PT PII

# Enabling **Partnership** and **Collaboration,** Managing Risk Through **Transparency**

Mewujudkan Kemitraan dan Kolaborasi, Mengelola Risiko Melalui Transparansi







2025 Annual Report
Laporan Tahunan

PT PII

# *Disclaimer* dan Lingkup Tanggung Jawab

## Disclaimer and Scope of Responsibility

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perseroan") tahun 2025 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan bukan perusahaan yang tercatat di bursa efek, Laporan Tahunan ini menggunakan standar *best practices* penyusunan laporan tahunan, yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikombinasikan dengan kriteria *Annual Report Award* (ARA) serta dengan merujuk pada ketentuan lain terkait penyusunan Laporan Tahunan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

The references and standards used in the 2025 Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund ("the Company") are using parameter and standard criteria that are applicable in Indonesia, where the Company operates. Despite not being listed in a stock exchange, the Company uses the best practice standards in preparing the Annual Report, as stated in the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Bond Issuers or Public Companies combined with the Annual Report Award (ARA) criteria and by referring to other provisions related to the preparation of the Annual Report applicable to the Company, including but not limited to the provisions regulated by the Ministry of Finance.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan, yang tergolong sebagai pernyataan prospektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait bisnis Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

The Annual Report contains various information on financial statement, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company that are classified into forward statements in the implementation of the applicable regulations. The statements are subject to risks of prospect and uncertainty, potentially resulting in difference from the actual development. Various prospective statements in the Annual Report is prepared based on assumptions of the current condition, and projection on the upcoming situation of the Company's business. The Company is unable to guarantee that the valid documents will bring the exact result.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan" atau "PT PII" yang mengacu pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selain itu, kata "Kami" terkadang diselipkan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan Perseroan. Laporan Tahunan mencantumkan identitas perusahaan secara jelas. Nama Perseroan dan tahun penerbitan Laporan Tahunan ditampilkan pada sampul muka, punggung buku, sampul belakang, serta pada setiap halaman laporan. Laporan Tahunan ini disusun dalam Bahasa Indonesia, dan juga dalam Bahasa Inggris, sehingga apabila terdapat perbedaan arti dari versi Bahasa Inggris maka yang berlaku dan menjadi rujukan utama adalah versi Bahasa Indonesia. Selain tersedia dalam bentuk *softcopy*, Laporan Tahunan juga dicetak dengan kualitas yang baik serta menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah di baca. Demi kemudahan, Laporan Tahunan ini dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan alamat www.ptpii.co.id.

The Annual Report contains the words "the Company" or "IIGF" that refer to Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. In addition, the word "We" is sometimes included in certain occasions with the similar function to refer the Company. The Annual Report clearly identifies the company. The company name and the year of publication of the Annual Report are displayed on the front cover, spine, back cover, and on each page of the report. This Annual Report is prepared in Indonesian and also in English; therefore, in the event of any discrepancy in meaning between the English version and the Indonesian version, the Indonesian version shall prevail and serve as the primary reference. In addition to being available in softcopy, the annual report is also printed in high-quality print using an easy-to-read font and size. For convenience, the Annual Report can be downloaded on the Company's website at www.ptpii.co.id.

# Enabling **Partnership** and **Collaboration**, Managing Risk Through **Transparency**

## Mewujudkan Kemitraan dan Kolaborasi, Mengelola Risiko Melalui Transparansi

Percepatan penyediaan infrastruktur membutuhkan dukungan sumber daya dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam ekosistem seperti ini, kepercayaan menjadi fondasi utama yang memungkinkan terciptanya investasi yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi pembangunan dan perekonomian nasional.

PT PII hadir sebagai penghubung terpercaya yang menjembatani kebutuhan Pemerintah terhadap skema pembiayaan kreatif dengan investasi dan partisipasi swasta melalui pengelolaan risiko yang transparan dan akuntabel.

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI penyedia instrumen penjaminan Pemerintah dan pendampingan proyek, PT PII memainkan peran strategis dalam memfasilitasi dua pelaku utama pembangunan, yaitu sektor publik sebagai penyedia layanan proyek infrastruktur dan sektor swasta sebagai pelaku investasi dengan keahlian yang relevan.

Sebagai *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan RI, PT PII berperan dalam menyediakan instrumen penjaminan pemerintah serta pendampingan proyek untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam menjalankan mandat tersebut, PT PII memfasilitasi kolaborasi antara Pemerintah sebagai penyedia layanan infrastruktur publik dan Badan Usaha / Swasta sebagai mitra investasi, guna memastikan proyek berjalan secara kredibel, *bankable*, dan berkelanjutan.

Komitmen terhadap transparansi menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas Perseroan. Keterbukaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel memastikan bahwa setiap proses bisnis dijalankan secara profesional dan berintegritas. Dengan perannya mendorong perolehan pembiayaan melalui pengelolaan risiko yang terukur dan transparan, PT PII berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem investasi infrastruktur nasional sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Accelerating infrastructure provision requires strong resource support and collaboration among the Government, the private sector, and various other stakeholders. In such an ecosystem, trust is the primary foundation enabling sustainable investment that has a broad impact on national development and the economy.

IIGF serves as a trusted liaison, bridging the government's need for creative financing schemes with private investment and participation through transparent and accountable risk management.

As a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, providing sovereign guarantee instruments and project assistance, IIGF plays a strategic role in facilitating two key development actors: the public sector as a service provider for infrastructure projects and the private sector as an investor with relevant expertise.

As a Special Mission Vehicle of the Indonesian Ministry of Finance, IIGF plays a role in providing sovereign guarantee instruments and project assistance to support infrastructure development. In carrying out this mandate, IIGF facilitates collaboration between the government as a public infrastructure service provider and private entities as investment partners, to ensure projects are credible, bankable, and sustainable.

This commitment to transparency is a key foundation in all of the Company's activities. Accurate, timely, and accountable information disclosure ensures that every business process is executed professionally and with integrity. With its role in facilitating financing acquisition through measurable and transparent risk management, IIGF contributes to strengthening trust in the national infrastructure investment ecosystem while supporting sustainable development and positively impacting Indonesia's economic growth.

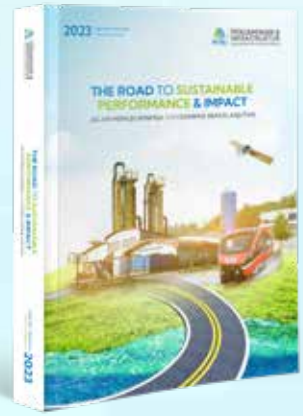


# Kesinambungan Tema
Theme Continuity

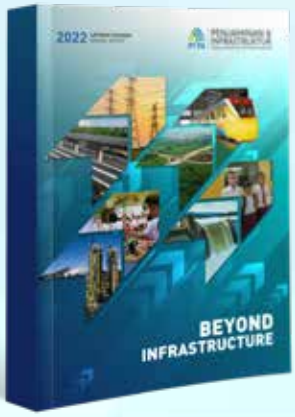
2024




2023




2022




2025




2021




2020




2019



# Daftar Isi
Table of Contents

## 3 Pendahuluan
Introduction


3 *Disclaimer* dan Lingkup Tanggung Jawab
Disclaimer and Scope of Responsibility

4 Tema dan Kesinambungan Tema
Theme and Continuity

7 Daftar Isi
Contents

10 Kinerja Unggul PT PII hingga 2025
IIGF's Strong Performance through 2025

12 Kinerja Operasional
Operational Performance

14 Kinerja Keuangan
Financial Performance

16 Ikhtisar Bisnis
Business Highlight

18 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Highlight

24 Ikhtisar Saham dan Aksi Korporasi
Share and Corporate Action Highlight

25 Informasi Tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya
Information of Bonds, Sukuk or Converted Bonds, As Well As Other Financing Information

26 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

27 Peristiwa Penting Tahun 2025
Significant Events in 2025


## 34 Laporan Manajemen
Management Report


36 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report

56 Laporan Direksi
Board of Directors' Report

79 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Statement of Accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2025 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)


## 80 Profil Perusahaan
Company Profile


82 Informasi Umum Perseroan
General Information of the Company

84 Identitas dan Makna Logo Perseroan
Corporate Logo Identity and Meaning

85 Riwayat Singkat Perseroan
Company's Brief History

90 Jejak Langkah
Milestones

100 Visi dan Misi Perseroan
Company Vision and Mission

102 Tata Nilai dan Budaya Perseroan
Corporate Value and Culture

103 Bidang Usaha dan Kegiatan Perseroan
Company's Business Sector and Activities

104 Produk dan Jasa Perseroan
Company's Products and Services

105 Jenis Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan
Sectors that Can be Guaranteed

106 Wilayah Operasional
Operational Areas

107 Keanggotaan Asosiasi
Membership in Association

108 Peta Sebaran Proyek
Project Distribution Map

110 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders

110 Informasi Pemegang Saham Utama Hingga Entitas Pemilik Akhir
Information on Main Shareholders to Ultimate Beneficial Owners

110 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

112 Struktur Organisasi
Organizational Structure

114 Informasi Perubahan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi
Information on the Changes in the Membership of the Board of Commissioners and Board of Directors

116 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

121 Profil Direksi
Board of Directors' Profile

124 Profil Deputi Direktur
Profile of Deputy Directors

126 Demografi Karyawan
Employee Demographics

128 Struktur Grup/Kelompok Usaha serta Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/*Special Purpose Vehicle*
Structure of the Group/ Business Group and Its Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures/ Special Purpose Vehicles

129 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perseroan
Supporting Institutions and/or Professions

130 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accounting Firm

130 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/ or Listing

131 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya
Chronology of Bond/Securities Issuance and/or Listing

131 Informasi Pada Situs *Website* Perseroan
Information on the Company's Website

134

## Aspek Pendukung Bisnis
Business Support Aspects

136 Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Human Resource Governance

153 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

162

## Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

164 Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industrial Overview

167 Kebijakan Strategis Tahun 2025
Strategic Policy in 2025

170 Pengembangan Usaha dan Aspek Pemasaran
Business Development and Marketing Aspect

177 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

278 Profitabilitas per Segmen
Profitability by Segment

282 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

282 Analisis Posisi Keuangan
Analysis of Statement of Financial Position

292 Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Analysis of Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

296 Analisis Arus Kas
Analysis of Statement of Cash Flows

300 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Debt Service Ability and Receivables Collectability Turnover

302 Struktur Modal
Capital Structure

304 Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure

304 Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Expenditure Realization

306 Prospek Usaha
Business Prospect

310 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026
Comparison of 2025 Target to Realization and 2026 Projection

313 Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi
Corporate Key Performance Index (KPI)

316 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

317 Aspek Perpajakan
Tax Aspect

318 Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
Information on Investment, Divestment, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring

319 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/orwith Affiliates/ Related Parties

324 Informasi Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring after the Accountant's Report Date

324 Realisasi Dana Penawaran Umum
Utilization of Public Offering Proceeds

325 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Unusual Events

325 Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Amendments to Laws and Regulations and the Impacts on the Company

326 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

328

## Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

330 Penerapan Tata Kelola PT PII
Implementation of Governance at IIGF

341 Penilaian dan Evaluasi Kepatuhan Penerapan Tata Kelola Perseroan
Assessment and Evaluation of Compliance with the Implementation of Good Corporate Governance

351 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

360 Direksi
Board of Directors

377 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

399 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di Bawah Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors and Committees Reporting to the Board of Commissioners

410 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

416 Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Serta Kepemilikan MSOP dan ESOP
Performance-Based Long-Term Compensation and MSOP/ESOP Ownership

416 Informasi Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

418 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

419 Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Reporting to the Board of Commissioners

419 Komite Audit
Audit Committee

436 Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

450 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

456 Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris
Other Committees Reporting to the Board of Commissioners

456 Komite di Bawah Direksi
Committee Reporting to the Board of Directors

456 Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

460 Komite Lain di Bawah Direksi
Other Committees Reporting to the Board of Directors

460 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

465 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

470 Audit Internal
Internal Audit

478 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

485 Manajemen Risiko
Risk Management

502 Audit Eksternal/Akuntan Publik
External Audit/Public Accountant

505 Informasi Perkara Penting Perseroan
Information on Significant Cases of the Company

506 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

514 Kode Etik Perseroan
Code of Conduct

518 Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Anti-Corruption and Gratification Control Policy

525 Kebijakan *Insider Trading*
Insider Trading Policy

526 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

529 Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditur
Creditor Rights Protection Policy

530

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR)

532 Komitmen Perseroan Dalam Penerapan Program Keberlanjutan
Company's Commitment to Implement Sustainability Program

534 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2025
Sustainable Performance Highlights in 2025

536 Strategi Penerapan Program TJSL
CSR Program Implementation Strategy

538 Kontribusi Perseroan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Company's Contribution to the Sustainable Development Goals

542 Kinerja Aspek Ekonomi
Economic Aspect Performance

544 Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

550 Kinerja Sosial
Social Performance

576

## Laporan Keuangan
Financial Statements

578 Laporan Keuangan *Audited*
Audited Financial Statements

# Kinerja Unggul PT PII hingga 2025

IIGF's Strong Performance through 2025

## Capaian Dukungan Infrastruktur dan Layanan PT PII dalam mendukung Kinerja Pemerintah Indonesia

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT PII terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui penjaminan pemerintah. Hingga 31 Desember 2025, PT PII mencatatkan kinerja unggul secara kumulatif sejak berdiri melalui dukungan pada proyek infrastruktur strategis di sektor transportasi, ketenagalistrikan, air minum, dan telekomunikasi, yang mendorong peningkatan skala dan kualitas infrastruktur serta memberikan dampak nyata bagi layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### JALAN TOL & NON-TOL
TOLL AND NON-TOLL ROADS

**17**
**Ruas Jalan Tol**
**Total panjang 1.033,14 km**
Toll Road Sections
Total length 1,033.14 km

**123 km**
**Preservasi Jalan Nasional untuk 3 ruas jalan**
National Road Preservation for 3 road sections

**39**
**Jembatan Callender Hamilton dan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I)**
Callender Hamilton Bridge and Panorama Flyover I (Sitinjau Lauik I)

### FASILITAS JALAN
ROAD FACILITIES

**20.374**
**Titik Lampu** Lighting Point

**844,1 km**
**Panjang Jalan** Length of the road

### SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM (SPAM)

**6**
**Proyek SPAM**
SPAM Projects

**15.850**
**liter/detik** liters/second
**Total debit produksi air**
Total water production flow rate

**1.432.600**
**Sambungan Rumah (SR)**
**Kapasitas untuk melayani jumlah rumah tangga**
Household Connections (SR)
Capacity to serve the number of households

### TELEKOMUNIKASI
TELECOMMUNICATION

**12.158 km**
**Kabel Serat Optik Lintas Pulau**
of Cross-Island Fiber Optic Cable

**150 Gbps**
**Melayani 14.546 titik melalui Satelit Satria-1 dan 11 stasiun bumi**
Serving 14,546 points via the Satria-1 Satellite and 11 earth stations

# IIGF's Achievements in Infrastructure and Service Support to Support the Performance of the Indonesian Government

As a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, IIGF continues to strengthen its role in supporting national infrastructure development through sovereign guarantees. As of December 31, 2025, IIGF has delivered strong cumulative performance since its establishment by supporting strategic infrastructure projects across the transportation, electricity, water supply, and telecommunications sectors, contributing to the expansion and improvement of infrastructure quality while delivering tangible impacts on public services and sustainable development in Indonesia.

## KETENAGALISTRIKAN
ELECTRICITY

**3.334 MW**

**Total kapasitas produksi energi listrik**
Total electricity production capacity

**1.294 MW**

**Total Dukungan peningkatan rasio bauran energi terbarukan *(hydropower, solar, wind, and geothermal)***
Total support for increasing the renewable energy mix (hydropower, solar, wind, and geothermal)

**42.917 km**

**Total dukungan rehabilitasi dan perluasan jaringan distribusi listrik tegangan menengah**
Total support for the rehabilitation and expansion of medium-voltage electricity distribution network

**BUMN Terjamin memperoleh pinjaman dengan tenor dan bunga setara *sovereign***
SOE is guaranteed to obtain loans with terms and interest rates equivalent to sovereign loans

## TRANSPORTASI
TRANSPORTATION

**142 km**

**Pelayanan rute kereta api Makassar – Pare-pare (Tahap I Jalur KA Trans-Sulawesi)**
Train route service
Makassar – Pare-pare (Phase I of Trans-Sulawesi Railway Line)

**Fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor**
Testing Facilities for Motor Vehicle Type

**Peningkatan Fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor proyek *Proving Ground* Bekasi dengan 16 jenis pengujian sesuai ASEAN MRA (UN) untuk menurunkan emisi dan meningkatkan ekspor**
Improvement of Testing Facilities for Motor Vehicle Type for Bekasi Proving Ground Project with 16 types of testing in accordance with ASEAN MRA (UN) standards to reduce emissions and increase exports

## CADANGAN PANGAN & INDUSTRI STRATEGIS PEMERINTAH
FOOD RESERVES AND GOVERNMENT STRATEGIC INDUSTRIES

**8.000**

**Metrik Ton Gula**
Metric Tons of Sugar

**257**

**Ribu Kilo Liter Minyak Goreng**
Thousand Kilos of Cooking Oil

**Pengadaan 13 radar GCI, perawatan meriam, dan *refurbishment* KRI untuk meningkatkan pengawasan udara, kesiapan alutsista darat, serta keandalan pertahanan laut, sekaligus memperkuat industri dan sistem pertahanan negara.**
Procurement of 13 GCI radars, artillery maintenance, and refurbishment of Indonesian Navy vessels (KRI) to enhance airspace surveillance, land defense readiness, and the reliability of naval defense, while also strengthening the defense industry and national defense system

# Kinerja Operasional
## Operational Performance

Kinerja operasional PT PII pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang solid, tercermin dari peningkatan jumlah dan nilai proyek serta eksposur penjaminan yang dikelola. Perseroan juga menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian melalui pengelolaan risiko yang optimal, *gearing ratio* dan *leveraging* yang terjaga, serta penerapan tata kelola yang baik, sehingga mendukung kinerja yang sehat dan berkelanjutan.

### PENJAMINAN BARU SELAMA 2025
NEW GUARANTEE IN 2025

**6**

**Proyek** Projects

**Penjaminan KPBU (2)**
**dan Non KPBU (4)**
PPP Guarantees (2)
and Non-PPP Guarantees (4)

### NILAI INVESTASI/ PROYEK SELAMA 2025
INVESMENT/ PROJECT VALUE IN 2025

**Rp154**

**Triliun** Trillion

### NILAI PENJAMINAN SELAMA 2025
GUARANTEE VALUE IN 2025

**Rp11,5**

**Triliun** Trillion

### AKUMULASI JUMLAH PROYEK
ACCUMULATED NUMBER OF PROJECTS

**60**

**Proyek** Projects

**Penjaminan KPBU (37)**
**Non KPBU (15)**
**BUMN PEN (8)**
PPP Guarantees (37)
Non-PPP Guarantees (15)
PEN SOE (8)

### TOTAL NILAI INVESTASI
TOTAL INVESTMENT VALUE

**Rp705**

**Triliun** Trillion

**323 Triliun** KPBU
**382 Triliun** NON KPBU
323 Trillion PPP
382 Trillion NON-PPP

### TOTAL NILAI PENJAMINAN
TOTAL GUARANTEE VALUE

**Rp109**

**Triliun** Trillion

Penjaminan Infrastruktur (KPBU & Non KPBU) **Rp104 Triliun**;
**BUMN PEN Rp5 Triliun**
Infrastructure Guarantees (PPP & Non-PPP) Rp104 Trillion;
PEN SOE Rp5 Trillion

IIGF's operational performance in 2025 showed solid growth, as reflected in the increase in the number and value of projects and managed guarantee exposure. The Company also maintained a balance between expansion and prudence through optimal risk management, maintained gearing and leveraging ratios, and good corporate governance practices, and thus, supporting healthy and sustainable performance.

## *GEARING RATIO*

**6,6x**

**(MAX 12x)**

**Nilai Penjaminan Rp104,2 Triliun**
**(Tidak termasuk BUMN PEN)**
Guarantee Value: Rp104.2 Trillion
(Excluding PEN SOE)

## *RISK MATURITY INDEX*

**4,08**

**Dari Skala 5,00**
From 5.00 Scale

## *GCG SCORE*

**91,017**

Kriteria **"Sangat Baik"**
**"Very Good"** Criteria

## *LEVERAGING*

**70,5x**

**Triliun** Trillion

**PMN Infra Rp9.085 Miliar**
**Nilai Proyek Aktif Rp640,4 Triliun**
PMN Infra Rp9,085 Billion
Active Project Value: Rp640.4 Trillion

## *ESG RATING*

**Medium Risk**

Target **Medium**

## IKU KORPORASI
CORPORATE KPI

**103,02%**

# Kinerja Keuangan
## Financial Performance

Kinerja keuangan PT PII pada tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika pergantian pemerintahan, perubahan fokus dan kebijakan pemerintahan baru, serta kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan. Di tengah tantangan-tantangan tersebut, Perseroan dapat mempertahankan pendapatan dan efisiensi biaya operasional sehingga profitabilitas dapat tetap terjaga. Dengan total aset yang terus berkembang serta pengelolaan liabilitas yang *prudent*, PT PII mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus memperkuat perannya sebagai *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

### Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

**Rp895,98**
Miliar Billion

### Total Pendapatan
Total Revenue

**Rp1.478,20**
Miliar Billion

### Total Aset
Total Assets

**Rp17.716,79**
Miliar Billion

### Ekuitas
Equity

**Rp17.485,43**
Miliar Billion

IIGF's financial performance in 2025 remained resilient amid the transition of government leadership, shifts in policy priorities under the new administration, and pressures in the global economy. Despite these challenges, the Company was able to maintain its revenue and operational cost efficiency, thereby preserving its profitability. With continuously growing total assets and prudent liability management, IIGF is able to create added value for shareholders while strengthening its role as the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle in supporting national infrastructure development.

## Liabilitas
Liabilities

**Rp231,36**
**Miliar** Billion

## Dividen
Dividends

**Rp186,18**
**Miliar** Billion

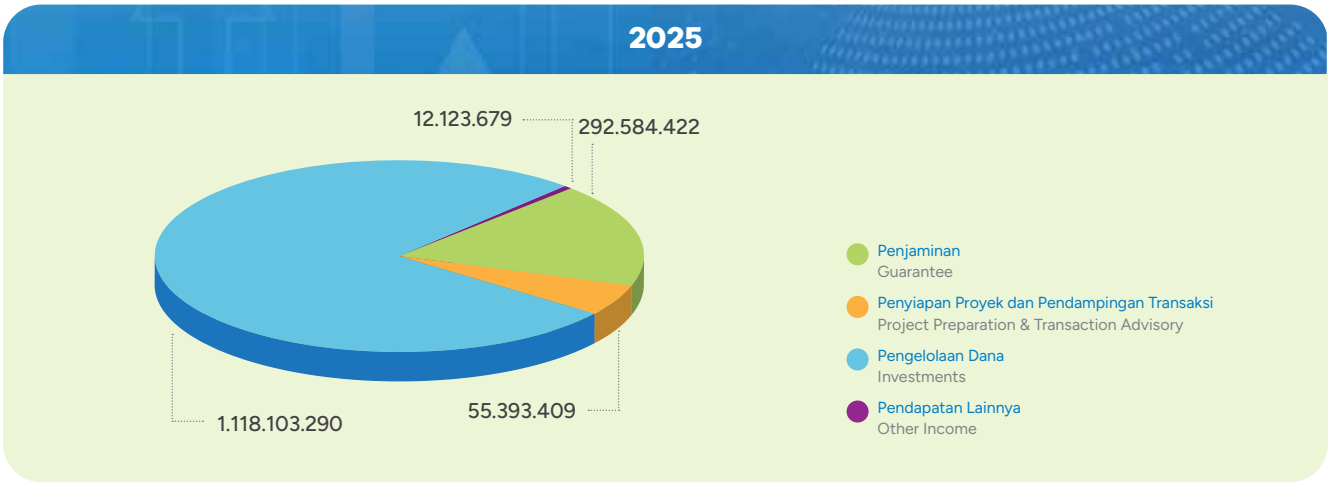
Dividen Tahun Buku 2024 yang dibayarkan pada Tahun 2025
Dividends for Fiscal Year 2024 to be paid in 2025

# Ikhtisar Bisnis
## Business Highlights

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand of Rupiah)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjaminan Guarantee | **292.584.422** | 310.054.107 | 232.353.547 | 252.573.833 | 156.529.213 |
| Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Preparation and Transaction Advisory | **55.393.409** | 70.265.155 | 70.529.576 | 41.098.924 | 29.171.852 |
| Pengelolaan Dana Investment | **1.118.103.290** | 1.091.915.052 | 1.009.080.358 | 793.702.056 | 735.871.054 |
| Pendapatan Lainnya Other Income | **12.123.679** | 14.696.272 | 6.042.076 | 1.477.498 | 935.260 |
| **Jumlah Pendapatan** Total Revenues | **1.478.204.800** | **1.486.930.586** | **1.318.005.557** | **1.088.852.311** | **922.507.379** |

**Grafik Komposisi Pendapatan (Rp ribu)**
Graph: Revenue Composition (Rp thousand)



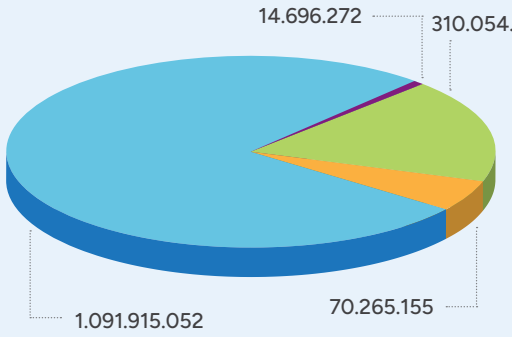

Selama periode 2021–2025, Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan sejalan dengan penguatan peran Perusahaan sebagai instrumen fiskal Pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Total pendapatan meningkat signifikan dari Rp922,5 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,48 triliun pada tahun 2025, mencerminkan perluasan kegiatan usaha serta optimalisasi mandat yang diberikan.

Kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan yang *solid* dari pendapatan mandat utama yaitu pendapatan penjaminan (baik KPBU dan Non KPBU) dan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping itu, pendapatan pengelolaan dana yang terus meningkat menunjukkan strategi pengelolaan dana yang efektif dalam mengelola likuiditas dan mengoptimalkan imbal hasil dana.

During the 2021–2025 period, the Company recorded sustained revenue growth in line with its strengthening role as a government fiscal instrument in supporting accelerated infrastructure development. Total revenue increased significantly from Rp922.5 billion in 2021 to Rp1.48 trillion in 2025, reflecting the expansion of business activities and optimization of assigned mandates.

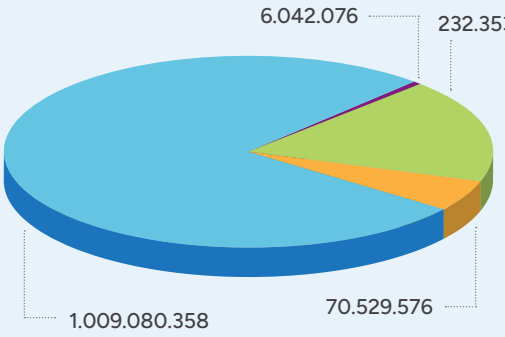
This performance was driven by solid growth in core mandate revenue, namely guarantee revenue (both PPP and non-PPP) and project preparation and transaction assistance, although there was a slight decline in 2025 compared to that of the previous year. Furthermore, the continued increase in fund management revenue demonstrates an effective fund management strategy in managing liquidity and optimizing fund returns.

## 2024



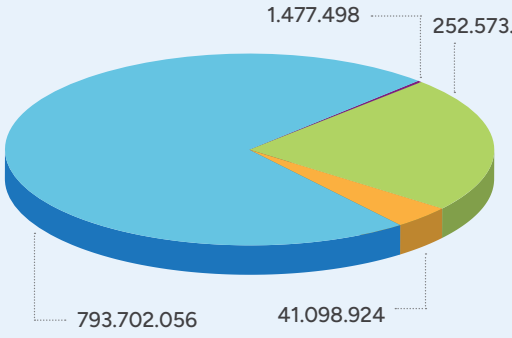

- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

## 2023



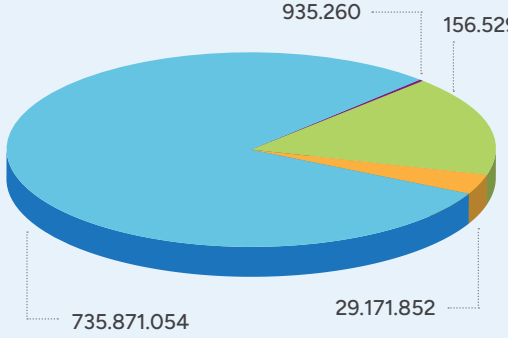

- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

## 2022




- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

## 2021




- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

# Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Data Highlight

## Laporan Posisi Keuangan

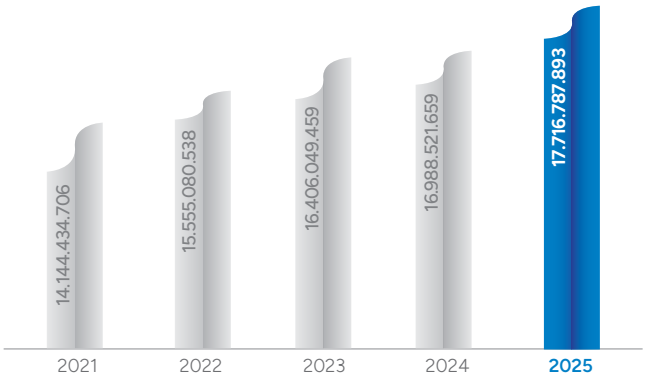
Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand of Rupiah)

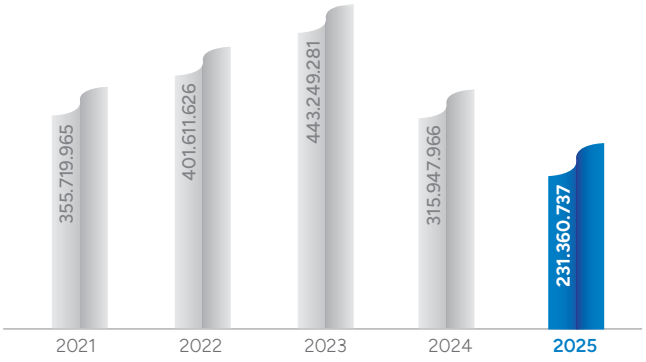
| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aset** Assets | | | | | |
| Kas dan Setara Kas<br>Cash and Cash Equivalents | **7.286.275.750** | 2.030.081.757 | 121.487.653 | 134.306.368 | 5.893.947.654 |
| Investasi<br>Investments | **9.884.203.091** | 14.423.560.381 | 15.793.648.683 | 15.008.163.837 | 7.948.301.268 |
| Piutang Usaha<br>Account Receivables | **475.276.683** | 402.385.200 | 327.574.789 | 294.720.460 | 169.217.041 |
| Piutang Lainnya<br>Other Receivables | **10.467.439** | 11.935.434 | 11.444.354 | 9.884.584 | 10.735.297 |
| Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka<br>Prepaid Expenses and Advances | **1.504.824** | 1.099.038 | 3.106.223 | 2.824.837 | 6.734.223 |
| Aset Tetap<br>Fixed Assets | **10.427.124** | 9.619.207 | 13.550.832 | 4.895.573 | 8.140.743 |
| Aset Hak Guna<br>Right-of-Use Assets | **11.446.272** | 28.615.680 | 45.313.785 | 12.573.130 | 31.432.826 |
| Aset Takberwujud<br>Intangible Assets | **4.743.816** | 4.923.545 | 4.287.126 | 5.469.731 | 3.242.322 |
| Beban Tangguhan<br>Deferred Expenses | **3.928.446** | 2.837.247 | 4.333.808 | 5.663.392 | 7.570.928 |
| Pajak Dibayar Dimuka<br>Prepaid Income Tax | **9.148.525** | 9.169.276 | 5.030.281 | 2.015.255 | 1.612.945 |
| Aset Pajak Tangguhan<br>Deferred Tax Asset | **13.875.508** | 58.909.855 | 70.902.886 | 69.194.332 | 58.130.420 |
| Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan<br>Refundable Deposits | **5.490.415** | 5.385.039 | 5.369.039 | 5.369.039 | 5.369.039 |
| **Jumlah Aset**<br>**Total Assets** | **17.716.787.893** | **16.988.521.659** | **16.406.049.459** | **15.555.080.538** | **14.144.434.706** |
| **Liabilitas** Liabilities | | | | | |
| Utang Usaha<br>Account Payables | **14.002.393** | 6.731.077 | 14.044.779 | 9.993.160 | 7.372.764 |
| Utang Pajak Taxes Payable | **2.843.815** | 1.531.600 | 3.845.808 | 3.779.948 | 4.421.469 |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain<br>Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables | **76.416.987** | 117.924.523 | 162.668.910 | 135.669.181 | 65.281.828 |
| Pendapatan Tangguhan<br>Unearned Income | **32.869.530** | 71.794.931 | 130.836.305 | 169.931.976 | 171.117.254 |
| Liabilitas Sewa Pembiayaan<br>Finance Lease Liabilities | **13.244.378** | 31.198.399 | 46.200.522 | 8.545.628 | 33.504.325 |
| Pinjaman Penerusan<br>Two-Step Loans | **52.701.112** | 54.586.445 | 55.126.686 | 55.126.686 | 55.126.686 |
| Liabilitas Imbalan Kerja<br>Employee Benefits Obligation | **39.282.522** | 32.180.991 | 30.526.271 | 18.565.047 | 18.895.639 |
| **Jumlah Liabilitas**<br>**Total Liabilities** | **231.360.737** | **315.947.966** | **443.249.281** | **401.611.626** | **355.719.965** |

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ekuitas** Equity | | | | | |
| Modal Saham<br>Share Capital | **10.655.000.000** | 10.655.000.000 | 10.655.000.000 | 10.655.000.000 | 9.570.000.000 |
| Laba Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan<br>Unrealised Gain rom Financial Assets | **189.024.480** | 85.062.184 | 142.007.600 | 20.604.578 | 300.351.343 |
| Keuntungan Aktuarial, Setelah Pajak<br>Gain from Actuarial, Net of Tax | **2.936.422** | 3.852.899 | 848.646 | 5.906.831 | 4.228.982 |
| Saldo Laba: Retained Earnings: | | | | | |
| Ditentukan Penggunaannya<br>Appropriated | **352.814.126** | 306.270.126 | 264.478.126 | 228.769.445 | 197.499.338 |
| Belum Ditentukan Penggunaannya<br>Unappropriated | **6.285.652.128** | 5.622.388.484 | 4.900.465.806 | 4.243.188.058 | 3.716.635.078 |
| **Jumlah Ekuitas**<br>Total Equity | **17.485.427.156** | **16.672.573.693** | **15.962.800.178** | **15.153.468.912** | **13.788.714.741** |
| **Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**<br>Total Liabilities and Equity | **17.716.787.893** | **16.988.521.659** | **16.406.049.459** | **15.555.080.538** | **14.144.434.706** |

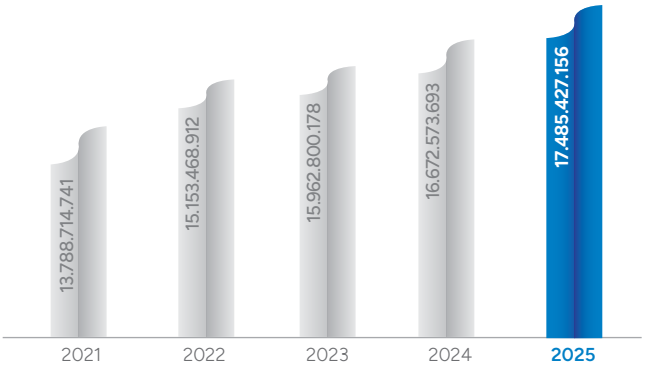
**Grafik Aset (Rp ribu)**
Graph: Assets (Rp thousand)




**Grafik Liabilitas (Rp ribu)**
Graph: Liabilities (Rp thousand)




**Grafik Ekuitas (Rp ribu)**
Graph: Equity (Rp thousand)



## Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

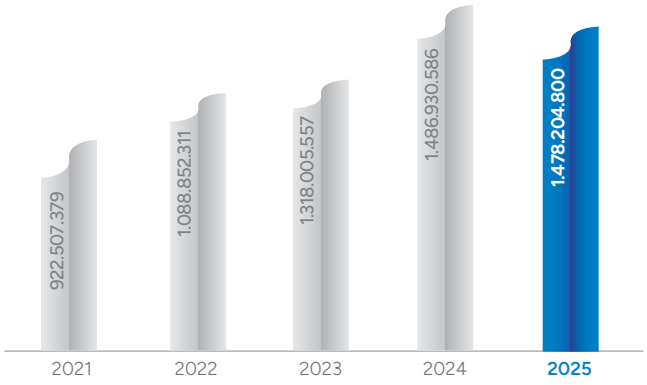
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand of Rupiah)

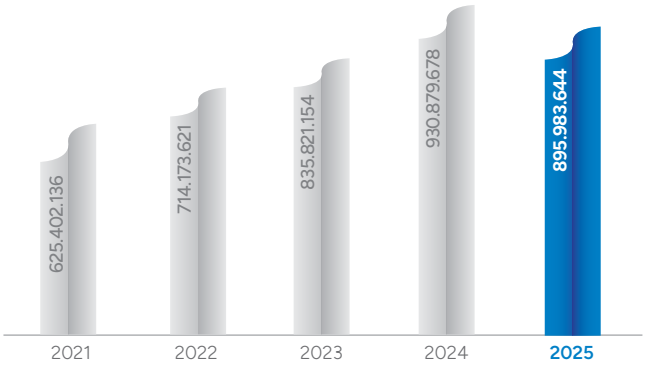
| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan<br>Revenues | **1.478.204.800** | 1.486.930.586 | 1.318.005.557 | 1.088.852.311 | 922.507.379 |
| Beban Usaha<br>Operating Expenses | **(536.928.315)** | (544.905.230) | (482.466.290) | (386.215.841) | (333.940.665) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan<br>Profit Before Income Tax | **941.276.485** | 942.025.356 | 835.539.267 | 702.636.470 | 588.566.714 |
| (Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan<br>(Expense)/Income Tax Benefit | **(45.292.841)** | (11.145.678) | 281.887 | 11.537.151 | 36.835.422 |
| **Laba Tahun Berjalan**<br>**Profit for the Year** | **895.983.644** | **930.879.678** | **835.821.154** | **714.173.621** | **625.402.136** |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:<br>Profit for the Year Attributable to: | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk<br>Owners of the Parent Entity | - | - | - | - | - |
| Kepentingan Non-Pengendali<br>Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - |
| Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan<br>Other Comprehensive Income/(Expense)/ for the Year | **103.045.819** | (53.941.163) | 116.344.837 | (278.068.916) | 6.048.427 |
| **Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan**<br>**Total Comprehensive Income for the Year** | **999.029.463** | **876.938.515** | **952.165.991** | **436.104.705** | **631.450.563** |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:<br>Total Comprehensive Income for the Year Attributable to: | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk<br>Owners of the Parent Entity | - | - | - | - | - |
| Kepentingan Non-Pengendali<br>Non-Controlling Interests | - | - | - | - | - |
| **Laba Bersih per Saham**<br>**Net Earnings per Share** | **84.090** | **87.366** | **78.444** | **67.027** | **65.350** |

*) Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah lembar saham.
Earnings per share is calculated by dividing profit for the year by the number of shares.

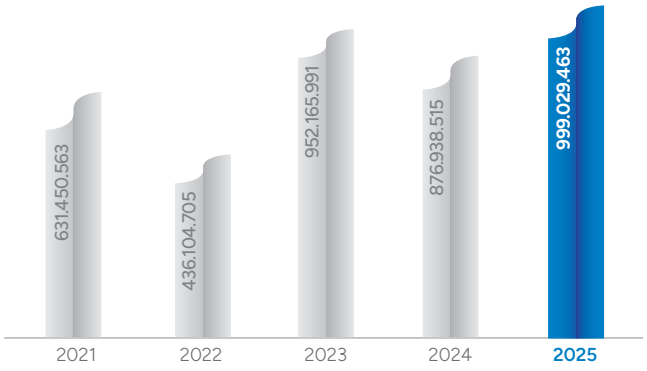
### Grafik Pendapatan (Rp ribu)
Graph: Revenues (Rp thousand)



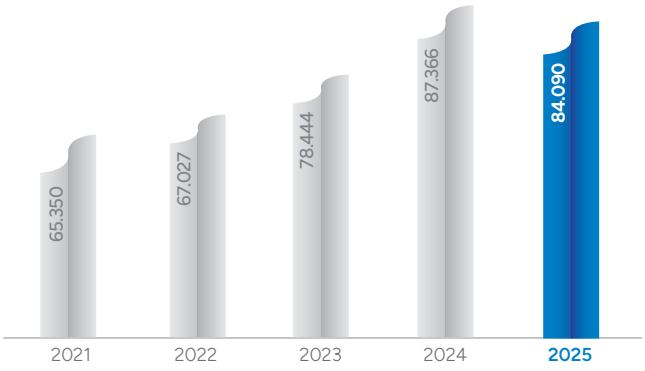

### Grafik Laba Tahun Berjalan (Rp ribu)
Graph: Profit for the Year (Rp thousand)




### Grafik Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rp ribu)
Graph: Total Comprehensive Income for the Year (Rp thousand)




### Grafik Laba Per Saham (Rp ribu)
Graph: Net Earnings per Share (Rp thousand)

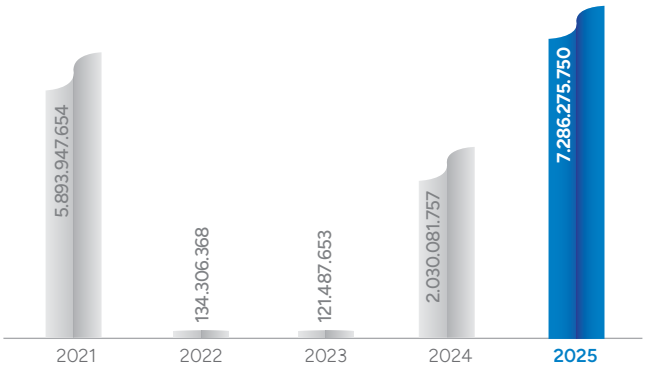



## Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand of Rupiah)

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi<br>Cash Flows from Operating Activities | **801.064.201** | 784.137.118 | 821.986.457 | 684.035.254 | 788.708.517 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi<br>Cash Flows from Investing Activities | **4.662.869.649** | 1.310.773.086 | (676.862.832) | (7.344.891.496) | 429.421.940 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan<br>Cash Flows from Financing Activities | **(207.739.857)** | (186.316.100) | (157.942.340) | 901.214.956 | (208.075.776) |
| Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas<br>Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents | **5.256.193.993** | 1.908.594.104 | (12.818.715) | (5.759.641.286) | 1.010.054.681 |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun<br>Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year | **2.030.081.757** | 121.487.653 | 134.306.368 | 5.893.947.654 | 4.883.892.973 |
| **Kas dan Setara Kas Akhir Tahun**<br>Cash and Cash Equivalents at End of Year | **7.286.275.750** | **2.030.081.757** | **121.487.653** | **134.306.368** | **5.893.947.654** |

### Grafik Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Rp ribu)
Graph: Cash and Cash Equivalents at End of Year (Rp thousand)



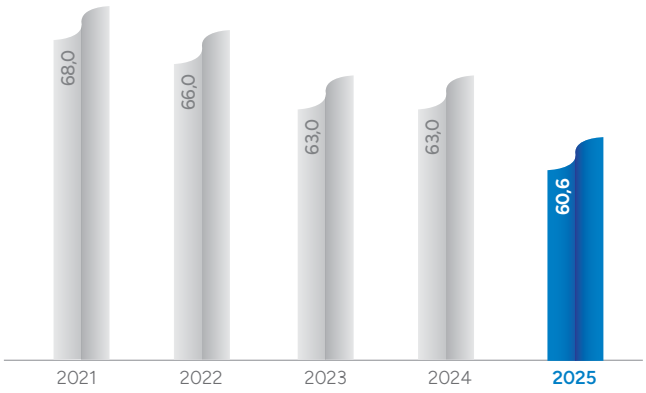

## Rasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

(dalam %) (in %)

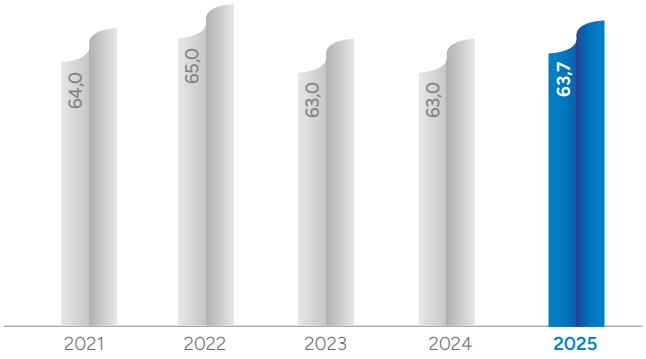
| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio Profitabilitas** Profitability Ratio | | | | | |
| Rasio Imbal Hasil Aset<br>Return on Assets (ROA) | **5,1** | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
| Rasio Imbal Hasil Ekuitas<br>Return on Equity (ROE) | **5,1** | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 4,6 |
| Margin Laba Operasi<br>Operating Profit Margin | **63,7** | 63,0 | 63,0 | 65,0 | 64,0 |
| Margin Laba Bersih<br>Net Profit Margin | **60,6** | 63,0 | 63,0 | 66,0 | 68,0 |
| Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)<br>Operating Expenses to Operating Income (BOPO) | **34,1** | 34,2 | 37,0 | 36,0 | 37,0 |
| **Rasio Likuiditas** Liquidity Ratio | | | | | |
| Rasio Kas<br>Cash Ratio | **18.441** | 13.039 | 8.814 | 10.133 | 17.959 |
| Rasio Lancar<br>Current Ratio | **15.859** | 11.096 | 7.414 | 8.582 | 17.890 |
| **Rasio Solvabilitas** Solvency Ratio | | | | | |
| Rasio Liabilitas terhadap Aset<br>Liabilities on Assets Ratio | **1,3** | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas<br>Liabilities on Equity Ratio | **1,3** | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| **Pertumbuhan** Growth | | | | | |
| Pendapatan<br>Revenues | **(0,6)** | 12,8 | 21,1 | 18,0 | (7,6) |
| Beban Usaha<br>Operating Expenses | **(1,5)** | 12,9 | 24,9 | 15,7 | (11,3) |

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laba Tahun Berjalan<br>Profit for the Year | (3,7) | 11,4 | 17,0 | 14,2 | 0,8 |
| Aset<br>Assets | 4,3 | 3,6 | 5,5 | 10,0 | 4,4 |
| Liabilitas<br>Liabilities | (26,8) | (28,7) | 10,4 | 12,9 | 74,4 |
| Ekuitas<br>Equity | 4,9 | 4,4 | 5,3 | 9,9 | 3,3 |

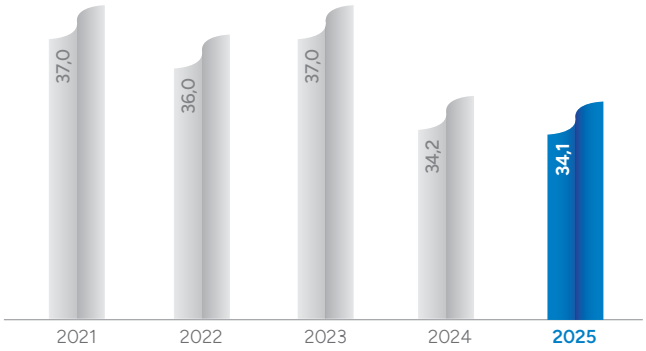
### Grafik Margin Laba Bersih (%)
Graph: Net Profit Margin (%)



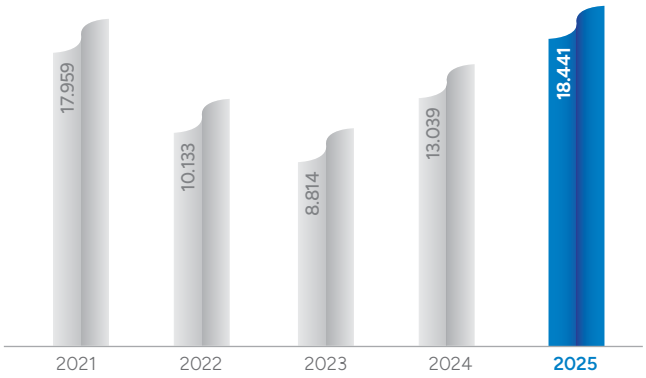

### Grafik Margin Laba Operasi (%)
Graph: Operating Profit Margin (%)



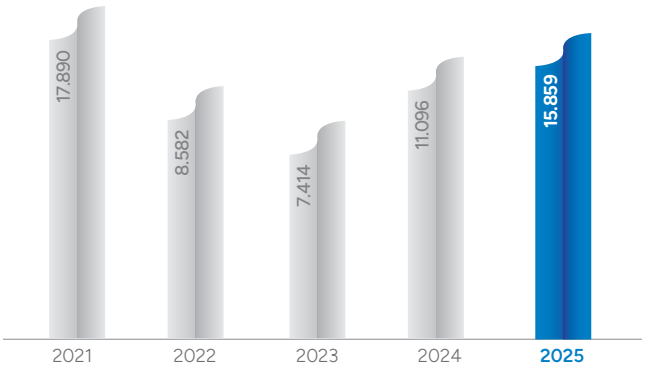

### Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)
Graph: Operating Expenses to Operating Income (BOPO) (%)




### Grafik Rasio Kas (%)
Graph: Cash Ratio (%)



**Grafik Rasio Lancar (%)**
Graph: Current Ratio (%)




# Ikhtisar Saham dan Aksi Korporasi

## Stock And Corporate Action Highlights

Jumlah saham Perseroan sebanyak 10.655.000 lembar saham, dengan kepemilikan seluruhnya atau 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga akhir tahun 2025 Perseroan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan saham Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga tidak menyajikan informasi terkait pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham.

The Company has a total of 10,655,000 shares, with 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia. Until the end of 2025, the Company did not list its shares on any stock exchange either in Indonesia or abroad. Accordingly, the Company does not present information related to the number of outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume of the Company's shares.

In addition, the Company also does not present information related to stock split, reverse stock split, share dividend, bonus shares, decrease in par value of shares, suspension, and delisting.

# Informasi Tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya

## Information of Bonds, Sukuk or Converted Bonds, As Well As Other Financing Information

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah.

Until the end of 2025, the Company did not issue any bonds/sukuk/converted bonds. Accordingly, the Company does not present information related to the number of outstanding bonds/sukuk/converted bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings. In addition, the Company also does not have other funding such as Medium Term Notes.



# Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications




## Penghargaan
Awards

| No | Tanggal<br>Date | Acara/Kegiatan<br>Event/Activity | Penghargaan<br>Award | Penyelenggara<br>Organizer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Februari 2025<br>26 February 2025 | PR Indonesia *Award* 2025 | *Bronze Winner* Laporan Tahunan sub kategori *Sustainability Report*<br>Bronze Winner Annual Report subcategory Sustainability Report | PR Indonesia |
| 2 | 9 April 2025<br>9 April 2025 | *The Best Corporate Transparency & Emission Reduction Award 2025* | *The Best Corporate Transparency & Emission Reduction Award 2025* | Investortrust.id |
| 3 | 2 Juli 2025<br>2 July 2025 | *The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Award 2025* | *PPP Agency of the Year* | The Asset |
| 4 | 31 Juli 2025<br>31 July 2025 | Investortrust BUMN *Award* 2025 | *Excellence in Public-Private Partnership Guarantees* | Investortrust.id |
| 5 | 16 September 2025<br>16 September 2025 | ENSIA *Award* 2025 | *Silver Champion* kategori Inovasi Sosial Silver Champion in the Social Innovation category | SUCOFINDO |
| 6 | 30 September 2025<br>30 September 2025 | Bisnis Indonesia CSR *Awards* 2025 | *Gold Champion* | Bisnis Indonesia |
| 7 | 16 Oktober 2025<br>16 October 2025 | *Information Transparency Award 2025* | Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik III<br>Best Public Agency for Information Provider III | Komisi Informasi Pusat |
| 8 | 28 November 2025<br>28 November 2025 | *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) | Peringkat *Gold*<br>Gold rating | National Center for Corporate Reporting |

## Sertifikasi
Certifications

| No | Nama Sertifikat<br>Certificate | Pemberi Sertifikasi<br>Certifying Institution | Masa Berlaku Sertifikasi<br>Certificate Validity |
|---|---|---|---|
| 7 | **ISO 37001:2016**<br>Sistem Manajemen Anti Penyuapan<br>Anti-Bribery Management System | PT Chesna dan Komite Akreditasi Nasional<br>PT Chesna and the National Accreditation Committee | 30 Maret 2025 - 29 Maret 2028<br>30 March 2025 - 29 March 2028 |

# Peristiwa Penting Tahun 2025

## Significant Events in 2025

**22 Januari / January**



Pelaksanaan *Market Sounding* Proyek SPAM Kabupaten Karo yang diselenggarakan oleh PT PII bersama Perumdam Tirta Malem dalam rangka mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di kantor PT PII, Jakarta Selatan.

Market Sounding for Karo Regency SPAM Project organized by IIGF with Perumdam Tirta Malem in order to encourage private sector participation in providing infrastructure under the Public-Private Partnership (KPBU) scheme at IIGF office, South Jakarta.

**5 Februari / February**



PT PII melaksanakan audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Marga dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum membahas rencana kerjasama dan kolaborasi strategis pada tahun 2025.

IIGF held an audience with the Director General of Highways and the Director General of Infrastructure Financing of the Ministry of Public Works to discuss plans for strategic cooperation and collaboration in 2025.

**24-25 Februari / February**




Pelaksanaan *Market Sounding* KPBU Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Otorita IKN di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum.

Market Sounding for Indonesian Capital City (IKN) KPBU Project with IKN Authority at the Auditorium of Ministry of Public Works.

**26 Februari / February**




Diskusi publik inovasi investasi infrastruktur berkelanjutan dalam In-*Person Market Event Infrastructure Asia*, yang berjudul "*Unlocking Sustainable Infrastructure Financing with Innovative Credit Guarantee Solution*".

Public discussion on sustainable infrastructure investment innovation at In-Person Market Event Infrastructure Asia, entitled "Unlocking Sustainable Infrastructure Financing with Innovative Credit Guarantee Solution".

**27 Februari / February**



Pelaksanaan *Agenda Setting* dan Rapat Kolaborasi Konten SMV/BLU bersama Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Agenda Setting and SMV/BLU Content Collaboration Meeting with the Ministry of Finance's Communication and Information Services Bureau.

**13 Maret / March**



Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, menetapkan kembali Sdr. Andre Permana sebagai anggota Direksi PT PII untuk masa jabatan 2025-2030 berdasarkan KMK No. 55 Tahun 2025.

The Minister of Finance as Shareholder, represented by the Director General of State Assets, reappointed Mr. Andre Permana as a member of the Board of Directors of IIGF for the 2025-2030 term based on KMK No. 55 of 2025.

**21 Maret / March**




Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek KPBU Proyek *Flyover* Panorama I (Sitinjau-Lauik I) Sumatera Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum.

Signing of KPBU Project Guarantee Agreement for Panorama I Flyover Project (Sitinjau-Lauik I) West Sumatra with the Ministry of Public Works at the Auditorium of Ministry of Public Works.

**24-26 Maret / March**



Pelaksanaan Rangkaian *Employee Volunteer Program* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Ramadan PT PII yang diikuti Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan PT PII bersama sukarelawan #IIGFans di Yayasan Sayap Ibu Bintaro.

Employee Volunteer Series of IIGF's Ramadan Social and Environmental Responsibility (CSR) Programs, attended by the Business Director and Finance Director of IIGF along with #IIGFans volunteers at Sayap Ibu Bintaro Foundation.

**9 April / April**



Dalam rangka peringatan HUT Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan ke-37, PT PII turut serta dalam kegiatan TJSL penanaman pohon pada rangkaian HUT BPLJSKB di *Proving Ground* BPLJSKB, Kabupaten Bekasi.

In commemoration of the 37th anniversary of the Ministry of Transportation's Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification Center (BPLJSKB), IIGF participated in CSR tree planting activity in a series of BPLJSKB anniversary events at BPLJSKB Proving Ground, Bekasi Regency.

**25 April / April**



Penyerahan sertifikat hasil audit Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan status tidak terdapat temuan mayor maupun minor oleh CHESNA Certification kepada PT PII.

Delivery of certificate of audit results for SNI ISO 37001:2016 Certification on the implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) with the status of no major or minor findings by CHESNA Certification to IIGF.

**30 April / April**



Bersama DJPK dan PT SMI, PT PII berpartisipasi dalam program "SINERGI" (Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri) dalam *talkshow* bertajuk "Percepatan Penyediaan Infrastruktur Layanan Publik melalui Skema Pembiayaan Kreatif" yang dilaksanakan di Aula Nagara Dana Rakca, Kementerian Keuangan.

With DJPK and PT SMI, IIGF participated in "SINERGI" (Cross-Unit Collaboration to Build the Nation) program in a talk show entitled "Accelerating the Provision of Public Service Infrastructure through Creative Financing Schemes" which was held at Nagara Dana Rakca Hall, Ministry of Finance.

**6 Mei / May**



PT PII mencatatkan kinerja positif pada Tahun Buku 2024. Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian, telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

IIGF recorded positive performance in the 2024 Financial Year. The 2024 Financial Year Annual Report, including the Company's audited Financial Statements and the Unmodified Opinion, has been approved by Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

**7 Mei / May**



PT PII berpartisipasi dalam forum "*The Closed-Door Private Roundtable Meeting*" yang diselenggarakan oleh media *Alpha Southeast Asia* untuk menghimpun *insight* terkait *Economic and Infrastructure Outlock* di wilayah Asia Tenggara.

IIGF participated in "The Closed-Door Private Roundtable Meeting" forum organized by Alpha Southeast Asia media to gather insights regarding the Economic and Infrastructure Outlook in Southeast Asia region.

**19-20 Mei / May**



PT PII berpartisipasi pada rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka, yaitu *Business Forum* bertajuk "*Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development*" bersama Kementerian PPN/Bappenas, PDPPI Kementerian Keuangan, dan PT SMI yang dilaksanakan di Paviliun Indonesia, area *World Expo* 2025 Osaka, Jepang. PT PII juga melakukan sesi *networking* bersama sejumlah mitra internasional seperti Chodai, Kansai Electric Power, dan ADB Institute untuk mendorong potensi kolaborasi.

IIGF participated in a series of World Expo 2025 Osaka activities, including a Business Forum titled "Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development" with the Ministry of National Development Planning/Bappenas, PDPPI Ministry of Finance, and PT SMI, held at Indonesian Pavilion, World Expo 2025 Osaka, Japan. IIGF also held networking sessions with several international partners such as Chodai, Kansai Electric Power, and ADB Institute to encourage potential collaboration.

**27 Mei / May**



PT PII berpartisipasi dalam program "SINERGI" (Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri) Session II oleh DJPK Kementerian Keuangan sebagai bentuk komitmen bersama meningkatkan kapasitas dan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan di Aula Nagara Dana Rakca, Kementerian Keuangan.

IIGF participated in "SINERGI" (Cross-Unit Collaboration to Build the Nation) Session II program by DJPK Ministry of Finance as a form of joint commitment to increase capacity and acceleration of regional infrastructure development which was held at Nagara Dana Rakca Hall, Ministry of Finance.

**3 Juni / June**



PT PII berpartisipasi dalam ajang *Creative Infrastructure Financing Forum* (CreaTIFF) 2025 yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

IIGF participated in Creative Infrastructure Financing Forum (CreaTIFF) 2025 event held by the Ministry of Public Works through the Directorate General of Infrastructure Financing at the Auditorium of Ministry of Public Works, South Jakarta.

**11-12 Juni / June**



PT PII turut berpartisipasi aktif dalam *International Conference on Infrastructure* (ICI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai panelis dalam diskusi panel bertemakan "*Partnering for Progress: Strengthening Public-Private Collaboration in Infrastructure*", yang diwakili oleh Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana di Assembly Hall JCC, Jakarta Pusat.

IIGF actively participated in the International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 organized by the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development as a panelist in a panel discussion themed "Partnering for Progress: Strengthening Public-Private Collaboration in Infrastructure", represented by IIGF's Business Director, Andre Permana at JCC Assembly Hall, Central Jakarta.

**22-24 Juni / June**




PT PII berpartisipasi pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 dengan fokus tema global "*Ending Plastic Pollution*" (Mengakhiri Polusi Plastik) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup di *Assembly Hall* JCC, Jakarta Pusat.

IIGF participated in the 2025 World Environment Day Commemoration with the global theme "Ending Plastic Pollution" with the Minister of Environment and Forestry, Hanif Faisol Nurofiq, which was held by the Ministry of Environment at JCC Assembly Hall, Central Jakarta.

**2 Juli / July**




PT PII kembali meraih penghargaan "*PPP Agency of the Year*" yang telah diraih selama tujuh tahun berturut-turut pada ajang The Asset Triple A *Sustainable Infrastructure Award 2025*, di Singapura.

IIGF once again won the "PPP Agency of the Year" award, making it seven consecutive years at the Asset Triple A Sustainable Infrastructure Award 2025 event in Singapore.

**19 Juli / July**



*Site Visit* Manajemen PT PII, yang diikuti Komisaris Utama PT PII, Dr. Hadiyanto serta Direktur Keuangan PT PII, Donny Hamdani, meninjau Stasiun Bumi Batam, Proyek Satelit Multifungsi/Satria-1 sekaligus Serah Terima Simbolis Donasi Fasilitas Pendidikan di Batam, Kepulauan Riau.

Site Visit of IIGF's Management, attended by IIGF's President Commissioner, Dr. Hadiyanto, and Finance Director, Donny Hamdani, to review Batam Earth Station, Multifunction Satellite Project/Satria-1, and Symbolic Handover of Educational Facility Donations in Batam, Riau Islands.

**31 Juli / July**



PT PII berhasil meraih penghargaan *Excellence Performance Award* dalam kategori "*Excellence in Public–Private Partnership Guarantees*" pada ajang Investortrust BUMN *Award* 2025, yang digelar oleh Investortrust.id, di Jakarta.

IIGF successfully won the Excellence Performance Award in the "Excellence in Public–Private Partnership Guarantees" category at the 2025 Investortrust BUMN Award event, held by Investortrust.id, in Jakarta.

**9 Agustus / August**



PT PII turut serta dalam dukungan Peningkatan Kualitas Rumah di Kawasan Kumuh untuk Pembangunan Rumah Layak Huni melalui TJSL sinergi SMV Kementerian Keuangan di Kelurahan Sangkrah, Surakarta.

IIGF participates in supporting the Improvement of House Quality in Slum Areas for the Construction of Livable Houses through CSR synergy of the Ministry of Finance's SMV in Sangkrah Village, Surakarta.

**8 September / September**



PT PII turut berpartisipasi dalam *International Conference on Urban Infrastructure Development* (ICUID) 2025 yang diselenggarakan oleh *Centre for Urban Infrastructure Development* Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Jawa Barat.

PT PII participated in the International Conference on Urban Infrastructure Development (ICUID) 2025 organized by the Center for Urban Infrastructure Development of Universitas Katolik Parahyangan in Bandung, West Java.

**16 September / September**




PT PII mendapatkan penghargaan *Silver* untuk kategori Inovasi Sosial pada Ajang *Environmental and Social Innovation Awards* (ENSIA) 2025.

IIGF received a Silver award for the Social Innovation category at the 2025 Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA).

29 September
September



PT PII berpartisipasi aktif dalam edukasi KPBU untuk perangkat daerah dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (21 Provinsi, 247 Kabupaten, dan 76 Kota), yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

IIGF actively participated in PPP education for regional apparatus in the Regional Revenue Optimization Coordination Meeting (21 Provinces, 247 Regencies, and 76 Cities), which was organized by the Ministry of Home Affairs.

30 September
September



PT PII menerima penghargaan *Gold Champion* untuk program TJSL WE CARE pada Bisnis Indonesia CSR *Awards* (BISRA 2025).

IIGF received the Gold Champion award for CSR WE CARE program at Bisnis Indonesia CSR Awards (BISRA 2025).

30 September
September



Simposium VI dan Musyawarah Nasional *University Network Indonesia Infrastructure Development* (UNIID) di Universitas Brawijaya, Malang.

The 6th Symposium and National Conference of the University Network Indonesia Infrastructure Development (UNIID) at Universitas Brawijaya, Malang.

2 Oktober
October



PT PII menerima kunjungan Pemerintah Kota Ternate bersama Wali Kota Ternate untuk membahas rencana usulan penjaminan proyek KPBU Alat Penerangan Jalan Ternate di Kantor PT PII.

IIGF received a visit from Ternate City Government and Mayor of Ternate to discuss the proposed guarantee plan for Ternate Street Lighting Equipment KPBU project at IIGF's Office.

2 Oktober
October



PT PII berpartisipasi dalam *ESG Outcome Indicator* yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan KIAT.

IIGF participated in ESG Outcome Indicator launched by the Ministry of Finance with the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and KIAT.

3 Oktober
October



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung) antara PT PII, Kementerian Pekerjaan Umum, bersama dengan PT Bogor Serpong Infra Selaras.

Signing of Guarantee Agreement for Bogor-Serpong Toll Road Project (Via Parung) between IIGF, the Ministry of Public Works, with PT Bogor Serpong Infra Selaras.

**3-5 Oktober / October**



Pelaksanaan rangkaian kegiatan *Company Retreat*, yang bersamaan dengan *Employee Volunteer Program* Penanaman 1.500 pohon di Watu Jagal bersama PT Jasamarga Jogja Bawen, sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada wilayah di sekitar proyek yang dijamin PT PII yaitu Tol Jogja-Bawen.

Implementation of a series of Company Retreat activities, which coincided with the Employee Volunteer Program for planting 1,500 trees in Watu Jagal with PT Jasamarga Jogja Bawen, as a form of Social and Environmental Responsibility in the area around the project guaranteed by IIGF, which is Jogja-Bawen Toll Road.

**9 Oktober / October**



PT PII menghadiri kegiatan diseminasi PMK 68/2024 di Provinsi Jambi dan berperan sebagai *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan yang memberikan pendampingan serta masukan teknis kepada pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek infrastruktur potensial melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk melalui sesi *coaching clinic* untuk mengeksplorasi kebutuhan dukungan pemerintah dan skema penjaminan yang relevan.

IIGF attended PMK 68/2024 dissemination in Jambi Province and acted as the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle, providing technical assistance and input to local governments in identifying and preparing potential infrastructure projects through the Public-Private Partnership (PPP) scheme, including through coaching clinic sessions to explore the need for government support and relevant guarantee schemes.

**14-16 Oktober / October**



PT PII berpartisipasi dalam *Information Transparency Expo* 2025 sebagai penilaian dalam *Information Transparency Award* 2025, yang berlangsung pada 14-16 Oktober. Dalam ajang ini PT PII berhasil mendapatkan penghargaan sebagai *Tenant* Terbaik ke-3 dalam partisipasi pertamanya, bersaing dengan puluhan *tenant* lain dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

IIGF participated in Information Transparency Expo 2025 as a participant in Information Transparency Award 2025, which took place from October 14-16. In this event, IIGF successfully won the 3rd Best Tenant award in its first participation, competing against dozens of other tenants from various ministries and institutions.

**27-29 Oktober / October**



Peliputan *News Feature* pada Proyek Alat Penerangan Jalan Kabupaten Madiun, kolaborasi *media engagement* yang dilakukan PT PII bersama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan pada program "Jendela Negeri" dari TVRI.

News Feature coverage on Madiun Regency Street Lighting Project, a media engagement collaboration carried out by IIGF with the Ministry of Finance's Communication and Information Services Bureau on "Jendela Negeri" program from TVRI.

**10 November / November**



PT PII berpartisipasi dalam Kemenkeu Mengajar 10 dengan menghadirkan 17 relawan termasuk jajaran Direksi di enam sekolah dengan melaksanakan edukasi langsung kepada generasi muda mengenai peran APBN dan peran PT PII sebagai *fiscal tool* Kementerian Keuangan.

IIGF participated in Kemenkeu Mengajar 10 by presenting 17 volunteers including the Board of Directors at six schools to provide direct education to the younger generation regarding the role of APBN and the role of IIGF as a fiscal tool of the Ministry of Finance.

**25 November / November**



PT PII bersama PT SMI, PT SMF, dan LPEI melaksanakan *SMV Business Forum* bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mengusung tema "*Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth*" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

IIGF with PT SMI, PT SMF, and LPEI held SMV Business Forum with the Directorate General of State Assets with the theme "Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth" at Dhanapala Building, Ministry of Finance.

**9 Desember**
December



PT PII bersama Kementerian Keuangan melaksanakan kunjungan kerja media ke Desa Curug, Karawang, untuk melihat dampak langsung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani melalui budidaya padi Inpari NutriZinc, yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan anak dan penurunan risiko stunting, sebagai bagian dari upaya menunjukkan kontribusi perseroan dalam mendukung Asta Cita, khususnya melalui penguatan ketahanan pangan nasional.

IIGF, with the Ministry of Finance, conducted a media working visit to Curug Village, Karawang, to observe the direct impact of the Corporate Social and Responsibility (CSR) program, which focused on increasing farmer capacity through Inpari NutriZinc rice cultivation. This program not only increased the community's economic value but also contributed to child growth and reduced the risk of stunting. This was part of an effort to demonstrate the Company's contribution to supporting Asta Cita, particularly through strengthening national food security.

**10 Desember**
December



PT PII bersama Kementerian Keuangan meninjau langsung keberhasilan operasional Satelit SATRIA-1 di Stasiun Bumi Cikarang sebagai hasil sinergi dengan BAKTI Komdigi dan SNT, dengan dukungan penjaminan dari PT PII yang memastikan ketersediaan akses internet di lebih dari 30.000 titik wilayah 3T, sebagai wujud nyata percepatan transformasi digital dan pemerataan akses informasi di seluruh pelosok Indonesia.

IIGF with the Ministry of Finance directly reviewed the successful operation of SATRIA-1 Satellite at Cikarang Earth Station as a result of synergy with BAKTI Komdigi and SNT, with guarantee support from IIGF, which ensures the availability of internet access in more than 30,000 points in the 3T region, as a concrete manifestation of the acceleration of digital transformation and equal distribution of access to information throughout Indonesia.

**10 Desember**
December




PT PII bersama Pemerintah Kota Denpasar menggelar Penjajakan Minat Pasar / *Market Sounding* untuk proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar di Jakarta.

IIGF with Denpasar City Government held a Market Sounding for Wangaya Regional General Hospital (RSUD) project in Denpasar City in Jakarta.

**15 Desember**
December



PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan Pinjaman PT Geo Dipa Energi dari Asian Development Bank untuk Kelanjutan Pembiayaan Proyek Dieng-2.

IIGF signed a Loan Guarantee Agreement for PT Geo Dipa Energi from Asian Development Bank for Continuance Financing for Dieng-2 Project.

**31 Desember**
December



PT PII melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan AICET, ISLE-2 dan I-ENET bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan.

IIGF signed AICET, ISLE-2, and I-ENET Guarantee Agreement with the Directorate General of Risk Management and Financing of the Ministry of Finance.

# Laporan Manajemen

## Management Report




TOL LEBANI GRESIK

# Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report



**Hadiyanto**
Komisaris Utama
President Commissioner

## Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat

Dewan Komisaris memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2025 dengan baik. Dengan ini kami menyampaikan Laporan Pengawasan atas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan, sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sekaligus wujud akuntabilitas kami kepada Pemegang Saham.

Sepanjang Tahun Buku 2025, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara independen dan objektif melalui mekanisme rapat, evaluasi kebijakan, serta pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan strategi, kinerja, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan oleh Direksi.

## To All Distinguished Shareholders and Stakeholders

The Board of Commissioners would like to express its gratitude to God Almighty for the successful management of the Company throughout 2025. We hereby submit our Supervisory Report on the Board of Directors' performance in managing the Company, as a fulfillment of the laws and regulations and a demonstration of our accountability to the Shareholders.

Throughout Fiscal Year 2025, the Board of Commissioners performed its supervisory and advisory functions independently and objectively through meetings, policy evaluations, and continuous monitoring of the Board of Directors' strategy implementation, performance, governance, risk management, and compliance.

## Kondisi Makro Ekonomi 2025 dan Dinamika Industri Infrastruktur

Macroeconomic Conditions in 2025 and Infrastructure Industry Dynamics

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global bergerak dalam fase pemulihan yang relatif lambat di tengah tren suku bunga yang mulai menurun serta tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini diwarnai oleh meningkatnya ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, terutama perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir serta konflik di wilayah Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak pada perlambatan perekonomian di berbagai negara serta mempengaruhi perdagangan global, arus modal internasional, dan selera risiko investor terhadap proyek jangka panjang, termasuk sektor infrastruktur.

Ketidakpastian global semakin meningkat seiring dengan munculnya ketegangan geoekonomi di tingkat internasional, yang ditandai oleh meningkatnya kebijakan proteksionisme dan perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya termasuk Indonesia serta melalui kebijakan tarif impor yang lebih tinggi. Dinamika tersebut memicu potensi perang tarif serta memperketat arus perdagangan global, yang pada gilirannya memberikan tekanan tambahan bagi negara berkembang, termasuk kawasan ASEAN. Negara-negara di Kawasan ini harus merespons volatilitas nilai tukar, kecenderungan penguatan dolar AS, serta meningkatnya biaya pembiayaan internasional. Kombinasi berbagai faktor tersebut menjadikan pendanaan proyek infrastruktur di kawasan selektif dan berbiaya lebih tinggi.

Throughout 2025, the global economy underwent a relatively slow recovery phase amidst the trend of declining interest rate and persistent inflationary pressures. This situation was marked by the increasing uncertainty due to ongoing geopolitical tensions, particularly the ongoing Russia-Ukraine war and conflicts in the Middle East. This situation resulted in economic slowdowns in various countries and affected global trade, international capital flows, and investor risk appetite for long-term projects, including the infrastructure sector.

Global uncertainty continued to increase with the emergence of geoeconomic tensions at the international level, evidenced by an increase in protectionist policies and trade disputes between the United States and a number of its trading partners, including Indonesia, as well as through higher import tariffs. These dynamics triggered the potential for tariff wars and tightened global trade flows, which in turn put additional pressure on developing countries, including ASEAN region. Countries in this region must respond to exchange rate volatility, the strengthening trend of the US dollar, and rising international financing costs. This combination of factors made financing infrastructure projects in the region selective and more costly.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Pada tahun 2025, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,11 persen (ctc), meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik serta kinerja berbagai komponen pengeluaran. Berdasarkan komponen pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 4,98 persen yang tetap menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Domestically, Indonesia's economy continued to demonstrate resilience amid global uncertainty. In 2025, the national economy grew by 5.11 percent (ctc), an increase compared to the 2024 growth rate of 5.03 percent. This growth was supported by strong domestic demand and the performance of various expenditure components. Based on expenditure components, exports of goods and services recorded the highest growth at 7.03 percent, followed by Gross Fixed Capital Formation (PMTB) at 5.09 percent and household consumption at 4.98 percent, which remained a major contributor to national Gross Domestic Product (GDP).

Selain itu, kinerja sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur juga menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 3,81 persen, yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas pembangunan proyek infrastruktur di berbagai wilayah. Sementara itu, sektor industri pengolahan tumbuh 5,30 persen dan tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur PDB nasional, sekaligus berperan penting sebagai penyedia *input* bagi pembangunan infrastruktur serta pengembangan industri hilir.

Furthermore, the performance of sectors related to infrastructure development also showed a positive trend throughout 2025. The construction sector grew by 3.81 percent, reflecting the continued development of infrastructure projects in various regions. Meanwhile, the manufacturing sector grew by 5.30 percent and remained the largest contributor to the national GDP structure, while playing a crucial role as a provider of inputs for infrastructure development and downstream industrial development.

Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,78 persen, seiring meningkatnya mobilitas barang dan orang serta penguatan konektivitas logistik nasional. Sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,35 persen, mencerminkan berkembangnya infrastruktur digital dalam mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan layanan publik. Selain itu, sektor pengadaan listrik dan gas turut tumbuh sebesar 3,10 persen, yang menunjukkan berlanjutnya penguatan infrastruktur energi sebagai penopang kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional.

Meanwhile, transportation and warehousing sector recorded a quite high growth of 8.78 percent, in line with the increased mobility of goods and people and strengthening national logistics connectivity. The information and communications sector grew by 8.35 percent, reflecting the development of digital infrastructure to support economic transformation and improve public services. Furthermore, electricity and gas procurement sector also grew by 3.10 percent, indicating the continued strengthening of energy infrastructure as a support for economic activities and national development.

Kondisi global dan domestik tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap dinamika industri infrastruktur. Pembiayaan proyek menjadi lebih berhati-hati, sementara kebutuhan terhadap skema pendanaan alternatif, seperti *blended finance*, reformasi fiskal, dan KPBU semakin meningkat. Pada saat yang sama, permintaan terhadap proyek energi terbarukan, digitalisasi nasional, penyediaan air minum, irigasi, ketahanan pangan, serta infrastruktur sosial tetap tinggi, menciptakan *pipeline* proyek yang kuat namun memerlukan skema penjaminan dan pengelolaan risiko yang lebih matang.

These global and domestic conditions have a direct impact on the dynamics of infrastructure industry. Project financing has become more cautious, while the need for alternative funding schemes, such as blended finance, fiscal reform, and PPPs, increases. At the same time, demand for renewable energy projects, national digitalization, drinking water supply, irrigation, food security, and social infrastructure remains high, creating a robust project pipeline but requiring more mature guarantee schemes and risk management.

Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya risiko pembiayaan, peran PT PII justru menjadi semakin penting. Dengan mandat sebagai penyedia penjaminan infrastruktur, PT PII berada pada posisi strategis sebagai penjaga kepercayaan investor, *risk mitigator*, sekaligus *enabler* percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Melalui penyediaan penjaminan yang kredibel, penguatan manajemen risiko, serta dukungan terhadap skema KPBU, Perseroan berperan sebagai mitra kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Amidst global uncertainty and increasing financing risks, the role of IIGF has become even more crucial. With its mandate as an infrastructure guarantee provider, IIGF occupies a strategic position to safeguard investor confidence, mitigate risks, and accelerate national infrastructure development. By providing credible guarantees, strengthening risk management, and supporting PPP schemes, the Company plays a key role in maintaining the sustainability of infrastructure development amid the increasingly complex global economic challenges.

# Penilaian atas Kinerja Direksi
Performance Assessment of the Board of Directors

## Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja keuangan Perseroan sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup solid di tengah dinamika global serta berbagai kebijakan domestik. Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.478 miliar atau 89% dari target sebesar Rp1.660 miliar, dengan selisih sebesar Rp182 miliar dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kemampuan Direksi dalam menjaga profitabilitas, meskipun Laba Bersih yang terealisasi sebesar Rp896 miliar dan telah dapat mencapai 83,1% dari target yang ditetapkan.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kebijakan pengendalian biaya yang dijalankan secara disiplin sepanjang tahun. Hal ini tercermin dari realisasi beban usaha Perseroan tercatat sebesar Rp536,9 miliar atau 89,6% dari target tahun 2025, sehingga Perseroan mampu menjaga efisiensi beban dengan realisasi yang lebih rendah Rp62,6 miliar dari target yang ditetapkan. Pengelolaan biaya yang efektif tersebut turut menjaga struktur keuangan tetap sehat serta memungkinkan Perseroan mempertahankan tingkat profitabilitas yang kompetitif. Indikator profitabilitas utama juga menunjukkan capaian yang relatif baik. Lebih lanjut, Perseroan membukukan margin laba bersih sebesar 60,6% dibawah target 65% sehingga Perseroan perlu terus memperkuat *pipeline* proyek penjaminan untuk mendukung pencapaian pendapatan mandat utama yang lebih optimal.

Rasio BOPO Perseroan tercatat sebesar 34,1% dibawah *threshold* 35% menunjukkan upaya Perseroan dalam disiplin pengendalian biaya operasional guna menjaga tingkat efisiensi yang optimal.

## Financial Performance

The Board of Commissioners considered that the Company's financial performance throughout 2025 demonstrated a fairly solid achievement amidst global dynamics and various domestic policies. Based on the financial statements as of 31 December 2025, The Company recorded operating revenue of Rp1,478 billion, or 89% of the target of Rp1,660 billion, with a difference of Rp182 billion from the set target. This achievement reflects the Board of Directors' ability to maintain profitability, despite the actual Net Profit of Rp896 billion, which reached 83.1% of the set target.

The Board of Commissioners expressed its appreciation for the disciplined cost control policies implemented throughout the year. This was reflected in the Company's operating expenses, which were recorded at Rp536.9 billion, or 89.6% of the 2025 target, thereby allowing the Company to maintain cost efficiency by coming in Rp62.6 billion below the set target. This effective cost management contributed to a healthy financial structure and enabled the Company to maintain a competitive level of profitability. Key profitability indicators also showed relatively good performance. Furthermore, the Company recorded a net profit margin of 60.6%, below the target of 65%. Therefore, the Company needs to continue to strengthen the guarantee project pipeline to support the achievement of more optimal main mandate revenue.

The Company's BOPO ratio was recorded at 34.1%, below the 35% threshold, demonstrating the Company's efforts to discipline operational cost control to maintain optimal efficiency.

Pada sisi pendapatan pengelolaan dana, kinerja Perseroan menunjukkan hasil yang sangat positif. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.118,1 miliar atau 112% dari target, yang didorong oleh peningkatan nilai aset di tengah penurunan tingkat suku bunga. Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja investasi yang kuat tersebut merupakan hasil dari penerapan kebijakan pengelolaan dana yang *prudent*, sejalan dengan ketentuan PMK 148/2022, serta keberhasilan Direksi dalam mengoptimalkan peluang pasar tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa meskipun terdapat tantangan pada sisi pendapatan inti akibat pergeseran waktu realisasi Penjaminan dan PDF, Direksi telah menunjukkan kinerja yang responsif, adaptif, dan akuntabel. Efektivitas pengendalian biaya, disiplin operasional, serta kinerja pengelolaan dana yang melampaui target menjadi faktor utama yang menopang kesehatan keuangan Perseroan di tahun 2025.

Namun demikian, Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan usaha sebagai penggerak motor utama dan *core business* Perseroan untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang, tidak hanya bergantung pada hasil pengelolaan dana semata.

## Kinerja Operasional

**Penjaminan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional Direksi dalam penyelenggaraan penjaminan KPBU pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dalam koordinasi, kecepatan proses, serta ketepatan kualitas penilaian proyek. Hingga Desember 2025, Perseroan telah memproses 25 proyek pada tahap *screening* dan 5 proyek pada tahap *appraisal*, yang mencerminkan *pipeline* proyek yang kuat sekaligus menunjukkan efektivitas Perseroan dalam menjalankan fungsi penjaminan sesuai dengan mandat pemerintah.

Selama tahun 2025, terdapat 2 proyek strategis yang berhasil mencapai tahap penandatanganan perjanjian penjaminan, yaitu proyek *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) yang ditandatangani pada 21 Maret 2025 dan proyek Jalan Tol Bogor–Serpong yang ditandatangani pada 3 Oktober 2025. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi utama yang mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi

Regarding income from investment, the Company's performance demonstrated a very positive result. Revenues reached Rp1,118.1 billion, or 112% of the target, driven by the increase in assets value amidst declining interest rates. The Board of Commissioners believes that this strong investment performance is the result of the implementation of prudent investment policies, in line with the provisions of PMK 148/2022, and the Board of Directors' success in optimizing market opportunities without neglecting the principle of prudent.

Overall, the Board of Commissioners evaluated that despite challenges to core revenues due to shifts in the revenue realization schedule for guarantees and PDF, the Board of Directors demonstrated responsive, adaptive, and accountable performance. Effective cost control, operational discipline, and investment performance that exceeded targets became the key factors supporting the Company's financial health in 2025.

Nevertheless, the Board of Commissioners expects the Board of Directors to prioritize efforts to increase revenues, the Company's main driver and core business, to increase future revenues, and not solely rely on investment results.

## Operational Performance

**Public Private Partnership (PPP) Guarantee**

The Board of Commissioners considered that the Board of Directors' operational performance in administering PPP guarantees in 2025 demonstrated improvements in coordination, process speed, and accuracy of project assessment quality. As of December 2025, the Company processed 25 projects at the screening stage and 5 projects at the appraisal stage, reflecting a strong project pipeline and demonstrating the Company's effectiveness in performing its guarantee function in accordance with the government's mandate.

Throughout 2025, 2 strategic projects managed to reach the guarantee agreement signing stage: Panorama Flyover I (Tahinjau Lauik I) project, signed on 21 March 2025, and Bogor-Serpong Toll Road project, signed on 3 October 2025. The two projects were part of the development of key transportation infrastructure that supported increased regional connectivity and accessibility, while providing social and economic benefits to the community. The Board of Commissioners considered the Board of Directors' success

bagi masyarakat. Dewan Komisaris menilai keberhasilan Direksi dalam merealisasikan penyelesaian proyek-proyek strategis KPBU tersebut sebagai indikator efektivitas pelaksanaan mandat Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan peran Perseroan sebagai *enabler* dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Selain itu, besarnya *pipeline* proyek yang dikelola mencerminkan kepercayaan Pemerintah terhadap kapasitas Perseroan serta memperkuat posisi PT PII dalam ekosistem pembiayaan infrastruktur jangka panjang.

in realizing the completion of these strategic PPP projects as an indicator of the effectiveness of the Company's mandate in supporting national infrastructure development. This also demonstrated the Company's role as an enabler in accelerating infrastructure development through PPP scheme. Furthermore, the large project pipeline it managed reflected the Government's confidence in the Company's capacity and strengthened IIGF's position in the long-term infrastructure financing ecosystem.

**Penjaminan Non-KPBU**

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam bidang penjaminan Non-KPBU, yang pada tahun 2025 berhasil menyelesaikan empat perjanjian penjaminan strategis. Seluruh proyek tersebut berkontribusi pada percepatan transisi energi bersih serta penguatan ketahanan jaringan listrik nasional. Proyek yang dijamin meliputi AICET *Phase*-1 yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB), PLTP Dieng Unit-2, ISLE-2, dan I-ENET yang didukung oleh World Bank Group.

**Non-PPP Guarantee**

The Board of Commissioners commended the Board of Directors' performance in non-PPP guarantee, which successfully completed four strategic guarantee agreements in 2025. All of these projects contributed to accelerating the clean energy transition and strengthening the resilience of national electricity grid. The guaranteed projects included AICET Phase-1, supported by Asian Development Bank (ADB), GPP Dieng Unit-2, ISLE-2, and I-ENET supported by World Bank.

Dewan Komisaris menilai bahwa keberhasilan Direksi dalam menyelesaikan penjaminan pinjaman atas proyek-proyek tersebut merupakan langkah signifikan dalam mendukung agenda transisi energi dan dekarbonisasi nasional. Proyek AICET *Phase*-1 dan ISLE-2 berfokus pada penguatan pembiayaan energi bersih, sementara PLTP Dieng-2 dan I-ENET mendukung perluasan jaringan transmisi serta peningkatan fleksibilitas sistem tenaga listrik nasional.

The Board of Commissioners considers the Board of Directors' success in completing loan guarantees for these projects a significant step in supporting the national energy transition and decarbonization agenda. The AICET Phase-1 and ISLE-2 projects focus on strengthening clean energy financing, while the GPP Dieng-2 and I-ENET support the expansion of transmission network and increase the flexibility of the national electricity system.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu memperluas kontribusinya di luar skema KPBU, sekaligus memposisikan diri sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mencapai target *Net Zero Emissions* (NZE). Dengan demikian, portofolio penjaminan Perseroan menjadi semakin beragam dan selaras dengan arah kebijakan nasional di sektor energi.

This performance demonstrates the Company's ability to expand its contributions beyond traditional PPP schemes, while simultaneously positioning itself as a strategic partner for the Government in achieving Net Zero Emissions (NZE) target. As a result, the Company's guarantee portfolio has become increasingly diverse and aligned with national policy directions in energy sector.

**Penjaminan Korporasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Untuk program Penjaminan Korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dewan Komisaris mencatat bahwa seluruh penjaminan terkait program tersebut telah berakhir pada tahun 2025. Pada tahap penyelesaian akhir, Perseroan membukukan pendapatan tangguhan serta reversal kontinjensi sebesar Rp85,5 miliar, yang mencerminkan bahwa risiko kredit dari penjaminan PEN dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan kewajiban klaim.

**Corporate Guarantee for National Economic Recovery (PEN) Program**

Regarding the Corporate Guarantee for National Economic Recovery (PEN) program, the Board of Commissioners noted that all guarantees related to the program expired in 2025. At the final settlement stage, the Company deferred income and contingency reversal of Rp85.5 billion, reflecting the successful management of credit risk from PEN guarantees without incurring any claims.

Dewan Komisaris menilai bahwa capaian tersebut menunjukkan kompetensi Direksi dalam mengelola penjaminan berskala besar yang memiliki urgensi nasional. Selain mencerminkan efektivitas penerapan manajemen risiko, penyelesaian program tersebut juga memperkuat struktur keuangan Perseroan melalui penyesuaian cadangan kontinjensi yang lebih akurat. Kinerja ini sekaligus menutup rangkaian kontribusi PT PII dalam mendukung stabilitas ekonomi pasca pandemi serta menunjukkan kemampuan organisasi menavigasi siklus risiko pada program pemerintah yang bersifat *extraordinary*.

The Board of Commissioners evaluates that this achievement demonstrates the Board of Directors' competence in managing large-scale guarantees of national urgency. In addition to reflecting the effectiveness of risk management implementation, this program completion also strengthens the Company's financial structure through more accurate adjustments to contingency reserves. This performance concludes IIGF's series of contributions to supporting post-pandemic economic stability and demonstrates the organization's ability to navigate the risk cycle of extraordinary government programs.

**Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Penyiapan *Project Development Facility* (PDF)**

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan fungsi *Project Development Facility* (PDF) sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan konsisten dengan mandat PT PII dalam mendukung percepatan penyiapan proyek infrastruktur yang berkualitas. Pada tahun 2025, terdapat tujuh proyek aktif dalam skema PDF, termasuk Proyek Bandara Singkawang, Jaringan Gas Kota Palembang, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Karo, SPAM Denpasar, Kapal Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Denpasar.

**Board of Commissioners' Assessment of Project Development Facility (PDF) Preparation Performance**

The Board of Commissioners assessed that the Project Development Facility (PDF) function conducted throughout 2025 showed good achievements and was consistent with IIGF's mandate to support the acceleration of preparation for quality infrastructure projects. In 2025, there were seven active projects in PDF scheme, including Singkawang Airport Project, Palembang City Gas Network, State Asset Management (BMN), Karo Regency Drinking Water Supply System (SPAM), Denpasar SPAM, National Research and Innovation Agency (BRIN) Research Ship, and Denpasar Regional General Hospital (RSUD).

Dewan Komisaris mencermati bahwa progres penyiapan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana, yang ditandai dengan penyelesaian sejumlah *deliverables* utama, yaitu *Business Case* (BC) Awal, *Business Case* (BC) Akhir, Rencana Bisnis, dan *Pre-Qualification* (PQ). Penyelesaian dokumen-dokumen tersebut merupakan tahapan penting dalam memastikan kesiapan proyek sebelum memasuki proses Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), karena mencakup analisis kelayakan teknis, finansial, ekonomi, hukum, serta struktur risiko proyek.

The Board of Commissioners observed that the progress of project preparation was carried out according to the plan, as indicated by the completion of several key deliverables, namely Initial Business Case (BC), Final Business Case (BC), Business Plan, and Pre-Qualification (PQ). Completion of these documents is a crucial step in ensuring project readiness before entering Public-Private Partnership (PPP) process, as it encompasses technical, financial, economic, and legal feasibility analysis, as well as the project's risk structure.

Dewan Komisaris memandang bahwa capaian tersebut menunjukkan konsistensi Direksi dalam menjaga kualitas penyiapan proyek melalui analisis yang komprehensif serta penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan. Kinerja ini juga mencerminkan penguatan kapasitas institusional Perseroan dalam memberikan dukungan teknis kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga proyek-proyek yang disiapkan memiliki kualitas yang mampu menarik minat badan usaha. Selain itu, efektivitas pengelolaan waktu serta koordinasi lintas pemangku kepentingan turut mendukung penyelesaian proyek PDF yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari transportasi udara hingga penyediaan air minum.

The Board of Commissioners views this achievement as demonstrating the Board of Directors' consistency in maintaining the quality of project preparation through comprehensive analysis and the application of prudent principles at every stage. This performance also reflects the Company's strengthened institutional capacity in providing technical support to Ministries/Institutions and Regional Governments, ensuring that the projects prepared are of a quality capable of attracting business interest. Furthermore, effective time management and cross-stakeholder coordination contribute to the completion of PDF projects involving various sectors, from air transportation to drinking water supply.

Kinerja PDF tahun 2025 tersebut turut berkontribusi pada meningkatnya kesiapan proyek untuk memasuki tahap transaksi KPBU dalam beberapa tahun mendatang, memperkuat keberlanjutan *pipeline* penjaminan PT PII, serta mendukung agenda pemerintah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan *bankable*.

The 2025 PDF performance also contributed to increased project readiness to enter the PPP transaction phase in the coming years, strengthened the sustainability of IIGF's guarantee pipeline, and supported the government's agenda to deliver more efficient and bankable infrastructure development.

## Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 yang mencapai 103,02%, sejalan dengan capaian tahun 2024. Konsistensi ini mencerminkan kemampuan Direksi dalam menjaga stabilitas kinerja serta memastikan tingkat eksekusi yang tetap optimal di tengah dinamika lingkungan operasional dan kompleksitas portofolio proyek yang terus berkembang. Capaian IKU di atas 100% selama dua tahun berturut-turut mencerminkan beberapa aspek penting, antara lain efektivitas eksekusi strategi Direksi dalam bidang penjaminan, penyiapan proyek, pengelolaan risiko, serta optimalisasi sumber pendapatan non-penjaminan. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan semakin matangnya sistem tata kelola kinerja Perseroan, termasuk penerapan mekanisme *cascading* IKU, proses *monitoring* kinerja, serta penguatan sistem pengendalian internal. Hal ini sekaligus menunjukkan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika proyek dan perubahan kebijakan, yang tercermin dari tetap tercapainya target kinerja meskipun terjadi pergeseran jadwal realisasi penjaminan dan penyesuaian fokus kerja.

Pencapaian IKU yang melampaui target tersebut memberikan keyakinan kepada Dewan Komisaris bahwa Direksi mampu menjaga stabilitas kinerja Perseroan sekaligus memastikan keselarasan antara strategi perusahaan, mandat Pemerintah, dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Hal ini juga menunjukkan bahwa budaya kinerja berbasis hasil (*performance-driven culture*) telah semakin mengakar di lingkungan Perseroan.

## Evaluation of Key Performance Indicator (KPI) Achievement in 2025

Board of Commissioners appreciates the achievement of the 2025 Key Performance Indicators (KPI), which reached 103.02%, in line with the 2024 achievement. This consistency reflects the Board of Directors' ability to maintain performance stability and ensure an optimal level of execution amid evolving operational dynamics and increasing portfolio complexity. The KPI achievement of above 100% for two consecutive years reflects several important aspects, including the effectiveness of the Board of Directors' strategy execution in guarantee, project preparation, risk management, and optimization of non-guarantee revenue sources. Furthermore, this achievement also reflects the increasing maturity of the Company's performance governance system, including the implementation of a cascading KPI mechanism, performance monitoring process, and strengthened internal control system. This also demonstrates the organization's readiness to face project dynamics and policy changes, as reflected in the continued achievement of performance targets despite shifts in the guarantee implementation schedule and adjustments to work focus.

The achievement of KPI, which exceeds the targets, gives the Board of Commissioners confidence that the Board of Directors is capable of maintaining the Company's performance stability while ensuring alignment between corporate strategy, government mandates, and stakeholder needs. This also demonstrates that a results-driven performance culture has become increasingly entrenched within the Company.

# Penilaian Dewan Komisaris atas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Board of Commissioners' Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG berada pada kategori sangat baik, yang tercermin dari penguatan mekanisme tata kelola, peningkatan transparansi, serta konsistensi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari hasil asesmen GCG oleh BPKP tahun 2025 yang mencapai skor 91,017, meningkat dibandingkan hasil asesmen tahun 2024 sebesar 90,829. Implementasi GCG yang solid tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan operasional Perseroan, integritas kegiatan penjaminan, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners considers that the implementation of GCG is in very good category, as reflected in strengthened governance mechanisms, increased transparency, and consistent compliance with internal provisions and applicable laws and regulations. This was reflected in the 2025 GCG assessment results by BPKP, which achieved a score of 91.017, an increase compared to the 2024 assessment of 90.829. This solid GCG implementation serves as a crucial foundation for the Company's operational sustainability, integrity of its assurance activities, and stakeholders' confidence.

Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen Direksi dalam meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas melalui perbaikan tata kelola informasi publik. Upaya tersebut turut memperkuat reputasi Perseroan sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) dengan tingkat transparansi yang tinggi sekaligus meningkatkan akuntabilitas Direksi dalam mengelola mandat penjaminan infrastruktur publik. Hal ini tercermin dari capaian Perseroan yang berhasil meraih *Information Transparency Award* 2025 yang menunjukkan kemampuan Direksi dalam mengelola informasi publik secara terbuka, tepat waktu, dan kredibel dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Perseroan juga berhasil memperkuat akses pemangku kepentingan terhadap data dan informasi korporasi, baik melalui kanal digital maupun laporan resmi Perseroan.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' commitment to raising transparency and accountability standards through improved public information governance. These efforts contribute to strengthening the Company's reputation as a Special Mission Vehicle (SMV) with a high level of transparency and enhancing the Board of Directors' accountability in managing its public infrastructure assurance mandate. This is reflected in the Company's achievement in winning the 2025 Information Transparency Award, demonstrating the Board of Directors' ability to manage public information openly, timely, and credibly by implementing the principles of information disclosure in accordance with the Law on Public Information Disclosure. Furthermore, the Company has successfully strengthened stakeholders' access to corporate data and information, both through digital channels and official Company reports.

Terkait dengan Pengendalian Gratifikasi dan Kepatuhan, Dewan Komisaris mencatat bahwa Direksi menunjukkan konsistensi dalam menindaklanjuti berbagai *Area of Improvement* GCG, termasuk penguatan sistem pengendalian gratifikasi dan kepatuhan internal. Sepanjang tahun 2025, Direksi secara konsisten melaksanakan sosialisasi anti-gratifikasi, memastikan seluruh pegawai memahami larangan serta pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, mekanisme pelaporan gratifikasi dan edukasi kepatuhan internal terus dijalankan secara rutin, serta tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal dilakukan secara sistematis. Upaya tersebut memberikan keyakinan bagi Dewan Komisaris bahwa budaya integritas di lingkungan Perseroan terus diperkuat, sehingga risiko pelanggaran etika maupun kepatuhan dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Regarding Graification Control and Compliance, the Board of Commissioners noted that the Board of Directors consistently followed up on various areas of GCG improvement, including strengthening the internal gratuity and compliance control system. Throughout 2025, the Board of Directors consistently implemented anti-gratification dissemination, ensuring all employees understood the prohibition and reporting of gratification in accordance with the provisions of Corruption Eradication Commission (KPK). Furthermore, gratification reporting mechanisms and internal compliance education were implemented routinely, and follow-up on internal and external audit findings was conducted systematically. These efforts give the Board of Commissioners confidence that the Company's culture of integrity is continuously strengthened, thereby minimizing the risk of ethical and compliance violations on an ongoing basis.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan GCG oleh Direksi selama tahun 2025 telah berjalan baik dan selaras dengan prinsip GCG. Implementasi GCG yang kuat tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas Perseroan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemerintah, lembaga keuangan, mitra strategis, serta masyarakat terhadap PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

Overall, the Board of Commissioners viewed that the GCG carried out by the Board of Directors throughout 2025 was running well and in line with GCG principles. Strong GCG implementation not only enhances the Company's credibility and accountability, but also strengthens the trust of the government, financial institutions, strategic partners, and the public in IIGF as an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI).

## Pandangan Dewan Komisaris atas Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)

Board of Commissioners' Views on the Whistleblowing System (WBS) Management

Dalam aspek penanganan pelaporan melalui *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan proses pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan setiap laporan dilakukan secara independen, tepat waktu, dan menjaga kerahasiaan pelapor (*whistleblower*). Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kasus signifikan yang memengaruhi operasional maupun reputasi Perseroan. Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pencegahan dan deteksi dini *fraud* telah berjalan secara efektif serta menunjukkan kemampuan Direksi dalam memelihara lingkungan pengendalian yang kuat dan berintegritas tinggi.

Regarding reporting through the Whistleblowing System (WBS), the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has implemented the complaint management process in accordance with applicable regulations. Each report is handled independently, in a timely manner, and maintains the confidentiality of the whistleblower. Throughout 2025, there were no significant cases affecting the Company's operations or reputation. This reflects the effective implementation of fraud prevention and early detection mechanisms and demonstrates the Board of Directors' ability to maintain a strong control environment with high integrity.

Selain itu, sistem pengaduan internal juga mampu menangani potensi penyimpangan secara cepat sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi telah membangun tata kelola risiko *fraud* yang matang, sekaligus berhasil menumbuhkan budaya pelaporan yang sehat di lingkungan Perseroan dengan menerapkan prinsip *zero tolerance to fraud*.

Furthermore, the internal complaint system is also capable of addressing potential irregularities quickly before they develop into greater risks. This shows that the Board of Directors has built a mature fraud risk governance system, while also successfully fostering a healthy reporting culture within the Company by implementing the principle of zero tolerance to fraud.

## Pandangan Dewan Komisaris atas Pengelolaan Manajemen Risiko

The Board of Commissioners' Views on Risk Management

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola risiko secara efektif dan terstruktur sesuai dengan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM), sehingga mampu merespon dinamika portofolio penjaminan yang semakin kompleks. Hasil asesmen tingkat kematangan risiko pada tahun 2025 mencapai 4,08 yang menunjukkan bahwa Perseroan telah berada pada *strong practice phase*. Mengingat karakter bisnis PT PII yang berfokus pada penjaminan proyek infrastruktur publik, kualitas pengelolaan risiko menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha dan stabilitas keuangan Perseroan.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has managed risks effectively and in a structured manner in accordance with the Enterprise Risk Management (ERM) framework, thus enabling it to respond to the increasingly complex dynamics of the guarantee portfolio. The risk maturity assessment results in 2025 reached 4.08, indicating that the Company was in a strong practice phase. Given the nature of IIGF's business, which focuses on guaranteeing public infrastructure projects, the quality of risk management is a crucial factor in maintaining the Company's business sustainability and financial stability.

Dalam pengelolaan portofolio risiko KPBU, Dewan Komisaris mencatat bahwa Direksi telah melakukan pemetaan risiko secara komprehensif terhadap proyek-proyek dengan tingkat risiko tinggi, termasuk SPAM Lampung dan SPAM Pekanbaru, serta menerapkan langkah pengendalian berdasarkan kategori risiko untuk memastikan fokus mitigasi yang tepat. Pengelolaan piutang regres juga menunjukkan progres positif, meskipun beberapa proyek masih menghadapi keterlambatan pembayaran. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi dan mendorong peningkatan upaya pemulihan regres di periode mendatang.

In managing PPP risk portfolio, the Board of Commissioners notes that the Board of Directors has conducted comprehensive risk mapping for high-risk projects, including Lampung SPAM and Pekanbaru SPAM, and implements control measures based on risk categories to ensure appropriate mitigation focus. The management of recourse receivables has also shown positive progress, although several projects still face payment delays. The Board of Commissioners appreciates the mitigation measures taken by the Board of Directors and encourages increased recourse recovery efforts in the coming period.

Tidak adanya klaim selama tahun 2025 pada portofolio Non-KPBU, mencerminkan efektivitas proses *due diligence*, kualitas penilaian risiko awal, serta konsistensi pemantauan risiko sepanjang periode penjaminan, termasuk pada proyek energi bersih dan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan yang melibatkan lembaga pembiayaan internasional. Dari sisi risiko likuiditas, Dewan Komisaris menilai bahwa hasil *stress test* yang dilakukan Perseroan menunjukkan posisi likuiditas yang tetap kuat bahkan dalam skenario peningkatan klaim maupun perubahan jadwal penjaminan. Kondisi ini menjadi indikator kesiapan finansial yang memadai bagi Perseroan dalam menghadapi kondisi ekstrem.

The absence of claims in Non-PPP portfolio during 2025 reflected the effectiveness of due diligence process, the quality of initial risk assessment, and the consistency of risk monitoring throughout the guarantee period, including for clean energy projects and electricity infrastructure enhancement by involving international financing institutions. Regarding liquidity risk, the Board of Commissioners considered that the Company's stress test results demonstrated a strong liquidity position, even in scenarios of increased claims and changes to the guarantee schedule. This condition is an indicator of the Company's adequate financial readiness to face extreme conditions.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan risiko dengan baik melalui pemetaan risiko yang akurat, penerapan mitigasi yang disiplin, pemantauan terhadap proyek-proyek prioritas, pengelolaan regres yang proaktif, serta koordinasi erat dengan para pemangku kepentingan. Manajemen risiko yang solid tersebut menjadi fondasi penting bagi PT PII dalam menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan portofolio penjaminan di tengah dinamika sektor infrastruktur nasional.

Overall, the Board of Commissioners views that the Board of Directors has implemented risk management effectively through accurate risk mapping, disciplined implementation of mitigation measures, monitoring of priority projects, proactive recourse management, and close coordination with stakeholders. This solid risk management serves as a critical foundation for IIGF in maintaining the financial health and sustainability of its guarantee portfolio amidst the dynamics of the national infrastructure sector.

## Penilaian Dewan Komisaris atas Sistem Pengendalian Internal

### Board of Commissioners' Assessment of Internal Control System

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh Direksi sepanjang tahun 2025 berjalan efektif dan menunjukkan penguatan yang signifikan, sejalan dengan kebutuhan pengelolaan risiko pada portofolio penjaminan yang semakin kompleks. Hal ini mencerminkan komitmen Direksi dalam menjaga integritas operasional sekaligus memperkuat tata kelola risiko di lingkungan Perseroan.

The Board of Commissioners considered that the Board of Directors' implementation of Internal Control System (SPI) throughout 2025 was effective and demonstrated significant strengthening, in line with the risk management needs of the increasingly complex guarantee portfolio. This reflects the Board of Directors' commitment to maintaining operational integrity while strengthening risk governance within the Company.

Dewan Komisaris mencermati bahwa seluruh temuan audit, baik yang berasal dari audit internal, audit eksternal, maupun regulator, telah ditindaklanjuti secara sistematis melalui

The Board of Commissioners notes that all audit findings, whether from internal audits, external audits, or regulators, have been systematically followed up through structured

rencana aksi yang terstruktur, penyempurnaan proses bisnis penjaminan, serta penguatan kontrol pada area dengan tingkat risiko tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa SPI berfungsi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan dan tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban kepatuhan.

Implementasi aplikasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) turut memperkuat efektivitas pengendalian internal melalui integrasi pemetaan risiko, *monitoring* tindak lanjut, kontrol kepatuhan, dan dokumentasi proses penjaminan. Sistem ini meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, mengurangi potensi kesalahan manual, serta memastikan keterlacakan seluruh aktivitas pengendalian sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi penguatan peran Audit Internal dalam kerangka *Three Lines Model*. Sepanjang tahun 2025, fungsi Audit Internal menunjukkan peningkatan kapabilitas melalui penerapan audit berbasis risiko, intensifikasi *monitoring* pada area kritikal, penyampaian rekomendasi perbaikan yang lebih implementatif, serta penguatan sinergi dengan Komite Audit. Penguatan ketiga lini pengendalian tersebut memberikan keyakinan bahwa SPI Perseroan telah berjalan efektif dan mampu mendukung operasional secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa SPI yang diterapkan Direksi telah mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara dini, menjaga integritas proses penjaminan, memperkuat kepatuhan, serta mendukung penerapan praktik tata kelola yang baik. Penguatan SPI ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha serta meningkatkan keandalan PT PII sebagai institusi penjamin infrastruktur nasional.

action plans, improvements to assurance business processes, and enhanced control in high-risk areas. This approach ensures that SPI functions as a continuous improvement mechanism, not simply as a means of fulfilling compliance obligations.

The implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC) application also strengthens the effectiveness of internal controls through the integration of risk mapping, follow-up monitoring, compliance controls, and assurance process documentation. This system improves data accuracy, accelerates reporting processes, reduces the potential for manual errors, and ensures traceability of all control activities, supporting more data-driven decision-making.

The Board of Commissioners also appreciates the role enhancement of Internal Audit within the Three Lines Model framework. Throughout 2025, the Internal Audit function demonstrated increased capabilities through the implementation of risk-based audits, intensified monitoring of critical areas, the delivery of more implementable improvement recommendations, and strengthened synergy with the Audit Committee. Strengthening these three lines of control provides confidence that the Company's SPI operates effectively and is capable of supporting the overall operations.

Overall, the Board of Commissioners considers that SPI implemented by the Board of Directors is able to identify and mitigate risks early, maintain the integrity of assurance process, strengthen compliance, and support the implementation of good governance practices. This strengthening of SPI serves as a crucial foundation for business sustainability and enhances the reliability of IIGF as a national infrastructure guarantee institution.

## Penilaian Dewan Komisaris atas Strategi Perseroan dan Implementasinya

### Board of Commissioners' Assessment of the Company's Strategy and Its Implementation

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi Perseroan pada tahun 2025 telah dijalankan Direksi secara efektif dan selaras dengan arah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2023–2027. Tema "*Perluasan Layanan Penjaminan untuk Mendukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Berdampak Positif bagi Lingkungan dan Sosial*" berhasil diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret serta memberikan kontribusi nyata terhadap perluasan portofolio penjaminan dan penguatan kapasitas institusional Perseroan.

The Board of Commissioners considered that the Company's strategy for 2025 was implemented effectively by the Board of Directors and was in line with the direction of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2023–2027. The theme "Expanding Guarantee Services to Support Sustainable Infrastructure with Positive Environmental and Social Impacts" was successfully translated into a concrete work program and made a tangible contribution to expanding the Company's guarantee portfolio and strengthening its institutional capacity.

Empat pilar strategis menjadi indikator utama efektivitas implementasi strategi pada tahun 2025. Pertama, ekspansi penjaminan sektor energi bersih menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui realisasi sejumlah proyek strategis, antara lain *Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition* (AICET) *Phase*-1, Kelanjutan Pembiayaan PLTP Dieng Unit-2, Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification-2* (ISLE-2), serta Indonesia *Electricity Network Transformation Program* (I-ENET). Seluruh proyek tersebut melibatkan lembaga pembiayaan global seperti Asian Development Bank (ADB), dan World Bank Group, yang mencerminkan kemampuan Direksi dalam mengelola proyek dengan standar internasional serta risiko kompleksitas yang tinggi.

Four strategic pillars served as key indicators of the effectiveness of strategy implementation in 2025. First, the expansion of guarantees in clean energy sector demonstrated significant progress through the implementation of several strategic projects, including Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (AICET) Phase 1, Additional Loan PLTP Dieng Unit-2, Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2), and Indonesia Electricity Network Transformation Program (I-ENET). All of these projects involved global financing institutions such as the Asian Development Bank (ADB), and World Bank Group, demonstrating the Board of Directors' ability to manage projects with international standards and high levels of complexity.

Kedua, Direksi berhasil menyederhanakan proses penjaminan melalui pengembangan *Smart Hub PPP (Public-Private Partnership)*, yang meningkatkan efisiensi penilaian proyek, mengurangi beban administratif, memperkuat transparansi proses, serta mengintegrasikan data dan dokumentasi penjaminan dalam satu platform terpadu.

Second, the Board of Directors managed to simplify the guarantee process through the development of Smart Hub PPP (Public-Private Partnership), which increased project assessment efficiency, reduced administrative loads, strengthened process transparency, and integrated guarantee data and documentation into a single platform.

Ketiga, penguatan peran IIGF Institute sebagai pusat pengetahuan, pelatihan, dan riset juga berjalan efektif. Program peningkatan kapasitas sepanjang tahun 2025 memberikan dukungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta internal Perseroan dalam menyiapkan proyek KPBU sesuai standar yang berlaku, sekaligus memperkuat posisi Perseroan sebagai *knowledge leader* dalam ekosistem pembiayaan infrastruktur nasional.

Third, IIGF Institute's role as a center for knowledge, training, and research was effectively strengthened. A capacity building program throughout 2025 provided support to ministries/agencies, local governments, and the Company itself in preparing PPP projects in accordance with applicable standards, while strengthening the Company's position as a knowledge leader in the national infrastructure financing ecosystem.

Keempat, Direksi menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyiapan proyek sektor sosial dan infrastruktur dasar, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, penyediaan air minum, serta layanan dasar masyarakat lainnya, melalui mekanisme *Project Development Facility* (PDF). Proses ini dilaksanakan secara terstruktur melalui penyusunan *Business Case* Awal dan Akhir, Rencana Bisnis, serta dokumen Pra-Kualifikasi (*Pre-Qualification*) sehingga memperluas dampak sosial sekaligus memastikan keberlanjutan *pipeline* proyek yang lebih merata.

Fourth, the Board of Directors demonstrated a strong commitment to preparing social sector and basic infrastructure projects, including education, health, housing, drinking water supply, and other basic public services, through the Project Development Facility (PDF) mechanism. This process is implemented in a structured manner through the development of Initial and Final Business Cases, Business Plans, and Pre-Qualification documents, thereby expanding social impact while ensuring a more equitable project pipeline.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa strategi Perseroan pada tahun 2025 telah diimplementasikan dengan sangat baik dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata melalui inovasi digital, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Dengan capaian tersebut, Perseroan berada pada posisi yang kuat untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan, berdampak sosial, serta berorientasi jangka panjang.

Overall, the Board of Commissioners evaluated that the Company's 2025 strategy was implemented very well and delivered tangible added value through digital innovation, strengthened governance, and enhanced stakeholder capacity. With such achievements, the Company is in a strong position to continue supporting sustainable, socially impactful, and long-term national infrastructure development.

# Pandangan Dewan Komisaris atas Program Keberlanjutan (*Environmental, Social, and Governance* / ESG)

Board of Commissioners' Views on Sustainability Program (Environmental, Social, and Governance / ESG)

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam model bisnis dan kegiatan operasionalnya. Pendekatan keberlanjutan yang dijalankan Direksi tidak hanya memperkuat kontribusi Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketahanan serta kredibilitas Perseroan sebagai lembaga penjamin infrastruktur yang bertanggung jawab.

Throughout 2025, the Company demonstrated significant progress in integrating ESG principles into its business model and operational activities. The Board of Directors' sustainability approach not only strengthened the Company's contribution to the environment and community but also enhanced the Company's resilience and credibility as a responsible infrastructure guarantor.

Pada pilar lingkungan (*Environmental*), Direksi berhasil memperluas penjaminan pada proyek-proyek energi bersih yang menjadi bagian penting dari agenda transisi energi Indonesia. Proyek seperti AICET *Phase*-1, *Additional* PLTP Dieng Unit-2, ISLE-2, dan I-ENET menunjukkan kemampuan Perseroan dalam bekerja sama dengan lembaga multilateral, termasuk ADB dan World Bank Group. Penjaminan pinjaman atas proyek-proyek ini berkontribusi langsung pada percepatan pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) serta meningkatkan porsi proyek rendah karbon dalam portofolio Perseroan.

In environmental pillar, the Board of Directors managed to expand guarantees for clean energy projects, a key part of Indonesia's energy transition agenda. Projects such as AICET Phase-1, Additional PLTP Dieng Unit-2, ISLE-2, and I-ENET demonstrated the Company's ability to collaborate with multilateral institutions, including ADB, and World Bank Group. Loan guarantees for these projects directly contributed to accelerating the achievement of Net Zero Emissions (NZE) target and increasing the share of low-carbon projects in the Company's portfolio.

Pada pilar sosial (*Social*), Dewan Komisaris menilai bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) semakin berorientasi pada penciptaan dampak nyata bagi masyarakat. Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Rantau Dedap, pengembangan Ekowisata Watu Hadang, serta inovasi pertanian organik menggunakan varietas padi Inpari memberikan manfaat langsung dalam penyediaan energi bersih, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan pangan. Ketiga program tersebut mencerminkan upaya nyata Direksi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan komunitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

In social pillar, the Board of Commissioners considers that Corporate Social Responsibility (CSR) program is increasingly oriented towards creating tangible impacts for the community. Rantau Dedap Mini-Hydro Power Plant (MHPP) development program, Watu Hadang Ecotourism development program, and organic farming innovation using Inpari rice varieties provide direct benefits in the provision of clean energy, sustainable waste management, and enhancing food security. These three programs reflect the Board of Directors' concrete efforts to improve the quality of life, strengthen community resilience, and encourage inclusive economic growth.

Pada pilar tata kelola (*Governance*), Direksi memperkuat fondasi keberlanjutan dengan berperan aktif dalam penyusunan dan penerapan ESG *Outcome Indicator* bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia, serta Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Inisiatif ini meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengukuran dampak keberlanjutan, sekaligus memastikan bahwa praktik pelaporan PT PII selaras dengan standar internasional.

In governance pillar, the Board of Directors strengthens the sustainability foundation by actively participating in the development and implementation of ESG Outcome Indicators with the Indonesian Ministry of Finance, Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), and Indonesia-Australia Partnership for Infrastructure (KIAT). This initiative enhances the accountability and quality of sustainability impact measurement, while ensuring that IIGF's reporting practices align with international standards.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi ESG pada tahun 2025 telah berjalan semakin matang dan terarah. Melalui perluasan penjaminan energi bersih, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis dampak, serta penguatan tata kelola keberlanjutan, Direksi menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan nasional yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat ketahanan Perseroan, tetapi juga semakin mengukuhkan peran PT PII sebagai institusi penjamin yang mengedepankan integritas dan tanggung jawab sosial.

Overall, the Board of Commissioners evaluated that the ESG implementation in 2025 was became increasingly mature and well-directed. Through the expansion of clean energy guarantees, implementation of impact-based Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and strengthening of sustainability governance, the Board of Directors demonstrated a strong commitment to supporting more environmentally friendly, inclusive, and sustainable national development. This approach strengthens the Company's resilience and further solidifies IIGF's role as a guarantee institution that prioritizes integrity and social responsibility.

## Penilaian Dewan Komisaris atas Prospek Usaha dan Strategi Masa Depan

Board of Commissioners' Assessment of Business Prospects and Future Strategy

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang disusun Direksi untuk tahun 2026 dan selanjutnya menunjukkan arah yang optimistis dan terukur, serta selaras dengan mandat pembangunan nasional. Strategi yang dirumuskan mencerminkan kesiapan Perseroan dalam merespons meningkatnya kebutuhan Pembangunan infrastruktur prioritas serta dinamika skema pembiayaan yang semakin inovatif dan kompleks.

The Board of Commissioners views that the business prospects prepared by the Board of Directors for 2026 and beyond demonstrate an optimistic and measurable direction in line with the national development mandate. The formulated strategy reflects the Company's readiness to respond to the increasing need for priority infrastructure development and the dynamics of increasingly innovative and complex financing schemes.

Sebagai institusi penjamin infrastruktur nasional, PT PII berada pada posisi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan melalui skema KPBU. *Pipeline* proyek yang semakin matang, yang mencakup sektor transportasi, energi, pengelolaan air, infrastruktur sosial, serta transformasi digital, menjadi indikator kuat bahwa Perseroan memiliki landasan yang solid untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya.

As a national infrastructure guarantee institution, IIGF is strategically positioned to accelerate development through the PPP scheme. Its increasingly mature project pipeline, covering transportation, energy, water management, social infrastructure, and digital transformation sectors, is a strong indicator that the Company has a solid foundation to enter the next phase of growth.

### Arah Strategis 2026: Mendukung Transformasi Nasional

Dewan Komisaris memandang bahwa arah strategi masa depan Perseroan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, Perseroan memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mendukung berbagai proyek prioritas nasional, antara lain seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, penyediaan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penguatan ketahanan pangan, serta perluasan jaringan telekomunikasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi memiliki pemahaman yang baik terhadap urgensi pembangunan yang inklusif dan merata, serta mampu mengarahkan Perseroan untuk berperan lebih aktif pada proyek berdampak luas bagi masyarakat.

### Strategic Direction 2026: Supporting National Transformation

The Board of Commissioners views the Company's future strategic direction is in line with the long-term development vision of Golden Indonesia 2045, particularly in supporting the acceleration of infrastructure development as the driver of economic growth. In this context, the Company plays a role as the Government's strategic partner in supporting various national priority projects, including the development of Nusantara Capital City, providing housing for Low-Income Communities (MBR), strengthening food security, and expanding the national telecommunications network. This demonstrates the Board of Directors' strong understanding of the urgency of inclusive and equitable development and the Company's ability to direct a more active role in projects with broad impacts on society.

## Penguatan Kapasitas Penjaminan dan Tata Kelola Risiko

Pengalaman lebih dari 16 tahun dalam pengelolaan risiko penjaminan menjadi salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Direksi telah membangun kapasitas teknis dan finansial yang memungkinkan Perseroan memberikan kepastian investasi bagi mitra domestik maupun global. Dengan fondasi tata kelola yang kuat dan rekam jejak kerja sama dengan lembaga internasional seperti ADB dan World Bank, Perseroan berada pada posisi yang solid untuk mendorong percepatan realisasi proyek-proyek bernilai tinggi yang memiliki struktur risiko kompleks.

## Integrasi Keberlanjutan (*Environmental, Social, and Governance* / ESG)

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam rencana jangka panjang dan pengembangan bisnis Perseroan. Perseroan tidak hanya memperkuat portofolio pada sektor energi terbarukan, *waste management*, *water sanitation*, serta pembangunan tanggul laut sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim (*climate mitigation*), tetapi juga semakin aktif berperan dalam pengembangan ekonomi hijau, konservasi energi perkotaan, penjaminan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan, serta pembiayaan inovatif (*creative financing*) untuk proyek-proyek rendah karbon dalam mendukung pencapaian agenda Pembangunan Nasional termasuk Asta Cita Pemerintah. Penguatan *value* ESG tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap agenda keberlanjutan nasional sekaligus memenuhi ekspektasi global terhadap pembiayaan proyek hijau. Langkah ini juga memperkuat posisi Perseroan sebagai mitra yang terpercaya bagi investor serta mendorong mobilisasi pendanaan hijau dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor-sektor yang berkontribusi pada upaya *climate mitigation*.

## Perluasan Peran dalam Ketahanan Pangan

Dewan Komisaris juga menilai positif langkah Perseroan untuk memperluas peran pada sektor ketahanan pangan. Strategi ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan stabilitas pasokan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga mendorong diversifikasi sektor penjaminan sehingga portofolio risiko Perseroan menjadi lebih seimbang dan lebih resilien terhadap guncangan eksternal.

Strategi dan prospek usaha yang disusun Direksi mencerminkan arah yang visioner sekaligus realistis. Dengan kesiapan organisasi dan kapasitas teknis yang kuat, Perseroan

## Strengthening Guarantee Capacity and Risk Governance

Having more than 16 years of experience in guarantee risk management serves as one of the Company's competitive advantages. The Board of Directors has built technical and financial capacity that enables the Company to provide investment certainty to both domestic and global partners. With a strong governance foundation and a track record of collaboration with international institutions such as the ADB and World Bank, the Company is well-positioned to accelerate the realization of high-value projects with complex risk structures.

## Sustainability Integration (Environmental, Social, and Governance / ESG)

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' efforts to integrate ESG principles into the Company's long-term plans and business development. The Company not only strengthens its portfolio in renewable energy, waste management, water sanitation, and sea wall construction sectors as part of climate change mitigation efforts, but is also increasingly active in developing green economy, urban energy conservation, guaranteeing environmentally friendly basic infrastructure, and innovative financing (creative financing) for low-carbon projects to support the achievement of the national development agenda, including the Government's Asta Cita. The strengthening of ESG values is expected to enhance the Company's contribution to the national sustainability agenda while meeting global expectations for green project financing. This step also strengthens the Company's position as a trusted partner for investors and encourages the mobilization of green funding for sustainable development, particularly in sectors that contribute to climate mitigation efforts.

## Expanding Roles in Food Security

The Board of Commissioners also considers the Company's efforts to expand its role in food security sector positively. This strategy not only contributes to strengthening food supply stability and improving farmer welfare, but also encourages diversification of guarantee sector, thereby making the Company's risk portfolio more balanced and more resilient to external shocks.

The strategy and business prospects formulated by the Board of Directors reflect a visionary yet realistic direction. With strong organizational readiness and technical

diyakini mampu menangkap peluang pertumbuhan, memperluas layanan penjaminan serta memperkuat perannya dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Dewan Komisaris mendukung arah strategis tersebut dan mendorong Direksi untuk terus menjaga penerapan tata kelola yang baik, penguatan mitigasi risiko, serta efektivitas eksekusi agar rencana yang telah disusun dapat terealisasi secara optimal.

capacity, the Company is deemed capable of securing growth opportunities, expanding its guarantee services, and strengthening its role in sustainable infrastructure financing. The Board of Commissioners supports this strategic direction and encourages the Board of Directors to continuously maintain good governance, strengthen risk mitigation, and ensure effective execution to ensure optimal implementation of the plans.

## Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Effectiveness of the Board of Commissioners' Duties

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat strategis sepanjang tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ *Good Corporate Governance* (GCG). Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terstruktur dan berbasis risiko guna mendukung mandat Perseroan sebagai lembaga penjamin infrastruktur nasional.

The Board of Commissioners considered that the implementation of its supervisory duties and strategic advisory services throughout 2025 was effective and in accordance with Good Corporate Governance ("GCG") principles. Supervisory activities were implemented in a structured and risk-based manner to support the Company's mandate as a national infrastructure guarantee institution.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 18 Rapat Gabungan yang diperkuat oleh rapat internal Dewan Komisaris serta peran aktif Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Efektivitas pengawasan tercermin dari berbagai arahan strategis yang diberikan antara lain terkait peningkatan proses penjaminan, penguatan asesmen proyek KPBU, serta mitigasi risiko portofolio.

Throughout 2025, the Board of Commissioners and Board of Directors held 18 Joint Meetings, strengthened by internal Board of Commissioners meetings and active participation of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee. The effectiveness of supervision was reflected in various strategic directives provided, including those related to improving the guarantee process, strengthening PPP project assessments, and mitigating portfolio risks.

Mekanisme *check and balance* berjalan dengan baik melalui penelaahan atas laporan Direksi serta penyampaian berbagai rekomendasi perbaikan secara konstruktif. Selain itu, Dewan Komisaris secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal, perkembangan risiko strategis, serta tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku. Seluruh proses pengawasan tersebut didukung oleh ketersediaan informasi terkait kinerja, portofolio, dan risiko yang lengkap serta disampaikan secara tepat waktu, sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal.

The check and balance mechanism operates effectively through the review of the Board of Directors' reports and the constructive submission of various recommendations for improvement. Furthermore, the Board of Commissioners continuously evaluates internal audit results, strategic risk developments, and the Company's level of compliance with applicable regulations. This entire supervision process is supported by the availability of comprehensive and timely information on performance, portfolio, and risks, ensuring

## Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Reporting to the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh organ pendukung Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif sepanjang tahun 2025. Organ tersebut memberikan dukungan yang terstruktur sesuai dengan mandat dalam

The Board of Commissioners considers that all supporting organs of the Board of Commissioners performed their duties effectively throughout 2025. These organs provided structured support in accordance with the mandate of

Piagam Komite, sehingga fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi PT PII dapat dilaksanakan secara optimal.

Komite Audit menjalankan perannya dalam memastikan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan regulasi. Sepanjang tahun, Komite Audit menelaah pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), meninjau hasil audit laporan keuangan dan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh auditor eksternal, serta memberikan rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris. Komite juga secara aktif melakukan evaluasi bersama Divisi Audit Internal serta memberikan masukan terkait berbagai tindakan korporasi maupun penunjukan auditor eksternal.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan pengawasan risiko secara menyeluruh, termasuk menilai efektivitas kebijakan manajemen risiko, meninjau implementasinya di unit kerja, serta melakukan reviu berkala atas profil dan laporan risiko Perseroan. Komite ini juga memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko termasuk sistem informasi risiko yang digunakan Perseroan. Selain itu, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses persetujuan berbagai tindakan korporasi yang memiliki implikasi risiko.

Sekretaris Dewan Komisaris memberikan dukungan administratif yang konsisten, mulai dari penyusunan dokumentasi rapat, pengelolaan korespondensi, hingga memfasilitasi berbagai kegiatan Dewan Komisaris dan komite-komitenya, sehingga proses pengawasan berjalan tertib dan efisien.

Pada akhir Tahun 2025, Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nominasi dan remunerasi di lingkungan Perseroan.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja seluruh organ Dewan Komisaris telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian IKU tahun 2025 sebesar 106,23%. Capaian tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan Dewan Komisaris sepanjang tahun buku 2025.

the Committee Charter, enabling optimal implementation of their oversight and advisory functions to the Board of Directors of IIGF.

Audit Committee plays its role in ensuring the quality of financial reporting, internal control effectiveness, and regulatory compliance. Throughout the year, Audit Committee reviewed the implementation of the Company's Work Plan and Budget (WP&B), reviewed the results of financial statement audits and the assessment of Key Performance Indicators (KPI) by external auditors, and provided strategic recommendations to the Board of Commissioners. The Committee also actively conducted joint evaluations with the Internal Audit Division and provided input on various corporate actions and appointment of external auditors.

Risk Monitoring Committee carries out comprehensive risk supervision, including assessing the effectiveness of risk management policies, reviewing their implementation in work units, and conducting regular reviews of the Company's risk profile and reports. This Committee also ensures the adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, including the Company's risk information system. In addition, Risk Monitoring Committee provides recommendations to the Board of Commissioners on the approval process for various corporate actions with risk implications.

Secretary of the Board of Commissioners provides consistent administrative support, from preparing meeting documentation and managing correspondence to facilitating various activities of the Board of Commissioners and its committees, ensuring an orderly and efficient supervisory process.

At the end of 2025, the Board of Commissioners also established a Nomination and Remuneration Committee to support the effective implementation of the Board of Commissioners' duties, particularly those related to nomination and remuneration policies within the Company.

In general, the Board of Commissioners evaluated that the performance of all Board of Commissioners organs significantly contributed to the achievement of the 2025 KPI of 106.23%. These achievements were submitted to the General Meeting of Shareholders as a form of accountability for the implementation of the Board of Commissioners' supervisory and directives to provide functions throughout the 2025 fiscal year.

## Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Changes in the Board of Commissioners' Composition

Pada tahun 2025, susunan dan komposisi Dewan Komisaris PT PII mengalami satu kali perubahan berdasarkan keputusan Pemegang Saham. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025, yang berlaku sebagai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui keputusan tersebut, RUPS mengangkat Sdr. Bhimantara Widyajala sebagai anggota Dewan Komisaris sekaligus memberhentikan dengan hormat Sdr. Ahmad Ghufron sebagai anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memandang bahwa perubahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan, melalui mekanisme keputusan Pemegang Saham yang sah serta tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Kehadiran Sdr. Bhimantara Widyajala diharapkan dapat memperkuat kapasitas strategis Dewan Komisaris dalam mengawal kinerja penjaminan, manajemen risiko, serta arah pengembangan Perseroan ke depan.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
- Hadiyanto : Komisaris Utama
- Bhimantara Widyajala : Komisaris
- Ferry Irawan : Komisaris

Perubahan tersebut menegaskan komitmen Pemegang Saham untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris memiliki struktur, kapasitas, serta kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sesuai prinsip GCG.

In 2025, the composition of the Board of Commissioners of IIGF underwent a single change based on Shareholders' resolution. This change was stipulated in Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 369 of 2025, dated 19 December 2025, which served as the General Meeting of Shareholders (GMS) resolution. Through this resolution, the GMS appointed Mr. Bhimantara Widyajala as a member of the Board of Commissioners and honorably dismissed Mr. Ahmad Ghufron as a member of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners views that this change was implemented in accordance with corporate governance provisions, through a valid Shareholder resolution mechanism, while maintaining the continuity of the Company's supervisory function. The presence of Mr. Bhimantara Widyajala is expected to strengthen the Board of Commissioners' strategic capacity in supervising the Company's guarantee performance, risk management, and future development direction.

Thus, the composition of IIGF's Board of Commissioners as of 31 December 2025 was as follows:
- Hadiyanto : President Commissioner
- Bhimantara Widyajala : Commissioner
- Ferry Irawan : Commissioner

These changes affirm the Shareholders' commitment to ensuring that the Board of Commissioners has the adequate structure, capacity, and competency to effectively carry out its supervisory function in accordance with GCG principles.

## Penutup
Closing

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh insan Perseroan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika pembangunan infrastruktur nasional serta tantangan dalam pengelolaan risiko penjaminan, Perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja, meningkatkan profesionalisme operasional, serta memperkuat kontribusi terhadap agenda pembangunan pemerintah. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima

The Board of Commissioners conveyed its highest appreciation to the Board of Directors and all Company personnel for the dedication, hard work, and commitment demonstrated throughout 2025. Amidst the dynamics of national infrastructure development and challenges in managing guarantee risks, the Company was able to maintain stable performance, enhance operational professionalism, and strengthen its contribution to the government's development agenda. The Board of Commissioners also expresses its

kasih kepada Pemegang Saham, regulator, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada PT PII.

gratitude to the Shareholders, regulators, partners, and all other stakeholders for their continued support and trust in IIGF.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip GCG. Pengawasan yang efektif akan senantiasa diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah selaku Pemegang Saham, mitra kerja, lembaga keuangan, maupun masyarakat luas yang merasakan manfaat dari proyek-proyek yang dijamin oleh Perseroan.

The Board of Commissioners is committed to continuously performing its supervisory function independently, objectively, and accountably, in accordance with GCG principles. Effective supervision will consistently be directed towards increasing added value for all stakeholders, including the government as shareholder, partners, financial institutions, and the wider community who benefit from the projects guaranteed by the Company.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Perseroan semakin memperkuat perannya sebagai katalis pembiayaan infrastruktur berkelanjutan melalui perluasan penjaminan pada sektor-sektor prioritas, penguatan integritas proses, peningkatan kapasitas institusi dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip ESG yang terukur. Dengan tata kelola dan manajemen risiko yang solid serta strategi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Perseroan diyakini mampu terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Going forward, the Board of Commissioners expects the Company to further strengthen its role as a catalyst for sustainable infrastructure financing by expanding guarantees to priority sectors, strengthening process integrity, enhancing institutional capacity and risk management, and implementing measurable ESG principles. With solid governance and risk management, along with strategies in line with the national policy directions, the Company is confident it will continue to make a tangible contribution to economic growth and inclusive and sustainable infrastructure development.

Demikian laporan Dewan Komisaris tahun 2025 ini disampaikan. Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi Pembangunan Nasional di masa mendatang.

Thus we convey the supervisory report of the Board of Commissioners in 2025. The Board of Commissioners expects the Company to continuously grow and provide broader benefits to the National Development in the future.

Jakarta, Maret 2026
Jakarta, March, 2026

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia**



**Hadiyanto**
Komisaris Utama
President Commissioner

# Laporan Direksi
Board of Directors' Report



**Andre Permana**
Plt. Direktur Utama
Acting President Director

### Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenan, rahmat dan karunia-Nya, PT PII mampu melalui berbagai tantangan pada tahun 2025 dan tetap mencatatkan kinerja yang solid. Sepanjang tahun 2025, Perseroan fokus menjalankan mandat sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, dengan memastikan peran dan kontribusi PT PII berjalan efektif, *prudent*, dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah yang cukup dinamis dalam periode awal transisi Pemerintahan.

Di tengah dinamika ekonomi, politik dan perubahan lanskap sektor infrastruktur, Perseroan berhasil menjaga stabilitas operasional, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagai fondasi untuk mendukung keberlanjutan usaha. Kinerja tersebut turut ditopang oleh sinergi dengan pemangku kepentingan, serta kontribusi seluruh Insan PT PII dalam memastikan implementasi strategi dan program kerja terlaksana dengan baik.

Pencapaian tahun 2025 mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat posisi PT PII sebagai institusi yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

### To All Distinguished Shareholders and Stakeholders

Alhamdulillah, praise and gratitude be to Allah SWT, the God Almighty. By His grace, mercy, and blessings, IIGF was able to overcome various challenges in 2025 and continue to record solid performance. Throughout 2025, the Company focused on performing its mandate as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance, ensuring that IIGF's role and contribution were effective, prudent, and aligned with the Government's dynamic policy direction during the initial transition period.

Amid economic and political dynamics, and changes in infrastructure sector landscape, the Company managed to maintain operational stability, strengthen governance, and improve risk management quality as a foundation for supporting business sustainability. Such performance was also supported by synergy with stakeholders and the contribution of all IIGF personnel in ensuring the effective implementation of strategies and work programs.

The 2025 achievement reflects the Company's commitment to continuously providing added value to the community and stakeholders, while strengthening IIGF's position as a professional, accountable, and adaptive institution facing future challenges.

## Tinjauan Makroekonomi 2025

Tinjauan Makroekonomi 2025

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian akibat berbagai faktor eksternal seperti konflik Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, ketegangan di Asia Timur, hingga perubahan kebijakan politik di beberapa negara besar. Berdasarkan World Bank, pertumbuhan ekonomi global 2025 masih mengalami pelemahan di kisaran 2,7%, terutama dipengaruhi perlambatan perdagangan dan tekanan geopolitik. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,2%, yang menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi berlangsung tidak merata antar kawasan, di mana negara-negara maju tumbuh lebih lambat, sementara beberapa ekonomi berkembang, khususnya di Asia, menunjukkan pemulihan yang relatif lebih kuat.

Throughout 2025, the global economy remained uncertain due to various external factors, such as Russia–Ukraine conflict, conflicts in the Middle East, and tensions in East Asia, and changes in political policies in several major economies. According to the World Bank, global economic growth in 2025 remained weak at around 2.7%, primarily influenced by slowing trade and geopolitical pressures. Meanwhile, the International Monetary Fund (IMF) projected the global growth of 3.2%, indicating that economic recovery was uneven across regions, with developed countries growing more slowly, while some developing economies, particularly in Asia, showing a relatively stronger recovery.

Di kawasan ASEAN, pertumbuhan tetap resilien, konsumsi domestik dan investasi publik menjaga momentum pertumbuhan regional. Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 tumbuh sekitar 5,1% (yoy). Hal ini ditopang industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi.

Inflasi Indonesia berada di kisaran 2,92% sepanjang 2025, masih dalam target Bank Indonesia (BI) dan lebih stabil dibanding periode sebelumnya. Rupiah mengalami tekanan selama 2025 seiring ketidakpastian global, namun tetap terjaga melalui respons kebijakan BI yang mempertahankan BI-Rate pada 4,75% sebagai upaya stabilisasi. Pemerintah juga memperkuat stimulus fiskal melalui APBN, termasuk insentif perumahan dan perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, meskipun tahun 2025 diwarnai berbagai tantangan global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang koheren, sebuah fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

In the ASEAN region, growth remains resilient, with domestic consumption and public investment maintaining regional growth momentum. Indonesia also demonstrated strong resilience, marked by economic growth of around 5.1% (yoy) in the quarter IV of 2025. This was supported by manufacturing, construction, trade, and information and communications industries.

Indonesia's inflation rate remained at around 2.92% throughout 2025, within Bank Indonesia's (BI) target and more stable than the previous period. The rupiah came under pressure in 2025 due to global uncertainty, but remained stable through Bank Indonesia's policy response, which maintained the BI-Rate at 4.75% as a stabilization measure. The government also strengthened fiscal stimulus through the state budget, including housing incentives and social protection.

Overall, although 2025 was marked by various global challenges, Indonesia's economy demonstrated solid resilience, supported by coherent fiscal and monetary policies, a strong foundation for the sustainability of national infrastructure development.

# Analisis Atas Kinerja Perseroan 2025

2025 Company's Performance Analysis

## Strategi dan Kebijakan Perusahaan

Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu sebagaimana dilaporkan oleh *World Economic Forum* melalui *Global Risks Report 2025*, dunia digambarkan memasuki fase fragmentasi dan instabilitas baru yan ditandai oleh eskalasi ketegangan geopolitik, krisis lingkungan, polarisasi sosial, serta disrupsi informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi fiskal nasional harus dirancang secara adaptif, kredibel dan berbasis manajemen risiko jangka panjang, yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan dalam kebijakan fiskal yang termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Strategi kebijakan tersebut memobilisasi sumber non-APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari pendekatan pembiayaan campuran sebagai strategi mitigasi risiko fiskal dengan menggunakan penjaminan pemerintah sebagai instrumen dengan mekanisme berbagi risiko terutama dalam proyek infrastruktur jangka panjang melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

## Company's Strategy and Policy

Amidst the increasingly uncertain global dynamics, as reported by the World Economic Forum in its Global Risks Report 2025, the world was depicted as entering a new phase of fragmentation and instability, which was characterized by the escalating geopolitical tensions, environmental crisis, social polarization, and information disruption. To address these challenges, national fiscal strategy must be designed in an adaptive, credible manner, and based on long-term risk management. This strategy is implemented by the Ministry of Finance through fiscal policies contained in the 2026 Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM-PPKF). This policy strategy mobilizes non-state budget sources as development financing sources as part of a blended finance approach, designed to mitigate fiscal risk by utilizing government guarantees as a risk-sharing instrument, particularly in long-term infrastructure projects through the Public-Private Partnership (PPP) scheme.

PT PII sebagai salah satu alat fiskal Pemerintah secara efektif menurunkan *perceived risk* dan menjaga tingkat kelayakan pembiayaan proyek baik KPBU maupun non-KPBU melalui strategi alokasi dan mitigasi risiko, dengan mandat awal sebagai pelaksana penjaminan infrastruktur pada skema KPBU melalui *single window policy*, dengan ruang lingkup penjaminan atas kewajiban finansial entitas Pemerintah sebagai Terjamin berdasarkan perjanjian yang mengacu pada alokasi risiko yang wajar. Sepanjang perkembangannya, PT PII secara aktif mengembangkan inovasi proses bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dan pembangunan.

IIGF as one of the Government's fiscal tools effectively reduces perceived risk and maintains the level of project creditworthiness, both PPP and non-PPP, through risk allocation and mitigation strategies, with an initial mandate as an implementer of infrastructure guarantees in PPP scheme through a single window policy, with the scope of guarantees for the financial obligations of Government entities as Guaranteed based on agreements that refer to reasonable risk allocation. Throughout its development, IIGF actively develops business process innovations, increases the effectiveness and efficiency of services, and collaborates with various parties to encourage the acceleration of infrastructure provision and development.

Dalam periode saat ini, sejalan dengan arah kebijakan Kemenkeu, Perseroan memberikan prioritas pada proyek-proyek energi terbarukan, infrastruktur sosial dan yang terkait perubahan iklim. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) PT PII 2023–2027 sebagai strategi jangka panjang. Sejalan dengan arah kebijakan, tantangan, dan peluang tersebut, Perseroan menetapkan arah strategis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 bertema "Perluasan Layanan Penjaminan untuk Mendukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Berdampak Positif bagi Lingkungan dan Sosial." Tema ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus memperluas dukungan pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan portofolio penjaminan.

In the current period, in line with the Ministry of Finance's policy direction, the Company prioritizes renewable energy, social infrastructure, and climate change-related projects. This is outlined in IIGF's 2023-2027 Long-Term Plan (RJP) as a long-term strategy. In line with this policy direction, challenges, and opportunities, the Company has established a strategic direction in its 2025 Corporate Work Plan and Budget (WP&B) with the theme "Expanding Guarantee Services to Support Sustainable Infrastructure with Positive Environmental and Social Impacts." This theme reflects the Company's commitment to continuously expanding support for projects with significant social and environmental impacts, while maintaining the sustainability of its guarantee portfolio.

Terkait hal tersebut, PT PII menetapkan sejumlah inisiatif strategis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan, peningkatan kontribusi dan kinerjanya melalui 3 topik berikut:

In this regard, IIGF establishes a number of strategic initiatives to ensure continued growth, increased contribution, and performance through the following 3 topics:

**Strategi Penguatan *Enabler***
Enabler Strengthening Strategy

**Strategi Pengembangan Bisnis**
Business Development Strategy

**Strategi Pengelolaan Risiko**
Risk Management Strategy

Pada topik Pengembangan Bisnis, PT PII menyiapkan strategi yang berfokus pada penguatan peran penjaminan melalui perluasan sektor, pengembangan skema yang lebih adaptif, serta integrasi prinsip ESG. Di bidang penjaminan, Perseroan memperkuat mandat regulasi, mengupayakan dukungan penjaminan pada skema *refinancing* dan *asset recycling*, serta pada energi terbarukan dan pembiayaan berkelanjutan, termasuk melalui penjaminan non-KPBU. Hal ini juga diperkuat dengan penyederhanaan proses berbasis risiko melalui *Smart Hub PPP*.

In terms of Business Development, IIGF prepares strategies focusing on strengthening the role of guarantees through sector expansion, more adaptive schemes development, and ESG principles integration. In guarantee sector, the Company strengthens its regulatory mandate, seeking guarantee support for refinancing and asset recycling schemes, as well as renewable energy and sustainable financing, including through non-PPP guarantees. This is also reinforced by simplifying risk-based processes through the PPP Smart Hub.

Di bidang pendampingan, Perseroan meningkatkan kualitaspenugasan *Project Development Facilities* (PDF) dan *Project Development Advisory* (PDA) untuk memberikan dukungan dalam bentuk penyiapan struktur proyek yang *feasible* yang nantinya akan meningkatkan *bankability*, mendatangkan banyak calon mitra kerja yang berminat dalam proses penawaran, serta lebih lanjut diharapkan dapat mengoptimalkan biaya pembangunan infrasturktur. Selain itu, PT PII juga memiliki IIGF Institute yang merupakan unit *think tank* Perseroan yang berperan dalam penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui riset, edukasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis *best practices*.

In terms of mentoring, the Company enhances the quality of its Project Development Facilities (PDF) and Project Development Advisory (PDA) assignments to provide support in the form of preparing feasible project structures that will increase bankability, attract more potential partners who are interested in the bidding process, and further optimize infrastructure development costs. In addition, IIGF also has IIGF Institute, which is the Company's think tank unit that plays a role in strengthening the infrastructure financing ecosystem through research, education, and policy recommendations based on best practices.

Untuk mendukung pencapaian sasaran usaha, PT PII menerapkan strategi penguatan peran sebagai *enabler* melalui peningkatan kapasitas organisasi agar fungsi dan mandat dapat dijalankan secara lebih optimal, pengembangan kompetensi SDM melalui experiential learning yang berkelanjutan, pemutakhiran tingkat kematangan teknologi informasi.

To support the achievement of business objectives, IIGF implements strategies to enhance its role as an enabler by increasing organizational capacity to ensure optimal execution of functions and mandates, developing HR competencies through continuous experiential learning, updating information technology maturity levels.

Selain itu, PT PII juga menerapkan strategi pengelolaan risiko dengan melakukan penguatan manajemen risiko korporasi dan fungsi assurance dan konsultansi Internal Audit sebagai mitra strategis manajemen serta implementasi ESG sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas proses bisnis korporasi.

Furthermore, IIGF also applies a risk management strategy by strengthening corporate risk management and assurance and consulting functions of Internal Audit as a strategic management partner, as well as implementing ESG as part of continuous improvement efforts to support the effectiveness of corporate business process.

Dari uraian di atas, langkah dan inisiatif strategis PT PII mengarah pada upaya untuk memastikan bahwa dukungan Perseroan tidak hanya berujung pada *deliverables* proyek/ penjaminan, tetapi juga manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

In summary, IIGF's strategic steps and initiatives are directed towards ensuring that the Company's support not only results in project/assurance deliverables, but also provides sustainable benefits for the community and environment.

## Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi menjalankan peran sentral dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perseroan yang ditetapkan melalui persetujuan Direksi sesuai dengan matriks kewenangan atau keputusan Direksi baik di dalam Rapat Direksi atau secara sirkuler. Persetujuan atau keputusan Direksi dilakukan berdasarkan usulan, masukan, informasi, atau laporan dari divisi-divisi yang relevan yang juga mempertimbangkan masukan dari para Ahli Bidang seperti fungsi Manajemen Risiko, Legal, dan Tata Kelola.

Dalam ruang lingkup penjaminan, Direksi menetapkan berbagai kebijakan strategis, seperti penentuan fokus pengembangan *pipeline* baik dari sisi sektor prioritas maupun calon Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama (PJPK) yang memiliki kapasitas finansial dan komitmen yang tinggi terkait pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Direksi juga memimpin penyusunan kebijakan penyiapan proyek dan *advisory*, mencakup penetapan prioritas proyek PDF serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan proyek berjalan optimal. Direksi juga menetapkan kebijakan investasi dan strategi pengelolaan dana.

Dalam peranannya untuk merumuskan strategi dan kebijakan strategis, Direksi senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance*, seperti melibatkan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta aspek GCG lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, Direksi memaparkan perkembangan kinerja operasional dan keuangan, menyampaikan potensi *pipeline*, peluang bisnis dan evaluasi terhadap risiko utama, serta melaporkan kemajuan implementasi strategi dan program kerja. Direksi juga menjelaskan kebutuhan penyesuaian kebijakan strategis, memberikan justifikasi atas rencana investasi dan penjaminan, serta meminta arahan strategis dari Dewan Komisaris agar pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tetap berada pada koridor tata kelola dan mandat pemerintah. Melalui forum ini pula, Direksi dan Dewan Komisaris menyelaraskan pandangan terhadap prioritas bisnis, prospek proyek, serta langkah mitigasi risiko yang perlu dipertegas untuk menjaga keberlanjutan usaha.

## Board of Directors' Role in Formulating Strategies and Strategic Policies

The Board of Directors plays a central role in formulating the Company's strategies and policies, which are established through Board of Directors' approval in accordance with the authority matrix or Board of Directors' decisions, either at Board of Directors' Meetings or through circulars. Board of Directors' approvals or decisions are based on proposals, input, information, or reports from relevant divisions, including input from experts in fields such as Risk Management, Legal, and Governance.

Within the scope of guarantee, the Board of Directors established various strategic policies, such as determining the focus of pipeline development both in terms of priority sectors and candidates for the Person-in-Charge of Cooperation Agreement Responsible (PJPK) who have financial capacity and high commitment related to sustainable infrastructure development. The Board of Directors also led the formulation of project preparation and advisory policies, including determining PDF project priorities and coordination with relevant ministries/ institutions to ensure optimal project readiness. The Board of Directors also established investment policies and fund management strategies.

In its role in formulating strategic strategies and policies, the Board of Directors always prioritizes good corporate governance, such as involving stakeholders in decision-making, compliance with laws and regulations, and other GCG aspects.

In this regard,in these joint meetings with the Board of Commissioners, the Board of Directors presented operational and financial performance developments, conveyed potential pipelines, business opportunities and main risks' evaluation, as well as reported the progress of strategy implementation and work programs. The Board of Directors also explained the need for strategic policy adjustments, justified investment and guarantee plans, and requested strategic direction from the Board of Commissioners to ensure that the implementation of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) remained within the framework of good governance and government mandate. Through this forum, the Board of Directors and Board of Commissioners aligned their views on business priorities, project prospects, and risk mitigation measures that needed to be strengthened to maintain business sustainability.

## Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif, Direksi menerapkan pendekatan yang terstruktur melalui siklus *Plan–Do–Check–Act* (PDCA) yang terintegrasi dalam proses pengawasan dan pengendalian Perseroan, antara lain:

1. Tahap *Plan*, Direksi melakukan perencanaan, evaluasi proyek dan tindak lanjut operasional. Direksi memimpin pembahasan pipeline, kebutuhan dukungan dan kolaborasi terkait, evaluasi terhadap proyek-proyek yang masih berada dalam tahap *screening*, *appraisal*, *structuring*, serta proyek-proyek PDF, termasuk di dalamnya isu-isu yang berpotensi menimbulkan risiko.
2. Tahap *Do*, Direksi melaksanakan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko, di antaranya implementasi rekomendasi *Area of Improvement* hasil penilaian pelaksanaan GCG, pengendalian gratifikasi, manajemen risiko korporasi serta pemenuhan standar kepatuhan internal dan regulator. Selain itu, melakukan reviu secara berkala atas strategi investasi dan kapasitas likuiditas. Direksi memastikan ketersediaan likuiditas memadai untuk mengantisipasi potensi klaim serta memastikan portofolio investasi tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Tahap *Check*, Direksi melakukan *monitoring* berkala. Monitoring berkala dilakukan melalui Rapat Direksi dan Rapat Gabungan bersama Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi menelaah perkembangan kinerja penjaminan, PDF, *advisory*, keuangan, investasi, dan manajemen risiko. Melalui forum ini, keputusan strategis dapat diambil secara cepat dan tepat. Sebagai bentuk akuntabilitas dan fungsi pengawasan, sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan 55 kali Rapat Direksi dan 18 kali Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris.
4. Tahap *Act,* Direksi melakukan koordinasi secara aktif dengan pemangku kepentingan strategis, termasuk Kementerian Keuangan (contohnya dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)), Kementerian/ Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, investor, lenders serta Badan Usaha dan *stakeholders* terkait.

Dalam pelaksanaannya, Direksi senantiasa menjaga sinergi melalui konsultasi intensif dengan Dewan Komisaris, yang bertujuan untuk memastikan setiap langkah strategis tetap selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan mandat dari pemegang saham.

## Board of Directors' Process to Ensure Strategy Implementation

To ensure effective strategy implementation, the Board of Directors adopts a structured approach through the Plan–Do–Check–Act (PDCA) cycle, which is integrated into the Company's monitoring and control processes, including:

1. Plan Phase, The Board of Directors conducting project planning, evaluation, and operational follow-up. The Board of Directors leads the discussions on pipeline, related support and collaboration needs, and evaluations of projects still in screening, appraisal, and structuring stages, as well as PDF projects, including issues that may potentially pose risks.
2. Do Phase, The Board of Directors implementing governance and risk management policies, including implementing Area of Improvement recommendations resulting from GCG implementation assessment, gratification control, corporate risk management, and compliance with internal and regulatory compliance standards. Furthermore, periodically reviewing investment strategies and liquidity capacity. The Board of Directors ensures adequate liquidity to anticipate potential claims and ensures the investment portfolio remains in compliance with laws and regulations.
3. Check Phase, The Board of Directors periodic monitoring. Periodic monitoring is conducted through the Board of Directors' Meetings and Joint Meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners. The Board of Directors reviews the performance of guarantee, PDF, advisory, finance, investment, and risk management. Through this forum, strategic decisions can be made quickly and accurately. As a form of accountability and supervisory function, throughout 2025, the Board of Directors held 55 Board of Directors' Meetings and 18 Joint Meetings with the Board of Commissioners.
4. Phase Act, The Board of Directors actively coordinating with strategic stakeholders, including the Ministry of Finance (e.g., the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR), the Directorate General of State Assets (DJKN)), Ministries/Agencies, Regional Governments, investors, lenders, Business Entities, and related stakeholders.

In its implementation, the Board of Directors consistently maintains synergy through intensive consultation with the Board of Commissioners, aiming to ensure that every strategic step remains in line with good governance principles and shareholders' mandate.

## Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2025

Pada tahun 2025, PT PII berhasil melaksanakan program kerja sesuai dengan RKAP Tahun 2025 dan menutup tahun dengan kinerja keuangan yang *solid*. Sepanjang tahun 2025, Perseroan menjalankan mandat penjaminan dan penyiapan proyek di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang menuntut ketangguhan operasional serta ketepatan strategi. Dalam situasi tersebut, PT PII tetap mampu menjaga stabilitas kinerja, baik dari sisi keuangan maupun operasional, meskipun realisasi akhir tahun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp896,0 miliar atau 83,1% dari target, yang ditopang oleh pendapatan usaha sebesar Rp1.478,2 miliar (atau 89% dari target). Struktur pendapatan usaha terutama berasal dari pendapatan pengelolaan dana, diikuti oleh pendapatan penjaminan, pendapatan pendampingan transaksi dan penyiapan proyek serta pendapatan lainnya.

Sementara itu dari sisi biaya, Perseroan dapat menjaga disiplin pengelolaan biaya dengan realisasi beban usaha sebesar Rp536,9 miliar atau 89,6% dari target, sehingga terdapat efisiensi biaya dengan realisasi lebih rendah Rp62,6 miliar dari target yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Perseroan membukukan margin laba bersih sebesar 60,6% di bawah target 65% sehingga Perseroan perlu terus memperkuat *pipeline* proyek penjaminan untuk mendukung pencapaian pendapatan mandat utama yang lebih optimal.

Dari sisi operasional, realisasi kinerja menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun terdapat beberapa pergeseran jadwal proyek. Sepanjang 2025, PT PII melakukan *screening* terhadap 25 proyek dan memberikan pembinaan intensif untuk memastikan kesiapan menuju tahap penjaminan berikutnya. Sejumlah proyek strategis, seperti Rumah Tapak ASN IKN, Rumah Susun ASN IKN, dan APJ Kabupaten Bandung, menunjukkan perkembangan berarti dan bergerak maju ke tahapan appraisal serta penyusunan struktur penjaminan. Di sisi lain, dua proyek prioritas berhasil mencapai penandatanganan Perjanjian Penjaminan, yaitu *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) pada bulan Maret dan Tol Bogor–Serpong pada Oktober, sejalan dengan target operasional tahunan.

## Comparison of Performance Results and Target in 2025

In 2025, IIGF managed to implement its work program in accordance with the 2025 Work Plan and Budget (WP&B) and closed the year with solid financial performance. Throughout 2025, the Company fulfilled its guarantee and project preparation mandate amidst global and national economic dynamics that demanded operational resilience and strategic accuracy. Despite such situation, IIGF was able to maintain stable performance, both financially and operationally, although the year-end realization did not fully meet the target set.

In terms of financial performance, the Company recorded a net profit of Rp896.0 billion, or 83.1% of the target, supported by operating revenues of Rp1,478.2 billion (or 89% of the target). Operating revenues were primarily derived from fund management revenues, followed by guarantee revenues, transaction assistance and project preparation revenues, as well as other income.

Meanwhile, in terms of costs, the Company maintained disciplined cost management with operating expenses of Rp536.9 billion, or 89.6% of the target, resulting in cost efficiencies, with realizations of Rp62.6 billion lower than the set target.

Furthermore, the Company recorded a net profit margin of 60.6%, below the 65% target. Therefore, the Company needs to continue strengthening its guarantee project pipeline to support optimal revenue achievement for its primary mandate.

Operationally, performance realization showed significant progress despite several project schedule shifts. Throughout 2025, IIGF screened 25 projects and provided intensive coaching to ensure readiness for the next guarantee stage. A number of strategic projects, such as IKN ASN Landed Houses, IKN ASN Flats, and Bandung Regency APJ, showed significant progress and advanced to appraisal and guarantee structure development stages. Furthermore, two priority projects managed to achieve Guarantee Agreement signings: Panorama I Flyover (Sitinjau Lauik I) in March and Bogor–Serpong Toll Road in October, in line with annual operational targets.

Pada penjaminan Non-KPBU, realisasi kinerja juga berlangsung sesuai rencana, meskipun beberapa program strategis memerlukan waktu tambahan untuk penyelarasan dokumen dan evaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan. Penjaminan pembiayaan program PT PLN seperti *Green Energy Corridor Sulawesi* (GECS) serta AICET *Phase*-1 dan *Phase*-2 menunjukkan kemajuan bertahap dalam proses evaluasi dan pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Sementara itu, penjaminan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memasuki fase akhir dengan penyelesaian kewajiban jaminan dan *reversal* kontinjensi sebesar Rp85,5 miliar.

Pada aspek penyiapan proyek, Perseroan berhasil menjaga intensitas pelaksanaan PDF dengan total 7 proyek aktif yang memasuki berbagai tahapan penyusunan, mulai dari Bandara Singkawang hingga proyek layanan dasar seperti Jargas Palembang dan SPAM Kota Denpasar. Seluruh proyek ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketersediaan infrastruktur dasar dan mendorong pemerataan pembangunan serta tema Ketahanan Energi dan Ketahanan Air.

Fundamental keuangan dan operasional PT PII turut diperkuat oleh pengelolaan dana yang *prudent*. Total dana kelolaan mencapai Rp17,107 triliun, ditempatkan pada instrumen berperingkat tinggi dan mencetak pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp1.118,1 miliar. Pendapatan bunga regres menyumbang Rp10,2 miliar, dan pendapatan lainnya sebesar Rp1,4 miliar, termasuk dari kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Korporasi tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid, dengan realisasi keseluruhan mencapai 103,02%, mencerminkan efektivitas strategi dan eksekusi program kerja PT PII sepanjang tahun. Kinerja unggul ditopang oleh peningkatan nilai investasi proyek yang dijamin, keberhasilan *financial close*, serta pencapaian proyek energi terbarukan dan *creative financing*. Di sisi kelembagaan, tingkat maturitas manajemen risiko meningkat signifikan dari 3,85 menjadi 4,08, reputasi korporasi tetap stabil, dan hasil penilaian pelaksanaan praktik GCG berada pada level sangat baik. Meskipun terdapat ruang perbaikan pada aspek *employee engagement*, secara keseluruhan Perseroan menunjukkan ketahanan dan daya saing yang kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penciptaan nilai berkelanjutan.

In non-PPP guarantee sector, performance targets were also realized as planned, although several strategic programs required additional time for document alignment and joint evaluation with the Ministry of Finance. Financing guarantees for PT PLN programs, such as Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) and AICET Phase 1 and Phase 2, showed gradual progress in evaluation process and compliance with the provisions of the Minister of Finance Regulation. Meanwhile, guarantees under the National Economic Recovery Program (PEN) entered their final phase, with the settlement of guarantee obligations and contingency reversals totaling Rp85.5 billion.

In terms of project preparation, the Company managed to maintain the intensity of PDF implementation, with a total of 7 active projects entering various stages of development, ranging from Singkawang Airport to basic service projects such as Palembang Gas Network and Denpasar Water Supply System. All of these projects are part of the efforts to strengthen the availability of basic infrastructure and promote equitable development, under the themes of Energy Security and Water Security.

IIGF's financial and operational fundamentals were also strengthened by prudent investment. The total investment reached Rp17.107 trillion, invested in high-rated instruments, generating income from investments of Rp1,118.1 billion. Recourse interest income contributed by Rp10.2 billion, and other income by Rp1.4 billion, including from training and capacity building activities.

The Corporate Key Performance Indicators (KPIs) for 2025 demonstrated solid performance, with overall realization reaching 103.02%, indicating the effectiveness of IIGF's strategy and work program execution throughout the year. This excellent performance was supported by an increase in the value of guaranteed project investments, successful financial closes, and achievements in renewable energy and creative financing projects. Institutionally, the risk management maturity level increased significantly from 3.85 to 4.08, the corporate reputation remained stable, and the assessment of GCG practices was at a very good level. While there was room for improvement in employee engagement, overall, the Company demonstrated strong resilience and competitiveness in supporting infrastructure development and sustainable value creation.

# Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

## Obstacles Faced and Steps to Resolve Them

Dalam upaya mencapai target strategis, PT PII menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang kompleks di tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi perubahan dan kebutuhan penguatan regulasi terkait bisnis, sektoral dan fiskal di tingkat Pusat dan Daerah, beragamnya tingkat kesiapan sektor dan kapasitas kelembagaan terkait terhadap implementasi skema KPBU, serta meningkatnya kebutuhan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, dinamika kebijakan fiskal, ketidakpastian ekonomi global serta indikator makro turut menjadi faktor yang memengaruhi minat investasi dari badan usaha maupun investor internasional. Khusus terkait konteks pemerintah daerah, tantangan utama penyediaan infrastruktur (termasuk pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) atau pembiayaan daerah) berakar pada kapasitas SDM dan kelembagaan, struktur fiskal yang belum solid dan masih bertumpu pada dana transfer pusat. Elaborasi terkait hal ini dijelaskan lebih jauh pada tabel penjelasan di halaman selanjutnya.

In the effort to achieve strategic targets, IIGF faced a complex business environment in 2025, as outlined above. Several main challenges identified include changes and the need to strengthen business, sectoral, and fiscal regulations at central and regional levels, varying levels of sectoral readiness and institutional capacity related to PPP scheme implementation, and the increasing need for intensive coordination and synergy with various stakeholders. Furthermore, fiscal policy dynamics, global economic uncertainty, and macroeconomic indicators also influence investment interest from both business entities and international investors. Specifically in the context of local governments, the main challenges in infrastructure provision (including creative financing such as Regional Government and Business Entity Cooperation (KPDBU) or regional financing) are rooted in HR and institutional capacity, unsolid fiscal structure, and reliance on central transfer funds. These issues are further elaborated in the explanatory table on the next page.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, Perseroan mengupayakan beberapa hal sebagai inisiatif dan mitigasi yang spesifik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dalam mengupayakan sinergi eksternal, PT PII memposisikan diri sebagai fasilitator strategis. Perseroan secara aktif menjembatani komunikasi antara K/L, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menyelaraskan kepentingan dan memitigasi hambatan operasional. Pendekatan ini diperkuat melalui program sosialisasi, pendampingan dan *capacity building* yang berkelanjutan untuk membangun pemahaman bersama serta memastikan adanya komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan (termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah).

To address these challenges, the Company pursues several specific initiatives and mitigation measures, both internally and externally. For example, in pursuing external synergy, IIGF positions itself as a strategic facilitator. The Company actively bridges communication between Ministries/Institutions, up to State-Owned Enterprises (SOEs)/Regional-Owned Enterprises (BUMD) in order to align interests and mitigate operational obstacles. This approach is strengthened through ongoing dissemination, mentoring, and capacity-building programs to build shared understanding and ensure long-term commitment from all stakeholders (including the Regional People's Representative Councils (DPRD) in various regions).

Pengupayaan strategi tersebut dilakukan melalui beberapa hal, termasuk melalui *platform* kolaborasi seperti Kantor Bersama KPBU, *PPP SmartHub* untuk KPBU Skala Kecil, dukungan unit Kantor Wilayah Kemenkeu dalam Kemenkeu-1 dan lainnya. Di sisi lain, hal tersebut diupayakan juga melalui salah satu unit PT PII, IIGF Institute, sebagai pilar strategis penguatan ekosistem melalui edukasi, riset, advokasi kebijakan, dan kolaborasi. Sebagai *think tank* yang dibentuk sejak tahun 2012, IIGF Institute memiliki program kerja riset

This strategy is carried out through several means, including collaborative platforms such as Joint PPP Office, PPP SmartHub for Small-Scale PPPs, support from the Ministry of Finance's Regional Office within the Ministry of Finance-1, and others. Furthermore, this is also pursued through one of IIGF Institute's units, the IIGF Institute, as a strategic pillar for strengthening the ecosystem through education, research, policy advocacy, and collaboration. Established as a think tank in 2012, the IIGF Institute has an evidence-

berbasis bukti untuk mendukung kebijakan pembiayaan dan penjaminan yang efektif serta mendorong partisipasi swasta. Kajian bersama yang melibatkan Kemenkeu dan jaringan perguruan tinggi (UNIID) menegaskan pentingnya penjaminan pemerintah sebagai instrumen *de-risking* dan *credit enhancement*. Riset tersebut merekomendasikan penguatan regulasi komprehensif guna mempertegas peran PT PII sebagai *sovereign guarantor* dan mendorong inovasi produk penjaminan lintas sektor.

based research program to support effective financing and guarantee policies and encourage private sector participation. A joint study involving the Ministry of Finance and a network of universities (UNIID) emphasizes the importance of government guarantees as a de-risking and credit enhancement instrument. The research recommends strengthening comprehensive regulations to emphasize IIGF's role as a sovereign guarantor and encourage cross-sector guarantee product innovation.

Kajian IIGF Institute bersama talenta Kemenkeu penempatan di wilayah Timur Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi ini membatasi ruang gerak fiskal daerah, terutama ketika kebutuhan infrastruktur terus meningkat dan menuntut pembiayaan jangka panjang yang tidak sepenuhnya dapat ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, ketimpangan kapasitas fiskal antar wilayah semakin memperlebar kesenjangan pembangunan, sehingga mempertegas urgensi reformasi strategi pembiayaan daerah.

IIGF Institute study with the Ministry of Finance's talent placement in Eastern Indonesia shows that most regions are highly dependent on central government transfers. This situation limits regional fiscal flexibility, particularly as infrastructure needs continue to grow and demand long-term financing that cannot be fully supported by the Regional Budget (APBD). Furthermore, disparities in fiscal capacity between regions further widen the development gap, underscoring the urgency of reforming regional financing strategies.

Merespons kendala struktural tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) sebagai kerangka kebijakan untuk mendorong diversifikasi sumber pembiayaan. Melalui regulasi ini, pemerintah mengarahkan daerah agar tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga memanfaatkan instrumen alternatif seperti KPBU, pinjaman daerah, obligasi daerah, serta sukuk daerah. Strategi ini bertujuan memperluas kapasitas pendanaan sekaligus mendorong transformasi tata kelola fiskal daerah agar lebih inovatif, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan.

In response to these structural constraints, the government enacted Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central and Regional Governments (HKPD) as a policy framework to encourage diversification of financing sources. Through this regulation, the government directs regions to rely not solely on the Regional Budget (APBD) but also utilize alternative instruments such as PPPs (Public Private Partnership), regional loans, regional bonds, and regional sukuk (Islamic bonds). This strategy aims to expand funding capacity while simultaneously encouraging the transformation of regional fiscal governance to be more innovative, independent, and sustainability-oriented.

Namun, implementasi strategi tersebut menghadapi sejumlah kendala operasional dan kelembagaan, khususnya dalam pelaksanaan KPBU di tingkat pemerintah daerah. Pertama, komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) di daerah sering kali belum optimal, baik dari sisi penganggaran pendukung maupun kesiapan sumber daya manusia. Ketergantungan pada fasilitasi pemerintah pusat menunjukkan bahwa sebagian daerah belum sepenuhnya membangun kemandirian dalam menyiapkan proyek. Kedua, kapasitas teknis dan manajerial PJPK dalam merancang, menstrukturkan, dan mengelola proyek KPBU masih terbatas, terutama dalam aspek alokasi risiko dan penyusunan skema pembiayaan yang *bankable*. Ketiga, koordinasi lintas pemangku kepentingan kerap menjadi hambatan, karena pelaksanaan KPBU melibatkan banyak institusi dengan kepentingan dan prioritas berbeda. Keempat, banyak daerah belum secara strategis melibatkan lembaga pembiayaan sejak tahap awal penyiapan proyek, sehingga proses transaksi melambat dan opsi pendanaan menjadi terbatas.

However, the implementation of this strategy faces several operational and institutional obstacles, particularly in PPP implementation at the regional government level. First, the commitment of regional Government Contracting Agency (GCA) is often suboptimal, both in terms of supporting budgeting and human resource readiness. This reliance on central government facilitation indicates that some regions have not yet fully established their independence in project preparation. Second, GCA's technical and managerial capacity in designing, structuring, and managing PPP projects remains limited, particularly in terms of risk allocation and developing bankable financing schemes. Third, cross-stakeholder coordination often presents a barrier, as PPP implementation involves numerous institutions with differing interests and priorities. Fourth, many regions have not strategically engaged financing institutions from early stages of project preparation, resulting in slow transaction processes and limited funding options.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah perlu menempatkan penguatan kapasitas dan tata kelola sebagai strategi utama. Daerah harus memperkuat komitmen kelembagaan PJPK, meningkatkan kompetensi teknis aparatur, serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih solid dengan K/L, investor, dan lembaga pembiayaan. Selain itu, pelibatan calon kreditur atau investor sejak tahap perencanaan harus menjadi bagian dari strategi peningkatan kelayakan finansial proyek. Melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi, instrumen pembiayaan inovatif—terutama KPBU—diharapkan dapat berfungsi sebagai pengungkit transformasi pembangunan daerah, bukan sekadar alternatif pendanaan di tengah keterbatasan fiskal.

To overcome these obstacles, regional governments need to prioritize capacity building and governance as a key strategy. Regions must strengthen the institutional commitment of GCA, improve technical competence of their apparatus, and establish a more robust coordination mechanism with Ministries/Agencies, investors, and financing institutions. Furthermore, involving potential creditors or investors from the planning stage must be part of a strategy to improve project financial viability. Through a more proactive and integrated approach, innovative financing instruments—especially PPPs—are expected to serve as levers for regional development transformation, not simply as alternative funding amidst fiscal constraints.

Di samping itu, PT PII terus memperluas cakupan layanan dengan mendorong pembiayaan inovatif yang inklusif. Tidak hanya berfokus pada proyek skala besar, Perseroan kini merambah ke proyek daerah berskala kecil di tingkat kabupaten dengan mengedepankan prinsip keuangan berkelanjutan. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan, PT PII juga turut serta dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Strategi ini diwujudkan melalui pengintegrasian aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan pengembangan energi hijau. Melalui penguatan kapasitas *advisory* dan mitigasi risiko yang terukur, PT PII berkomitmen untuk terus meningkatkan daya tarik investasi infrastruktur di Indonesia, sekaligus memastikan setiap proyek memberikan dampak yang positif.

Furthermore, IIGF continues to expand its service coverage by promoting innovative, inclusive financing. Beyond focusing solely on large-scale projects, the Company currently expands to include small-scale regional projects at district level, prioritizing sustainable finance principles. As an institution under the Ministry of Finance, IIGF also supports the Indonesian government's commitment to the New and Renewable Energy (NRE) sector to reduce carbon emissions and achieve Net Zero Emission target by 2060. This strategy is realized through the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects and the development of green energy. By strengthening advisory capacity and measurable risk mitigation, IIGF is committed to continuously increasing the attractiveness of infrastructure investment in Indonesia, while ensuring that each project delivers a positive impact.

Untuk membantu merealisasikan komitmen tersebut, diperlukan strategi mengurangi risiko atau *de-risking* yang tepat agar dapat memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan, termasuk instrumen pembiayaan (termasuk penjaminan), regulasi, dan tata kelola. Saat ini, PT PII sudah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek, termasuk di antaranya beberapa PLTA milik PT PLN serta PLTP Dieng-2 milik PT Geo Dipa Energi (GDE). Kendati demikian, masih terdapat beberapa tantangan untuk pembiayaan proyek EBT di Indonesia, mulai dari kesiapan regulasi, risiko eksplorasi dan nilai investasi awal yang tinggi, risiko teknis dan sosial yang signifikan, serta skema penjaminan yang belum terbukti optimal.

To help realize this commitment, an appropriate de-risking strategy is needed to strengthen the sustainable financing ecosystem, including financing instruments (including guarantees), regulations, and governance. IIGF has currently provided guarantees for several projects, including several HPP owned by PT PLN and GPP Dieng-2 owned by PT Geo Dipa Energi (GDE). However, several challenges remain for financing renewable energy projects in Indonesia, including regulatory readiness, high exploration and initial investment risks, significant technical and social risks, and under-proven guarantee schemes.

Melalui rekomendasi seperti skema gabungan proyek, penjaminan rantai pasok, reformasi produk penjaminan eksisting yang mendukung kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL), serta reformasi tata kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan, PT PII dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong skema pembiayaan kreatif dan inovatif untuk proyek energi terbarukan.

Through recommendations such as combined project schemes, supply chain guarantees, reforms to existing guarantee products that support Power Purchase Agreements (PPA) contracts, as well as governance reforms and synergy between stakeholders, IIGF can make concrete contribution to encouraging creative and innovative financing schemes for renewable energy projects.

## Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan
Sustainable HR Management

Dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks serta dinamika lingkungan usaha yang bergerak cepat, PT PII menempatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas strategis. Talenta unggul yang dapat diandalkan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan kemajuan organisasi. Perseroan berkomitmen penuh dan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan SDM, memastikan setiap proses dijalankan dengan fokus yang baik demi mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan. SDM yang kreatif dan inovatif merupakan faktor krusial dalam bisnis penjaminan, mengingat jasa yang diberikan sangat terkait dengan penilaian dan pengetahuan yang dimiliki oleh personel yang handal dan kompeten. Peran strategis insan PT PII dalam mendukung tercapainya kinerja difokuskan pada peningkatan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), peningkatan kapabilitas organisasi, serta pembangunan strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

In facing the increasingly complex business challenges and a dynamic, fast-paced business environment, IIGF places Human Resource (HR) management as a strategic priority. Reliable and excellent talent is a crucial foundation for the organization's sustainability and progress. The Company is fully committed to and pays significant attention to HR management, ensuring that every process is executed with focus to support the achievement of overall company goals. Creative and innovative HR is a crucial factor in guarantee business, given that the services provided are closely linked to the judgment and knowledge owned by reliable and competent personnel. The strategic role of IIGF's employees in supporting performance achievement is focused on enhancing leadership skills, improving organizational capabilities, and developing competency and productivity strategies to address existing gaps.

Proses rekrutmen di Perseroan dilaksanakan secara transparan dan terbuka, tanpa diskriminasi terhadap gender, suku, agama, ras, maupun golongan tertentu, sepanjang kandidat memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Tahapan seleksi ini menjadi krusial untuk memastikan kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan serta tujuan strategis. Sepanjang tahun 2025, Perseroan senantiasa memperkuat pemenuhan formasi SDM sesuai dengan kebutuhan dengan 6 karyawan baru sehingga karyawan pada akhir 2025 tetap berjumlah 163 orang sebagaimana tahun sebelumnya.

The Company's recruitment process is conducted transparently and openly, without discrimination on the basis of gender, ethnicity, religion, race, or specific social groups, as long as the candidates meet the specified qualifications and requirements. This selection stage is crucial to ensuring candidates' fit with the Company's culture and strategic objectives. Throughout 2025, The Company continues to strengthen its human resource development program, meeting its needs with 6 new hires, and thus, its workforce was 163 at the end of 2025, similar to that of the previous year.

Melengkapi proses rekrutmen yang transparan, PT PII berkomitmen penuh pada kebijakan kesempatan yang sama dan non-diskriminatif dalam pengembangan karier dan partisipasi pelatihan. Kebijakan ini dijalankan dengan pertimbangan prestasi kerja, kemampuan, kebutuhan tugas, serta persetujuan pimpinan, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Sepanjang tahun 2025, program

Complementing this transparent recruitment process, IIGF is fully committed to a policy of equal opportunity and non-discrimination in career development and training participation. This policy is implemented based on work performance, capabilities, task requirements, and management approval, to create a conducive work environment. Throughout 2025, development programs

pengembangan telah dilaksanakan mencakup total 93 kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 244 peserta dari berbagai jenjang, di mana jenjang *Junior* menyumbang kegiatan dan peserta terbanyak, diikuti *Middle*, dan *Senior Leader*, dengan rata-rata peserta per kegiatan yang konsisten di angka 4 orang untuk semua jenjang. Selain itu, jika ditinjau dari jenis pelatihan, total 78 kegiatan melibatkan 622 peserta. *In House Training* memiliki rata-rata peserta tertinggi (35,7 peserta per kegiatan), sementara *Public Training* menyumbang jumlah kegiatan terbanyak (65 kegiatan), dengan rata-rata 1 peserta per kegiatan, sama seperti *Knowledge Sharing*.

were implemented, encompassing a total of 93 training activities attended by 244 participants from various levels. Junior Leaders accounted for the largest number of activities and participants, followed by Middle Leaders and Senior Leaders, with an average of 4 participants per activity consistently at all levels. Furthermore, by training type, a total of 78 activities involved 622 participants. In-House Training had the highest average number of participants (35.7 participants per activity), while Public Training contributed the most activities (65 activities), with an average of one participant per activity, similar to Knowledge Sharing.

PT PII memandang bahwa karyawan memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis. Guna memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan, Perseroan mengukur tingkat keterikatan mereka secara berkala melalui *Employee Engagement Survey* (EES), yang diikuti sebanyak 158 karyawan dan mencapai skor 64. Hasil survei ini digunakan sebagai landasan konstruktif, perusahaan mengidentifikasi area penguatan yang relevan serta merumuskan strategi pengembangan di tahun 2026, termasuk perbaikan dalam strategi komunikasi, mekanisme umpan balik, dan pengembangan karier untuk meningkatkan *engagement* secara signifikan.

IIGF views that employees play a crucial role in business continuity. To ensure that all employees contribute optimally to the progress, the Company periodically measures their engagement levels through the Employee Engagement Survey (EES), which was completed by 158 employees and achieved a score of 64. The survey results are used as a constructive basis for the Company to identify relevant areas for enhancement and formulate development strategies for 2026, including improvements in communication strategies, feedback mechanisms, and career development to significantly boost engagement.

PT PII juga berkomitmen untuk fokus pada pengembangan SDM sebagai investasi strategis jangka panjang untuk kesuksesan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui implementasi kebijakan *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM), yang dirancang untuk memaksimalkan potensi dan kapasitas karyawan secara terstruktur. Melalui inisiatif ini, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kesempatan untuk menyelaraskan pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis inti mereka melalui *Individual Development Plan* (IDP) yang dipersonalisasi. Fokus utama investasi SDM ini mencakup penutupan dua kesenjangan kompetensi terbanyak melalui metode *experiential learning* yang aplikatif, serta penguatan keahlian kritis di bidang Manajemen Risiko, Pengetahuan Produk, dan Manajemen Proyek. Selain itu, PT PII secara spesifik berinvestasi dalam penguatan suksesi kepemimpinan melalui program pengembangan yang ditargetkan bagi Pimpinan Divisi dan Deputi Direktur, memastikan efektivitas peran mereka sebagai pemimpin kunci dan mengamankan aset SDM terbaik perusahaan untuk masa depan.

IIGF is also committed to focusing on HR development as a long-term strategic investment for a sustainable success. This commitment is realized through the implementation of Competency-Based Human Resources Management (CBHRM) policy, designed to maximize employee potential and capacity in a structured manner. Through this initiative, the Company ensures that all employees have the opportunity to align the development of their core technical and non-technical competencies through a personalized Individual Development Plan (IDP). The primary focus of this HR investment includes closing the two largest competency gaps through applied experiential learning methods, as well as strengthening critical skills in Risk Management, Product Knowledge, and Project Management. Furthermore, IIGF specifically invests in strengthening leadership succession through targeted development programs for Division Heads and Deputy Directors, ensuring the effectiveness of their roles as key leaders and securing the Company's best HR assets for the future.

# Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment to Maintaining the Quality of Corporate Governance

Perseroan meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan membangun lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien. Penerapan GCG juga menjadi landasan bagi Perseroan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, serta bagi seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, peran organ-organ pendukung, satuan kerja pengendalian internal, fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta pengelolaan risiko dan penerapan sistem pengendalian intern.

The Company believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important foundation in maintaining business continuity and establishing a professional, transparent, integrity-based, and efficient business environment. GCG implementation also serves as the basis for the Company to increase and optimize corporate value for shareholders and all stakeholders. These principles are realized through the duty implementation of the Board of Directors and Board of Commissioners, roles of supporting organs, internal control work unit, compliance function, internal and external audits, as well as risk management and internal control system implementation.

Sepanjang tahun 2025, PT PII terus memastikan bahwa praktik GCG diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga melakukan penilaian berkala atas penerapan GCG sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015. Berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perseroan memperoleh skor sebesar 91,017% dengan predikat Sangat Baik. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan mengacu pada *best practices* untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di masa mendatang. Komitmen ini tercermin dari peningkatan skor GCG Perseroan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 90,036% pada 2023, 90,829% pada 2024, dan 91,017% pada tahun 2025.

Throughout 2025, IIGF continued to ensure that GCG practices were consistently implemented in accordance with applicable regulations. The Company also conducts periodic assessments of GCG implementation, as stipulated in Article 72 of Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015. Based on the results of the 2025 GCG assessment conducted by Financial and Development Supervisory Agency, the Company obtained a score of 91.017%, which was Very Good. Follow-up on recommendations from the assessment results is carried out on an ongoing basis by referring to the best practices to improve the quality of GCG implementation in the future. This commitment is reflected in the Company's GCG score improvement over the past three years, which reached 90.036% in 2023, 90.829% in 2024, and 91,017% in 2025.

## Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Seluruh kebijakan dan proses pengelolaan risiko disusun berdasarkan standar ISO 31000:2018, sehingga pelaksanaannya lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan praktik terbaik. Melalui kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM), 8 kategori risiko: strategis, operasional, kredit, likuiditas, pasar, hukum, kepatuhan, dan reputasi diidentifikasi, dianalisis, dinilai, dan ditangani secara tepat oleh seluruh lapisan manajemen melalui *Three Lines Model*, sehingga budaya sadar risiko dapat tumbuh konsisten di seluruh lini organisasi.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menjalankan berbagai kegiatan antara lain melakukan pemutakhiran *framework Enterprise Risk Management*, *review* dokumen proses bisnis, memvalidasi kepatuhan proses penjaminan dan penempatan

## Risk Management

The Company implements integrated risk management as a key component of corporate governance. All risk management policies and processes are developed based on the ISO 31000:2018 standard, ensuring systematic, measurable, and aligned implementation with best practices. Through the Enterprise Risk Management (ERM) framework, 8 risk categories: strategic, operational, credit, liquidity, market, legal, compliance, and reputational, are identified, analyzed, assessed, and appropriately by all levels of management through the Three Lines Mode, ensuring a consistent risk-aware culture throughout the organization.

Throughout 2025, the Company carried out various activities, including enhancement of an Enterprise Risk Management framework, reviewing business process documents, validating compliance with guarantee processes and

dana investasi, serta melakukan *compliance check* terhadap pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertentu. Selain itu, juga memfasilitasi proses identifikasi, penanganan, pemantauan, dan pelaporan risiko, mengimplementasikan *Risk Control Matrix, Risk Control Self Assessment* (RCSA), dan *Key Risk Indicators* (KRI) serta melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas SDM. Disamping itu, Perseroan mengembangkan aplikasi GRC untuk otomasi modul-modul risiko dan menjaga sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.

Guna memastikan pengelolaan risiko berjalan efektif, Perseroan melakukan evaluasi melalui integrasi aspek manajemen risiko ke dalam KPI korporasi, audit berbasis risiko, serta pemantauan dan pelaporan rutin kepada pemangku kepentingan. Pada tahun 2025, Perseroan juga menjalani penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) oleh pihak independen menggunakan model SAICORP. Hasilnya, tingkat maturitas risiko meningkat dari 3,85 (*Repeatable*) menjadi 4,08 (*Managed*). Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi dasar penyusunan *roadmap* pengembangan manajemen risiko ke depan.

Hasil penilaian maturitas manajemen risiko tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja sekaligus dasar penguatan penerapan ERM di seluruh unit kerja. Secara berkala, Perseroan memetakan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target bisnis dan kesinambungan operasional. Pada tahun 2025, Perseroan menghadapi tiga risiko utama, yaitu risiko strategis, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Risiko strategis dapat timbul dari ketidakakuratan perumusan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan strategi bisnis Perseroan, risiko likuiditas muncul dari potensi apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo secara tepat waktu, sementara risiko kredit muncul apabila pihak ketiga gagal memenuhi kewajiban keuangan kepada Perseroan. Ketiga risiko tersebut dikelola melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, pemantauan likuiditas secara berkala, serta peningkatan instrumen dan perjanjian regres. Seluruh risiko ditangani melalui mekanisme pengendalian dan pemantauan yang terstruktur, termasuk penetapan profil risiko serta *monitoring* atas progres mitigasi dan status pengendalian risiko, sehingga Direksi memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan risiko di Perseroan.

Direksi juga berkoordinasi secara rutin dengan Komite Pemantau Risiko untuk memastikan implementasi manajemen risiko berjalan efektif dan sesuai praktik terbaik. Sepanjang tahun 2025, berbagai perbaikan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi guna memperkuat

investment placements, and conducting compliance checks on goods and services procurement with a certain value. Furthermore, the Company facilitated the identification, handling, monitoring, and reporting of risks, implemented Risk Control Matrix, Risk Control Self-Assessment (RCSA), and Key Risk Indicators (KRI), and conducted dissemination, training, and certification to improve HR capacity. Furthermore, the Company developed GRC application to automate risk modules and maintained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) certification.

To ensure the effective risk management, the Company evaluates the integration of risk management aspects into corporate KPIs, risk-based audits, and regularly monitors and reports to the stakeholders. In 2025, the Company also underwent a Risk Maturity Index (RMI) assessment by an independent party by using SAICORP model. As a result, its risk maturity level increased from 3.85 (Repeatable) to 4.08 (Managed). This achievement demonstrates significant progress and serves as the basis for developing the roadmap for future risk management development.

The results of the 2025 risk management maturity assessment are used as performance evaluation material and as a basis for strengthening ERM implementation across all work units. The Company periodically maps potential risks that could impact the achievement of business targets and operational continuity. In 2025, the Company faced three main risks, namely strategic risk, liquidity risk, and credit risk. Strategic risk can arise from inaccuracies when formulating decisions, implementing and monitoring the Company's business strategy, liquidity risk arises from the potential if the Company is unable to meet its maturing financial obligations in a timely manner, while credit risk arises if a third party fails to meet its financial obligations to the Company. These three risks were managed through strengthened coordination with stakeholders, regular liquidity monitoring, and improvements to recourse instruments and agreements. All risks were addressed through structured control and monitoring mechanisms, including establishing a risk profile and monitoring mitigation progress and risk control status, providing the Board of Directors with a comprehensive overview of the effectiveness of risk management within the Company.

The Board of Directors also regularly coordinates with the Risk Monitoring Committee to ensure effective risk management implementation and adherence to best practices. Throughout 2025, various improvements were made through dissemination, training, and certification to

budaya sadar risiko. Hasil *Risk-Control Self Assessment* (RCSA) menunjukkan bahwa pengendalian risiko untuk seluruh kategori risiko di atas level rendah telah berjalan secara memadai.

Dengan demikian, penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan yang semakin baik dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengelolaan risiko Perseroan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dan semakin memperkuat kesiapan perusahaan dalam menjaga ketahanan serta keberlanjutan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

## Sistem Pengendalian Internal

Sepanjang tahun 2025 Perseroan telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara konsisten dan menyeluruh dengan mengacu pada COSO *Internal Control – Integrated Framework* 2013. Kerangka ini menjadi landasan dalam pengendalian operasional, pengendalian keuangan, dan kepatuhan, serta dituangkan dalam Pedoman Sistem Pengendalian Internal dan Kebijakan Pengelolaan Proses Bisnis Berbasis Pengendalian Internal untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan efisien, efektif, konsisten, terstandarisasi, dan sistematis. Penerapannya dilaksanakan melalui lima komponen utama COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen ini saling melengkapi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa operasi dan pelaporan keuangan Perseroan berjalan efektif serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam membangun lingkungan pengendalian, Direksi menekankan pentingnya integritas, etika, dan kompetensi, sekaligus memastikan struktur organisasi yang tepat, pendelegasian wewenang yang jelas, kebijakan SDM yang sehat, serta penguatan peran Internal Audit. Penilaian risiko dilakukan secara berkala melalui identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko internal maupun eksternal sebagai dasar penentuan langkah pengendalian. Aktivitas pengendalian dijalankan melalui prosedur dan kebijakan yang terdokumentasi, termasuk *review* kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengamanan aset, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, serta pencatatan dan dokumentasi yang memadai. Di sisi lain, informasi dan komunikasi dikelola agar dapat tersedia secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengendalian oleh seluruh unit kerja.

strengthen a culture of risk awareness. The results of Risk-Control Self-Assessment (RCSA) indicate that risk controls for all risk categories above the low level are implemented adequately.

Therefore, the implementation of risk management demonstrates an increasing level of maturity and is able to support the achievement of sustainable strategic objectives. Overall, the Company's risk management in 2025 underwent significant improvement and further strengthened the Company's readiness to maintain business resilience and sustainability amidst the ever-changing business environment.

## Internal Control System

Throughout 2025, the Company consistently and comprehensively implemented Internal Control System (SPI) based on COSO Internal Control – Integrated Framework 2013. This framework serves as the basis for operational control, financial control, and compliance, and is outlined in the Internal Control System Guidelines and Internal Control-Based Business Process Management Policy to ensure all business processes are efficient, effective, consistent, standardized, and systematic. Implementation is carried out through the five main components of COSO, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. These five components complement each other to provide reasonable assurance that the Company's operations and financial reporting are effective and comply with applicable regulations.

In establishing control environment, the Board of Directors emphasizes the importance of integrity, ethics, and competence, while ensuring an appropriate organizational structure, clear delegation of authority, sound HR policies, and strengthened role for Internal Audit. Risk assessments are conducted periodically through identification, analysis, and evaluation of internal and external risks as the basis for determining control measures. Control activities are implemented through documented procedures and policies, including performance reviews, HR development, information system controls, asset security, separation of duties, transaction authorization, and adequate recording and documentation. Information and communication are managed to ensure accurate and timely availability to support the implementation of control functions by all work units.

Pemantauan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan melalui kegiatan supervisi, rekonsiliasi, dan evaluasi terpisah oleh Internal Audit. Tindak lanjut atas rekomendasi audit dilakukan segera, objektif, dan terdokumentasi untuk memastikan pengendalian internal berjalan optimal. Dalam aspek operasional, keuangan, dan kepatuhan, Perseroan menjalankan pengendalian yang meliputi penyusunan dan penerapan SOP, pemantauan transaksi keuangan, verifikasi dan rekonsiliasi, serta pemenuhan seluruh ketentuan perundang-undangan melalui audit internal dan eksternal.

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan evaluasi *Entity Level Control* (ELC) yang mencakup evaluasi terhadap seluruh proses pengendalian tingkat entitas di PT PII dengan capaian skor hasil evaluasi sebesar 90,42 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tingkat entitas Perseroan telah dirancang dan diterapkan dengan sangat baik. Selain itu, pencapaian kinerja melalui penyelesaian tindak lanjut audit, pencegahan potensi kerugian serta penyelesaian rekomendasi auditor eksternal, pelaksanaan audit dan konsultansi sebagai *trusted advisor*, dukungan terhadap penerapan GCG, peningkatan kapabilitas, pengelolaan risiko, dan penguatan pengendalian internal dalam proses bisnis. Capaian ini mencerminkan efektivitas fungsi audit internal dalam memperkuat tata kelola dan mendukung kinerja Perseroan secara keseluruhan. Dengan hasil evaluasi serta pencapaian Perseroan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

The effectiveness of Internal Control System is monitored through supervision, reconciliation, and separate evaluation by Internal Audit. Follow-up on audit recommendations is carried out promptly, objectively, and documented to ensure optimal internal control. In operational, financial, and compliance aspects, the Company implements controls that include the development and implementation of SOPs, monitoring of financial transactions, verification and reconciliation, and compliance with all laws and regulations through internal and external audits.

In 2025, the Company conducted an Entity Level Control (ELC) evaluation that included an evaluation of all entity-level control processes at IIGF with an evaluation score of 90.42, indicating that the Company's entity-level internal control system has been designed and implemented very well. In addition, performance achievements were through completion of audit follow-up, prevention of potential loss and completion of external auditor recommendations, implementation of audits and consultancies as trusted advisors, support for GCG implementation, increased capabilities, risk management, and strengthening internal control in business process. This achievement reflects the effectiveness of internal audit function in strengthening governance and supporting the Company's overall performance, with the evaluation results and achievements of the Company as previously explained.

## Penerapan *Whistleblowing System* dan Kebijakan Anti Korupsi

Implementation of Whistleblowing System and Anti-Corruption Policy

Perseroan memiliki *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap Insan PT PII maupun pemangku kepentingan menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, maupun kebijakan internal. WBS ini diatur dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran No. CSC.003/KEB/V.02/2023, yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 19 September 2023. Sistem ini disusun untuk memastikan adanya proses penanganan pelanggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi pelapor yang beritikad baik. Saluran pelaporan tersedia melalui *website*, email, kotak surat internal, dan korespondensi resmi, sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Penerapan WBS juga menjadi bagian penting dari upaya Perseroan membangun budaya integritas. Pada tahun 2025, PT PII melaksanakan berbagai sosialisasi WBS kepada pegawai dan pemangku kepentingan, termasuk melalui acara Sosialisasi Kebijakan terkait GRC.

The Company has a Whistleblowing System (WBS) as a violation reporting mechanism that allows all IIGF personnel and stakeholders to report alleged violations of laws and regulations, the code of conduct, and internal policies. WBS is regulated by the Whistleblowing System Policy No. CSC.003/KEB/V.02/2023, signed by the Board of Directors and Board of Commissioners on 19 September 2023. This system is designed to ensure an effective, transparent, and accountable violation handling process, while providing comprehensive protection for whistleblowers in good faith. Reporting channels are available through the website, email, internal mailboxes, and official correspondence, making them easily accessible to all stakeholders. WBS implementation is also a key part of the Company's efforts to build a culture of integrity. In 2025, IIGF conducted various WBS dissemination programs for employees and stakeholders, including through GRC Policy Dissemination events. The dissemination materials covered the types of violations that could be reported, reporting procedures,

Materi sosialisasi mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, tata cara penyampaian laporan, perlindungan pelapor, dan mekanisme investigasi. Sepanjang tahun 2025 Perseroan tidak menerima laporan pelanggaran, sebagaimana tercatat dalam laporan tahun berjalan.

whistleblower protection, and investigation mechanisms. Throughout 2025, the Company received no reports of violations, as recorded in the current year's report.

Sejalan dengan penerapan WBS, Perseroan juga memiliki kebijakan anti korupsi, anti suap, dan anti pencucian uang sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 505/PMK.06/2020 dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). PT PII telah menetapkan berbagai kebijakan internal yang menjadi landasan pencegahan korupsi, yakni Pedoman Kode Etik, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, Pedoman LHKPN, serta Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran. Kebijakan ini memastikan adanya standar etika, mekanisme pengendalian, dan pedoman perilaku yang jelas bagi seluruh Insan Perseroan.

In line with the implementation of WBS, the Company also has anti-corruption, anti-bribery, and anti-money laundering policies as mandated by the Minister of Finance's Decree No. 505/PMK.06/2020 and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI). IIGF has established various internal policies that serve as the basis for corruption prevention, namely the Code of Conduct, Gratification Control Policy, ISO 37001:2016-based Anti-Bribery Management System (ABMS) Guidelines, State's Official Wealth Report (LHKPN), and Whistleblowing System Policy. These policies ensure clear ethical standards, control mechanisms, and behavioral guidelines for all Company personnel.

Untuk mendukung implementasi kebijakan anti korupsi, Perseroan menjalankan berbagai program, antara lain sosialisasi dan pelatihan, audit internal, mekanisme pengaduan, serta penerapan sanksi disipliner bagi pelanggaran. PT PII juga telah memperoleh dan mempertahankan sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 untuk lingkup pengadaan barang dan jasa. Pada tanggal 20–21 Maret 2025, Perseroan telah melalui Audit Resertifikasi SMAP. Berdasarkan hasil audit tersebut, Perseroan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk mempertahankan sertifikasi yang diperoleh, dengan masa berlaku diperpanjang hingga 29 Maret 2028.

To support the implementation of anti-corruption policy, the Company carries out various programs, including dissemination and training, internal audits, complaint mechanism, and imposition of disciplinary sanctions for violations. IIGF has also obtained and maintained ISO 37001:2016 ABMS certification for the procurement of goods and services. On 20-21 March 2025, the Company underwent ABMS Recertification Audit. Based on the audit results, the Company was declared to have met all the requirements to maintain its certification, with the validity period extended until 29 March 2028.

Pada tahun 2025, Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaporan LHKPN melalui penyediaan dokumen panduan dan fasilitasi konsultasi e-LHKPN. Untuk pelaporan periode 2024, seluruh Wajib Lapor PT PII telah menyampaikan laporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%, menunjukkan komitmen Perseroan terhadap transparansi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

In 2025, the LHKPN Management Unit provided dissemination and technical guidance regarding LHKPN reporting by providing guidance documents and facilitating e-LHKPN consultations. For the 2024 reporting period, all IIGF Mandatory Reporters submitted their wealth reports with a 100% compliance rate, demonstrating the Company's commitment to transparency and compliance with laws and regulations.

Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2025, tidak terdapat insiden korupsi yang melibatkan pegawai maupun mitra bisnis. Seluruh kegiatan pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, serta pembinaan terkait GRC juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen kuat PT PII dalam menerapkan standar antikorupsi dan menjaga integritas di seluruh proses bisnisnya.

Based on monitoring results throughout 2025, there were no incidents of corruption involving employees or business partners. All activities related to gratification control, LHKPN reporting, and GRC-related guidance also demonstrated a high level of compliance. This reflects IIGF's strong commitment to implementing anti-corruption standards and maintaining integrity throughout its business processes.

## Prospek Usaha dan Strategi Masa Depan: Mengakselerasi Transformasi Nasional

Business Prospect and Future Strategy: Accelerating National Transformation

Menyongsong tahun 2026, PT PII optimis menjaga tren pertumbuhan positif di tengah meningkatnya urgensi pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Sebagai pilar utama dalam ekosistem pembiayaan kreatif, Perseroan melihat perluasan skema KPBU sebagai peluang strategis. Hal ini didukung oleh *pipeline* proyek yang semakin matang di berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi, dan pengelolaan air, hingga infrastruktur sosial dan transformasi digital. Fokus Perseroan tetap selaras dengan visi Pemerintah, dimana percepatan infrastruktur penggerak ekonomi menjadi kunci transformasi sosial ekonomi yang inklusif.

Ke depan, PT PII memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek super prioritas pemerintah, termasuk keberlanjutan pembangunan IKN serta penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, Perseroan turut berperan dalam mempercepat pemerataan akses teknologi informasi di berbagai wilayah melalui dukungan terhadap pengembangan infrastruktur digital, antara lain pembangunan 11.558 km kabel serat optik lintas pulau serta kapasitas 150 Gbps yang melayani 14.546 titik melalui Satelit Satria-1 dan 11 stasiun bumi. Dengan pengalaman dan kapabilitas teknis yang telah teruji selama 16 tahun, Perseroan memiliki landasan kokoh dalam tata kelola risiko penjaminan dan kapasitas finansial untuk memberikan kepastian investasi bagi para mitra global maupun domestik.

Looking ahead to 2026, IIGF is optimistic in maintaining its positive growth trend amidst the increasing urgency of national priority infrastructure development. As a key pillar in the creative financing ecosystem, the Company views the expansion of PPP scheme as a strategic opportunity. This is supported by a maturing project pipeline across various sectors, from transportation, energy, and water management, to social infrastructure and digital transformation. The Company's focus remains in line with the Government's vision, in which accelerating infrastructure to drive the economy becomes a key to inclusive socio-economic transformation.

Going forward, IIGF positions itself as a strategic partner in supporting the government's super-priority projects, including IKN's sustainable development and strengthening national food security. Furthermore, the Company plays a role in accelerating equitable access to information technology across various regions through support for digital infrastructure development, including the construction of 11,558 km of cross-island fiber optic cables with a capacity of 150 Gbps, serving 14,546 points via Satria-1 Satellite and 11 ground stations. With 16 years of proven experience and technical capabilities, the Company has a solid foundation in guarantee risk governance and financial capacity to provide investment certainty for both global and domestic partners.

## Implementasi Program TJSL dan Penghargaan

CSR Program Implementation and Awards

Pada tahun 2025, PT PII melaksanakan 30 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta sosial, budaya dan keagamaan di berbagai wilayah, termasuk 3 program sinergi dengan SMV lainnya. Tingkat realisasi anggaran mencapai 92% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025, dengan jumlah program sebanyak 30 program yang mencapai lebih dari 5.000 penerima manfaat, mencakup 42 daerah penerima manfaat. Hal tersebut mencerminkan komitmen kuat Perseroan dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Di bidang pendidikan, Perseroan melaksanakan program Guru

In 2025, IIGF organized 30 Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs in the fields of education, community empowerment, environment, health, and social, cultural and religious affairs in various regions, including 3 synergy programs with other SMVs. The budget realization rate reached 92% of the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP), with a total of 30 programs reaching more than 5,000 beneficiaries. This reflects the Company's strong commitment to providing tangible benefits to the community and supporting sustainable development. In education, the Company organized Guru PIIjar program, provided scholarships for outstanding students, and conducted Digital Training and Learning in collaboration with local education

PIIjar, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta menyelenggarakan Pelatihan dan Pembelajaran Digital bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Di bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, PT PII menjalankan program renovasi MCK umum, penanaman pohon produktif, pengembangan pertanian, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata, serta program WE CARE, yaitu pengelolaan sampah berbasis *maggot*.

offices. In the environmental and community empowerment sector, IIGF conducted public toilet renovation programs, planted productive trees, developed agriculture, optimized Dewanata Integrated Waste Processing Site (TPST), and WE CARE program, a maggot-based waste management program.

Perseroan juga aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui program penanggulangan bencana di berbagai daerah, serta memberikan dukungan sosial keagamaan berupa pembangunan rumah ibadah dan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kerajinan lokal. Di sisi lain, kolaborasi lintas SMV menghasilkan program-progam berdampak jangka panjang, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di Rantau Dedap, Sumatra Selatan.

The Company also actively distributes humanitarian aid through disaster management programs in various regions and provides socio-religious support through the construction of places of worship and women's empowerment through the development of local crafts. Furthermore, cross-SMV collaboration results in programs with long-term impacts, such as the construction of Mini-Hydro Power Plant (MHPP) and community empowerment activities in Rantau Dedap, South Sumatra.

PT PII juga menyelenggarakan Program Literasi Publik & Dampak Proyek bersama Kementerian Keuangan dan TVRI untuk memperlihatkan manfaat pembangunan infrastruktur, khususnya untuk Proyek Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Madiun yang meningkatkan keamanan dan aktivitas ekonomi lokal. Perseroan turut berpartisipasi dalam Kemenkeu Mengajar 10 untuk memberikan edukasi kepada siswa mengenai peran APBN dan skema KPBU. Selain itu, Perseroan menginisiasi kegiatan Ketahanan Pangan & Dampak Sosial melalui kunjungan media ke Karawang yang menyoroti keberhasilan inovasi pertanian organik dengan varietas padi Inpari sebagai upaya peningkatan pendapatan petani dan pencegahan *stunting*.

IIGF also holds Public Literacy & Project Impact Program with the Ministry of Finance and TVRI to demonstrate the benefits of infrastructure development, particularly in Public Street Lighting Project in Madiun Regency, which improves security and local economic activity. The Company participates in Kemenkeu Mengajar 10 program to educate students about the role of the State Budget (APBN) and PPP scheme. Furthermore, the Company initiates Food Security & Social Impact activity through media visits to Karawang, highlighting the success of organic farming innovation using Inpari rice varieties as an effort to increase farmer income and prevent stunting.

Secara keseluruhan, program TJSL tahun 2025 berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan di berbagai wilayah. Kinerja keberlanjutan Perseroan semakin diakui melalui berbagai apresiasi. Pada tahun 2025, PT PII berhasil meraih penghargaan *Silver Winner* untuk Kategori Inovasi Sosial pada *Environmental & Social Innovation Awards* (ENSIA) 2025 sebagai apresiasi atas transparansi serta akuntabilitas Perseroan untuk komitmen terhadap pembangunan keberlanjutan. Selain itu PT PII juga mendapatkan penghargaan *Gold Champion* pada Bisnis Indonesia CSR *Awards* 2025 yang digelar oleh Bisnis Indonesia, sebagai bukti nyata kemampuan PT PII dalam menjalankan program TJSL yang menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

Overall, the 2025 CSR programs were effective and made a tangible contribution to the communities' quality of life, local economy enhancement, and environmental sustainability in various regions. The Company's sustainability performance is increasingly recognized through various awards. In 2025, IIGF received the Silver Winner award in the Social Innovation Category at the 2025 Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA), recognizing the Company's transparency and accountability in its commitment to sustainable development. Furthermore, IIGF also received the Gold Champion award at the 2025 Bisnis Indonesia CSR Awards, held by Bisnis Indonesia, demonstrating IIGF's ability to implement CSR programs that create positive, sustainable change.

## Komite di Bawah Direksi
Committees Reporting to the Board of Directors

Perseroan membentuk komite di bawah Direksi untuk mendukung pengambilan keputusan pada area yang memerlukan kompetensi khusus. Salah satu komite tersebut adalah Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI), yang bertugas memastikan kebijakan dan inisiatif TI selaras dengan strategi bisnis, memantau implementasi program TI, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan keandalan pengelolaan teknologi informasi di Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Komite Pengarah TI mengadakan rapat kerja secara berkala untuk membahas kemajuan program, mengevaluasi efektivitas kebijakan TI, dan menyelesaikan isu-isu strategis di bidang teknologi informasi.

The Company establishes committees reporting to the Board of Directors to support decision-making in areas requiring specialized competencies. One such committee is the Information Technology (IT) Steering Committee, in charge of ensuring IT policies and initiatives in line with business strategy, monitoring IT program implementation, and providing strategic recommendations to improve the effectiveness and reliability of information technology management within the Company. The IT Steering Committee holds regular working meetings to discuss program progress, evaluate the effectiveness of IT policies, and resolve strategic issues in information technology sector.

## Perubahan Komposisi Direksi
Perubahan Komposisi Direksi

Pada tanggal 20 Juni 2025 Sdr. M. Wahid Sutopo mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemegang Saham kemudian menetapkan KMK No. 225 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025, yang menjadi dasar pemberhentian beliau sebagai anggota Direksi. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Sdr. Andre Permana yang tengah menjabat sebagai Direktur Bisnis, untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama melalui SK-006/KOM/0725 tanggal 15 Juli 2025.

On June 20, 2025, Mr. M. Wahid Sutopo resigned from his position as President Director. Furthermore Shareholders then stipulated KMK No. 225 of 2025 dated 15 July 2025, which served as the basis for his dismissal as member of the Board of Directors. Following this decision, the Board of Commissioners mandated Andre Permana, currently serving as Business Director, to serve as Acting President Director through the Decision Letter SK-006/KOM/0725 dated 15 July 2025.

Dengan demikian, hingga 31 Desember 2025 susunan Direksi adalah:
Andre Permana : Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama
Donny Hamdani : Direktur Keuangan.

Therefore, until 31 December 2025, the composition of the Board of Directors was as follows:
Andre Permana : Business Director concurrently serving as Acting President Director
Donny Hamdani : Finance Director.

Direksi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sdr. M. Wahid Sutopo atas seluruh dedikasi dan kontribusinya selama memimpin Perseroan. Fondasi dan arah strategis yang ditinggalkan menjadi landasan penting bagi Perseroan untuk terus berkembang. Direksi berkomitmen menjaga soliditas, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kelanjutan berbagai program prioritas, sehingga perjalanan transformasi dan pertumbuhan kinerja Perseroan dapat terus berlanjut dengan baik.

The Board of Directors expresses its deepest appreciation to Mr. M. Wahid Sutopo for his dedication and contributions during his leadership of the Company. The foundation and strategic direction he left behind provide a crucial foundation for the Company's continued growth. The Board of Directors is committed to maintaining solidarity, strengthening collaboration, and ensuring the continuation of various priority programs, so that the Company's transformation journey and performance growth can continue smoothly.

# Apresiasi
## Appreciation

Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sepanjang 2025. Kepada Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan atas arahan dan kerja sama yang konstruktif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra usaha, regulator, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjadikan PT PII sebagai entitas utama dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan melalui skema pembiayaan inovatif dan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Dengan semangat menginspirasi melangkah bersama, menuju masa depan berkelanjutan. Kami percaya, dengan semangat untuk terus menginspirasi dan melangkah bersama, PT PII akan menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia, masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude to the Shareholders for their trust and support throughout 2025. To the Board of Commissioners, we would like to express our appreciation for their guidance and constructive cooperation. We also would like to express our gratitude to all employees, business partners, regulators, and stakeholders who have contributed to the Company's performance. We look forward to continuing to collaborate with various parties to make IIGF a leading entity in supporting efforts to accelerate infrastructure development and sustainable development through innovative financing schemes and broad benefits for the community. With the spirit of inspiring, we move forward together, towards a sustainable future. We believe that with this spirit of continuing to inspire and move forward together, IIGF will be a vital part of Indonesia's future—a future that is more advanced, inclusive, and sustainable.

Jakarta, Maret 2026
Jakarta, March, 2026

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia**

**Andre Permana**
Plt. Direktur Utama
Acting President Director

# Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

## Statement of Accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2025 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has been presented in full and we shall be fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement was made with actual.

Jakarta, Maret 2026
Jakarta, March, 2026

**Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

**Hadiyanto**
Komisaris Utama
President Commissioner

**Ferry Irawan**
Komisaris
Commissioner

**Bhimantara Widyajala**
Komisaris
Commissioner

**Direksi**
Board of Directors

**Andre Permana**
Plt. Direktur Utama
Acting President Director

**Andre Permana**
Direktur Bisnis
Business Director

**Donny Hamdani**
Direktur Keuangan
Finance Director

# Profil Perusahaan

## Company Profile




WASKITA

# Informasi Umum Perseroan

General Information of the Company

## Nama Perusahaan
**Company Name**

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

## Jenis/Badan Hukum Perusahaan
**Company's Type/Legal Entity**

Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
Limited Liability Company, as a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance.

## Tanggal Pendirian
**Date of Establishment**

30 Desember 2009
30 December 2009

## Kepemilikan
**Ownership**

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (100%).
All Company's shares are owned by the Republic of Indonesia (100%).

## Pencatatan Di Bursa
**Listing on the Exchange**

Perseroan merupakan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun.
The Company is a state-owned enterprise that has not listed on any stock exchange.

## Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
**Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar**

1. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 10 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0031006 tanggal 24 Februari 2023.

1. Deed of Establishment of Limited Liability Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Number 29 dated 30 December 2009, drawn up before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., a Notary in Jakarta, as amended by Deed of Amendment Number 14 dated 14 January 2010, drawn up before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., a Notary in Jakarta, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU 04444.AH.01.01.Tahun 2010 dated 27 January 2010 on the Ratification of the Company's Legal Entity.
2. The last amendment to the Articles of Association was under Deed of Shareholders' Resolution of Limited Liability Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Number 10 dated 24 February 2023, drawn up before Arry Supratno S.H., a Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia under the Letter of Acceptance of Notification of Changes to the Company Data of PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Number AHU-AH.01.03-0031006 dated 24 February 2023.

## Kegiatan Bisnis Utama sesuai Anggaran Dasar
## Main Business Pursuant to the Articles of Association

- Memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
- Memberikan Penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah; dan
- Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat maupun daerah.
- Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
- Providing Sovereign Guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on government assignments; and
- Conducting activities related to the Government Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the central and local national economy.

## Modal Dasar
## Authorized Capital

Rp20.000.000.000.000
yang terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham.
Rp20,000,000,000,000 consisting of 20,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

## Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
## Issued and Fully Paid Up Capital

Rp10.655.000.000.000 yang terdiri dari 10.655.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham.
Rp10,665,000,000,000 consisting of 10,655,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

## Media Sosial
## Social Media

- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
- @pii_persero
- @PII_Persero
- @pii_persero

## Email
## Email

info@iigf.co.id

## Situs *Website*
## Website

www.ptpii.co.id

PT PII

## Jumlah Karyawan
## Number of Employees

163

## Sekretaris Perusahaan
## Corporate Secretary

**Rian Ditha Prasetianti**
Division Head of Corporate Secretary and Communication

rian.ditha@iigf.co.id
+62 21 5795 0550

## Alamat Kantor Pusat
## Head Office Address

Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No. Kav 18
RT.6/RW.1, Kuningan Barat
Kec. Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550
+62 21 5795 0040

# Identitas dan Makna Logo Perseroan

Corporate Logo Identity and Meaning

**Identitas PT PII tercermin dalam Logo Perseroan yang merepresentasikan nilai-nilai inti dan mandat Perseroan. Logo ini dirancang dengan ide dasar kerajinan anyaman yang melambangkan peran PT PII sebagai jembatan penggerak percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.**

The identity of IIGF is reflected in the Company's logo, which represents the core values and mandate of the Company. The logo was designed based on the concept of woven craftsmanship, symbolizing the role of IIGF as a bridge that drives the acceleration of infrastructure development in Indonesia.

PT PII

**Warna Biru pada logo mengandung makna:**

*Trust* (terpercaya), *responsibility* (tanggung jawab) dan *strength* (kekuatan). Warna tersebut merepresentasikan PT PII sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan profesional untuk mewujudkan visi PT PII.

**The Blue color in the logo signifies:**

Trust, responsibility, and strength. The color represents IIGF as a trustworthy, responsible, and professional company in realizing IIGF's vision.

**Warna Hijau pada logo mengandung makna:**

*Growth* (pertumbuhan), *financial* (keuangan), *harmony* (keseimbangan, keselarasan) dan *environment* (lingkungan; masyarakat). Warna tersebut sejalan dengan misi PT PII

**The Green color in the logo signifies:**

Growth, financial strength, harmony (balance and alignment), and the environment (environment; society). The color aligns with IIGF's mission

# Riwayat Singkat Perseroan

Company's Brief History

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah genap berusia 16 tahun pada akhir tahun 2025 dan selama ini telah menjalankan mandat-mandatnya secara efektif dan berkontribusi kepada pembangunan nasional. Tingkat bangkitan investasi untuk tiap 1 Rupiah PMN PT PII (*leverage*) mencapai 70,5x.**

Indonesian Infrastructure Guarantee Fund was 16 years old at the end of 2025 and has effectively fulfilled its mandate and contributed to national development. The investment generation rate for every 1 Rupiah of IIGF's PMN (leverage) reached 70.5x.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 30 Desember 2009 dan ditugaskan sebagai pelaksana layanan satu pintu (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres 38/2015"). Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Agar KPBU dapat berjalan baik, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan penjaminan infrastruktur diatur melalui PMK No. 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/ atau Skema Pembiayaan Lainnya ("PMK 68/2024"), untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya sebagaimana diatur dalam perjanjian KPBU. Peran PT PII diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is a State-Owned Enterprise (SOE) established by the Government of the Republic of Indonesia on 30 December 2009, and mandated to serve as a single window in evaluating, structuring guarantees, and providing guarantees for infrastructure projects under the Public-Private Partnership (PPP) scheme. As the legal basis for the implementation of PPP, the Government issued Presidential Regulation Number 38 of 2015 on Public-Private Partnership (PPP) in Infrastructure Provision ("Perpres 38/2015"). The implementation of PPP scheme is intended to meet sustainable financing needs for infrastructure provision by mobilizing private sector funding, to ensure the delivery of quality, effective, efficient, targeted, and timely infrastructure, and to create an investment climate that encourages private sector participation in infrastructure development based on sound business principles.

In order for PPP to run well, the Government of the Republic of Indonesia provides infrastructure guarantee support regulated under PMK No. 68 of 2024 on Government Support for Infrastructure Financing Through Government and Business Entity Cooperation Schemes and/or Other Financing Schemes ("PMK 68/2024"), to provide certainty to the private sector regarding the commitment of the Cooperation Project Manager (PJPK) in fulfilling its financial obligations as stipulated in the PPP agreement. IIGF's role is expected to be able to increase certainty in obtaining financing (financial close) for projects by increasing the

melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah. PT PII sebagai BUMN yang dirancang Pemerintah untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel melalui tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, *framework* yang akuntabel serta didukung dengan transparansi, profesionalisme, dan independensi.

creditworthiness or bankability of PPP projects, while maintaining the interests of the Government, especially regarding contingent obligations that may arise to the Government. IIGF is an SOE designed by the Government to become a credible guarantee institution through good corporate governance, risk management, an accountable framework and supported by transparency, professionalism, and independence.

Pada tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 50/2016"). Melalui PP 50/2016, PT PII memperoleh perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur di luar skema KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur ("PMK 101/2018").

In 2016, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation Number 50 of 2016 on Amendments to Government Regulation Number 35 of 2009 on State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Companies (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector ("PP 50/2016"). Through PP 50/2016, IIGF obtained an expanded mandate to be able to provide government guarantees for infrastructure projects outside the PPP scheme. This expanded mandate was followed up with the issuance of Minister of Finance Regulation Number 101 of 2018 on Procedures for Providing and Implementing Joint Government Guarantees or Through Infrastructure Guarantee Business Entities against the Risk of Default from State-Owned Enterprises that Undertake Loans and/or Issuance of Bonds to Finance Infrastructure Provision ("PMK 101/2018").

Sejak tahun 2018, PT PII juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 yang telah mengalami beberapa kali pergantian terakhir melalui PMK 68/2024. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha PT PII menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada penjaminan, tetapi juga mencakup kegiatan pendampingan proyek, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Since 2018, IIGF has also been assigned by the Ministry of Finance to provide assistance in the preparation and implementation of infrastructure project transactions under the PPP scheme, as stipulated in Minister of Finance Regulation Number 73/PMK.08/2018, which has been amended several times, most recently through PMK 68/2024. Thus, the scope of IIGF's business activities has expanded, extending beyond guarantees to include project assistance activities, from the preparation stage to transaction execution.

Pada tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat dan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai akibat pandemi Covid-19, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 55/2020"). Melalui PP 55/2020 tersebut, Pemerintah memberikan perluasan mandat kepada

In 2020, to support the Government's policy of meeting the increasing need for government guarantees and to support state financial policies, including the National Economic Recovery (PEN) program due to the impact of the Covid-19 pandemic, the Government issued Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2020 on the Second Amendment to Government Regulation Number 35 of 2009 on State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Companies (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector ("PP 55/2020"). Through PP 55/2020, the Government provides an expanded mandate to IIGF so that the purposes




PT PII sehingga maksud dan tujuan usaha PT PII menjadi semakin luas, yaitu sebagai berikut:

- Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur;
- Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
- Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Perluasan mandat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar PT PII. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK.06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"), Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham, menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT PII yang mencakup perubahan maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, serta penambahan modal dasar Perseroan

and objectives of IIGC's business become broader, as follows:

- Providing sovereign guarantees (sovereign guarantees) in the infrastructure sector;
- Carrying out activities related to the implementation of sovereign guarantees and other activities related to the implementation of project development that supports the national economy; and
- Providing sovereign guarantees (sovereign guarantees) in financing in other sectors besides infrastructure based on government assignments.

The expansion of mandate was then followed up with amendments to IIGF's Articles of Association. Under the Decree of the Minister of Finance Number 497/KMK.06/2020 on Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"), the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, representing the Government of the Republic of Indonesia as Shareholder, approved the amendments to IIGF's Articles of Association, which included changes to the Company's purposes and



menjadi sebesar Rp20 triliun. Keputusan tersebut kemudian dinyatakan dalam Akta No. 14 tanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.Tahun 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Menindaklanjuti peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun, pada tanggal 30 Desember 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("PP 79/2020") yang menjadi dasar tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PII sebesar Rp1,57 triliun. Penambahan PMN tersebut telah dicatatkan sebagai modal disetor PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.06/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) PT PII ("KMK 61/2021"), yang kemudian dinyatakan dalam Akta

objectives, the Company's business activities, and the increase in the Company's authorized capital to Rp20 trillion. This decision was then stated in Deed No. 14 dated 19 November 2020, drawn up before Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.Tahun 2020 dated 19 November 2020.

Following up on the increase in the Company's authorized capital to Rp20 trillion, on 30 December 2020, Government Regulation Number 79 of 2020 on the Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PP 79/2020") was issued, which serves as the basis for the additional State Capital Participation (PMN) to IIGF amounting to Rp1.57 trillion. The additional PMN has been recorded as IIGF's paid-up capital based on the Decree of the Minister of Finance Number 61/KMK.06/2021 on the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital and Amendments to the Articles of Association of the Company (Persero) of IIGF ("KMK 61/2021"), which was then stated in the Notarial

Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 9 Maret 2021 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0167178 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia tanggal 16 Maret 2021.

Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 4 dated 9 March 2021 and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Letter No. AHU-AH.01.03-0167178 regarding Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association of the Company (Persero) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia dated 16 March 2021.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan dan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah, maka pada tanggal 12 Desember 2022 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Penambahan PMN ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PT PII Tahun Anggaran 2022.

To improve the Company's capital structure and enhance its business capacity, and to accelerate the development of government infrastructure projects, Government Regulation Number 53 of 2022 was enforced on 12 December 2022, on the Increase in State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). The increase in State Capital Participation (PMN) to the share capital of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) is sourced from the 2022 State Budget, as stipulated in the Detailed State Budget of IIGF for Fiscal Year 2022.

Hingga 31 Desember 2025, kinerja Perseroan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana Perseroan telah menjamin 60 proyek yang terdiri dari 51 proyek penjaminan infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU serta 9 proyek penjaminan non-infrastruktur. Total nilai investasi proyek yang telah dijamin adalah sebesar Rp705 triliun, dengan jumlah eksposur atas proyek yang dijamin sebesar Rp109 triliun dan *gearing ratio* 6,6 kali. Jumlah proyek yang dijamin oleh Perseroan telah mengalami peningkatan hingga 13,21% dari tahun sebelumnya dengan total peningkatan investasi sebesar 18,82%. Sedangkan untuk penjaminan dalam rangka program PEN, total nilai penjaminan mencapai Rp1,5 triliun, dengan jumlah eksposur atas proyek yang dijamin sebesar Rp4,5 triliun, dan *gearing ratio* 2,9 kali.

Until 31 December 2025, the Company's performance experienced significant improvement, with the Company guaranteeing 60 projects, consisting of 51 infrastructure guarantee projects under PPP and non-PPP schemes, and 9 non-infrastructure guarantee projects. The total investment value of the guaranteed projects is Rp705 trillion, with total project exposure of Rp109 trillion and a gearing ratio of 6.6 times. The number of projects guaranteed by the Company increased by 13.21% compared to the previous year, with a total investment increase of 18.82%. Meanwhile, guarantees under the National Economic Recovery (PEN) program reached a total value of Rp1.5 trillion, with a total project exposure of Rp4.5 trillion and a gearing ratio of 2.9 times.

## Informasi Perubahan Nama dan Status Badan Hukum Perseroan

Information on Changes in the Company's Name and Legal Status

Sejak didirikan pada 30 Desember 2009 melalui Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29, Perseroan tidak pernah mengalami perubahan nama maupun status badan hukum.

Since its establishment on 30 December 2009 through the Deed of Establishment of the Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Number 29, the Company has never undergone any change in its name or legal entity status.

# Jejak Langkah
## Milestone

## 2009

### Pembentukan Perseroan
**Company's Establishment**

Pada 30 Desember 2009 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) resmi didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

On 30 December 2009, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) was officially established by the Government of the Republic of Indonesia as a State-Owned Enterprise (SOE) through State Equity Participation of the Republic of Indonesia amounting to Rp1 trillion, in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector.

## 2010

### Peresmian Operasional Perseroan
**Inauguration of the Company's Operations**

Pada 11 Mei 2010 Menteri Keuangan melakukan peresmian PT PII yang menandai dimulainya operasional Perseroan dengan mandat menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

On 11 May 2010, the Minister of Finance inaugurated IIGF, marking the beginning of the Company's operations with a mandate to provide guarantees for infrastructure projects under PPP scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia.

### Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010
**Presidential Decree No. 78/2010 and PMK 260/2010**

Pada 21 Desember 2010 diterbitkan Perpres No. 78/2010 dan 31 Desember 2010 diterbitkan PMK No. 260/2010 yang menjadi pedoman bagi Perseroan untuk menjamin proyek infrastruktur dan mengokohkan keberadaan Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

On 21 December 2010, Presidential Decree No. 78/2010 was issued. On 31 December 2010, PMK No. 260/2010 was also issued. Both are a guideline for the Company to guarantee infrastructure projects and strengthen the Company's existence as an Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI).

### Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)
**Increased State Equity Participation (PMN)**

Pemerintah RI melakukan penambahan PMN ke dalam modal saham PT PII sebesar Rp1 Triliun, merujuk pada PP No.88/2010.

The Government of the Republic of Indonesia increased State Equity Participation (PMN) in the share capital of IIGF by Rp1 trillion, referring to PP No. 88/2010.

## 2011

### Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
**Memorandum of Understanding between the Company and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)**

Pada 24 Januari 2011 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam rangka mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama.

On 24 January 2011, an Memorandum of Understanding was signed between the Company and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) to promote infrastructure investment via various joint activities.

### Acuan Alokasi Risiko
**Risk Allocation References**

Pada 31 Maret 2011 Perseroan menerbitkan Dokumen Acuan Alokasi Risiko Edisi Pertama yang berisi acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

On 31 March 2011, the Company published the First Edition of the Risk Allocation Reference Document, which contains references regarding the categories and distribution of infrastructure risks as a reference for parties involved in infrastructure projects under the PPP scheme.

### Penandatanganan Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah
**Signing of Guarantee for the Central Java Power Plant (CJPP)**

Pada 6 Oktober 2011 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek dengan skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah dengan menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh Perseroan dan Kementerian Keuangan RI.

On 6 October 2011, the Company signed a Guarantee Agreement for the 2 x 1,000 MW Central Java Power Plant (CJPP) project in Batang, Central Java. This project is the first PPP project that was successfully realized by the Government using joint guarantee facilities by the Company and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

## 2012

### Penambahan PMN PT PII
**Increased State Equity Participation (PMN) for IIGF**

Pada tanggal 10 Agustus 2012, PT PII kembali menerima penambahan PMN dengan jumlah sebesar Rp 1 triliun melalui PP No. 68/2012.

On 10 August 2012, IIGF received an additional State Capital Participation (PMN) amounting to Rp1 trillion through PP No. 68/2012.

### IIGF Institute

Peluncuran IIGF Institute dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perseroan dengan 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

Launching of the IIGF Institute and Signing of a Memorandum of Understanding between the Company and three (3) universities, i.e., the University of Indonesia, Institut Teknologi Bandung, and Gadjah Mada University, regarding a program to increase stakeholders' understanding and capacity on infrastructure provision.

## 2013

### Peningkatan Kapitalisasi Penjaminan dan Pengakuan Peringkat Kredit
**Guarantee Capitalization Increase and Credit Rating Recognition**

Pada awal tahun 2013 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank senilai USD25 juta dan implementasi *Co-Guarantee* dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan. Di samping itu Perseroan juga mendapatkan Peringkat Kredit BBB- (*outlook* stabil) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.

In early 2013, the Company obtained a loan from the World Bank amounted to USD25 million and implemented a Co-Guarantee with MIGA amounted to USD50 million to increase guarantee capacity. In addition, the Company also received a BBB- (stable outlook) Credit Rating from Fitch Rating, an international financial rating agency, equivalent to the Government of Indonesia's rating, which recognized the Company's financial capacity and performance.

## 2014

### Kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin
**Collaboration with Sriwijaya University and Hasanuddin University**

Pada 18 Agustus 2014 dan 17 Oktober 2014 Perseroan melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin, untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

On 18 August 2014 and 17 October 2014, the Company, via the IIGF Institute, signed a Memorandum of Understanding with Sriwijaya University and Hasanuddin University, for cooperation in the fields of education, research, community service, capacity building, and partnerships in environmental, social, and community development.

## 2015

### Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015
**Presidential Regulation No. 38 of 2015**

Pada 20 Maret 2015 diterbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai upaya memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin Perseroan menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

On 20 March 2015, Presidential Regulation No. 38 of 2015 on the Public Private Partnership in Providing Infrastructure was issued, as an effort to expand the PPP scheme infrastructure project sector that can be guaranteed by the Company, up to 19 sectors which include the social infrastructure sector.

### PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)
**SPP Batang Central Java (CJPP)**

Pada 28 Agustus 2015 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan proyek PLTU Batang Jawa Tengah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, PT PLN, Perseroan dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari Perseroan.

On 28 August 2015, President Joko Widodo did the groundbreaking for the construction of the Central Java Batang SPP project, accompanied by the Minister of Finance, the Minister of SOEs, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Governor of Central Java, Regent of Batang, PT PLN, the Company, and developer investors. This project was the first PPP project in the electricity sector that received guarantees from the Company.

### Pembentukan UNIID
**UNIID Establishment**

Pada 16 Desember 2015 Perseroan melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja Antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID). Pembentukan jaringan ini menjadi forum bagi para akademisi untuk berkontribusi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

On 16 December 2015, the Company, via the IIGF Institute, facilitated the establishment of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). The establishment of this network provides a forum for academics to contribute to encouraging the national infrastructure development.

## 2016

### Proyek Palapa Ring Paket Barat
**West Palapa Ring Project**

Pada 29 Februari 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Barat oleh Perseroan dan PT Palapa Ring Paket Barat selaku Badan Usaha, dan antara Perseroan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK. Penandatanganan dokumen perjanjian proyek ini merupakan proyek pertama KPBU di sektor telekomunikasi. Selanjutnya, pada 25 Juli 2016 *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat dapat tercapai.

On 29 February 2016, the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the West Palapa Ring project were signed by the Company and PT Palapa Ring Barat as the Business Entity, and between the Company and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA. The signing of this agreement document marks the first PPP project in the telecommunications sector. Subsequently, on 25 July 2016, the Financial Close of the West Palapa Ring Project was successfully achieved.

### Proyek Palapa Ring Paket Tengah
**Central Palapa Ring Project**

Pada 4 Maret 2016 dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah oleh Perseroan dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK. Pada 29 September 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Paket Tengah.

On 4 March 2016, the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Central Palapa Ring project were signed by the Company and PT Len Telekomunikasi Indonesia as the Business Entity, and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA. On 29 September 2016, the Financial Close for Central Palapa Ring Project was carried out.

### Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 4 Jalan Tol
**Signing of Guarantee Agreement for 4 Toll Road**

Pada 27 April 2016 dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan proyek Jalan Tol Batang-Semarang, yang merupakan proyek pertama KPBU di sektor jalan tol yang berhasil dijamin oleh Perseroan. Selanjutnya di tahun 2016 juga dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian untuk 3 proyek jalan tol lainnya, yaitu Jalan Tol Balikpapan- Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung.

On 27 April 2016, the guarantee agreement for Batang-Semarang Toll Road project was signed, marking the first PPP project in the toll road sector successfully guaranteed by the Company. Subsequently, in 2016, agreements were signed for 3 other toll road projects: Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, and Manado-Bitung Toll Roads.

### Proyek SPAM Umbulan
**SPAM Umbulan**

Pada 21 Juli 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara Perseroan dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjamin Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan proyek pertama KPBU di sektor air minum yang dijamin oleh Perseroan. Selanjutnya, pada 30 Desember 2016 *Financial Close* Proyek SPAM Umbulan dapat tercapai.

On 21 July 2016, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta, and a Resource Agreement with the Governor of East Java to guarantee the Umbulan Drinking Water Supply System (SPAM) Project. This project represents the first Public–Private Partnership (PPP) project in the drinking water sector guaranteed by the Company. Subsequently, on 30 December 2016, the Financial Close of the Umbulan Water Supply System Project was successfully achieved.

## 2017

### Proyek Central Java Power Plant (CJPP)
**Central Java Power Plant (CJPP) Project**

Pada 6 Juni 2016 telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek CJPP yang berlokasi di Batang Jawa Tengah.

On 6 June 2016, the financial close stage was reached for CJPP project located in Batang, Central Java.

### Perluasan Mandat Perseroan
**Company's Mandate Expansion**

Pada 7 November 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, mandat Perseroan diperluas sehingga Perseroan dapat memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur di luar skema KPBU.

On 7 November 2016, Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector. The issuance of amendment to this Regulation expands the Company's mandate to be able to guarantee infrastructure projects outside the PPP scheme.

### Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 6 Jalan Tol
**Signing of Guarantee Agreement for 6 Toll Roads**

Pada 22 Februari 2017 dan Desember 2017 Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah total 6 (enam) proyek Jalan Tol yaitu: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta- Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo-Banyuwangi; dan (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

On 22 February 2017 and December 2017, the Company signed six (6) guarantee agreements for Toll Roads projects: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta-Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo-Banyuwangi; and (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

## 2018

### Penjaminan Proyek SPAM Bandar Lampung
**SPAM Bandar Lampung Project Guarantee**

Pada 14 Februari 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Regres proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung.

On 14 February 2018, the Company signed a Guarantee and Recourse Agreements for the Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project.

### Penjaminan Proyek SPAM Semarang Barat
**SPAM West Semarang Project Guarantee**

Pada 23 November 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

On 23 November 2018, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the SPAM West Semarang Project.

### Penjaminan Proyek KEK Mandalika
**Mandalika SEZ Project Guarantee**

Pada 28 Desember 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok. Perjanjian ini menjadi tonggak penting (*milestone*) bagi Perseroan sebagai langkah awal dalam memberikan penjaminan Non-KPBU pertama sejak diterbitkannya PMK 101/2018.

On 28 December 2018 The Company signed a Guarantee Agreement with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) for the Loan Guarantee for the Tourism Infrastructure Facility Development Project for the Mandalika Special Economic Zone, Lombok. This agreement was an important milestone for the Company as an initial step in providing the first Non-PPP guarantee since the issuance of PMK 101/2018.

# 2019

## Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU
**Assignment and Implementation of PPP Project**

Perseroan mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatra Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

The Company received a mandate from the Ministry of Finance to implement facilities for Project Development Facility of PPP Projects, 1) Makassar-Parepare Train developed by the Ministry of Transportation, 2) South Sumatra East Cross Road, 3) Riau East Cross Road developed by Ministry of PUPR, and 4) Dharmais Cancer Hospital, developed by the Ministry of Health.

## Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare
**Guarantee for the Makassar-Parepare Train PPP Project**

Pada 5 April 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku PJPK dengan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini merupakan proyek KPBU dan menggunakan Penjaminan Pemerintah yang pertama di Kementerian Perhubungan.

On 5 April 2019, a Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Transportation c.q. Directorate General of Railways as GCA, and PT Celebes Railway Indonesia (CRI) as the Implementing Business Entity (BUP). This project was a PPP project and used the first Sovereign Guarantee in the Ministry of Transportation.

## Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang – Demak
**Semarang-Demak Toll Road PPP Project Guarantee**

Pada 23 September 2019 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ruas Jalan Tol Semarang-Demak antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Pembangunan Perumahan Semarang- Demak (PPSD) yang merupakan konsorsium dari Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrikal.

On 23 September 2019, a cooperation agreement for the Public Private Partnership (PPP) project for the Semarang-Demak Toll Road section was signed between the Ministry of PUPR as GCA and the Implementing Business Entity (BUP), PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD), which is a Consortium of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and PT Misi Mulia Metrikal.

## Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia
**Guarantee for PPP Project of Multifunctional Satellite of the Republic of Indonesia**

Pada 3 Mei 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai PJPK. SATRIA merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang diberikan penjaminan pemerintah melalui Perseroan setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Indonesia.

On 3 May 2019, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Satelit Nusantara Tiga as the Implementing Business Entity (BUP) and the Recourse Agreement of the Multifunction Satellite for the Republic of Indonesia PPP project (SATRIA) with the Minister of Communication and Information Technology as the GCA. SATRIA is the fourth PPP project in the telecommunications sector to be provided a sovereign guarantee through the Company, after the West, Central, and East Palapa Ring Packages, with the objective to improve connectivity in Indonesia's Disadvantaged, Frontier, and Outermost regions.

# 2020

## Penjaminan Pinjaman PLN untuk Proyek *Hydropower Programme*

**Penjaminan Pinjaman PLN untuk Proyek Hydropower Programme**

Pada 5 September 2019, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara KfW dan PLN, yang kemudian diikuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dan PLN, serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII, dan KfW atas pinjaman tersebut. Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung yang diperoleh PT PLN (Persero) dari KfW sebesar EUR 294,7 juta untuk membiayai enam subproyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Penjaminan ini menjadi tonggak penting karena menandai dimulainya skema penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dan PT PII untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek PT PLN selanjutnya.

On 5 September 2019, a Loan Agreement was signed between KfW and PLN, followed by a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN, and a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and KfW for the loan. This project utilized a direct loan scheme obtained by PT PLN (Persero) from KfW amounting to EUR294.7 million to finance six subprojects in Kalimantan, Sulawesi, and Papua. This guarantee was an important milestone as it marked the beginning of a joint guarantee scheme between the Ministry of Finance and IIGF to support the financing of subsequent PT PLN projects.

## Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2

**Construction of Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plant (GPP) Project**

Pada tanggal 19 Agustus 2020 PT PII dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") menandatangani perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2, yang meliputi Penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara GeoDipa dan ADB, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GeoDipa.

On 19 August 2020, IIGF and PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB) for the Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plants (GPPs) Development projects, which include the Signing of the Loan Agreement between GeoDipa and ADB, the Signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the Signing of the Guarantee Agreement between IIGF and GeoDipa.

## Proyek KPBU Jalan Tol Jogja Solo

**Jogja Solo Toll Road PPP Project**

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Solo (dahulu PT Jogjasolo Marga Makmur) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 9 September 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Solo (previously PT Jogjasolo Marga Makmur) as the Implementing Business Entity (BUP). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.

## Perluasan Mandat Perseroan

**Company's Mandate Expansion**

Pada 30 September 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas maksud dan tujuan PT PII tidak lagi terbatas pada penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur, namun juga mencakup penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya berdasarkan penugasan pemerintah dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang mendukung perekonomian nasional.

On 30 September 2020, Government Regulation No. 55 of 2020 on the second amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector. The issuance of the amendment to this Regulation expanded IIGF's goals and objectives, so that the Company is no longer limited to sovereign guarantees in the infrastructure sector, but includes sovereign guarantees in financing in other sectors based on government assignments, and carries out activities related to the sovereign guarantees and other activities related to the projects that support the national economy.

## Proyek KPBU Jalan Tol Jogja Bawen

**Jogja Bawen Toll Road PPP Project**

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 13 November 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Bawen as the Implementing Business Entity (BUP). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.

# 2021

### Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Kelistrikan di Jawa Timur dan Bali
**Construction of East Java and Bali Electricity Distribution Network Project Guarantee**

Pada 10 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Perseroan atas Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kepada PT PLN untuk pembiayaan proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali.

On 10 February 2021, the Company signed a Sovereign Guarantee Agreement with the Ministry of Finance for Direct Lending from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to PT PLN to finance the East Java and Bali Distribution Network Development.

### Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Korporasi
**Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs**

Pada 16 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Eksekutif LPEI.

On 16 February 2021, the Company, represented by the President Director, signed a Cooperation Agreement for the Implementation of Sovereign Guarantees for Corporate Entrepreneurs, with the Executive Director of LPEI.

### Penjaminan Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Jatiluhur I
**Unsolicited SPAM Jatiluhur I PPP Project Guarantee**

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jatiluhur I yang merupakan Proyek KPBU *Unsolicited*.

On 18 February 2021, there was a ceremonial activity to sign an agreement regarding the sovereign guarantee for the SPAM Jatiluhur I Project, which is an Unsolicited PPP Project.

### Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra Selatan
**South Sumatra East Cross Road (Jalintim) Project**

Pada 22 Februari 2021 dilaksanakan *Financial Close* Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel yang merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia dan merupakan proyek KPBU pertama yang mendapatkan pendanaan Syariah.

On 22 February 2021, the South Sumatra Jalintim Preservation PPP Project reached its Financial Close phase. The project was the first PPP project in the Non-Toll Road sector in Indonesia and is the first PPP project to receive Sharia funding.

### Penjaminan Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau
**East Sumatra Cross Road Preservation Project Guarantee in Riau Province**

Pada 12 April 2021 Perseroan resmi memberikan penjaminan pada Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau yang merupakan proyek kedua di sektor jalan Non-tol di Indonesia.

On 12 April 2021, the Company officially provided guarantees for the East Sumatra Cross Road Preservation PPP Project in Riau Province, which is the second project in the non-toll road sector in Indonesia.

### Penjaminan Proyek KPBU Unsolicited SPAM Karian – Serpong (Unsolicited)
**SPAM Karian-Serpong Unsolicited PPP Project Guarantee (Unsolicited)**

Pada 29 April 2021 dilaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek SPAM Karian – Serpong dimana menjadi proyek ke-6 di sektor Air Minum yang diberikan penjaminan oleh Perseroan.

On 29 April 2021, the Company signed an agreement regarding the sovereign guarantee for the Karian-Serpong SPAM project, which is the 6th project in the Drinking Water sector to be given a guarantee by the Company.

### Penjaminan Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa *(Unsolicited)*
**Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication Project Guarantee on Java Island (Unsolicited)**

Pada 6 Desember 2021 dengan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Perseroan melaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU *unsolicited* di sektor jalan dan jembatan yaitu proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

On 6 December 2021, witnessed directly by the Minister of PUPR, Basuki Hadimuljono, the Company signed an agreement regarding the sovereign guarantee for an unsolicited PPP project in the road and bridge sector, i.e., the Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication project on Java Island.

## 2022

### Penjaminan Proyek KPBU
**PPP Project Guarantee**

1. Pada tanggal 20 September 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait dengan Proyek Alat Penerangan Jalan Madiun. Proyek ini merupakan proyek Alat Penerangan Jalan dan proyek KPBU skala kecil pertama di Indonesia yang kemudian dijadikan *benchmark* oleh Pemda lain untuk mengembangkan proyek sejenis.
2. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan melaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait dengan Proyek *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJKSB) Bekasi.

1. On 20 September 2022, a guarantee agreement was signed for the Madiun Street Lighting Project. This project was the first Street Lighting Equipment project and small-scale PPP project in Indonesia, which was later used as a benchmark by other local governments to develop similar projects.
2. On 31 October 2022, the Company signed a guarantee agreement for the Proving Ground Project of the Bekasi Roadworthiness Testing and Certification Center (BPLJKSB).

### Presidensi G20
**G20 Presidency**

Perseroan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 sebagai *co-host* T20 TF8 dalam rangka percepatan *economic recovery* melalui penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan dengan tema *"Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing"*.

The Company actively participates in supporting the G20 Presidency as co-host of T20 TF8 to accelerate economic recovery via the provision of sustainable public infrastructure with the theme "Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing".

### Penjaminan Proyek Non-KPBU
**Non-PPP Project Guarantee**

1. Pada tanggal 22 April 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (persero) Tbk.
2. Pada tanggal 19 Mei 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program Western and Central Java* (SREAP)
3. Pada tanggal 28 Desember 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Pembangunan PLTU Tahap III (PLTU Timor-1)
4. Pada tanggal 30 Desember 2022, dilaksanakan penandatanganan:
   a. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Industri Kereta Api (Persero);
   b. perjanjian penjaminan atas pinjaman Perusahaan Umum DAMRI;
   c. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Pertamina (Persero);
   d. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT LEN Industri (Persero).

1. On 22 April 2022, an agreement was signed for the guarantees of Bond IV and Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. On 19 May 2022, a guarantee agreement was signed for the Western and Central Java Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) Project.
3. On 28 December 2022, a guarantee agreement for the SPP Phase III Development Project (SPP Timor-1) was signed.
4 On 30 December 2022, the following signing were carried out:
   a. Guarantee Agreement for the loan of PT Industri Kereta Api (Persero);
   b. Guarantee Agreement for the loan of DAMRI Public Corporation;
   c. Guarantee Agreement for the loan of PT Pertamina (Persero);
   d. Guarantee Agreement for the loan of PT LEN Industry (Persero).

## 2023

### Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
**Project Development Facility**

1. Pada tanggal 24 Maret 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Pada tanggal 19 Juni 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo;
3. Pada tanggal 31 Agustus 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek Kapal Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
4. Pada tanggal 10 November 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Denpasar.

1. On 24 March 2023, Minister of Finance Decree was issued regarding the special assignment of IIGF as the implementor in the Project Development Facility of State Property Utilization Transactions and/or Transfer in the Preparation, Development, and Relocation of the National Capital City.
2. On 19 June 2023, Minister of Finance Decree (KMK) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in the Project Development Facility of SPAM Karo Regency PPP Project;
3. On 31 August 2023, Minister of Finance Decree (KMK) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in the Project Development Facility of Vessel Research Project with National Research and Innovation Agency (BRIN);
4. On 10 November 2023, Minister of Finance Decree (KMK) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in the Project Development Facility of SPAM Denpasar PPP Project.

# 2024

## Penjaminan Proyek KPBU
**PPP Project Guarantee**

1. Pada tanggal 24 Januari 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Tol Akses Patimban.
2. Pada tanggal 12 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan Proyek Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat.
3. Pada tanggal 17 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir - Ulujami.

1. On 24 January 2023, a guarantee agreement was signed for Patimban Access Toll Road Project.
2. On 12 October 2023, a guarantee agreement was signed for the Public Street Lighting Project in West Lombok Regency.
3. On 17 October 2023, a guarantee agreement was signed for the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Cikunir-Ulujami Elevated Toll Project.

## Penjaminan Proyek Non-KPBU
**Non-PPP Project Guarantee**

Pada tanggal 19 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

On 19 October 2023, a guarantee agreement was signed for the loan of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) for the Government's Food Reserves implementation.

## Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
**Project Development Facility**

Pada tanggal 2 Agustus 2024 sudah diterbitkan KMK Penugasan RSUD Wangaya.

On 2 August 2024, the KMK for the assignment of Wangaya Local Hospital was issued.

## Penjaminan Proyek KPBU
**PPP Project Guarantee**

1. Pada tanggal 27 Februari 2024, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan pada proyek Jalan Tol Kediri - Tulungagung.
2. Pada tanggal 3 Juli 2024 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan pada proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura - Wamena.

1. On 27 February 2024, a guarantee agreement was signed for Kediri–Tulungagung Toll Road Project.
2. On 3 July 2024, a guarantee agreement was signed for Trans Papua Road Project (Jayapura–Wamena section).

## PMK 68 Tahun 2024
**PMK No. 68 of 2024**

Pada 18 Oktober 2024 telah diterbitkan PMK 68 Tahun 2024 yang menjadi pedoman Perseroan dalam memberikan penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur khususnya yang menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

On 18 October 2024, the PMK No. 68 of 2024 was issued, which serves as the guideline for the Company in providing guarantees for infrastructure projects, particularly those using Public–Private Partnership (PPP) scheme.

## Penjaminan Proyek Non-KPBU
**Guarantee for Non-PPP Projects**

1. Pada 25 Januari 2024 telah dilaksanakan perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) dari China Development Bank terkait Percepatan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
2. Pada 28 Mei 2024 telah dilaksanakan perjanjian penjaminan pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN) dari World Bank terkait program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification* (ISLE-1).

1. On 25 January 2024, a guarantee agreement was signed for a loan to PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) from China Development Bank related to the Acceleration of Jakarta–Bandung High-Speed Rail Project.
2. On 28 May 2024, a guarantee agreement was signed for a loan to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN) from the World Bank related to the Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE-1) Program.

# 2025

## Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
### Project Development Facility

Pada 16 April 2025, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penugasan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Denpasar Bali kepada PT PII.

On 16 April 2025, the assignment agreement for the project preparation facility and transaction advisory for Wangaya Regional General Hospital (RSUD Wangaya) project in Denpasar, Bali was signed and assigned to IIGF.

## Penjaminan Proyek KPBU
### PPP Project Guarantee

1. Pada 21 Maret 2025, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres pada proyek *Flyover* Panorama I Sitinjau Lauik.
2. Pada 3 Oktober 2025, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres pada proyek Jalan Tol Bogor - Serpong.

1. On 21 March 2025, the guarantee agreement and regress agreement were signed for Sitinjau Lauik Panoramic Flyover I Project.
2. On 3 October 2025, the guarantee agreement and regress agreement were signed for Bogor–Serpong Toll Road Project.

## Penjaminan Proyek Non-KPBU
### Guarantee for Non-PPP Projects

Pada tahun 2025, PT PII memberikan dukungan terhadap pengembangan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia, melalui beberapa penandatanganan penjaminan pinjaman sebagai berikut:

1. Pada 15 Desember 2025, dilaksanakan penandatanganan penjaminan Pinjaman PT Geo Dipa Energi (Persero) dari Asian Development Bank (ADB) untuk Kelanjutan Pembiayaan Proyek Dieng-2.
2. Pada 31 Desember 2025, dilaksanakan penandatanganan penjaminan Pinjaman PT PLN (Persero) dari Asian Development Bank (ADB) terkait untuk *Program Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program* (AICET).
3. Pada 31 Desember 2025, dilaksanakan penandatanganan penjaminan Pinjaman PT PLN (Persero) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk terkait Program *Indonesia Sustainable Least-cost Electrification Phase 2* (ISLE-2).
4. Pada 31 Desember 2025, dilaksanakan penandatanganan penjaminan Pinjaman PT PLN (Persero) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk terkait Program *Indonesia Electricity Network Transformation* (I-ENET).

In 2025, IIGF provided support for the development of renewable energy projects as part of efforts to accelerate the transition to clean and sustainable energy in Indonesia, through the signing of several loan guarantees as follows:

1. On 15 December 2025, a guarantee agreement was provided for a loan to PT Geo Dipa Energi (Persero) from the Asian Development Bank (ADB) for the additional loan for Dieng-2 project.
2. On 31 December 2025, a guarantee agreement was provided for a loan to PT PLN (Persero) from the Asian Development Bank (ADB) related to the Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program (AICET).
3. On 31 December 2025, a guarantee agreement was provided for a loan to PT PLN (Persero) from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) related to the Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Phase 2 (ISLE-2) Program.
4. On 31 December 2025, a guarantee agreement was provided for a loan to PT PLN (Persero) from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) related to the Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET) Program.

# Visi dan Misi Perseroan
Company Vision and Mission

## VISI
VISION

**Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui berbagai skema inovatif.**

To be the trusted driving entity in supporting efforts to accelerate infrastructure and sustainable development by the Government via various innovative schemes.

## MISI
MISSION

**Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan dukungan lainnya melalui:**

1. **Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel;**
2. **Menyediakan *instrument de-risking*, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung investasi oleh badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan;**
3. **Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem Pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial;**
4. **Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan.**

To ensure the accelerated fulfillment of equitable and sustainable infrastructure development by providing guarantees and other support by:

1. Performing the role as the Government's fiscal tool in implementing sustainable development through transparent and accountable risk management and processes;
2. Providing de-risking instruments, guarantees, and risk management facilitation to support investment by business entities and the fulfillment of their financing in a sustainable manner;
3. Having an active role as part of the ecosystem of sustainable national development with due regard to environmental and social principles;
4. Strengthening the capabilities, organizational capacity, and quality of human resources to support the achievement of the Company's vision.

# Telaah Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Visi dan Misi Perseroan

The Board of Commissioners and Board of Directors Review on the Company's Vision and Mission

Dewan Komisaris dan Direksi PT PII secara rutin melakukan tinjauan terhadap visi dan misi Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hingga laporan ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi Perseroan tetap relevan dengan dinamika dan perkembangan lingkungan bisnis. Selain itu, visi dan misi tersebut juga selaras dengan arah dan sasaran strategis Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of IIGF regularly review the Company's vision and mission to ensure their alignment with the established long-term objectives. As of the issuance of this report, the Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the Company's vision and mission remain relevant to the dynamics and developments of the business environment. In addition, the vision and mission are also aligned with the Company's strategic direction and objectives in supporting sustainable infrastructure development and improving the quality of life of the community.



**Visi dan Misi PT PII dalam mendukung keberlanjutan, sejalan dengan instruksi Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan**

The Vision and Mission of IIGF in supporting sustainability are aligned with the instructions of the Director General of State Assets at the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS).

Sebagai entitas penggerak pembangunan nasional, PT PII menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari visi dan misinya untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Perseroan memprioritaskan penjaminan proyek energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan, yang menjadi dasar strategi tahun 2025 dengan tema "Perluasan Layanan Penjaminan untuk Mendukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Berdampak Positif bagi Lingkungan dan Sosial."

Dalam pelaksanaannya, PT PII memperkuat peran melalui skema penjaminan energi terbarukan dan transisi energi, pengembangan *sustainable finance*, serta pelaksanaan *Project Development Facility* (PDF) pada sektor sosial, disertai perluasan proyek berskala kecil dan penambahan sektor prioritas perumahan dan kesehatan untuk mendorong pemerataan pembangunan.

As an agent driving national development, IIGF places sustainability at the core of its vision and mission to ensure sustainable economic performance while delivering positive impacts for society. In line with the direction of the Director General of State Assets, the Company prioritizes guarantees for renewable energy projects and environmentally friendly infrastructure, which become the basis of the 2025 strategy under the theme "Expansion of Guarantee Services to Support Sustainable Infrastructure that Positively Impacts the Environment and Society."

In its implementation, IIGF strengthens its role through renewable energy and energy transition guarantee schemes, the development of sustainable finance, and the implementation of Project Development Facility (PDF) in the social sector, accompanied by the expansion of small-scale projects and the addition of priority sectors in housing and healthcare to promote equitable development.

# Tata Nilai dan Budaya Perseroan

Corporate Value and Culture

PT PII mengusung tata nilai Perseroan yang dikenal dengan nama **InTIME**, yang meliputi ***Integrity*** (Integritas), ***Teamwork*** (Kerja Sama), ***Think Big*** (Berpikir Besar), ***Mutual Trust*** (Saling Percaya), dan ***Excellence*** (Keunggulan). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi budaya Perseroan serta pedoman dalam pengembangan karakter talenta di lingkungan PT PII. Selain itu, nilai-nilai InTIME juga menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme tinggi dan dalam mewakili Perseroan di berbagai kegiatan usaha.

IIGF upholds the Company's core values known as InTIME, which consist of Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence. These values serve as the foundation of the Company's culture as well as a guideline in developing the character of talents within IIGF. In addition, InTIME values also serve as a reference for all employees in carrying out their duties with a high level of professionalism and in representing the Company in various business activities.

### Integritas
**Integrity**

**Berperilaku jujur bekerja dengan standar etika tinggi dan mengutamakan kepentingan publik.**
Behaving honestly, working with high ethical standards, and prioritizing public interest.

- Jujur
- Amanah (menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab)
- Honest
- Trustworthy (carrying out duties responsibly)

### Kerja Sama
**Team Work**

**Bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan Perseroan.**
Working in a team to achieve the Company's objectives.

- Pro aktif
- Memberikan nilai tambah
- Proactive
- Providing added value

### Berpikir Besar
**Think Big**

**Berpikir ke depan dengan wawasan yang luas dan berani untuk membuat terobosan yang inovatif.**
Thinking ahead with great insight and being brave to make innovative breakthroughs.

- *Visioner*
- Berpikiran terbuka
- Belajar berkelanjutan
- Visionary
- Open-minded
- Continuous learning

### Saling Percaya
**Mutual Trust**

**Membangun dan saling menjaga kepercayaan secara konsisten dan berkesinambungan.**
Establishing and maintaining mutual trust consistently and continuously.

- Berorientasi untuk kepentingan bersama
- Saling menghargai
- Orientated to the common good
- Mutual respect

### Keunggulan
**Excellence**

**Melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk menjadi yang terunggul.**
Continuously improving performance to be the best.

- Memberi hasil kerja terbaik
- Bekerja cerdas dan gigih
- Giving the best work
- Working smart and persistently

## Penerapan Budaya Perusahaan

Implementation of Corporate Culture

Budaya Perseroan diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai InTIME ke dalam setiap aspek operasional dan interaksi antar karyawan. Pada tahun 2025, Perseroan melanjutkan penguatan implementasi nilai-nilai budaya perusahaan yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada penguatan pemahaman, konsistensi perilaku, serta integrasi nilai budaya dalam aktivitas kerja sehari-hari.

The Company's culture is applied by integrating InTIME values into every aspect of operations and employee interactions. In 2025, the Company continued to strengthen the implementation of corporate culture values initiated in the previous year. This effort is carried out through various initiatives focused on strengthening understanding, consistent behavior, and integrating cultural values into daily work activities.

# Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha Perseroan

## Company's Business Sector and Activities

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 10 Tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan dari kegiatan Perseroan adalah untuk:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
2. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat maupun daerah.

In accordance with the Company's Articles of Association, last amended by the Deed of Shareholders' Resolution No. 10 dated 24 February 2023, drawn up before Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta, the purposes and objectives of the Company's activities are:

1. Providing sovereign guarantees in the infrastructure sector;
2. Providing sovereign guarantees in financing in sectors other than infrastructure based on Government assignments; and
3. Carrying out activities related to the implementation of sovereign guarantees as well as other activities related to the implementation of development projects that support the national economy at both the central and regional levels.

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

In order to achieve the purposes and objectives described above, the Company conducts the following business activities:

| No | Kegiatan Usaha yang Dijalankan<br>Business Activities | |
|---|---|---|
| 1 | Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam skema perjanjian kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontingensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. | Providing guarantees for the Government's financial obligation under Public–Private Partnership (PPP) agreements in infrastructure projects that are capable of ensuring accountability in the management of the Government's contingent liabilities and enhancing the credit worthiness of Public–Private Partnership infrastructure projects. |
| 2 | Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam proyek infrastruktur. | Providing guarantees for the Government's financial obligations in infrastructure projects. |
| 3 | Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari:<br>• Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan;<br>• Penerbitan surat hutang atau obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya. | Providing guarantees against the risk of default by State-Owned Enterprises (SOEs) in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, arising from:<br>• The implementation of loan agreements with financial institutions;<br>• The issuance of debt securities or bonds and/or other financial instruments. |
| 4 | Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari:<br>• Pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan lembaga keuangan;<br>• Penerbitan surat hutang/obligasi. | Providing guarantees against the risk of default to Regional Owned Enterprises (BUMD) and/or regional governments in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, arising from:<br>• The implementation of agreements with financial institutions;<br>• The issuance of debt securities/bonds. |
| 5 | Pemberian penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain pinjaman dan surat utang/obligasi. | Providing guarantees for other financial risks to State-Owned Enterprises (SOEs), Regional Owned Enterprises (BUMD), and/or business entities in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, arising from the procurement of financing or financial risk mitigation facilities in forms other than loans and debt securities/bonds. |

| No | Kegiatan Usaha yang Dijalankan<br>Business Activities | |
|---|---|---|
| 6 | Pemberian penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. | Providing guarantees to other business actors in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance. |
| 7 | Pemberian jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitasi perencanaan, penyiapan, dan penyiapan kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek. | Providing consulting services, information provision, planning facilitation, project preparation and feasibility preparation for projects or programs, as well as other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structures. |
| 8 | Kerja sama dengan pihak lain termasuk organisasi/lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. | Cooperating with other parties, including international organizations/financial institutions, in the implementation of guarantee provisions as referred to in points 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. |
| 9 | Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan. | Establishing joint ventures or making equity participation in other legal entities that have purposes and objectives similar to those of the Company. |
| 10 | Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Carrying out other activities to achieve the Company's purposes and objectives in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations. |

# Produk dan Jasa Perseroan
## Company's Products and Services

PT PII menyediakan produk dan jasa utama berupa:
- Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur untuk Proyek KPBU maupun non KPBU;
- Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dan Penerbitan Obligasi BUMN untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur;
- Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi;
- Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

IIGF provides the following main products and services:
- Sovereign Guarantees in the Infrastructure Sector for PPP and non-PPP projects;
- Sovereign Guarantees for Loans and Bond Issuances by SOEs to finance infrastructure provision;
- Sovereign Guarantees for Loans in the implementation of the Government Food Reserve program;
- Project Preparation and Transaction Advisory;
- Sovereign Guarantees for Corporate Business Actors in the implementation of the National Economic Recovery Program.

# Jenis Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan

## Sectors that Can be Guaranteed

Dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia, PT PII berperan aktif dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur melalui kegiatan penjaminan yang diberikan kepada 26 sektor infrastruktur sebagai berikut.

In order to accelerate infrastructure development in Indonesia, IIGF plays an active role in the development of infrastructure projects through guarantee activities provided to the following 26 infrastructure sectors:



**Air Minum**
Drinking Water



**Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat**
Centralized Wastewater Management System



**Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat**
Local Wastewater Management System



**Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan termasuk Bio Energi**
Oil and gas and renewable energy including Bio Energy



**Konservasi Energi**
Energy Conservation



**Pariwisata**
Tourism



**Kesehatan**
Healthcare



**Lembaga Pemasyarakatan**
Correctional Facilities



**Ekonomi Fasilitas Perkotaan**
Urban Facilities Economy



**Perumahan Rakyat**
Public Housing



**Transportasi**
Transportation



**Jalan**
Roadway



**Sumber Daya Air dan Irigasi**
Water Resource and Irrigation



**Telekomunikasi dan Informatika**
Telecommunication and Informatics



**Ketenagalistrikan**
Electricity



**Sistem Pengelolaan Persampahan dan/atau Limbah Berbahaya dan Beracun**
Garbage and/or hazardous and toxic waste management



**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**
Conservation for Biological Natural Resources and their Ecosystems



**Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian dan Budaya**
Facilities and Infrastructure of Sports and Arts and Culture



**Bangunan Gedung Negara**
State Building



**Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai**
Battery-based Electric Motorized Vehicle



**Perikanan**
Fishery



**Fasilitas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan**
Education, Research, and Development Facilities



**Karantina**
Quarantine



**Ekosistem Industri**
Industrial Ecosystem



**Kawasan**
Region



**Kota Cerdas**
Smart City

# Wilayah Operasional
## Operational Area

Wilayah operasional PT PII secara keseluruhan berada di wilayah Indonesia. Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan di kantor pusat Perseroan yang beralamat di:

The operational area of IIGF as a whole covers the territory of Indonesia. All of the Company's business activities are conducted at the Company's head office located at:

Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No.Kav 18, RT.6/RW.1,
Kuningan Barat., Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan

Hingga akhir 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan.

As of 31 December 2025, the Company does not have any subsidiaries, associated entities, branch offices, or representative offices.



# Keanggotaan Asosiasi

## Membership in Association

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan belum memiliki keanggotaan pada asosiasi atau organisasi profesi tertentu. Meskipun demikian, Perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha melalui koordinasi dan sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga terkait, institusi keuangan, serta mitra strategis lainnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan mandat Perseroan sebagai alat fiskal pemerintah di bidang penjaminan infrastruktur.

Until 31 December 2025, the Company does not hold membership in any particular association or professional organization. Nevertheless, the Company continues to conduct its business activities through close coordination and synergy with various stakeholders, including relevant ministries/agencies, financial institutions, and other strategic partners, in order to support the implementation of the Company's mandate as the Government's fiscal instrument in the field of infrastructure guarantees.

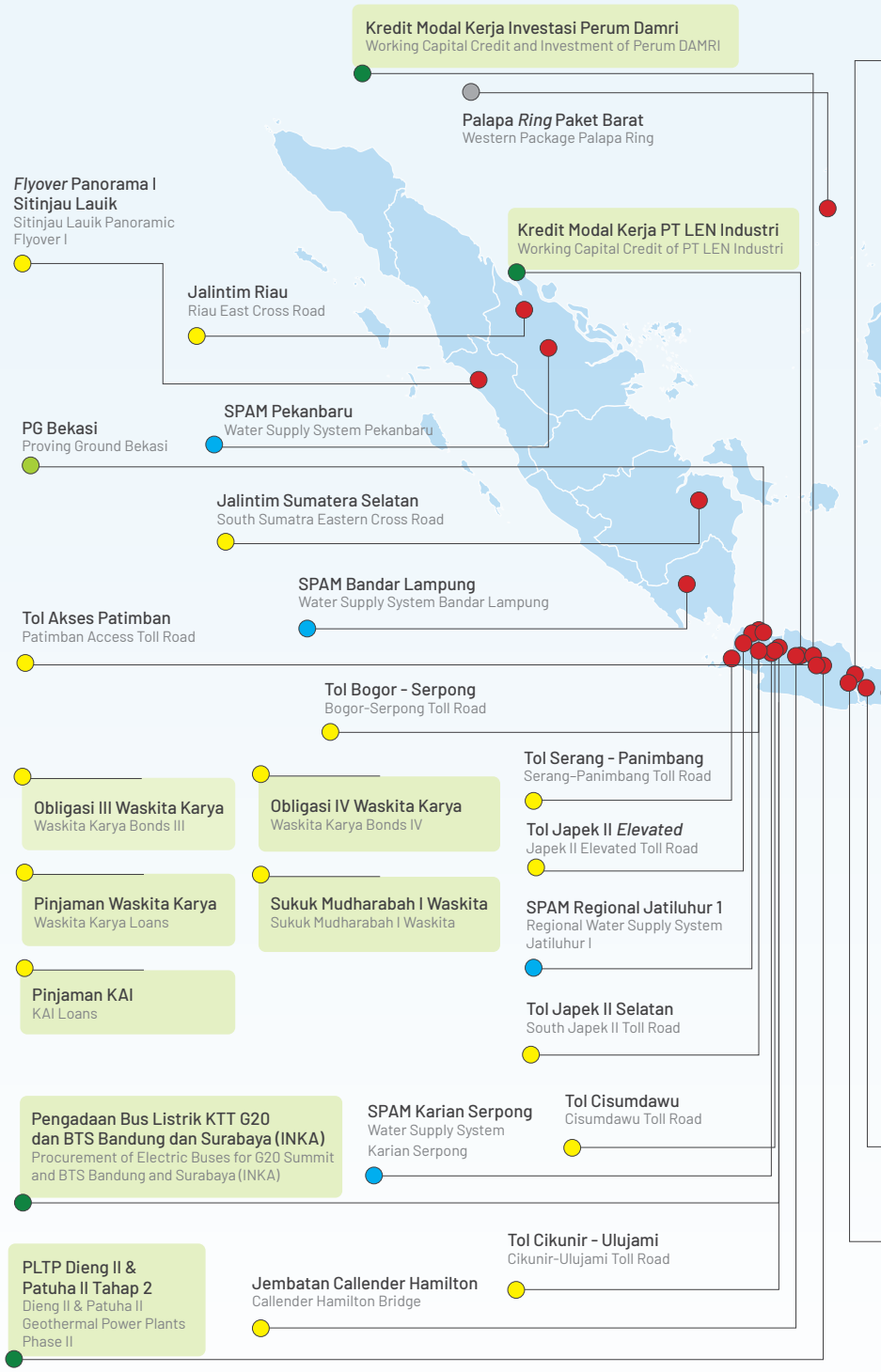


# Peta Sebaran Proyek

## Project Distribution Map

Per 31 Desember 2025, PT PII telah menjamin 60 proyek yang terdiri dari 51 proyek penjaminan infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU serta 9 proyek penjaminan non infrastruktur dengan total nilai investasi keseluruhan proyek infrastruktur sebesar Rp705 triliun.

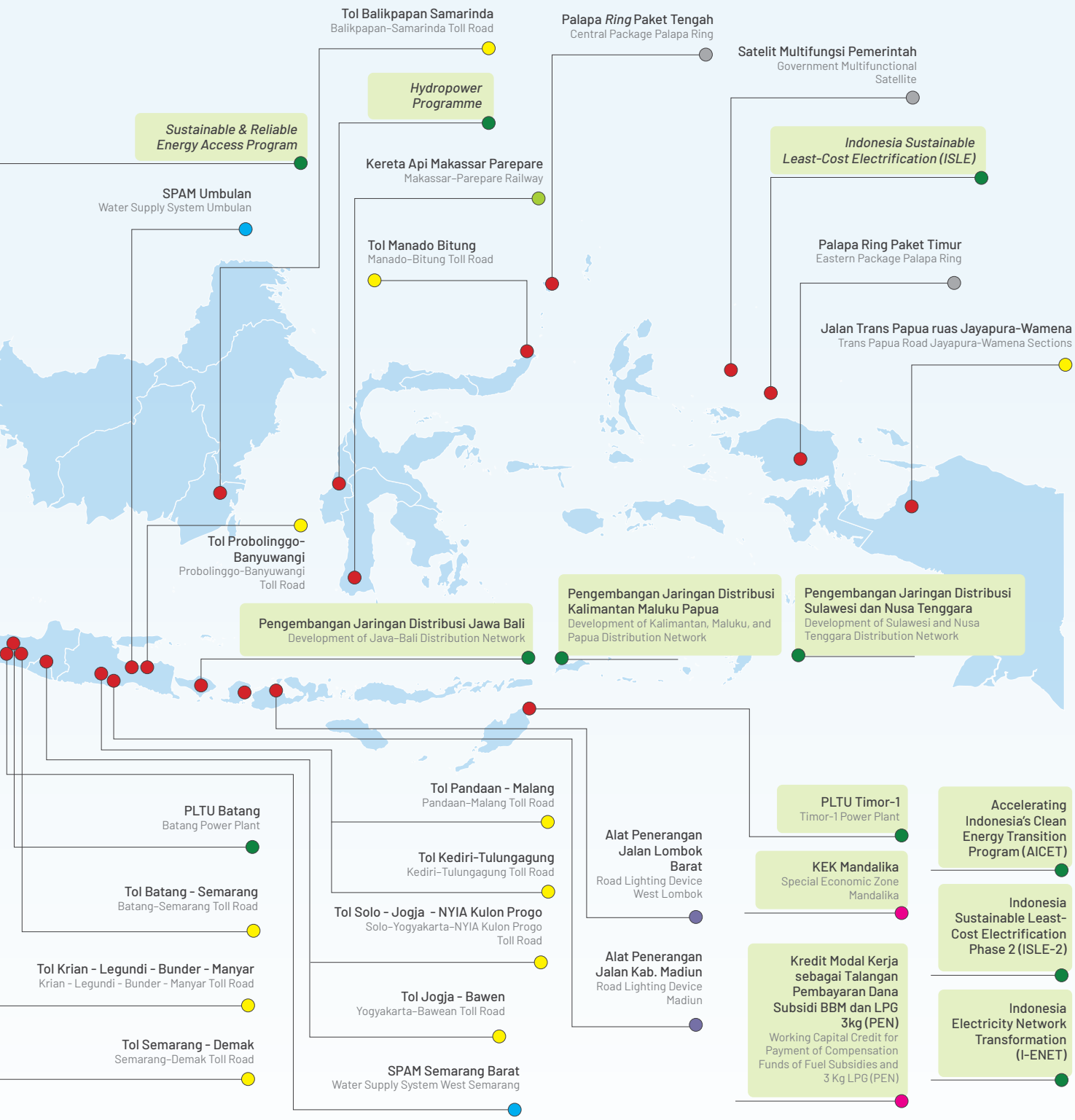
As of 31 December 2025, IIGF has guaranteed 60 projects, consisting of 51 infrastructure guarantee projects under PPP and non-PPP schemes and 9 non-infrastructure guarantee projects, with a total investment value for all infrastructure projects amounting to Rp705 trillion.




**Keterangan Sektor** Sector Description

- Sektor Pariwisata Tourism Sector
- Sektor Ketenagalistrikan Electricity Sector
- Sektor Telekomunikasi Telecommunications Sector
- Sektor Air Minum Drinking Water Sector
- Sektor Transportasi Transportation Sector
- Sektor Jalan Road Sector
- Sektor Konservasi Energi Energy Conservation Sector

Penjaminan Non KPBU Non-PPP Guarantee


Tol Balikpapan Samarinda
Balikpapan–Samarinda Toll Road
Palapa *Ring* Paket Tengah
Central Package Palapa Ring
Satelit Multifungsi Pemerintah
Government Multifunctional Satellite
*Hydropower Programme*
*Sustainable & Reliable Energy Access Program*
*Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE)*
Kereta Api Makassar Parepare
Makassar–Parepare Railway
SPAM Umbulan
Water Supply System Umbulan
Tol Manado Bitung
Manado–Bitung Toll Road
Palapa Ring Paket Timur
Eastern Package Palapa Ring
Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena
Trans Papua Road Jayapura-Wamena Sections
Tol Probolinggo-Banyuwangi
Probolinggo-Banyuwangi Toll Road
Pengembangan Jaringan Distribusi Kalimantan Maluku Papua
Development of Kalimantan, Maluku, and Papua Distribution Network
Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara
Development of Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Network
Pengembangan Jaringan Distribusi Jawa Bali
Development of Java-Bali Distribution Network
PLTU Batang
Batang Power Plant
Tol Pandaan - Malang
Pandaan-Malang Toll Road
Alat Penerangan Jalan Lombok Barat
Road Lighting Device West Lombok
PLTU Timor-1
Timor-1 Power Plant
Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program (AICET)
Tol Kediri-Tulungagung
Kediri-Tulungagung Toll Road
KEK Mandalika
Special Economic Zone Mandalika
Tol Batang - Semarang
Batang-Semarang Toll Road
Tol Solo - Jogja - NYIA Kulon Progo
Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road
Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Phase 2 (ISLE-2)
Alat Penerangan Jalan Kab. Madiun
Road Lighting Device Madiun
Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar
Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road
Kredit Modal Kerja sebagai Talangan Pembayaran Dana Subsidi BBM dan LPG 3kg (PEN)
Working Capital Credit for Payment of Compensation Funds of Fuel Subsidies and 3 Kg LPG (PEN)
Tol Jogja - Bawen
Yogyakarta-Bawean Toll Road
Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET)
Tol Semarang - Demak
Semarang-Demak Toll Road
SPAM Semarang Barat
Water Supply System West Semarang

# Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders

Komposisi Pemegang Saham PT PII per 31 Desember 2025 dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:

The Composition of IIGF's Shareholders as of 31 December 2025 is fully (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia, as illustrated in the following scheme:



Pemerintah Republik Indonesia
Government of The Republic of Indonesia

100%

PT PII

# Informasi Pemegang Saham Utama Hingga Entitas Pemilik Akhir
Information on Main Shareholders to Ultimate Beneficial Owners

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Per 31 Desember 2025, Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah saham sebanyak 10.655.000 lembar saham.

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance. As of 31 December 2025, the Company's main and controlling shareholder is the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of Finance, holding a total of 10,655,000 shares.

# Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Struktur kepemilikan saham PT PII seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yang berkedudukan di Indonesia. Tidak terdapat kepemilikan saham oleh institusi asing, individu lokal maupun individu asing.

The shareholding structure of IIGF is entirely owned by local institutions based in Indonesia. There is no share ownership by foreign institutions, local individuals, or foreign individuals.

## Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi
Number of Shareholders and Ownership Percentage by Classification

Per 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham PT PII diklasifikasikan berdasarkan jenis pemegang saham dan seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yang berkedudukan di Indonesia. Tidak terdapat kepemilikan saham oleh institusi asing, individu lokal maupun individu asing. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pemegang saham Perseroan seluruhnya atau sebesar 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

As of 31 December 2025, the shareholding structure of IIGF is classified based on the type of shareholder and is entirely owned by local institutions based in Indonesia. There is no share ownership by foreign institutions, local individuals, or foreign individuals. Based on this classification, the Company's shareholder is entirely, or 100%, owned by the Government of the Republic of Indonesia.

| Nama Pemegang Saham<br>Shareholder Name | Kedudukan Pemegang Saham<br>Shareholder Domicile | Jumlah Saham<br>Total Shares | % |
|---|---|---|---|
| Institusi Lokal: Pemerintah Republik Indonesia<br>Local Institution: Government of the Republic of Indonesia | Indonesia | 10.655.000 lembar<br>10,655,000 shares | 100% |

## Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Perusahaan
Composition of Shareholders Holding 5% or More of the Company's Shares

Sampai dengan akhir Desember 2025, Pemerintah Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali PT PII serta satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% atau lebih.

As of the end of December 2025, the Government of the Republic of Indonesia is the Main and Controlling Shareholder of IIGF and the only shareholder holding 5% or more of the shares.

| Nama Pemegang Saham<br>Shareholder Name | Jumlah Saham<br>Total Shares | % | Status |
|---|---|---|---|
| Pemerintah Republik Indonesia<br>Government of the Republic of Indonesia | 10.655.000 lembar<br>10,655,000 shares | 100% | Pemegang Saham Utama dan Pengendali<br>Main and Controlling Shareholder |

## Kelompok Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Saham Perusahaan
Shareholder Group with Less Than 5% Ownership of the Company's Shares

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan dengan persentase kepemilikan saham di bawah 5%.

As of 31 December 2025, there are no shareholders of the Company holding less than 5% of the shares.

## Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Shareholding by the Board of Commissioners and the Board of Directors

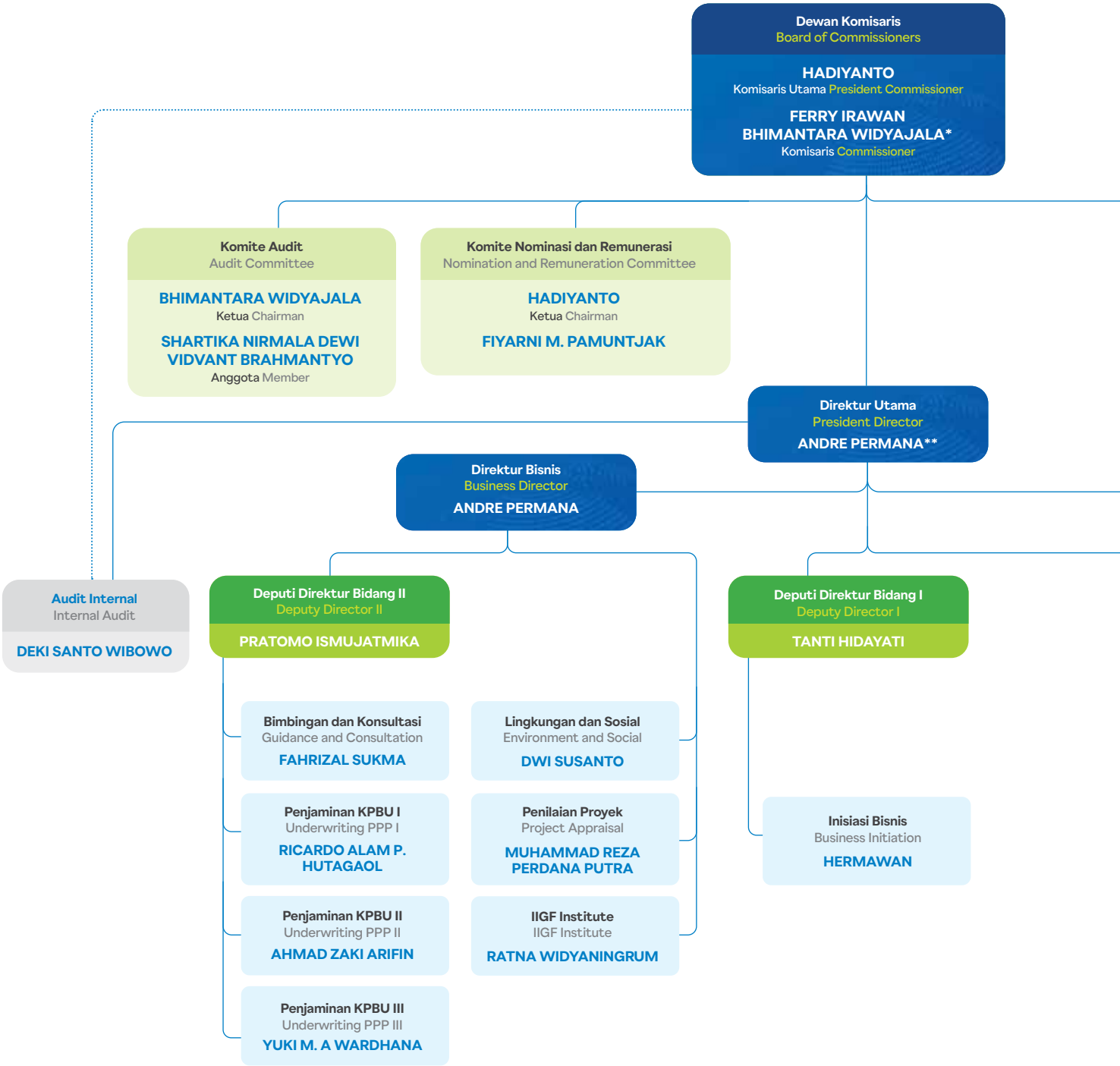
Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi terkait kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan publik lainnya telah diuraikan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

As of 31 December 2025, none of the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors hold shares in the Company, either directly or indirectly. Information regarding the shareholding of the Board of Commissioners and Board of Directors in other public companies is presented in the Corporate Governance chapter.

# Struktur Organisasi

## Struktur Organisasi

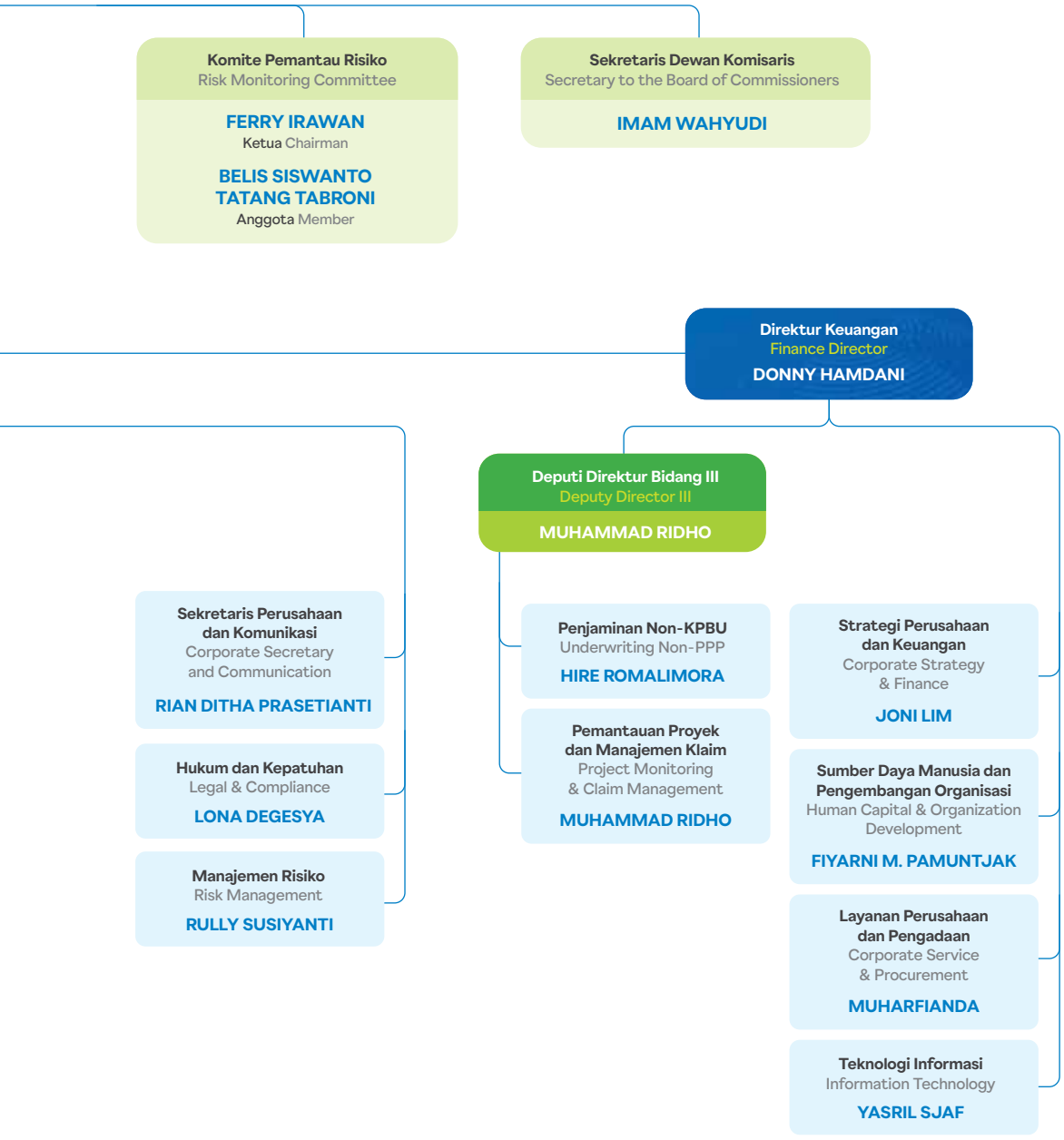
Struktur organisasi PT PII per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:




* Sdr. Bhimantara Widyajala menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 19 Desember 2025
Mr. Bhimantara Widyajala serves as a Commissioner of the Company since 19 December 2025

** Sdr. Andre Permana ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 15 Juli 2025
Mr. Andre Permana was appointed by the Board of Commissioners as Acting President Director since 15 July 2025

IIGF's organizational structure as of 31 December 2025 is as follows.



# Informasi Perubahan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi

Information on the Changes in the Membership of the Board of Commissioners and Board of Directors

## Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Tahun Buku 2025

Information on the Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year

Sepanjang tahun 2025, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Sdr. Bhimantara Widyajala sebagai Anggota Dewan Komisaris dan memberhentikan Sdr. Ahmad Ghufron sebagai Anggota Dewan Komisaris dikarenakan adanya penugasan Sdr. Ahmad Ghufron sebagai Anggota Dewan Komisaris di PT Indonesia Infrastructure Finance. Berikut susunan dan komposisi Dewan Komisaris PT PII periode 1 Januari – 31 Desember 2025:

Throughout 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent changes. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Number 369 of 2025 dated 19 December 2025, the General Meeting of Shareholders appointed Mr. Bhimantara Widyajala as a Member of the Board of Commissioners and dismissed Mr. Ahmad Ghufron as a Member of the Board of Commissioners due to Mr. Ahmad Ghufron's assignment as a Board Member at PT Indonesia Infrastructure Finance. The following is the composition of IIGF's Board of Commissioners for the period 1 January – 31 December 2025:

| Periode 1 Januari - 18 Desember 2025<br>Period 1 January - 18 December 2025 | | Periode 19 Desember - 31 Desember 2025<br>Period 19 December – 31 December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Komisaris Utama<br>President Commissioner | Hadiyanto | Komisaris Utama<br>President Commissioner | Hadiyanto |
| Komisaris<br>Commissioner | Ahmad Ghufron | Komisaris<br>Commissioner | Bhimantara Widyajala |
| Komisaris<br>Commissioner | Ferry Irawan | Komisaris<br>Commissioner | Ferry Irawan |

## Informasi Perubahan Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku 2025

Information on the Changes in the Board of Commissioners after the 2025 Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah tahun buku 2025 sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan ini.

There were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners after the 2025 fiscal year up to the submission date of this Annual Report.

## Informasi Perubahan Komposisi Anggota Direksi Tahun Buku 2025

Information on Changes in the Composition of the Board of Directors for the 2025 Fiscal Year

Sepanjang tahun 2025, susunan dan komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan dengan pengunduran diri Sdr. M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama pada tanggal 20 Juni 2025 yang mana atas pengunduran diri tersebut Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 225 Tahun 2025 pada 15 Juli 2025 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Menindaklanjuti KMK No. 225 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor SK-006/KOM/0725 pada tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-007/KOM/0825 pada tanggal 14 Agustus 2025 yang menunjuk Sdr. Andre Permana sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama. Berikut susunan dan komposisi Direksi PT PII periode 1 Januari – 31 Desember 2025:

Throughout 2025, the composition of the Company's Board of Directors underwent changes with the resignation of Mr. M. Wahid Sutopo as President Director on 20 June 2025 and following this resignation, the Shareholders issued Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 225 of 2025 on 15 July 2025 concerning the dismissal of the Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. In follow-up to KMK No. 225 of 2025 dated 15 July 2025, the Board of Commissioners issued a Decision Letter of the Board of Commissioners of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Number SK-006/KOM/0725 dated 15 July 2025 and Decision Letter of the Board of Commissioners of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Number SK-007/KOM/0825 dated 14 August 2025 which appointed Mr. Andre Permana as Business Director concurrently serving as Acting President Director. The following is the composition of IIGF's Board of Directors for the period 1 January – 31 December 2025:

| Periode 1 Juli 2024 – 14 Juli 2025<br>Period 1 July 2025 – 14 July 2025 | | Periode 15 Juli - 31 Desember 2025<br>Period 15 July - 31 December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Direktur Utama<br>President Director | M. Wahid Sutopo | Direkur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama<br>Business Director and Acting President Director | Andre Permana |
| Direktur Keuangan<br>Finance Director | Donny Hamdani | | |
| Direktur Bisnis<br>Business Director | Andre Permana | Direktur Keuangan<br>Finance Director | Donny Hamdani |

## Informasi Perubahan Direksi Setelah Tahun Buku 2025

Information on Changes in the Board of Directors After the 2025 Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan setelah tahun buku 2025 sampai dengan batas waktu Laporan Tahunan ini.

There were no changes in the composition of the Company's Board of Directors after the 2025 fiscal year up to the submission date of this Annual Report.

# Profil Dewan Komisaris

## Board of Commissioners Profile

Berikut profil Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2025:

The Following is the profile of IIGF's Board of Commissioners as of 31 December 2025:



**Bhimantara Widyajala**
Komisaris
Commissioner

**Hadiyanto**
Komisaris Utama
President Commissioner

**Ferry Irawan**
Komisaris
Commissioner



# Hadiyanto

Komisaris Utama
President Commissioner

**Indonesia**
Indonesian citizen

**63 tahun per 31 Desember 2025**
63 years old as of 31 December 2025

**Ciamis, 10 Oktober 1962**
Ciamis, 10 October 1962

**Bogor, Jawa Barat, Indonesia**
Bogor, West Java, Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| **Riwayat Pendidikan**<br>Educational Background | • Doktor Hukum, Universitas Padjajaran (2012)<br>• Master of Law dari Harvard University, USA (1993)<br>• Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran (1986) | • Doctorate of Law, Universitas Padjajaran (2012)<br>• Master of Law dari Harvard University, USA (1993)<br>• Bachelor of Law, Universitas Padjadjaran (1986) |
| **Sertifikasi**<br>Certification | • Corporate Governance That Build Value, Wharton School University of Pennsylvania, USA, 1-2 Februari, 2023<br>• One Planet Leader by IMD in Lausanne, Switzerland, 18-22 November, 2013<br>• Leading Organizational Change, Wharton University of Pennsylvania, Philadelphia, 3-6 Desember 2012 | • Corporate Governance That Builds Value, Wharton School University of Pennsylvania, USA, 1-2 Februari, 2023<br>• One Planet Leader by IMD in Lausanne, Switzerland, 18-22 November, 2013<br>• Leading Organizational Change, Wharton University of Pennsylvania, Philadelphia, 3-6 December 2012 |
| **Riwayat Jabatan**<br>Career History | Memiliki pengalaman luas di sektor keuangan dan hukum, dengan lebih dari 30 tahun pengabdian diantaranya:<br>• Anggota Dewan Pengawas RS TNI AD Dustira Cimahi (2024-November 2025)<br>• Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (2024-November 2025)<br>• Ketua Persatuan Purna Bakti Pegawai (P2BP) Kementerian Keuangan (2024-November 2025)<br>• Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2021-2024)<br>• Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2023)<br>• Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara (2021-2022)<br>• Komisaris PT Telkom Tbk (2012-2018)<br>• Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (2015-2021)<br>• Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk (2007-2012)<br>• Direktur Jenderal Kekayaan Negara (2006-2015)<br>• Alternate Executive Director di World Bank, Washington DC (2003-2005) | He has extensive experience in the financial and legal sectors, with over 30 years of service, including:<br>• Member of the Supervisory Board of RS TNI AD Dustira Cimahi (2024–November 2025)<br>• Member of the Board of Trustees of Universitas Padjadjaran (2024–November 2025)<br>• Chairman of Retired Employees Association (P2BP) of the Ministry of Finance (2024–November 2025)<br>• President Commissioner of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2021-2024)<br>• Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2023)<br>• Director General of Treasury (2021-2022)<br>• Commissioner of PT Telkom Tbk (2012-2018)<br>• Secretary General of the Ministry of Finance (2015-2021)<br>• President Commissioner of PT Garuda Indonesia Tbk (2007-2012)<br>• Director General of State Assets (2006-2015)<br>• Alternate Executive Director at the World Bank, Washington DC (2003-2005) |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>Legal Basis of Appointment | Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024 | Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Number 297 dated 1 July 2024 |
| **Periode Jabatan**<br>Term of Office | Ke 1, dengan masa jabatan 1 Juli 2024 – 30 Juni 2029 | First, with a term of office from 1 July 2024 – 30 June 2029 |
| **Rangkap Jabatan**<br>Concurrent Positions | Jabatan rangkap di dalam Perseroan<br>• Sebagai Komite: Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi | Within the Company<br>• As Committee: Chairman of the Nomination and Remuneration Committee |
| **Hubungan Afiliasi**<br>Affiliation | Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Perseroan | Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Shareholder of the Company |
| **Kepemilikan Saham Perseroan Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2025**<br>Company Shareholding, Statement of Independence, and Training in 2025 | Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini | Presented separately in the GCG chapter, under the subchapter Board of Commissioners in this Annual Report |



# Ferry Irawan

Komisaris
Commissioner

Indonesia
Indonesian citizen

50 tahun per 31 Desember 2025
50 years old as of 31 December 2025

Depok, 2 Februari 1975
Depok, 2 February 1975

Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| **Riwayat Pendidikan**<br>Educational Background | • Doktoral Ekonomi Moneter Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2006)<br>• Magister Ekonomi Moneter Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2004)<br>• Sarjana pada jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2000) | • Doctorate of Monetary Economics, Gradue School of Economics, University of Indonesia, Jakarta (2006)<br>• Master of Monetary Economics, Gradue School of Economics, University of Indonesia, Jakarta (2004)<br>• Bachelor of Financial Management, Faculty of Economics, University of Indonesia, Jakarta (2000) |
| **Sertifikasi**<br>Certification | - | - |
| **Riwayat Jabatan**<br>Career History | Memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang ekonomi dan pengalaman yang luas di sektor kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Dengan lebih dari 15 tahun pengabdian di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelum menjabat sebagai Dewan Komisaris PT PII, menduduki berbagai jabatan di Kemenko Perekonomian RI diantaranya:<br>• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara (2024-sekarang)<br>• Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah (2022-2023)<br>• Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal (2020-2022)<br>• Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil (2017-2020) | He has a strong background in economics and extensive experience in the macroeconomic and fiscal policy sectors. He has more than 15 years of service in the Ministry of Finance and the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Prior to serving on IIGF's Board of Commissioners, he held various positions at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, among others:<br>• Deputy for Coordination of State-Owned Enterprise Management and Development (2024–present)<br>• Expert Staff for Local Development (2022-2023)<br>• Assistant Deputy for Monetary and External Sector (2020-2022)<br>• Assistant Deputy for Local Economy and Real Sector (2017-2020) |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>Legal Basis of Appointment | Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 339 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 | Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Number 339 dated 27 August 2024 |
| **Periode Jabatan**<br>Term of Office | Ke 1 dengan masa jabatan 27 Agustus 2024 – 26 Agustus 2029 | First, with a term of office from 27 August 2024 – 26 August 2029 |
| **Rangkap Jabatan**<br>Concurrent Positions | Jabatan rangkap di dalam Perseroan<br>• Sebagai Komite: Ketua Komite Pemantau Risiko<br><br>Jabatan rangkap di luar Perseroan<br>• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2024-sekarang) | Within the Company<br>• As Committee: Chairman of the Risk Monitoring Committee<br><br>Outside the Company<br>• Deputy for Coordination of Management and Development of State-Owned Enterprises, Ministry of State-Owned Enterprises (2024-present) |
| **Hubungan Afiliasi**<br>Affiliation | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham dikarenakan memiliki jabatan di Kementerian Koordinator Perekonomian RI | Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. However, he has an affiliation with the Shareholder due to holding a position at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia |
| **Kepemilikan Saham Perseroan Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2025**<br>Company Shareholding, Statement of Independence, and Training in 2025 | Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini | Presented separately in the GCG chapter, under the subchapter Board of Commissioners in this Annual Report |



# Bhimantara Widyajala

Komisaris
Commissioner

Indonesia
Indonesian citizen

58 tahun per 31 Desember 2025
58 years old as of 31 December 2025

Surabaya, 29 Maret 1967
Surabaya, 29 March 1967

Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia
Jakarta, Special Region of Jakarta, Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| **Riwayat Pendidikan**<br>Educational Background | • Magister Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia (2009)<br>• S2 Master of Science in Finance – The George Washington University, DC, USA (1999)<br>• S1 Hukum – Universitas Indonesia (1992)<br>• Diploma IV Akuntansi - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1995)<br>• Diploma III - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) | • Master's Degree in Accounting, Universitas Indonesia (2009)<br>• Master of Science in Finance (M.Sc.), The George Washington University, DC, USA (1999)<br>• Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1992)<br>• Diploma IV in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (1995)<br>• Diploma III, State College of Accountancy (STAN) |
| **Sertifikasi**<br>Certification | • Indonesia Internal Auditor Practitioner, the Institute of Internal Auditors Indonesia (2022)<br>• Fellow CPA (Aust.), CPA Australia (2021)<br>• Certified Professional Management Accountant (CPMA), IAMI (2021)<br>• Qualified Government Internal Auditor (QGIA), Dewan Sertifikasi QGIA (2021)<br>• Certified Professional in Human Resources Management (CPHRM) | • Indonesia Internal Auditor Practitioner, The Institute of Internal Auditors Indonesia (2022)<br>• Fellow CPA (Aust.), CPA Australia (2021)<br>• Certified Professional Management Accountant (CPMA), IAMI (2021)<br>• Qualified Government Internal Auditor (QGIA), QGIA Certification Council (2021)<br>• Certified Professional in Human Resources Management (CPHRM) |
| **Riwayat Jabatan**<br>Career History | Sebagai profesional dengan latar belakang di bidang akuntansi dan manajemen risiko. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban di Kementerian Keuangan RI antara lain:<br>• Saat ini Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (2024 – sekarang)<br>• Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) (2023)<br>• Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (2023)<br>• Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK (2020)<br>• Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, Sekretariat Jenderal (2020) | A professional with a background in accounting and risk management. Some of key positions previously held at the Ministry of Finance of RI include:<br>• At present, Head of the Budget and Treasury Education and Training Center, Financial Education and Training Agency (BPPK) (2024–present)<br>• Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) (2023)<br>• Director of Regional Financing and Economy, DJPK (2023)<br>• Director of Transfer Capacity and Implementation, DJPK (2020)<br>• Staff Analyst in Human Resources, Secretariat General (2020) |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>Legal Basis of Appointment | Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 | Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Number 369 dated 19 December 2025 |
| **Periode Jabatan**<br>Term of Office | Ke 1 dengan masa jabatan 19 Desember 2025 – 18 Desember 2030 | First appointment with a term of office from 19 December 2025 – 18 December 2030 |
| **Rangkap Jabatan**<br>Concurrent Positions | Jabatan rangkap di dalam Perseroan<br>• Sebagai Komite: Ketua Komite Audit<br><br>Jabatan rangkap di luar Perseroan<br>• Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI (2024 – sekarang) | Within the Company<br>• As Committee: Chairman of the Audit Committee<br><br>Outside the Company<br>• Head of the Budget and Treasury Education and Training Center, Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2024–present) |
| **Hubungan Afiliasi**<br>Affiliation | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham dikarenakan memiliki jabatan di Kementerian Keuangan RI | Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. However, he has an affiliation with the Shareholder due to holding a position at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia |
| **Kepemilikan Saham Perseroan Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2025**<br>Company Shareholding, Statement of Independence, and Training in 2025 | Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini | Presented separately in the GCG chapter, under the subchapter Board of Commissioners in this Annual Report |



# Profil Direksi
## Board of Directors' Profile

Berikut profil Direksi PT PII per 31 Desember 2025:

The following is the profile of the Board of Directors of IIGF as of 31 December 2025:



### Andre Permana

Direkur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama
Business Director and Acting President Director

### Donny Hamdani

Direktur Keuangan
Director of Finance



# Andre Permana

Direkur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama
Business Director and Acting President Director

**Indonesia**
Indonesian citizen

**49 tahun per 31 Desember 2025**
49 years old as of 31 December 2025

**Cirebon, 31 Januari 1976**
Cirebon, 31 January 1976

**Tangerang Selatan, Banten, Indonesia**
South Tangerang, Banten Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| **Riwayat Pendidikan**<br>Educational Background | • Doctor of Philosophy bidang Risk Management, Project Finance dari Nanyang Technological University, Singapura (2012)<br>• Magister Teknik bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2003)<br>• Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1998) | • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Risk Management, Project Finance from Nanyang Technological University, Singapore (2012)<br>• Master of Engineering in Project Management from Universitas Indonesia (2003)<br>• Bachelor of Engineering in Civil Engineering from Universitas Indonesia (1998) |
| **Sertifikasi**<br>Certification | • *Certified CP3P Level Foundation*<br>• *Accredited Trainer CP3P Level Foundation*<br>• Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) | • Certified CP3P Level Foundation<br>• Accredited Trainer CP3P Level Foundation<br>• Junior Expert in Civil Engineering (Construction Services Development Board) |
| **Riwayat Jabatan**<br>Career History | Sebelum diangkat menjadi Direktur Bisnis dan Plt. Direktur Utama Perseroan, karier profesional di Perseroan dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi Risk and Compliance (2010-2016), Kepala Divisi Business Development (2017), dan terakhir kali menjabat sebagai Executive Vice President Project Appraisal (2017-2020) | Prior to being appointed as Business Director and Acting President Director of the Company, his professional career at the Company began in 2010 and held various strategic positions, including Head of Risk and Compliance Division (2010–2016), Head of Business Development Division (2017), and the last position was Executive Vice President of Project Appraisal (2017–2020) |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>Legal Basis of Appointment | Sebagai Direktur Bisnis berdasarkan:<br>• Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 tanggal 23 Maret 2020 (pengangkatan pertama)<br>• Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 55 Tahun 2025 tanggal 8 Maret 2025 (pengangkatan kedua)<br><br>Sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan:<br>• Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-006/KOM/0725 pada tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-007/KOM/0825 pada tanggal 14 Agustus 2025 | As Business Director, based on:<br>• Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020 dated 23 March 2020 (first appointment)<br>• Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 55 of 2025 dated 8 March 2025 (second appointment)<br><br>As Acting President Director, based on:<br>• Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-006/KOM/0725 dated July 15, 2025, and Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-007/KOM/0825 dated 14 August 2025 |
| **Periode Jabatan**<br>Term of Office | Sebagai Direktur Bisnis<br>• Periode pertama dengan masa jabatan 23 Maret 2020 sampai 22 Maret 2025<br>• Periode kedua dengan masa jabatan 23 Maret 2025 sampai 22 Maret 2030<br><br>Sebagai Plt. Direktur Utama<br>• Sementara sejak 15 Juli 2025 sampai saat ini | As Business Director<br>• First period with a term of office from 23 March 2020 to 22 March 2025<br>• Second period with a term of office from 23 March 2025 to 22 March 2030<br><br>As Acting President Director<br>• Temporarily since 15 July 2025 to present |
| **Rangkap Jabatan**<br>Concurrent Positions | Jabatan rangkap di dalam Perseroan<br>• Plt. Direktur Utama<br><br>Jabatan rangkap di luar Perseroan<br>• Dosen Tidak Tetap, Program S2 Magister Teknik, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2014 – saat ini) | Within the Company<br>• Acting President Director<br><br>Outside the Company<br>• Adjunct Lecturer, Master of Engineering Program, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia (2014–present) |
| **Hubungan Afiliasi**<br>Affiliation | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan | Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or the Shareholders of the Company |
| **Kepemilikan Saham Perseroan Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2025**<br>Company Shareholding, Statement of Independence, and Training in 2025 | Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini | Presented separately in the GCG chapter, under the subchapter Board of Directors in this Annual Report. |



# Donny Hamdani

Direktur Keuangan
Finance Director

**Indonesia**
Indonesian citizen

**47 tahun per 31 Desember 2025**
47 years old as of 31 December 2025

**Jakarta, 23 September 1978**
Jakarta, 23 September 1978

**Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia**
East Jakarta, Special Region of Jakarta, Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| **Riwayat Pendidikan**<br>Educational Background | • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000) | • Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Indonesia (2000) |
| **Sertifikasi**<br>Certification | • Chartered Accountant (CA) | • Chartered Accountant (CA) |
| **Riwayat Jabatan**<br>Career History | Sebelum diangkat menjadi Direktur Keuangan, merintis karier sebagai auditor selama 11 tahun di KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) tahun 2001-2012 Kemudian bergabung pertama kali dengan Perseroan pada tahun 2012 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Executive Vice President Corporate Strategy and Finance (2017-2018) dan terakhir kali menjabat sebagai Deputi Direktur Keuangan (2018-2022) sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan | Prior to being appointed as Finance Director, he began a career as an auditor for 11 years at KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers network) from 2001–2012. Joined the Company for the first time in 2012 and held various strategic positions, including Executive Vice President of Corporate Strategy and Finance (2017–2018) and the last position as Deputy Finance Director (2018–2022) before being appointed as Finance Director |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>Legal Basis of Appointment | Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022 | Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022 dated 17 January 2022 |
| **Periode Jabatan**<br>Term of Office | Periode pertama dengan masa jabatan 17 Januari 2022 sampai 16 Januari 2027 | First period with a term of office from 17 January 2022 to 16 January 2027 |
| **Rangkap Jabatan**<br>Concurrent Positions | Jabatan rangkap di dalam Perseroan<br>• Komite Pengarah TI<br><br>Jabatan rangkap di luar Perseroan<br>• Tidak ada | Within the Company<br>• IT Steering Committee<br><br>Outside the Company<br>• None |
| **Hubungan Afiliasi**<br>Affiliation | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan | Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, or the Shareholders of the Company |
| **Kepemilikan Saham Perseroan Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2025**<br>Company Shareholding, Statement of Independence, and Training in 2025 | Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini | Presented separately in the GCG chapter, under the subchapter Board of Directors in this Annual Report |

# Profil Deputi Direktur

Profile of Deputy Directors



## Tanti Hidayati

Deputi Direktur Bidang I
Deputy Director I

**Indonesia**
Indonesian

**53 tahun**
53 years old

**Depok, Jawa Barat, Indonesia**
Depok, West Java, Indonesia

### Latar Belakang Pendidikan

Educational Background

Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995.

Bachelor of Agribusiness from Institut Pertanian Bogor in 1995.

### Dasar Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang I berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-014/DIR/HC/0322.

Appointed as Deputy Director I pursuant to the Board of Directors' Decree No. SK-014/DIR/HC/0322.



## Pratomo Ismujatmika

Deputi Direktur Bidang II
Deputy Director II

**Indonesia**
Indonesian

**49 tahun**
49 years old

**Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia**
East Jakarta, Special Region of Jakarta, Indonesia

### Latar Belakang Pendidikan

Educational Background

- Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjajaran (2025)
- Magister of Business Administration dari Sullivan University (2005)
- Magister Manajemen (Keuangan) dari Universitas Gadjah Mada (2003)
- Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh November (1999)
- Doctor of Management Science from Padjajaran University (2025)
- Master of Business Administration from Sullivan University (2005)
- Master of Management (Finance) from Gadjah Mada University (2003)
- Bachelor of Architecture Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1999)

### Dasar Pengangkatan

Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang II berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/HC/0922.

Appointed as Deputy Director II pursuant to the Board of Directors' Decree No. SK-030/DIR/HC/0922.



## Muhammad Ridho

Deputi Direktur Bidang III
Deputy Director III

**Indonesia**
Indonesian

**49 tahun**
49 years old

**Tangerang Selatan, Banten, Indonesia**
South Tangerang, Banten, Indonesia

### Latar Belakang Pendidikan
Educational Background

- Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2008), Graduated in 2010
- Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005)
- Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003)
- Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro (1998)
- Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2010)
- Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005)
- Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003)
- Bachelor of Engineering in Urban and Regional Planning from Diponegoro University (1998)

### Dasar Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang III berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/HC/0922.

Appointed as Deputy Director III pursuant to the Board of Directors' Decree No. SK-030/DIR/HC/0922.

# Demografi Karyawan

## Employee Demographics

Hingga akhir tahun 2025, jumlah karyawan PT PII tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, yaitu sebanyak 163 orang karyawan. Komposisi karyawan saat ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perseroan, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya.

As of the end of 2025, the number of employees at IIGF remained unchanged at 163 employees. The current employee composition has been aligned with the Company's organizational needs, both in terms of quantity and competency quality.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan komposisi karyawan selama tiga tahun terakhir berdasarkan status kepegawaian, level organisasi, jenjang jabatan, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Pada akhir tahun 2025, PT PII melakukan penyesuaian kepangkatan karyawan berdasarkan level kompetensi individu sehingga komposisi jumlah karyawan berdasarkan kepangkatan dan jabatan karyawan akan berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan implementasi CBHRM di PT PII pada periode tahun 2025.

The tables below show the employee composition over the past three years based on employment status, organizational level, job level, gender, age, and education level. At the end of 2025, IIGF adjusted its employee ranks based on individual competency levels, resulting in a different employee composition based on rank and position than in the previous year. This aligns with the implementation of CBHRM at IIGF in 2025.

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

| Status Kepegawaian<br>Employment Status | Tahun<br>Year | | |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Tetap Permanent | 143 | 147 | 149 |
| Tidak Tetap Contract Employee | 20 | 16 | 15 |
| **Jumlah Total** | **163** | **163** | **164** |

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan dalam Struktur Organisasi

Employee Composition by Position Level in Organization Structure

Sesuai dengan kebutuhan Perseroan, Direksi menetapkan jabatan karyawan pada level organisasi yang terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional, dengan sebaran sebagai berikut:

In line with the Company's needs, the Board of Directors determines employee positions at the organizational level consisting of structural position and functional position, with the following distribution:

| Level Jabatan<br>Position Level | Tahun<br>Year | | |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Deputy Director | 3 | 3 | 3 |
| Division Head | 17 | 18 | 18 |
| Team Member | 140 | 141 | 142 |
| Functional Team | 3 | 1 | 1 |
| **Jumlah Total** | **163** | **163** | **164** |

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Kepangkatan
Employee Composition by Position

| Kepangkatan Position | Tahun Year | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| EVP | 7 | 7 |
| VP-SVP | 37 | 36 |
| DSM-AVP | 36 | 34 |
| AM-M | 59 | 61 |
| Staff | 24 | 26 |
| **Jumlah Total** | **163** | **164** |

Sebagai bentuk implementasi kebijakan *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM), PT PII telah menerapkan sistem kepangkatan karyawan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya bagi karyawan tetap yang telah melaksanakan asesmen, dengan rincian sebagai berikut:

As a form of implementation of the Competency Based Human Resources Management (CBHRM) policy, IIGF has implemented a different employee ranking system compared to the previous year for permanent employees who have completed the assessment, with the following details:

| Kepangkatan Position | 2025 |
|---|---|
| EVP | 5 |
| SVP | 14 |
| VP | 23 |
| Associate VP | 19 |
| Officer | 60 |
| Associate | 14 |
| **Jumlah Total** | **135** |

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat 28 (dua puluh delapan) karyawan yang belum menggunakan kepangkatan baru, yang terdiri dari 2 (dua) karyawan yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan, 6 (enam) karyawan yang akan atau sedang menjalani masa persiapan pensiun, serta 20 (dua puluh) karyawan dengan status karyawan tidak tetap. Penyesuaian kepangkatan terhadap karyawan dimaksud akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan PT PII.

Based on the table, there are still 28 (twenty-eight) employees who have not used the new rank, consisting of 2 (two) employees who are on unpaid leave, 6 (six) employees who will or are undergoing a retirement preparation period, and 20 (twenty) employees with non-permanent employee status. Rank adjustments for these employees will be carried out in stages in 2026 according to IIGF's needs.

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

| Jenis Kelamin Gender | Tahun Year | | |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Laki-laki Male | 84 | 86 | 88 |
| Perempuan Female | 79 | 77 | 76 |
| **Jumlah Total** | **163** | **163** | **164** |

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition by Age

| Usia Age | Tahun Year | | |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| >56 tahun years old | 1 | - | - |
| 41 – 56 Tahun years old | 44 | 47 | 42 |
| 31 – 40 Tahun years old | 87 | 87 | 83 |
| 20 – 30 Tahun years old | 31 | 29 | 39 |
| **Jumlah Total** | **163** | **163** | **164** |

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education Level

| Tingkat Pendidikan Education Level | Tahun Year | | |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Doktoral Doctorate | 6 | 3 | 2 |
| Pasca Sarjana Master | 64 | 63 | 61 |
| Sarjana Bachelor | 92 | 94 | 97 |
| Diploma Diploma | 1 | 3 | 4 |
| **Jumlah Total** | **163** | **163** | **164** |

# Struktur Grup/Kelompok Usaha serta Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/ *Special Purpose Vehicle*

Structure of the Group/ Business Group and Its Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures/ Special Purpose Vehicles

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Entitas Pengendalian Bersama, Perusahaan Patungan atau *Joint Venture Company* (JV), maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Until 31 December 2025, IIGF does not have any subsidiaries, associates, jointly controlled entities, joint venture companies (JV), or special purpose vehicles (SPV).

# Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perseroan

Supporting Institutions and/or Professions

## Kantor Notaris

Notary Office

| | |
|---|---|
| Nama<br>Name | **Arry Supratno, S.H.** |
| Alamat<br>Address | Arry Centre,<br>Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69, Jakarta Pusat, Jakarta 10210 |
| Jasa yang diberikan<br>Service provided | Penyusunan Akta Notaris sebagai berikut:<br>1. Berita Acara RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahun Buku 2024;<br>2. Dua (2) Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas Pengangkatan kembali dan Pemberhentian Anggota Direksi;<br>3. Satu (1) Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris;<br>4. Berita Acara RUPS Tahunan persetujuan RKAP Tahun 2026 Perseroan. |
| | Preparation of Notarial Deeds as follows:<br>1. Minutes of the Annual GMS Approving the 2024 Financial Year Report;<br>2. Two (2) Shareholders' Deeds of Statement of Resolution regarding the dismissal and appointment of members of the Board of Directors;<br>3. One (1) Shareholders' Deeds of Statement of Resolution regarding the dismissal and appointment of members the Board of Commissioners;<br>4. Minutes of the Annual GMS Approving the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) of the Company |
| Periode Penugasan<br>Assignment Period | Tahun 2025 |
| | 2025 |

## Konsultan Hukum

Legal Consultant

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PII tidak menghadapi permasalahan hukum, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Konsultan Hukum.

As of 31 December 2025, IIGF did not face any legal issues. Therefore, there is no information regarding a Legal Consultant.

## Biro Administrasi Publik

Public Administration Bureau

PT PII per 31 Desember 2025 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Biro Administrasi Publik.

As of 31 December 2025, IIGF did not issue shares on any Stock Exchange. Therefore, there is no information regarding a Public Administration Bureau.

## Perusahaan Pemeringkat Efek

Securities Rating Agency

PT PII per 31 Desember 2025 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek.

As of 31 December 2025, IIGF did not issue shares on any Stock Exchange Therefore, there is no information regarding a Securities Rating Agency.

# Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

| | |
|---|---|
| Kantor Akuntan Publik (KAP)<br>Public Accounting Firm (KAP) | **KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan**<br>**(firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)**<br>(a member firm of the PricewaterhouseCoopers network) |
| | No. Izin: KEP-315/KM.1/2024 — License No.: KEP-315/KM.1/2024 |
| Nama Akuntan Publik<br>Public Accountant's Name | **Jimmy Pangestu, SE., CPA** |
| | No. Izin: AP.1224 — License No.: AP.1224 |
| Alamat<br>Address | WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31<br>Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 29, RT. 4/RW. 2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Indonesia 12920 |
| Periode Penugasan KAP<br>KAP Assignment Period | Periode ke-2, tahun buku 2024 dan 2025*<br>2nd period covering the fiscal years 2024 and 2025* |
| Periode Penugasan AP<br>AP Assignment Period | Periode ke-3, Tahun Buku 2023-2025<br>3rd period covering the fiscal years 2023-2025 |
| Jasa Audit dan Biaya jasa (*fee*) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku 2025<br>Audit Services and Audit Fees for each assignment provided during the 2025 fiscal year | Jasa Audit Audit Services: *General Audit* Laporan Keuangan Financial Statements General Audit; Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan PSA-62<br>Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control based on PSA-62; Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris<br>Assurance Engagement on the Company's, Board of Directors', and Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPIs)<br>Biaya Audit Audit Fee: Rp1,195,000,000 |
| Jasa Non Audit dan Biaya jasa (*fee*)<br>Non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku 2025<br>Non-Audit Services and Non-Audit Fees for each assignment provided during the 2025 fiscal year | Pada tahun buku 2025, tidak ada jasa non audit sehingga tidak terdapat informasi pembayaran biaya jasa non-audit kepada KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan — In the 2025 fiscal year, there were no non-audit services, so there is no information on non-audit fee payments to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners |

* terhitung sejak pergantian nama dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan

* starting from the change of name from KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partner to KAP Rintis, Jumadi, Rianto, and Partner

Penjelasan lebih lengkap terkait Kantor Akuntan Publik Perseroan tahun 2025 diuraikan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Audit Eksternal/Akuntan Publik pada Laporan Tahunan ini.

A more detailed explanation regarding the Company's Public Accounting Firm in 2025 is presented in the Corporate Governance chapter, under the External Audit/Public Accountant section of this Annual Report.

# Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sampai dengan 31 Desember 2025 PT PII tidak menerbitkan saham kepada publik. Dengan demikian pada Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

All shares of the Company are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, so as of 31 December 2025, IIGF did not issued shares to the public. Therefore, in this Annual Report, the Company does not provide information regarding the chronology of listing, types of corporate actions, changes in the number of shares, or stock exchange names.

# Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya

Chronology of Bond/Securities Issuance and/or Listing

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PII tidak menerbitkan efek dalam bentuk apa pun yang diperdagangkan di bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

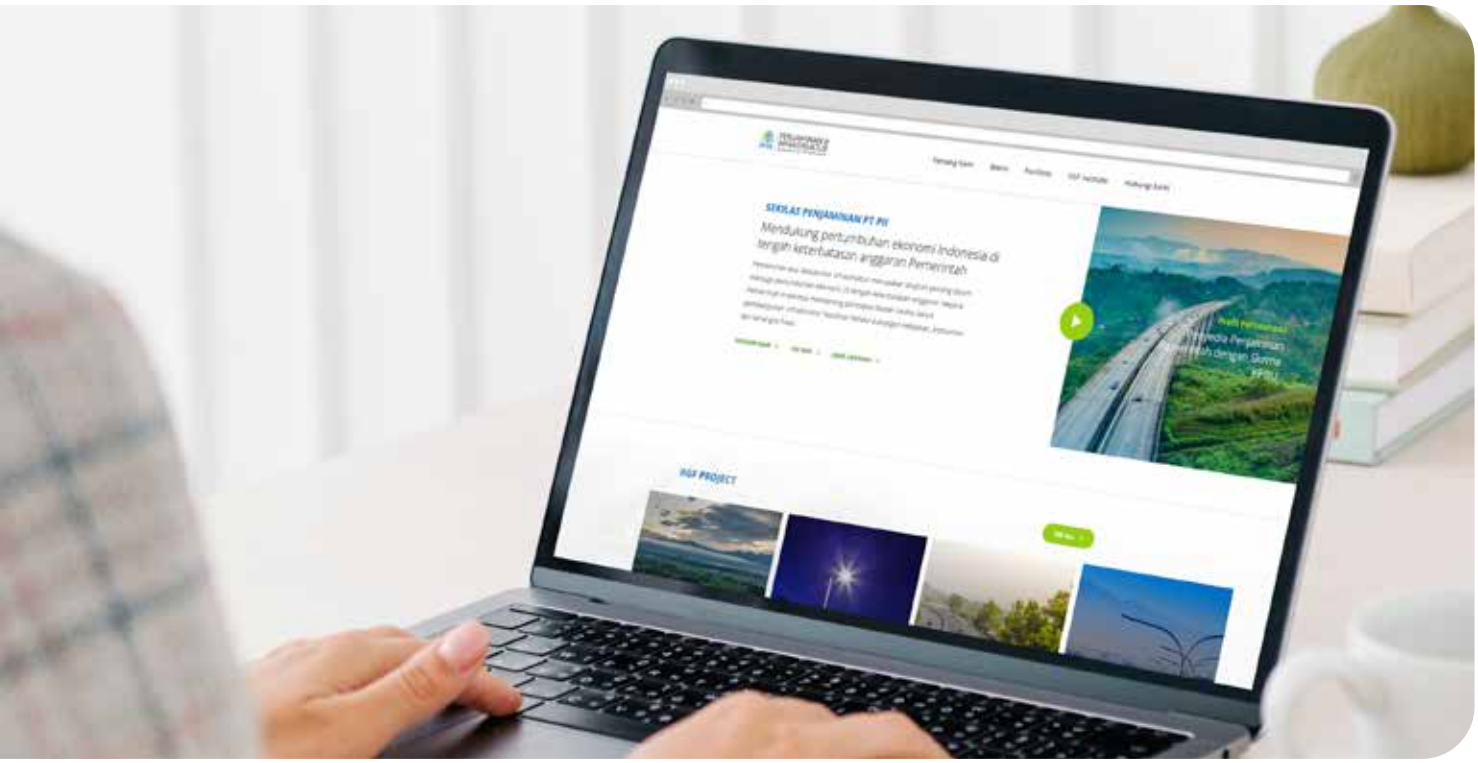
As of 31 December 2025, IIGF did not issued any securities in any form traded on any stock exchange. Therefore, there is no information regarding the chronology of issuance and/or listing of other securities from the initial issuance to the end of the fiscal year.

# Informasi Pada Situs *Website* Perseroan

Information on the Company's Website

PT PII menyediakan berbagai informasi dan data terkait Perseroan yang dapat diakses oleh publik melalui situs *website* Perseroan yang beralamat di www.ptpii.co.id. Situs web resmi PT PII menyajikan informasi dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada halaman utama, tersedia bar navigasi untuk memudahkan pengunjung mengakses halaman informasi yang terbagi dalam 5 (lima) kategori informasi sebagai berikut:

IIGF provides various information and data related to the Company that can be accessed by the public through the Company's website at www.ptpii.co.id. The official website of IIGF presents information in two languages, Bahasa Indonesia and English. On the homepage, a navigation bar is available to facilitate visitors in accessing information pages, which are divided into 5 (five) categories as follows:



## Tentang Kami
## About Us

**Tentang Kami**
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Visi & Misi
2. Jejak Langkah
3. Regulasi
4. Manajemen
5. Struktur Organisasi
6. Pemegang Saham
7. Pemangku Kepentingan

**About Us**
On this menu, there is related information:
1. Vision & Mission
2. Milestones
3. Regulation
4. Management
5. Organizational Structure
6. Shareholders
7. Stakeholders

**Acuan Alokasi risiko**
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Umpan Balik Alokasi Risiko
2. Alokasi Risiko

**Risk Allocation References**
On this menu, there is related information:
1. Risk Allocation Feedback
2. Risk Allocation

**Tata Kelola Perusahaan**
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Sekilas Tata Kelola Perusahaan
2. Manual Kebijakan Perusahaan
3. Pelaporan Pelanggaran

**Good Corporate Governance**
On this menu, there is related information:
1. Corporate Governance Highlight
2. Company's Manual
3. Whistleblowing

## Bisnis
## Business

**Berita & Publikasi**
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Berita Perusahaan
2. Publikasi
3. Publikasi IIGF Institute
4. Perpustakaan Media
5. e-Perpustakaan

**News & Publication**
On this menu, there is related information:
1. Company News
2. Publication
3. IIGF Institute Publication
4. Media Library
5. e-Library

**Produk**
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Penjaminan Pemerintah
2. Pembiayaan Kreatif
3. Penjaminan Pinjaman Langsung
4. Persiapan dan Pendampingan Proyek

**Product**
On this menu, there is related information:
1. Sovereign Guarantee
2. Creative Financing
3. Direct Loan Guarantees
4. Project Preparation and Advisory

**E-Procurement**
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Pengadaan
2. Pendaftaran Pengadaan
3. Registrasi Akun

**E-Procurement**
On this menu, there is related information:
1. Procurement
2. Procurement Registration
3. Account Registration

## Portfolio
## Portfolio

**Proyek**
Pada menu ini terdapat informasi terkait Informasi Proyek

**Projects**
In this menu there is information related to Project Information

**Keberlanjutan**
Pada menu ini terdapat informasi terkait Keberlanjutan

**Sustainability**
In this menu there is information related to Sustainability

**IIGF Institute**
IIGF Institute

Pada menu ini terdapat informasi terkait kegiatan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute.

The menu contains information related to the activities of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute.

**Hubungi Kami**
Contact Us

Pada menu ini terdapat informasi terkait kontak Perseroan dan feedback form.

+62 21 5795 0550
+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

This menu contains information related to the Company's contact and feedback form.

+62 21 5795 0550
+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

Berikut tabel pemenuhan informasi pada situs Perseroan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015.

The following table shows the fulfillment of information on the Company's website in accordance with POJK No. 8/POJK.04/2015.

| Uraian<br>Description | Ketersediaan<br>Availability | Keterangan<br>Remark |
|---|---|---|
| Struktur grup Perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu<br>Company Group Structure and Shareholder Information up to the Ultimate Individual Owner | ✓ | Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII"<br>Available, found in the "About Us" menu |
| Isi Kode Etik<br>Contents of the Code of Ethics | ✓ | Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan"<br>Available, found in the "Corporate Policy Manual" menu |
| Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan<br>Information about the General Meeting of Shareholders (GMS), at a minimum including the agenda materials discussed in the GMS, a summary of the GMS minutes, and key dates, namely announcement date of the GMS, notice date of the GMS, GMS date, and the date the summary of the GMS minutes is published | ✓ | Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi"<br>Available, found in the "News and Publications" menu |
| Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)<br>Annual Financial Statements (last 5 years) | ✓ | Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi"<br>Available, found in the "News and Publications" menu |
| Profil Dewan Komisaris dan Direksi<br>Profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors | ✓ | Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII"<br>Available, found in the "About Us" menu |
| Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal<br>Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit | ✓ | Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan"<br>Available, found in the "Corporate Policy Manual" menu |

X : tersedia pada situs Perseroan
✓ : belum tersedia pada situs Perseroan

X : available at the Company's website
✓ : not available at the Company's website

# Analisis dan Pembahasan Manajemen

## Management Discussion and Analysis





# Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industrial Overview

## Kondisi Perekonomian Global
Global Economic Condition

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diestimasikan tetap resilien sebesar 3,3%. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan antara tekanan dari perubahan kebijakan perdagangan global dan dorongan positif dari peningkatan investasi berbasis teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), terutama di kawasan Amerika Utara dan Asia, didukung kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif serta ketahanan sektor swasta. Inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 4,1% pada tahun 2025 yang akan berangsur turun seiring dengan proses penurunan inflasi di Amerika Serikat diproyeksikan berlangsung lebih gradual dibandingkan negara ekonomi besar lainnya.

Meskipun demikian, risiko terhadap prospek pertumbuhan global masih cenderung berada pada sisi penurunan. Penyesuaian ekspektasi terhadap produktivitas AI berpotensi memicu perlambatan investasi dan koreksi pasar keuangan, sementara ketegangan perdagangan, dinamika politik domestik, maupun ketegangan geopolitik dapat meningkatkan ketidakpastian dan mengganggu stabilitas rantai pasok serta harga komoditas. Di sisi lain, peluang pertumbuhan tetap terbuka apabila investasi dan adopsi AI mampu mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, serta apabila ketegangan perdagangan mereda. Untuk itu, kebijakan yang berfokus pada pemulihan ruang fiskal, menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan, mengurangi ketidakpastian, serta mempercepat reformasi struktural menjadi kunci dalam memperkuat prospek pertumbuhan jangka menengah.

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO) oleh *International Monetary Fund* (IMF), edisi Januari 2026.

Based on the World Economic Outlook (WEO) report published by the International Monetary Fund in January 2026, global economic growth in 2025 is expected to remain resilient at 3.3%. This stability reflects a balance between pressures arising from shifts in global trade policies and positive momentum from increased technology-based investment, including Artificial Intelligence (AI), particularly in North America and Asia, supported by accommodative fiscal and monetary policies as well as the resilience of the private sector. Global inflation is projected to gradually decline from 4.1% in 2025, easing in line with the disinflation process in the United States, which is expected to proceed more gradually compared to other major economies.

Nevertheless, risks to the global growth outlook remain tilted to the downside. Adjustments in expectations regarding AI-driven productivity may trigger slower investment and corrections in financial markets, while trade tensions, domestic political dynamics, and geopolitical conflicts may heighten uncertainty and disrupt supply chain stability and commodity prices. On the other hand, growth opportunities remain if AI investment and adoption are able to sustainably boost productivity and if trade tensions ease. Therefore, policies focused on restoring fiscal space, maintaining price and financial system stability, reducing uncertainty, and accelerating structural reforms will be key to strengthening the medium-term growth outlook.

Source: World Economic Outlook (WEO) by the International Monetary Fund, January 2026 edition.

## Kondisi Perekonomian Indonesia
Indonesian Economic Condition

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025, berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, tercatat mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4. Secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 5,03% (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%, sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh paling tinggi sebesar 7,03%.

Indonesia's economy in 2025, based on the Gross Domestic Product (GDP) at current prices, was recorded at Rp23,821.1 trillion with GDP per capita of Rp83.7 million, or equivalent to USD5,083.4. On an annual basis, Indonesia's economy grew by 5.11%, higher than the 2024 growth of 5.03% (c-to-c). In terms of production, the Other Services sector recorded the highest growth at 9.93%, while from the expenditure side, the Exports of Goods and Services component posted the highest growth at 7.03%.

Sementara itu, inflasi secara tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 2,92% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,92. Inflasi y-on-y tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,33%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,58%; kelompok kesehatan sebesar 1,83%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,62%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,46%; kelompok transportasi sebesar 1,23%; kelompok pendidikan sebesar 1,22%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,66%; serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20%. Sementara itu, satu-satunya kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencatat deflasi sebesar 0,28%.

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Meanwhile, annual inflation (y-on-y) was recorded at 2.92%, with the Consumer Price Index (CPI) reaching 109.92. The y-on-y inflation was influenced by price increases in most expenditure groups. The highest increase occurred in the personal care and other services group at 13.33%, followed by the food, beverages, and tobacco group at 4.58%; the health group at 1.83%; the housing, water, electricity, and household fuels group at 1.62%; the food and beverage provision/restaurants group at 1.46%; the transportation group at 1.23%; the education group at 1.22%; the recreation, sports, and culture group at 1.17%; the clothing and footwear group at 0.66%; and the furnishings, household equipment, and routine household maintenance group at 0.20%. Meanwhile, the only group that recorded a decline in the index was the information, communication, and financial services group, which experienced a deflation of 0.28%.

Source: Official Statistics News Release (BRS) by the Statistics Indonesia (BPS).

## Perkembangan Industri Konstruksi dan Infrastruktur Nasional

Development of the National Construction Industry and Infrastructure Industry

Meskipun menghadapi tantangan global dan kondisi pembiayaan yang lebih ketat, industri infrastruktur tetap menunjukkan ekspansi berkelanjutan melalui dukungan investasi publik dan partisipasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan energi besar yang berjalan hingga 2025 dan seterusnya. Pertumbuhan nilai tambah konstruksi mencapai 7% di tahun 2024 dan tetap tumbuh 3,6% pada pertengahan 2025, sejalan dengan stabilnya kondisi makroekonomi dan inflasi yang menurun, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembiayaan proyek-proyek besar.

Ekspektasi pertumbuhan untuk tahun 2025 tetap optimis, dengan proyeksi total pasar konstruksi meningkat sekitar 5,48% dibandingkan 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor bangunan yang diperkirakan naik tajam sementara konstruksi sipil mengalami sedikit tekanan karena pengetatan anggaran. Keberlanjutan momentum ini didukung oleh strategi jangka panjang pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029, yang menetapkan target investasi infrastruktur sekitar 5% dari PDB tahunan dan mencakup lebih dari 200 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam berbagai sektor seperti koridor logistik, pelabuhan, dan sistem transportasi perkotaan.

Despite facing global challenges and tighter financing conditions, the infrastructure industry continued to demonstrate sustained expansion through public investment support and private sector participation in major infrastructure and energy projects that would run through 2025 and beyond. Construction value-added growth reached 7% in 2024 and continued to grow by 3.6% in mid-2025, in line with stable macroeconomic conditions and declining inflation, thereby creating a more conducive environment for financing large-scale projects.

Growth expectations for 2025 remains optimistic, with the total construction market projected to increase by around 5.48% compared to 2024. This growth is driven by the building sector, which is expected to rise significantly, while civil construction faces slight pressure due to budget tightening. The sustainability of this momentum is supported by the government's long-term strategy through the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2024–2029, which sets an infrastructure investment target of around 5% of annual GDP and includes more than 200 National Strategic Projects (PSN) across various sectors such as logistics corridors, ports, and urban transportation systems.

Pemerintah juga meningkatkan dukungan anggaran dengan alokasi lebih besar untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2025, yang sebelumnya diusulkan sekitar Rp75,63 triliun namun akhirnya disetujui Rp116,23 triliun untuk prioritas penguatan infrastruktur pangan dan energi, fasilitas publik, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek IKN sendiri dipandang sebagai salah satu upaya terbesar Indonesia dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, dengan rencana utama (*masterplan*) senilai puluhan miliar dolar yang mencakup teknologi *smart city* dan sistem energi bersih.

Di luar proyek infrastruktur dasar, permintaan konstruksi juga meluas ke sektor energi terbarukan dan industri. Rencana penyediaan listrik nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas sekitar 69,5 GW, sebagian besar dari sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi. Tren ini, bersama dengan ekspansi kawasan industri besar di berbagai wilayah seperti Morowali dan Kalimantan, menunjukkan bahwa sektor konstruksi semakin dipengaruhi oleh diversifikasi regional dan peluang baru bagi kontraktor untuk terlibat dalam pembangunan fasilitas energi, smelter, dan infrastruktur logistik.

Sumber: https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-construction-sector-builds-steady-momentum-as-infrastructure-drives-growth?

The government has also increased budgetary support by allocating a larger budget to the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in 2025, which was initially proposed at around Rp75.63 trillion but was ultimately approved at Rp116.23 trillion. The allocation is prioritized for strengthening food and energy infrastructure, public facilities, and the development of Nusantara Capital City (IKN). The IKN project itself is viewed as one of Indonesia's largest efforts in sustainable urban development, with a masterplan valued at tens of billions of dollars that incorporates smart city technology and clean energy systems.

Beyond basic infrastructure projects, construction demand is also expanding into the renewable energy and industrial sectors. The national electricity supply plan through the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2025–2034 targets the addition of around 69.5 GW of capacity, much of which will come from environmentally friendly energy sources such as solar, hydro, wind, and geothermal power. This trend, along with the expansion of major industrial zones in various regions such as Morowali and Kalimantan, indicates that the construction sector is increasingly influenced by regional diversification and new opportunities for contractors to participate in the development of energy facilities, smelters, and logistics infrastructure.

Source: https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-construction-sector-builds-steady-momentum-as-infrastructure-drives-growth?



# Kebijakan Strategis Tahun 2025
Strategic Policy in 2025

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2025, Perseroan telah menetapkan sejumlah strategi dan fokus utama untuk tahun 2025 sebagai landasan pelaksanaan kegiatan usaha di sepanjang tahun 2025 yang mencakup:

Based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2025, the Company had established several key strategies and priorities for 2025 as the basis for implementing its business activities throughout 2025, which include:




## Strategi Pengembangan Bisnis
Business Development Strategy

PT PII secara berkelanjutan mengembangkan strategi bisnis yang berorientasi pada penguatan peran penjaminan infrastruktur nasional melalui perluasan cakupan sektor, pengembangan skema penjaminan yang adaptif, serta integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam seluruh proses bisnis. Strategi ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing kelembagaan, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.

IIGF continuously develops business strategies aimed at strengthening its role in national infrastructure guarantees through the expansion of sector coverage, the development of adaptive guarantee schemes, and the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles across all business processes. This strategy is designed to ensure sustainable business growth, enhance institutional competitiveness, and support the creation of long-term value for stakeholders while considering environmental and social sustainability aspects.

### Penjaminan
Guarantee

Dalam rangka memperkuat peran sebagai institusi penjaminan pemerintah yang adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Perseroan terus mengembangkan berbagai inisiatif strategis di bidang penjaminan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas dan diversifikasi instrumen penjaminan, meningkatkan

In order to strengthen its role as a sovereign guarantee institution that is adaptive to the dynamics and financing needs of infrastructure development, the Company continues to develop various strategic initiatives in the guarantee sector. These efforts are aimed at expanding and diversifying guarantee instruments, enhancing

efektivitas mitigasi risiko, serta memperkuat dukungan terhadap pengembangan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan layak dibiayai.

1. Penguatan mandat Perseroan melalui dukungan terhadap pengembangan dan penguatan regulasi yang relevan;
2. Pengusahaan inisiatif penjaminan untuk proyek-proyek *brownfield* melalui penerapan skema *refinancing* dan *asset recycling* guna mendukung optimalisasi nilai aset infrastruktur yang telah beroperasi serta meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan proyek;
3. Pengusahaan penjaminan bersama dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung proyek-proyek IKN dalam rangka menarik minat partisipasi badan usaha untuk bekerja sama dengan OIKN;
4. Pelaksanaan peran pendampingan dan konsultasi dalam penjaminan non-KPBU (PNK) sebagai bentuk perluasan layanan Perseroan untuk mendukung proyek infrastruktur strategis di luar skema KPBU;
5. Pengembangan skema penjaminan pada sektor energi terbarukan, transisi energi, dan *sustainable finance* guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan serta komitmen Pemerintah terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon;
6. Simplifikasi proses penjaminan berbasis risiko, termasuk pengembangan platform kolaborasi *Smart Hub* PPP bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mendukung percepatan implementasi proyek KPBU skala kecil.

the effectiveness of risk mitigation, and strengthening support for the development of sustainable and bankable infrastructure projects.

1. Strengthening the Company's mandate through support for the development and reinforcement of relevant regulations;
2. Undertaking guarantee initiatives for brownfield projects through the implementation of refinancing and asset recycling schemes to support the optimization of value of infrastructure assets that are already in operation and increase the efficiency of the project financing structure;
3. Undertaking joint guarantee with the Ministry of Finance to support IKN projects in order to attract the interest of business entities to collaborate with OIKN;
4. Carrying out advisory and consulting roles in non-PPP guarantees (PNK) as an expansion of the Company's services to support strategic infrastructure projects outside the PPP scheme;
5. Developing guarantee schemes in the renewable energy, energy transition, and sustainable finance sectors to support the sustainable development agenda and the Government's commitment to transitioning toward a low-carbon economy;
6. Simplifying risk-based guarantee processes, including the development of the Smart Hub PPP collaboration platform together with the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs, in order to support the acceleration of small-scale PPP project implementation.

## Inisiasi Bisnis
Business Initiatives

PT PII melaksanakan berbagai inisiatif bisnis yang utamanya berfokus pada pengelolaan penugasan Penyiapan Proyek dan Pendampaingan Transaksi (*Project Development Facility*/PDF) melalui peningkatan kualitas kesiapan proyek, guna memastikan keselarasan antara tahapan persiapan dan transaksi proyek dalam upaya pemenuhan pembiayaan infrastruktur. Sejumlah inisiatif yang telah dirancang meliputi:

1. Pelaksanaan penugasan PDF pada sektor sosial, mencakup kesehatan, air minum, pendidikan, dan perumahan rakyat;
2. Penyelarasan jadwal pemrosesan dan struktur proyek antara tahapan persiapan pada PDF dengan penjaminan, guna mendorong proses yang lebih terintegrasi dan efisien;
3. Pelaksanaan *Project Development Advisory* (PDA) pada proyek infrastruktur guna memastikan terpenuhinya aspek *feasibility*, *bankability*, dan *affordability*, sebagai prasyarat utama keberhasilan pembiayaan proyek.

IIGF carries out various business initiatives, which primarily focus on managing Project Development Facility (PDF) assignments through improving project readiness quality, in order to ensure alignment between the project preparation and transaction stages as an effort to fulfil infrastructure financing. Several initiatives that have been designed include:

1. Implementation of PDF assignments in the social sector, covering healthcare, drinking water, education, and public housing;
2. Alignment of processing schedules and project structures between the preparation stage under the PDF and the guarantee stage, in order to promote a more integrated and efficient process;
3. Implementation of Project Development Advisory (PDA) for infrastructure projects to ensure the fulfillment of feasibility, bankability, and affordability aspects, which are key prerequisites for successful project financing.

### *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF) *Institute*
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute

*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Institute* (IIGFI) merupakan *think tank* Perseroan yang berperan sebagai *ecosystem enabler* dalam mendukung pengembangan bisnis dan ekosistem pembiayaan infrastruktur. Melalui pelaksanaan program edukasi dan riset yang berkualitas serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, IIGFI berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang bertumpu pada praktik terbaik (*best practices*). Selain itu, IIGFI juga menjalankan peran strategis dalam mendorong diseminasi rekomendasi kebijakan yang aplikatif melalui berbagai kegiatan *outreach*, guna mendukung visi Perseroan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

The Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Institute (IIGFI) serves as the Company's think tank and acts as an ecosystem enabler in supporting the development of infrastructure financing business and ecosystem. Through the implementation of high-quality education and research programs as well as collaboration with various strategic partners, IIGFI contributes to the formulation of policy recommendations based on best practices. In addition, IIGFI also plays a strategic role in promoting the dissemination of practical policy recommendations through various outreach activities, in order to support the Company's vision of achieving sustainable infrastructure development.

## Strategi Penguatan *Enabler*
Enabler Enhancement Strategy

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran usaha, Perseroan menerapkan strategi penguatan peran sebagai enabler melalui:
1. Penguatan kapasitas organisasi berasaskan tugas dan fungsi yang lebih optimal;
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui *experiential learning* berkelanjutan;
3. Pemutakhiran tingkat kematangan TI sebagai perbaikan berkelanjutan dalam mendukung proses bisnis Perseroan.

In order to support the achievement of its business objectives, the Company implements strategies to enhance its role as an enabler through:
1. Strengthening organizational capacity based on more optimal duties and functions;
2. Enhancing human resource competencies through continuous experiential learning;
3. Updating IT maturity levels as part of continuous improvements to support corporate business processes.

## Strategi Pengelolaan Risiko
Risk Management Strategy

PT PII mengimplementasikan berbagai strategi pengelolaan risiko guna mendukung pencapaian sasaran, yang meliputi:
1. Penguatan manajemen risiko melalui pemutakhiran Kerangka Manajemen Risiko dan pemanfaatan sistem aplikasi SIM GRC;
2. Penguatan fungsi asurans dan konsultansi Internal Audit sebagai mitra strategis bagi Manajemen;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas korporasi melalui implementasi ESG yang berkelanjutan (*rating* ESG).

IIGF implements various risk management strategies to support the achievement of its objectives, which include:

1. Management through updating the Risk Management Policy and utilizing SIM GRC application system;
2. Strengthening the assurance and consulting functions of Internal Audit as a strategic partner to Management;
3. Enhancing corporate capacity and capability through the sustainable implementation of ESG practices (ESG rating).

# Pengembangan Usaha dan Aspek Pemasaran

## Business Development and Marketing Aspect

Sesuai dengan mandat Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui PP No. 55 Tahun 2020, PT PII memiliki 3 (tiga) mandat, yaitu: (1) memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur; (2) melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan (3) memberikan penjaminan Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Sebagai implementasi dari PP tersebut, PT PII terus melanjutkan pengembangan perluasan lingkup atas kegiatan usaha dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur dan selain infrastruktur, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan proyek sesuai penugasan Pemerintah. Beberapa pengembangan usaha tersebut antara lain:

1. Sejak tahun 2018, PT PII telah melaksanakan kegiatan bisnis di luar penjaminan melalui penugasan *Project Development Facility* (PDF) dari Kementerian Keuangan. Melalui penugasan tersebut, Perseroan memberikan pendampingan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2024. Selain melaksanakan PDF untuk Proyek KPBU, PT PII juga dapat melaksanakan penugasan khusus untuk PDF Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, sesuai ketentuan PMK No. 139 Tahun 2022.
2. Pada tahun 2025, berdasarkan PMK No. 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur, PT PII melaksanakan penugasan Pemerintah dengan memberikan penjaminan secara bersama atas Pinjaman sebagai berikut:
   a. Pinjaman kepada PT PLN dari Asian Development Bank (ADB) untuk program *Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program* (AICET)

In accordance with the Government's mandate as stipulated in Government Regulation (PP) No. 35/2009, as lastly amended by PP No. 55 of 2020, IIGF has 3 (three) mandates: (1) providing sovereign guarantees in the infrastructure sector; (2) carrying out activities related to the implementation of Sovereign guarantees and other activities related to the development of projects that support the national economy; and (3) providing sovereign guarantees for financing in sectors other than infrastructure based on Government assignment.

As an implementation of the Government Regulation, IIGF continues to expand the scope of its business activities developed in previous years by providing sovereign guarantees in both the infrastructure and non-infrastructure sectors, as well as other activities related to project development in accordance with Government assignments. Several of these business developments include:

1. Since 2018, IIGF has carried out business activities beyond guarantee services through the Project Development Facility (PDF) assignment from the Ministry of Finance. Through this assignment, the Company provides assistance to the Government Contracting Agency (GCA) from the project preparation stage through the execution of Public Private Partnership (PPP) project transactions, in accordance with the provisions of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 68/2024. In addition to implementing PDF for PPP Projects, IIGF may also carry out special assignments for the PDF for the Utilization of State-Owned Assets and/or the Transfer of State-Owned Assets in the context of the Preparation, Development, and Relocation of the National Capital, in accordance with the provisions of PMK No. 139 of 2022.
2. In 2025, based on PMK No. 101/PMK.08/2018 on Procedures for the Provision and Implementation of Joint Sovereign Guarantees or through Infrastructure Guarantee Companies against the risk of default by SOEs that obtain loans and/or issue bonds to finance infrastructure provision, IIGF carried out a Government assignment by jointly providing guarantees for the following loans:

   a. A loan to PT PLN (Persero) from the Asian Development Bank (ADB) for the Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program (AICET);

b. Pinjaman kepada PT PLN dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification Phase* 2 (ISLE-2)
c. Pinjaman kepada PT PLN dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk program Indonesia *Electricity Network Transformation* (I-ENET)

3. Pada tahun 2020, secara formal terlibat aktif dalam sinergi Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan penyediaan infrastruktur KPBU melalui Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia sesuai Nota Kesepakatan 7 Kementerian/Lembaga pada tanggal 18 September 2020 dan telah diperbaharui pada tanggal 2 Oktober 2025. Melalui Kantor Bersama KPBU, Perseroan melakukan upaya-upaya sosialisasi skema KPBU serta *pipelining* potensi Penjaminan Pemerintah
4. PT PII juga berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program PEN. Pemberian penjaminan tersebut diatur dalam PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 211/2020). Selain itu PT PII juga berperan dalam program PEN untuk Korporasi, sebagaimana diatur dalam PMK No. 98/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah atas Pembiayaan bagi Korporasi Padat Karya sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN.
5. Berdasarkan PMK No. 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) (PMK 30/2021), PT PII kembali mendapat perluasan mandat untuk memberikan penjaminan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan PSN dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan PSN. Terkait dengan pemanfaatan PMN PEN untuk penjaminan sesuai dengan PMK 211/2020.
6. Dalam rangka mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Menteri

b. A loan to PT PLN (Persero) from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for the Indonesia Sustainable Least-cost Electrification Phase 2 (ISLE-2) program;
c. A loan to PT PLN (Persero) from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for the Program of Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET).

3. In 2020, the Company formally became actively involved in inter-ministerial/institutional synergy in implementing PPP infrastructure provision through the PPP Joint Office of the Republic of Indonesia, in accordance with the Memorandum of Understanding among seven ministries/agencies dated 18 September 2020. Through the PPP Joint Office, the Company carried out efforts to disseminate PPP scheme and pipeline potential Sovereign guarantees.
4. IIGF also participates in the National Economic Recovery Program (PEN) by providing Sovereign guarantees to State-Owned Enterprises that implement PEN programs. The provision of these guarantees is regulated under PMK No. 211/PMK.08/2020 on Procedures for the Provision of Sovereign Guarantees for State-Owned Enterprises in the Implementation of the National Economic Recovery Program (PMK 211/2020). In addition, IIGF also plays a role in the PEN program for corporations, as regulated under PMK No. 98/PMK.08/2020 on Sovereign Guarantees for Financing for Labor-Intensive Corporations, as amended by PMK No. 27/PMK.08/2022 on Procedures for Sovereign Guarantees for Corporate Business Actors through Designated Guarantee Companies in the implementation of the PEN program.
5. Based on PMK No. 30/PMK.08/2021 on Procedures for the Provision of Central Sovereign Guarantees for the Acceleration of National Strategic Projects (PSN) (PMK 30/2021), IIGF again received an expanded mandate to provide guarantees against Political Risks that may hinder the implementation of PSNs and potentially result in financial impacts on Business Entities implementing the PSNs. This is also related to the utilization of PMN PEN for guarantees in accordance with PMK 211/2020.
6. In order to support the development of Nusantara Capital City (IKN) in Penajam Paser Utara, East Kalimantan, the Ministry of Finance issued PMK No. 220/PMK.08/2022 on Government Support for Public-Private Partnership and Creative Financing in order to accelerate infrastructure provision in Nusantara Capital City. The Minister of Finance together with IIGF provides

Keuangan bersama-sama PT PII menyediakan Penjaminan Infrastruktur atas kewajiban finansial PJPK yang ditimbulkan oleh risiko infrastruktur dan tertuang dalam Perjanjian KPBU IKN untuk dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan pemerintah.

7. PT PII melaksanakan Jaminan Pemerintah Bersama Kementerian Keuangan kepada BUMN Pangan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut diatur dalam PMK No. 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
8. Berdasarkan PMK No. 89 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB), PT PII melaksanakan penugasan Pemerintah dengan memberikan penjaminan secara bersama atas Pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI). Penugasan tersebut mengacu kepada KMK No. 239/KM.8/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penugasan Kepada PT PII Untuk Melakukan Penjaminan Pemerintah Secara Bersama atas Pinjaman PT KAI dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.
9. Berdasarkan PMK No. 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Serta Penanggungan Risiko Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, PT PII melaksanakan penugasan Pemerintah dengan memberikan penjaminan secara bersama atas Pinjaman PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE). Penugasan tersebut mengacu kepada KMK No. 132/MK/PR/2025 tanggal 3 September 2025 tentang Penugasan kepada PT PII untuk Memberikan Jaminan terhadap Risiko Gagal Bayar dari PT GDE yang mendapatkan Pinjaman Langsung dari ADB untuk Kelanjutan Pembiayaan Proyek PLTP Dieng Unit 2 (PLTP Dieng-2).

Selain melaksanakan perluasan bidang usaha, PT PII melakukan inisiatif strategis bersama *development partners* dan melakukan penguatan kepada mitra perusahaan baik melalui Nota Kesepakatan maupun program kolaborasi bersama melalui 3 (tiga) program utama, antara lain:

1. Pengembangan Proyek
   Aktivitas pengembangan proyek bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas *pipeline* proyek yang kredibel untuk proses penjaminan yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyaringan potensi *pipeline*, termasuk dengan dukungan kantor vertikal Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang berperan aktif

Infrastructure Guarantees for the financial obligations of GCA arising from infrastructure risks and stipulated in the IKN PPP Agreement, to be implemented based on a government guarantee agreement.

7. IIGF provides a Joint Government Guarantee together with the Ministry of Finance to SOEs in the food sector for the implementation of Government Food Reserves. The provision of this Government Guarantee is regulated under PMK No. 34 of 2024 on Procedures for the Provision of Government Guarantees in the Implementation of Government Food Reserves.
8. Based on PMK No 89 of 2023 on Procedures for Government Guarantees to Accelerate the Development of Infrastructure and Facilities for the Jakarta–Bandung High-Speed Railway (KCJB), IIGF carried out a Government assignment by jointly providing guarantees for loans to PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI. This assignment refers to the Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 239/KM.8/2023 dated 28 December 2023 on the Assignment to IIGF to Provide a Joint Government Guarantee for the loans of PT KAI in order to accelerate the development of infrastructure and facilities for Jakarta–Bandung High-Speed Railway.
9. Based on PMK No. 5 of 2025 on Procedures for the Provision and Implementation of Government Guarantees and Risk-Sharing in the Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply, IIGF carries out a Government assignment by jointly providing guarantees for the loan of PT Geo Dipa Energi (Persero)/PT GDE. This assignment refers to KMK No. 132/MK/PR/2025 dated 3 September 2025 on the assignment to IIGF to provide a guarantee against the risk of default by PT GDE on its direct loan from ADB for the continued financing of Dieng Unit 2 Geothermal Power Plant Project (PLTP Dieng-2).

In addition to expanding its business scope, IIGF has undertaken strategic initiatives with development partners and strengthened collaboration with the Company's partners through Memorandum of Understanding and joint collaboration programs under 3 (three) main initiatives, namely:

1. Project Development
   Project development activities aim to increase the number and quality of credible project pipelines for the guarantee process through the dissemination and screening of potential pipelines, including with the support of regional offices of the Ministry of Finance and Bank Indonesia, which actively facilitate potential

dalam memfasilitasi potensi proyek Daerah. Dalam rangka pengusahaan *pipeline* proyek, PT PII juga mengembangkan PPP *Smart Hub*, sebuah *platform* untuk pengembangan KPBU skala kecil yang melibatkan Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional, Bank Pembangunan Daerah, asosiasi pelaku industri, dan *development partners* untuk mempercepat proses penyusunan, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek KPBU, sehingga dapat menghasilkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengusahaan diversifikasi ke KPBU sektor baru juga dilakukan dengan melakukan beberapa program penguatan kapasitas baik dari sisi kesiapan sektor, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) serta calon investor/ lembaga keuangan.

2. Penguatan Struktur Penjaminan
   - **Struktur Penjaminan**
     Penyiapan struktur penjaminan merupakan aktivitas penting dalam memastikan aspek *bankability* dan *credit worthiness* dapat tercapai. Dalam hal ini, PT PII secara aktif melakukan penguatan struktur penjaminan serta mitigasi risiko, baik untuk sektor KPBU eksisting maupun sektor baru dengan kolaborasi dengan mitra strategis PJPK, perbankan, dan investor. Selain itu, PT PII juga melakukan penjajakan kerja sama *co-guarantee* dengan lembaga multilateral dan bilateral.
   - **Inisiatif ESG**
     Melanjutkan inisiatif ESG bersama Kementerian Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2022, PT PII menyusun *framework* serta mempersiapkan implementasi evaluasi penyiapan proyek PDF dan evaluasi penjaminan berbasis ESG.
   - **Pemulihan Piutang Regres**
     Dalam rangka memperkuat mekanisme regres penjaminan proyek daerah, PT PII menjajaki penerapan skema pemulihan piutang regres penjaminan melalui pemotongan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) daerah (skema *intercept* regress).

3. Kolaborasi Strategis dalam Penguatan Kemitraan Bisnis Perseroan
   Beberapa jenis kolaborasi penting dilakukan oleh PT PII, diantaranya kerja sama dengan *development partners* untuk *matchmaking* bantuan penyiapan proyek (*technical assistant*) dan *capacity building* berskala internasional, kerja sama penguatan kapabilitas PJPK (*capability building*) dalam pembiayaan kreatif pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan sebagai mitra bisnis utama perusahaan, dan kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pengembangan instrumen pasar modal untuk mendukung pembiayaan kreatif pada sektor infrastruktur publik.

regional projects. In developing project pipelines, IIGF has also established the PPP Smart Hub, a platform for the development of small-scale PPP projects involving Regional Governments, national and international financial institutions, Regional Development Banks, industry associations, and development partners to accelerate project preparation, financing, and implementation processes of PPP projects, thereby producing sustainable infrastructure projects that generate positive impacts for the community. Efforts to diversify into new PPP sectors are also carried out through several capacity-building programs aimed at improving both sector readiness and the capability of the Government Contracting Agency (GCA).

2. Strengthening of Guarantee Structure
   - **Guarantee Structure**
     The preparation of guarantee structures is an important activity to ensure that the bankability and creditworthiness aspects of projects can be achieved. As such, IIGF actively strengthens its guarantee structures and risk mitigation for both existing PPP sectors and new sectors together with GCA strategic partners, banks, and investors. Furthermore, IIGF also explores co-guarantee and re-guarantee cooperation with multilateral and bilateral institutions.
   - **ESG Initiatives**
     Continuing the ESG initiative with the Ministry of Finance initiated in 2022, IIGF has developed a framework and prepared the implementation of ESG-based evaluations for PDF project preparation and guarantee assessments.
   - **Recovery of Regress Receivable**
     Moreover, IIGF is exploring mechanisms to strengthen the regress mechanism for guarantees on regional projects through the implementation of a regress receivables recovery scheme via deductions from regional Transfer to Regions and Village Funds (TKDD) (intercept regress scheme).

3. Strategic Collaboration to Strengthen the Company's Business Partnerships
   IIGF carries out several important collaborations, including cooperation with development partners for the matchmaking of project preparation (technical assistance) and internationally scaled capacity-building programs, collaboration of GCA capability building in creative financing with the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) and the Ministry of Transportation as key business partners, as well as collaboration with the Indonesia Stock Exchange (IDX) in developing capital market instruments to support creative financing in the public infrastructure sector.

# Pangsa Pasar
Market Share

Sepanjang tahun 2025, pengembangan *pipeline* Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dijalankan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahapan tersebut antara lain: *initial project identification*, *scanning* terhadap potensi proyek-proyek KPBU dari berbagai sumber yang menghasilkan *Longlist Projects* dan *Shortlist Projects*, dan pelaksanaan *pre-screening* yang merupakan proses persiapan pelaksanaan penyaringan/*screening* yang berfokus pada aspek kesiapan dokumentasi proyek, komitmen PJPK, identifikasi profil risiko proyek, potensi atas keberlanjutan proyek sampai dengan tahapan proses penjaminan diselesaikan. PT PII terus memperkuat pangsa pasar Perseroan, yang terdiri dari:

1. Kementerian/Lembaga/Badan yang sesuai mandatnya melaksanakan pengembangan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU dan *blended financing*.
2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengembangan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU, baik KPBU reguler dan KPBU skala kecil, penerbitan obligasi daerah, dan *blended financing*.
4. BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penyiaran Publik/Badan Layanan Umum yang sesuai regulasi sektoral dapat bertindak mewakili pemerintah dalam kontrak kerjasama investasi yang melaksanakan skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU, dan *blended financing*.
5. BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur publik dan program pemerintah yang dalam pelaksanaanya menerbitkan obligasi, pinjaman kepada lembaga multilateral atau pinjaman kepada lembaga keuangan.
6. *Indonesia Sovereign Wealth Fund* yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan kemitraan infrastruktur publik, misalnya terkait pelaksanaan program *waste to energy* untuk mendukung penyelesaian masalah persampahan secara nasional.

Di sepanjang tahun 2025, PT PII menerima permohonan pendampingan penjaminan proyek dan formulir penyaringan (*Screening From*) proyek sebanyak 8 proyek yang terdiri dari sektor kesehatan, sektor konservasi energi, sektor persampahan, sektor riset, dan sektor perumahan IKN.

Throughout 2025, the development of Public-Private Partnership (PPP) pipeline was carried out through a series of structured stages. These stages include initial project identification, scanning potential PPP projects from various sources resulting in a Longlist of Projects and Shortlist of Projects, and the implementation of pre-screening, which is a preparatory process for the screening stage focusing on project documentation readiness, the commitment of the Government Contracting Agency (GCA), identification of the project risk profile, and the potential sustainability of the project through to the completion of the guarantee process. IIGF continues to strengthen the Company's market share, which consists of:

1. Ministries/Agencies/Bodies whose mandates include the development of public infrastructure through creative financing schemes, including PPP partnerships and blended financing.
2. Ministries/Agencies/Regional Governments implementing National Strategic Projects in accordance with prevailing regulations.
3. Regional Governments undertaking public infrastructure development through creative financing schemes, including PPP partnerships, both regular PPP and small-scale PPP, regional bond issuance, and blended financing.
4. State-Owned Enterprises (SOEs)/Regionally-Owned Enterprises (BUMD)/State Universities/Public Broadcasting Institutions/Public Service Agencies which, under sectoral regulations, may act on behalf of the Government in investment cooperation contracts implementing creative financing schemes, including PPP partnerships and blended financing.
5. SOEs that receive assignments from the Government to provide public infrastructure and government programs which, in their implementation, issue bonds, loans from multilateral institutions, or receive loans from financial institutions.
6. Indonesian Sovereign Wealth Fund, which is tasked with implementing public infrastructure partnership development, for example related to the implementation of waste to energy program to support the resolution of national waste problem.

Throughout 2025, IIGF received applications for guarantee advisory for projects and project screening forms totaling 8 projects across several sectors, including the healthcare sector, energy conservation sector, garbage sector, research sector, and IKN housing sector.

Adapun daftar *Screening Form* (SF) KPBU yang telah disampaikan oleh PJPK sebagaimana tabel di bawah ini:

The list of PPP Screening Forms (SF) submitted by the GCA is presented in the table below:

**Tabel Daftar SF KPBU**
Table of List of PPP SF

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Tanggal Perolehan<br>Date Obtained |
|---|---|---|
| 1. | TPA Manggar, Balikpapan TPA Manggar, Balikpapan | 31 Januari 2025 31 January 2025 |
| 2. | Rumah Tapak IKN IKN Landed House | 21 Maret 2025 21 March 2025 |
| 3. | Rusun ASN ASN Flats | 21 Maret 2025 21 March 2025 |
| 4. | APJ Kab. Batang APJ Kab. Batang | 14 November 2025 14 November 2025 |
| 5. | RSUD Wangaya, Denpasar RSUD Wangaya, Denpasar | 25 November 2025 25 November 2025 |
| 6. | APJ Kab. Sleman APJ Kab. Sleman | 18 Desember 2025 18 December 2025 |
| 7. | APJ Kab. Sampang APJ Kab. Sampang | 23 Desember 2025 23 December 2025 |
| 8. | Kapal Riset BRIN BRIN Research Ship | 29 Desember 2025 29 December 2025 |

Pada tahun 2025, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan terhadap 6 proyek yaitu:

1. KPBU - *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan PJPK Kementerian PU
2. KPBU - Jalan Tol Bogor - Serpong (via Parung) dengan PJPK Kementerian PU
3. Non KPBU - Pinjaman PT GDE (Persero) dari Asian Development Bank (ADB) untuk Kelanjutan Pembiayaan Proyek Dieng-2
4. Non KPBU - Pinjaman PT PLN (Persero) dari Asian Development Bank (ADB) untuk Program *Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program* (AICET) – ADB
5. Non KPBU – Pinjaman PT PLN (Persero) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification Phase* 2 (ISLE-2)
6. Non KPBU – Pinjaman PT PLN (Persero) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk Program Indonesia *Electricity Network Transformation* (I-ENET)

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PII menempati posisi strategis dalam pasar penjaminan infrastruktur nasional dengan portofolio penjaminan yang mencakup 60 proyek, terdiri dari 51 proyek KPBU dan 9 proyek non-KPBU, dengan total nilai investasi mencapai Rp705 triliun. Sampai dengan akhir Desember 2025 jangka waktu penjaminan Korporasi PEN telah selesai dan menandakan berakhirnya keseluruhan Penjaminan Korporasi PEN, sehingga eksposur Penjaminan Korporasi PEN di PT PII menjadi nihil.

In 2025, IIGF signed Guarantee Agreements for six projects, namely:

1. PPP – Siinjau Lauik Flyover of the Ministry of Public Works
2. PPP – Bogor - Serpong Toll Road (via Parung) with PJPK of the Ministry of Public Works
3. Non-PPP – Loan to PT Geo Dipa Energi (Persero) from the Asian Development Bank (ADB) for the continued financing of the Dieng-2 Project
4. Non-PPP – Loan to PT PLN (Persero) from the Asian Development Bank (ADB) for the Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program (AICET)
5. Non-PPP – Loan to PT PLN (Persero) from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for the Indonesia Sustainable Least-cost Electrification Phase 2 (ISLE-2) Program
6. Non-PPP – Loan to PT PLN (Persero) from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for the Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET) Program

As of 31 December 2025, IIGF had guaranteed 6 projects consisting of 51 infrastructure guarantee projects and 9 non-infrastructure guarantees, with a total guaranteed project investment value of Rp705 trillion. Until the end of December 2025, the guarantee period for the Corporate PEN program had been completed, marking the end of all Corporate PEN Guarantees, resulting in the exposure of Corporate PEN Guarantees at IIGF becoming zero.

# Strategi Pemasaran
Marketing Strategy

PT PII menjalankan pemasaran dan komunikasi terhadap produk bisnis perusahaan melalui beberapa aktivitas seperti keterlibatan aktif dalam Kantor Bersama KPBU Indonesia, komunikasi langsung dengan calon PJPK potensial dan para pemangku kepentingan terkait, serta sosialisasi dan terlibat dalam forum, seminar, baik nasional dan internasional, melaksanakan *media briefing* serta promosi melalui media sosial. Untuk memasarkan dan mengkomunikasikan produk bisnis perusahaan berbagai kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, luring maupun secara daring.

IIGF conducts marketing and communication of the Company's business products through several activities, such as active involvement in the Indonesia PPP Joint Office, direct communication with potential GCAs and relevant stakeholders, as well as dissemination and participation in forums and seminars at both national and international levels, conducting media briefings, and promoting through social media. To market and communicate the Company's business products, various activities are carried out in hybrid formats, both offline and online.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perseroan juga berupaya memanfaatkan aplikasi dan *digital platform* untuk mendukung kegiatan pemasaran Perseroan dan sosialisasi mengenai skema KPBU dan peran PT PII kepada pemangku kepentingan. Sebagai bentuk dukungan terhadap PJPK dalam penyiapan proyek KPBU, PT PII secara aktif telah mempertemukan kebutuhan PJPK dalam penyusunan dokumen studi dengan *development partners* yang dapat memberikan bantuan teknis dalam penyusunan studi tersebut. Dengan demikian, kualitas dan kecepatan penyiapan proyek secara keseluruhan diharapkan dapat mengalami peningkatan.

In line with rapid technological developments, the Company also seeks to utilize applications and digital platforms to support its marketing activities and to disseminate PPP schemes and the role of IIGF to stakeholders. As a form of support for GCAs in preparing PPP projects, IIGF has actively facilitated connections between GCAs requiring assistance in preparing study documents and development partners capable of providing technical assistance in the preparation of such studies. Through these efforts, the overall quality and speed of project preparation are expected to improve.

PT PII secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam bentuk pemberian serta peningkatan pemahaman mengenai skema KPBU kepada calon PJPK dan *potential* investor baik untuk KPBU reguler maupun KPBU skala kecil di tingkat pusat atau daerah. Guna memperoleh *pipeline* potensial yang kredibel, PT PII aktif berkoordinasi dengan PJPK potensial untuk menindak lanjuti pemenuhan catatan pada berbagai proses penjaminan dalam bentuk *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun koordinasi lintas instansi/lembaga serta berpartisipasi mendukung kegiatan proyek yang dilaksanakan PJPK seperti *market sounding* dan lainnya.

IIGF actively conducts dissemination and advisory activities aimed at providing and enhancing understanding of PPP schemes among prospective GCAs and potential investors, both for regular PPP projects at the central and regional levels as well as IKN PPP. In order to obtain credible potential pipelines, IIGF actively coordinates with prospective GCAs to follow up on outstanding requirements in various guarantee processes through workshops, Focus Group Discussions (FGDs), inter-agency/institution coordination, and participation in supporting project activities carried out by GCA such as market sounding and others.

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalaninya, PT PII terus melakukan pemetaan atas potensi Penjaminan Pemerintah dengan tetap mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Daftar Rencana Proyek KPBU/PPP *Book* Bappenas, Daftar rencana Proyek Strategis Nasional, dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah, dokumen perencanaan dari sektor infrastruktur terkait, dan interaksi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan sebagainya.

In line with its business line, IIGF continues to map potential Government guarantees while referring to documents issued by the Government, such as the PPP Project Plan List/ Bappenas PPP Book, the list of National Strategic Project plans, central and regional government planning documents, planning documents from relevant infrastructure sectors, as well as interactions and communications with various stakeholders and others.

Selanjutnya, PT PII akan menyusun *pipeline project* dan merumuskan strategi dengan melakukan analisis terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh proyek tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pengusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan hingga akhirnya ditentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan demi mendukung kesinambungan kinerja usaha sampai pada akhirnya menempatkan posisi Perseroan dalam pasar Penjaminan dan Infrastruktur. Strategi pemasaran tersebut didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang efisien, sehingga Perseroan dapat mengimplementasikan rencana dengan lebih terstruktur dan optimal.

Subsequently, IIGF prepares a project pipeline and formulates strategies by conducting analyses of the opportunities and challenges that may be faced by these projects. This process needs be done to support business development in accordance with the Company's business line, ultimately determining the activities required to sustain business performance and position the Company within the infrastructure guarantee market. These marketing strategies are supported by efficient allocation of budgets and resources, enabling the Company to implement its plans in a more structured and optimal manner.

# Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

## Operational Review by Business Segment

Pembiayaan inovatif merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah untuk mengatasi anggaran yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah membutuhkan *vehicle* agar pemenuhan atas kebutuhan infrastruktur dapat terlaksana secara berkelanjutan. PT PII merupakan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Innovative financing is one of the Government's efforts to address limited fiscal capacity in accelerating infrastructure development. The Government requires a dedicated vehicle to ensure that infrastructure needs can be fulfilled in a sustainable manner. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance, established to accelerate infrastructure development and promote sustainable development in Indonesia.

Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sejak didirikan 16 tahun yang lalu, PT PII telah mendapatkan beberapa kali perluasan mandat serta penambahan penugasan, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Keberadaan PT PII merupakan sebuah solusi di tengah kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Selama 16 tahun perjalanannya, PT PII telah membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan penjaminan BUMN.

In supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia, since its establishment 15 years ago, IIGF has received several mandate expansions and additional assignments, through the provision of guarantees carried out in an accountable, transparent, and credible manner. The presence of IIGF serves as a solution amid urgent infrastructure needs. Over the past 15 years, IIGF has financed a number of infrastructure projects and provided guarantees for SOEs.

Melalui PP 55/2020, Pemerintah kembali memberikan perluasan mandat kepada PT PII untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat serta dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka PT PII diberikan mandat untuk memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang

Through Government Regulation No. 55 of 2020, the Government has once again expanded IIGF's mandate to support Government policies in meeting the increasing demand for Government guarantees, as well as to support the National Economic Recovery (PEN) Program in response to the impact of the COVID-19 pandemic. Based on this regulation, IIGF is mandated to provide Government guarantees in the infrastructure sector, carry out activities

infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

related to the implementation of Government guarantees and other activities related to the execution of development projects that support the national economy, as well as to provide Government guarantees for financing in sectors beyond infrastructure based on Government assignments.

Dengan meningkatnya kebutuhan atas penjaminan Pemerintah, Pemerintah memandang perlu dilakukan penguatan mandat PT PII, khususnya dalam pemberian penjaminan lainnya selain infrastruktur, serta optimalisasi pengawasan dan monitoring kegiatan penjaminan dan investasi Perseroan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menetapkan PMK No. 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sebagai pengganti PMK No. 95/PMK.08/2017. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup, dan tata kelola pelaksanaan kegiatan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur maupun pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh Perseroan. Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII tidak lagi terbatas pada proyek KPBU, tetapi juga penjaminan bagi BUMN dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penjaminan untuk Cadangan Pangan Pemerintah, serta penjaminan dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Lebih lanjut, dengan diterbitkannya PMK No. 5 Tahun 2025, cakupan penjaminan PT PII semakin diperluas, termasuk penjaminan dalam rangka percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

With the increasing demand for Government guarantees, the Government considers it necessary to strengthen IIGF's mandate, particularly to enable it to provide guarantees in sectors beyond infrastructure, as well as to optimize the supervision and monitoring of IIGF's guarantee and investment activities in the future. Accordingly, the Minister of Finance (Menkeu) issued Minister of Finance Regulation (PMK) No. 148/PMK.08/2022 concerning the Scope of Infrastructure Guarantee Management by Infrastructure Guarantee Companies. This regulation replaces PMK No. 95/PMK.08/2017 which sets out more detailed provisions regarding the scope and governance of activities related to Government guarantees in the infrastructure sector and financing in other sectors beyond infrastructure by the Company. The Government guarantees implemented by IIGF have now evolved beyond being limited to Public-Private Partnership (PPP) projects, to also include guarantees for State-Owned Enterprises (SOEs) under the National Economic Recovery (PEN) Program, guarantees related to Government Food Reserves, and guarantees for the Acceleration of the Development of Infrastructure and Facilities for the Jakarta–Bandung High-Speed Railway.

Selain itu, PT PII dilibatkan secara aktif dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, pembangunan proyek infrastruktur di berbagai sektor, dan mendukung pelaksanaan program PEN.

In addition, IIGF is actively involved in ensuring the sustainability of national strategic projects, including the relocation of the National Capital City (IKN), the development of infrastructure projects across various sectors, and supporting the implementation of the PEN program.

Sejalan dengan perluasan mandat dalam Anggaran Dasar dan penugasan Pemerintah kepada PT PII tersebut, kegiatan usaha PT PII membagi bisnis Perseroan menjadi 4 (empat) segmen usaha, yang meliputi (1) Penjaminan Proyek Infrastruktur; (2) Pengelolaan Dana; (3) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; dan (4) Lainnya.

In line with the expansion of its mandate as stipulated in its Articles of Association and the assignments from the Government, IIGF's business activities are divided into 4 (four) business segments: (1) Infrastructure Project Guarantee; (2) Fund Management; (3) Project Development Facility Segment; and (4) Others.




## Segmen Usaha Penjaminan
Guarantee Segment

Segmen Penjaminan meliputi 2 (dua) kelompok besar kegiatan usaha, yaitu:
1. Penjaminan Infrastruktur yang terbagi ke dalam KPBU dan Non KPBU; dan
2. Penjaminan Non-Infrastruktur yang terbagi ke dalam Penjaminan Pelaku Usaha Korporasi dan Penjaminan BUMN.

The Guarantee segment comprises 2 (two) main groups of business activities, namely:
1. Infrastructure Guarantees, which are divided into PPP and Non-PPP; and
2. Non-Infrastructure Guarantees, which are divided into Corporate Business Guarantees and SOE Guarantees.

Uraian masing-masing kegiatan usaha serta profitabilitas segmen Penjaminan dapat dilihat di bawah ini.

A description of each business activity, as well as the profitability of the Guarantee segment, is presented below.

### Penjaminan Infrastruktur
Infrastructure Guarantee

Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 beserta seluruh peraturan pelaksana dan kebijakan turunannya, yang dilengkapi berbagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kelayakan dan daya tarik proyek

The Government continues to strengthen collaboration with the private sector in infrastructure provision through the Public-Private Partnership (PPP) scheme as regulated under Presidential Regulation Number 38 of 2015, along with all its implementing regulations and derivative policies. This framework is supported by various fiscal instruments aimed at enhancing project feasibility and attractiveness

bagi investor. Implementasi skema ini dilaksanakan secara konsisten dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2024–2029 yang menargetkan investasi infrastruktur sekitar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, mencakup lebih dari 200 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor-sektor prioritas seperti koridor logistik, pelabuhan, dan sistem transportasi perkotaan.

for investors. The implementation of this scheme is carried out consistently in line with the development direction set out in the 2024–2029 RPJMN, which targets infrastructure investment at approximately 5% of Gross Domestic Product (GDP) per year, covering more than 200 National Strategic Projects (PSN) across priority sectors such as logistics corridors, ports, and urban transportation systems.

Mengacu pada Perpres 38/2015, salah satu bentuk *fiscal tools* untuk KPBU adalah Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk dapat memberikan kenyamanan mitra Badan Usaha serta pihak *lenders* dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah.

Referring to Presidential Regulation No. 38 of 2015, one of the fiscal tools available for PPP is Government Guarantees provided through Infrastructure Guarantee Companies (BUPI), aimed at providing comfort to private sector partners as well as lenders in engaging in cooperation with the Government.

Sebagai BUPI, PT PII mendapat mandat dari Pemerintah untuk menjalankan kebijakan satu pelaksana (*Single Window Policy*) bagi Pemerintah dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen risiko sesuai dengan prinsip dari skema KPBU. Dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT PII berpartisipasi secara aktif sejak tahapan penyiapan proyek KPBU sampai dengan pelaksanaan proyek dan sampai masa konsesi KPBU berakhir. Partisipasi PT PII pada tahapan penyiapan proyek dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada PJPK seperti pelaksanaan audiensi, koordinasi, korespondensi, sosialisasi, peningkatan kapasitas (*capacity building*), strukturisasi proyek KPBU, dan membantu memastikan kelayakan hukum dan kelembagaan, teknis, finansial, lingkungan dan sosial dan juga kesesuaian terhadap prinsip alokasi risiko dari proyek KPBU. Setelah tahapan penyiapan dan transaksi, PT PII melakukan asistensi kepada PJPK dalam implementasi rencana mitigasi risiko mulai dari konstruksi hingga berakhirnya periode penjaminan dengan melakukan pemantauan proyek melalui *Joint Monitoring Committee* (JMC)/Tim Pemantauan Bersama dengan para pemangku kepentingan terutama untuk memantau risiko-risiko proyek yang dialokasikan kepada PJPK. Sebagai bagian dari upaya mitigasi proyek, PT PII juga secara rutin mengadakan rapat atau mengirimkan hasil pemantauan proyek kepada PJPK atau perwakilannya.

As a BUPI, IIGF is mandated by the Government to implement the Single Window Policy for the provision of Government Guarantees, while adhering to risk management principles in accordance with the PPP scheme. In carrying out its guarantee activities, IIGF actively participates from the project preparation stage through to project implementation and until the end of the PPP concession period. During the preparation stage, IIGF provides assistance to the Government Contracting Agency (GCA) through activities such as hearings, coordination, correspondence, dissemination, capacity building, PPP project structuring, and helping ensure legal and institutional, technical, financial, environmental, and social feasibility, as well as alignment with risk allocation principles of PPP projects. Following the preparation and transaction stages, IIGF continues to assist the GCA in implementing risk mitigation plans from the construction phase through to the end of the guarantee period, including monitoring projects through the Joint Monitoring Committee (JMC) with stakeholders, particularly to oversee risks allocated to the GCA. As part of project mitigation efforts, IIGF also regularly conducts meetings or submits project monitoring reports to the GCA or its representatives.

Selain itu, PT PII bersama para pemangku kepentingan lainnya secara aktif melakukan pemantauan terhadap risiko proyek yang menimbulkan kewajiban finansial bagi PJPK, misalnya risiko penyerapan air curah oleh Perumdam pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Kota Bandar Lampung dikarenakan keterlambatan pembangunan jaringan distribusi, risiko keterlambatan pengadaan tanah pada proyek jalan tol dikarenakan belum dapat diserahkannya tanah dari Pemerintah kepada Badan Usaha secara 100% pada batas waktu yang telah ditentukan, maupun kemungkinan adanya risiko politik pada proyek.

In addition, IIGF, together with other stakeholders, actively monitors project risks that may give rise to financial obligations for the GCA. These include, for example, the risk of bulk water offtake by Perumdam in the Umbulan SPAM and Bandar Lampung City SPAM projects due to delays in the development of distribution networks, the risk of land acquisition delays in toll road projects due to the Government's inability to 100% hand over land to the private sector within the stipulated timeframe, as well as potential political risks in projects.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, PT PII dapat mendukung penjaminan 26 Sektor proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang secara lengkap dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

By referring to the Minister of National Development Planning/National Development Planning Agency Regulation Number 9 of 2025 on Amendments to the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Regulation Number 7 of 2023 on the Implementation of Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructure, IIGF can support the guarantee of 26 infrastructure project sectors with PPP scheme, which can be seen in full in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009, PT PII memperoleh perluasan mandat untuk memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII tidak lagi terbatas pada proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU. Perluasan mandat tersebut kemudian didukung dengan terbitnya PMK 101/2018 yang mulai berlaku di tahun 2018, PMK 89/2023 yang berlaku di tahun 2023 dan PMK 5/2025 yang berlaku di tahun 2025.

Through Government Regulation No. 50 of 2016 concerning the Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009, IIGF obtained an expanded mandate to strengthen its role in supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia. As a result, Government guarantees provided by IIGF are no longer limited to government infrastructure projects developed under the PPP scheme. This expanded mandate is further supported by the issuance of PMK 101/2018, which came into effect in 2018, and PMK 89/2023, which came into effect in 2023.

## Penjaminan Non-Infrastruktur
Non-Infrastructure Guarantees

Selain Penjaminan Infrasturktur, Pemerintah juga turut memperkuat penjaminan sektor Non Infrastruktur melalui penerbitan regulasi untuk penjaminan pinjaman dalam beberapa sektor diantaranya penjaminan bagi pelaku usaha korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, penjaminan pinjaman untuk BUMN dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, serta penjaminan pinjaman untuk BUMN yang mendapat penugasan untuk program Cadangan Pangan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

In addition to Infrastructure Guarantees, the Government also strengthens guarantees for the Non-Infrastructure sector by issuing regulations for loan guarantees in several sectors, including guarantees for corporate business actors in the context of National Economic Recovery under the Regulation of the Minister of Finance Number 98/PMK.08/2020 of 2020 on Procedures for Government Guarantees for Corporate Business Actors through Designated Guarantee Business Entities in the context of the Implementation of National Economic Recovery Program, loan guarantees for SOEs in the context of National Economic Recovery (PEN) program during the Covid-19 pandemic under the Regulation of the Minister of Finance Number 211/PMK.08/2020 of 2020 on Procedures for Providing Government Guarantees for State-Owned Enterprises in the context of the Implementation of National Economic Recovery Program, as well as loan guarantees for SOEs assigned to the Government Food Reserve program through the Regulation of the Minister of Finance Number 34 of 2023 on Procedures for Providing Government Guarantees in the Framework of Organizing Government Food Reserves.

## Penjaminan Baru
New Guarantees

Pada tahun 2025, PT PII memberikan penjaminan atas 6 (enam) proyek, yang terdiri atas 2 (dua) proyek dengan skema KPBU dan 4 (empat) penjaminan dengan skema non-KPBU, dengan total nilai investasi proyek mencapai Rp154 triliun.

Adapun total nilai penjaminan yang diberikan mencapai Rp11,5 triliun, yang terdiri atas penjaminan KPBU sebesar Rp5,1 triliun dan penjaminan non-KPBU sebesar Rp6,4 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Proyek Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan skema KPBU;
2. Proyek Jalan Tol Bogor - Serpong (via Parung) dengan skema KPBU;
3. Pinjaman PT Geo Dipa Energi (Persero) dari Asian Development Bank untuk Kelanjutan Pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 (PLTP Dieng-2);
4. Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk Program Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2).
5. Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk Program *Indonesia Electricity Network Transformation* (I-ENET)
6. Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Asian Development Bank untuk Program *Results-Based Loan Accelerating indonesia's Clean Energy Transition Phase*-1 (AICET Phase-1)

In 2025, IIGF provided guarantees for 6 (six) projects, consisting of 2 (two) projects under the PPP scheme and 4 (four) guarantees under the non-PPP scheme, with a total project investment value amounted to Rp154 trillion.

The total guarantee value amounted to Rp11.5 trillion, consisting Rp5.1 trillion for PPP Projects and Rp6.4 trillion for non-PPP guarantees, with the details as follows:

1. The Panorama I Flyover Development Project (Sitinjau Lauik I) under the PPP scheme;
2. The Bogor–Serpong Toll Road Project (via Parung) under the PPP scheme;
3. A loan to PT Geo Dipa Energi (Persero) from the Asian Development Bank for the continued financing of the Dieng Unit 2 Geothermal Power Plant Project (PLTP Dieng-2);
4. A loan to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for the Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program (ISLE-2);
5. A loan to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for the Indonesia Electricity Network Transformation Program (I-ENET);
6. A loan to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) from the Asian Development Bank for the Results-Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase-1 (AICET Phase-1).

### Ringkasan Status Penjaminan Proyek Infrastruktur - KPBU
Summary of Infrastructure Project Guarantee Status - PPP

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | *Central Java Power Plant* | Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dengan kapasitas 2x1000 MW yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.<br>A coal-fired power plant with a capacity of 2 × 1,000 MW located in Ujungnegoro Village, Batang Regency, Central Java Province. | 68,59 | 16/21 tahun<br>16/21 years |
| 2. | Palapa Ring Paket Barat<br>Western Package Palapa Ring | Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian barat Indonesia yang berada di 5 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel 2.119 km.<br>A telecommunications project utilizing a fiber optic system with both land and submarine cables in the western region of Indonesia, covering 5 regencies/cities with a total cable length of 2,119 km. | 1,23 | 12 tahun<br>12 years |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Palapa Ring Paket Tengah<br>Central Palapa Ring Package | Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian tengah Indonesia yang berada di 17 kabupaten/kota dengan total panjang kabel 3.102 km dan 7 *tower*.<br>A telecommunications project utilizing a fiber optic system with both land and submarine cables in the central region of Indonesia, covering 17 regencies/cities with a total cable length of 3,102 km and 7 towers. | 1,09 | 12 tahun<br>12 years |
| 4. | Palapa Ring Paket Timur<br>Eastern Package Palapa Ring | Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian timur Indonesia yang berada di 35 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel 6.938 km dan 52 *tower*.<br>A telecommunications project utilizing a fiber optic system with both land and submarine cables in the eastern region of Indonesia, covering 35 regencies/cities with a total cable length of 6,938 km and 52 towers. | 5,09 | 12 tahun<br>12 years |
| 5. | Jalan Tol Batang - Semarang<br>Batang–Semarang Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan panjang 75 km.<br>Located in Central Java Province with a length of 75 km. | 13,97 | 15 tahun<br>15 years |
| 6. | Jalan Tol Pandaan - Malang<br>Pandaan–Malang Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 38,48 km.<br>Located in East Java Province with a length of 38.48 km. | 6,36 | 15 tahun<br>15 years |
| 7. | Jalan Tol Manado - Bitung<br>Manado–Bitung Toll Road | Terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang 39 km.<br>Located in North Sulawesi Province with a length of 39 km. | 4,95 | 15 tahun<br>15 years |
| 8. | Jalan Tol Balikpapan - Samarinda<br>Balikpapan–Samarinda Toll Road | Terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang total 97,99 km.<br>Located in East Kalimantan Province with a total length of 97.99 km. | 11,89 | 15 tahun<br>15 years |
| 9. | SPAM Umbulan<br>Umbulan SPAM | Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 4.000 l/detik dan panjang pipa transmisi 92,3 km dari Umbulan ke Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik.<br>A water supply project with a capacity of 4,000 liters/second and a transmission pipeline length of 92.3 km from Umbulan to Pasuruan Regency, Pasuruan City, Sidoarjo Regency, Surabaya City, and Gresik Regency. | 2,06 | 15 tahun<br>15 years |
| 10. | Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta -Cikampek II *Elevated*)<br>Sheikh Mohamed Bin Zayed Elevated Toll Road Project (Jakarta–Cikampek II Elevated) | Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 36,4 km.<br>Located in West Java Province with a total length of 36.4 km. | 16,23 | 15 tahun<br>15 years |
| 11. | Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan<br>Cileunyi–Sumedang–Dawuan Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 km.<br>Located in West Java Province with a total length of 60.1 km. | 10,39 | 15 tahun<br>15 years |
| 12. | Jalan Tol Krian-Legundi Bunder-Manyar<br>Bunder–Manyar Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 km.<br>Located in East Java Province with a total length of 38.3 km. | 12,93 | 15 tahun<br>15 years |
| 13. | Jalan Tol Serang-Panimbang<br>Serang–Panimbang Toll Road | Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 km.<br>Located in Banten Province with a total length of 83.7 km. | 8,58 | 15 tahun<br>15 years |
| 14. | Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan<br>Jakarta–Cikampek II South Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 km.<br>Located in West Java Province with a length of 64 km. | 14,69 | 15 tahun<br>15 years |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi<br>Probolinggo–Banyuwangi Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km.<br>Located in East Java Province with a road length of approximately 172.9 km. | 23,39 | 15 tahun<br>15 years |
| 16. | SPAM Kota Bandar Lampung<br>Bandar Lampung City SPAM | Proyek penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km.<br>A water supply project in Bandar Lampung City with a capacity of 750 liters/second and a transmission pipeline length of 22 km. | 0,75 | 15 tahun<br>15 years |
| 17. | SPAM Semarang Barat<br>West Semarang SPAM | Proyek penyediaan air minum di Kota Semarang dengan kapasitas 1.000 l/ detik.<br>A water supply project in Semarang City with a capacity of 1,000 liters/second. | 0,42 | 15 tahun<br>15 years |
| 18. | Kereta Api Makassar-Parepare<br>Makassar–Parepare Railway | Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Area Layanan Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.<br>Provision of public railway infrastructure services in the South Sulawesi service area, covering 5 regencies/cities: Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City, and Parepare City. | 0,99 | 14 tahun setelah TOK-2<br>14 years after COD-2 |
| 19. | Satelit Multifungsi Pemerintah<br>Government Multifunction Satellite | Satelit dengan teknologi HTS (*High Throughout Satellite*) dengan kapasitas 150 Gbps.<br>A satellite utilizing High Throughput Satellite (HTS) technology with a capacity of 150 Gbps. | 6,42 | 12 tahun<br>12 years |
| 20. | Jalan Tol Semarang- Demak<br>Semarang–Demak Toll Road | Terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 27 km.<br>Located in Central Java Province with a length of 27 km. | 5,93 | 15 tahun<br>15 years |
| 21. | Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan<br>Preservation of the Eastern Sumatra National Road in South Sumatra Province | Terletak di sisi Timur Jalan Sumatera Selatan di Kota Palembang sepanjang 29,87 km.<br>Located on the eastern side of the South Sumatra corridor in Palembang City with a length of 29.87 km. | 0,98 | 11 tahun<br>11 years |
| 22. | Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo<br>Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Toll Road | Jalan tol ini menghubungkan Kota Solo Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kulon Progo DIY dengan panjang 96,6 km.<br>This toll road connects Solo City in Central Java, Yogyakarta, and Kulon Progo (Special Region of Yogyakarta) with a length of 96.6 km. | 27,49 | 15 tahun<br>15 years |
| 23. | Jalan Tol Yogyakarta-Bawen<br>Yogyakarta–Bawen Toll Road | Jalan tol ini melalui Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Sleman dengan panjang 75,82 km.<br>This toll road passes through Magelang Regency, Magelang City, Semarang Regency, Temanggung Regency, and Sleman Regency with a length of 75.82 km. | 14,26 | 15 tahun<br>15 years |
| 24. | SPAM Kota Pekanbaru<br>Pekanbaru City SPAM | Proyek penyediaan air minum di Kota Pekanbaru dengan kapasitas 750 l/ detik<br>A water supply project in Pekanbaru City with a capacity of 750 liters per day. | 0,50 | 15 tahun<br>15 years |
| 25. | SPAM Regional Jatiluhur I<br>Jatiluhur I Regional SPAM | Proyek penyediaan air minum Regional dari Jatiluhur dengan kapasitas 4.750 l/ detik ke Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab. Karawang.<br>A regional water supply project from Jatiluhur with a capacity of 4,750 liters per day supplying DKI Jakarta Province, Bekasi Regency, Bekasi City, and Karawang Regency. | 1,68 | 15 tahun<br>15 years |
| 26. | Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau<br>Preservation of the Eastern Sumatra National Road in Riau Province | Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau.<br>Preservation of Eastern Sumatra National Road in Riau Province. | 0,53 | 11 tahun<br>11 years |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 27. | SPAM Regional Karian Serpong<br>Karian–Serpong Regional SPAM | Proyek penyediaan air minum Regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 l/ detik ke Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.<br>A regional water supply project from Karian Dam with a capacity of 4,600 liters per day supplying DKI Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City. | 2,43 | 15 tahun<br>15 years |
| 28. | Jembatan Callender Hamilton<br>Callender Hamilton Bridge | Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa.<br>Replacement and/or duplication of Callender Hamilton Bridges on Java Island. | 2,20 | 10 tahun<br>10 years |
| 29. | Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur<br>Street Lighting Infrastructure (APJ) in Madiun Regency, East Java | Pembangunan baru (tanpa *retrofit*), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan.<br>New development (without retrofit), operation, and maintenance of 7,459 points across national roads, primary regency roads, and urban roads. | 0,10 | 4 tahun<br>4 years |
| 30. | Proyek Pengembangan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi<br>Proving Ground Development Project for the Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification Center (BPLJSKB) Bekasi | Fasilitas pengujian di luar ruangan (*outdoor test*) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi *United Nations Agreement*.<br>An outdoor testing facility in accordance with international standards that have adopted the United Nations Agreement. | 1,99 | 12 tahun<br>12 years |
| 31. | Tol Akses Patimban<br>Patimban Access Toll Road | Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 km akan mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah disekitarnya.<br>The Patimban Access Toll Road, spanning 37.05 km, will support Patimban Port and the development of its surrounding areas. | 5,03 | 15 tahun<br>15 years |
| 32. | Penerangan Jalan Umum – Lombok Barat<br>Public Street Lighting – West Lombok | Fasilitas Penerangan Jalan Umum terhadap jalan sepanjang 545,1 km di 12.915 titik pada 10 Kecamatan Kabupaten Lombok.<br>Public street lighting facilities covering 545.1 km of roads across 12,915 points in 10 subdistricts of Lombok Regency. | 0,09 | 7 tahun<br>7 years |
| 33. | Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir Ulujami<br>Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir–Ulujami | Jalan Tol yang bertujuan untuk mengurangi kapasitas dan kepadatan di Jalan Tol JORR-1 serta meningkatkan pelayanan jalan, menyediakan rute alternatif, dan memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek.<br>A toll road project aimed at reducing capacity constraints and congestion on the JORR-1 Toll Road, while improving road services, providing alternative routes, and strengthening the toll road network in the Greater Jakarta (Jabodetabek) area. | 21,25 | 15 tahun<br>15 years |
| 34. | Jalan Tol Kediri - Tulungagung<br>Kediri–Tulungagung Toll Road | Jalan tol sepanjang 44,17 km ini direncanakan sebagai bagian dari sistem jalan tol trans Jawa dan menjadi penyokong akses menuju Bandara Dhoho Kediri.<br>This 44.17 km toll road is planned as part of the Trans-Java toll road system and will serve as a supporting access route to Dhoho Airport in Kediri. | 9,92 | 15 tahun<br>15 years |
| 35. | Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena<br>Trans Papua Road | Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (segmen Mamberamo – Elelim) di Provinsi Papua Pegunungan diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional<br>The Trans Papua Road, Jayapura–Wamena section (Mamberamo–Elelim segment) in Highland Papua Province, is expected to accelerate equitable national development. | 3,34 | 11 tahun<br>11 years |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 36. | Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I)<br>Panorama I Flyover Development (Sitinjau Lauik I) | Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dibangun dengan tujuan mengurangi risiko kemiringan jalan eksisting antara Kota Padang dan Kota Solok serta mendukung mobilitas dan distribusi logistik di Provinsi Sumatera Barat<br>The construction of Panorama I Flyover (Sitinjau Lauik I) aims to reduce the gradient risk of the existing road between Padang City and Solok City, while supporting mobility and logistics distribution in West Sumatra Province. | 2,79 | 10 tahun<br>10 years |
| 37. | Jalan Tol Bogor Serpong via Parung<br>Bogor–Serpong Toll Road via Parung | Jalan tol dengan panjang 32,03 km ini merupakan bagian dari rencana jaringan jalan JORR-3 sebagai upaya untuk memperkuat konektivitas antarkawasan di Jabodetabek .<br>This 32.03 km toll road is part of the planned JORR-3 network, aimed at strengthening inter-regional connectivity within the Greater Jakarta (Jabodetabek) area. | 12,35 | 15 tahun<br>15 years |

## Tabel Ringkasan Status Proyek Penjaminan Non KPBU

Table of Summary of Non-PPP Guarantee Project Status

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika<br>Mandalika Special Economic Zone (Mandalika SEZ) | Pengembangan wilayah Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.<br>Development of the Mandalika Special Economic Zone (Mandalika SEZ) tourism area, located in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara. | 5,12 | 35 tahun<br>35 years |
| 2. | *Hydropower Programme* | Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro yang terletak di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua) dengan total kapasitas 195 MW.<br>Hydropower and mini-hydro plants located across four provinces (South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Kalimantan, and Papua) with a total capacity of 195 MW. | 7,09 | 14 Tahun<br>14 years |
| 3. | PLTP Dieng-2 & Patuha-2<br>Geothermal Power Plants (PLTP Dieng-2 & Patuha-2) | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlokasi di Dieng Jawa Tengah dan Gunung Patuha Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing sebesar 55 MW.<br>Geothermal power plants located in Dieng, Central Java, and Mount Patuha, West Java, with capacities of 55 MW each. | 7,58 | 20 tahun<br>20 years |
| 4. | Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)<br>Kalimantan and Maluku–Papua Distribution Network Development Project under the Result-Based Lending scheme (RBL-KMP) | Terletak di Kalimantan dan Maluku- Papua, proyek pembangunan jaringan distribusi listrik ini ditargetkan untuk menambah sambungan listrik hingga 6,7 juta pelanggan.<br>Located in Kalimantan and Maluku–Papua, this electricity distribution network development project aims to add connections for up to 6.7 million customers. | 34,12 | 20 tahun<br>20 years |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT)<br>Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Network Development Project under the Result-Based Lending scheme (RBL-SNT) | Terletak di Sulawesi dan Nusa Tenggara, target dari Proyek ini adalah peningkatan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan.<br>Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, this project targets an increase in electricity connections of up to 7.7 million customers. | 23,61 | 15 tahun<br>15 years |
| 6. | Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali<br>East Java and Bali Distribution Network Development Project | Pembangunan sistem distribusi Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah, trafo, dan sambungan di wilayah Jawa Timur dan Bali.<br>Development of medium-voltage and low-voltage distribution networks, transformers, and connections in East Java and Bali. | 19,48 | 20 tahun<br>20 years |
| 7. | Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (*Sustainable and Reliable Energy Access Program*/SREAP)<br>Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP | Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas *charging station* kendaraan listrik.<br>Gradual development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure to support electric vehicle charging facilities. | 45,56 | 20 tahun<br>20 years |
| 8. | Penjaminan Pembiayaan Proyek Pembangunan Pembangkit PLTU Tahap III Program 35.000 MW (PLTU Timor-1 2x50 MW)<br>Financing Guarantee for Coal-Fired Power Plant Development Projects Phase III of the 35,000 MW Program (PLTU Timor-1 2 × 50 MW) | Pembangunan Pembangkit PLTU Tahap III Program 35.000 MW (PLTU Timor-1 2x50 MW) yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.<br>Construction of Coal-Fired Power Plant Phase III of the 35,000 MW Program (PLTU Timor-1 2 × 50 MW), located in Kupang Regency, East Nusa Tenggara. | 3,72 | 10 tahun<br>10 years |
| 9. | Pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Rangka Pembiayaan tambahan untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung<br>Loan to PT Kereta Api Indonesia (Persero) for Cost Overrun Financing of the Jakarta–Bandung High-Speed Rail Project | Pemberian Penjaminan atas Pembiayaan tambahan untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung<br>Provision of guarantees for cost overrun financing of the Jakarta–Bandung High-Speed Rail (KCJB) Project. | 11,69 | 45 tahun<br>45 years |
| 10. | Program Indonesia *Sustainable Least Cost Electrification*-1 (ISLE-1)<br>Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program – Phase 1 (ISLE-1) | Program Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.<br>Electricity infrastructure development programs in the Maluku, North Maluku, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara regions. | 20,96 | 30 tahun<br>30 years |
| 11. | Kelanjutan Pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 (PLTP Dieng-2)<br>Continued Financing of Dieng Unit 2 Geothermal Power Plant Project (PLTP Dieng-2) | Tambahan pembiayaan dalam rangka pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng-2<br>Additional financing for the Dieng-2 Geothermal Power Plant Project. | 2,59 | 14,5 tahun<br>14,5 years |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | *Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program* (AICET) - ADB | Program pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pembangunan PLTS, PLTB, Pembangunan/*upgrade control center* Sumatera dan Sulawesi, serta Pembangunan gardu induk ekstensi/uprating di Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi<br>Electricity infrastructure development programs across Indonesia, including solar PV (PLTS), wind power (PLTB), construction/upgrades of control centers in Sumatra and Sulawesi, and construction of substation extensions/upgrading in Java–Bali, Sumatra, and Sulawesi. | 19,64 | 20 tahun<br>20 years |
| 13. | Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification Phase*-2 (ISLE-2)<br>Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification – Phase 2 (ISLE-2) Program | Program peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera<br>Programs to increase renewable energy generation capacity in Kalimantan and Sumatra. | 12,98 | 31 tahun<br>31 years |
| 14. | Program Indonesia - *Electricity Network Transformation* (I-ENET)<br>Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET) Program | Peningkatan penyediaan dan keandalan pasokan listrik serta mengintegrasikan sumber daya energi terbarukan terdistribusi di wilayah-wilayah Jawa, Madura, dan Bali<br>Programs to improve electricity supply reliability and integrate distributed renewable energy resources across Java, Madura, and Bali. | 103,34 | 31 tahun<br>31 years |

## Ringkasan Status Penjaminan Proyek Non Infrastruktur - Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Summary of Non-Infrastructure Project Guarantees Status– SOE Guarantees in Support of the National Economic Recovery (PEN) Program

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp-trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penjaminan Pemerintah atas Obigasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 dalam rangka Pelaksanaan Program PEN dan Obligasi IV & Sukuk Mudharabah I Tahun 2022<br>Government Guarantee for PT Waskita Karya (Persero) Tbk's Bond III in 2021 in support of the National Economic Recovery (PEN) Program, and for Bond IV & Sukuk Mudharabah I in 2022 | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi.<br>Provision of guarantees against default risk on bonds. | 1,77 | Seri A: 5 tahun<br>Seri B: 7 tahun<br>A Series: 5 years<br>B Series: 7 years |
| 2. | Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN<br>Government Guarantee for PT Waskita Karya (Persero) Tbk's Loan in support of the National Economic Recovery (PEN) Program | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman.<br>Provision of guarantees against default risk on loan interest. | 8,08 | 5 tahun<br>5 tahun |

| No. | Nama Proyek<br>Project Name | Uraian<br>Description | Nilai Proyek (Rp triliun)<br>Project Value (Rp-trillion) | Durasi Penjaminan (setelah COD)<br>Guarantee Term (after COD) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Penjaminan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional)<br>Guarantee for PT Waskita Karya (Persero) Tbk's Bond IV in support of the National Economic Recovery Program | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi.<br>Provision of guarantees against default risk on loan interest. | 2,13 | Seri A: 5 tahun<br>Seri B: 7 tahun<br>A Series: 5 years<br>B Series: 7 years |
| 4. | Penjaminan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional<br>Guarantee for PT Waskita Karya (Persero) Tbk's Sukuk Mudharabah I in support of the National Economic Recovery Program | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar sukuk.<br>Provision of guarantees against default risk on sukuk. | 1,15 | Seri A: 5 tahun<br>Seri B: 7 tahun<br>A Series: 5 years<br>B Series: 7 years |
| 5. | Penjaminan Pinjaman Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero)<br>Guarantee for Electric Bus Loans for the G20 Summit and BTS in Bandung & Surabaya by PT Industri Kereta Api (Persero) | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman 53 unit Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya.<br>Provision of guarantees against default risk on loans for 53 electric buses for the G20 Summit and BTS in Bandung & Surabaya. | 0,15 | 4 tahun<br>4 years |
| 6. | Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perum DAMRI<br>Guarantee for Working Capital and Investment Loans of Perum DAMRI | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman guna peremajaan armada dan *maintenance facility*.<br>Provision of guarantees against default risk on loans for fleet renewal and maintenance facilities. | 0,10 | 4 tahun<br>4 years |
| 7. | Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Len Industri (Persero)<br>Working Capital Loan of PT Len Industri (Persero) | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman Pelaksanaan 3 proyek penugasan dari Kementerian Pertahanan RI.<br>Provision of guarantees against default risk on loans for the implementation of three assignment projects from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. | 2,79 | 4 tahun<br>4 years |
| 8. | Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Pertamina (Persero) dalam rangka Talangan Pembayaran Dana Kompensasi dan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg<br>Guarantee for Working Capital Loan of PT Pertamina (Persero) in connection with the Advance Payment of Compensation Funds and Subsidies for Fuel (BBM) and 3-kg LPG | Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman pembayaran dana kompensasi dan subsidi BBM dan LPG 3 kg.<br>Provision of guarantees against default risk on loans for the payment of compensation funds and subsidies for fuel (BBM) and 3 kg LPG. | 47,19 | 2 tahun<br>2 years |
| 9. | Penjaminan atas Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.<br>enjaminan atas Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangkacPenyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. | Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.<br>Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. | 1,5 | - |

## Kontijensi dan Kapasitas Penjaminan
Contingencies and Guarantee Capacity

Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi Pemerintah karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan proyek infrastruktur dan non-infrastruktur.

Dalam melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur, PT PII menggunakan ekuitas Perseroan sebagai kapasitas penjaminan yang terutama bersumber dari PMN. Sampai dengan 31 Desember 2025, PMN yang diterima perseroan sebesar Rp10,66 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Adequacy of guarantee capacity is a priority for the Government because it affects IIGF's credibility in front of potential investors in infrastructure project development. Therefore, capital capacity is a key determinant of the ability to provide guarantees for infrastructure and non-infrastructure projects.

In providing guarantees for infrastructure projects, IIGF uses the Company's equity as its guarantee capacity, which is primarily sourced from State Equity Participation (PMN). As of 31 December 2025, the PMN received by the Company totaled Rp10.66 trillion, detailed as follows:

| Referensi<br>Reference | Jumlah Modal Disetor<br>Additional Paid-up Capital | Akumulasi Modal PT PII<br>Capital Accumulation of IIGF | Modal Dasar<br>Authorized Capital |
|---|---|---|---|
| Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009*<br>Government Regulation No. 35 of 2009* | Rp1 triliun<br>Rp1 trillion | Rp1 triliun<br>Rp1 trillion | Rp4 triliun<br>Rp4 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010<br>Government Regulation No. 88 of 2010 | Rp1 triliun<br>Rp1 trillion | Rp2 triliun<br>Rp2 trillion | Rp4 triliun<br>Rp4 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2011<br>Government Regulation No. 55 of 2011 | Rp1,5 triliun<br>Rp1.5 trillion | Rp3,5 triliun<br>Rp3.5 trillion | Rp4 triliun<br>Rp4 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2012**<br>Government Regulation No. 68 of 2012** | Rp1 triliun<br>Rp1 trillion | Rp4,5 triliun<br>Rp4.5 trillion | Rp9 triliun<br>Rp9 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2015<br>Government Regulation No. 94 of 2015 | Rp1,5 triliun<br>Rp1.5 trillion | Rp6 triliun<br>Rp6 trillion | Rp9 triliun<br>Rp9 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2016<br>Government Regulation No. 79 of 2016 | Rp1 triliun<br>Rp1 trillion | Rp7 triliun<br>Rp7 trillion | Rp9 triliun<br>Rp9 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017<br>Government Regulation No. 57 of 2017 | Rp1 triliun<br>Rp1 trillion | Rp8 triliun<br>Rp8 trillion | Rp9 triliun<br>Rp9 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020***<br>Government Regulation No. 79 of 2020*** | Rp1,57 triliun<br>Rp1.57 trillion | Rp9,57 triliun<br>Rp9.57 trillion | Rp20 triliun<br>Rp20 trillion |
| Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022<br>Government Regulation No. 53 of 2022 | Rp1,08 triliun<br>Rp1.08 trillion | Rp10,66 triliun<br>Rp10.66 trillion | Rp20 triliun<br>Rp20 trillion |

*) Berdasarkan keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Dsember 2009, Pemerintah selaku pemegang saham menempatkan modal dasar Perseroan sebesar Rp4 triliun.
**) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp9 triliun.
***) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn No. 14 tanggal 19 November 2020, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.

*) Berdasarkan keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Dsember 2009, Pemerintah selaku pemegang saham menempatkan modal dasar Perseroan sebesar Rp4 triliun
**) Based on the shareholders' resolution documented in Notarial Deed No. 145 by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., dated 30 August 2012, the Government as the shareholder approved an increase of the Company's authorized capital to Rp9 trillion.
***) Based on the shareholders' resolution documented in Notarial Deed No. 14 by Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dated 19 November 2020, the Government as the shareholder approved an increase of the Company's authorized capital to Rp20 trillion.

Secara bertahap PT PII mendapat mandat untuk mengurangi ketergantungan kepada APBN dalam meningkatkan kapasitas penjaminan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PP 78/2010).

IIGF gradually has been mandated to reduce reliance on the State Budget in increasing its guarantee capacity, as stipulated in Presidential Regulation No. 78 of 2010 concerning Infrastructure Guarantees in Public-Private Partnership Projects Conducted Through the Infrastructure Guarantee Agency ("PP 78/2010").

Oleh karenanya, PT PII harus berperan aktif untuk menjalin kerja sama dengan institusi penjaminan lainnya, Lembaga Multilateral, dan Institusi Bilateral dengan tujuan sejenis. Dalam berbagai diskusi yang dilakukan secara intensif dengan para mitra terkait, PT PII melakukan penyusunan kerangka penyediaan dukungan dan penjaminan bersama Pemerintah yang lebih terintegrasi.

Therefore, IIGF must actively engage in cooperation with other guarantee institutions, multilateral organizations, and bilateral institutions with similar objectives. Through intensive discussions with relevant partners, IIGF has developed a framework for providing integrated support and guarantees alongside the Government.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham PT PII melalui KMK 497/2020 menyetujui peningkatan modal dasar PT PII menjadi Rp20 triliun, yang dilanjutkan dengan penambahan PMN kepada PT PII sebesar Rp1,6 triliun berdasarkan PP 79/2020 pada tanggal 30 Desember 2020. Inisiatif ini dilakukan guna memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas PT PII dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah kepada PT PII.

In 2020, the Minister of Finance, as the shareholder of IIGF, approved through KMK 497/2020 an increase of IIGF's authorized capital to Rp20 trillion, followed by additional State Equity Participation (PMN) to IIGF of Rp1.6 trillion based on PP 79/2020 on 30 December 2020. This initiative was undertaken to improve the capital structure and enhance IIGF's capacity to support the National Economic Recovery (PEN) program and stimulate the national economy through Government assignments to IIGF.

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17,49 triliun (termasuk tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1,57 triliun). Sejak berdiri sampai dengan 31 Desember 2025, PT PII telah menjamin 60 proyek terdiri dari 51 proyek yang merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non KPBU, serta 9 penjaminan proyek non infrastruktur dengan nilai estimasi investasi proyek sebesar Rp705 triliun.

As of 31 December 2025, the Company's equity amounted to Rp17,49 trillion (including additional State Equity Participation for the PEN assignment of Rp1,57 trillion). Since its establishment until 31 December 2025, IIGF has provided guarantees for 60 projects, consisting of 51 infrastructure projects under PPP and non-PPP schemes, and 9 non-infrastructure projects, with an estimated total project investment of Rp705 trillion.

Jumlah eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII per 31 Desember 2025 ialah sebesar Rp109 triliun yang terdiri dari proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU sebesar Rp104 triliun serta proyek non-Infrastruktur sebesar Rp5 triliun, dengan mempertimbangkan ekuitas Perseroan sebesar Rp15,91 triliun (tanpa memperhitungkan PMN Program PEN Rp1,57 triliun) maka *Gearing Ratio* PT PII per 31 Desember 2025 mencapai 6,6 kali.

The total guarantee exposure for projects backed by IIGF as of 31 December 2025 amounted to Rp109 trillion, consisting of Rp104 trillion for infrastructure projects under PPP and non-PPP schemes and Rp5 trillion for non-infrastructure projects. Considering the Company's equity of Rp15,91 trillion (excluding the PEN Program PMN of Rp1,57 trillion), IIGF's gearing ratio as of 31 December 2025 reached 6.6 times.

## *Appraisal* Penjaminan
Guarantee Appraisal

Dalam rangka melakukan appraisal atas proyek yang akan dijamin, PT PII mengacu pada masing-masing regulasi terkait penjaminan proyek sebagai dasar penentuan kriteria evaluasi dan kebijakan internal terkait evaluasi penjaminan proyek dengan tujuan melakukan evaluasi yang komprehensif dan konsisten atas dokumen proyek yang disampaikan oleh entitas pemerintah terkait. Adapun proses *appraisal* yang dilakukan merupakan proses evaluasi berbasis risiko yang dapat mencakup berbagai macam aspek proyek, antara lain teknis, finansial, ekonomi, risiko, kapasitas PJPK, hukum, serta lingkungan dan sosial. Risiko dari tiap

In appraising the project to be guaranteed, IIGF refers to each regulation related to project guarantees as a basis for determining evaluation criteria and internal policies related to project guarantee evaluation with the aim of conducting a comprehensive and consistent evaluation of project documents submitted by the relevant government entities. The appraisal process carried out is a risk-based evaluation process that can cover various aspects of the project, including technical, financial, economic, risk, GCA capacity, legal, and environmental and social. The risks from each evaluated aspect will be analyzed in depth to then be

aspek yang dievaluasi akan dianalisis secara mendalam untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi risiko yang dibutuhkan agar dapat dipastikan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang serta meningkatkan bankabilitas.

used as a basis for preparing the necessary risk mitigation plan to ensure the long-term sustainability of the project and increase bankability.

Terkait dengan proses appraisal untuk penjaminan kredit, PT PII mengacu pada kebijakan internal terkait evaluasi penjaminan kredit dengan juga merujuk kepada masing-masing regulasi terkait fasilitas penjaminan kredit sebagai dasar penentuan kriteria evaluasi. Secara umum, proses *appraisal* untuk penjaminan kredit dapat mencakup aspek hukum, aspek finansial korporasi, aspek finansial proyek, aspek teknis, struktur pinjaman, aspek risiko, serta aspek lingkungan dan sosial. Dalam proses *appraisal* ini, Divisi *Project Appraisal* yang berada di bawah Direktur Bisnis ditunjuk sebagai koordinator proses *appraisal* penjaminan, dengan dukungan dari Divisi *Legal and Compliance* serta Divisi *Environmental & Social*.

Regarding the appraisal process for credit guarantees, IIGF refers to internal policies on credit guarantee evaluation, along with the respective regulations related to credit guarantee facilities, as the basis for determining evaluation criteria. In general, the appraisal process for credit guarantees can encompass legal aspects, corporate financial aspects, project financial aspects, technical aspects, loan structure, risk aspects, and environmental and social aspects. In this appraisal process, the Project Appraisal Division, under the Business Director, is appointed as the coordinator of the guarantee appraisal process, with support from the Legal and Compliance Division and the Environmental & Social Division.

Dalam proses *appraisal* ini, Divisi *Project Appraisal* yang berada di bawah Direktur Bisnis ditunjuk sebagai koordinator proses *appraisal* penjaminan, dengan dukungan dari Divisi *Legal and Compliance* serta Divisi *Environmental & Social.* Pelaksanaan proses *appraisal* juga dapat memanfaatkan keahlian pihak-pihak independen yang bereputasi baik untuk meningkatkan kualitas dan memastikan independensi proses evaluasi.

In this appraisal process, the Project Appraisal Division, under the Business Director, is appointed as the coordinator of the guarantee appraisal process, with support from the Legal and Compliance Division and the Environmental & Social Division. The appraisal process can also utilize the expertise of reputable independent parties to improve the quality and ensure the independence of the evaluation process.

Hingga akhir Desember 2025, proses *appraisal* telah dilakukan terhadap 3 penjaminan proyek dan 6 penjaminan kredit.

Until the end of December 2025, the appraisal process had been carried out on 3 project guarantees and 6 credit guarantees.

**Tabel *Appraisal* Penjaminan Proyek KPBU dan Non KPBU**
Table of Guarantee Appraisal in PPP and Non-PPP Projects

| No. | Penjaminan Proyek<br>Project Guarantee | No. | Penjaminan Kredit<br>Loan Guarantee |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Kota Samarinda<br>Regional General Hospital I.A. Moeis, Samarinda City | 1. | Kelanjutan Pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 (PLTP Dieng-2)<br>Continuation of Financing for Dieng Unit 2 Geothermal Power Plant Project (PLTP Dieng-2) |
| 2. | Alat Penerangan Jalan Kabupaten Bandung<br>Street Lighting in Bandung Regency | 2. | Program Indonesia *Electricity Network Transformation Program for Result* (I-ENET)<br>Indonesia Electricity Network Transformation for Results (I-ENET) Program |
| 3. | Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN)<br>Civil Servants' Flats in the Nusantara Capital City (IKN) | 3. | Program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification*-2 (ISLE-2)<br>Indonesia Sustainable Least Cost Electrification-2 for Results (ISLE-2 PforR) Program |
| | | 4. | Proyek *Green Energy Corridor* Sulawesi (GECS)<br>Sulawesi Green Energy Corridor Project (GECS) |
| | | 5. | Program *Result-Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase*-1 (RBL AICET-1) Porsi Pinjaman Agence Française de Développement (AFD)<br>Result-Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase-1 (RBL AICET-1) Program from Agence Française de Développement (AFD) Loan Portion |
| | | 6. | Program *Result-Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase*-1 (RBL AICET-1) Porsi Pinjaman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)<br>Result-Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase-1 (RBL AICET-1) Program from Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Loan Portion |

# Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur - KPBU

Infrastructure Project Guarantee Portfolio – PPP

## Sektor Jalan dan Jembatan

Road and Bridge Sector



### Proyek Jalan Tol Batang - Semarang

**Batang – Semarang Toll Road Project**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Tengah<br>Central Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp13,97 triliun<br>Rp13,97 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Semarang Batang |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 21 Januari 2019<br>In operation since 21 January 2019 |

Proyek Tol Batang-Semarang merupakan salah satu proyek infrastruktur jalan tol skema KPBU pertama yang diberikan penjaminan oleh Pemerintah melalui PT PII. Proyek Jalan sepanjang 75 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki nilai investasi sebesar Rp13,97 triliun.

Pada tanggal 27 April 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dan PT Jasamarga Semarang Batang selaku BUP menandatangani Perjanjian Kerja Sama Proyek di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The Batang–Semarang Toll Road Project is one of the first PPP-scheme toll road infrastructure projects to receive a guarantee from the Government through IIGF. The 75 km road project is part of the Trans-Java Toll Road, which will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java, with an investment value of Rp13,97 trillion.

On 27 April 2016, the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) as GCA and PT Jasamarga Semarang Batang as the BUP signed the Project Cooperation Agreement at the Ministry of Finance office. At the same time, the Guarantee Agreement between PT Jasamarga Semarang Batang and IIGF, as well as the Recourse Agreement between IIGF and GCA were also signed.



## Proyek Jalan Tol Pandaan - Malang
### Pandaan – Malang Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Timur<br>East Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp6,36 triliun<br>Rp6,36 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Pandaan Malang |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi penuh sejak 2 April 2020<br>Fully operational since 2 April 2020 |

Proyek KPBU Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan dengan panjang 38,48 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Sehingga, ruas jalan tol ini akan menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek ini dilaksanakan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Jasamarga Pandaan Malang selaku Badan Usaha Jalan Tol. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Pandaan Malang dengan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The Pandaan–Malang Toll Road PPP Project is part of the planned north–south road corridor in East Java Province, continuing from the Gempol–Pandaan Toll Road, with a total length of 38.48 km. This toll road section passes through three key areas in East Java: Pasuruan Regency, Malang Regency, and Malang City. Accordingly, this toll road will serve as the main artery among many alternative non-toll routes connecting the northern and southern regions of East Java.

The Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) as GCA and PT Jasamarga Pandaan Malang as the Toll Road Business Entity. Moreover, the Guarantee Agreement between PT Jasamarga Pandaan Malang and IIGF, as well as the Recourse Agreement between IIGF and GCA, were also signed.



## Proyek Jalan Tol Manado - Bitung
### Manado – Bitung Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Sulawesi Utara<br>North Sulawesi Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp4,95 triliun<br>Rp4,95 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Manado Bitung |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi penuh sejak 25 Februari 2022<br>Fully operational since 25 February 2022 |

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari dan ke wilayah provinsi Sulawesi Utara (Perpres 32/2011). Oleh karena itu, Pemerintah berupaya merealisasikan rencana tersebut melalui Proyek Jalan Tol Manado-Bitung dengan nilai investasi mencapai Rp4,95 triliun. Dengan panjang 39 km, proyek jalan tol ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu seksi I sepanjang 14 km dari Manado-Airmadidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunannya dan seksi II sepanjang 25 km yang dibangun oleh BUP. Proyek ini dikerjakan dengan skema SBOT (*Supported Build Operate Transfer*) dengan masa konsesi 40 tahun, di mana Pemerintah menyediakan bantuan berupa dukungan konstruksi untuk seksi I sepanjang 14 km untuk membuat Proyek ini layak secara finansial.

Keberadaan proyek yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan mengurangi risiko-risiko kecelakaan untuk wilayah Sulawesi Utara.

Based on Presidential Regulation No. 32 of 2011 concerning the Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development 2011–2025, Bitung Port is planned to be developed into a port serving import and export activities to and from North Sulawesi Province (Presidential Regulation 32/2011). Therefore, the Government seeks to realize this plan through the Manado–Bitung Toll Road Project, with an investment value of Rp4,95 trillion. With a total length of 39 km, the toll road project is divided into two sections: Section I, 14 km from Manado to Airmadidi, which is the Government's responsibility in the construction process, and Section II, 25 km, built by the BUP. The project is implemented under the SBOT (Supported Build Operate Transfer) scheme with a 40-year concession period, where the Government provides support in the form of construction assistance for the 14 km Section I to make the project financially viable.

The project, located in North Minahasa Regency and Bitung City, aims to improve connectivity between regions in North Sulawesi Province and is expected to increase travel efficiency and reduce accident risks within the region.



## Proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
### Balikpapan – Samarinda Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Kalimantan Timur<br>East Kalimantan Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp11,89 triliun<br>Rp11.89 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Balikpapan Samarinda |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi penuh sejak 24 Agustus 2021<br>Fully operational since 24 August 2021 |

Terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km ini terdiri dari 5 seksi. Konstruksi seksi 1 dan 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan konstruksi seksi 2-4 merupakan tanggung jawab BUP. Nilai proyek ini mencapai Rp11,89 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan ruas tol Balikpapan-Samarinda tersebut dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Selain itu, Pembangunan ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan meningkatkan layanan/ akses mobilisasi bagi warga Kalimantan Timur.

Located within the administrative areas of Balikpapan City, Kutai Kartanegara Regency, and Samarinda City, the 97.99 km Balikpapan–Samarinda Toll Road Project consists of five sections. The construction of Sections 1 and 5 is the Government's responsibility, while Sections 2–4 are the responsibility of the Toll BUP. The project value reaches Rp11,89 trillion, with a guarantee period of up to 15 years after COD.

The Balikpapan–Samarinda toll road is one of the key corridors for the movement of people and goods in East Kalimantan Province and is one of the 7 (seven) toll roads included in the East Kalimantan Provincial transportation system plan.

The presence of the Balikpapan–Samarinda toll road provides an alternative solution to heavy traffic congestion and improves travel time efficiency. In addition, the construction of this toll road is expected to enhance social and economic growth in East Kalimantan and enhance mobility services and access for residents of the province.



## Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta - Cikampek II *Elevated*)

**Sheikh Mohamed Bin Zayed Elevated Toll Road Project (Jakarta – Cikampek II Elevated)**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat<br>West Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp16,23 triliun<br>Rp16,23 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 12 Desember 2019<br>Operational since 12 December 2019 |

Proyek jalan tol Jakarta - Cikampek II Elevated sepanjang 36,4 km ini memiliki nilai investasi sebesar Rp16,23 triliun. Proyek ini dibangun melalui skema KPBU dan merupakan proyek tol yang diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII sebagai pelaksana *single window policy*.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku BUP melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek dan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII dilakukan secara bersamaan pada 22 Februari 2017.

The 36.4 km Jakarta–Cikampek II Elevated Toll Road Project has an investment value of Rp16,23 trillion. The project is developed under the PPP scheme and is a toll road project guaranteed by the Government through IIGF as the implementing agency of the single window policy.

On 5 December 2016, the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) as GCA and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek as the Toll Road Business Entity (BUP) signed the Project Cooperation Agreement. Meanwhile, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek and the Recourse Agreement between GCA and IIGF were signed simultaneously on 22 February 2017.




## Proyek Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

**Krian–Legundi–Bunder–Manyar Toll Road Project**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Timur<br>East Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp12,93 triliun<br>Rp12,93 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Waskita Bumi Wira |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi Parsial<br>Seksi 1-3 beroperasi sejak 19 November 2020<br>Partial Operation<br>Sections 1–3 have been operational since 19 November 2020 |

Terletak di Provinsi Jawa Timur, Proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 38,3 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp12,93 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dan PT Waskita Bumi Wira selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII secara bersamaan dilakukan pada 22 Februari 2017.

Located in East Java Province, the 38.3 km Krian–Legundi–Bunder–Manyar Toll Road Project has an investment value of Rp12,93 trillion, with a guarantee period of up to 15 years after COD.

On 5 December 2016, the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) as GCA and PT Waskita Bumi Wira as the BUP signed the Project Cooperation Agreement at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Meanwhile, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Waskita Bumi Wira, as well as the Recourse Agreement between GCA and IIGF, were signed simultaneously on 22 February 2017.



### Proyek Jalan Tol Serang - Panimbang
### Serang – Panimbang Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Banten<br>Banten Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp8,58 triliun<br>Rp8.58 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Wijaya Karya Serang Panimbang |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi Parsial<br>Seksi 1 beroperasi sejak 16 November 2021<br>Partial Operation<br>Section 1 has been operational since 16 November 2021 |

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020, proyek jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,7 km yang terletak di Provinsi Banten ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi sebesar Rp8,58 triliun.

Pada tanggal 22 Februari 2017, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK dilakukan secara bersamaan.

As stated in Presidential Regulation No. 109 of 2020, the 83.7 km Serang–Panimbang Toll Road Project, located in Banten Province, is one of the National Strategic Projects with an investment value of Rp8,58 trillion.

On 22 February 2017, the signing of the Project Cooperation Agreement between the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) and PT Wijaya Karya Serang Panimbang, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Wijaya Karya Serang Panimbang, and the Recourse Agreement between IIGF and GCA were carried out simultaneously.




## Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
### Cileunyi–Sumedang–Dawuan Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat<br>West Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp10,39 triliun<br>Rp10,39 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Citra Karya Jabar Tol |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi penuh sejak 10 Agustus 2023<br>Fully operational since 10 August 2023 |

Terletak di Provinsi Jawa Barat, Proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60,1 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp10,39 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 22 Februari 2017, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) dengan PT Citra Karya Jabar Tol, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Citra Karya Jabar Tol, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

Located in West Java Province, the 60.1 km Cileunyi–Sumedang–Dawuan Toll Road Project has an investment value of Rp10,39 trillion, with a guarantee period of up to 15 years after COD.

On 22 February 2017, the Project Cooperation Agreement between the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) and PT Citra Karya Jabar Tol, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Citra Karya Jabar Tol, and the Recourse Agreement between IIGF and GCA were signed.




## Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
### Probolinggo–Banyuwangi Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Timur<br>East Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp23,39 triliun<br>Rp23.39 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Construction |

Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,39 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Jalan tol ini akan melewati 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi.

The Probolinggo-Banyuwangi Toll Road project has an investment value of Rp23.39 trillion, with a guarantee period of up to 15 years after COD. This toll road will pass through 3 (three) regencies: Probolinggo, Situbondo, and Banyuwangi, with a total length of approximately 172.9 km. The presence of this toll road is expected to facilitate the smooth flow of goods and people to and from Banyuwangi.



### Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
### Jakarta-South Cikampek II Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat<br>West Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp14,69 triliun<br>Rp14.69 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Japek Selatan |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Construction |

Proyek jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 64 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp14,69 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Pembangunan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah Kota Bekasi dan berakhir di sekitar *interchange* Sadang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

The 64 km Jakarta–South Cikampek II toll road project has an investment value of Rp14.69 trillion, with a guarantee period of up to 15 years after COD. The construction of the Jakarta–South Cikampek II toll road starts around the Jatiasih interchange, passes through the Bekasi City area, and ends near the Sadang interchange in Purwakarta Regency, West Java Province.



### Proyek Jalan Tol Semarang - Demak
### Semarang – Demak Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Tengah<br>Central Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp5,93 triliun<br>Rp5.93 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi Parsial<br>Seksi 2 beroperasi sejak 16 Januari 2023<br>Partial Operation<br>Section 2 began operations on January 16, 2023 |

Berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, proyek ini memiliki panjang jalan tol ±27 km dengan nilai investasi sebesar Rp5,93 triliun. Proyek berskema KPBU ini meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut. Jalan Tol Semarang – Demak ini terdiri atas porsi BUP pada Seksi 2 (Sayung – Demak) sepanjang 16,31 km yang sudah beroperasi dan porsi dukungan pemerintah pada Seksi 1 (Semarang – Sayung) sepanjang 10,64 km yang berada di atas laut dan terbagi menjadi 3 paket yang saat ini dalam tahap konstruksi.

Pada tanggal 23 September 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, di saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

Located from Semarang City to Demak Regency, Central Java, this project has a toll road length of approximately 27 km with an investment value of Rp5.93 trillion. This PPP project covers the construction and operation of the Semarang–Demak Toll Road, which is integrated with the Sea Wall. The Semarang–Demak Toll Road consists of the business entity portion in Section 2 (Sayung–Demak), spanning 16.31 km, which is already operational, and the government support portion in Section 1 (Semarang–Sayung), spanning 10.64 km, which is located offshore and divided into three packages currently under construction.

On 23 September 2019, the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works), acting as the GCA, signed a Cooperation Agreement with PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak as BUP. At the same time, a Guarantee Agreement between IIGF and the BUP, as well as a Recourse Agreement between the Contracting Agency and IIGF, were also signed.



### Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel)
### Preservation of the Eastern Sumatra National Road in South Sumatra Province (Jalintim Sumsel) Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Sumatera Selatan<br>South Sumatra Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp980 miliar<br>Rp980 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum<br>Director General of Highways, Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jalintim Adhi Abipraya |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi sejak 5 September 2023<br>Operating since 5 September 2023 |

Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Ruang lingkup skema KPBU Proyek ini meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh BUP.

Dengan nilai investasi sebesar Rp980 miliar, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik,

The South Sumatra Jalintim Preservation PPP Project is the first PPP project in Indonesia's non-toll road sector and has received a government guarantee through IIGF. The scope of this PPP scheme includes technical planning, construction implementation, operation and maintenance during both the construction and service periods, as well as project financing by the BUP.

With an investment value of Rp980 billion, this project is expected to have a significant impact on economic growth by improving interregional connectivity, particularly for logistics routes, tourism, access roads to ports and airports,

pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.

as well as reducing Vehicle Operating Costs (VOC) and travel time value.

Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jalintim Adhi Abipraya dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 3 August 2020, the Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works), acting as the GCA, and PT Jalintim Adhi Abipraya as the Business Entity. On the same occasion, a Guarantee Agreement between IIGF and PT Jalintim Adhi Abipraya, as well as a Recourse Agreement between IIGF and the GCA, were also signed.




## Proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo

### Solo - Yogyakarta – NYIA Kulon Progo Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta<br>Central Java Province and Yogyakarta Special Region |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp27,49 triliun<br>Rp27.49 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Jogja Solo |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi Parsial.<br>Seksi 1 beroperasi sejak 20 September 2024<br>Partial Operating<br>Section 1 has been operating since 20 September 2024 |

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sepanjang 96,5 km ini dibangun dengan skema kerja sama *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 40 tahun. Pembangunan proyek infrastruktur jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo, termasuk melayani akses Bandara NYIA Kulon Progo, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol serta menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

The 96.5 km Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Toll Road Project is developed under a Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) scheme, with a concession period of 40 years. The development of this toll road infrastructure project aims to improve accessibility between Solo, Yogyakarta, and Kulon Progo, including providing access to NYIA Kulon Progo Airport, supporting regional development along the toll road corridor, and fostering regional economic growth.

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Jogjasolo Marga Makmur (sekarang PT Jasamarga Jogja Solo) selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 9 September 2020, the Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works), acting as the GCA, and PT Jogjasolo Marga Makmur (now PT Jasamarga Jogja Solo) as the BUP. On the same occasion, a Guarantee Agreement between IIGF and the Business Entity, as well as a Recourse Agreement between IIGF and the GCA, were also signed.



## Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
## Yogyakarta -Bawen Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta<br>Central Java Province and Special Region of Yogyakarta |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp14,26 triliun<br>Rp14.26 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Jogja Bawen |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Construction |

Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km ini terletak di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pembangunan proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama akses Semarang-Yogyakarta.

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jogja Bawen dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The 75.82 km Yogyakarta–Bawen Toll Road Project is located in Central Java Province and the Special Region of Yogyakarta. The development of this project is expected to have a significant impact on regional economic growth in Central Java and Yogyakarta, as well as improve interregional connectivity, particularly access between Semarang and Yogyakarta.

On 13 November 2020, the Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works), acting as the GCA, and PT Jasamarga Jogja Bawen as the BUP. On the same occasion, a Guarantee Agreement between IIGF and PT Jasamarga Jogja Bawen, as well as a Recourse Agreement between IIGF and the GCA, were also executed.



## Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau (Jalintim Riau)
## Preservation of the Eastern Sumatra National Road in Riau Province (Jalintim Riau) Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Riau<br>Riau Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp0,53 triliun<br>Rp0.53 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum<br>Directorate General of Highways, Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Adhi Jalintim Riau |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi sejak 27 April 2024<br>Operational since 27 April 2024 |

Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau adalah proyek KPBU kedua di sektor Jalan Non-tol di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) jalan yang akan dipreservasi di Jalintim Riau dengan total seluruhnya mencapai 43 kilometer, yaitu Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)-Batas Kabupaten Pelalawan, Jalan Batas Pelalawan-Sikijang Mati, dan Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago. Selain itu, dilakukan perbaikan 4 unit jembatan sepanjang 60 meter di Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago serta pembangunan 1 unit fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek dilakukan pada 12 April 2021.

The Eastern Sumatra National Road Preservation Project in Riau Province is the second PPP project in Indonesia's non-toll road sector. A total of 3 (three) road sections will be preserved under the Jalintim Riau project, with a combined length of 43 kilometers, namely the Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)–Pelalawan Regency Border road, the Pelalawan Border–Sikijang Mati road, and the Sikijang Mati–Simpang Lago road. In addition, the project includes the rehabilitation of four bridges with a total length of 60 meters on the Sikijang Mati–Simpang Lago section, as well as the construction of one Weigh Station (UPPKB) facility. The signing of the Project Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement took place on 12 April 2021.



## Proyek Jembatan *Callender Hamilton*
### Callender Hamilton Bridge Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur<br>Banten, West Java, Central Java and East Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp2,20 triliun<br>Rp2.20 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum<br>Directorate General of Highways, Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Baja Titian Utama |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi sejak 20 Desember 2023<br>Operating since 20 December 2023 |

Proyek Jembatan *Callender Hamilton* (CH) merupakan proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa dengan lingkup penggantian 33 unit jembatan dengan panjang eksisting 2.452,9 meter untuk koridor Jalan Nasional; duplikasi tanpa penggantian jembatan terhadap 4 unit jembatan dengan panjang eksisting 430 meter; duplikasi dengan penggantian jembatan terhadap 1 unit jembatan dengan panjang eksisting 50 meter; serta pengoperasian dan pemeliharaan untuk seluruh jembatan. Pada 6 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk proyek ini.

The Callender Hamilton (CH) Bridge Project involves the replacement and/or duplication of CH bridges on the island of Java. The scope includes the replacement of 33 bridge units with a total existing length of 2,452.9 meters along the National Road corridor; duplication without replacement for 4 bridge units with a total existing length of 430 meters; duplication with replacement for 1 bridge unit with a total existing length of 50 meters; as well as the operation and maintenance of all bridges. On 6 December 2021, the Project Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement for this project were signed.



## Proyek Jalan Tol Akses Patimban
### Patimban Access Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat<br>West Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp5,03 triliun<br>Rp5.03 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jasamarga Akses Patimban |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Construction |

Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Perpres No. 109 Tahun 2020, Jalan Tol Akses Patimban akan mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah di sekitarnya. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023.

Designated as a National Strategic Project through Presidential Regulation No. 109 of 2020, the Patimban Access Toll Road will support Patimban Port and the development of its surrounding areas. The signing of the Project Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement was carried out on 24 January 2023.

Jalan Tol ini direncanakan akan memiliki panjang 37,05 km, dengan porsi BUP sepanjang 14,11 km dan dukungan konstruksi dari Pemerintah sepanjang 22,94 km. Adapun nilai investasi proyek yang menjadi porsi BUJT adalah sebesar Rp5,03 triliun dengan masa konsesi 50 tahun.

The toll road is planned to have a total length of 37.05 km, with a BUP portion of 14.11 km and a government-supported construction portion of 22.94 km. The investment value for the BUJT portion amounts to Rp5.02 trillion, with a concession period of 50 years.



## Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) *Elevated* Cikunir Ulujami
### Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir–Ulujami Toll Road

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat<br>DKI Jakarta and West Java Provinces |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp21,25 triliun<br>Rp21.25 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Jakarta Metro Expressway |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Pra-Konstruksi<br>Pre-Construction |

Proyek jalan tol ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, mengurangi kemacetan, dan waktu tempuh pada jalan tol JORR-1 serta meningkatkan tingkat pelayanan jalan, menyediakan rute alternatif, dan memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Jabodetabek dengan trase sepanjang 21,5 km yang akan dibangun di atas ruas tol JORR eksisting.

Nilai investasi proyek adalah sebesar Rp21,25 triliun dengan masa konsesi 45 tahun. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan pada 11 Oktober 2023, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres ditandatangani pada 17 Oktober 2023.

This toll road project is intended to increase capacity, reduce congestion, and shorten travel time on the JORR-1 toll road, as well as to improve the level of service, provide alternative routes, and strengthen the toll road network in the Greater Jakarta (Jabodetabek) area. The toll road will form part of the Jabodetabek toll road network, with a 21.5 km alignment to be constructed above the existing JORR toll road.

The project has an investment value of Rp21.27 trillion with a concession period of 45 years. The Project Cooperation Agreement was signed on 11 October 2023, while the Guarantee Agreement and Recourse Agreement were signed on 17 October 2023.



## Proyek Jalan Tol Kediri - Tulungagung
## Kediri-Tulungagung Toll Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Timur<br>East Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp9,92 triliun<br>Rp9.92 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum<br>Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Surya Sapta Agung Tol |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Construction |

Jalan Tol Kediri-Tulungagung merupakan proyek KPBU yang direncanakan sebagai bagian dari sistem Jalan Tol Trans Jawa dan menjadi akses menuju Bandara Kediri yang juga telah selesai dibangun oleh PT Gudang Garam yang merupakan pemegang saham PT Surya Sapta Agung Tol. Adapun Proyek sepanjang 44,17 km ini direncanakan melintasi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung, di mana dibangunnya ruas tol Kediri-Tulungagung ini berada di bawah program percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Perpres 80 tahun 2019. Selain akan menjadi jalan penghubung dari dan ke Bandara Kediri, ruas jalan tol ini juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jawa Timur bagian selatan dan mendukung perekonomian kawasan di sekitarnya, termasuk sektor pariwisata. Nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp9,92 triliun.

The Kediri–Tulungagung Toll Road is a PPP project planned as part of the Trans-Java Toll Road system and will serve as an access route to Kediri Airport, which has also been completed by PT Gudang Garam, the shareholder of PT Surya Sapta Agung Tol. The 44.17 km project is planned to pass through Kediri City, Kediri Regency, and Tulungagung Regency. The development of the Kediri–Tulungagung toll road is part of the accelerated economic development program for East Java Province as stipulated under Presidential Regulation No. 80 of 2019. In addition to serving as a connecting road to and from Kediri Airport, this toll road aims to improve public access to the southern part of East Java and support the economic growth of surrounding areas, including the tourism sector. The investment value of this toll road amounts to Rp9.92 trillion.



## Proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena
### Trans Papua Road Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Papua Pegunungan<br>Papua Pegunungan Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp3,34 triliun<br>Rp3.34 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum<br>Directorate General of Highways, Ministry of Public Works |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Hutama Mambelim Trans Papua |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Construction |

Proyek KPBU Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena segmen Mamberamo–Elelim ini merupakan proyek pembangunan jalan sepanjang ±50,14 km di Provinsi Papua Pegunungan, melalui skema KPBU dengan lingkup pekerjaan *design, build, finance, operate, maintenance, and transfer* (DBFOMT) yang dikelola oleh Dirjen Bina Marga selaku PJPK bersama dengan PT Hutama Mambelim Trans Papua sebagai BUP. Total nilai investasi mencapai Rp3,34 triliun termasuk biaya konstruksi Rp2,69 triliun dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Sama sepanjang 15 tahun 4 bulan. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres dilaksanakan pada 3 Juli 2024.

The Jayapura–Wamena Trans Papua Road PPP Project, specifically the Mamberamo–Elelim segment, involves the construction of ±50.14 km road in Papua Pegunungan Province under a PPP scheme with a scope covering design, build, finance, operate, maintenance, and transfer (DBFOMT), managed by the Directorate General of Highways as the GCA in cooperation with PT Hutama Mambelim Trans Papua as the BUP. The total investment value amounts to Rp3.34 trillion, including construction costs of Rp2.69 trillion, with a Cooperation Agreement period of 15 years and 4 months. The signing of the Project Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement took place on 3 July 2024.

## Proyek Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I)
## Panorama I Flyover Development (Sitinjau Lauik I) Project



| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan<br>West Sumatra Province, Padang City, Lubuk Kilangan Subdstrict |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp2,79 triliun<br>Rp2.79 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Menteri PU selaku PJPK mendelegasikan wewenangnya kepada:<br>- Dirjen Bina Marga mewakili Menteri PU pada Proyek sampai dengan berakhirnya perjanjian KPBU<br>- Dirjen Pembiayaan Infrastruktur untuk melakukan kegiatan proses penyiapan, transaksi, pemantauan dan evaluasi terkait pembiayaan Proyek<br><br>The Minister of Public Works, acting as the GCA, delegates authority to:<br>• The Director General of Highways, representing the Minister of Public Works for the Project until the end of the PPP Agreement period<br>• The Director General of Infrastructure Financing, to carry out activities related to project preparation, transaction, monitoring, and evaluation in relation to project financing |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL) |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Konstruksi<br>Konstruksi |

Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) merupakan proyek pembangunan jalan layang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang tepatnya Kecamatan Lubuk Kilangan tepatnya di Kota Padang. Ruang lingkup pekerjaan proyek ini meliputi Pembiayaan seluruh kegiatan untuk menyediakan layanan (FO beroperasi), Pendanaan pengadaan tanah, Perencanaan Teknis Terperinci (RTT) jalan dan jembatan (FO) , Pembangunan Jalan dan Jembatan (FO), Pembangunan jalan kerja sebagaimana Basic Design, dan pengawasan terkait *Quality Assurance*, Preservasi jalan dan jembatan eksisting selama masa konstruksi, Preservasi jalan dan jembatan (FO) sesuai RTT selama masa layanan, dan Penyusunan dan perolehan perizinan yang menjadi kewajiban BUP. Dengan nilai investasi sebesar Rp2,79 triliun.

Pada tanggal 21 Maret 2025 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) selaku PJPK dengan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL).

The Panorama Flyover (Sitinjau Lauik I) PPP Project is a flyover construction project located in West Sumatra Province, in Padang City, specifically in Lubuk Kilangan Sub-dDistrict, Padang City. The scope of this project includes financing all activities to provide services (operational FO), land acquisition funding, detailed technical planning (RTT) for roads and bridges (FO), road and bridge construction (FO), construction of working roads according to the basic design, and supervision related to quality assurance, preservation of existing roads and bridges during construction, preservation of roads and bridges (FO) according to the RTT during the service period, and preparation and obtaining of permits required by the Regional Development Planning Agency (BUP). The investment value is Rp2.79 trillion.

On 21 March 2025, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing (currently the Ministry of Public Works) as the Contracting Agency (GCA) and PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL).



## Jalan Tol Bogor – Serpong (via Parung)
### Bogor–Serpong Toll Road (via Parung)

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat dan Banten<br>West Java and Banten Provinces |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp12,35 Triliun<br>Rp12.35 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Pekerjaan Umum - BPJT<br>Ministry of Public Works – BPJT |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Bogor Serpong Infra Selaras |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Pra-Konstruksi<br>Pra-Konstruksi |

Jalan Tol Bogor - Serpong merupakan proyek KPBU yang direncanakan sebagai bagian dari sistem Jalan Tol yang menghubungkan antara provinsi Jawa Barat dan Banten. Pembangunan proyek tol ini untuk meningkatkan efisiensi waktu tempuh antara Bogor dan Serpong, memperlancar konektivitas di wilayah Jabodetabek bagian Selatan dan sebagai alternatif jaringan jalan tol DKI Jakarta-Bogor selain jalan Tol Jagorawi. Pembangunan proyek Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung akan mengintegrasikan jaringan jalan tol Depok-Salabenda (Tol Desari), Salabenda-Bogor (Tol BORR), Salabenda-Dramaga (tersambung dengan Tol BOCIMI), dan Serpong Junction (Tol Serpong-Balaraja). Pembangunan proyek jalan tol Bogor-Serpong via Parung sepanjang 32,03 Km, dengan nilai investasi Rp12,35 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 3 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Pekerjaan Umum) dengan PT Bogor Serpong Infra Selaras, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Bogor Serpong Infra Selaras, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

Bogor-Serpong Toll Road is a public-private partnership (PPP) project planned as part of a toll road system connecting West Java and Banten. This toll road project aims to improve travel time between Bogor and Serpong, streamline connectivity in the southern Greater Jakarta area, and serve as an alternative to Jakarta-Bogor toll road network, in addition to Jagorawi Toll Road. Bogor-Serpong via Parung Toll Road will integrate Depok-Salabenda (Desari Toll Road), Salabenda-Bogor (BORR Toll Road), Salabenda-Dramaga (connected to the BOCIMI Toll Road), and Serpong Junction (Serpong-Balaraja Toll Road). Bogor-Serpong via Parung toll road project spans 32,027 kilometers and has an investment value of Rp12.35 trillion, with a guarantee period of up to 15 years after cash on delivery.

On 3 October 2025, a Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing (currently the Ministry of Public Works) and PT Bogor Serpong Infra Selaras, a Guarantee Agreement between IIGF and PT Bogor Serpong Infra Selaras, and a Regress Agreement between IIGF and GCA.

## Sektor Telekomunikasi
Telecommunications

Sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018. Proyek Palapa Ring adalah salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional dan merupakan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke-57 kota/kabupaten yang belum terlayani.

Dengan estimasi jangkauan wilayah sepanjang 12.229 km, proses pengadaan proyek dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

As stated in Presidential Decree No. 56 of 2018, the Palapa Ring Project is one of the National Strategic Infrastructure Projects and is the construction of a national fiber optic backbone network. The project is designed and implemented using the Submarine Cable Communication System and the Fiber Optic Communication System to 57 unserved cities/regencies.

With an estimated coverage of 12,229 km, the project procurement process was divided into three packages: the Western Package, the Central Package, and the Eastern Package. The project is targeted to deliver broadband network distribution with speeds of 10 Mbps in rural areas and 20 Mbps in urban areas.



### Proyek Palapa Ring Paket Barat
**Western Package Palapa Ring Project**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Sumatera, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat<br>Sumatra, Riau Islands, and West Kalimantan |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp1,23 triliun<br>Rp1.23 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Komunikasi dan Digital<br>Ministry of Communications and Digital Affairs |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Palapa Ring Barat |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 2 Maret 2018<br>Operating since 2 March 2018 |

Pada tanggal 29 Februari 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dan PT Palapa Ring Barat selaku BUP di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring Barat serta Perjanjian Regres antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dengan PT PII. Pada tanggal 10 November 2016, *financial close* proyek ini tercapai di mana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku lender menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada BUP dan kredit tersebut telah lunas pada Juli 2024.

On 29 February 2016, the Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Communication and Information Technology, acting as the GCA (now the Ministry of Communications and Digital Affairs), and PT Palapa Ring Barat as the BUP at the Ministry of Finance office. At the same time, a Guarantee Agreement between IIGF and PT Palapa Ring Barat, as well as a Recourse Agreement between the Ministry of Communication and Information Technology (now the Ministry of Communications and Digital Affairs) and IIGF, were also signed. On 10 November 2016, the project reached financial close, with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk acting as the lender providing a loan of Rp875 billion to the BUP and the loan was fully repaid in July 2024.



## Palapa Ring Paket Tengah
### Central Package Palapa Ring

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kalimantan Timur, Sulawesi dan Kepulauan Maluku<br>East Kalimantan, Sulawesi, Maluku Islands |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp1,09 triliun<br>Rp1.09 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Komunikasi dan Digital<br>Ministry of Communications and Digital Affairs |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Len Telekomunikasi Indonesia |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 21 Desember 2018<br>Operating since 21 December 2018 |

Pada tanggal 4 Maret 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek senilai Rp1,09 triliun dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia. Pada kesempatan yang sama, PT PII yang merupakan pelaksanaan *single window policy* penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah.

On 4 March 2016, the Cooperation Agreement for the project, valued at Rp1.1 trillion, was signed between the Ministry of Communication and Information Technology, acting as the GCA (now the Ministry of Communications and Digital Affairs), and PT Len Telekomunikasi Indonesia. On the same occasion, IIGF, as the implementer of the single window policy for the provision of government guarantees for infrastructure projects, also signed the Guarantee Agreement and the Recourse Agreement for the Central Package Palapa Ring project.



## Palapa Ring Paket Timur
### Eastern Package Palapa Ring

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua<br>East Nusa Tenggara, Maluku and Papua |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp5,09 triliun<br>Rp5.09 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Komunikasi dan Digital<br>Ministry of Communications and Digital Affairs |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Palapa Timur Telematika |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 29 Agustus 2019<br>Operating since 29 August 2019 |

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 (Perpres 56/2018), proyek ini merupakan Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya,

As stipulated in Presidential Regulation No. 56 of 2018 ("Perpres 56/2018"), this project is a National Strategic Infrastructure Project and is also categorized as a National

yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital). Setelah penandatanganan tersebut, dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Paket Timur dan juga penyerahan Surat Efektif Penjaminan oleh PT PII pada 29 Maret 2017.

Priority Project. On 29 September 2016, at the State Palace and witnessed by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, as well as the Coordinating Minister for Economic Affairs and the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Palapa Timur Telematika as the BUP, and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA (now the Ministry of Communications and Digital Affairs), were signed. Following the signing, the Eastern Package Palapa Ring Project reached financial close, and the Guarantee Effectiveness Letter was issued by IIGF on 29 March 2017.



## Satelit Multifungsi Pemerintah
### Government's Multifunction Satellite

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia<br>Nationwide across the Republic of Indonesia |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp6,42 triliun<br>Rp6.42 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Komunikasi dan Digital<br>Ministry of Communications and Digital Affairs |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Satelit Nusantara Tiga |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 2 Januari 2024<br>Operational since 2 January 2024 |

Satelit Multi Fungsi merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur.

Pada tanggal 3 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dan PT Satelit Nusantara Tiga selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Satelit Nusantara Tiga serta Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

The Multifunction Satellite is the fourth PPP project in the telecommunications sector to receive government guarantees through IIGF, following the Western, Central, and Eastern Packages Palapa Ring projects.

On 3 May 2019, the Ministry of Communication and Information Technology, as the Contracting Agency (now the Ministry of Communications and Digital Affairs), and PT Satelit Nusantara Tiga, as the BUP, signed the Government Multifunction Satellite Project Cooperation Agreement. At the same time, a Guarantee Agreement between IIGF and PT Satelit Nusantara Tiga, as well as a Recourse Agreement between the Contracting Agency and IIGF, were also signed.

Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas, di antaranya untuk sektor pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan keamanan, pemerintah daerah, juga khususnya sektor keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), dalam rangka mengakselerasi realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

This project is expected to provide benefits to the wider community, including in the sectors of education, healthcare, politics, law and security, and local governments. It is also particularly aimed at supporting the financial sector by accelerating the digitalization of ultra-micro (UMi) financing distribution, in order to advance financial inclusion across Indonesia.

## Sektor Ketenagalistrikan
Electricity



### PLTU Jawa Tengah
**Central Java Power Plant**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah<br>Batang Regency, Central Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp68,59 triliun<br>Rp68.59 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | PT PLN (Persero) |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Bhimasena Power Indonesia |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasi sejak 31 Agustus 2022<br>Operational since 31 August 2022 |

PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. Proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat. Proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW ini berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan nilai investasi sebesar US$4 miliar atau lebih dari Rp40 triliun tersebut, proyek dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dengan skema *Build Own Operate Transfer* selama masa konsesi 25 tahun.

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT BPI selaku BUP serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Pada bulan Juni 2016, *Financial Close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara.

The Central Java Coal-Fired Power Plant (PLTU Jawa Tengah) is the first PPP infrastructure project successfully implemented with joint guarantee facilities from IIGF and the Government of the Republic of Indonesia (Ministry of Finance) in accordance with Presidential Regulation No. 78/2010. This project represents the Government's effort to meet the electricity needs of the community. This coal-fired power plant, with a capacity of 2 x 1,000 MW, is located in Batang Regency, Central Java. With an investment value of USD4 billion or more than Rp40 trillion, the project was developed by a consortium under PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) using a Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) scheme over a 25-year concession period.

On 6 October 2011, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT BPI as the Project Company (BUP), as well as a Recourse Agreement with PT PLN (Persero) as the GCA. In June 2016, the project reached Financial Close at the State Palace.



## Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun
## Street Lighting Equipment (APJ) in Madiun Regency

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kabupaten Madiun<br>Madiun Regency |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp101 miliar<br>Rp101 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Pemerintah Kabupaten Madiun<br>Madiun Regency Government |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Tri Tunggal Madiun Terang |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Operasional sejak 18 Juli 2023<br>Operational since 18 July 2023 |

Proyek APJ di Kabupaten Madiun ("Proyek") merupakan pembangunan infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha ("KPBU")/*Public-Private Partnership* ("PPP"). Ruang lingkup Proyek meliputi pembangunan baru (tanpa *retrofit*), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar antara lain 1.604 titik di jalan Nasional (arteri), 5.603 titik di jalan Kabupaten (lokal) dan 252 titik di jalan perkotaan (lingkungan). Nilai investasi Proyek sebesar Rp101 miliar dengan masa konstruksi selama 9 bulan dan periode kerja sama sampai dengan 10 tahun sejak tanggal operasi komersial.

Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Hal ini diharapkan dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan PT PII kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung *green infrastructure*, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

The APJ Project in Madiun Regency ("the Project") involves the development of street lighting infrastructure implemented under a Public-Private Partnership (PPP) scheme. The scope of the Project includes new construction (without retrofit), as well as the operation and maintenance of 7,459 lighting points. These are distributed across 1,604 points on national roads (arterial), 5,603 points on regency roads (local), and 252 points on urban roads (neighborhood). The Project has an investment value of Rp100,650,782,338, with a construction period of 9 months and a cooperation period of up to 10 years from the commercial operation date.

This Project demonstrates IIGF's commitment to supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia across various project scales. It is expected to encourage the implementation of more infrastructure projects under the PPP scheme. In addition, IIGF's support for this Project reflects its commitment to energy-saving initiatives in support of green infrastructure, while also delivering significant benefits to the community, particularly in Madiun Regency, East Java.



## Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat
**Public Street Lighting in West Lombok Regency**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kabupaten Lombok Barat<br>West Lombok Regency |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp94,99 miliar<br>Rp94.99 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat<br>West Lombok Regency Government |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Sinar Energi Indonusa |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Pra-Konstruksi<br>Pre-Construction |

Proyek Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lombok Barat ("Proyek") merupakan Proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU di 200 ruas jalan sepanjang 545,1 km dan tersebar di 12.915 titik. Proyek ini memiliki nilai investasi Rp94,99 miliar dengan periode kerjasama 1 tahun konstruksi dan 10 tahun periode operasi komersial.

Proyek ini diharapkan mampu memberi manfaat dan mendorong peningkatan geliat aktivitas perekonomian masyarakat serta peningkatan minat investasi. Lebih lanjut, dengan dibangunnya Penerangan Jalan Umum akan sangat berdampak positif dari sisi keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

The Public Street Lighting Project in West Lombok Regency ("the Project") is an infrastructure project developed under a PPP scheme across 200 road segments, covering a total length of 545.1 km and distributed over 12,915 lighting points. The Project has an investment value of Rp94.99 billion, with a cooperation period consisting of 1 year of construction and 10 years of commercial operation.

The Project is expected to provide benefits by stimulating economic activity within the community and increasing investment interest. Furthermore, the development of public street lighting is anticipated to have a significant positive impact on security in the West Lombok Regency area.

## Sektor Air Minum
Drinking Water



## Proyek SPAM Umbulan-Jawa Timur
**Umbulan SPAM Project – East Java**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Timur<br>East Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp2,06 triliun<br>Rp2.06 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Gubernur Jawa Timur<br>Governor of East Java |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Meta Adhya Tirta Umbulan |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 31 Januari 2021<br>Operational since 31 January 2021 |

Untuk mengatasi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena kemampuannya untuk memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan sekitarnya.

In order to address the water crisis and meet the increasing needs of the community, the East Java Provincial Government sought solutions through the utilization of the Umbulan spring located in Umbulan Village, Winongan Subdistrict, Pasuruan Regency. The Umbulan spring was selected due to its capacity to produce 4,000 liters per second, capable of supplying clean water to approximately 1.8 million people across Surabaya City, Sidoarjo Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, Pasuruan City, and surrounding areas.

Proyek SPAM Umbulan dibangun dengan menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPK dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Nilai investasi Proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,06 triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp818 miliar dari Kementerian Keuangan. Pada 21 Juli 2016, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

The Umbulan Water Supply System (Umbulan SPAM) Project was developed under a PPP scheme between the East Java Provincial Government as the GCA and PT Meta Adhya Tirta Umbulan as the Project Company (BUP). The Project has an investment value of Rp2.06 trillion and received a Viability Gap Fund of Rp818 billion from the Ministry of Finance. On 21 July 2016, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan and a Recourse Agreement with the Governor of East Java for the Umbulan SPAM Project. This Project is the first water sector and regional project to receive a government guarantee through IIGF.



### Proyek SPAM Kota Bandar Lampung
### Bandar Lampung SPAM Project

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung<br>Bandar Lampung City, Lampung Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp750 miliar<br>Rp750 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung<br>Perumda Air Minum Way Rilau Bandar Lampung City |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Adhya Tirta Lampung |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 13 Agustus 2020<br>Operational since 13 August 2020 |

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. PDAM Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk Kota Bandar Lampung. Selain rendahnya tingkat pelayanan PDAM Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata. Nilai investasi SPAM Kota Bandar Lampung mencapai Rp750 miliar dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp258,8 miliar dari Kementerian Keuangan.

The Bandar Lampung Water Supply System (SPAM) Project was initiated to improve and expand the provision of drinking water in Bandar Lampung City. PDAM Way Rilau currently serves only around 20% of the city's total population. In addition to the low service coverage, the hilly topography of Bandar Lampung also poses challenges, resulting in uneven water distribution. The Project has an investment value of Rp750 billion and received a Viability Gap Fund of Rp258.8 billion from the Ministry of Finance.

Perjanjian Kerjasama antara PDAM Way Rilau selaku PJPK dan PT Adhya Tirta Lampung selaku BUP telah ditandatangani pada 14 Februari 2018. Pada kesempatan yang sama, PT PII juga telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. *Financial Close* Proyek telah tercapai pada 13 Agustus 2018 dan Proyek telah mulai beroperasi sejak 13 Agustus 2020.

The Cooperation Agreement between PDAM Way Rilau as the GCA and PT Adhya Tirta Lampung as the BUP was signed on 14 February 2018. On the same occasion, IIGF also signed the Guarantee Agreement and the Recourse Agreement. The Project reached Financial Close on 13 August 2018 and has been operational since 13 August 2020.




## SPAM Semarang Barat
### West Semarang SPAM

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah<br>Semarang City, Central Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp417 miliar<br>Rp417 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang<br>Perumda Air Minum Tirta Moedal Semarang City |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Air Semarang Barat |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 22 Mei 2021<br>Operational since 22 May 2021 |

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Perumda Air Minum Tirta Moedal selaku PJPK dengan PT Air Semarang Barat selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp417 miliar tanpa menggunakan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu (zona 1), sebagian Kecamatan Ngaliyan (zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5).

The West Semarang SPAM Project, with a capacity of 1,000 liters per second, was developed under a PPP scheme between Perumda Air Minum Tirta Moedal as the GCA and PT Air Semarang Barat as the Project Company (BUP). The Project has a total value of Rp417 billion and was implemented without Viability Gap Fund support from the Ministry of Finance. The service area of West Semarang SPAM is targeted to cover three subdistricts divided into 5 (five) service zones, namely Tugu Subdistrict (Zone 1), part of Ngaliyan Subdistrict (Zones 2 and 3), and West Semarang Subdistrict (Zones 4 and 5).

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang. PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Adapun *Financial Close* proyek ini dicapai pada tanggal 22 Mei 2019.

This Project aims to improve service performance and expand piped water connection coverage through the addition of approximately 37,000 household connections (SR), bringing the total number of connections served to around 71,500 by 2030. Many SRs are currently unserved due to limited funding and raw water resources available within Semarang City. On 23 November 2018, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the West Semarang SPAM Project. The Project reached Financial Close on 22 May 2019.



## SPAM Pekanbaru
### Pekanbaru SPAM

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kota Pekanbaru, Provinsi Riau<br>Pekanbaru City, Riau Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp499 miliar<br>Rp499 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Perumda Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru<br>Perumda Air Minum Tirta Siak Pekanbaru City |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT PP Tirta Madani |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | - Fase A – Operasi (30 September 2022).<br>- Fase B – Konstruksi.<br>- Phase A – Operational (30 September 2022)<br>- Phase B – Construction |

Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru berkapasitas 750 lpd dengan nilai investasi sebesar Rp499 miliar. Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek *Rehabilitate-Build-Operate-Transfer* (RBOT), di mana untuk Fase A telah beroperasi pada tanggal 30 September 2022 dan untuk Fase B sedang dalam tahap konstruksi.

Saat ini, Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru baru dapat melayani sekitar 9,3% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Proyek SPAM Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan Sambungan Langganan (SL) sebanyak ± 48.500 SL sehingga dengan pelanggan saat ini dapat mencapai kurang lebih 61.000 SL. Dengan demikian, Proyek SPAM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan jumlah pelanggan Perumdam Kota Pekanbaru hingga hampir 4 kali lipat dari kondisi SL saat ini.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Pekanbaru dilaksanakan secara bersamaan.

Pekanbaru SPAM Project involves the development and operation of a drinking water supply system with a capacity of 750 liters per second, with a total investment value of Rp499 billion. The Pekanbaru SPAM is implemented under a Rehabilitate-Build-Operate-Transfer (RBOT) scheme, where Phase A has been operational since 30 September 2022, while Phase B is currently under construction.

At present, Perumdam Tirta Siak Pekanbaru City is only able to serve approximately 9.3% of the city's population. The Project is expected to increase Customer Connections (SL) by approximately 48,500, bringing the total number of connections to around 61,000. As such, The Pekanbaru SPAM is projected to increase the number of customers of Perumdam Pekanbaru City by nearly four times compared to the current SL condition.

On 16 December 2020, the signing of the Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement for the Pekanbaru SPAM Project was carried out simultaneously.



## SPAM Regional Jatiluhur I
### Jatiluhur I Regional SPAM

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang<br>DKI Jakarta Province, Bekasi City, Bekasi Regency, and Karawang Regency |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp1,67 triliun<br>Rp1.67 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Menteri Pekerjaan Umum, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya<br>Minister of Public Works, delegated to the Director General of Human Settlements |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 18 Desember 2024<br>Operational since 18 December 2024 |

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan proyek kerja sama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Menteri Pekerjaan Umum) dan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di mana area pelayanannya akan mencakup Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Proyek dengan kapasitas 4.750 liter/detik ditargetkan akan menyalurkan air minum ke-380.000 sambungan rumah.

Pada 19 Februari 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan untuk Proyek unsolicited ini telah mencapai *financial close* pada 1 April 2022 dan diberikan penjaminan oleh PT PII di mana durasi penjaminannya adalah 15 tahun sejak COD.

The Jatiluhur I Regional Water Supply System (SPAM) Project is a partnership between the Minister of Public Works and Housing (now the Minister of Public Works) and PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur. The service coverage includes DKI Jakarta Province, Bekasi City Government, Bekasi Regency Government, and Karawang Regency Government. With a capacity of 4,750 liters per second, the Project is targeted to supply drinking water to approximately 380,000 household connections.

On 19 February 2021, the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed. This unsolicited project reached Financial Close on 1 April 2022 and received a guarantee from IIGF, with a guarantee period of 15 years from the Commercial Operation Date (COD).



## SPAM Regional Karian Serpong
### Karian Serpong Regional SPAM

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan<br>DKI Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp2,43 triliun<br>Rp2.43 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Menteri Pekerjaan Umum, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya<br>Minister of Public Works, delegated to the Director General of Human Settlements |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Karian Water Services |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Pra-konstruksi<br>Pre-Construction |

Proyek SPAM Regional Karian Serpong merupakan proyek antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Menteri Pekerjaan Umum) dengan PT Karian Water Services yang mencakup area Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Proyek penyediaan air minum regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 liter/detik ini ditargetkan akan menyalurkan air minum ke 540.000 sambungan rumah.

Pada 29 April 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama dan Perjanjian Penjaminan, dan untuk Perjanjian Regres ditandatangani pada 30 April 2021. Proyek SPAM Karian Serpong merupakan proyek ke-6 di sektor air minum yang diberikan penjaminan dan memiliki durasi penjaminan selama 15 tahun sejak COD.

The Karian Serpong Regional Water Supply System (SPAM) Project is a partnership between the Minister of Public Works and Housing (now the Minister of Public Works) and PT Karian Water Services, covering the areas of DKI Jakarta Province, Tangerang City Government, and South Tangerang City Government. This regional water supply project, sourced from the Karian Dam, has a capacity of 4,600 liters per second and is targeted to supply drinking water to approximately 540,000 household connections.

On 29 April 2021, the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed, followed by the signing of the Recourse Agreement on 30 April 2021. The Karian Serpong SPAM Project is the sixth project in the water supply sector to receive a government guarantee, with a guarantee period of 15 years from the COD.

## Sektor Transportasi
Transportation



### Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar - Parepare
**Operation of Makassar – Parepare Public Railway Infrastructure**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Makassar – Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan<br>Makassar – Parepare, South Sulawesi Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp989 miliar<br>Rp989 billion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Perhubungan<br>Ministry of Transportation |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Celebes Railway Indonesia |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | - TOK 1 – Operasi (12 Oktober 2022)<br>- TOK 2 - Operasi (28 Desember 2023)<br>- TOK 3 – Konstruksi<br>- COD 1 – Operational (12 October 2022)<br>- COD 2 – Operational (28 December 2023)<br>- COD 3 – Construction |

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare merupakan proyek pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan RI. Proyek KPBU ini mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT) dengan nilai investasi sebesar Rp989 miliar, dengan masa kerja sama 16 tahun 3 bulan setelah Tanggal Operasi Komersial 1 (TOK1). Proyek dengan skema *Availability Payment* (AP) ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

The Makassar–Parepare Railway Project is the first transportation sector project under the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. This PPP project adopts a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme with an investment value of Rp989 billion and a cooperation period of 16 years and 3 months after Commercial Operation Date 1 (COD 1). Implemented under an Availability Payment (AP) scheme, the Project serves 5 (five) regencies/cities in South Sulawesi Province, namely Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City, and Parepare City.

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara PJPK dengan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) pada tanggal 5 April 2019. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT CRI, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

The Cooperation Agreement was signed between the GCA and PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) on 5 April 2019. At the same time, IIGF signed the Guarantee Agreement with PT CRI, and the Recourse Agreement was signed between the Contracting Agency and IIGF.



### Pengembangan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi

### Development of the Proving Ground for the Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification Center (BPLJSKB) in Bekasi

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat<br>West Java Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp1,98 triliun<br>Rp1.98 trillion |
| **PJPK**<br>GCA | : | Kementerian Perhubungan<br>Ministry of Transportation |
| **Badan Usaha**<br>Business Entity | : | PT Indonesia International Automotive Proving Ground |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | : | Beroperasi sejak 7 Agustus 2025<br>Operational since 7 August 2025 |

Pengembangan *Proving Ground* BPLJSKB di Bekasi merupakan proyek KPBU *Solicited* yang bertujuan sebagai tempat sertifikasi dan pengujian kendaraan yang mengadopsi standar United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) untuk peraturan kendaraan internasional yang terdiri dari trek kecepatan tinggi, pengujian rem, pengujian suara, pengujian sidelap dan fasilitas testing lainnya. Berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, proyek tersebut menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) dengan periode kerja sama selama 17 tahun 4 bulan yang terdiri dari 2 tahun 4 bulan masa konstruksi dan 15 tahun masa operasi serta bentuk kerja sama meliputi *Design - Built - Finance - Maintainance - Transfer* (DBFMT).

The development of the BPLJSKB Proving Ground in Bekasi is a solicited PPP project aimed at serving as a vehicle certification and testing facility that adopts the standards of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) for international vehicle regulations. The facility includes a high-speed track, braking tests, noise tests, sidelap tests, and other testing facilities. Located in Bekasi Regency, West Java, the project is implemented under an Availability Payment scheme with a cooperation period of 17 years and 4 months, consisting of 2 years and 4 months of construction and 15 years of operation. The form of cooperation covers Design-Build-Finance-Maintain-Transfer (DBFMT).

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perhubungan selaku PJPK dan PT *Indonesia International Automotive Proving Ground* (PT IIAPG) selaku BUP dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022. Di samping itu penandatanganan Perjanjian Penjaminan juga dilakukan antara PT IIAPG dan PT PII, serta Perjanjian Regres antara Kementerian Perhubungan dan PT PII. Tanggal Operasi Komersial Pengembangan *Proving Ground* BPLJSKB telah tercapai pada 7 Agustus 2025.

The Cooperation Agreement between the Ministry of Transportation as the GCA and PT Indonesia International Automotive Proving Ground (PT IIAPG) as the BUP was signed on 31 October 2022. In addition, the Guarantee Agreement was signed between PT IIAPG and IIGF, along with the Recourse Agreement between the Ministry of Transportation and IIGF. The Commercial Operation Date of the BPLJSKB Proving Ground Development was achieved on 7 August 2025.

# Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur - Non KPBU

Infrastructure Project Guarantee Portfolio – Non-PPP

## Sektor Pariwisata

Tourism




### Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

**Mandalika Special Economic Zone (SEZ)**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat<br>Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp4,87 triliun<br>Rp4.87trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD248,3 juta<br>USD248.3 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Infrastructure Investment Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Sebagai salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia, proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar yang berkelanjutan untuk pengembangan tujuan wisata baru di wilayah Mandalika, Lombok. Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nilai investasi untuk Proyek ini diperkirakan sebesar USD316,5juta (Rp4,5 triliun) dengan rencana pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD248,3 juta. Dengan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based destination*, pembangunan dan pengembangan proyek di atas lahan seluas 1.175 Ha ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas.

Pada tanggal 28 Desember 2018, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan ITDC, yang selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara AIIB dengan ITDC yang diikuti penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan AIIB.

As part of Indonesia's tourism development program, the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) Tourism Area Development Project aims to provide sustainable basic infrastructure to support the development of a new tourism destination in the Mandalika area, Central Lombok, West Nusa Tenggara (NTB).

The total investment value of the Project is estimated at USD316.5 million (Rp4.5 trillion), with planned financing from the Asian Infrastructure Investment Bank amounting to USD248.3 million. By adopting an eco-green and event-based destination concept, the development of this 1,175-hectare area includes the provision of basic infrastructure such as road networks, clean water supply systems, river normalization, wastewater treatment, solid waste management facilities, as well as electricity and gas networks and facilities.

On 28 December 2018, the Implementation Guarantee Agreement was signed between IIGF and ITDC. This was followed by the signing of the Loan Agreement between AIIB and ITDC on 31 December 2018, along with the signing of the Guarantee Agreement among the Ministry of Finance, IIGF, and AIIB.

## Sektor Ketenagalistrikan
Electricity



### *Hydropower Programme*

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kalimantan, Sulawesi, dan Papua<br>Kalimantan, Sulawesi, and Papua |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp7,09 triliun<br>Rp7.09 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | EUR294,7 juta<br>EUR294.7 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2027 dan bagian dari Program 35.000 MW Pemerintah, Hydropower Programme ini bertujuan di antaranya untuk:

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).
2. Menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat base load dan terutama pada saat beban puncak serta peningkatkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung oleh PT PLN (Persero) dari KfW Bank sebesar EUR294,7 juta untuk pembiayaan 6 (enam) sub proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pada tanggal 5 September 2019, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara KfW dengan PLN yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara ay/PT PII dengan PLN serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan KfW atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

As part of the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2019–2027 and the Government's 35,000 MW Program, the Hydropower Programme aims to:

1. Increasing the electrification ratio in Central and Eastern Indonesia through the development of Hydropower Plants (PLTA) and Mini Hydropower Power Plants (MHPP).

2. Reducing the Cost of Electricity Production (BPP) by decreasing reliance on fossil fuels, both during base load and especially during peak load periods, while also improving the Service Quality Level (TMP) for customers within the relevant systems.

This Project is financed through a direct loan scheme by PT PLN (Persero) from KfW Bank amounting to EUR294.7 million, to support six sub-projects located across Kalimantan, Sulawesi, and Papua.

On 5 September 2019, the Loan Agreement between KfW and PLN was signed, followed by the signing of the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and PLN, as well as the Guarantee Agreement among the Ministry of Finance, IIGF, and KfW for the direct loan guarantee.



## Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 dan Patuha 2

### Geothermal Power Plant (PLPT) Dieng 2 and Patuha 2

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Dieng dan Patuha<br>Dieng and Patuha |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp7,58 triliun<br>Rp7.58 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD335 juta<br>USD335 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT Geo Dipa Energi (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Development Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Proyek PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 termasuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya kebutuhan beban dasar/baseload di area Jawa. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), mengurangi emisi karbon, dan berkontribusi dalam program Pemerintah terkait penyedian listrik 35.000.

Pendanaan Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung dari dari Asian Development Bank (ADB) kepada GDE sebesar USD335 juta untuk membiayai pembangunan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing kapasitas sebesar 55 MW.

Pada tanggal 19 Agustus 2020, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ADB dengan GDE yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GDE serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

The Dieng 2 and Patuha 2 Geothermal Power Plant (PLTP) Projects are included in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2019–2028 and aim to increase new and renewable energy-based (NRE) power generation, particularly for baseload demand in the Java region. In addition, the projects support the achievement of the national renewable energy mix target of 23% by 2025 as outlined in the National Energy Policy (RUEN), reduce carbon emissions, and contribute to the Government's 35,000 MW electricity program.

The Projects are financed through a direct loan scheme from the Asian Development Bank (ADB) to GDE amounting to USD335 million, to support the development of PLTP Dieng Unit 2 and PLTP Patuha Unit 2, each with a capacity of 55 MW.

On 19 August 2020, the Loan Agreement between ADB and GDE was signed, followed by the signing of the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and GDE, as well as the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB for the direct loan guarantee.



## Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku - Papua dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)

### Development of Kalimantan and Maluku–Papua Distribution Network under Result-Based Lending (RBL-KMP) Scheme

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Kalimantan dan Maluku-Papua<br>Kalimantan and Maluku–Papua |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp34,12 triliun<br>Rp34.12 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD600 juta<br>USD600 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Development Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan Skema Result-Based Lending (RBL-KMP) yang berlokasi di Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan ditargetkan untuk menambah sambungan listrik untuk 6,7 juta pelanggan. Proyek ini merupakan bagian dari program jangka Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) PT PLN 2019-2028.

The Kalimantan and Maluku–Papua Distribution Network Development Project is an electricity infrastructure project implemented under a Result-Based Lending (RBL-KMP) scheme, located across Kalimantan, Maluku, and Papua and it is targeted to add electricity connections for 6.7 million customers. This project is a part of the long-term program outlined in PT PLN's Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2019–2028.

Keberadaan proyek ini nantinya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrisasi Nasional khususnya di Wilayah Timur Indonesia, meningkatkan kualitas hidup di Indonesia Timur melalui penggunaan listrik berkelanjutan serta mempromosikan tenaga surya dan penggunaan energi bersih.

The Project is expected to support the Government's efforts to increase the national electrification ratio, particularly in Eastern Indonesia, improve quality of life through sustainable electricity usage, and promote solar power and the use of clean energy.

Pada tanggal 8 Desember 2020, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ADB dengan PLN, yang selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN yang diikuti penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB.

On 8 December 2020, the Loan Agreement between ADB and PLN was signed. This was followed by the signing of the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and PLN on 16 December 2020, along with the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB.



## Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT)

### Development of Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Network under Result-Based Lending (RBL-SNT) Scheme

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Sulawesi dan Nusa Tenggara<br>Sulawesi and Nusa Tenggara |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp23,61 triliun<br>Rp23.61 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD255 juta<br>USD255 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Sudah beroperasi<br>Operational |

Berlokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Proyek RBL-SNT ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan menjalankan program penyedian listrik 433 desa di Wilayah Timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik sehingga pada akhirnya dapat mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100% pada tahun 2021. Dengan pembiayaan sebesar USD310 juta dari KFW kepada PLN, proyek ini ditargetkan dapat meningkatkan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan.

Selain itu, pembangunan proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sosial di wilayah Indonesia Timur; meningkatkan keandalan sistem, efisiensi sistem distribusi, dan pelayanan kelistrikan; serta memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Pada tanggal 16 Desember 2020, PT PII dan PLN menandatangani perjanjian dengan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) untuk proyek RBL-SNT yang meliputi penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII, dan KfW, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, KfW dan PLN telah menandatangani Perjanjian Pinjaman.

Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the RBL-SNT Project is one of the Government's initiatives to increase the electrification ratio by implementing a program to electrify 433 villages in Eastern Indonesia, particularly in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) areas. This is achieved through expanding electricity network access, ultimately supporting the target of a 100% national electrification ratio by 2021. With financing of USD310 million from KfW to PLN, the Project is expected to increase electricity connections to up to 7.7 million customers.

Furthermore, the development of this Project is expected to contribute to sustainable economic growth and social development in Eastern Indonesia; improve system reliability, distribution efficiency, and electricity services; and meet electricity demand in the Nusa Tenggara and Sulawesi regions.

On 16 December 2020, IIGF and PLN signed agreements with Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) for the RBL-SNT Project, including the signing of the Guarantee Agreement among the Ministry of Finance, IIGF, and KfW, as well as the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and PLN, which previously on 8 December 2020, KfW and PLN had signed the Loan Agreement.



## Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali

### Development of Distribution Network in East Java and Bali

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Jawa Timur dan Bali<br>East Java and Bali |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp19,48 triliun<br>:Rp19.48 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD310 juta<br>USD310 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Infrastructure Investment Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Sistem kelistrikan wilayah Jawa Timur dan Bali merupakan sistem yang terinterkoneksi dengan sistem Jawa-Bali untuk melayani kebutuhan listrik di Jawa Timur, Madura, dan Bali. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2019-2028, diperkirakan bahwa sampai dengan tahun 2024 akan ada penambahan pelanggan sekitar 713 ribu pelanggan dengan tambahan penjualan sebesar 13,9 TWh (TerraWatt hour). Dalam rangka mendukung tercapainya target tersebut, PT PLN perlu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi melalui penambahan jaringan ataupun *uprating trafo*.

The electricity system in East Java and Bali is interconnected with the Java–Bali system to serve electricity demand across East Java, Madura, and Bali. As outlined in PT PLN's Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2019–2028, it is projected that by 2024 there would be an additional 713 thousand customers, with increased electricity sales of 13.9 TWh (terawatt-hours). To support the achievement of these targets, PT PLN should improve and enhance the efficiency and reliability of the distribution system through network expansion and transformer uprating.

Dalam hal ini, komitmen Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung PT PLN dalam mengembangkan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali, direalisasikan melalui pendanaan senilai USD310 juta untuk pembiayaan non-material distribusi utama pada pembangunan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, trafo, dan sambungan pelanggan. Selain itu, Kementerian Keuangan dan PT PII juga turut serta memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan pada pinjaman dari AIIB tersebut. Pada tanggal 10 Februari 2021, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara AIIB dengan PT PLN, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan AIIB dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN.

In this regard, the Asian Infrastructure Investment Bank's (AIIB) commitment to support PT PLN in developing the distribution network in East Java and Bali is realized through financing of USD310 million, intended for non-material distribution components such as medium-voltage networks, low-voltage networks, transformers, and customer connections. In addition, the Ministry of Finance and IIGF also provide support in the form of guarantees for the loan from AIIB. On 10 February 2021, the Loan Agreement between AIIB and PT PLN was signed, along with the Guarantee Agreement among the Ministry of Finance, IIGF, and AIIB, and the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and PT PLN.



**Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (*Sustainable and Reliable Energy Access Program*/SREAP)**

**Development of Transmission and Distribution Networks in Western and Central Java (Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP)**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah<br>West Java and Central Java Provinces |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp45,56 triliun<br>Rp45.56 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD600 juta<br>USD600 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Development Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Dalam upaya mencapai target penjualan dan penambahan pelanggan, Regional Jawa Madura Bali telah merencanakan program investasi jangka menengah dan pendek melalui penambahan kapasitas aset distribusi. Selain untuk mencapai sasaran penjualan, program investasi lainnya juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional distribusi, di antaranya dengan penambahan jaringan tegangan menengah serta penambahan jumlah atau kapasitas transformator distribusi. PLN juga telah mempersiapkan beberapa program strategis untuk mendukung visi pemerintah untuk peningkatan energi terbarukan dengan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025, di antaranya dengan program konversi energi sisi pelanggan, khususnya pada penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik. Untuk itu, telah direncanakan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas charging station kendaraan listrik.

In an effort to achieve sales targets and increase the number of customers, the Java–Madura–Bali Regional has planned medium- and short-term investment programs through the expansion of distribution asset capacity. In addition to achieving sales targets, these investment programs are also aimed at improving the efficiency and reliability of distribution operations, including through the expansion of medium-voltage networks and the addition or upgrading of distribution transformers. PLN has also prepared several strategic programs to support the Government's vision of increasing renewable energy, targeting a 23% renewable energy mix by 2025. These include energy conversion programs on the consumer side, particularly in the use of household appliances and electric vehicles. To support this, the development of Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) has been planned in phases.

Pelaksanaan program tersebut melalui pendanaan pinjaman (loan) dari ADB sebesar USD600 juta. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan penjualan di Sub Regional JBB dan JBT, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas dan keandalan sistem transmisi dan distribusi yang tinggi. Pada tanggal 19 Mei 2022 PT PII dan PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Asian Development

The implementation of this program is financed through a loan from ADB amounting to USD600 million. With the execution of this program, it is expected to increase capacity and sales revenue in the Western Java and Central Java sub-regions, as well as enhance customer satisfaction through improved quality and reliability of transmission and distribution systems. On 19 May 2022, IIGF and PLN signed agreements with the Asian Development Bank (ADB),

Bank (ADB), yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PLN dengan ADB untuk pendanaan Proyek SREAP.

including the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and PLN. Prior to that, on 31 December 2021, the Loan Agreement between PLN and ADB for the SREAP Project had been signed.



## Pembangunan PLTU Timor-1 (2x50 MW)
## Development of Timor-1 Coal-Fired Power Plant (2x50 MW)

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Dusun Panaf, Desa Luifuleo, Kabupaten Kupang<br>Panaf Hamlet, Luifuleo Village, Kupang Regency |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp3,72 triliun<br>Rp3.72 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | Rp2,75 triliun<br>Rp2.75 trillion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat<br>Syndication of Bank Permata and Bank Muamalat |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

PLTU Timor-1 merupakan salah satu proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap yang sudah direncanakan di dalam Rencana Usulan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Saat ini kebutuhan sistem Timor (Kupang – Soe – Kefamenanu – Atambua) merupakan sistem yang paling besar di PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dapat terserap beban puncak 98,4 MW atau 42,46% dari jumlah daya terpasang sebesar 231,73 MW per tanggal 11 Februari 2021.

The Timor-1 Coal-Fired Power Plant (PLTU Timor-1) is one of the power generation development projects planned under the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021–2030. Currently, the needs of Timor system (Kupang – Soe – Kefamenanu – Atambua) is the largest system in the PLN East Nusa Tenggara (NTT) Main Unit which can absorb a peak load of 98.4 MW or 42.46% of the total installed power of 231.73 MW as of February 11, 2021.

Penambahan kapasitas daya di Provinsi NTT dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Untuk Pulau Timor yang merupakan sistem ketenagalistrikan terbesar di NTT, penambahan kapasitas daya listrik diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan yang relatif cukup tinggi. Penambahan kapasitas ini juga diperlukan mengingat akan berakhirnya sewa pembangkit *Leased Marine Vessel Power Plant* (LMVPP) berbahan bakar minyak dengan kapasitas 60 MW pada bulan Desember 2021. Pembangunan PLTU Timor-1 menjadi satu-satunya langkah untuk memenuhi target sistem kelistrikan aman (reserve margin > 30%) dalam jangka waktu yang dekat. Tanpa PLTU Timor-1, maka sistem akan berada pada status Siaga, (*reserve margin* <30%) dan meningkatnya risiko pemadaman jika terjadi gangguan atau pemeliharaan. Pembangkit listrik

The addition of power capacity in NTT Province is aimed at increasing the electrification ratio. For Timor Island, as the largest electricity system in NTT, additional capacity is required to anticipate relatively high demand growth. This capacity expansion is also necessary due to the expiration of the leased Marine Vessel Power Plant (LMVPP), a fuel oil-based power plant with a capacity of 60 MW, in December 2021. The development of PLTU Timor-1 is the only viable solution to achieve a secure electricity system (reserve margin >30%) in the near term. Without this project, the system would remain on alert status (reserve margin <30%) and increase the risk of power outages during disruptions or maintenance. Electricity generation in NTT is currently dominated by fuel oil, resulting in high production costs (BPP). PLTU Timor-1 will serve as a baseload power plant

di NTT didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan tingginya Biaya Pokok Produksi (BPP). PLTU Timor-1 menjadi pembangkit baseload dengan BPP rendah (indikasi BPP PLTU Timor-1 sebesar Rp1.228,51/kWh), sehingga berpotensi menurunkan BPP dan menjaga pasokan daya di Sistem Timor.

with a lower BPP (estimated at Rp1,228.51/kWh), thereby helping to reduce overall production costs and maintain reliable power supply in the Timor system.

Pada tanggal 28 Desember 2022, PT PII dan PLN menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN yang selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 telah diterbitkan Surat Jaminan Pemerintah atas Penjaminan Proyek PLTU Timor-1 oleh Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, PLN dan Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat telah menandatangani perjanjian pinjaman atas pendanaan Proyek PLTU Timor-1.

On 28 December 2022, IIGF and PLN signed the Implementation Guarantee Agreement, followed on 29 December 2022 by the issuance of the Government Guarantee Letter for the Timor-1 Project by the Director General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance. Prior to that, on 8 December 2022, PLN and the syndication of Bank Permata and Bank Muamalat had signed the Loan Agreement for the PLTU Timor-1 Project financing.



### Program Indonesia *Sustainable Least Cost Electrification* (ISLE)

**Indonesia Sustainable Least Cost Electrification (ISLE) Program**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Maluku dan Nusa Tenggara<br>Maluku and Nusa Tenggara |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp20,96 triliun<br>Rp20.96 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD562,5 juta<br>USD562.5 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | World Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Program ISLE memiliki tujuan untuk memungkinkan PLN mengembangkan dan melakukan uji coba bagi kerangka kerja elektrifikasi yang berkelanjutan dan terjangkau dengan mengurangi biaya pembangkitan, meningkatkan keandalan jaringan, dan memobilisasi investasi swasta di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lingkup program dari ISLE yaitu (i) Pembangunan BESS/PLTS; (ii) Pembangunan/upgrade SCADA; (iii) Pembangunan SUTT dan GI; (iv) Penambahan JTM, JTR, dan Gardu Distribusi; dan (v) Pekerjaan *Management Information System Single Source of Truth* (SsoT). Rencana pengembangan ini telah tertuang dalam Rencana Usulan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030.

The ISLE Program aims to enable PLN to develop and pilot a sustainable and least-cost electrification framework by reducing generation costs, improving network reliability, and mobilizing private investment across Maluku, North Maluku, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara. The program scope includes: (i) development of BESS/solar power plants (PLTS); (ii) development/upgrading of SCADA systems; (iii) construction of SUTT and GI; (iv) JTM, JTR networks, and distribution substations; and (v) development of a Management Information System Single Source of Truth (SSoT). This development plan is outlined in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021–2030.

Pelaksanaan program ISLE salah satunya melalui pendanaan pinjaman (*loan*) dari World Bank sebesar USD562,5 juta. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat memberikan serangkaian solusi kepada PLN untuk (i) mengurangi biaya pembangkitan di Kepulauan di Wilayah Timur dengan meningkatkan porsi pembangkit listrik terbarukan yang paling rendah biayanya; (ii) meningkatkan keandalan jaringan dengan mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menilai rugi-rugi kelistrikan dan kurangnya keandalan; dan (iii) mengurangi beban keuangan pada keuangan publik dengan memobilisasi investasi swasta.

The implementation of the ISLE Program is supported, among others, by a loan from the World Bank amounting to USD562.5 million. The program is expected to provide a range of solutions for PLN to: (i) reduce generation costs in island systems in Eastern Indonesia by increasing the share of least-cost renewable energy; (ii) improve network reliability by establishing clear guidelines for assessing electricity losses and reliability gaps; and (iii) reduce the financial burden on public finances by mobilizing private investment.

Pada tanggal 7 Mei 2024, PLN menandatangani Perjanjian Pinjaman antara World Bank dengan PLN, yang selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 dilakukan penandatanganan Perjanjian pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan World Bank pada tanggal 28 Mei 2024 atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

On 7 May 2024, PLN signed the Loan Agreement with the World Bank. This was followed by the signing of the Implementation Guarantee Agreement between IIGF and PLN on 13 May 2024, and subsequently the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and the World Bank on 28 May 2024 for the direct loan guarantee.



### Kelanjutan Pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 (PLTP Dieng-2)
### Continuation of Financing for Dieng Unit 2 Geothermal Power Plant Project (PLTP Dieng-2)

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Dieng, Jawa Tengah<br>Dieng, Central Java |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp2,59 triliun<br>Rp2.59 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD180 juta<br>USD180 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT GDE (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Development Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Per Des 2025 proses EPC dan pra-konstruksi<br>As of Dec 2025, EPC and pre-construction processes |

Saat ini PT GDE sedang melaksanakan penyelesaian Proyek PLTP Patuha-2 dan PLTP Dieng-2, dimana proyek tersebut mendapatkan pendanaan berupa pinjaman langsung dari ADB yang terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu pinjaman *Ordinary Capital Resources* (OCR) ADB senilai USD300 juta dan pinjaman senilai USD35 juta yang bersumber dari ADB *Clean Technology Fund* (CTF) dengan total pinjaman senilai USD335 juta.

Currently, PT GDE is carrying out the completion of the Patuha-2 Geothermal Power Plant (PLTP Patuha-2) and Dieng-2 Geothermal Power Plant (PLTP Dieng-2) projects, where these projects are financed through direct loans from the ADB, consisting of two sources, namely an ADB Ordinary Capital Resources (OCR) loan of USD300 million and a USD35 million loan from the ADB Clean Technology Fund (CTF), totaling USD335 million.

Terhadap pinjaman langsung tersebut PT GDE dan ADB telah menyepakati untuk mengubah alokasi penggunaan pinjaman berjalan tersebut untuk penyelesaian PLTP Patuha 2. Oleh karena adanya alokasi pinjaman tersebut, maka penyelesaian proyek PLTP Dieng-2 didukung oleh tambahan pinjaman ADB sebesar USD180 juta dengan rincian sebagai berikut:

For these direct loans, PT GDE and ADB have agreed to reallocate the ongoing loan usage to complete the PLTP Patuha-2 project. Due to this loan allocation, the completion of the PLTP Dieng-2 project is supported by an additional ADB loan of USD180 million, with the details as follows:

| No. | Kategori Penggunaan Dana<br>Category of Fund Use | Nilai (USD)<br>Amount (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan EPC- Pembangunan PLTP Dieng Unit 2 EPC Work – Construction of PLTP Dieng Unit 2 | 103.810.714 |
| 2 | *Interest and Commitment Charges** | 11.535.074 |
| 3 | Kontijensi Contingency | 64.654.212 |
| | **Total** | **180.000.000** |

*) Termasuk *interest* dan *commitment charges* dari *Loan* 3928-INO

*) Including interest and commitment charges from Loan 3928-INO



### Program *Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program* (AICET) ADB

### Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program (AICET) – ADB

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Seluruh Indonesia<br>Across Indonesia |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp19,64 triliun<br>Rp19.64 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD500 juta<br>USD500 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | Asian Development Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Program *Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase*-1 (AICET-1) bertujuan untuk mendukung PT PLN dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Lingkup program dari AICET yaitu (i) Pengembangan PLTS dan PLTB di seluruh Indonesia; (ii) Gardu Induk *Extension/Uprating* di Sumatera, Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi; (iii) *Upgrade Transmission Control Center* di Sumatera dan Sulawesi; dan (iv) *Maintenance Capex* Transmisi dan Distribusi di Sumatera, Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. RBL AICET merupakan bagian dari program pengembangan di RUPTL untuk mewujudkan komitmen Indonesia mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060.

The Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase-1 (AICET-1) Program aims to support PT PLN in increasing the capacity of Renewable Energy (RE) power plants. The program scope of AICET includes: (i) Development of solar PV (PLTS) and wind (PLTB) power plants across Indonesia; (ii) Extension/Uprating of substations in Sumatra, Java, Madura, Bali, and Sulawesi; (iii) Upgrade of Transmission Control Centers in Sumatra and Sulawesi; and (iv) Maintenance Capex for Transmission and Distribution in Sumatra, Java, Madura, Bali, and Sulawesi. The AICET RBL is part of the development program in the RUPTL to realize Indonesia's commitment to achieve Net Zero Emissions by 2060.

Pada tanggal 23 Desember 2025, PLN menandatangani Perjanjian Pinjaman antara Asian Development Bank (ADB) dengan PLN, yang selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB serta penandatanganan *Supplemental Letter* antara Kementerian Keuangan, PT PII dan ADB pada tanggal 31 Desember 2025 atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

On 23 December 2025, PLN signed a Loan Agreement with the Asian Development Bank (ADB), followed by the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN on 31 December 2025, which was then followed by the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, as well as signing of a Supplemental Letter between the Ministry of Finance, IIGF, and ADB on 31 December 2025 regarding the guarantee of the direct loan.



### Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification Phase* 2 (ISLE-2)

**Indonesia Sustainable Least-cost Electrification Phase 2 (ISLE-2) Program**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Wilayah Kalimantan dan Sumatera<br>Kalimantan and Sumatra regions |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp12,98 triliun<br>Rp12.98 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD600 juta<br>USD600 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | World Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification*-2 (ISLE-2) merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Indonesia dan PT PLN untuk mendukung transisi energi nasional menuju energi bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Program ini dirancang sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, ISLE-1. Program ISLE-2 bertujuan untuk mendukung PT PLN dalam meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT), khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang merupakan dua regional dengan potensi besar untuk pengembangan EBT. Ruang lingkup Program meliputi (i) Pengembangan PLTS; (ii) Pengembangan PLTB; (iii) Pengembangan *battery storage equipment*; (iv) Pembangunan transmisi dan gardu induk (GI) 150kV; (v) *Upgrade transmission control center*; dan (vi) Penambahan pelanggan.

The Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) Program is part of the strategic efforts by the Government of Indonesia and PT PLN to support the national energy transition toward clean, sustainable, and low-emission energy. This program is designed as a continuation of the previous program, ISLE-1. ISLE-2 aims to support PT PLN in increasing the capacity of new and renewable energy (NRE) power plants, particularly in Sumatra and Kalimantan, which are two regions with significant potential for NRE development. The program scope includes: (i) Development of solar PV (PLTS); (ii) Development of wind power plants (PLTB); (iii) Development of battery storage equipment; (iv) Construction of transmission lines and 150kV substations (GI); (v) Upgrade of transmission control centers; and (vi) Addition of new customers.

Pada tanggal 31 Desember 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman PLN antara World Bank dengan PLN, yang selanjutnya dilakukan

On 31 December 2025, the PLN Loan Agreement between the World Bank and PLN was signed, followed by the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF

penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan World Bank pada tanggal atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

and PLN, and subsequently followed by the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and the World Bank regarding the guarantee of the direct loan.



## Program Indonesia - *Electricity Network Transformation* (I-ENET)

### Indonesia - Electricity Network Transformation (I-ENET) Program

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Wilayah Jawa, Madura dan Bali<br>Java, Madura, and Bali regions |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp103,34 triliun<br>Rp103,34 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD500 juta<br>USD500 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT PLN (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | World Bank |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Konstruksi<br>Construction |

Program Indonesia *Electricity Network Transformation* (I-ENET) merupakan bagian dari upaya PT PLN untuk meningkatkan penyediaan dan keandalan pasokan listrik serta mengintegrasikan sumber daya energi terbarukan di Jawa, Madura dan Bali, yang merupakan bagian dari program pengembangan dalam RUPTL 2025-2036. Ruang lingkup Program meliputi (i) Pengembangan Jaringan Distribusi; (ii) Pengembangan SPKLU; (iii) Pembangunan/*upgrade* SCADA Dsitribusi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman PLN antara World Bank dengan PLN, yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan World Bank pada tanggal atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

The Indonesia Electricity Network Transformation Program (I-ENET) is part of PT PLN's efforts to improve electricity supply and reliability, as well as to integrate renewable energy resources in Java, Madura, and Bali. This program is part of the development initiatives outlined in the 2025–2036 RUPTL. The program scope includes: (i) Development of Distribution Networks; (ii) Development of EV Charging Stations (SPKLU); (iii) Construction/Upgrade of Distribution SCADA systems.

On 31 December 2025, the PLN Loan Agreement between the World Bank and PLN was signed, followed by the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN, and subsequently the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and the World Bank regarding the guarantee of the direct loan.

## Sektor Transportasi
Transportation



### Pembiayaan tambahan untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
**Financing of Cost Overrun for Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project**

| | | |
|---|---|---|
| **Lokasi**<br>Location | : | Jakarta dan Bandung<br>Jakarta and Bandung |
| **Nilai Proyek**<br>Project Value | : | Rp11,69 triliun<br>Rp11,69 trillion |
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | USD542,7 juta<br>USD542.7 million |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT KAI (Persero) |
| **Kreditur/Penerima Jaminan**<br>Creditor/Guarantee Recipient | : | China Development Bank (CDB) |
| **Tahapan Proyek**<br>Project Phase | | Sudah beroperasi<br>Operational |

Kereta Cepat Jakarta dan Bandung (KCJB)/Whoosh resmi beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2023. Kehadiran KCJB menjadi salah satu infrastruktur strategis nasional yang berperan dalam meningkatkan konektivitas antar kota dan antar kawasan demi pertumbuhan ekonomi wilaya dan nasional, serta mendorong efisensi mobilitas masyarakat.

Berdasarkan Perpres No. 93 Tahun 2021, Pemerintah telah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") sebagai pimpinan konsorsium BUMN Indonesia, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PT PSBI") dalam percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB. Dalam pelaksanaanya, proyek menghadapi sejumlah tantangan, anatara lain terkait proses pembebasan lahan serta dampak dari pandemi COVID-19 yang berkontribusi terhadap penyesuaian jadwal penyelesaian proyek dari rencana awal di tahun 2022 menjadi tahun 2023.

Sejalan dengan dinamika pelaksanaan tersebut, terdapat peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk memastikan penyelesaian proyek secara optimal. Atas hal tersebut, Pemerintah memberikan dukungan melalui pemberian Penjaminan Pemerintah atas pinjaman dari China Development Bank (CDB) kepada PT KAI.

The Jakarta-Bandung High-Speed Rail (KCJB)/Whoosh officially began operations on 2 October 2023. KCJB serves as a solution to ease the dense transportation flow between Jakarta and Bandung and enhances connectivity between cities and regions to support regional and national economic growth.

Based on Presidential Regulation No. 93 of 2021, the Government assigned PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") as the leader of the Indonesian SOE consortium for the joint venture PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) in the acceleration of KCJB infrastructure development. Due to land acquisition challenges and the impacts of the COVID-19 pandemic, the KCJB project experienced delays, shifting its planned operation from 2022 to 2023.

In line with these dynamics, there was an increasing need for financing to ensure optimal project completion. As such, the government provided support through a Government Guarantee for a loan from China Development Bank (CDB) to PT KAI.

Pada tanggal 29 Desember 2023, CDB dan PT KAI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman. Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 2024, PT PII dan PT KAI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan, ynag selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan CDB.

On 29 December 2023, CDB and PT KAI signed a Loan Agreement. Subsequently, on 22 January 2024, IIGF and PT KAI signed a Guarantee Implementation Agreement. The Guarantee Agreement was then signed by the Ministry of Finance, IIGF, and CDB on 25 January 2024.

## Penjaminan Korporasi Padat Karya
Labor Intensive Corporate Guarantee

### Kegiatan Penjaminan Korporasi Padat karya
Labor Intensive Corporate Guarantee Activities

Pada tahun 2020, PT PII sebagai salah satu SMV di bawah Kementerian Keuangan memperoleh perluasan mandat untuk meningkatkan kontribusi dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya melalui skema penjaminan bagi pelaku usaha korporasi (PEN Korporasi), yang juga dikenal sebagai korporasi padat karya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

In 2020, IIGF, as one of the SMVs under the Ministry of Finance, received an expanded mandate to increase its contribution to the implementation of National Economic Recovery Program (PEN), specifically through a guarantee scheme for corporate business actors (PEN Korporasi), also known as labor-intensive corporations. This policy is part of the government's efforts to address the impact of the COVID-19 pandemic on the national economy and public welfare.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 27/2022, pelaksanaan program PEN Korporasi yang dimulai pada September 2020 hingga berakhirnya masa program pada Desember 2025 telah menghasilkan penerbitan penjaminan kepada pelaku usaha korporasi sebanyak 78 sertifikat penjaminan untuk PEN Korporasi Generasi I dengan total nilai penjaminan sebesar Rp5,86 triliun, serta 8 sertifikat penjaminan untuk PEN Korporasi Generasi II dengan total nilai penjaminan sebesar Rp2,15 triliun. Selain itu, dalam skema penjaminan bersama antara LPEI dan PT PII, telah diterbitkan sebanyak 22 sertifikat penjaminan dengan porsi nilai penjaminan PT PII sebesar Rp1,56 triliun.

In accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 98/2020, as most recently amended by PMK Number 27/2022, the implementation of PEN Corporate program, which began in September 2020 and concluded in December 2025, had resulted in the issuance of 78 guarantee certificates for Generation I Corporate PEN, with a total guarantee value of Rp5.86 trillion, and 8 guarantee certificates for Generation II Corporate PEN, with a total guarantee value of Rp2.15 trillion. Furthermore, under the joint guarantee scheme between LPEI and IIGF, 22 guarantee certificates were issued, with a guarantee value of Rp1.56 trillion for IIGF.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat permohonan klaim atas penjaminan PEN Korporasi yang diajukan kepada PT PII, sehingga tidak terdapat eksposur penjaminan PEN Korporasi yang tersisa pada PT PII.

Until 31 December 2025, no claims for the Corporate PEN guarantee were submitted to IIGF, resulting in no remaining exposure to the Corporate PEN guarantee at IIGF.

## Penjaminan BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Cadangan Pangan Pemerintah

SOE Guarantees in the Implementation of the National Economic Recovery Program and Government Food Reserves

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional.

The National Economic Recovery Program (PEN) aims to protect, maintain, and enhance the economic capacity of business actors in both the real and financial sectors in running their businesses. This program was launched by the Government to support state financial policies in safeguarding the national economy.

PEN dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah di mana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

PEN is implemented through State Equity Participation (PMN), placement of government funds and/or investments, and/or guarantee activities under schemes determined by the Government. In practice, the guarantee schemes can be executed directly by the Government and/or through one or more designated guarantee agencies.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 ("PP 23/2020") tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagai langkah inisiasi penerapan program PEN. Berdasarkan Pasal 17 PP 23/2020 tersebut, Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan, yang mana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka penjaminan langsung oleh Pemerintah. Menyusul penerbitan PMK No. 98/PMK.08/2020 mengenai Penjaminan Korporasi Padat Karya, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 22 Desember 2020. Sesuai dengan mandat dari Kementerian Keuangan, PT PII dapat berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN.

On 11 May 2020, the Government issued Government Regulation No. 23 of 2020 (PP 23/2020) regarding the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policies in Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats Endangering the National Economy and/or Financial System Stability as well as National Economic Rescue, as the initial step for implementing the PEN program. Based on Article 17 of PP 23/2020, the Government may assign guarantee agencies, executed through a Minister of Finance Decree, as part of direct Government Guarantees. Following the issuance of Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 on the Labor-Intensive Corporate Guarantee, the Minister of Finance also issued PMK No. 211/PMK.08/2020 on Procedures for Providing Government Guarantees for State-Owned Enterprises (SOEs) in the Implementation of the National Economic Recovery Program, dated 22 December 2020. Under the mandate from the Ministry of Finance, IIGF can collaborate with the Ministry of Finance to provide Government Guarantees to SOEs affected by the COVID-19 pandemic and/or receive assignments under the PEN program.

PT PII selain berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT PII juga mendapat perluasan mandat untuk dapat melaksanakan Jaminan Pemerintah bersama Kementerian Keuangan kepada BUMN Pangan

In addition to participating in the National Economic Recovery Program (PEN), IIGF has also received an expanded mandate to implement Government Guarantees together with the Ministry of Finance for Food SOEs in

dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut diatur dalam PMK 34/2024 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, PT PII telah menandatangani di antaranya 8 proyek terkait PEN dan 1 proyek terkait cadangan pangan pemerintah.

the Implementation of the Government Food Reserves Program. The provision of these Government Guarantees is regulated under PMK 34/2024 on Procedures for Providing Government Guarantees in the Implementation of Government Food Reserves. As of 31 December 2025, IIGF has signed agreements for 9 projects related to SOE guarantees under the PEN program and the Government Food Reserves program, with 7 projects still under guarantee.

## Portofolio Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN

Portfolio of SOE Guarantee in the Implementation of the PEN Program

### Penjaminan Obligasi III PT Waskita Karya (Persero)

Guarantee of the Bonds III of PT Waskita Karya (Persero)



**Informasi Penjaminan**

**Guarantee Information**

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Obligasi**<br>Bond Value | : | Rp1,77 triliun<br>Rp1,77 trillion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT KAI (Persero) |
| **Wali Amanat**<br>Trustee | : | PT Bank Mega Tbk |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : | 5 dan 7 tahun<br>5 and 7 years |

Kinerja operasional dan likuiditas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemic COVID-19 yang berkepanjangan. Kondisi ini berdampak terhadap profil risiko kredit Waskita yang semakin meningkat sehingga berakibat pada penurunan kredit oleh lembaga pemeringkat. Pada akhirnya pihak perbankan secara bertahap mengurangi dukungan pendanaan kepada Waskita.

The operational performance and liquidity of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") declined as a result of the prolonged COVID-19 pandemic. This situation increased Waskita's credit risk profile, resulting in a downgrade by rating agencies. Consequently, banks gradually reduced their funding support to Waskita.

Oleh karena itu, Waskita berencana menerbitkan obligasi dalam rangka *refinancing* dan pemenuhan kebutuhan modal kerja. Agar rencana tersebut dapat tercapai, Waskita membutuhkan dukungan berupa penjaminan untuk meningkatkan peringkat obligasi sehingga dapat menarik minat investor pasar modal dan dapat mengoptimalisasikan penerbitan obligasi yang dilakukan. Dalam hal ini, Kementerian

Therefore, Waskita planned to issue bonds for refinancing and meeting working capital needs. To realize this plan, Waskita required guarantee support to improve the bond rating, attract capital market investors, and optimize the bond issuance. In this regard, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support for the risk of default on principal and interest of Waskita Karya's Bonds III of 2021. On

Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok obligasi III Waskita Karya tahun 2021. Pada tanggal 16 September 2022, pihak-pihak terkait telah menandatangani Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan.

16 September 2022, the related parties signed the Trustee Agreement, the Guarantee Agreement, and the Guarantee Implementation Agreement.

## Penjaminan Pinjaman PT Waskita Karya (Persero)

Loan Guarantee for PT Waskita Karya (Persero)



### Informasi Penjaminan

**Guarantee Information**

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | Rp8,08 triliun<br>Rp8,08 trillion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| **Kreditur**<br>Lenders | : | Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank BJB<br>Syndicate of PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank BJB |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : | 3 tahun<br>3 years |

Agar kondisi perusahaan semakin membaik, Waskita terus melakukan upaya restrukturisasi keuangan secara menyeluruh, salah satunya adalah melalui penjaminan pemerintah atas pinjaman dan obligasi/sukuk. Untuk menambah modal kerja, Waskita memperoleh pinjaman dari sindikasi Bank dalam negeri yang modalnya akan digunakan untuk membiayai 148 proyek penugasan dari Pemerintah dalam rangka program PEN.

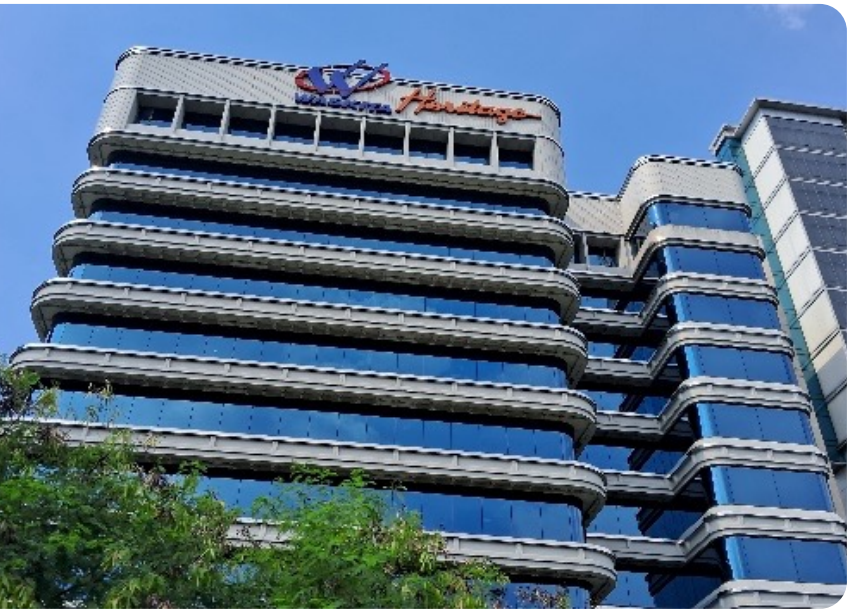
To improve the company's financial condition, Waskita continues to implement comprehensive financial restructuring, including through government guarantees on loans and bonds/sukuk. To increase working capital, Waskita obtained a syndicated loan from domestic banks, which will be used to finance 148 government-assigned projects under the PEN program.

Untuk meningkatkan kelayakan dalam rencana pinjaman dari pihak Perbankan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan dan pemenuhan kewajiban Waskita, maka dibutuhkan penjaminan pemerintah. Jaminan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi program restrukturisasi keuangan Waskita. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Waskita dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021.

To enhance the feasibility of the planned loan from banks for completing ongoing projects and fulfilling Waskita's obligations, government guarantees are required. These guarantees are expected to provide a significant boost to Waskita's financial restructuring program. On 25 October 2021, Waskita and the lenders signed the Loan Agreement, while the Guarantee Agreement and Guarantee Implementation Agreement were signed on 29 October 2021.

## Penjaminan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero)

Guarantee of Bonds IV and Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero)



### Informasi Penjaminan

**Guarantee Information**

| | | |
|---|---|---|
| **Obligasi**<br>Bonds | : | Rp2,13 triliun<br>Rp2.13 trillion |
| **Sukuk**<br>Sukuk | : | Rp1,15 triliun<br>Rp1.15 trillion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| **Wali Amanat**<br>Trustee | : | PT Bank KB Bukopin Tbk |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : | 5 tahun<br>5 years |

Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Tahun 2022 dengan Jaminan Pemerintah merupakan bagian dari strategi penyehatan keuangan Waskita yang terintegrasi dan saling berkaitan serta merupakan penjaminan atas surat utang Waskita dalam Rangka PEN Tahap II yang merupakan tahap lanjutan dari penerbitan Obligasi III dengan Penjaminan Pemerintah yang telah ditandatangani pada 16 September 2021.

Penerbitan obligasi dan sukuk tersebut dalam rangka *refinancing* dan pemenuhan kebutuhan modal kerja Waskita. Dalam upaya pemberian dukungan kepada Waskita, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok Obligasi IV dan Sukuk I Waskita tahun 2022 yang pada tanggal 22 April 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan oleh Waskita, Kementerian Keuangan, PT PII dan Wali Amanat.

Waskita's Bonds IV and Sukuk Mudharabah I of 2022, with Government Guarantees, are part of Waskita's integrated financial restructuring strategy. This issuance is interconnected with previous guarantees and represents the guarantee of Waskita's debt instruments under PEN Phase II, which is a continuation of the Bonds III with Government Guarantees signed on 16 September 2021.

The issuance bond and sukuk is intended for refinancing and meeting Waskita's working capital needs. To support Waskita, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support for the risk of default on principal and interest of the Waskita's Bonds IV and Sukuk I of 2022. On 22 April 2022, Waskita, the Ministry of Finance, IIGF, and the Trustee signed the Trustee Agreement, Guarantee Agreement, and Guarantee Implementation Agreement.

## Penjaminan Pinjaman Bus Listrik PT Industri Kereta Api (Persero)

Loan Guarantee for Electric Buses of PT Industri Kereta Api (Persero)




### Informasi Penjaminan

### Guarantee Information

| | |
|---|---|
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : Rp150 miliar<br>Rp150 billion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : PT Industri Kereta Api (Persero) |
| **Kreditur**<br>Lender | : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : 4 tahun<br>4 years |

Bertepatan dengan diselenggarakannya rangkaian agenda KTT G-20, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G-20, yang digelar di Provinsi Bali. Kementerian Perhubungan menyelenggarakan pengadaan penyediaan layanan transportasi umum bus listrik untuk mendukung Program G-20. Operator yang ditunjuk untuk menyediakan layanan bus listrik adalah Perum DAMRI. Perum DAMRI melalui LOA pada bulan Februari dan April 2022 telah menunjuk PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) untuk menyediakan bus listrik sebanyak 53 unit. Setelah dioperasikan pada KTT G-20, bus listrik tersebut selanjutnya akan dioperasikan di Kota Bandung sebanyak 1 koridor (14 unit) dan Kota Surabaya sebanyak 2 koridor (39 unit) dengan skema *Buy The Service* (BTS).

Coinciding with the series of G-20 Summit events, where Indonesia held the G-20 Presidency for the first time in Bali, the Ministry of Transportation organized the procurement of electric bus public transport services to support the G-20 Program. The operator appointed to provide the electric bus service was Perum DAMRI. Through Letters of Award (LOA) in February and April 2022, Perum DAMRI appointed PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) to supply 53 electric buses. After operating during the G-20 Summit, the buses would be deployed in Bandung totaling 1 corridor (14 buses) and Surabaya with 2 corridors (39 buses) under the Buy The Service (BTS) scheme.

Dalam upaya pemberian dukungan penyediaan bus listrik kepada PT INKA, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan yang di mana pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Muamalat, yang sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT INKA dengan Bank Muamalat untuk pendanaan pengadaan 53 unit bus listrik.

To support PT INKA in providing the electric buses, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support. On 30 December 2022, the following agreements were signed, namely the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Muamalat, and previously, on December 30, 2022, a Loan Agreement was signed between PT INKA and Bank Muamalat to fund the procurement of 53 electric buses.

## Penjaminan Pinjaman Perum DAMRI
Loan Guarantee for Perum DAMRI




### Informasi Penjaminan
**Guarantee Information**

| | | |
|---|---|---|
| **Kredit Modal Kerja**<br>Kredit Modal Kerja | : | Rp72,1 miliar<br>72.1 billion |
| **Kredit Investasi**<br>Kredit Investasi | : | Rp25,1 miliar<br>Rp25.1 billion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | Perum DAMRI |
| **Kreditur**<br>Lender | : | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : | 4 tahun<br>4 years |

Perum DAMRI merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang. Pandemi COVID-19 menyebabkan sektor transportasi darat mengalami tekanan yang cukup sulit dikarenakan masyarakat membatasi mobilitas mereka demi pencegahan penularan dari COVID-19 mengakibatkan penurunan drastis pada jumlah penumpang. Oleh sebab itu, DAMRI memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah sebagai upaya memperkuat basis komersial perusahaan.

Pinjaman dari Bank Mandiri kepada DAMRI akan difokuskan untuk mengembangkan trayek Angkutan Bandara dan Angkutan Antar Kota melalui peremajaan armada di 35 trayek antarkota dan bandara yang terpilih karena memiliki *traffic* penumpang yang baik, serta mengembangkan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan (*Maintenance Facility*). Pada tanggal 30 Desember 2022, DAMRI dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan DAMRI ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

Perum DAMRI is a state-owned enterprise engaged in passenger transport services. The COVID-19 pandemic caused significant pressure on the land transportation sector, as people limited their mobility to prevent virus transmission, resulting in a sharp decline in passenger numbers. Consequently, DAMRI utilized a loan facility with Government Guarantee to strengthen its commercial base.

The loan from Bank Mandiri to DAMRI is intended to develop airport and intercity routes by renewing the fleet on 35 selected intercity and airport routes with strong passenger traffic, as well as to develop vehicle maintenance facilities. On 30 December 2022, DAMRI and the lender signed the Loan Agreement, followed by the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and DAMRI, all executed on 30 December 2022.

## Penjaminan Pinjaman PT Len Industri (Persero)
Loan Guarantee for PT Len Industri (Persero)




### Informasi Penjaminan
### Guarantee Information

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | eqv.Rp2,79 triliun<br>eqv.Rp2,79 trillion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT Len Industri (Persero) |
| **Kreditur**<br>Lenders | : | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya<br>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and other banks/financial institutions |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : | 4 tahun<br>4 years |

PT Len Industri (Persero) (PT Len) pada tahun 2021 sampai dengan 2022 menerima surat penunjukan proyek strategis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka kemandirian penyediaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) oleh Industri Dalam Negeri. Penunjukan dari Kementerian Pertahanan ini selain untuk menjalankan 3 proyek tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan PT Len terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

From 2021 to 2022, PT Len Industri (PT Len) received project appointment letters from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia for strategic projects to support domestic self-sufficiency in providing Main Defense System Equipment (Alutsista). This appointment not only covers the execution of the three projects but also represents PT Len's contribution to the National Economic Recovery Program (PEN).

Untuk menunjang pelaksanaan penunjukan atas 3 (tiga) proyek di atas PT Len membutuhkan fasilitas kredit perbankan, baik *Cash Loan* (CL) maupun *Non Cash Loan* (NCL). Oleh sebab itu, PT Len mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas pinjaman dengan jaminan Pemerintah. Pada tanggal 30 Desember 2022, PT Len dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT Len ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

To support the implementation of the three projects, PT Len required banking credit facilities, both Cash Loan (CL) and Non-Cash Loan (NCL). Therefore, PT Len applied for financing through a loan facility with Government Guarantee. On 30 December 2022, PT Len and the lenders signed the Loan Agreement, followed by the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT Len, all signed on 30 December 2022.

## Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero)
Loan Guarantee for PT Pertamina (Persero)



### Informasi Penjaminan
**Guarantee Information**

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Pinjaman**<br>Loan Value | : | Rp47,19 triliun<br>Rp47,19 trillion |
| **BUMN – Terjamin**<br>SOE - Guaranteed | : | PT Pertamina (Persero) |
| **Kreditur**<br>Lenders | : | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| **Jangka Waktu Penjaminan**<br>Guarantee Term | : | 2 tahun + 1 tahun<br>2 years + 1 year |

PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") melalui Pertamina Patra Niaga (PPN) melaksanakan penugasan kegiatan *Public Service Obligation* (PSO) penyediaan dan pendistribusian kuota volume penyalur Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus (JBKP). Mengacu pada PMK No. 159/PMK.02/2022, dalam pelaksanaan penugasan kegiatan PSO, Pertamina dapat memperoleh Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah atas kekurangan penerimaan Pertamina akibat selisih Harga Jual Eceran (HJE). Namun berdasarkan kondisi eksisting pembayaran Dana Kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah baru dapat diselesaikan pada rata-rata 3 tahun. Terjadinya penundaan pembayaran Dana Kompensasi menyebabkan defisit pada *Operating Cash Flow* (OCF). Atas hal tersebut, Pertamina melakukan proses penyediaan KMK Dana Kompensasi dan Subsidi dengan debitur Bank Mandiri, BNI dan BRI dalam rangka upaya menjaga *cashflow* dalam mencegah terjadinya disrupsi operasional. Namun, fasilitas kredit yang diberikan oleh ketiga Bank tersebut sudah hampir mencapai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditentukan oleh OJK. Dengan memperhatikan kondisi BMPK Himbara, opsi yang dapat diupayakan oleh Pertamina adalah permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program PEN dari Kementerian Keuangan atas Fasilitas KMK tersebut, sehingga ketentuan BMPK tersebut dapat dikecualikan.

PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), through Pertamina Patra Niaga (PPN), carries out the Public Service Obligation (PSO) assignment to provide and distribute quota volumes for Certain Fuel Types (JBT) and Special Fuel Types (JBKP). Referring to PMK No. 159/PMK.02/2022, under the PSO assignment, Pertamina may receive Fuel Compensation Funds from the Government for revenue shortfalls caused by differences in the Retail Selling Price (HJE). However, under existing conditions, compensation payments by the Government are typically completed within an average of 3 years, causing a deficit in Operating Cash Flow (OCF). To address this, Pertamina arranged the KMK Compensation and Subsidy Facility with Bank Mandiri, BNI, and BRI to maintain cash flow and prevent operational disruption. However, the credit facilities provided by the three banks were approaching the Legal Lending Limit (LLL) set by OJK. Considering the LLL condition of Himbara, Pertamina opted to request a KMK on Government Guarantee Facility under the National Economic Recovery (PEN) Program from the Ministry of Finance, which allowed an exemption from the LLL provision.

Pertamina mengajukan permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pada tanggal Pada tanggal 30 Desember 2022, Pertamina dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi (Bank Mandiri, BNI dan BRI), selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan Pertamina ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 30 Desember 2022. Per 30 Desember 2025, fasilitas kredit modal kerja telah berakhir dengan *outstanding* Rp0, sehingga penjaminan PT PII dan Kementerian Keuangan juga ikut berakhir

Pertamina submitted the request for the KMK on Government Guarantee Facility under PEN, and on 30 December 2022, Pertamina and the lenders signed the Syndicated Loan Agreement (Bank Mandiri, BNI, and BRI), followed by the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and Pertamina, all executed on 30 December 2022. As of 30 December 2025, the working capital credit facility had fully matured with an outstanding balance of Rp0, and consequently, the guarantees by IIGF and the Ministry of Finance also ended.

## Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Project Development Facility Business Segment

Dengan pengalaman lebih dari 14 tahun, PT PII telah menjalankan peran serta usaha terbaiknya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU. Perkembangan dan pertumbuhan industri infrastruktur di Indonesia menuntut PT PII untuk terus adaptif terhadap kemajuan zaman dan berinovasi serta berkembang dalam menjalankan perannya demi mencapai hasil yang optimal serta pemerataan infrastruktur di Indonesia.

With over 14 years of experience, IIGF has contributed its best efforts to Indonesia's infrastructure development through Government Guarantees provided to infrastructure projects under the PPP scheme. The development and growth of the infrastructure industry in Indonesia require IIGF to remain adaptive to changing times, to innovate, and to evolve in carrying out its role, aiming to achieve optimal results and ensure equitable infrastructure distribution across Indonesia.

## Kegiatan Operasi dan Usaha Pendampingan Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi

Operations and Business Activities for Project Development Facility

Pada tahun 2018, PT PII memperluas kegiatan usaha di samping memberikan penjaminan pada proyek infrastruktur, yaitu melalui keterlibatan dalam penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya ("PMK 68/2024"). PMK 68/2024 mengatur dukungan pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek ("Fasilitas PDF").

In 2018, IIGF expanded its business activities beyond providing guarantees for infrastructure projects, namely by participating in the preparation and execution of PPP project transactions. These activities are carried out in accordance with Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 68 of 2024 concerning Government Support for Infrastructure Financing through Public-Private Partnership Schemes and/or Other Financing Schemes ("PMK 68/2024"). PMK 68/2024 regulates government support provided by the Ministry of Finance to accelerate infrastructure delivery, including the Project Preparation and Transaction Execution Facility ("PDF Facility").

Selain Fasilitas PDF, PT PII juga diberikan kesempatan sebagai pelaksana Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka

In addition to the PDF Facility, IIGF has also been given the opportunity to implement the Facility for Preparation and Execution of Transactions involving State-Owned Assets and/or Transfer of State-Owned Assets in the Preparation,

Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara yang mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2022 ("Fasilitas PDF BMN IKNL") yang terdiri dari tahap penyiapan dan tahap pelaksanaan transaksi.

Development, and Relocation of the State Capital, in accordance with Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 139 of 2022 ("PDF BMN IKNL Facility"), which consists of the preparation phase and the transaction execution phase.

Pelaksanaan Fasilitas PDF dan Fasilitas PDF BMN IKNL dilakukan oleh PT PII berdasarkan penugasan yang diperoleh dari Kementerian Keuangan. Fasilitas PDF menjadi salah satu pengembangan aktivitas kegiatan Perseroan sesuai dengan rencana arah pengembangan Perseroan tahun 2023-2027 khususnya dalam upaya turut mendukung keberlangsungan pipeline penjaminan dan meningkatkan peran pendampingan. Melalui Fasilitas PDF, keterlibatan PT PII secara menyeluruh dalam proses penyediaan infrastruktur diharapkan dapat menjadi nilai tambah tersendiri untuk Proyek. Selain Proyek BMN IKNL, proyek yang dapat diberikan Fasilitas PDF sesuai PMK 68/2024 meliputi Proyek KPBU, khususnya KPBU Prioritas, KPBU Kilang Minyak, dan/atau KPBU lainnya atas Prakarsa Pemerintah, dan proyek penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan lainnya.

The implementation of both the PDF Facility and the PDF BMN IKNL Facility is carried out by IIGF based on assignments received from the Ministry of Finance. The PDF Facility represents one of the expansion activities of the Company, in line with the Company Development Plan 2023–2027, particularly in efforts to sustain the guarantee pipeline and enhance advisory roles. Through the PDF Facility, IIGF's comprehensive involvement in infrastructure provision is expected to create added value for projects. Beyond the BMN IKNL projects, projects eligible for the PDF Facility under PMK 68/2024 include PPP projects, particularly Priority PPPs, Oil Refinery PPPs, and/or other PPP projects initiated by the government, as well as infrastructure provision projects under other financing schemes.

Dalam pelaksanaan Fasilitas PDF, PT PII telah menyiapkan struktur yang berorientasi pada proyek serta menjaga independensi pengambilan keputusan di masing-masing fungsi (*segregation of function*) melalui pembentukan Divisi Inisiasi Bisnis yang didukung oleh dua hal, yaitu: (i) Pengawasan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan penugasan tersebut dengan berbekal pengalaman proyek infrastruktur; dan (ii) Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam pengelolaan transaksi.

In implementing the PDF Facility, IIGF has established a project-oriented structure while maintaining independence in decision-making within each function (segregation of function) through the formation of the Business Initiation Division, supported by two key aspects: (i) Supervision of competent human resources to carry out the assignments, leveraging prior experience in infrastructure projects; and (ii) Strong corporate governance infrastructure for effective transaction management.

Melalui Fasilitas PDF, PT PII turut mendampingi PJPK sejak tahap penyiapan dan memastikan penyusunan dokumen penyiapan proyek, yakni prastudi kelayakan beserta dokumen pendukungnya dan penjajakan minat pasar, dilakukan secara komprehensif, kredibel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap transaksi, PT PII mendampingi PJPK mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana hingga tercapainya tahap perolehan pembiayaan (*financial close*). Melalui PMK 68/2024, PT PII juga dapat melakukan pendampingan kepada PJPK pada tahap manajemen proyek, melalui pendampingan pada masa konstruksi termasuk pengujian operasional infrastruktur dan masa penyediaan layanan yang terhitung sejak infrastruktur beroperasi paling lama 2 (dua) tahun. Keterlibatan PT PII secara *end-to-end* diharapkan dapat turut memastikan aspek *bankability* dan *feasibility* proyek sehingga meningkatkan kepastian keberhasilan proyek yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.

Through the PDF Facility, IIGF assists the GCA from the preparation phase and ensuring that project preparation documents, including pre-feasibility studies, supporting documents, and market interest assessments, are developed comprehensively, credibly, and in compliance with applicable laws and regulations. During the transaction phase, IIGF supports the GCA from the preparation of procurement documents, the implementation of procurement for the Implementing Business Entity, up to achieving financial close. Under PMK 68/2024, IIGF can also provide advisory support to the GCA during the project management phase, through guidance during construction period, including operational testing of infrastructure, and the service provision period, counted from the start of operations for a maximum of 2 (two) years. IIGF's end-to-end involvement is expected to help ensure both the bankability and feasibility of projects, thereby increasing the likelihood of successful project completion, which ultimately guarantees the delivery of high-quality and sustainable infrastructure.

## Pelaksanaan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
Project Preparation and Transaction Support

Hingga akhir tahun 2025, PT PII melaksanakan penugasan Fasilitas PDF sebanyak 7 (tujuh) Proyek yang terdiri dari 6 (enam) Proyek dengan skema KPBU dan 1 (satu) Proyek Pengelolaan Barang Milik Negara. Dari 6 (enam) Proyek skema KPBU tersebut terdapat 1 (satu) proyek yang penugasannya telah berakhir, yaitu Jaringan Gas Kota Palembang sehingga jumlah proyek PDF efektif sampai dengan akhir bulan Desember 2025 sebanyak 6 (enam) proyek, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Until the end of 2025, IIGF had been assigned to implement the PDF Facility for a total of 7 (seven) projects, consisting of 6 (six) PPP projects and 1 (one) State-Owned Assets Management Project. Of the 6 (six) PPP projects, 1 (one) project assignment has been completed, namely the Palembang City Gas Network, bringing the total number of active PDF projects as of the end of December 2025 to 6 (six) projects, as described below.

### Pembangunan Bandar Udara Singkawang
Construction of Singkawang Airport

Kota Singkawang di Kalimantan Barat dikenal sebagai kota dengan kekayaan budaya Tionghoa, Dayak, dan Melayu (Tidayu), serta memiliki potensi pariwisata tinggi dengan berbagai perayaan hari raya keagamaan seperti Imlek, Cap Go Meh, Cheng Beng (Sembahyang Kubur), Hari Raya Idul Fitri, Hari Waisak, dan Hari Natal.

Singkawang City in West Kalimantan is known for its rich Chinese, Dayak, and Malay (Tidayu) culture. It also boasts high tourism potential, with various religious celebrations such as Chinese New Year, Cap Go Meh, Cheng Beng (Grave Prayer), Eid al-Fitr, Vesak Day, and Christmas.

Untuk mendukung mobilitas masyarakat, lalu lintas diaspora yang relatif padat dan logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional, direncanakan pembangunan Bandar Udara Singkawang melalui skema KPBU, sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

To support community mobility, relatively dense diaspora traffic, and logistics, as well as to stimulate regional economic growth, the development of Singkawang Airport is planned through a PPP scheme, in accordance with the Ministry of Transportation's Strategic Plan, as stipulated in Ministerial Regulation No. 80 of 2020 on the Ministry of Transportation's Strategic Plan for 2020-2024.



Bandara ini berlokasi di Pangmilang, Singkawang Selatan, merupakan proyek brownfield seluas 151,45 Ha dan diklasifikasikan sebagai bandara pengumpan untuk penerbangan domestik. Dalam pelaksanaannya, proyek menggunakan skema *blended financing* (APBN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pemberi Hibah). Saat ini Bandar Udara Singkawang telah resmi beroperasi secara minimum sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan paralel dengan proses penyiapan KPBU.

Located in Pangmilang, South Singkawang, this airport is a 151.45-hectare brownfield project classified as a feeder airport for domestic flights. The project utilizes a blended financing scheme (the state budget, State Sharia Securities (SBSN), and Corporate Social Responsibility (CSR) from the grantor). Currently, Singkawang Airport has officially operated at a minimum level in accordance with Ministry of Transportation regulations, parallel to the PPP preparation process.

## Informasi Proyek
Project Information

| | | |
|---|---|---|
| **PJPK** GCA | Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan | Director General of Civil Aviation, Ministry of Transportation |
| **Lokasi Proyek** Project Location | Kota Singkawang, Kalimantan Barat | Singkawang City, West Kalimantan |
| **Skema Proyek** Project Scheme | *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) | Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) |
| **Lingkup KPBU** PPP Scope | • Rancang dan Bangun, diantaranya faslitas sisi udara dan fasilitas sisi darat bandar udara;<br>• Menyediakan dan memastikan pendanaan untuk konstruksi, operasional dan pemeliharaan Proyek;<br>• Mengoperasikan fasilitas bandar udara (termasuk Aset *Brownfield*) selama periode kerja sama;<br>• Melaksanakan pemeliharaan fasilitas bandar udara (termasuk Aset *Brownfield*) selama periode kerja sama; dan<br>• Pengalihan aset kepada PJPK atas semua fasilitas yang telah dioperasikan dan dipelihara selama masa kerjasama Proyek pada akhir masa konsesi. | • Design and construction, including airside and landside airport facilities;<br>• Providing and ensuring financing for the construction, operation, and maintenance of the Project;<br>• Operating airport facilities (including brownfield assets) during the cooperation period;<br>• Maintenance of airport facilities (including brownfield assets) during the cooperation period; and<br>• Transfer of assets to the GCA for all facilities that have been operated and maintained throughout the project cooperation period at the end of the concession term. |
| **Mekanisme Pengambilan Investasi** Investment Return Mechanism | *User Charge* | User Charge |
| **Estimasi Nilai Investasi** Estimated Investment Value | Rp841 miliar | Rp841 billion |
| **Masa Kerja Sama** Collaboration Period | 32 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) | 32 years (including 2 years of construction) |
| **Tahapan** Phase | Transaksi | Transaction |

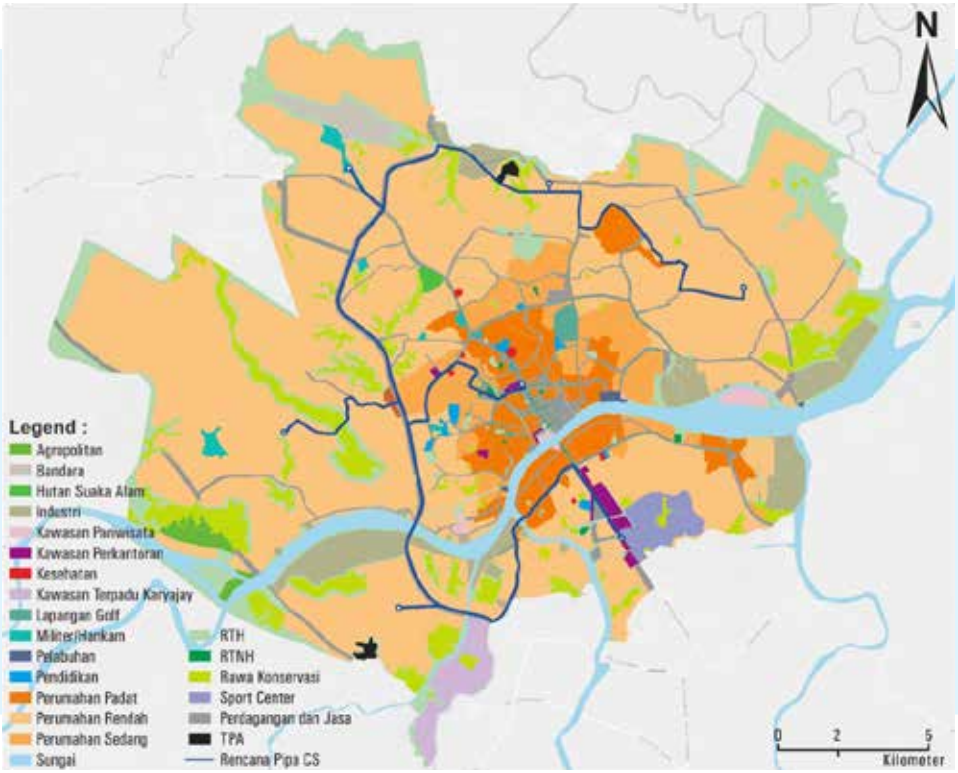
Pertanggal 31 Desember 2025 proyek telah memasuki tahap transaksi KPBU berupa permintaan proposal atau *Request for Proposal* dengan target *signing* di tahun 2026.

As of 31 December 2025, the Project has entered the PPP transaction stage, specifically the Request for Proposal phase, with a target signing in 2026.

## Pembangunan Jaringan Gas Kota Palembang
Construction of Palembang City Gas Network

Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Palembang dilaksanakan melalui skema KPBU dengan Menteri ESDM sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Proyek ini diindikasikan akan memiliki masa konsesi 30 tahun dengan skema *Design-Build-Finance-Maintain-Operate-Transfer* ("DBFMOT"). Lokasi Proyek serta gambaran awal proyek dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

The development of natural gas distribution network for households in Palembang City is implemented under a PPP scheme, with the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) acting as the Government Contracting Agency (GCA). The Project is expected to have a 30-year concession period under Design-Build-Finance-Maintain-Operate-Transfer (DBFMOT) scheme. The Project location and initial overview are presented in the following figures and table.




| | | |
|---|---|---|
| **Nama Proyek**<br>Project Name | Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU di Kota Palembang | Construction of a Natural Gas Distribution Network for Households through a PPP Scheme in Palembang City |
| **Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama ("PJPK")**<br>Government Contracting Agency (GCA) | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Minister of Energy and Mineral Resources |
| **Estimasi jumlah sambungan rumah**<br>Estimated number of household connections | 354.441 SR | 354.441 SR |
| **Konsumsi per pelanggan**<br>Consumption per customer | Pelanggan RT-1: 12,6 $m^3$/ bulan<br>Pelanggan RT-2: 12,64 $m^3$/ bulan<br>Pelanggan Kecil ("PK"): 97,73 $m^3$/bulan | RT-1 Customers: 12.6 $m^3$/month<br>RT-2 Customers: 12.64 $m^3$/month<br>Small Customers ("PK"): 97.73 $m^3$/month |
| **Indikasi Skema Proyek**<br>Indicative Project Scheme | *User charge* (pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif) | User charge (tariff-based payments by users) |
| **Indikasi Ruang Lingkup KPBU**<br>Indicative PPP Scope | DBFMOT | DBFMOT |
| **Indikasi Masa Konsesi**<br>Indicative Concession Period | 30 tahun | 30 years |

Pada tanggal 20 Oktober 2025, PT PII telah menerima surat dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan terkait Pengakhiran Penugasan Khusus dalam Melaksanakan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Palembang dikarenakan belum terbitnya regulasi nasional yang dibutuhkan untuk KPBU ini.

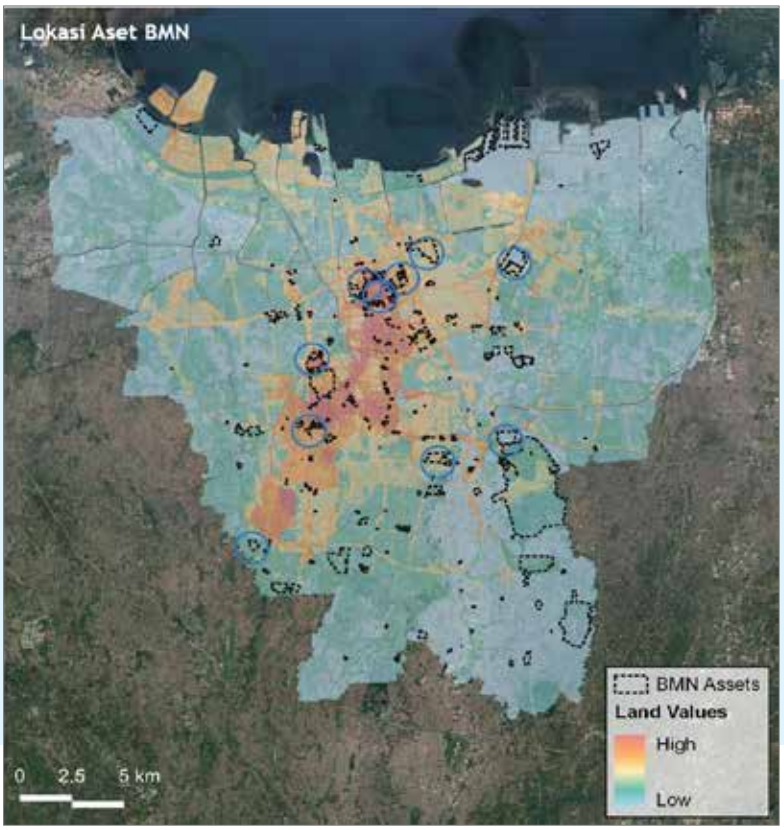
On 20 October 2025, IIGF received a letter from the Directorate of Government Support Management and Infrastructure Financing of the Ministry of Finance regarding the Termination of Special Assignment in Implementing the Preparation and Implementation Facility for the PPP Project Transaction for Natural Gas Distribution Networks for Households in Palembang City due to the non-issuance of the national regulations required for this PPP.

## Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Management of State-Owned Assets (BMN)

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur maka status Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara setelah ditetapkannya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tidak lantas menjadikan Jakarta ditinggalkan begitu saja tetapi Jakarta harus mempunyai rencana besar yang dituangkan dalam Penyiapan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta sekaligus untuk mengantisipasi dampak tidak terutilisasinya gedung/ bangunan pemerintahan/aset BMN pasca pemindahan ibu kota negara dan agar terjadi optimalisasi peningkatan nilai aset BMN yang pada akhirnya dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan proyek KPBU Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan Berbasis Transit dan Digital.

The relocation of Indonesia's capital from Jakarta to Nusantara in Penajam Paser Utara, East Kalimantan, has resulted in Jakarta no longer holding its status as the State Capital (IKN) following the enactment of Law No. 3 of 2022 on the State Capital. However, this relocation does not mean that Jakarta will be abandoned. Instead, Jakarta must have a comprehensive plan, as outlined in the preparation of the Jakarta Grand Design Study as well as to anticipate the impact of underutilization of government buildings/ construction/ state-owned assets (BMN) following the capital relocation and to optimize and enhance the value of BMN assets, which in turn can support the implementation of PPP projects related to the new capital (IKN), while realizing Jakarta's vision as a Global-Scale Business City that is resilient and based on transit-oriented and digital development.



## Informasi Proyek
Project Information

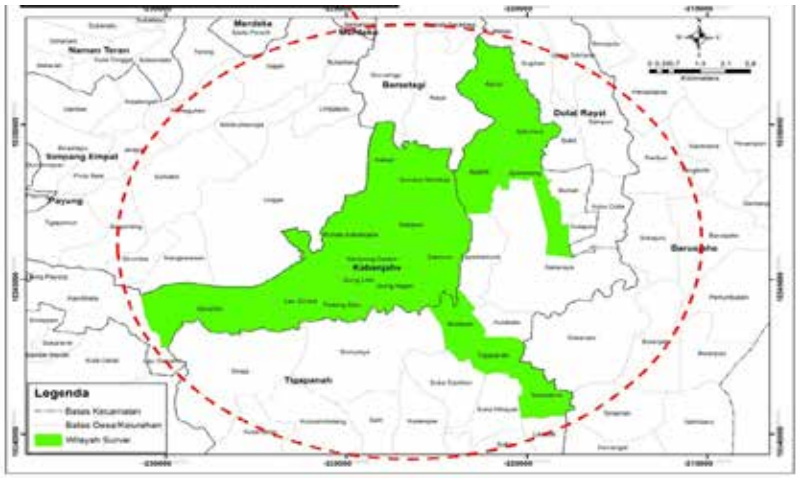
| | | |
|---|---|---|
| **PJPK** GCA | Direktur Jenderal Kekayaan Negara | Director General of State Assets |
| **Lokasi Proyek** Location | Jakarta | Jakarta |
| **Estimasi Masa Kerja Sama** Estimated Cooperation Period | 10 tahun | 10 years |
| **Tahapan** Stages | Penyiapan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta | Preparation of the Jakarta Grand Design Study |
| **Persetujuan Fasilitas** Facility Approval | 21 Februari 2023 | 21 February 2023 |
| **KMK** MoF Decree | 24 Maret 2023 | 24 March 2023 |
| **Perjanjian Penugasan** Assignment Agreement | 31 Mei 2023 & 31 Januari 2025 | 31 May 2023 & 31 January 2025 |
| **Perjanjian Pelaksanaan** Implementation Agreement | 6 Juni 2023 & 31 Januari 2025 | 6 June 2023 & 31 January 2025 |

## Pembangunan SPAM Kabupaten Karo
Construction of Karo Regency SPAM

Pemerintah Kabupaten Karo saat ini berupaya untuk meningkatkan penyediaan akses air minum untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan infrastruktur air minum nasional. Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ("RPJMD") Kabupaten Karo tahun 2022-2026 yaitu memperluas cakupan pelayanan SPAM dengan peningkatan maupun pembangunan baru serta pengelolaan aset secara efektif guna menurunkan tingkat kehilangan air hingga di bawah 25%.

The Government of Karo Regency is currently striving to improve access to drinking water in order to align with national drinking water infrastructure development priorities. The Karo Regency Government has established targets as outlined in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2022–2026, which include expanding SPAM service coverage through both upgrades and new developments, as well as managing assets effectively to reduce water loss to below 25%.






## Informasi Proyek
Project Information

| | | |
|---|---|---|
| **PJPK** GCA | Perusahaan Umum Daerah Air Minum ("Perumdam") Tirta Malem berdasarkan Penugasan Pemerintah Kabupaten Karo | Regional Water Utility Company ("Perumdam") Tirta Malem, based on an assignment from the Government of Karo Regency |
| **Lokasi Proyek** Project Location | Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara | Karo Regency, North Sumatra Province |
| **Skema Proyek** Project Scheme | *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) | Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) |

| | | |
|---|---|---|
| **Lingkup KPBU** PPP Scope | • Hulu: DBFOMT;<br>• Hilir: DBFT;<br>• Unit Pelayanan: BFT (Penggantian *water meter* pelanggan eksisting). | • Upstream: DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer);<br>• Downstream: DBFT (Design-Build-Finance-Transfer);<br>• Service Unit: BFT (replacement of existing customer water meters). |
| **Mekanisme Pengambilan Investasi** Investment Return Mechanism | User Tariff (*Take or Pay*) | User Tariff (Take or Pay) |
| **Estimasi Nilai Investasi** Estimated Investment Value | Rp200-250 miliar | Rp200-250 billion |
| **Masa Kerja Sama** Estimated Collaboration Period | 25 tahun | 25 years |
| **Tahapan** Stages | Penyiapan Proyek | Project Preparation |

Sejak PT PII ditugaskan sebagai pelaksana Fasilitas PDF Proyek hingga Desember 2025, PT PII telah melakukan pendampingan kepada PJPK dalam melakukan *real demand survey* (RDS), survei pemetaan pelanggan eksisting dan potensi pelanggan baru yang berbasis data *geographic information system* (GIS), mengkaji strategi perbaikan kinerja Perumdam, penyusunan Prastudi Kelayakan Awal Proyek, penyusunan Rencana Bisnis Perumdam, dan pelaksanaan *market sounding* / penjajakan minat pasar. Per 31 Desember 2025, PT PII dalam proses mendampingi finalisasi penyusunan Prastudi Kelayakan Akhir Proyek dan program penyehatan dalam rangka peningkatan kinerja Perumdam dengan tujuan menjadi "SEHAT".

Since IIGF was appointed as the implementing entity of the Project's PDF Facility until December 2025, IIGF has provided assistance to the GCA in conducting a real demand survey (RDS), surveys for mapping existing customers and potential new customers based on Geographic Information System (GIS) data, assessing strategies to improve Perumdam's performance, preparing the Initial Pre-Feasibility Study, drafting the Perumdam Business Plan, and conducting market sounding. As of 31 December 2025, IIGF is in the process of assisting with the finalization of the Final Pre-Feasibility Study and the corporate turnaround program aimed at improving Perumdam's performance, with the objective of achieving a "HEALTHY" classification.

## Kapal Riset Badan Riset dan Inovasi (BRIN)

Research Vessel of the National Research and Innovation Agency (BRIN)



Konsorsium Riset Samudra Nasional (NORC) dibentuk pada 26 September 2017 untuk mengoordinasikan penelitian kelautan di Indonesia secara terpadu, melibatkan 11 kementerian/lembaga dan universitas.

Konsorsium riset tersebut berkomitmen membangun kerjasama terkait program penelitian, pengembangan infrastruktur dan data kelautan. Untuk efisiensi dan efektivitas lembaga dan pembiayaan penelitian laut, kegiatan konsorsium riset dilakukan secara sinergis dan sistematis untuk menghasilkan program penelitian laut terpadu oleh semua pihak dengan mengaitkan interaksi antara laut dan atmosfer dengan dampak perubahan iklim.

Selain itu, NORC juga menyusun *roadmap* penelitian kelautan berbasis Rencana Induk Riset Nasional 2045 guna memperkuat kapasitas dan kelembagaan riset kelautan.

Untuk memenuhi kebutuhan riset tersebut, diperlukan modernisasi dan penambahan armada kapal dan fasilitas riset kelautan yang ada. Selain itu perlu adanya peningkatan dalam hal pengelolaan armada kapal dan kegiatan riset di bidang kelautan. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan dengan skema KPBU.

Konsorsium Riset Samudra Nasional (NORC) dibentuk pada 26 September 2017 untuk mengoordinasikan penelitian kelautan di Indonesia secara terpadu, melibatkan 11 kementerian/lembaga dan universitas.

Konsorsium riset tersebut berkomitmen membangun kerjasama terkait program penelitian, pengembangan infrastruktur dan data kelautan. Untuk efisiensi dan efektivitas lembaga dan pembiayaan penelitian laut, kegiatan konsorsium riset dilakukan secara sinergis dan sistematis untuk menghasilkan program penelitian laut terpadu oleh semua pihak dengan mengaitkan interaksi antara laut dan atmosfer dengan dampak perubahan iklim.

Selain itu, NORC juga menyusun roadmap penelitian kelautan berbasis Rencana Induk Riset Nasional 2045 guna memperkuat kapasitas dan kelembagaan riset kelautan.

To meet these research needs, it is necessary to modernize and expand the existing fleet of research vessels and marine research facilities. In addition, improvements are required in the management of the vessel fleet and marine research activities. These needs will be fulfilled through the PPP scheme.

## Informasi Proyek
Project Information

| | | |
|---|---|---|
| **PJPK**<br>GCA | Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional | Head of the National Research and Innovation Agency |
| **Lokasi Proyek**<br>Project Location | Sesuai wilayah operasi (*mobile*) di seluruh wilayah Indonesia | According to the operating area (mobile) throughout Indonesia |
| **Skema Proyek**<br>Project Scheme | *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) | Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) |
| **Lingkup KPBU**<br>PPP Scope | 1. Pembangunan dan pengelolaan kapal riset baru sebanyak 2 (dua) kapal;<br>2. Pengelolaan kapal riset baru berupa 1 (satu) Kapal Litoral dan 1 (satu) Kapal Penjelajah Samudera yang pengadaannya masih berproses dengan skema Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);<br>3. Penyelenggaraan *Fleet Management Unit* ("FMU") sebagai suatu unit yang akan melaksanakan pengelolaan kapal riset baru ataupun eksisting; dan<br>4. Pengembangan bisnis riset industri pesisir, laut, dan samudera berbasis kapal riset dalam aspek membantu pemasaran yang dilakukan oleh BRIN. | 1. Development and management of 2 (two) new research vessels;<br>2. Management of newly built research vessels consisting of 1 (one) Littoral Vessel and 1 (one) Ocean-Going Vessel, the procurement of which is still in progress under a Foreign Loan/Grant Scheme (PHLN);<br>3. Establishment of a Fleet Management Unit (FMU) as a unit to manage both new and existing research vessels; and<br>4. Development of coastal, marine and ocean industry research business based on research vessels in terms of assisting marketing carried out by BRIN. |
| **Mekanisme Pengambilan Investasi**<br>Investment Return Mechanism | *Availability Payment* | Availability Payment |
| **Estimasi Nilai Investasi**<br>Estimated Investment Value | Rp3,8 triliun | Rp3.8 trillion |
| **Masa Kerja Sama**<br>Estimated Collaboration Period | 20 tahun | 20 years |
| **Tahapan**<br>Stages | Penyiapan Proyek (Penyusunan Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) | Project Preparation (Preparation of the Final Report of the Final Pre-Feasibility Study) |

Per 31 Desember 2025, proyek dalam tahapan proses penyusunan Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (BC Akhir).

As of 31 December 2025, the project is in the process of preparing the Final Report of the Pre-Feasibility Study (BC Akhir).

## Pembangunan SPAM Kota Denpasar

Construction of Denpasar City SPAM

Pemerintah Kota Denpasar merencanakan pengembangan SPAM melalui skema KPBU untuk mencapai target 100% akses air minum layak pada 2042, dengan menugaskan Perumdam Tirta Sewakadarma sebagai pelaksana.

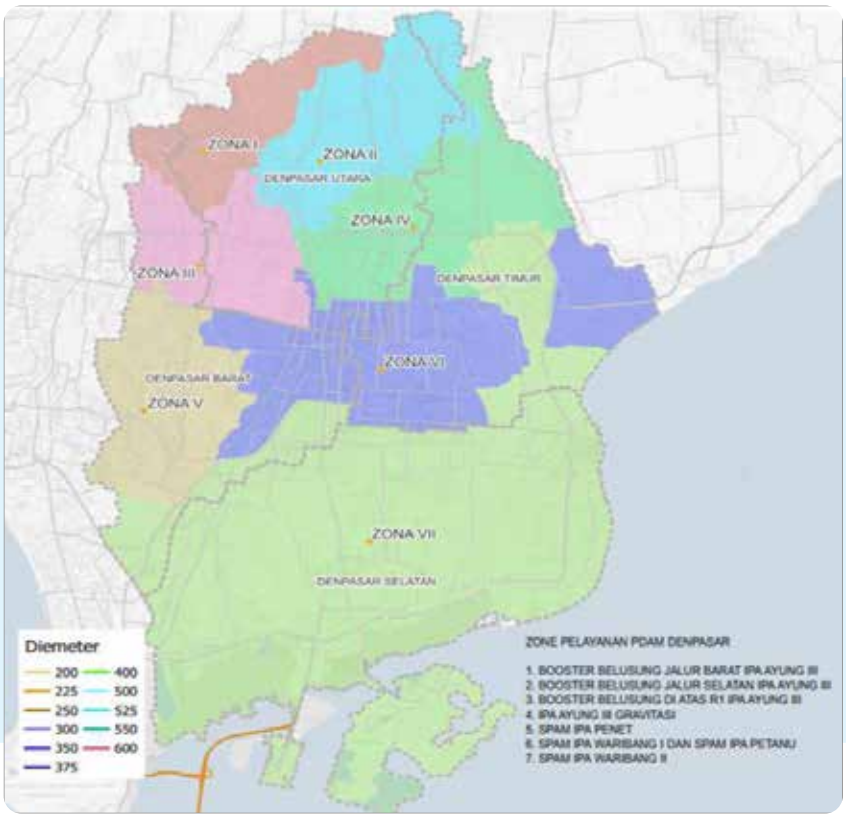
Denpasar City Government plans to develop a water supply system (SPAM) through a PPP scheme to achieve the target of 100% access to safe drinking water by 2042, with Tirta Sewakadarma Regional Water Company (Perumdam) as the implementing agency.

Sumber air baku Perumdam berasal dari Sungai Ayung, 19 (sembilan belas) sumur bor, serta membeli air curah dari SPAM Petanu dan SPAM Penet, sehingga total kapasitas air baku Perumdam menjadi sebesar 1.463 lpd. Pada 2024 cakupan layanan baru mencapai 53,24% dengan tingkat NRW yang cukup tinggi (34,05%), sehingga kualitas layanan belum optimal.

Perumdam's raw water sources come from Ayung River, 19 drilled wells, and bulk water purchased from Petanu and Penet SPAMs, bringing Perumdam's total raw water capacity to 1,463 lpd. In 2024, service coverage only reached 53.24%, with a relatively high NRW rate (34.05%), resulting in suboptimal service quality.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkot Denpasar dan Perumdam mendorong Proyek SPAM yang sejalan dengan RISPAM 2022–2042 guna mencapai layanan 100% pada 2042.

To address this issue, Denpasar City Government and Perumdam encouraged a SPAM project aligned with the 2022–2042 RISPAM to achieve 100% service coverage by 2042.



## Informasi Proyek
Project Information

| | | |
|---|---|---|
| **PJPK** GCA | Walikota Denpasar dengan penugasan kepada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | Mayor of Denpasar with an assignment to the President Director of PERUMDA Air Minum Tirta Sewakadarma |
| **Lokasi Proyek** Project Location | Kota Denpasar | Denpasar City |
| **Skema Proyek** Project Scheme | DBFT & DBFOMT | DBFT & DBFOMT |
| **Lingkup KPBU** PPP Scope | • *Design-Build-Finance-Transfer* (DBFT) untuk lingkup penyempurnaan *intake* serta produksi IPA Waribang dan Belusung.<br>• *Design-Build-Finance-Operation-Maintenance-Transfer* (DBFOMT) untuk unit distribusi dan layanan (tidak termasuk hubungan ke pelanggan seperti *billing collection* dan *complaint handling*) | • Design-Build-Finance-Transfer (DBFT) for the scope of intake improvement and production at Waribang and Belusung Water Treatment Plants (IPA);<br>• Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) for the distribution and service units (excluding customer-related activities such as billing collection and complaint handling). |
| **Mekanisme Pengambilan Investasi** Investment Return Mechanism | Tarif Kinerja Penyediaan Sarana + Tarif Kinerja Penanganan NRW | Performance-Based Tariff for Infrastructure Provision + Performance-Based Tariff for NRW Handling |
| **Estimasi Nilai Investasi** Estimated Investment Value | Rp 944,7 Miliar | Rp944.7 billion |
| **Masa Kerja Sama** Estimated Collaboration Period | 20 tahun<br>(termasuk masa konstruksi 4 tahun) | 20 years<br>(including a 4-year construction period) |
| **Tahapan** Stages | Penyiapan | Preparation |

Pada bulan November 2025, telah diselesaikan hasil keluaran berupa Laporan Prastudi Kelayakan Awal dan Rencana Bisnis PJPK. Proyek saat ini sedang dalam proses pengakhiran PDF pasca PJPK menyampaikan secara prinsip bahwa skema KPBU tidak dapat dilanjutkan di Proyek SPAM Denpasar.

In November 2025, key deliverables were completed, including the Initial Pre-Feasibility Study Report and the GCA Business Plan. Currently, the Project is undergoing the termination process of the PDF Facility, following the GCA's indication in principle that the PPP scheme cannot be continued for the Denpasar SPAM Project.

## RSUD Kota Denpasar
Denpasar City Regional General Hospital (RSUD)

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar (RSUD Wangaya) merupakan salah satu rumah sakit tertua di Bali yang didirikan pada tahun 1921. RSUD Wangaya membutuhkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk meningkatkan layanan sektor kesehatan kepada masyarakat Kota Denpasar. Pengembangan ini sejalan dengan Misi Kota Denpasar melalui RPJMD yaitu Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan dan Pendapatan yang Berkeadilan. Selain itu, sesuai dengan mandat dari Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak, RSUD Wangaya ditetapkan sebagai Rumah Sakit dengan Pelayanan Kanker, Jantung, Saraf, Uronefrologi serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSUIA) pada level Madya, keterbatasan dana APBD Kota Denpasar, mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk menggunakan skema KPBU.

Wangaya Regional General Hospital (RSUD Wangaya) of Denpasar City is one of the oldest hospitals in Bali, established in 1921. RSUD Wangaya requires enhancements in both capacity and capability to improve healthcare services for the residents of Denpasar City. This development aligns with the Denpasar City Mission as outlined in the RPJMD, which aims to increase public welfare through improved quality of education, healthcare services, and equitable income. In addition, in accordance with the mandate of the Ministry of Health, as stipulated in Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/1277/2024 concerning the hospital network for referral services in cancer, cardiovascular diseases, stroke, uronephrology, and maternal and child health, RSUD Wangaya has been designated as a hospital providing Cancer, Cardiac, Neurology, Uronephrology, and Maternal & Child Health (KJSUIA) services at the intermediate (Madya) level. The limited funds of Denpasar City Regional Budget (APBD) encouraged Denpasar City Government to use PPP scheme.

**Denah Bangunan**




**Visual Bangunan Tampak Depan**



**Visual Bangunan Tampak Atas**



## Informasi Proyek
Project Information

| | | |
|---|---|---|
| **PJPK**<br>GCA | Walikota Denpasar up Direktur BLUD RSUD Wangaya | Mayor of Denpasar c.q. Director of BLUD RSUD Wangaya |
| **Lokasi Proyek** Project Location | Kota Denpasar | Denpasar City |
| **Skema Proyek**<br>Project Scheme | *Design-Build-Finance-Operation-Support-Maintain-Transfer* (DBFOsMT) | Design-Build-Finance-Operation-Support-Maintain-Transfer (DBFOsMT) |
| **Lingkup KPBU**<br>PPP Scope | • Desain dan konstruksi bangunan Gedung rumah sakit baru, rumah duka, dan fasilitas penunjang<br>• Pengadaan alat kesehatan baru<br>• Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)<br>• Pemeliharaan bangunan dan fasilitas penunjang, alat kesehatan, dan SIMRS baru<br>• Penggantian peralatan Kesehatan<br>• *Operation Support* (OS) | • Design and construction of new hospital buildings, a funeral home, and supporting facilities;<br>• Procurement of new medical equipment;<br>• Installation of a Hospital Management Information System (SIMRS);<br>• Maintenance of buildings and supporting facilities, medical equipment, and the new SIMRS;<br>• Replacement of medical equipment; and<br>• Operation Support (OS) |
| **Mekanisme Pengambilan Investasi**<br>Investment Return Mechanism | Pembayaran Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment* (AP) | Availability Payment (AP) |
| **Estimasi Nilai Investasi**<br>Indicated Investment Value | Rp800-900 miliar | Rp800-900 billion |
| **Masa Kerja Sama**<br>Estimated Collaboration Period | 20 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) | 20 years (including 2 years of construction) |
| **Tahapan** Stages | Penyiapan | Preparation |

Sumber: Laporan Prastudi Kelayakan Awal KPBU Pengembangan RSUD Wangaya Kota Denpasar

Source: Initial Pre-Feasibility Study Report for the PPP Development of RSUD Wangaya, Denpasar City

Per 31 Desember 2025, proyek sedang dalam tahapan proses penyusunan Laporan Prastudi Kelayakan Akhir (*Final Business Case*/FBC).

Per 31 Desember 2025, proyek sedang dalam tahapan proses penyusunan Laporan Prastudi Kelayakan Akhir (Final Business Case/FBC).

## Pelaksanaan Jasa Konsultasi

Implementation of Project Development Advisory

Selain menjalankan bisnis penjaminan dan PDF, PT PII juga melakukan diversifikasi melalui pengembangan lini usaha baru berupa jasa konsultasi (PDA). PDA berfokus pada peran PT PII dalam perumusan gagasan serta penjajakan peluang bisnis, baik melalui mandat penugasan dengan skema/jenis baru maupun pelaksanaan jasa konsultasi secara langsung. Kehadiran fungsi PDA PT PII diharapkan mampu merespon kebutuhan pemilik proyek serta *stakeholders* sejak tahapan paling awal, disertai penguatan analisis-terutama terkait rancangan struktur proyek dan pembagian risiko-yang menjadi nilai tambah Perseroan serta dapat mendukung pengembangan proyek KPBU yang berpotensi menjadi *pipeline* penjaminan di masa mendatang.

In addition to carrying out its guarantee business and PDF Facility, IIGF has also carried out diversification by developing a new business line in the form of consulting (PDA) services. The PDA function focuses on IIGF's role in formulating ideas and exploring business opportunities, whether through assignment mandates under new schemes/types or through the direct provision of consulting services. The presence of IIGF's PDA function is expected to address the needs of project owners and stakeholders from the earliest stages, supported by strengthened analysis—particularly in relation to project structuring and risk allocation design—which serves as the Company's added value and can support the development of PPP projects that have the potential to become guarantee pipelines in the future.

Dalam rangka memastikan kesiapan internal dalam pelaksanaan PDA, PT PII menyusun Kajian Kesiapan yang mencakup penilaian daya saing dan kapabilitas, sekaligus pemetaan persyaratan yang perlu dipenuhi agar penyelenggaraan layanan PDA dapat dilakukan secara efektif dan optimal.

To ensure internal readiness in delivering PDA services, IIGF has prepared a Readiness Assessment Study, which includes an evaluation of competitiveness and capabilities, as well as the identification of requirements that must be fulfilled to enable the effective and optimal delivery of PDA services.

*Piloting project advisory* PT PII dimulai pada tahun 2021 melalui pendampingan sebagai *project advisor* untuk proyek Pelabuhan *New* Palembang Tanjung Carat. PT PII memperoleh penunjukan langsung dari Kementerian Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk pekerjaan dengan hasil keluaran meliputi: (i) Dokumen Identifikasi Proyek, (ii) Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesiapan Data Dukung untuk Studi Pendahuluan Proyek, dan (iii) Studi Pendahuluan Pelabuhan Tanjung Carat. Selain itu, saat ini PDA dalam proses menggali beberapa potensi jasa pendampingan maupun kerjasama bentuk lainnya dengan pihak baik dari sisi BUMN maupun swasta. Informasi kegiatan *advisory* PT PII sepanjang tahun 2021-2025 antara lain:

1. Penyusunan Pedoman Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU.
2. Pendampingan Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut pada proses pengajuan dan perolehan penugasan *Project Development Facility* (PDF) Proyek KPBU Pelabuhan Tanjung Carat.

The piloting of IIGF's advisory services began in 2021 through its role as a project advisor for the New Palembang (Tanjung Carat) Port Project. IIGF received a direct appointment from the Ministry of Transportation c.q. the Director General of Sea Transportation, for conducting works with deliverables including: (i) Project Identification Document, (ii) Evaluation of Supporting Data Readiness for the Preliminary Study, and (iii) Preliminary Study of Tanjung Carat Port. In addition, the PDA is currently exploring several potential advisory services and other forms of collaboration with both SOEs and private sector entities. IIGF's advisory activities during the 2021–2025 period include:

1. Preparation of Pre-Feasibility Study Guidelines for road and bridge projects under the PPP scheme.
2. Assistance to the Ministry of Transportation c.q. the Director General of Sea Transportation in the application and approval process for the Project Development Facility (PDF) for the Tanjung Carat Port PPP Project.

3. Pendampingan Kementerian Keuangan dalam penyusunan konsep dan penerbitan kerangka regulasi terkait penugasan fasilitasi bentuk baru dalam pengelolaan BMN di wilayah ibu kota negara Lama.
4. Jasa Konsultansi Proyek Pengembangan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar melalui penyusunan kajian hukum & kelembagaan, analisis struktur, analisis risiko, dan mekanisme de-*risking* Proyek.
5. Pendampingan Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada *Project Investment Project Ready to Offer* (IPRO) *Challenge* 2025.
6. Pendampingan Bank Indonesia Sulawesi Utara pada Project North Sumatera Investment Challenge 2025 (NSIC 2025).
7. Pendampingan Bank Indonesia Sibolga pada *Project Investment Challenge* 2025.

3. Assistance to the Ministry of Finance in developing concepts and issuing regulatory frameworks related to new forms of facilitation assignments for the management of state-owned assets (BMN) in the former capital area.
4. Consulting services for the Container Terminal Development Project at Batu Ampar Port through the preparation of legal and institutional studies, structural analysis, risk analysis, and project de-risking mechanisms.
5. Bank Indonesia of South Kalimantan Assistance in the Investment Project Ready to Offer (IPRO) Challenge 2025.
6. Pendampingan Bank Indonesia Sulawesi Utara pada Project North Sumatera Investment Challenge 2025 (NSIC 2025).
7. Pendampingan Bank Indonesia Sibolga pada *Project Investment Challenge* 2025.

# Segmen Pengelolaan Dana
Fund Management

## Kegiatan Operasi dan Usaha Pengelolaan Dana
Operations and Fund Management Business Activities

Dalam segmen Pengelolaan Dana, Perseroan melakukan kegiatan penempatan dana pada instrumen keuangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, di antaranya meliputi instrumen investasi pasar uang, obligasi, dan reksa dana dengan bobot penempatan yang dinamis dilakukan penyesuaian dengan kondisi pasar yang ada untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan risiko yang terukur.

In the Fund Management segment, the Company carries out fund placement activities in financial instruments as stipulated under applicable regulations, including money market instruments, bonds, and mutual funds, with allocation weights dynamically adjusted to market conditions in order to achieve optimal returns with measured risk.

Adapun sumber pendapatan usaha PT PII berasal dari aktivitas penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*/PDF), serta dari aktivitas pengelolaan dana. Aktivitas pengelolaan dana ini merupakan pendukung proses kegiatan penjaminan dan PDF yang merupakan bisnis inti PT PII. Selain melakukan pengelolaan portofolio instrumen investasi, fungsi pengelolaan dana yang dilakukan meliputi pengelolaan likuiditas keuangan Perseroan dan menjaga kapasitas penjaminan oleh Perseroan.

IIGF's operating revenue is derived from guarantee activities, project preparation and transaction advisory (Project Development Facility/PDF), as well as fund management activities. The fund management function serves to support the guarantee and PDF processes, which constitute IIGF's core business. In addition to managing investment portfolios, the fund management function also includes managing the Company's financial liquidity and maintaining the Company's guarantee capacity.

# Kebijakan Strategis dan Produktivitas Pengelolaan Dana
Strategic Policy and Fund Management Productivity

## Pengelolaan Dana
Investment

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan dana yang lebih adaptif dan mempertimbangkan risiko likuiditas pembayaran klaim untuk mengoptimalkan imbal hasil pengelolaan dana.

The Company implements more adaptive investment strategy and considers the risk of claim payment liquidity to optimize investment return.

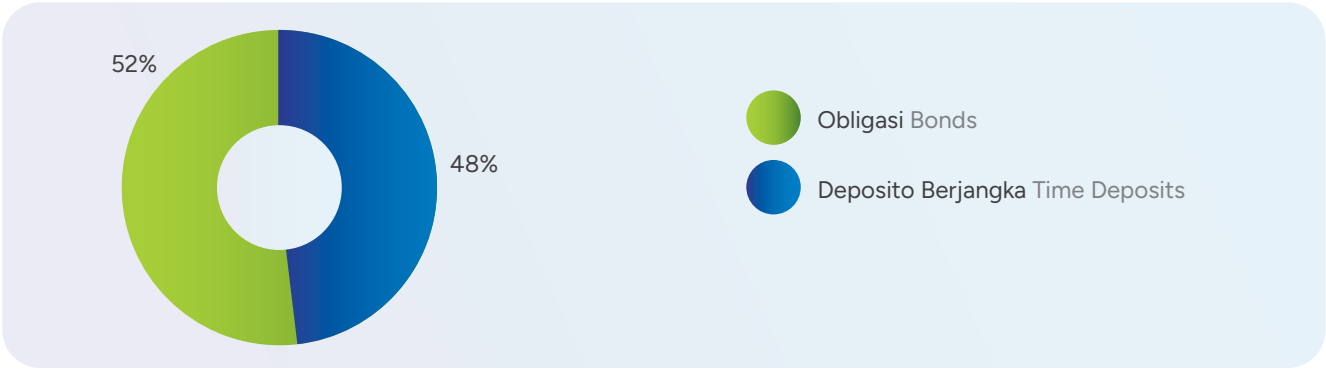
Strategi Perseroan dalam pengelolaan dana dalam bentuk investasi adalah sebagai berikut:
1. Alokasi investasi sesuai Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp995 Miliar, telah mengikuti sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 148/PMK.08/2022.
2. Mengoptimalkan penempatan pada deposito berjangka sesuai dengan kebijakan dan limit yang telah ditetapkan dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga.

The Company's investment strategy in fund management is as follows:
1. Investment allocation in accordance with the 2025 Budget, aimed at achieving the Key Performance Indicator (KPI) target of Rp995 billion, has complied with the provisions stipulated in PMK No. 148/PMK.08/2022.
2. Optimizing placements in time deposits in accordance with established policies and limits, while continuously considering interest rate movement trends.

Portofolio investasi Perseroan per 31 Desember 2025 terdiri dari investasi pada deposito berjangka (48%) dan investasi pada pendapatan tetap (obligasi) (52%) dari total pengelolaan dana sebesar Rp17,1 triliun.

As of 31 December 2025, the Company's investment portfolio consists of time deposits (48%) and fixed income investments (bonds) (52%), with a total fund under management of Rp17.1 trillion.

### Grafik Portofolio Investasi Posisi 31 Desember 2025
Graph of Investment Portfolio Position as of 31 December 2025




## Investasi pada deposito berjangka
Investment in Time Deposits

Investasi dalam bentuk deposito berjangka pada setiap Bank Pemerintah tidak melebihi 25% dari jumlah modal Perseroan; dan pada setiap Bank di luar Bank Pemerintah tidak melebihi 10% dari jumlah modal Perseroan, di mana penempatan dapat dilakukan pada Bank dengan minimal peringkat AA.

Investments in the form of time deposits at each State-Owned Bank shall not exceed 25% of the Company's total capital, and at each non-state-owned bank shall not exceed 10% of the Company's total capital. Placements are made in banks categorized with a minimum rating of AA.

## Investasi pada pendapatan tetap
Investment in Fixed Income Instruments

Penempatan investasi pada pendapatan tetap dalam bentuk obligasi pada setiap emiten untuk surat utang korporasi dan sukuk korporasi tidak melebihi 5% dari jumlah modal Perseroan dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah modal Perseroan.

Investment in Fixed Income Instruments placements in the form of bonds, including corporate bonds and corporate sukuk, for each issuer shall not exceed 5% of the Company's total capital, and in aggregate shall not exceed 20% of the Company's total capital.

Pada bulan Oktober 2022, Pemerintah menerbitkan PMK 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang berlaku efektif pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan berlakunya PMK tersebut, maka PMK 95/PMK.08/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

In October 2022, the Government issued PMK No. 148/PMK.08/2022 concerning the Scope of Government Guarantee Management by Infrastructure Guarantee Companies, which became effective on 20 October 2022. With the enactment of this regulation, PMK No. 95/PMK.08/2017 was revoked and declared no longer valid.

Seluruh penempatan investasi pengelolaan dana Perseroan per 31 Desember 2025 telah sesuai dengan batas koridor ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 148/PMK.08/2022.

All of the Company's fund management investment placements as of 31 December 2025 have complied with the regulatory limits stipulated under PMK No. 148/PMK.08/2022.

# Segmen Lainnya
Other Segments

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) secara berkelanjutan mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan terkait penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat peran PT PII sebagai BUMN penggerak utama yang berperan aktif dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

In order to support the development of the infrastructure ecosystem, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund continuously promotes the enhancement of understanding and capacity of stakeholders related to infrastructure project delivery in Indonesia. This effort aims to strengthen IIGF's role as a SOE acting as a key driver that is actively contributing to the acceleration of sustainable infrastructure development to improve the quality of life of the community.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur menunjukkan tren yang semakin meningkat. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan kapasitas teknis, pemahaman kebijakan, serta kesiapan institusional masih menjadi tantangan signifikan, khususnya dalam implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

In line with the Government's policy to accelerate infrastructure development through the utilization of alternative financing schemes, private sector participation in infrastructure provision has shown a growing trend. However, challenges remain, particularly in terms of limited technical capacity, policy understanding, and institutional readiness, which continue to pose significant obstacles, especially in the implementation of the Public-Private Partnership (PPP) scheme.

Menjawab tantangan tersebut, PT PII menempatkan pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai salah satu pilar strategis Perseroan melalui pembentukan IIGF Institute. Inisiatif ini merupakan upaya strategis PT PII untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan melalui diseminasi pengetahuan, peningkatan pemahaman kebijakan, serta penguatan praktik perencanaan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur berbasis KPBU.

In response to these challenges, IIGF has positioned infrastructure ecosystem development as one of its strategic pillars through the establishment of the IIGF Institute. This initiative represents a strategic effort by IIGF to strengthen stakeholder capacity through knowledge dissemination, enhancement of policy understanding, and the reinforcement of planning and implementation practices for PPP-based infrastructure provision.

Sebagai lembaga *think tank* Perseroan, IIGF Institute berperan dalam mendorong terciptanya ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik melalui dukungan program edukasi dan riset yang berkualitas, serta penguatan kolaborasi dengan mitra strategis. Untuk merealisasikan peran tersebut, kegiatan IIGF Institute difokuskan pada Edukasi, Riset dan Publikasi, Advokasi Kebijakan, serta *Outreach*, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

As the Company's think tank, the IIGF Institute plays a role in fostering a better infrastructure development ecosystem through high-quality education and research programs, as well as strengthening collaboration with strategic partners. To realize this role, the activities of the IIGF Institute are focused on Education, Research and Publication, Policy Advocacy, and Outreach, as part of a continuous effort to support the development of competitive and sustainable national infrastructure.

## Edukasi
Education

Pada tahun 2025, IIGF Institute menempatkan stream edukasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan kreatif infrastruktur, sejalan dengan dinamika kebijakan fiskal, kebutuhan pembiayaan daerah, serta kompleksitas proyek KPBU yang semakin berkembang. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan program sertifikasi, IIGF Institute berperan aktif sebagai *knowledge enabler* dan *learning hub* bagi pemangku kepentingan infrastruktur di tingkat pusat maupun daerah.

In 2025, the IIGF Institute positioned the education stream as a strategic instrument to strengthen the creative infrastructure financing ecosystem, in line with evolving fiscal policies, regional financing needs, and the increasing complexity of PPP projects. Through various capacity building and certification programs, the IIGF Institute plays an active role as a knowledge enabler and learning hub for infrastructure stakeholders at both the central and regional levels.

Fokus utama program edukasi tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lintas sektor, khususnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta mitra strategis lainnya. Program *capacity building* tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang dialog strategis untuk menyelaraskan kebijakan, kesiapan institusional, serta pemahaman teknis pemangku kepentingan terhadap skema pembiayaan kreatif dan KPBU.

The main focus of the 2025 education programs was directed toward enhancing the capacity of cross-sector stakeholders, particularly Ministries/Agencies, Regional Governments, SOEs/BUMDs, and other strategic partners. These capacity building programs serve not only as a means of knowledge dissemination, but also as a strategic dialogue platform to align policies, institutional readiness, and stakeholders' technical understanding of creative financing schemes and PPPs.

Dalam pelaksanaannya, IIGF Institute secara aktif memperkuat kolaborasi lintas unit internal PT PII dengan pendekatan *demand-driven*, menyesuaikan kebutuhan substansi dan pendalaman teknis sesuai dengan dinamika proyek dan permintaan pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan *Capacity Building*. Sinergi lintas unit ini memastikan bahwa materi edukasi dan diseminasi pengetahuan yang disampaikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga selaras dengan praktik bisnis, pengalaman lapangan, serta kebutuhan aktual pengembangan proyek infrastruktur.

In its implementation, the IIGF Institute actively strengthens cross-unit collaboration within IIGF through a demand-driven approach, adjusting to the substance and depth of technical materials to project dynamics and stakeholder needs across various capacity building activities. This cross-unit synergy ensures that the educational materials and knowledge dissemination delivered are not only conceptual, but also aligned with business practices, field experience, and the actual needs of infrastructure project development.

Di sisi eksternal, kolaborasi dijalin dengan mitra strategis seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, jejaring akademisi dan praktisi yang memiliki pengalaman

In terms of external aspect, collaboration is established with strategic partners such as the Ministry of National Development Planning (Bappenas), the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, Regional Governments, as

relevan dalam perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan pembiayaan kreatif nasional, sekaligus memperkuat kapasitas institusional pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek yang *bankable* dan berkelanjutan.

Dalam perannya sebagai *knowledge hub* dan *knowledge* partner, IIGF Institute terlibat aktif dalam berbagai program *capacity building* kementerian teknis, termasuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum Bimbingan Teknis Pembiayaan Infrastruktur Tingkat *Intermediate* bagi pegawai DJPI Kementerian PUPR dalam kerangka *Executive Development Program* (EDP) PT PII Tahun 2025. Program ini dirancang dengan kurikulum yang menyeluruh dan aplikatif, selaras dengan praktik terbaik pembiayaan infrastruktur dan tantangan nyata implementasi KPBU.

Pembelajaran dari program tersebut menjadi rujukan penting bagi pengembangan kurikulum *capacity building* IIGF Institute ke depan, guna memastikan pendekatan yang terintegrasi, bertahap, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung terbentuknya *pipeline* proyek KPBU yang berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Rangkaian kegiatan *capacity building* yang dilaksanakan selama tahun 2025 menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, serta mencakup spektrum topik dari level pengenalan hingga pendalaman teknis. Daftar kegiatan *capacity building* sepanjang tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut menunjukkan skala, variasi, dan jangkauan intervensi IIGF Institute dalam mendukung penguatan kapasitas pembiayaan infrastruktur nasional.

well as networks of academics and practitioners with relevant experience in infrastructure project planning and implementation. This collaboration serves as a critical foundation in supporting the development of national creative financing, while also strengthening the institutional capacity of regional governments in preparing bankable and sustainable projects.

In its role as a knowledge hub and knowledge partner, the IIGF Institute is actively involved in various capacity building programs of technical ministries, including the development and implementation of the Intermediate-Level Infrastructure Financing Technical Guidance curriculum for employees of the Directorate General of Infrastructure Financing (DJPI), Ministry of Public Works and Housing (PUPR), within the framework of IIGF's Executive Development Program (EDP) 2025. This program is designed with a comprehensive and practical curriculum, aligned with best practices in infrastructure financing and the real challenges of PPP implementation.

Lessons learned from this program serve as an important reference for the future development of the IIGF Institute's capacity building curriculum, ensuring an approach that is integrated, progressive, and responsive to stakeholder needs, while supporting the development of a high-quality, sustainable PPP project pipeline aligned with national development policies.

The series of capacity building activities carried out throughout 2025 had been tailored to the needs of stakeholders at both the central and regional levels, covering a broad spectrum of topics ranging from introductory to advanced technical levels. The list of capacity building activities throughout 2025, as presented in the following table, demonstrates the scale, diversity, and reach of the IIGF Institute's interventions in strengthening national infrastructure financing capacity.

| No. | Tanggal<br>Date | Nama Kegiatan<br>Activity Name | Jumlah Peserta<br>Total Participants |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 Februari 2025<br>4 February 2025 | *Guest Lecture* PKN STAN Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan (Manajemen Keuangan untuk Kekayaan Negara Dipisahkan)<br>Guest Lecture at PKN STAN for Applied Undergraduate Program in Public Asset Management, course: Financial Statement Analysis (Financial Management for Separated State Assets) | 40 |
| 2. | 6 Februari 2025<br>6 February 2025 | CB Transaksi APJ Kab Bandung<br>CB on Transaction for Street Lighting (APJ) – Bandung Regency | 15 |

| No. | Tanggal<br>Date | Nama Kegiatan<br>Activity Name | Jumlah Peserta<br>Total Participants |
|---|---|---|---|
| 3. | 19 Februari 2025<br>19 February 2025 | CB Skema KPBU Sektor Migas di Lingkungan ASN Kementerian ESDM bekerja sama dengan Badan Arbitrase Sengketa Energi Indonesia<br>CB on PPP Scheme in the Oil and Gas Sector for civil servants at the Ministry of Energy and Mineral Resources, in collaboration with the Indonesian Energy Dispute Arbitration Board | 50 |
| 4. | 27 – 28 Februari 2025<br>27-28 February 2025 | Pelatihan Evaluasi Investasi Pemerintah oleh BPPK<br>Government Investment Evaluation Training by BPPK | 50 |
| 5. | 15 April 2025<br>15 April 2025 | CB *Value for Money* dengan PT Baja Titian Utama<br>CB on Value for Money with PT Baja Titian Utama | 30 |
| 6. | 23 April 2025<br>23 April 2025 | CB Sosialisasi Skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Malang<br>CB on PPP Scheme Dissemination for Regional Infrastructure Provision with the Government of Malang Regency | 40 |
| 7. | 23 April 2025<br>23 April 2025 | CB Sosialisasi KPBU Proyek RSUD dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo<br>CB on PPP Dissemination for RSUD Project with the Government of Boalemo Regency | 20 |
| 8. | 23 April 2025<br>23 April 2025 | CB Sosialisasi KPBU Proyek APJ dengan Pemerintah Kabupaten Brebes<br>CB on PPP Dissemination for APJ Project with the Government of Brebes Regency | 30 |
| 9. | 28 – 29 April 2025<br>28 – 29 April 2025 | CB Sosialisasi KPBU Proyek RSUD dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Malang<br>CB on PPP Dissemination for RSUD Project with the Regecny Government and DPRD of Malang | 40 |
| 10. | 30 April 2025<br>30 April 2025 | Program SINERGI Tahap 1a oleh DJPK Kemenkeu terkait Diseminasi Pembiayaan Kreatif dalam Percepatan Infrastruktur Daerah<br>SINERGI Program Phase 1a by DJPK of the Ministry of Finance on the Dissemination of Creative Financing for Accelerating Regional Infrastructure | 500 |
| 11. | 9 Mei 2025<br>9 May 2025 | CB Sosialisasi KPBU Proyek APJ dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut<br>CB on PPP Dissemination for APJ Project with the Government of Tanah Laut Regency | 40 |
| 12. | 27 Mei 2025<br>27 May 2025 | Program SINERGI Tahap 1b oleh DJPK Kemenkeu terkait Diseminasi Pembiayaan Kreatif dalam Percepatan Infrastruktur Daerah<br>SINERGI Program Phase 1b by DJPK of the Ministry of Finance on the Dissemination of Creative Financing for Accelerating Regional Infrastructure | 400 |
| 13. | 11 Juni 2025<br>11 June 2025 | CB KPDBU Proyek APJ Kabupaten Klaten<br>CB on KPDBU of APJ Project in Klaten Regency | 30 |
| 14. | 19 Juni 2025<br>19 June 2025 | Sosialisasi Akselerasi Pembangunan Daerah Melalui KPDBU dengan Implementasi Prinsip Syariah bekerja sama dengan KNEKS<br>Dissemination on Regional Development Acceleration through KPDBU with Sharia Principles Implementation, in collaboration with KNEKS | 200 |
| 15. | 25 Juni 2025<br>25 June 2025 | Program SINERGI Tahap 1c oleh DJPK Kemenkeu terkait Diseminasi Pembiayaan Kreatif dalam Percepatan Infrastruktur Daerah<br>SINERGI Program Phase 1c by DJPK of the Ministry of Finance on the Dissemination of Creative Financing for Accelerating Regional Infrastructure | 400 |
| 16. | 18 Juli 2025<br>18 July 2025 | *Capacity Building*: Konsep Dasar Evaluasi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek KPBU RSUD Kanjuruhan<br>Capacity Building: Basic Concepts of Economic and Financial Feasibility Evaluation for the PPP Project of RSUD Kanjuruhan | 50 |
| 17. | 22 Juli 2025<br>22 July 2025 | CB KPDBU Proyek APJ Kabupaten Sleman<br>CB on KPDBU of APJ Project in Sleman Regency | 50 |
| 18. | 22 Agustus 2025<br>22 August 2025 | Peningkatan Layanan Infrastruktur Daerah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) dengan Pemerintah Kota Metro Lampung<br>Improving Regional Infrastructure Services through Regional PPP (KPDBU) Scheme with the Government of Metro City, Lampung | 20 |
| 19. | 10 September 2025<br>10 September 2025 | Program SINERGI Tahap 2 oleh DJPK Kemenkeu terkait Diseminasi Pembiayaan Kreatif dalam Percepatan Infrastruktur Daerah Wilayah Jawa Timur<br>SINERGI Program Phase 2 by DJPK of the Ministry of Finance on the Dissemination of Creative Financing for Accelerating Regional Infrastructure in East Java Region | 40 |

| No. | Tanggal<br>Date | Nama Kegiatan<br>Activity Name | Jumlah Peserta<br>Total Participants |
|---|---|---|---|
| 20. | 15 September 2025<br>15 September 2025 | CB Skema KPBU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta<br>CB on PPP Scheme for the Coordinating Ministry for Economic Affairs in Jakarta | 20 |
| 21. | 17 September 2025<br>17 September 2025 | Program SINERGI Tahap 2 oleh DJPK Kemenkeu terkait Diseminasi Pembiayaan Kreatif dalam Percepatan Infrastruktur Daerah Wilayah Jawa Tengah<br>SINERGI Program Phase 2 by DJPK of the Ministry of Finance on the Dissemination of Creative Financing for Accelerating Regional Infrastructure in Central Java Region | 60 |
| 22. | 18 September 2025<br>18 September 2025 | Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Wilayah Timur Indonesia<br>Dissemination on Regional Creative Financing for Eastern Indonesia Region | 50 |
| 23. | 30 September 2025<br>30 September 2025 | Program SINERGI Tahap 2 oleh DJPK Kemenkeu terkait Diseminasi Pembiayaan Kreatif dalam Percepatan Infrastruktur Daerah Wilayah Jawa Barat<br>SINERGI Program Phase 2 by DJPK of the Ministry of Finance on the Dissemination of Creative Financing for Accelerating Regional Infrastructure in West Java Region | 25 |
| 24. | 16 Oktober 2025<br>16 Oktober 2025 | CB Skema KPBU dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Mamasa<br>CB on PPP Scheme for Infrastructure Development with the Government of Mamasa Regency | 40 |
| 25. | 20 – 25 Oktober 2025<br>20 – 25 Oktober 2025 | Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Tingkat *Intermediate* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum<br>Technical Guidance for Competency Development in Infrastructure Financing (Intermediate Level) within the Ministry of Public Works | 20 |
| 26. | 6 November 2025<br>6 November 2025 | CB Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur daerah di Padang Sumatera Barat<br>CB on Dissemination of Creative Financing for Regional Infrastructure in Padang, West Sumatra | 100 |
| 27. | 20 – 21 November 2025<br>20 – 21 November 2025 | CB Skema KPBU di lingkungan Kementerian Dalam Negeri<br>CB on PPP Scheme within the Ministry of Home Affairs | 20 |

Selain *capacity building*, IIGF Institute juga secara konsisten memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang KPBU melalui program sertifikasi *Certified* PPP *Professional* (CP3P). Sejak ditetapkan sebagai Accredited Training Organization (ATO) APMG International pada tahun 2019, IIGF Institute menjadi rujukan nasional dalam penyediaan sertifikasi KPBU berstandar internasional yang dikembangkan oleh Multilateral Development Banks (MDBs), termasuk World Bank Group, Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Inter-American Development Bank (IDB).

Program CP3P dirancang untuk membangun kompetensi profesional KPBU secara komprehensif dan berjenjang, mulai dari level pemahaman dasar hingga kemampuan eksekusi proyek. Selain meningkatkan kompetensi teknis peserta, sertifikasi ini juga berperan dalam memperluas jejaring profesional lintas sektor dan lintas negara, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, dan implementasi proyek KPBU di Indonesia.

In addition to capacity building, the IIGF Institute consistently strengthens human resource capacity in the PPP sector through the Certified PPP Professional (CP3P) certification program. Since being designated as an Accredited Training Organization (ATO) by APMG International in 2019, the IIGF Institute has become a national reference for delivering internationally recognized PPP certification developed by Multilateral Development Banks (MDBs), including the World Bank Group, Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), and Inter-American Development Bank (IDB).

The CP3P program is designed to build comprehensive and tiered PPP professional competencies, ranging from foundational understanding to project execution capabilities. In addition to enhancing participants' technical competencies, this certification also helps expand cross-sectoral and international professional networks, thereby directly contributing to improving the quality of planning, preparation, and implementation of PPP projects in Indonesia.

Tahun 2025, ATO PT PII (Persero) telah menyelenggarakan sebanyak 7 program sertifikasi CP3P *Level Foundation*, 1 program sertifikasi CP3P Level Preparation, dan 1 program Sertifikasi CP3P *Level Execution* yang diikuti oleh 113 peserta dari berbagai latar belakang instansi, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, serta konsultan. Seluruh program dilaksanakan secara luring, dengan tingkat kelulusan rata-rata seluruh *batch* mencapai 89%, yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan serta kesiapan peserta dalam memenuhi standar kompetensi internasional CP3P. Capaian keseluruhan program CP3P sejak pertama beroperasi hingga tahun 2025 menjadikan ATO PT PII sebagai lembaga terakreditasi terkemuka di dunia untuk APMG PPP *Certification Program*. Menurut *survey* APMG International, ATO PT PII menduduki peringkat kedua di dunia sebagai afiliasi APMG yang mencetak rekor jumlah champion PPP terakdreditasi terbanyak (*source*: LinkedIn APMG's *Public-Private Partnerships Certification Program*). Oleh karena itu, PT PII menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang memainkan peran strategis dalam membentuk infrastruktur berkelanjutan di Indonesia maupun di tingkat global.

In 2025, IIGF's ATO held 7 (seven) CP3P Foundation Level certification programs, one CP3P Preparation Level certification program, and one CP3P Execution Level certification program, attended by 113 participants from various agencies, including the Central Government, Regional Governments, Business Entities, and consultants. All programs were conducted offline, with an average pass rate of 89% for all batches, reflecting the effectiveness of the program and the participants' readiness to meet the international CP3P competency standards. The overall achievements of CP3P program, from its inception until 2025, established IIGF's ATO as the world's leading accredited institution for APMG PPP Certification Program. According to an APMG International survey, IIGF's ATO ranked second globally as an APMG affiliate with the highest number of accredited PPP champions (source: LinkedIn APMG's Public-Private Partnerships Certification Program). Therefore, IIGF is part of the development ecosystem that plays a strategic role in shaping sustainable infrastructure in Indonesia and globally.

Rincian pelaksanaan program CP3P tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Details of the implementation of CP3P program in 2025 are presented in the following table.

| No. | Kegiatan<br>Activity | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | *Venue* | Peserta<br>Participant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP3P Level Foundation Batch 20 | Course: 11-13 Maret 2025<br>Refreshment: 18 Maret 2025<br>Ujian: 19 Maret 2025<br>Course: 11–13 March 2025<br>Refreshment: 18 March 2025<br>Exam: 19 March 2025 | Course: Main Hall PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Main Hall PT PII<br>Course: Main Hall of IIGF<br>Refreshment and Exam: Main Hall of IIGF | 13 orang<br>*In-house* Training PT PLN Indonesia Power<br>13 participants<br>In-house Training of PT PLN Indonesia Power |
| 2 | CP3P Level Foundation Batch 21 | Course: 21 – 25 April 2025<br>Refreshment: 5 Mei 2025<br>Ujian: 6 Mei 2025<br>Course: 21–25 April 2025<br>Refreshment: 5 May 2025<br>Exam: 6 May 2025 | Course: Main Hall dan Jurnal 3 PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Aston Bintaro Hotel & Conference Center<br>Course: Main Hall and Jurnal 3 of IIGF<br>Refreshment and Exam: Aston Bintaro Hotel & Conference Center | 15 orang<br>*In-house Training* karyawan PT PII (Persero)<br>15 participants<br>In-house Training of IIGF's employees |
| 3 | CP3P Level Foundation Batch 22 | Course: 6-8 Mei 2025<br>Refreshment: 22 Mei 2025<br>Ujian: 23 Mei 2025<br>Course: 6–8 May 2025<br>Refreshment: 22 May 2025<br>Exam: 23 May 2025 | Gedung B Ruang Rapat Kompeten, Kantor PT Jasamarga Pusat<br>Building B, Kompeten Meeting Room of PT Jasa Marga Head Office | 10 orang<br>PT Jasa Marga<br>10 participants<br>PT Jasa Marga |
| 4 | CP3P Level Preparation Batch 6 | Course: 7 – 11 Juli 2025<br>Refreshment: 21 Juli 2025<br>Ujian: 22 Juli 2025<br>Course: 7–11 July 2025<br>Refreshment: 21 July 2025<br>Exam: 22 July 2025 | Course: Jurnal 3 PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Hotel Pullman Jakarta<br>Course: Jurnal 3 of IIGF<br>Refreshment and Exam: Pullman Jakarta Hotel | 8 orang<br>PT SMI, PT Jasa Marga, PT MRT, dan PT Bukaka Teknik Utama Tbk<br>8 participants<br>PT SMI, PT Jasa Marga, PT MRT, and PT Bukaka Teknik Utama Tbk |

| No. | Kegiatan<br>Activity | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | *Venue* | Peserta<br>Participant |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CP3P Level Foundation Batch 23 | Course: 14 – 16 Juli 2025<br>Refreshment: 23 Juli 2025<br>Ujian: 24 Juli 2025<br>Course: 14–16 July 2025<br>Refreshment: 23 July 2025<br>Exam: 24 July 2025 | Course: Main Hall PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Mangkuluhur ArtotelRefreshment dan Ujian: Hotel Mangkuluhur Artotel Suites Jakarta<br>Course: Main Hall of IIGF<br>Refreshment and Exam: Mangkuluhur Artotel<br>Refreshment and Exam: Hotel Mangkuluhur Artotel Suites Jakarta | 13 orang<br>Karyawan PT PII (Persero), BPKP, PT MRT, dan Kementerian PPN/ Bappenas<br>13 participants<br>Employees of IIGF, BPKP, PT MRT, and the Ministry of National Development Planning/ Bappenas |
| 6 | CP3P Level Foundation Batch 24 | Course: 7 – 9 Oktober 2025<br>Refreshment: 13 Oktober 2025<br>Ujian: 14 Oktober 2025<br>Course: 7–9 October 2025<br>Refreshment: 13 October 2025<br>Exam: 14 October 2025 | Course: Jurnal 3 PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Hotel Ayana Midplaza Jakarta<br>Course: Jurnal 3 of IIGF<br>Refreshment and Exam: Ayana Midplaza Jakarta Hotel | 9 orang<br>*In-House Training* PT Baja Titian Utama<br>9 participants<br>In-house Training of PT Baja Titian Utama |
| 7 | CP3P Level Foundation Batch 25 | Course: 14 – 16 Oktober 2025<br>Refreshment: 20 Oktober 2025<br>Ujian: 21 Oktober 2025<br>Course: 14–16 October 2025<br>Refreshment: 20 October 2025<br>Exam: 21 October 2025 | Course: Jurnal 3 PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Hotel Ayana Midplaza Jakarta<br>Course: Jurnal 3 of IIGF<br>Refreshment and Exam: Ayana Midplaza Jakarta Hotel | 8 orang<br>PT IIF, PT MRT, PT Jasa Marga, Pemerintah Kabupaten Kab. Malang<br>8 orang<br>PT IIF, PT MRT, PT Jasa Marga, Pemerintah Kabupaten Kab. Malang |
| 8 | CP3P Level Execution Batch 3 | Course: 3 – 7 November 2025<br>Refreshment: 17 November 2025<br>Ujian: 18 November 2025<br>Course: 3 – 7 November 2025<br>Refreshment: 17 November 2025<br>Ujian: 18 November 2025 | Course: Jurnal 3 dan Main Hall PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Hotel Mercure Jakarta<br>Course: Jurnal 3 dan Main Hall PT PII<br>Refreshment dan Ujian: Hotel Mercure Jakarta | 9 orang<br>(Karyawan internal PT PII, PT Jasa Marga, KPMG)<br>9 participants<br>(Karyawan internal PT PII, PT Jasa Marga, KPMG) |
| 9 | CP3P Level Foundation Batch 26 | Course: 8 – 10 Desember 2025<br>Refreshment: 11 Desember 2025<br>Ujian: 12 Desember 2025<br>Course: 8–10 December 2025<br>Refreshment: 11 December 2025<br>Exam: 12 December 2025 | Hotel Harper MT Haryono Cawang, Jakarta<br>Harper MT Haryono Cawang Hotel, Jakarta | 28 orang<br>(*In-House Training* Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Pemda Palembang, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Bitung)<br>28 participants<br>(In-house Training of Ministry of National Development Planning/ Bappenas, DKI Jakarta Provincial Government, Palembang City Regional Government, Semarang City Government, Palembang City Government, Balikpapan City Government, and Bitung City Government) |

Selain pelaksanaan *capacity building* dan sertifikasi CP3P, IIGF Institute juga mengembangkan pembelajaran berbasis *e-learning* sebagai bagian dari penguatan *learning ecosystem* KPBU yang berkelanjutan. Pengembangan *e-learning* yang dapat diakses melalui *website* IIGF Institute ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan pembelajaran yang lebih terstruktur, *scalable*, dan dapat diakses secara digital dan masif, sekaligus melengkapi pendekatan pembelajaran yang selama ini masih didominasi oleh format klasikal.

In addition to implementing capacity building and CP3P certification, IIGF Institute is also developing e-learning-based learning as part of strengthening the sustainable PPP learning ecosystem. The development of e-learning, accessible through IIGF Institute website aims to address the need for more structured, scalable, and digitally accessible learning, while complementing the learning approach currently dominated by traditional formats.

Pada tahun 2025, IIGF Institute menyusun dan mengembangkan dua topik utama *e-learning*, yaitu Manajemen Risiko dalam Proyek KPBU serta Penjaminan Pemerintah melalui PT PII Kedua topik ini dipilih karena merupakan fondasi kunci dalam meningkatkan *bankability* proyek KPBU serta menjadi isu yang paling banyak muncul dalam berbagai kegiatan *capacity building* dan pendampingan proyek.

In 2025, IIGF Institute developed two main e-learning topics: Risk Management in PPP Projects and Government Guarantees through Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF). These two topics were chosen because they are key foundations for improving PPP project bankability and are the most frequently raised issues in various capacity building and project mentoring activities.

| No. | Judul Topik *E-Learning*<br>E-Learning Topic Title | Penjelasan Modul<br>Module Explanation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Risiko dalam Proyek KPBU<br>Risk Management in PPP Projects | Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar risiko dalam proyek KPBU, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga alokasi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Materi disusun secara sistematis dan aplikatif, dilengkapi dengan ilustrasi kasus proyek infrastruktur serta melaui pendekatan diskusi interaktif antara host dan narasumber. Pendekatan ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas kontraktual, melainkan elemen inti dalam perencanaan dan pengendalian proyek KPBU. | This module is designed to provide a comprehensive understanding of the basic concepts of risk in PPP projects, from identification, analysis, evaluation, and risk allocation to the most capable party. The material is structured systematically and in an applicable manner, complemented by illustrations from infrastructure projects and interactive discussions between the host and the resource person. This approach emphasizes that risk management is not merely a contractual formality but a core element in PPP project planning and control. |
| 2 | Penjaminan Pemerintah melalui PT PII<br>Government Guarantee through Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) | Modul ini difokuskan pada pemahaman peran strategis penjaminan pemerintah dalam mengelola risiko dari sisi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan investor. Materi mencakup rasional perlunya penjaminan, mekanisme dan proses penjaminan, peran PT PII sebagai *Single Window Policy*, serta kontribusi penjaminan terhadap peningkatan *bankability* proyek KPBU. Modul ini juga menampilkan praktik pendampingan PT PII sepanjang siklus proyek serta studi kasus proyek KPBU daerah, yang menunjukkan bagaimana penjaminan mampu mempercepat pencapaian *financial close* dan memperkuat keberlanjutan proyek. | This module focuses on understanding the strategic role of government guarantees in managing government risk and enhancing investor confidence. The material covers the rationale for guarantees, the guarantee mechanism and process, the role of IIGF as a Single Window Policy, and the guarantee's contribution to improving bankability of PPP projects. The module also showcases IIGF's mentoring practices throughout the project cycle and case studies of regional PPP projects, demonstrating how guarantees can accelerate financial close and strengthen project sustainability. |

Pengembangan kedua modul *e-learning* tersebut menjadi pelengkap strategis bagi program edukasi IIGF Institute, sekaligus berfungsi sebagai entry point pembelajaran bagi pemangku kepentingan yang berada pada *level awareness*. Ke depan, e-learning ini diharapkan menjadi bagian dari *learning pathway* IIGF Institute yang terintegrasi melalui pelatihan tematik dan blended learning. Dengan pendekatan tersebut, IIGF Institute dapat terus mendukung penguatan kapasitas SDM KPBU secara berjenjang dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.

The development of these two e-learning modules is a strategic complement to the IIGF Institute's educational program and serves as a learning entry point for stakeholders at the awareness level. Going forward, this e-learning is expected to become part of the IIGF Institute's integrated learning pathway through thematic training and blended learning. With this approach, IIGF Institute can continue to support the gradual strengthening of PPP human resource capacity in line with the direction of national infrastructure development policy.

## Riset
Research

Sepanjang tahun 2025, rincian kegiatan riset PT PII adalah sebagai berikut:

In 2025, IIGF's research activities were as follows:

### Riset Kebijakan

### Policy Research

**Kajian Analisis Efisiensi melalui Penerapan Nilai ICOR atas Proyek-Proyek KPBU dengan Penjaminan Pemerintah**

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi investasi pada proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang memperoleh penjaminan pemerintah melalui pendekatan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa besar tambahan modal yang diperlukan guna menghasilkan tambahan *output* tertentu, sehingga dapat mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan investasi infrastruktur.

**Efficiency Analysis Study Using ICOR Value for PPP Projects with Government Guarantee**

This study aims to analyze the level of investment efficiency in Public-Private Partnership (PPP) projects that receive government guarantee using the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) approach. The ICOR is used as an indicator to assess the amount of additional capital required to produce a certain additional output, thus reflecting the quality of planning, implementation, and utilization of infrastructure investments.

**Kajian Integrasi *Monitoring* dan Evaluasi Proyek KPBU di Kantor Bersama KPBU**

Kajian ini disusun untuk mengkaji kebutuhan dan strategi integrasi sistem monitoring dan evaluasi (Monev) proyek KPBU yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Kantor Bersama KPBU. Melalui kajian ini, dilakukan pemetaan kerangka monev yang saat ini diterapkan oleh instansi terkait, termasuk indikator kinerja, mekanisme pelaporan, serta pemanfaatan hasil evaluasi guna mengatasi fragmentasi dan mendukung penyediaan gambaran kinerja proyek yang lebih komprehensif.

**Study of Integrated Monitoring and Evaluation of PPP Projects at the Joint PPP Office**

This study was conducted to assess the need for and strategies for integrating the monitoring and evaluation (M&E) system for PPP projects implemented by various stakeholders within the Joint PPP Office. This study maps the monitoring and evaluation framework currently implemented by relevant agencies, including performance indicators, reporting mechanism, and the use of evaluation results to address fragmentation and support a more comprehensive picture of project performance.

**Kajian Aspek Strategis dalam Rangka Penyusunan Kajian Harmonisasi Regulasi Penjaminan Pemerintah.**

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan kajian harmonisasi regulasi penjaminan pemerintah. Dengan mempertimbangkan perkembangan skema pembiayaan infrastruktur dan meningkatnya peran penjaminan, kajian ini bertujuan mendorong terbentuknya kerangka regulasi yang konsisten, komprehensif, dan adaptif, guna mendukung kepastian hukum, efisiensi pelaksanaan, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang.

**Strategic Aspect Study for the Preparation of a Government Guarantee Regulation Harmonization Study**

This study aims to identify and analyze strategic aspects that form the basis for developing a government guarantee regulation harmonization study. Considering developments in infrastructure financing scheme and increasing role of guarantees, this study aims to encourage the development of a consistent, comprehensive, and adaptive regulatory framework to support legal certainty, implementation efficiency, and long-term fiscal sustainability.

**Kajian Kolaboratif Eksplorasi Pengembangan Skema Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur Publik yang Melibatkan Investasi Swasta, termasuk Peluang Adaptasi *Empressa Mixta* di Indonesia**

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan kajian harmonisasi regulasi penjaminan pemerintah. Mengeksplorasi pengembangan skema pembiayaan infrastruktur publik yang melibatkan investasi swasta, termasuk potensi adaptasi Empressa Mixta di Indonesia. Melalui pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan, kajian ini menghasilkan analisis strategis dan rekomendasi terkait kelayakan, prasyarat, serta tahapan implementasi, guna mendorong diversifikasi pembiayaan dan peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

**Collaborative Study Exploring the Development of Public Infrastructure Financing Schemes Involving Private Investment, Including Opportunities for Adapting Empressa Mixta in Indonesia**

This study aims to identify and analyze strategic aspects that form the basis for developing a study on the harmonization of government guarantee regulations. Mengeksplorasi pengembangan skema pembiayaan infrastruktur publik yang melibatkan investasi swasta, termasuk potensi adaptasi Empressa Mixta di Indonesia. Melalui pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan, kajian ini menghasilkan analisis strategis dan rekomendasi terkait kelayakan, prasyarat, serta tahapan implementasi, guna mendorong diversifikasi pembiayaan dan peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

**Kajian Pengintegrasian Perencanaan dan Pembiayaan Pengusahaan Jalan Tol**

Kajian ini bertujuan untuk Menyusun kerangka konseptual dan rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan perencanaan, pembiayaan, dan pengusahaan jalan tol dengan pengembangan kawasan. Fokus kajian mencakup model bisnis, skema pendanaan seperti *land value capture*, serta penyesuaian tahapan KPBU dan PPJT, guna meningkatkan kelayakan investasi dan keberlanjutan finansial melalui penciptaan nilai tambah kawasan serta keterpaduan pembangunan infrastruktur dan wilayah.

**Study on Integrating Toll Road Planning and Financing**

This study explores the development of public infrastructure financing scheme that involves private investment, including the potential adaptation of Empressa Mixta in Indonesia. Through a collaborative, multi-stakeholder approach, this study produces a strategic analysis and recommendations regarding feasibility, prerequisites, and implementation stages, to encourage financing diversification and increase the private sector's role in sustainable infrastructure development.

**Kajian Evaluasi Penyertaan Modal Negara dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional**

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan dampak kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMN merupakan salah satu instrumen fiskal strategis yang digunakan pemerintah untuk memperkuat permodalan BUMN dan entitas terkait agar mampu menjaga keberlangsungan usaha, mendukung pemulihan ekonomi, serta melanjutkan peran strategisnya dalam pembangunan.

**Evaluation Study of State Capital Participation in the Context of National Economic Recovery**

This study aims to evaluate the implementation and impact of the State Capital Participation (PMN) policy provided to support the National Economic Recovery (PEN) program. PMN is a strategic fiscal instrument used by the government to strengthen the capital of state-owned enterprises (SOEs) and related entities to ensure their business continuity, support economic recovery, and continue their strategic role in development.

**Antara Daya Tarik dan Disiplin Fiskal: Evaluasi Kebijakan Minimum Revenue Guarantee (MRG) dalam Proyek KPBU Jalan Tol**

Kajian ini bertujuan untuk Mengevaluasi peran *Minimum Revenue Guarantee* (MRG) sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi swasta pada proyek KPBU jalan tol sekaligus menjaga disiplin fiskal. MRG dinilai mampu meningkatkan kelayakan proyek dengan mengurangi risiko pendapatan dan menurunkan biaya modal, namun juga menimbulkan kewajiban kontingensi bagi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang hati-hati, didukung proyeksi lalu lintas berbasis data, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang kuat.

**Between Attractiveness and Fiscal Discipline: An Evaluation of the Minimum Revenue Guarantee (MRG) Policy in Toll Road PPP Projects**

This study aims to evaluate the role of the Minimum Revenue Guarantee (MRG) as an instrument to increase the attractiveness of private investment in toll road PPP projects while maintaining fiscal discipline. The MRG is considered capable of improving project feasibility by reducing revenue risk and lowering capital costs, but it also creates contingent liabilities for the government. Therefore, careful policy design, supported by data-based traffic projections, transparent governance, and strong oversight, is required.

## Kajian Sektoral dan Dukungan Proyek

Sebagai unit *think tank* di lingkungan PT PII. IIGF Institute melaksanakan Kajian Sektoral dan Dukungan Proyek untuk menjembatani kebutuhan antara perumusan kebijakan strategis dan implementasi proyek infrastruktur di tingkat sektoral dan daerah. Kajian ini berfokus pada eksplorasi sektor dan proyek infrastruktur tertentu guna memperkuat kesiapan proyek (*project readiness*), meningkatkan kualitas perencanaan, serta mengidentifikasi skema pembiayaan dan penjaminan yang paling sesuai. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks dan beragam, kajian eksploratif menjadi penting untuk memahami karakteristik sektor, tantangan implementasi, serta potensi keterlibatan investasi swasta sejak tahap awal. Kajian Sektoral dan Dukungan Proyek yang dilakukan oleh IIGF Institute disusun dengan fokus untuk menyediakan analisis berbasis data dan praktik terbaik, khususnya dalam mengidentifikasi peluang penerapan skema KPBU, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pendekatan ini tidak hanya mendukung mandat PT PII dalam pengelolaan risiko penjaminan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.

## Sectoral Study and Project Support

As a think tank within IIGF, IIGF Institute conducts Sectoral Studies and Project Support to bridge the gap between strategic policy formulation and infrastructure project implementation at sectoral and regional levels. These studies focus on exploring specific infrastructure sectors and projects to strengthen project readiness, improve planning quality, and identify the most appropriate financing and guarantee schemes. In the context of increasingly complex and diverse infrastructure development, exploratory studies are crucial for understanding sector characteristics, implementation challenges, and the potential for private investment involvement from an early stage. IIGF Institute's Sectoral Studies and Project Support are designed with a focus on providing data-driven analysis and best practices, particularly in identifying opportunities for implementing PPP schemes, efficient resource utilization, and strengthening local government capacity. This approach not only supports IIGF Institute's mandate in managing infrastructure guarantee risks but also contributes to the development of a sustainable infrastructure financing ecosystem.

Adapun daftar Kajian Sektoral dan Dukungan Proyek yang dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The list of Sectoral Studies and Project Support conducted in 2025 is as follows:

**Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Energi melalui Penerapan Prinsip Efisiensi; Studi Kasus Penerapan di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Batang**

Kajian ini mengidentifikasi potensi optimalisasi pemanfaatan energi melalui penerapan prinsip efisiensi di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Batang. Hasil kajian berupa

**Study of Energy Utilization Optimization through the Application of Efficiency Principles; Case Study of Implementation in Jepara and Batang Regencies**

This study identifies the potential for optimizing energy utilization through applying efficiency principles in Jepara and Batang Regencies. The study results in policy

rekomendasi kebijakan dan model implementasi yang dapat direplikasi, guna mendukung efisiensi energi, memperkuat peran pemerintah daerah, serta membuka peluang investasi pada infrastruktur energi berkelanjutan.

recommendations and a replicable implementation model to support energy efficiency, strengthen local government's role, and open up investment opportunities in sustainable energy infrastructure.

**Kajian Potensi Penerapan Skema KPBU untuk Revitalisasi Laboratorium Karantina Hewan, Ikan, & Tumbuhan**

Kajian ini mengeksplorasi potensi penerapan skema KPBU untuk revitalisasi laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kajian ini memberikan gambaran awal terkait kelayakan dan prasyarat implementasi, guna mendukung peningkatan layanan strategis serta membuka peluang partisipasi swasta melalui skema pembiayaan yang berkelanjutan.

**Study of the Potential Implementation of a PPP Scheme for the Revitalization of Animal, Fish, and Plant Quarantine Laboratories**

This study explores the potential for implementing a PPP scheme to revitalize animal, fish, and plant quarantine laboratories. This study provides an initial overview of the feasibility and implementation prerequisites to support strategic service improvements and open up opportunities for private sector participation through sustainable financing schemes.

**Kajian Pemetaan Pemerintah Daerah di Indonesia: Aspek Kapasitas Fiskal, Politik, dan Prioritas Perencanaan Pembangunan**

Kajian ini memetakan karakteristik pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan kapasitas fiskal, dinamika politik, dan prioritas pembangunan. Hasilnya memberikan gambaran tingkat kesiapan daerah dalam pengembangan infrastruktur dan kerja sama dengan badan usaha, serta keselarasan dengan agenda pembangunan nasional.

**Study of Regional Government Mapping in Indonesia: Aspects of Fiscal Capacity, Politics, and Development Planning Priorities**

This study maps the characteristics of local governments in Indonesia based on fiscal capacity, political dynamics, and development priorities. The results provide an overview of regional readiness for infrastructure development and business partnerships, as well as alignment with the national development agenda.

**Kajian Implementasi PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa di Pemerintah Daerah; Studi Kasus Proyek KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun**

Publikasi ini membahas implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 16 terkait perjanjian konsesi jasa pada pemerintah daerah melalui studi kasus proyek KPBU APJ di Kabupaten Madiun. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi akuntansi, pelaporan keuangan, dan tata kelola aset dalam proyek KPBU. Dengan pendekatan studi kasus, publikasi ini menyajikan pembelajaran praktis yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan PSAP 16 secara tepat dan konsisten. Publikasi ini mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan proyek KPBU di daerah.

**Study of the Implementation of PSAP 16 on Service Concession Agreements in Regional Governments; Case Study of Madiun Regency Street Lighting (APJ) PPP Project**

This publication discusses the implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) 16 related to service concession agreements in local governments through a case study of APJ PPP project in Madiun Regency. This study aims to provide a deeper understanding of the accounting, financial reporting, and asset governance implications of PPP projects. Using a case study approach, this publication presents practical lessons learned that can serve as a reference for other local governments in implementing PSAP 16 appropriately and consistently. This publication supports strengthening accountability and transparency in PPP project management in the region.

**Pengembangan Skema KPBU Efisiensi Energi Berbasis *Energy Performance Contract Shared Saving* (EPC SS) Dengan Penjaminan PT PII**

Kajian ini bertujuan merumuskan kerangka pengembangan KPBU efisiensi energi, mengidentifikasi kendala regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang memengaruhi kelayakan proyek, serta menganalisis peran penjaminan PT PII dalam meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan dalam meningkatkan kelayakan proyek. Hasil kajian mencakup kerangka pengembangan, identifikasi kendala, dan proof of concept, guna mendukung percepatan investasi dan transisi energi.

**Development of Energy Efficiency PPP Scheme Based on Energy Performance Contract Shared Savings (EPC SS) with Guarantees from IIGF**

This study aims to formulate a framework for developing energy efficiency PPP projects, identify regulatory, institutional, and financing constraints affecting project feasibility, and analyze the role of IIGF's guarantee in improving the trust of financing institutions in enhancing project feasibility. The study's findings include a development framework, constraint identification, and proof of concept, all of which support accelerated investment and the energy transition.

## Publikasi
Publication

Publikasi merupakan instrumen strategis bagi IIGF Institute dalam menjalankan mandatnya sebagai *think tank* di lingkungan PT PII untuk mengembangkan, mengelola, dan menyebarluaskan pengetahuan di bidang penjaminan, pembiayaan, dan kebijakan pembangunan infrastruktur. IIGF Institute terus berupaya memastikan bahwa hasil kajian, pembelajaran implementasi proyek, serta analisis kebijakan dapat diakses secara luas dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Publikasi menjadi sarana untuk menerjemahkan isu-isu teknis dan kompleks ke dalam referensi yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pengambil kebijakan dan praktisi. Penerbitan publikasi juga mencerminkan pendekatan kolaboratif IIGF Institute dalam membangun pengetahuan, yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta mitra pembangunan. Kolaborasi ini memperkaya perspektif, meningkatkan kualitas analisis, dan memastikan bahwa substansi publikasi selaras dengan tantangan nyata di lapangan. IIGF Institute menghimpun dan mendiseminasikan pengetahuan lintas aktor, sehingga dapat berperan sebagai jembatan antara kebijakan, praktik, dan inovasi pembiayaan infrastruktur. Lebih jauh, publikasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun dan memperkuat ekosistem penjaminan dan pembiayaan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui buku, kajian tematik, dan jurnal ilmiah, IIGF Institute mendorong peningkatan literasi, keselarasan pemahaman, serta pembelajaran bersama di antara para pelaku ekosistem. Publikasi yang dihasilkan IIGF Institute tidak hanya berfungsi sebagai produk pengetahuan, tetapi juga sebagai katalis dialog kebijakan dan kolaborasi, yang pada akhirnya mendukung pengembangan proyek infrastruktur yang lebih siap, *bankable*, dan berkelanjutan.

Publication is a strategic tool for IIGF Institute in carrying out its mandate as a think tank within IIGF, developing, managing, and disseminating knowledge in the areas of infrastructure development guarantees, financing, and policy. IIGF Institute continuously strives to ensure that its study results, project implementation lessons learned, and policy analyses are widely accessible and utilized by stakeholders, both at national and regional levels. Furthermore, publication serves as a means of translating technical and complex issues into systematic, applicable, and relevant references that meet the needs of policymakers and practitioners. Publications also reflect IIGF Institute's collaborative approach to knowledge building, involving ministries/agencies, local governments, academics, business actors, and development partners. This collaboration enriches perspectives, improves the quality of analysis, and ensures that the substance of publication aligns with real-world challenges. IIGF Institute collects and disseminates knowledge across actors, thus acting as a bridge among policy, practice, and innovation in infrastructure financing. Furthermore, these publications are part of efforts to build and strengthen an inclusive and sustainable infrastructure guarantee and financing ecosystem. Through books, thematic studies, and scientific journals, IIGF Institute promotes increased literacy, alignment of understanding, and shared learning among ecosystem stakeholders. IIGF Institute publications serve not only as knowledge products but also as catalysts for policy dialogue and collaboration, ultimately supporting the development of more prepared, bankable, and sustainable infrastructure projects.

Beberapa publikasi yang dihasilkan IIGF Institute selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Some of the publications produced by IIGF Institute through 2025 are as follows:




**Buku "Peran Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Tinjauan Kritis dari 2009 hingga 2025 dan Telaah Ke Depan"**

Buku ini mengkaji peran aspek hukum dan kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak 2009 hingga 2025. Melalui evaluasi kebijakan, analisis tantangan pembiayaan, serta perumusan rekomendasi berbasis empiris, publikasi ini bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

**Book titled "The Role of Legal and Institutional Aspects in Infrastructure Development in Indonesia: A Critical Review from 2009 to 2025 and Future Outlook"**

This book examines the role of legal and institutional aspects in infrastructure development in Indonesia from 2009 to 2025. Through policy evaluation, analysis of financing challenges, and formulation of empirically based recommendations, this publication aims to support more effective, inclusive, and sustainable infrastructure development.




**Buku Saku KPBU untuk Pembangunan Infrastruktur Publik**

Buku Saku KPBU ini disusun sebagai panduan praktis dan ringkas bagi pemangku kepentingan, khususnya pemerintah

**PPP Pocketbook for Public Infrastructure Development**

This PPP Pocketbook is designed as a practical and concise guide for stakeholders, particularly local governments, to

daerah, dalam memahami konsep, tahapan, dan prinsip dasar KPBU. Publikasi ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dan aplikatif untuk menjembatani kesenjangan pemahaman teknis terkait KPBU. Buku ini memuat gambaran umum skema KPBU, peran para pihak, serta manfaat dan tantangan implementasinya. Dengan format yang mudah diakses, buku saku ini diharapkan dapat meningkatkan literasi KPBU dan mendorong pemanfaatan skema kerja sama secara lebih luas dalam pembangunan infrastruktur publik.

understand the concepts, stages, and basic principles of PPPs. This publication is designed in simple and applicable language to bridge the technical understanding gap related to PPPs. The book provides an overview of PPP scheme, roles of the parties, and the benefits and challenges of its implementation. With its accessible format, this pocketbook is expected to increase PPP literacy and encourage broader use of cooperation schemes in public infrastructure development.

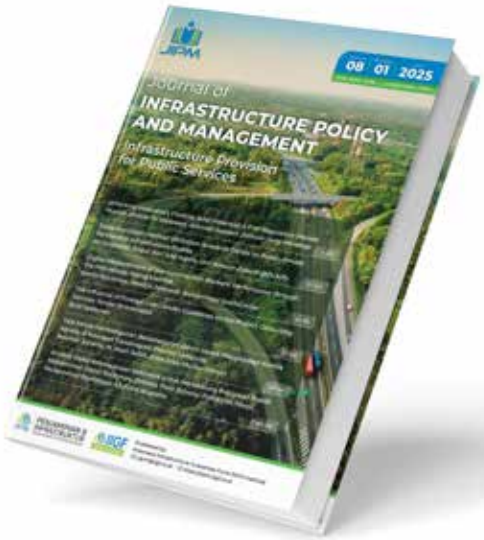



**Buku "*Advancing Inclusive Development in Eastern Indonesia: Building Sustainable Infrastructure through Collaborative and Creative Financing*" (Translasi Publikasi)"**

Publikasi ini merupakan translasi buku yang membahas strategi pembangunan infrastruktur inklusif dan berkelanjutan di Indonesia Timur melalui skema pembiayaan kreatif. Melalui diseminasi ini, IIGF Institute mendorong perluasan akses pengetahuan, penguatan dialog kebijakan lintas negara, serta kolaborasi internasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

**Book titled "Advancing Inclusive Development in Eastern Indonesia: Building Sustainable Infrastructure through Collaborative and Creative Financing" (Published Translation)**

This publication is a translation of a book discussing strategies for inclusive and sustainable infrastructure development in Eastern Indonesia through creative financing schemes. Through this dissemination, IIGF Institute encourages expanding access to knowledge, strengthening cross-border policy dialogue, and international collaboration in supporting sustainable infrastructure development.






**Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM), Volume VIII Edisi 1 dan 2 Tahun 2025**

JIPM Volume VIII Edisi 1 dan 2 Tahun 2025 diterbitkan sebagai media diseminasi pemikiran akademik dan kebijakan di bidang infrastruktur, pembiayaan, dan penjaminan. Publikasi ini memuat beragam kajian strategis, mulai dari pengembangan skema KPBU, isu keberlanjutan dan risiko kebencanaan, hingga inovasi kebijakan dan teknologi dalam infrastruktur publik. Melalui kontribusi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, jurnal ini bertujuan memperkuat basis pengetahuan, mendorong diskursus ilmiah, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih kolaboratif dan berbasis bukti.

**Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM), Volume VIII, Issues 1 and 2, 2025**

JIPM Volume VIII, Issues 1 and 2, 2025, was published as a medium for disseminating academic and policy thinking in the fields of infrastructure, financing, and guarantees. This publication contains a variety of strategic studies, ranging from PPP scheme development, issues of sustainability and disaster risks, to policy and technology innovation in public infrastructure. Through contributions from academics, practitioners, and policymakers, this journal aims to strengthen the knowledge base, stimulate scientific discourse, and support more collaborative and evidence-based policymaking.




**Buku "Strategi *De-Risking* untuk Peningkatan Peran Energi Terbarukan di Indonesia"**

Kajian ini menyoroti tantangan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia dan pentingnya instrumen de-risking untuk meningkatkan investasi swasta. Berbagai kendala utama diidentifikasi, termasuk ketidakpastian regulasi, tingginya risiko, dan keterbatasan pembiayaan.

**Book titled "De-Risking Strategies to Increase the Role of Renewable Energy in Indonesia"**

This study highlights the challenges of renewable energy financing in Indonesia and the importance of de-risking instruments to increase private investment. Key obstacles are identified, including regulatory uncertainty, high risk, and limited financing.

## Advokasi Kebijakan dan *Outreach*
Policy Advocacy and Outreach

Untuk memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur, PT PII melalui IIGF Institute secara konsisten mengembangkan strategi kemitraan dengan mitra strategis di tingkat nasional dan internasional. Kemitraan ini menjadi fondasi dalam mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan penyediaan infrastruktur yang lebih efektif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan pembangunan Indonesia.

To expand stakeholder engagement in the infrastructure sector, Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), through IIGF Institute, consistently develops partnership strategies with strategic partners at the national and international levels. These partnerships serve as the foundation for encouraging the development and implementation of infrastructure provision policies that are more effective, sustainable, and responsive to Indonesia's development needs.

Sepanjang tahun 2025, IIGF Institute menjalin kolaborasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) dan Community of Practice Innovative Financing Community (CoP INFINITY) sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem pembangunan infrastruktur nasional. Dalam memperluas jangkauan dan dampak kemitraan, IIGF Institute mengutamakan skema kolaborasi berbasis jejaring dengan mitra-mitra strategis sehingga turut mendorong *collective learning* dan *peer-to-peer knowledge exchange* antara akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha.

Selanjutnya, IIGF Institute akan terus mengamplifikasi dampak program melalui *knowledge management* pengetahuan, *lesson learned*, dan praktik terbaik. Hasil kegiatan kemitraan didiseminasikan secara lebih luas melalui platform komunitas, publikasi, dan kegiatan bersama agar menjangkau audiens yang lebih beragam dan mendorong replikasi inisiatif di berbagai sektor dan daerah. Pendekatan ini sekaligus meningkatkan visibilitas dan kredibilitas program, serta menciptakan *multiplier effect* terhadap upaya penguatan kapasitas dan inovasi kebijakan.

Beberapa kolaborator mitra internasional IIGF institute selama tahun 2025:

1. Program Energi dengan GIZ, melalui kolaborasi antar program *Energy Hub* melalui IKI *Flex Support Package* dan *Sustainable Energy Transition in* Indonesia (SETI) dibawah naungan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM dalam kegiatan *Workshop* Strategi *De-Risking* Untuk Peningkatan Peran Energi Terbarukan di Indonesia.
2. Kolaborasi dengan Bulgarian *Embassy* dalam penyelenggaraan "*Courtesy Call on Knowledge Sharing of Indonesian Guarantee Schemes in Infrastructure Projects*".

Keterlibatan peran keahlian dan kepakaran akademisi di lingkungan perguruan tinggi UNIID maupun para praktisi CoP INFINITY diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan dan penyediaan Infrastruktur terutama di daerah. Sebagaimana slogan CoP INFINITY "*Beyond Knowledge for Better Infrastructure*", kemitraan IIGF Institute 2025 diwujudkan dengan kolaborasi *multistakeholder engagement* kemitraan IIGF Institute di bawah ini.

Throughout 2025, IIGF Institute collaborated with various Ministries and Institutions (K/L), local governments, the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), and the Community of Practice Innovative Financing Community (CoP INFINITY) as part of efforts to strengthen the national infrastructure development ecosystem. To expand the reach and impact of these partnerships, IIGF Institute prioritizes network-based collaboration with strategic partners, thus encouraging collective learning and peer-to-peer knowledge exchange between academics, practitioners, policymakers, and business actors.

Furthermore, IIGF Institute will continue to amplify the impact of its programs through knowledge management, lessons learned, and best practices. The results of partnership activities are disseminated more widely through community platforms, publications, and joint activities to reach a more diverse audience and encourage replication of initiatives across various sectors and regions. This approach simultaneously increases the program's visibility and credibility, while creating a multiplier effect on capacity building and policy innovation efforts.

Some of IIGF Institute's international partner collaborators throughout 2025 were:

1. The Energy Program with GIZ, through collaboration between Energy Hub program through IKI Flex Support Package and Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) under the auspices of the Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources, in the Workshop on De-Risking Strategies for Increasing the Role of Renewable Energy in Indonesia.
2. Collaboration with Bulgarian Embassy in organizing "Courtesy Call on Knowledge Sharing of Indonesian Guarantee Schemes in Infrastructure Projects."

The involvement of experts and expertise of academics within UNIID university and CoP INFINITY practitioners is expected to provide optimal contributions to infrastructure development and provision, especially in the regions. As the CoP INFINITY slogan "Beyond Knowledge for Better Infrastructure", IIGF Institute 2025 partnership was realized through collaborative multi-stakeholder engagement. IIGF Institute partnership is below.

| No. | Kegiatan<br>Activity | Topik/Tema dan Case Study<br>Topic/Theme and Case Study | Universitas<br>University |
|---|---|---|---|
| 1. | INCoTalk #4 - Sesi Berbagi Inspirasi dari Disertasi Penelitian Anggota CoP INFINITY.<br>INCoTalk #4 - Sharing Inspiration from the Research Dissertations of CoP INFINITY Members. | Peningkatan pemahaman terkait Kerangka Pengelolaan Penjaminan Pemerintah yang Berkesinambungan dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema KPBU.<br>Increased understanding regarding the Sustainable Government Guarantee Management Framework for Infrastructure Financing with PPP Scheme. | PKN STAN |
| 2. | INCoTalk #5 Sesi Berbagi Inspirasi Implementasi PSAP No 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa pada Proyek KPBU.<br>INCoTalk #5 - Sharing Inspiration on the Implementation of PSAP No. 16 concerning Service Concession Agreements in PPP Projects. | Peningkatan pemahaman terkait Implementasi PSAP No 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa pada Proyek KPBU, untuk meminimalisir dispute dan mendorong pelaksanaan proyek KPBU yg lebih berkelanjutan.<br>Increased understanding regarding the Implementation of PSAP No. 16 on Service Concession Agreements in PPP Projects, to minimize disputes and encourage more sustainable implementation of PPP projects. | PKN STAN |
| 3. | INCoTalk #6 Sesi Berbagi Inspirasi Memahami ICOR serta Relevansinya dalam KPBU dan Penjaminan Pemerintah.<br>INCoTalk #6 - Sharing Inspiration on Understanding ICOR and Its Relevance in PPPs and Government Guarantees. | Pemahaman selaras sebagai alat komunikasi nilai tambah proyek, meluruskan miskonsepsi konsep agar digunakan tepat sasaran dalam analisis dan pengambilan keputusan.<br>Harmonized understanding as a communication tool for project added value, correcting conceptual misconceptions so that they are used appropriately in analysis and decision making. | ERIA |
| 4. | INCoTalk #7 Strategi *De-Risking* Untuk Peningkatan Peran Energi Terbarukan di Indonesia.<br>INCoTalk #7 - De-Risking Strategies for Increasing the Role of Renewable Energy in Indonesia. | Diseminasi hasil kajian terkait *de-risking* proyek energi terbarukan di Indonesia, serta peningkatan pemahaman terkait *de-risking* pembiayaan proyek energi terbarukan<br>Dissemination of study results related to de-risking of renewable energy projects in Indonesia, as well as increasing understanding regarding de-risking of renewable energy project financing. | Universitas Gadjah Mada, GIZ |
| 5. | *Workshop* Pemanfaatan Aset BMN Perguruan Tinggi.<br>Workshop on Utilizing State-Owned Assets in Higher Education. | Peningkatan kapasitas pengurus UNIID terkait Pemanfaatan Aset BMN Perguruan Tinggi melalui skema KPBU.<br>Increasing the capacity of UNIID administrators regarding the Utilization of State-Owned Enterprises (BMN) Assets of Higher Education through PPP scheme. | Universitas Brawijaya<br>Brawijaya University |
| 6. | Indonesia *Infrastructure Roundtable* (IIR) ke-27.<br>27th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR). | Kolaborasi Strategis untuk Transisi Energi dalam rangka *Unlocking* proyek PLTS di Indonesia melalui dukungan regulasi lintas kementerian.<br>Strategic Collaboration for Energy Transition in the context of Unlocking Solar Power Plant projects in Indonesia through cross-ministerial regulatory support. | Universitas Indonesia<br>Indonesia University |
| 7. | INCoTalk 8# Seminar Nasional *Project Management Plan for Building Back Better of Infrastructures in the Post Sumatera Disaster.*<br>INCoTalk #8 - National Seminar on Project Management Plans for Building Back Better Infrastructure in the Post-Sumatra Disaster. | Menghasilkan skema perencanaan Pembangunan dalam rangka *recovery* infrastruktur pasca bencana.<br>Producing a development planning scheme for post-disaster infrastructure recovery. | Universitas Andalas<br>Andalas University |

# Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment




## Komponen Pendapatan Usaha
Components of Revenues

Sejalan dengan perluasan mandat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta penugasan Pemerintah, PT PII mengelola dan mengembangkan kegiatan usahanya menjadi beberapa segmen usaha, yaitu: (i) Penjaminan KPBU dan Penjaminan Kredit (Non KPBU); (ii) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*/ PDF); (iii) Pengelolaan Dana serta (iv) Segmen Lainnya yang mendukung optimalisasi peran Perseroan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pembagian segmen usaha ini selaras dengan struktur pendapatan Perseroan, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu Pendapatan Penjaminan; Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF); Pendapatan Pengelolaan Dana; serta Pendapatan Lain-lain yang juga turut berkontribusi dalam keseluruhan pendapatan Perseroan. Struktur ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih transparan dan komprehensif mengenai operasi bisnis serta kinerja keuangan Perseroan, sehingga mendukung efektivitas strategi bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan.

In line with the expansion of its mandate as stipulated in the Articles of Association and Government assignments, IIGF manages and develops its business activities into several business segments, namely: (i) PPP Guarantee and Credit Guarantee (Non-PPP); (ii) Project Preparation and Transaction Advisory (Project Development Facility/ PDF); (iii) Fund Management; and (iv) Other Segments that support the optimization of the Company's role in sustainable infrastructure development.

The segmentation of these business segments is aligned with the Company's revenue structure, which is grouped into four main categories, namely Revenue from Guarantee; Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory (PDF); Revenue from Investments; and Income from Others, all of which contribute to the Company's overall income. This structure is designed to provide a more transparent and comprehensive overview of the Company's business operations and financial performance, thereby supporting the effectiveness of business strategies and sustainable growth.

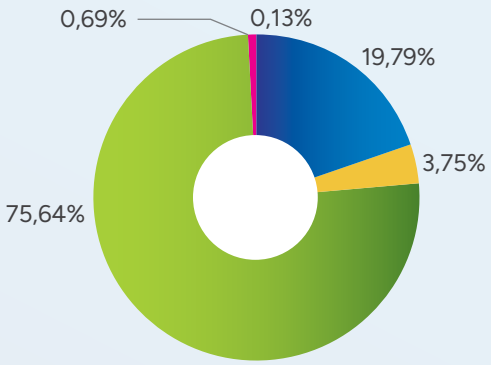
## Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha
Table of Components and Compositions of Revenues

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nilai Value | Komposisi Composition | Nilai Value | Komposisi Composition |
| Pendapatan Penjaminan Revenue from Guarantee | 292.584.422 | 19,79% | 310.054.107 | 20,85% |
| Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory | 55.393.409 | 3,75% | 70.265.155 | 4,73% |
| Pendapatan Pengelolaan Dana Revenue from Investments | 1.118.103.290 | 75,64% | 1.091.915.052 | 73,43% |
| Pendapatan Bunga Regres Pendapatan Bunga Regres | 10.207.925 | 0,69% | 13.625.092 | 0,92% |
| Pendapatan Lainnya Income from Others | 1.915.754 | 0,13% | 1.071.180 | 0,07% |
| **Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues** | 1.478.204.800 | 100,00% | 1.486.930.586 | 100,00% |

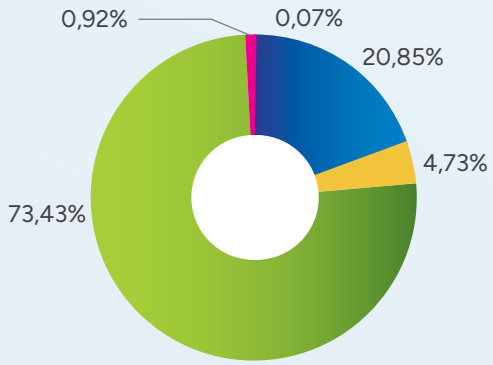
## Grafik Komposisi Pendapatan Per Segmen
Graph of Revenues Composition by Segment

### 2025




- Pendapatan Penjaminan
  Revenue from Guarantee
- Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Revenue from project preparation and transaction advisory
- Pendapatan Pengelolaan Dana
  Income from Investments
- Pendapatan Bunga Regres
  Recourse Interest Income
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

### 2024




- Pendapatan Penjaminan
  Revenue from Guarantee
- Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Revenue from project preparation and transaction advisory
- Pendapatan Pengelolaan Dana
  Income from Investments
- Pendapatan Bunga Regres
  Recourse Interest Income
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

# Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Per Segmen
Profitability and Financial Performance by Segment

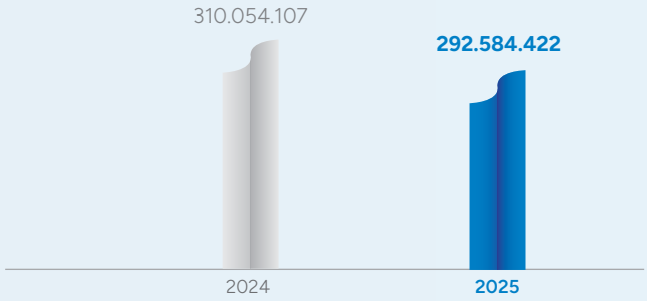
## Pendapatan Segmen Penjaminan
Revenue from Guarantee

Pendapatan yang diperoleh segmen penjaminan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp292,58 miliar, yaitu turun sebesar 5,63% dibandingkan perolehan pada tahun 2024 Rp310,05 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh jumlah aset kelolaan per 31 Desember 2025 dibandingkan 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp0,7 triliun (atau naik 4,5%), sedangkan rata-rata imbal hasil pengelolaan dana tahun 2025 sebesar 6,7% (turun 0,1% dari tahun 2024) yang dikontribusi oleh penurunan tingka suku bunga deposito berjangka sebagai dampak dari penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Revenue generated from the guarantee segment in 2025 amounted to Rp292.58 billion, representing a 5.63% decrease compared to the 2024 revenue of Rp310.05 billion. This decrease was primarily due to an increase in assets under management as of 31 December 2025, compared to Rp0.7 trillion (or 4.5%) in 2024, while the average fund management return in 2025 was 6.7% (a decrease of 0.1% from that of 2024), contributed by a decrease in time deposit interest rates as a result of the reduction in Bank Indonesia's benchmark interest rate.

**Grafik Pendapatan Segmen Penjaminan**
Graph of Revenue from Guarantee

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)



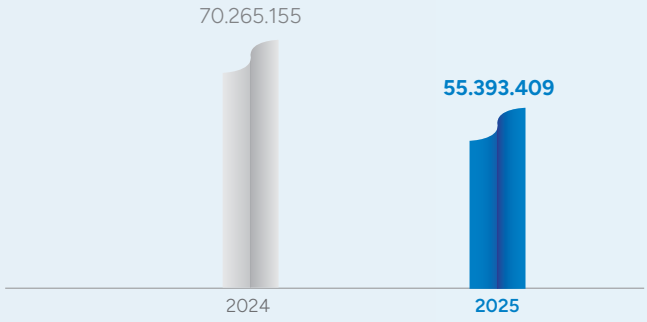

## Pendapatan Segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF)
Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory (PDF)

Pada tahun 2025 pendapatan yang diperoleh segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi sebesar Rp55,39 miliar, yaitu lebih rendah 21,17% dibandingkan perolehan di tahun 2024 sebesar Rp70,27 miliar. Hal ini utamanya dikontribusi oleh telah berakhirnya penugasan Jaringan Gas Palembang dan bergesernya beberapa *milestone* proyek.

In 2025, revenue generated from the Project Preparation and Transaction Advisory segment amounted to Rp55.39 billion, representing a 21.17% decrease compared to the 2024 revenue of Rp70.27 billion. This decline was mainly attributable to the completion of the Palembang City Gas Network (Jargas) assignment and the shifting of several project milestones.

**Grafik Pendapatan Segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi**
Graph of Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)



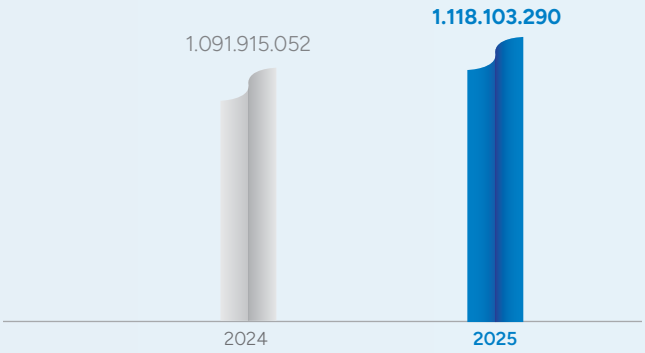
## Pendapatan Segmen Pengelolaan Dana
Revenue from Investments

Pada tahun 2025 pendapatan yang diperoleh segmen pengelolaan dana sebesar Rp1,12 triliun, yaitu meningkat 2,75% dibandingkan perolehan di tahun 2024 sebesar Rp1,09 triliun. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun dan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6.05% atau 130 bps di atas suku bunga acuan.

In 2025, revenue generated from investment segment amounted to Rp1.12 trillion, representing an increase of 2.75% compared to the 2024 revenue of Rp1.09 trillion. This increase was mainly driven by higher placements in time deposits with maturities of more than 3 months up to 1 year and an average investment return of 6.05%, or 130 basis points above the benchmark interest rate.

**Grafik Pendapatan Segmen Pengelolaan Dana**
Graph of Revenue from Investments

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)



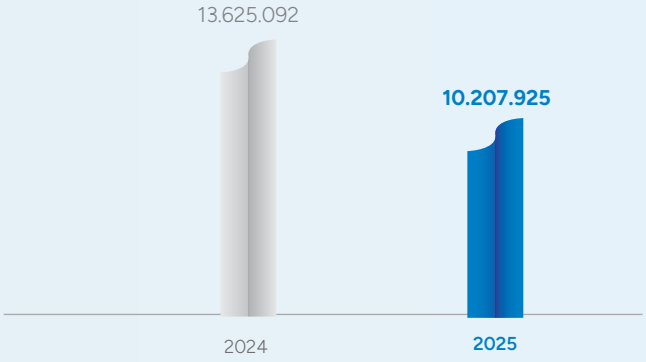

## Pendapatan Bunga Regres
Regressive Interest Income

Pada tahun 2025 pendapatan yang diperoleh bunga regres adalah sebesar Rp10,21 miliar, yaitu lebih rendah 25,08% dibandingkan perolehan di tahun 2024 sebesar Rp13,63 miliar.

In 2025, regressive interest income was Rp10.21 billion, a 25.08% decrease compared to Rp13.63 billion in 2024.

**Grafik Pendapatan Bunga Regres**
Graph of Regression Interest Income

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)



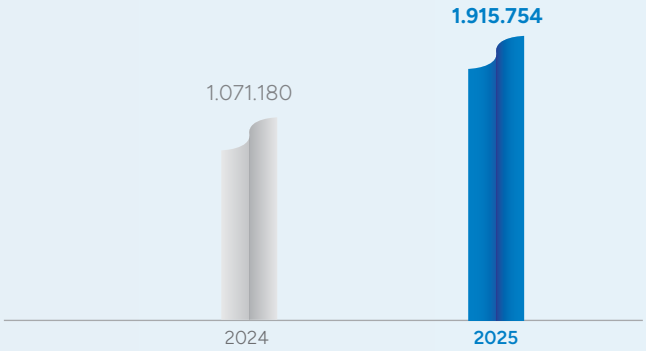

## Pendapatan Segmen Lainnya
Income from Others

Pendapatan yang diperoleh segmen lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,92 miliar, yaitu meningkat 78,85% dibandingkan perolehan pada tahun 2024 sebesar Rp1,07 miliar.

Income generated from the other segment in 2025 amounted to Rp12.12 billion, representing a 17.51% decrease compared to the 2024 income of Rp14.70 billion. This decline was mainly due to a decrease in Regress Interest Income during 2025.

### Grafik Pendapatan Segmen Lainnya
Graph of Income from Others

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)




# Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada Laporan Tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Audit untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan rekan penanggung jawab adalah Jimmy Pangestu, S.E., CPA dalam laporannya tertanggal 2 Maret 2026 dengan opini "**wajar tanpa modifikasian**" dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

The analysis and discussion of financial performance in this Annual Report refer to the audited Financial Statements for the years ended 31 December 2025 and 2024, audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), with the responsible partner was Jimmy Pangestu, S.E., CPA, in their report dated 2 March 2026, which expressed an "**unqualified**" opinion in all material respects.

The Company's financial statements have been prepared in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, which include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

## Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis

Posisi keuangan PT PII pada tahun 2025 terdiri dari jumlah aset sebesar Rp17,72 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp231,36 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp17,49 triliun.

IIGF's financial position in 2025 consisted of total assets of Rp17.72 trillion, total liabilities of Rp231.36 billion, and total equity of Rp17.49 trillion.

### Tabel Posisi Keuangan
Table of Financial Position

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Jumlah aset Total Assets | **17.716.787.893** | 16.988.521.659 | 4,29% | 728.266.234 |
| Jumlah liabilitas Total Liabilities | **231.360.737** | 315.947.966 | (26,77%) | (84.587.229) |
| Jumlah ekuitas Total Equity | **17.485.427.156** | 16.672.573.693 | 4,88% | 812.853.463 |

## Aset
Assets

Jumlah aset PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp17,72 triliun, yaitu mengalami peningkatan 4,29% atau Rp728,27 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp16,99 triliun.

IIGF's total assets in 2025 amounted to Rp17.72 trillion, an increase of 4.29% or Rp728.27 billion compared to 2024, when total assets were Rp16.99 trillion.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada jumlah aset kelolaan yang ditempatkan atau diinvestasikan baik di deposito berjangka maupun di pendapatan tetap.

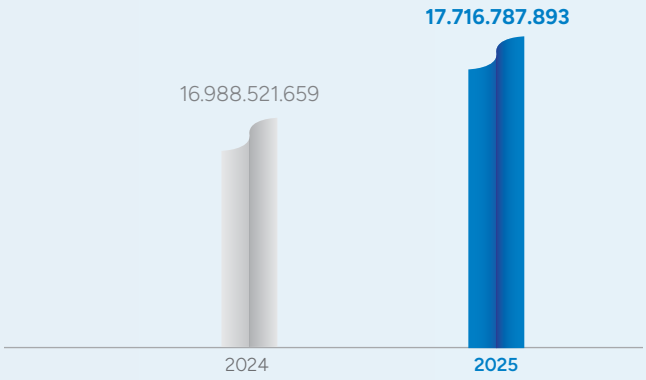
This increase was primarily driven by an increase in the amount of managed assets placed or invested in both time deposits and fixed income instruments.

Posisi Aset menunjukkan kondisi Perseroan yang sangat likuid yang dengan porsi terbesar pada kas dan setara kas, dan investasi yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban klaim penjaminan dan menjaga kredibilitas serta kepercayaan investor kepada PT PII dalam memberikan penjaminan.

The asset position demonstrates the Company's highly liquid condition, with the largest portion being cash and cash equivalents, and investments reflecting the Company's ability to meet its guarantee claim obligations and maintain investor credibility and trust in IIGF in providing guarantees.

### Grafik Perkembangan Aset
Graph of Asset Development

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands Rupiah)




### Tabel Jumlah Aset
Table of Total Assets

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Kas dan setara kas Cash and cash equivalents | **7.286.275.750** | 2.030.081.757 | 258,92% | 5.256.193.993 |
| Investasi Investment | **9.884.203.091** | 14.423.560.381 | (31,47%) | (4.539.357.290) |
| Piutang usaha setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Account receivables-net of allowance for impairment losses | **475.276.683** | 402.385.200 | 18,11% | 72.891.483 |
| Piutang lainnya Other receivables | **10.467.439** | 11.935.434 | (12,30%) | (1.467.995) |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepaid expenses and advances | **1.504.824** | 1.099.038 | 36,92% | 405.786 |
| Aset tetap Fixed assets | **10.427.124** | 9.619.207 | 8,40% | 807.917 |
| Aset hak-guna Right-of-use assets | **11.446.272** | 28.615.680 | (60,00%) | (17.169.408) |
| Aset takberwujud Intangible assets | **4.743.816** | 4.923.545 | (3,65% | (179.729) |

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Beban tangguhan Deferred expenses | 3.928.446 | 2.837.247 | 38,46% | 1.091.199 |
| Pajak dibayar dimuka Prepaid income tax | 9.148.525 | 9.169.276 | (0,23%) | (20.751) |
| Aset pajak tangguhan Deferred tax asset | 13.875.508 | 58.909.855 | (76,45%) | (45.034.347) |
| Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposits | 5.490.415 | 5.385.039 | 1,96% | 105.376 |
| **Jumlah Aset** Total Assets | 17.716.787.893 | 16.988.521.659 | 4,29% | 728.266.234 |

## Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Jumlah kas dan setara kas PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7,29 triliun, yaitu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 258,93% atau Rp5,26 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,03 triliun.

The total cash and cash equivalents of IIGF in 2025 amounted to Rp7.29 trillion, representing a significant increase of 258.93% or Rp5.26 trillion compared to Rp2.03 trillion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 3 bulan.

This increase was primarily driven by the placement of time deposits with maturities of less than three months.

Peningkatan ini merupakan strategi pengelolaan dana Perseroan dalam mengoptimalkan imbal hasil pengelolaan dana dari penempatan di deposito berjangka ditengah ketidakpastian perekonomian global dan domestik yang berdampak terhadap tren suku bunga acuan yang cenderung turun.

This increase reflects the Company's fund management strategy to optimize returns from time deposits amidst global and domestic economic uncertainty, which has affected the downward trend in benchmark interest rates.

## Investasi
Investments

Jumlah investasi PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9,88 triliun, yaitu lebih rendah 31,48% atau Rp4,54 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp14,42 triliun.

The total investments of IIGF in 2025 amounted to Rp9.88 trillion, which was 31.48% or Rp4.54 trillion lower than Rp14.42 trillion in 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh porsi deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sesuai dengan strategi pengelolaan dana Perseroan untuk mengoptimalkan imbal hasil pengelolaan dana dari penempatan di deposito berjangka.

This decrease was due to an increase in the portion of time deposits with maturities of less than 3 months compared to that of 2024, in line with the Company's fund management strategy to optimize returns from time deposits.

## Piutang Usaha
Account Receivables

Jumlah piutang usaha PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp475,28 miliar, yaitu mengalami peningkatan 18,11% atau Rp72,89 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp402,39 miliar .

The total account receivables of IIGF in 2025 amounted to Rp475.28 billion, experiencing an increase of 18.11% or Rp72.89 billion compared to Rp402.39 billion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan piutang regres seiring dengan bertambahnya klaim penjaminan yang dibayarkan oleh Perseroan dibandingkan dengan jumlah piutang regres yang terpulihkan selama tahun 2025. Disamping itu, terdapat peningkatan piutang imbal jasa penjaminan yang terutama disebabkan oleh piutang upfront fees dari penjaminan kredit non KPBU yang terealisasi pada akhir tahun 2025.

This increase was primarily driven by an increase in regress receivables, as the Company increased its guarantee claims compared to the amount of regress receivables recovered throughout 2025. Furthermore, there was an increase in guarantee fee receivables, primarily due to upfront fees receivable from non-PPP credit guarantees realized at the end of 2025.

## Piutang Lainnya
Other Receivables

Jumlah piutang lainnya PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp10,47 miliar, yaitu mengalami penurunan 12,32% atau Rp1,47 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11,94 miliar

The total other receivables of IIGF in 2025 amounted to Rp10.47 billion, a decrease of 12.32% or Rp1.47 billion compared to Rp11.94 billion in 2024.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyelesaian deposit terkait asuransi kesehatan yang baru dibayarkan di tahun 2025.

The decrease was mainly driven by the settlement of time deposits related to health insurance that were paid in 2025.

## Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka
Prepaid Expenses and Advances

Jumlah biaya dibayar dimuka dan uang muka PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,50 miliar, yaitu lebih tinggi 36,94% atau Rp405,79 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,10 miliar.

The total prepaid expenses and advances of IIGF in 2025 amounted to Rp1.50 billion, which was 36.94% or Rp405.79 million higher than Rp1.10 billion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada premi asuransi yang dibayar dimuka.

This increase was primarily driven by an increase in prepaid insurance premiums.

## Aset Tetap
Fixed Assets

Jumlah aset tetap PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp10,43 miliar, yaitu lebih tinggi 8,40% atau Rp807,92 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,62 miliar.

The total fixed assets of IIGF in 2025 amounted to Rp10.43 billion, which was 8.40% or Rp807.92 million higher than Rp9.62 billion in 2024.

Hal ini utamanya dikarenakan oleh adanya penambahan aset tetap tahun 2025 terkait dengan renovasi kantor lantai 8.

This was mainly due to the addition of fixed assets in 2025 related to the office renovation of the 8$^{th}$ floor.

## Aset Hak-Guna
Right-of-Use Assets

Jumlah aset hak guna PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp11,45 miliar, yaitu lebih rendah 60,00% atau Rp17,17 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp28,62 miliar.

The total right-of-use assets of IIGF in 2025 amounted to Rp11.45 billion, representing a decrease of 60.00% or Rp17.17 billion compared to Rp28.62 billion in 2024.

Hal tersebut dikarenakan oleh amortisasi atas sewa hak guna atas gedung kantor selama tahun 2025.

This increase was due to the amortization of lease for the right-to-use of office building throughout 2025.

## Aset Tak berwujud
Intangible Assets

Jumlah aset takberwujud PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp4,74 miliar, yaitu mengalami penurunan 3,66% atau Rp179,73 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,92 miliar

The total intangible assets of IIGF in 2025 amounted to Rp4.74 billion, representing a decrease of 3.66% or Rp179.73 million compared to Rp4.92 billion in 2024.

Hal ini disebabkan oleh amortisasi aset takberwujud selama tahun 2025 sebesar Rp2,3 miliar, sedangkan penambahan aset takberwujud berupa piranti lunak selama tahun berjalan sebesar Rp2,1 miliar.

This was due to the amortization of intangible assets throughout 2025 amounting to Rp2.3 billion, while the addition of intangible assets in the form of software during the current year amounted to Rp2.1 billion.

## Beban Tangguhan
Deferred Expenses

Jumlah beban tangguhan PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3,93 miliar, yaitu lebih tinggi 38,38% atau Rp1,09 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,84 miliar.

The total deferred expenses of IIGF in 2025 amounted to Rp3.93 billion, which was 38.38% or Rp1.09 billion higher than Rp2.84 billion in 2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan beban konsultan atas proses penjaminan, namun proses penandatanganan penjaminan proyeknya belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

This increase was due to an increase in consultant costs for the guarantee process, but the project guarantee signing process could not be implemented in 2025.

## Pajak Dibayar Dimuka
Prepaid Income Tax

Jumlah pajak dibayar di muka PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9,15 miliar, yaitu mengalami penurunan 0,22% atau Rp20,75 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,17 miliar.

The total prepaid income tax of IIGF in 2025 amounted to Rp9.15 billion, decreasing by 0.22% or Rp20.75 million compared to Rp9.17 billion in 2024.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran atas SKPLB tahun 2023 yang baru di terima di tahun 2025 dan tambahan pajak dibayar dimuka akibat lebih bayar PPN tahun 2025.

The decrease was mainly driven by the payment related to the 2023 SKPLB that was just received in 2025 and additional prepaid tax due to the overpayment of VAT in 2025.

## Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets

Jumlah aset pajak tangguhan PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp13,88 miliar, yaitu lebih rendah 76,44% atau Rp45,03 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp58,91 miliar.

The total deferred tax assets of IIGF in 2025 amounted to 13.88 billion, which was 76.44% or Rp45.03 billion lower than Rp58.91 billion in 2024.

Hal tersebut terutama karena adanya pembebanan atas aset pajak tangguhan yang diakui pada tahun-tahun sebelumnya yang merupakan porsi yang tidak dapat dimanfaatkan atas tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan.

This was primarily due to the imposition on deferred tax assets recognized in previous years, which represents the portion that cannot be utilized for the availability of taxable income in the future.

## Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan
Refundable Deposits

Jumlah uang jaminan yang dapat dikembalikan PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5,49 miliar, yaitu mengalami peningkatan 1,95% atau Rp105,38 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,39 miliar.

The total refundable deposits of IIGF in 2025 amounted to Rp5.49 billion, representing an increase of 1.95% or Rp105.38 million compared to Rp5.39 billion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan deposit untuk sewa apartemen.

The increase was mainly driven by additional deposits for apartment rentals.

## Liabilitas
Liabilities

Jumlah liabilitas PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp231,36 miliar, yaitu lebih rendah 26,77% atau Rp84,59 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp315,95 miliar.

The total liabilities of IIGF in 2025 amounted to Rp231.36 billion, or a decrease of 26.77% or Rp84.59 billion compared to Rp315.95 billion in 2024.

Penurunan ini terjadi di tengah peningkatan kas dan investasi, sehingga secara keseluruhan mencerminkan penguatan likuiditas Perseroan.

This decrease occurred amid an increase in cash and investments, which overall reflects the strengthening of the Company's liquidity.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi atas estimasi kontijensi penjaminan korporasi bersama di tahun 2025.

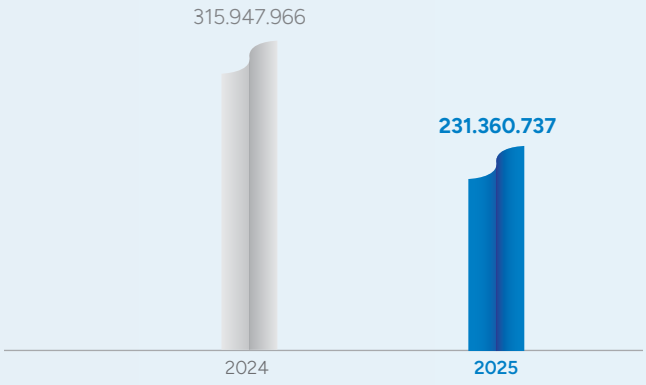
This condition was mainly influenced by the realization of the estimated contingency for joint corporate guarantees in 2025.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun 2024, kondisi likuiditas Perseroan pada tahun 2025 mengalami perbaikan yang signifikan, ditandai dengan penurunan total liabilitas, berkurangnya kewajiban berbunga, serta meningkatnya fleksibilitas keuangan. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan kewajiban dan likuiditas yang pruden serta mendukung keberlanjutan operasional Perseroan ke depan.

Overall, compared to 2024, the Company's liquidity condition in 2025 showed a significant improvement, as reflected by the decrease in total liabilities, the reduction in interest-bearing obligations, and increased financial flexibility. This condition reflects prudent liability and liquidity management and supports the sustainability of the Company's operations going forward.

### Grafik Perkembangan Liabilitas
Graph of Liabilities Development

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands Rupiah)



## Tabel Jumlah Liabilitas
Table of Total Llabilities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Utang usaha Account payables | 14.002.393 | 6.731.077 | 108,03% | 7.271.316 |
| Utang pajak Taxes payables | 2.843.815 | 1.531.600 | 85,68% | 1.312.215 |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions, and other payables | 76.416.987 | 117.924.523 | (35,20%) | (41.507.536) |
| Pendapatan tangguhan Unearned income | 32.869.530 | 71.794.931 | (54,22%) | (38.925.401) |
| Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities | 13.244.378 | 31.198.399 | (57,55%) | (17.954.021) |
| Pinjaman penerusan Two-step loans | 52.701.112 | 54.586.445 | (3,45%) | (1.885.333) |
| Liabilitas imbalan kerja Employee benefits obligation | 39.282.522 | 32.180.991 | 22,07% | 7.101.531 |
| **Jumlah Liabilitas Total Liabilities** | 231.360.737 | 315.947.966 | (26,77%) | (84.587.229) |

## Utang Usaha
Account Payables

Jumlah utang usaha PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp14,00 miliar, yaitu lebih tinggi 108,03% atau Rp7,27 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6,73 miliar.

The total account payables of IIGF in 2025 amounted to Rp14.00 billion, increasing by 108.03% or Rp7.27 billion compared to Rp6.73 billion in 2024.

Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan aktivitas operasional yang masih berada dalam skala terbatas dan tidak menimbulkan tekanan likuiditas.

The increase indicates a rise in operational activities that remain within a limited scale and do not create liquidity pressure.

## Utang Pajak
Taxes Payable

Jumlah utang pajak PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,84 miliar, yaitu lebih tinggi 85,86% atau Rp1,31 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,53 miliar.

The total taxes payable of IIGF in 2025 amounted to Rp2.84 billion, 85.86% or Rp1.31 billion higher compared to Rp1.53 billion in 2024.

Peningkatan ini bersifat temporer dan administratif, sejalan dengan perhitungan kewajiban pajak akhir tahun, dan tidak mencerminkan penurunan kemampuan bayar Perseroan.

This increase is temporary and administrative in nature, in line with the year-end tax liability calculation, and does not reflect any decline in the Company's ability to meet its payment obligations.

## Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan, dan Utang Lain-Lain
Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables

Jumlah biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp76,42 miliar, yaitu lebih rendah 35,20% atau Rp41,50 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp117,92 miliar.

The total accrued expenses, provisions, and other payables of IIGF in 2025 amounted to Rp76.42 billion, representing a decrease of 35.20% or Rp41.50 billion compared to Rp117.92 billion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi atas sisa saldo estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi sehubungan dengan berakhirnya periode penjaminan pelaku usaha korporasi pada akhir tahun 2025.

This was primarily influenced by the realization of remaining estimated balance of commitments and contingencies for corporate business guarantees in connection with the end of the corporate business guarantee period at the end of 2025.

Penurunan ini mencerminkan penyelesaian kewajiban operasional serta pengelolaan utang jangka pendek yang lebih efisien, sehingga berdampak positif terhadap likuiditas.

The decrease reflects the settlement of operational obligations and more efficient management of short-term liabilities, thereby positively impacting the Company's liquidity.

## Pendapatan Tangguhan
Unearned Income

Jumlah pendapatan tangguhan PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp32,87 miliar, yaitu lebih rendah 54,21% atau Rp38,92 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp71,79 miliar.

The total unearned income of IIGF in 2025 amounted to Rp32.87 billion, a decrease of 54.21% or Rp38.92 billion compared to Rp71.79 billion in 2024.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas sisa saldo pendapatan tangguhan penjaminan pelaku usaha korporasi sehubungan dengan berakhirnya periode penjaminan pelaku usaha korporasi pada akhir tahun 2025.

The decrease was primarily due to the realization of remaining balance of deferred income from corporate business guarantees in connection with the end of the corporate business guarantee period at the end of 2025.

## Liabilitas Sewa Pembiayaan
Finance Lease Liabilities

Jumlah liabilitas sewa pembiayaan PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp13,24 miliar, yaitu lebih rendah 57,56% atau Rp17,96 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp31,20 miliar.

The total finance lease liabilities of IIGF in 2025 amounted to Rp13.24 billion, representing a decrease of 57.56% or Rp17.96 billion compared to Rp31.20 billion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh selama tahun 2025 tidak terdapat kontrak sewa baru untuk Aset Hak-Guna sehingga mutasi atas liabilitas sewa pembiayaan hanya berasal dari nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan.

This was mainly influenced by the absence of new lease contracts for right-of-use assets during 2025, resulting in movements in finance lease liabilities arising only from the present value of minimum finance lease payments.

## Pinjaman Penerusan
Two-step Loan

Jumlah pinjaman penerusan PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp52,70 miliar, yaitu lebih rendah 3,46% atau Rp1,89 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp54,59 miliar.

The total two-step loan of IIGF in 2025 amounted to Rp52.70 billion, representing a decrease of 3.46% or Rp1.89 billion compared to Rp54.59 billion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran pertama atas cicilan pokok pinjaman penerusan sebesar Rp1,89 miliar di tahun 2025.

This was mainly influenced by the first installment payment of the two-step loan principal amounting to Rp1.89 billion in 2025.

Penurunan ini menunjukkan pembayaran kewajiban pinjaman secara bertahap dan stabil, tanpa adanya tambahan utang baru yang signifikan.

The decrease indicates gradual and stable repayment of loan obligations, without any significant addition of new debt.

## Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Obligation

Jumlah liabilitas imbalan kerja PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp39,28 miliar, yaitu mengalami peningkatan 22,07% atau Rp7,10 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp32,18 miliar.

The total employee benefits obligation of IIGF in 2025 was at Rp39.28 billion, representing an increase of 22.07% or Rp7.10 billion compared to Rp32.18 billion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pengakuan akrual liabilitas imbalan kerja bulanan yang lebih tinggi dari tahun 2024.

The increase was mainly influenced by the recognition of higher monthly accrued employee benefits liabilities compared to 2024.

Kenaikan ini bersifat non-kas dan jangka panjang, sehingga tidak berdampak langsung terhadap likuiditas jangka pendek Perseroan.

This increase is non-cash in nature and long-term, therefore it does not have a direct impact on the Company's short-term liquidity.

## Ekuitas
Equity

Jumlah ekuitas PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp17,49 triliun, yaitu mengalami peningkatan 4,88% atau Rp812,85 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp16,67 triliun.

The total equity of IIGF in 2025 amounted to Rp17.49 trillion, increasing by 4.88% or Rp812.85 billion compared to Rp16.67 trillion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan atas laba tahun berjalan 2025.

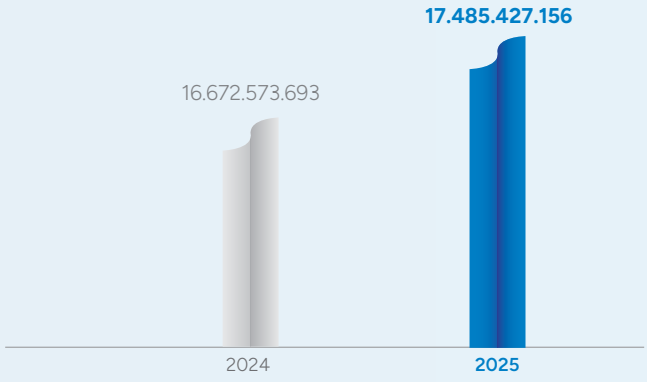
The increase was mainly driven by the growth in profit for the year in 2025.

Hal ini terutama berdampak pada stabilitas perusahaan dan indikator kesehatan keuangan yang lebih baik.

This primarily contributed to greater corporate stability and improved financial health indicators.

**Grafik Perkembangan Ekuitas**
Graph of Equity Development

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands Rupiah)



## Tabel Jumlah Ekuitas
Table of Total Equity

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Modal saham Share capital | 10.655.000.000 | 10.655.000.000 | - | - |
| Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain<br>Unrealized gain from financial assets at fair value through other comprehensive income | **189.024.480** | 85.062.184 | 122,22% | 103.962.296 |
| Keuntungan aktuarial, setelah pajak<br>Gain from actuarial, net of tax | 2.936.422 | 3.852.899 | (23,79%) | (916.477) |
| Saldo laba: Retained earning: | | | | |
| Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib<br>Appropriated – statutory reserve | 352.814.126 | 306.270.126 | 15,20% | 46.544.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya<br>Unappropriated | 6.285.652.128 | 5.622.388.484 | 11,80% | 663.263.644 |
| **Jumlah Ekuitas** Total Equity | **17.485.427.156** | **16.672.573.693** | **4,88%** | **812.853.463** |

## Modal Saham
Share Capital

Jumlah modal saham PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp10,66 triliun sama dengan tahun 2024. Modal saham ini terdiri dari modal dasar sebanyak 20.000.000 lembar saham serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.655.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

The total share capital of IIGF in 2025 amounted to Rp10.66 trillion, the same as in 2024. This share capital consists of 20,000,000 authorized capital and 10,655,000 issued and fully paid capital, with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

## Laba Belum Direalisasi
Unrealized Gain

Jumlah laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tahun 2025 adalah sebesar Rp189,02 miliar, yaitu lebih tinggi 122,22% atau Rp103,96 miliar dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp85,06 miliar.

The total unrealized gains on financial assets at fair value through other comprehensive income in 2025 amounted to Rp189.02 billion, representing an increase of 122.22% or Rp103.96 billion compared to Rp85.06 billion in 2025.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pasar atas nilai investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar selama tahun 2025.

This was mainly influenced by increase in market price affecting the value of bond investments measured at fair value during 2025.

## Keuntungan Aktuarial
Actuarial Gain

Jumlah keuntungan aktuarial PT PII pada tahun 2025 adalah Rp2,94 miliar, yaitu lebih rendah 23,79% atau Rp916,48 juta sebesar Rp3,85 miliar.

The total actuarial gain of IIGF in 2025 amounted to Rp2.94 billion, lower by 23.79% or Rp916.48 million compared to Rp3.85 billion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh efek OCI atas penyesuaian provisi imbalan kerja di tahun 2025.

This was mainly influenced by the OCI effect arising from adjustments to employee benefits provisions in 2025.

### Saldo Laba
Retained Earnings

Jumlah saldo laba ditentukan penggunaannya - cadangan wajib PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp352,81 miliar, yaitu mengalami peningkatan 15,20% atau Rp46,54 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp306,27 miliar.

The total appropriated retained earnings – statutory reserve of IIGF in 2025 amounted to Rp352.81 billion, representing an increase of 15.20% or Rp46.54 billion compared to Rp306.27 billion in 2024.

Jumlah saldo laba belum ditentukan penggunaannya PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp6,29 triliun, yaitu mengalami peningkatan 11,80% atau Rp663,26 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,62 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan olah adanya kenaikan atas laba tahun berjalan 2025.

The total unappropriated retained earnings of IIGF in 2025 amounted to Rp6.29 trillion, representing an increase of 11.80% or Rp663.26 billion compared to Rp5.62 trillion in 2024. The increase was mainly driven by the growth in profit for the year in 2025.

## Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Pada tahun 2025, PT PII berhasil mencatatkan peningkatan kinerja keuangan yang positif. Perolehan pendapatan dan laba yang konsisten didukung oleh strategi yang tepat menjadi aspek pendorong utamanya.

In 2025, IIGF successfully recorded a positive improvement in its financial performance. Consistent revenue and profit generation, supported by appropriate strategies, were the main driving factors.

### Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Table of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Pendapatan Revenues | 1.478.204.800 | 1.486.930.586 | (0,59)% | (8.725.786) |
| Beban usaha Operating Expense | **(536.928.315)** | (544.905.230) | (1,46)% | 7.976.915 |
| Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax | 941.276.485 | 942.025.356 | (0,08)% | (748.871) |
| Beban pajak penghasilan Income tax expense | (45.292.841) | (11.145.678) | 306,37% | (34.147.163) |
| **Laba tahun berjalan** Profit for the year | **895.983.644** | **930.879.678** | **(3,75)%** | **(34.896.034)** |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Other comprehensive income for the year, after tax | 103.045.819 | (53.941.163) | (291,03)% | 156.986.982 |
| **Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan** Total Comprehensive Income for the Year | **999.029.463** | **876.938.515** | **13,92%** | **122.090.948** |

# Pendapatan
Revenues

Jumlah pendapatan PT PII tahun 2025 sebesar Rp1,48 triliun, yaitu mengalami penurunan 0,59% atau Rp8,73 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,49 triliun.

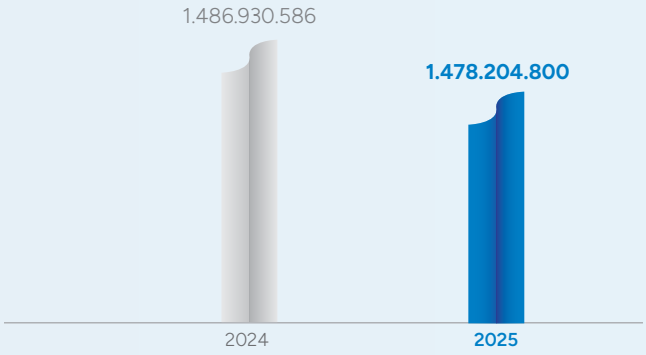
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan penjaminan korporasi PEN, dikarenakan nilai atas estimasi kontijensi yang direalisasikan lebih kecil dari pada tahun 2025. Selain itu pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (PDF) juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh berakhirnya penugasan PDF untuk proyek Jaringan Gas Pelembang dan mundurnya beberapa milestone proyek yang berdampak terhadap pengakuan pendapatan PDF.

Total revenue of IIGF in 2025 amounted to Rp1.48 trillion, representing a decrease of 0.59% or Rp8.73 billion compared to 2024, which amounted to Rp1.49 trillion.

The decline was primarily due to PEN corporate guarantee income, as the realized value of the estimated contingency was lower than in 2025. Furthermore, project preparation and transaction assistance (PDF) revenue also decreased due to the termination of PDF's assignment for Palembang Gas Network project and the delay of several project milestones, which affected PDF revenue recognition.

**Grafik Pendapatan**
Grafik Pendapatan

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)




**Tabel Pendapatan**
Table of Revenues

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Pendapatan penjaminan Revenue from guarantee | 292.584.422 | 310.054.107 | (5,63%) | (17.469.685) |
| Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory | **55.393.409** | 70.265.155 | (21,17%) | (14.871.746) |
| Pendapatan pengelolaan dana Revenue from Investments | 1.118.103.290 | 1.091.915.052 | 2,40% | 26.188.238 |
| Pendapatan Bunga Regres Pendapatan Bunga Regres | 10.207.925 | 13.625.092 | (25,08%) | (3.417.167) |
| Pendapatan lainnya Income from Others | 1.915.754 | 1.071.180 | 78,85% | 844.574 |
| **Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues** | **1.478.204.800** | **1.486.930.586** | **(0,59%)** | **(8.725.786)** |

# Beban Usaha
Operating Expenses

Di tengah tekanan terhadap pencapaian pendapatan usaha serta kebutuhan menjaga rasio margin laba bersih dan BOPO pada tingkat yang sehat, Perseroan secara konsisten menerapkan disiplin pengendalian biaya dan inisiatif efisiensi operasional.

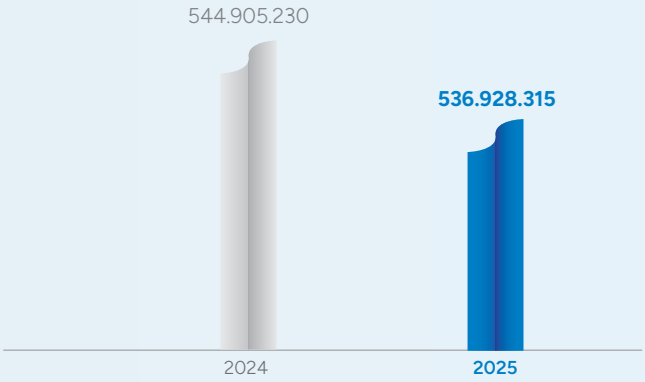
Amidst pressure to achieve operating revenue and the need to maintain sound net profit margins and BOPO ratios, the Company consistently implemented cost control discipline and operational efficiency initiatives.

Upaya tersebut menghasilkan realisasi beban usaha tahun 2025 sebesar Rp536,93 miliar, turun Rp7,98 miliar atau 1,46% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp544,91 miliar. Penurunan ini mencerminkan efektivitas strategi efisiensi yang dijalankan Perseroan dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika bisnis.

These efforts resulted in operating expenses of Rp536.93 billion in 2025, a decrease of Rp7.98 billion, or 1.46%, compared to Rp544.91 billion in 2024. This decrease reflected the effectiveness of the Company's efficiency strategy in maintaining profitability amidst business dynamics.

### Grafik Perkembangan Beban Usaha
Graph of Operating Expenses

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)




### Tabel Beban Usaha
Table of Operating Expenses

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Beban pajak final Final tax expense | (166.201.263) | (158.158.364) | 5,09% | (8.042.899) |
| Umum dan administrasi General and administrative | **(131.719.702)** | (128.552.881) | 2,46% | (3.166.821) |
| Penjaminan Guarantee | **(90.589.192)** | (87.923.483) | 3,03% | (2.665.709) |
| Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi Project preparation and transaction advisory | **(47.809.924)** | (61.441.679) | (22,19%) | 13.631.755 |
| Inisiasi bisnis Inisiasi bisnis | **(16.170.859)** | (20.129.272) | (19,66%) | 3.958.413 |
| Pengembangan usaha Business development | **(38.977.238)** | (38.665.474) | 0,81% | (311.764) |
| Kerugian penurunan nilai Impairment losses | **(36.333.890)** | (38.913.580) | (6,63%) | 2.579.690 |
| Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan) Interest expense (including finance lease interest) | **(5.549.658)** | (7.005.772) | (20,78%) | (1.456.114) |
| Penyusutan Depreciation | **(5.041.580)** | (4.702.176) | 7,22% | (339.404) |
| Amortisasi Amortization | **(2.291.207)** | (1.963.944) | 16,66% | (327.263) |
| Keuntungan kurs, bersih Foreign exchange (loss)/gain, net | **166.489** | 166.542 | (0,03%) | (53) |
| Penghasilan keuangan, kotor Finance income, gross | **3.247.411** | 1.986.883 | 63,44% | 1.260.528 |
| Lain-lain Others | **342.298** | 397.970 | (13,99%) | (55.672) |
| **Jumlah Beban Usaha** Total Operating Expenses | **(536.928.315)** | **(544.905.230)** | **(1,46%)** | **7.976.915** |

## Laba sebelum Pajak Penghasilan
Profit Before Income Tax

Jumlah laba sebelum pajak PT PII tahun 2025 sebesar Rp941,28 miliar, yaitu mengalami penurunan 0,08% atau Rp748,87 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp942,03 miliar.

IIGF's profit before income tax in 2025 amounted to Rp941.28 billion, representing a decrease of 0.08% or Rp748.87 million compared to Rp942.03 billion in 2024.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh pencapaian pendapatan usaha tahun 2025 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, terutama berasal dari pendapatan penjaminan dan pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (PDF).

This decrease was primarily driven by a decrease in operating revenues for 2025 compared to that of 2024, primarily stemming from underwriting income and project preparation and transaction assistance (PDF).

Selain itu, Perseroan juga mencatat adanya cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha di tahun 2025 sebesar Rp36,33 miliar (2024: Rp38,91 miliar). Terkait pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai ini berdampak terhadap pencapaian laba Perseroan, namun memberikan gambaran yang lebih akurat tentang risiko kredit yang dihadapi Perseroan.

Furthermore, the Company recorded an allowance for impairment losses on accounts receivable in 2025 of Rp36.33 billion (2024: Rp38.91 billion). While this allowance for impairment losses affected the Company's profit, it provided a more accurate picture of the credit risk faced by the Company.

## Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Jumlah laba tahun berjalan PT PII tahun 2025 sebesar Rp895,98 miliar, lebih rendah 3,75% atau Rp34,90 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp930,88 miliar.

IIGF's profit for the year in 2025 amounted to Rp895.98 billion, representing a decrease of 3.75% or 34.90 billion compared to Rp930.88 billion in 2024.

Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi atas beban pajak tangguhan pada tahun 2025 sebesar Rp45,29 miliar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11,15 miliar.

This was mainly influenced by the realization of deferred tax expense in 2025 of Rp45.29 billion, an increase compared to Rp11.15 billion in 2024.

## Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan
Other Comprehensive Income for the Year

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan PT PII tahun 2025 sebesar Rp103,05 miliar sedangkan untuk tahun 2024 adalah sebesar minus Rp56,95 miliar.

IIGF recorded other comprehensive income for the year of Rp103.05 billion in 2025, while in 2024 it recorded negative Rp56.95 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga pasar atas investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar pada 31 Desember 2025.

This was mainly driven by an increase in market price for bond investments measured at fair value as of 31 December 2025.

Hal ini terutama berdampak pada kebijakan perusahaan dalam mengevaluasi pengelompokan investasi obligasi terkait dengan pencatatan yang diukur dengan nilai wajar atau pada biaya perolehan.

This particularly affected the Company's policy in evaluating the classification of bond investments related to recording measured at fair value or at cost.

## Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

PT PII berhasil membukukan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp999,03 miliar, yaitu lebih tinggi 13,92% atau Rp122,09 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp876,94 miliar.

IIGF recorded total comprehensive income for the year 2025 of Rp999.03 billion, representing an increase of 13.92% or Rp122.09 billion compared to Rp876.94 billion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh dikarenakan peningkatan harga pasar atas investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar selama tahun 2025.

This increase was mainly influenced by the rise in market price for bond investments measured at fair value during 2025.

# Analisis Arus Kas

Cash Flow Analysis

Jumlah kas dan setara kas PT PII pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7,29 triliun, yaitu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 258,92% atau Rp5,26 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,03 triliun.

The total cash and cash equivalents of IIGF in 2025 amounted to Rp7.29 trillion, representing a significant increase of 258.92%, or Rp5.26 trillion, compared to Rp2.03 trillion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada deposito berjangka dengan jatuh tempo ≤ 3 bulan. Hal ini merupakan strategi Perseroan dalam mengoptimalkan imbal hasil pengelolaan dana dari penempatan di deposito berjangka ditengah ketidakpastian perekonomian global dan domestik yang berdampak terhadap tren suku bunga acuan yang cenderung turun.

This increase was primarily driven by an increase in time deposits with maturities of ≤ 3 months. This was the Company's strategy to optimize returns on fund management from time deposits amidst global and domestic economic uncertainty, which affected the downward trend in benchmark interest rates.

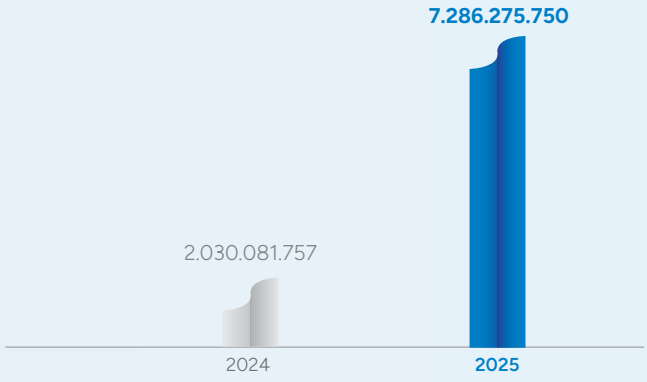
Hal ini berdampak pada kecukupan likuiditas Perseroan yang lebih baik di tahun 2025.

This development particularly contributed to a stronger liquidity position for the Company in 2025.

**Grafik Perkembangan Kas dan Setara Kas**

Graph of Cash and Cash Equivalent Developments

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah)
(expressed in thousands of Rupiah)



### Tabel Arus Kas
Table of Cash Flow

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan<br>Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase<br>Percentage | Nominal |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi<br>Net cash flow provided from operating activities | 801.064.201 | 784.137.118 | 2,16% | 16.927.083 |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi<br>Net cash flow provided from/(used in) investing activities | 4.662.869.649 | 1.310.773.086 | 255,73% | 3.352.096.563 |
| Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan<br>Net cash flow (used in)/provide from financing activities | (207.739.857) | (186.316.100) | 11,50% | (21.423.757) |
| Kenaikan bersih kas dan setara kas<br>Net increase in cash and cash equivalents | 5.256.193.993 | 1.908.594.104 | 175,40% | 3.347.599.889 |
| Kas dan setara kas awal tahun<br>Cash and cash equivalent at beginning of year | 2.030.081.757 | 121.487.653 | 1571,02% | 1.908.594.104 |
| **Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun**<br>**Total cash and cash equivalents at end of year** | **7.286.275.750** | **2.030.081.757** | **258,92%** | **5.256.193.993** |

## Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Cash flows from operating activities

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 sebesar Rp801,06 miliar, yaitu meningkat 2,16% atau sebesar Rp16,93 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp784,14 miliar.

Net cash flow provided from operating activities in 2025 amounted to Rp801.06 billion, an increase of 2.16%, or Rp16.93 billion, compared to Rp784.14 billion in 2024.

Peningkatan ini secara umum bersifat wajar dan lebih mencerminkan kegiatan usaha Perseroan yang semakin berkembang.

This increase was generally reasonable and better reflected the Company's growing business activities.

### Tabel Kas dari Aktivitas Operasi
Table of Cash from Operating Activities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan<br>Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase<br>Percentage | Nominal |
| Laba sebelum pajak penghasilan ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:<br>Profit before income tax add items not affecting cash flows: | 941.276.485 | 942.025.356 | (0,08%) | (748.871) |
| Beban penyusutan Depreciation expense | **5.041.580** | 4.702.176 | 7,22% | 339.404 |
| Beban kerugian penurunan nilai<br>Impairment losses | 36.333.890 | 38.913.580 | (6,63%) | (2.579.690) |

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan<br>Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase<br>Percentage | Nominal |
| Beban amortisasi Amortization expense | 2.291.207 | 1.963.944 | 16,66% | 327.263 |
| Beban penyisihan imbalan kerja<br>Expense from provision for employee benefit obligation | 7.172.451 | 7.958.143 | (9,87%) | (785.692) |
| Beban amortisasi aset hak-guna<br>Right-of-use assets amortization expense | 17.169.408 | 17.228.322 | (0,34%) | (58.914) |
| Beban bunga sewa pembiayaan<br>Finance lease interest expense | 1.724.503 | 3.078.519 | (43,98%) | (1.354.016) |
| Beban amortisasi investasi<br>Beban amortisasi investasi | (27.616.413) | (1.017.114) | 2.615,17% | (26.599.299) |
| **Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi**<br>**Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities** | **983.393.111** | **1.014.852.926** | **(3,10%)** | **(31.459.815)** |
| (Kenaikan)/penurunan aset operasi:<br>(Increase)/ decrease in operating assets: | | | | |
| Piutang usaha Account receivables | (109.225.373) | (113.723.991) | (3,96%) | 4.498.618 |
| Piutang lainnya Other receivables | 1.467.995 | (491.080) | (398,93%) | 1.959.075 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka<br>Prepaid expenses and advances | (405.786) | 2.007.185 | (120,22%) | (2.412.971) |
| Beban tangguhan Deferred expenses | (1.091.199) | 1.496.561 | (172,91%) | (2.587.760) |
| Pajak dibayar dimuka Prepaid tax | 20.751 | (4.138.995) | (100,50%) | 4.159.746 |
| (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:<br>(Decrease)/increase in operating liabilities: | | | | |
| Utang usaha Account payable | 7.271.316 | (7.313.702) | (199,42%) | 14.585.018 |
| Utang pajak Taxes payable | 1.312.215 | (2.314.208) | (156,70%) | 3.626.423 |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain<br>Accrued expenses, provisions, and other payables | (41.507.536) | (44.744.387) | (7,23%) | 3.236.851 |
| Pembayaran manfaat imbalan kerja<br>Payment of employee benefit | (1.245.891) | (2.451.817) | (49,18%) | 1.205.926 |
| Pendapatan tangguhan Unearned income | (38.925.402) | (59.041.374) | (34,07%) | 20.115.972 |
| **Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi**<br>**Changes in operating assets and liabilities** | **(182.328.910)** | **(230.715.808)** | **(20,97%)** | **48.386.898** |
| **Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi**<br>**Net cash flow provided from operating activities** | **801.064.201** | **784.137.118** | **2,16%** | **16.927.083** |

## Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2025 sebesar Rp4,66 triliun, mengalami peningkatan 255,73% atau sebesar Rp3,35 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,31 triliun.

Net cash flow provided from investing activities in 2025 amounted to Rp4.66 trillion, an increase of 255.73%, or Rp3.35 trillion, compared to Rp1.31 trillion in 2024.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penempatan investasi pada deposito berjangka yang jatuh tempo selama 2025 yang lebih difokuskan pada deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo ≤ 3 bulan yang dikategorikan sebagai kas dan setara kas.

This was primarily influenced by investments in time deposits maturing in 2025, which were more focused on time deposits with maturities of ≤ 3 months, categorized as cash and cash equivalents.

### Tabel Kas dari Aktivitas Investasi
Table of Cash from Investing Activities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Penempatan investasi Placement for investments | (2.154.117.000) | (8.916.640.000) | (75,84%) | 6.762.523.000 |
| Investasi jatuh tempo Investasi jatuh tempo | 6.825.053.000 | 10.230.800.000 | (33,29%) | (3.405.747.000) |
| Pembelian aset tetap Pembelian aset tetap | (5.849.497) | (770.550) | 659,13% | (5.078.947) |
| Pembelian aset takberwujud Pembelian aset takberwujud | (2.111.478) | (2.600.364) | (18,80%) | 488.886 |
| Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan | (105.376) | (16.000) | 558,60% | (89.376) |
| **Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi** Net Cash Flow Provided/(Used In) Investing Activities | **4.662.869.649** | **1.310.773.086** | **255,73%** | **3.352.096.563** |

## Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Cash flows from Financing Activities

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 sebesar Rp207,74 miliar, mengalami peningkatan 11,50% atau Rp21,42 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp186,32 miliar.

Net cash flow used in financing activities in 2025 amounted to Rp207.74 billion, an increase of 11.50%, or Rp21.42 billion, compared to Rp186.32 billion in 2024.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran dividen selama tahun 2025 lebih besar daripada tahun 2024.

This increase was primarily driven by higher dividend payments in 2025 compared to 2024.

### Tabel Kas dari Aktivitas Pendanaan
Table of Cash from Financing Activities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Percentage | Nominal |
| Pembayaran pinjaman penerusan Two-step loans payment | (1.885.333) | (540.241) | 248,98% | (1.345.092) |
| Pembayaran dividen Dividend payment | (186.176.000) | (167.165.000) | 11,37% | (19.011.000) |
| Pembayaran sewa Payment for lease | (19.678.524) | (18.610.859) | 5,74% | (1.067.665) |
| **Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan** Net cash flow (used in)/provide from financing activities | **(207.739.857)** | **(186.316.100)** | **11,50%** | **(21.423.757)** |

# Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Debt Service Ability and Receivables Collectability

Sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang menyediakan layanan penjaminan, Perseroan menghadapi risiko likuiditas yang berkaitan dengan potensi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansial, baik atas klaim yang telah diajukan maupun klaim potensial atas risiko-risiko yang ditanggung dalam perjanjian penjaminan.

As an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI) providing guarantee services, the Company faces liquidity risk related to the potential inability to meet financial obligations, both for claims that have been submitted and for potential claims arising from risks covered under guarantee agreements.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara aktif menyesuaikan portofolio investasinya dengan kewajiban finansial yang timbul dari klaim yang telah diajukan serta memperhitungkan profil jatuh tempo dari potensi klaim yang dapat terjadi di masa mendatang. Perseroan secara berkala melakukan analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan likuiditas guna memastikan kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban finansial.

To manage and mitigate these risks, the Company actively adjusts its investment portfolio in line with financial obligations arising from submitted claims and considers the maturity profile of potential future claims. The Company periodically conducts analysis and identification of liquidity needs to ensure sufficient funds meet its financial obligations.

Selain itu, analisis ini didukung oleh strategi investasi yang selaras dengan regulasi yang berlaku serta kebijakan investasi yang bersifat konservatif. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mengelola risiko likuiditas secara optimal, sehingga memastikan keberlanjutan operasional dan keandalan layanan penjaminan yang diberikan.

In addition, this analysis is supported by an investment strategy aligned with applicable regulations and a conservative investment policy. This approach enables the Company to optimally manage liquidity risk, ensuring operational continuity and the reliability of the guarantee services provided.

## Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Short-Term Debt Service Ability

Dalam rangka memastikan kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, Perseroan menerapkan pengukuran likuiditas melalui dua indikator utama, yaitu Rasio Kas dan Rasio Lancar. Rasio Kas mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas jangka pendek secara langsung menggunakan kas dan setara kas, yang merupakan aset paling likuid. Sedangkan, Rasio Lancar digunakan untuk menilai sejauh mana aset lancar yang dimiliki Perseroan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

In order to ensure adequate financial capacity to meet short-term obligations, the Company measures liquidity using two main indicators: the Cash Ratio and the Current Ratio. The Cash Ratio measures the Company's ability to settle short-term liabilities directly using cash and cash equivalents, which are the most liquid assets. The Current Ratio is used to assess the extent to which the Company's current assets can cover its short-term obligations.

Perseroan senantiasa menjaga tingkat likuiditas yang optimal dengan memiliki cadangan kas dan setara kas yang memadai, serta investasi yang dikelola secara bijaksana. Dengan strategi manajemen likuiditas yang baik, Perseroan memastikan stabilitas keuangan yang mendukung keberlanjutan operasional dan pemenuhan kewajiban finansial secara tepat waktu.

The Company consistently maintains an optimal level of liquidity by holding sufficient cash and cash equivalents, along with prudently managed investments. With this effective liquidity management strategy, the Company ensures financial stability that supports operational continuity and the timely fulfillment of financial obligations.

### Tabel Kinerja Rasio Likuiditas
Tabel of Liquidity Ratio Performance

(dinyatakan dalam %) (expressed in %)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease |
|---|---|---|---|
| Rasio Kas Cash Ratio | 18.441 | 13.039 | 41,43% |
| Rasio Lancar Current Ratio | 15.859 | 11.096 | 42,93% |

Dari rasio-rasio likuiditas, tingkat likuiditas Perseroan pada tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio kas mengalami peningkatan dari 13,039% pada tahun 2024 menjadi 18,441% di tahun 2025, sedangkan rasio lancar mengalami peningkatan dari 11,096% pada tahun 2024 menjadi 15,859% di tahun 2025.

Based on liquidity ratios, the Company's liquidity level in 2025 recorded an improvement in performance compared to the previous year. Cash ratio increased from 13.039% in 2024 to 18.441% in 2025. Whereas, current ratio increased from 11.096% in 2024 to 15.859% in 2025.

## Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang
Long-Term Debt Service Ability

Hingga akhir tahun 2025, saldo utang jangka panjang Perseroan terutama berupa pinjaman penerusan yang dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas dan teknis operasi Perseroan melalui dukungan Bank Dunia (World Bank) senilai Rp52,70 miliar yang mengalami penurunan dari Rp54,59 miliar di tahun 2024 karena adanya pembayaran angsuran pokok pinjaman penerusan sebesar Rp1,88 miliar yang telah jatuh tempo setelah melewati masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan berakhir di tahun 2034.

As of the end of 2025, the Company's long-term debt balance mainly consisted of two-step loans used to enhance the Company's operational capacity and technical capabilities through support from the World Bank, amounting to Rp52.70 billion. This represents a decrease from Rp54.59 billion in 2024 due to a principal repayment of the two-step loan of Rp1.88 billion, which had matured after a 9 (nine) year grace period from the first drawdown date and will conclude in 2034.

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka panjang diukur melalui rasio solvabilitas. Rasio ini mencerminkan kapasitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan mengandalkan total aset yang dimiliki. Tingkat solvabilitas yang sehat menunjukkan struktur keuangan yang kuat serta ketahanan terhadap risiko keuangan, sehingga memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas jangka panjang Perseroan.

The Company's long-term debt service ability is measured through the solvency ratio. This ratio reflects the Company's capacity to fulfill its long-term obligations by relying on its total assets. A healthy level of solvency indicates a strong financial structure and resilience against financial risks, thereby ensuring the sustainability of the Company's operations and long-term stability.

### Tabel Kinerja Rasio Solvabilitas
Table of Solvency Ratio Performance

(dinyatakan dalam %) (expressed in %)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease |
|---|---|---|---|
| Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets Ratio | 1,31 | 1,86 | (29,57%) |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio | 1,32 | 1,90 | (30,53%) |

Pada tahun 2025, rasio liabilitas terhadap aset tercatat sebesar 1,31%, sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas mencapai 1,32%.

In 2025, the liabilities-to-assets ratio was recorded at 1.31%, while the liabilities-to-equity ratio reached 1.32%.

## Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan

Company's Collectability Level of Receivables

Hingga akhir tahun 2025, piutang Perseroan terdiri dari piutang bunga yang belum diterima, piutang regres, piutang penjaminan, serta piutang penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Piutang usaha Perseroan didominasi oleh piutang regres sebesar 45,98%, diikuti dengan piutang bunga yang belum diterima sebesar 24,73% dan piutang penjaminan sebesar 22,44% serta piutang PDF sebesar 6,85% dari total piutang usaha.

Until the end of 2025, the Company's receivables consist of interest receivables, recourse receivables, guarantee receivables, as well as project preparation and transaction advisory receivables. The Company's trade receivables were dominated by regress receivables at 45.98%, followed by unearned interest receivables at 24.73%, guarantee receivables at 22.44%, and PDF receivables at 6.85% of total trade receivables.

Sesuai dengan PSAK 109 (dahulu PSAK 71) "Instrumen Keuangan", Perseroan secara proaktif melakukan pengukuran kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) untuk mengantisipasi risiko kredit yang mungkin timbul. Hingga 31 Desember 2025, Perseroan telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara akumulasi sebesar Rp94,02 miliar atas piutang regres dan piutang penjaminan, sehingga nilai tercatat piutang usaha menjadi Rp475,28 miliar. Pembentukan cadangan ini mencerminkan pendekatan *prudent* Perseroan dalam mengantisipasi potensi risiko kredit, sekaligus menjaga kualitas aset secara berkelanjutan.

In accordance with PSAK 109 (formerly PSAK 71) "Financial Instruments," the Company proactively measures expected credit loss to anticipate potential credit risks. As of 31 December 2025, the Company has established an accumulated allowance for impairment losses of Rp94.02 billion for regress receivables and guarantee receivables, bringing the carrying value of trade receivables to Rp475.28 billion. This provision reflected the Company's prudent approach to anticipating potential credit risks while sustainably maintaining asset quality.

Piutang regres timbul dari pembayaran klaim yang telah dilakukan Perseroan akibat tidak terpenuhinya kewajiban finansial oleh PJPK kepada BU pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung dan Pekanbaru. Selain itu, piutang bunga atas regres sebesar Rp27,52 miliar telah dicatat sebagai bunga yang belum diterima.

Recourse receivables arise from claim payments made by the Company due to the failure of the GCA to fulfill financial obligations to the Business Entity (BU) in the Drinking Water Supply System (SPAM) projects in Bandar Lampung and Pekanbaru. In addition, interest on recourse receivables of Rp27.52 billion has been recorded as accrued interest.

# Struktur Modal

Capital Structure

PT PII menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi Pemegang Saham. Dalam rangka penelaahan struktur modal, Perseroan mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi

IIGF reviews and manages its capital structure to ensure an optimal capital structure and returns for its shareholders. In reviewing the capital structure, the Company considers several factors, including future capital requirements and capital efficiency of the Company, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected

masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis.

capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

Perseroan dapat mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal dengan melakukan penyesuaian jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

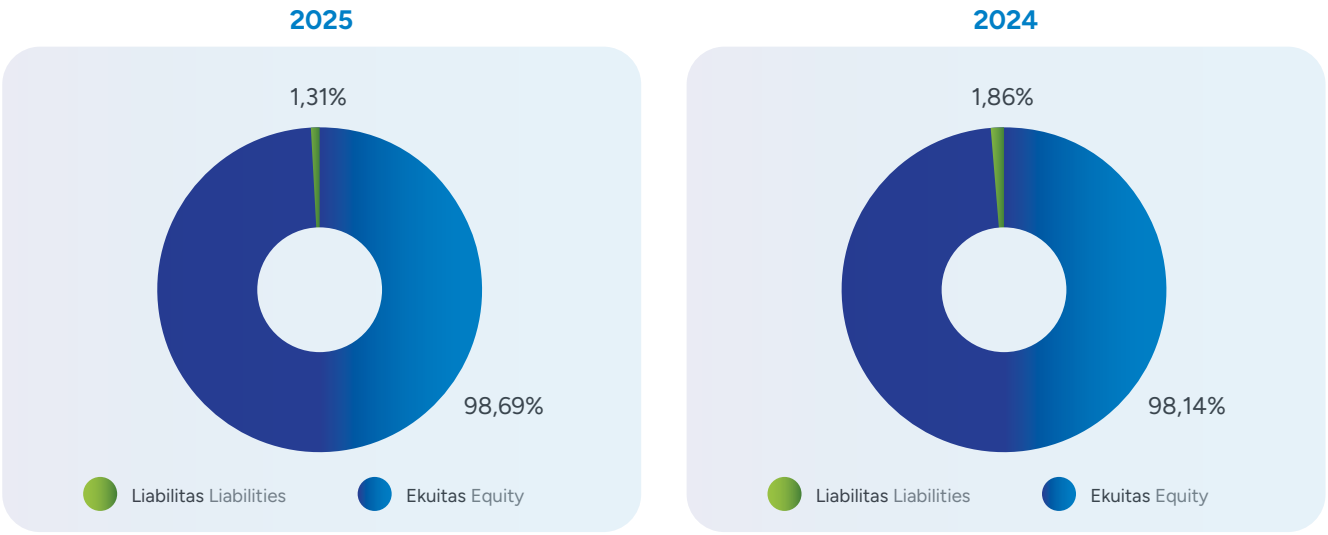
The Company may maintain or adjust its capital structure by adjusting the amount of dividends distributed to shareholders, returning capital to shareholders, issuing new shares, or selling assets to reduce the level of debt.

### Tabel Komponen dan Komposisi Struktur Modal
Table of Components and Composition of Capital Structure

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian Description | 2025 | | 2024 | | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | Persentase Percentage | Nominal | Persentase Percentage | Nominal | Persentase Percentage |
| Jumlah Liabilitas Total Liabilities | 231.360.737 | 1,31% | 315.947.966 | 1,86% | (84.587.229) | (26,77%) |
| Jumlah Ekuitas Total Equity | 17.485.427.156 | 98,69% | 16.672.573.693 | 98,14% | 812.853.463 | 4,88% |
| Jumlah Aset Total Assets | 17.716.787.893 | 100,00% | 16.988.521.659 | 100,00% | 728.266.234 | 4,29% |

### Grafik Komposisi Struktur Modal
Graph of Capital Structure Composition




## Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

The policy on capital management aims to ensure that the Company maintains an efficient capital structure, possesses strong capital to support its current business development strategy, sustains business continuity in the future, and complies with the capital adequacy requirements set by the regulator.

## Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal

Basis for Choosing a Capital Structure Policy

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce the level of debt.

Perseroan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

The Company reviews and manages its capital structure to ensure an optimal capital structure and returns for shareholders, by considering future capital requirements and the Company's capital efficiency, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic investment opportunities. To maintain or adjust its capital structure, the Company may utilize internal funding to reduce its debt.

# Ikatan Material Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditure

Hingga akhir tahun 2025, PT PII tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai tujuan dari ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, dan mata uang yang menjadi denominasi.

As of the end of 2025, IIGF did not have any material bonds/commitments related to capital expenditure. Therefore, there is no information regarding the purpose of such commitments, the expected sources of funds to fulfill them, or the currency in which they would be denominated.

# Realisasi Investasi Barang Modal

Capital Expenditrue Realization

PT PII mengalokasikan investasi pada barang modal dalam bentuk aset tetap, aset hak guna, dan aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional. Seluruh investasi tersebut dibiayai sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan.

IIGF allocates capital expenditure in the form of fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets utilized to support operational activities. All of these investments are fully financed using the Company's internal funds.

Program investasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan, memastikan setiap aktivitas kerja dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan kajian atas kebutuhan investasi pada setiap barang modal.

This investment program aims to support the smooth operation of the Company, ensuring that all work activities can be carried out optimally, effectively, and efficiently. In its implementation, assessments have been conducted to determine investment needs for each capital asset.

# Investasi Barang Modal
Capital Expenditure

Realisasi investasi barang modal PT PII pada tahun 2025 sebesar Rp7,96 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp3,90 miliar. Berikut disajikan rincian perkembangan investasi dalam aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud.

The realization of capital expenditure by IIGF in 2025 amounted to Rp7.96 billion and in 2024 amounted to Rp3.90 billion. The following presents the details of the development of investments in fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets.

## Tabel Realisasi Investasi Barang Modal
Table of Capital Expenditure Realization

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian<br>Description | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Aset Kepemilikan Langsung:** Direct Ownership Assets | | |
| Aset dalam penyelesaian Construction in progress | 5.451.735 | 252.965 |
| Prasarana kantor Leasehold improvement | 106.560 | 98.790 |
| Peralatan komputer Computer equipment | 84.160 | 11.844 |
| Peralatan kantor, perabotan, dan perlengkapan<br>Office equipment, furniture and fixtures | 207.042 | 406.952 |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **5.849.497** | **770.551** |
| **Aset Hak Guna:** Right-of-use Assets | | |
| Gedung kantor Office Building | 0 | 530.217 |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **0** | **530.217** |
| **Aset Tak Berwujud:** Intangible Assets | | |
| Aset dalam penyelesaian Construction in progress | 1.719.877 | 1.022.608 |
| Piranti lunak Software | 391.601 | 1.577.755 |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **2.111.478** | **2.600.363** |
| **Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi Barang Modal**<br>**Total Capital Expenditure Realization** | **7.960.975** | **3.901.131** |

Dari jumlah diatas, berikut disajikan jumlah nilai buku setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi dari masing-masing nilai investasi barang modal:

From the amount above, the following presents the net book value after deducting accumulated depreciation and/or amortization for each capital goods investment:

## Tabel Investasi pada Aset Tetap Tahun 2025
Table of Fixed Assets Investment in 2025

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah) (expressed in thousands of Rupiah)

| Uraian<br>Description | Saldo Awal<br>Beginning Balance | Penambahan<br>Additions | Pelepasan<br>Disposals | Reklasifikasi<br>Reclassifications | Saldo Akhir<br>Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan:** Acquisition Cost: | | | | | |
| Aset dalam penyelesaian Construction in progress | 403.485 | 5.451.735 | - | (5.547.225) | 307.995 |
| Prasarana kantor Leasehold improvement | 31.572.672 | 106.560 | - | 5.190.360 | 36.869.592 |
| Peralatan komputer Computer equipment | 15.066.868 | 84.160 | - | - | 15.151.026 |
| Peralatan kantor, perabotan, dan perlengkapan<br>Office equipment, furniture, and fixtures | 11.657.704 | 207.042 | - | 356.865 | 12.221.613 |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **58.700.729** | **5.849.497** | **-** | **-** | **64.550.226** |
| **Akumulasi Penyusutan:** Accumulated Depreciation | | | | | |
| Prasarana kantor Leasehold improvement | (24.094.520) | (3.940.953) | - | - | (28.035.473) |
| Peralatan komputer Computer equipment | (13.912.179) | (738.872) | - | - | (14.651.050) |

| Uraian Description | Saldo Awal Beginning Balance | Penambahan Additions | Pelepasan Disposals | Reklasifikasi Reclassifications | Saldo Akhir Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Peralatan kantor, perabotan, dan perlengkapan Office equipment, furniture, and fixtures | (11.074.824) | (361.755) | - | - | (11.436.579) |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **(49.081.522)** | **(5.041.580)** | **-** | **-** | **(54.123.102)** |
| **Nilai Buku** Net Book Value | **9.619.207** | | | | **10.427.124** |

### Tabel Investasi pada Aset Hak Guna Tahun 2025
Table of Right-of-Use Investment in 2025

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah) (expressed in thousands of Rupiah)

| Uraian Description | Saldo Awal Beginning Balance | Penambahan Additions | Pelepasan Disposals | Saldo Akhir Ending Balance |
|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan:** Acquisition Cost: | | | | |
| Gedung kantor Office Building | 51.508.225 | - | - | 51.508.225 |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **51.508.225** | **-** | **-** | **51.508.225** |
| **Akumulasi Amortisasi:** Accumulated Amortization | | | | |
| Gedung kantor Office Building | (22.892.545) | (17.169.408) | - | (40.061.953) |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **(22.892.545)** | **(17.169.408)** | **-** | **(40.061.953)** |
| **Nilai Buku** Net Book Value | **28.615.680** | | | **11.446.272** |

### Tabel Investasi pada Aset Tak Berwujud Tahun 2025
Table of Intangible Assets Investment in 2025

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah) (expressed in thousands of Rupiah)

| Uraian Description | Saldo Awal Beginning Balance | Penambahan Additions | Pelepasan Disposals | Reklasifikasi Reclassification | Saldo Akhir Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Harga Perolehan:** Acquisition Cost: | | | | | |
| Aset dalam penyelesaian Construction in progress | 1.041.608 | 1.719.877 | - | (1.324.608) | 1.436.877 |
| Piranti lunak Software | 16.433.599 | 391.601 | - | 1.324.608 | 18.149.808 |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **17.475.207** | **2.111.478** | **-** | **-** | **19.586.685** |
| **Akumulasi Penyusutan:** Accumulated Amortization | | | | | |
| Piranti lunak Software | (12.551.662) | (2.291.207) | - | - | (14.842.869) |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **(12.551.662)** | **(2.291.207)** | **-** | **-** | **(14.842.869)** |
| **Nilai Buku** Net Book Value | **4.923.545** | | | | **4.743.816** |

# Prospek Usaha
Business Prospect

## Prospek Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Outlook

Berdasarkan WEO yang dirilis Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan stabil dan resilien pada tingkat 3,3% untuk tahun 2026 dan sedikit menurun pada tahun 2027 yaitu hanya mencapai 3,2%, yaitu sejalan dengan estimasi realisasi pertumbuhan sebesar 3,3% pada tahun 2025.

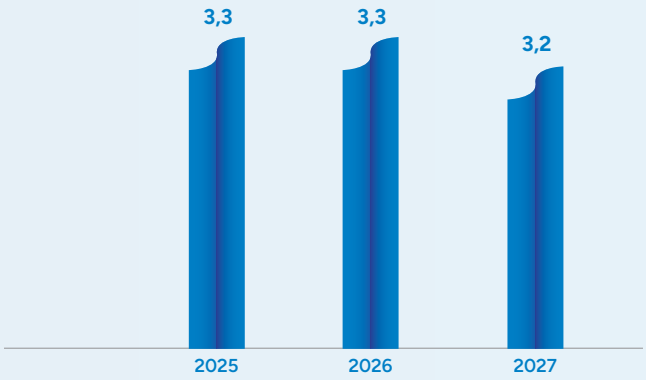
Based on the WEO released in January 2026, global economic growth is projected to remain stable and resilient at 3.3% in 2026, with a slight decline to 3.2% in 2027, in line with the estimated realized growth of 3.3% in 2025.

Ketahanan pertumbuhan ekonomi global tersebut pada prinsipnya tercapai melalui keseimbangan antara berbagai dinamika. Risiko dari dampak negatif atas perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat diredam oleh meningkatnya arus investasi di sektor teknologi, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang menunjukkan akselerasi terutama di kawasan Amerika Utara dan Asia. Di samping itu, keberlanjutan kinerja ekonomi global juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang suportif, kondisi pasar keuangan yang relatif longgar, serta tingkat adaptabilitas sektor swasta dalam merespons perubahan lingkungan usaha.

This resilience in global economic growth is primarily achieved through a balance of various dynamics. Risks from negative impacts of changes in international trade policies can be mitigated by increasing investment flows in the technology sector, including the development of artificial intelligence, which is accelerating particularly in North America and Asia. In addition, the sustainability of global economic performance is also supported by supportive fiscal and monetary policies, relatively accommodative financial market conditions, and the private sector's adaptability in responding to changes in the business environment.

**Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global**
Graph of Global Economic Growth Projection

(%)




Sejalan dengan perkembangan ekonomi tersebut, IMF juga memperkirakan laju inflasi global diproyeksikan melanjutkan tren penurunan secara bertahap, dari estimasi sebesar 4,1% pada tahun 2025 menjadi 3,8% pada tahun 2026, serta mencapai 3,4% pada tahun 2027. Proyeksi ini pada dasarnya sejalan dengan perkiraan pada Oktober 2025, dengan asumsi bahwa proses kembalinya inflasi ke tingkat sasaran akan berlangsung lebih lambat di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara ekonomi besar lainnya.

Sumber: www.imf.org

In line with these economic developments, the IMF also projects that the global inflation rate will continue its gradual decline, from an estimated 4.1% in 2025 to 3.8% in 2026, and reaching 3.4% in 2027. This projection is broadly in line with estimates from October 2025, assuming that the process of bringing inflation back to target levels will progress more slowly in the United States compared to other major economies.

Source: www.imf.org

Selain itu, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 dan 2027 adalah sebesar 5,1%. Dari 30 negara yang tercakup dalam laporan WEO per Januari 2026, Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Proyeksi 5,1% hanya berada di bawah beberapa negara seperti India (6,4%) dan Filipina (5,6%), serta lebih tinggi dibandingkan China (4,5%) dan Malaysia (4,3%).

In addition, the IMF projects Indonesia's economic growth at 5.1% for both 2026 and 2027. Among the 30 countries covered in the WEO report as of January 2026, Indonesia ranks among the fastest-growing economies. The 5.1% projection is slightly below a few countries such as India (6.4%) and the Philippines (5.6%), and higher than China (4.5%) and Malaysia (4.3%).

Meski menunjukkan ketahanan, proyeksi IMF tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah dalam APBN 2025 dan 2026, yakni masing-masing sebesar 5,2% dan 5,4%.

Although showing resilience, the IMF projection is still lower than the economic growth assumptions set by the Government in the 2025 and 2026 State Budgets (APBN), which are 5.2% and 5.4%, respectively.

Kementerian Keuangan menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi mencapai 6% pada tahun 2026, seiring munculnya momentum pemulihan dan akselerasi ekonomi nasional. Optimisme tersebut didukung oleh semakin selarasnya dua mesin utama pertumbuhan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi secara lebih efektif. Di samping itu, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembenahan iklim investasi guna memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan menopang pertumbuhan jangka menengah.

The Ministry of Finance expressed optimism that Indonesia's economic growth can reach 6% in 2026, as momentum for national economic recovery and acceleration emerges. This optimism is supported by the increasing alignment of the two main engines of growth, namely fiscal and monetary policy, which are expected to stimulate economic activity more effectively. In addition, the Government continues various efforts to improve the investment climate to strengthen Indonesia's attractiveness as an investment destination and support medium-term growth.

Pandangan optimistis tersebut juga sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI), yang memperkirakan kinerja perekonomian pada tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9%-5,7%, serta meningkat pada tahun 2027 dalam rentang 5,1%-5,9%.

This optimistic view is also in line with Bank Indonesia's (BI) projections, which anticipate that economic performance in 2026 will improve compared to 2025. BI projects Indonesia's economic growth in 2026 to range between 4.9% and 5.7%, increasing in 2027 to between 5.1% and 5.9%.

Sumber: www.imf.org, www.reuters.com, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan sumber lainnya (diolah)

Source: www.imf.org, www.reuters.com, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia, and other sources (processed)

Pada tahun 2026, sektor infrastruktur Indonesia diproyeksikan kembali mencatatkan pertumbuhan, meskipun arah pembangunan masih relatif berfokus pada infrastruktur pendukung sektor pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional serta infrastruktur sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memantapkan langkah strategis dengan mengusung visi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

In 2026, Indonesia's infrastructure sector is projected to record growth again, although development will still primarily focus on infrastructure supporting the agricultural sector to strengthen national food security, as well as social infrastructure. In line with this, the Ministry of Public Works (PU) has solidified strategic steps by promoting a vision of equitable and sustainable infrastructure development across all regions of Indonesia.

Alokasi anggaran Kementerian PU pada tahun 2026 diarahkan pada sektor-sektor prioritas sebagaimana diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mendukung program swasembada pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan infrastruktur sosial, termasuk pembangunan sekolah rakyat dan fasilitas pendukung lainnya. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

The Ministry of PU budget allocation for 2026 is directed toward priority sectors as mandated by President Prabowo Subianto, particularly to support the self-sufficiency in food program, the Free Nutritious Meal (MBG) program, and the strengthening of social infrastructure, including the construction of public schools and other supporting facilities. This policy reflects the Government's commitment to making infrastructure development an instrument for equitable development and improving community welfare.

Selanjutnya, Pemerintah melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mencakup pengelolaan sumber daya air, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, penguatan layanan dasar permukiman, serta pembangunan prasarana strategis di sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan fasilitas publik lainnya. Program tersebut juga didukung oleh pengembangan infrastruktur transportasi berskala besar, termasuk pengoperasian

Furthermore, the Government continues to accelerate integrated infrastructure development, covering water resource management, improved road and bridge connectivity, strengthened basic settlement services, and the construction of strategic infrastructure in education, health, markets, and other public facilities. These programs are also supported by large-scale transportation infrastructure development, including the operation and

dan pembangunan sejumlah ruas jalan tol di berbagai wilayah, serta percepatan proyek transportasi massal dan perkeretaapian, seperti MRT, LRT, elektrifikasi jalur kereta api, dan reaktivasi jalur kereta eksisting. Seluruh inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah, memperkuat ketahanan wilayah, melancarkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata dan berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sumber lainnya (diolah)

construction of several toll road sections across regions, as well as the acceleration of mass transit and railway projects, such as MRT, LRT, railway electrification, and the reactivation of existing railway lines. All of these initiatives are aimed at improving interregional connectivity, strengthening regional resilience, facilitating logistics distribution and public mobility, and providing more equitable and higher-quality public services to support economic growth and enhance the quality of life for communities, both in rural and urban areas.

Source: Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development, Ministry of Public Works, and other sources (processed)

## Program Strategi Ke Depan
Future Strategy

Dalam rangka merespon dinamika prospek usaha serta menangkap peluang yang diproyeksikan berkembang pada tahun 2026, Perseroan telah merumuskan sejumlah inisiatif strategis yang diarahkan untuk memperkuat keunggulan kompetitif, mengoptimalkan kinerja operasional, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perseroan telah menetapkan program strategis tahun 2026, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tetap fokus pada pemantapan bisnis Penjaminan baik skema KPBU maupun non-KPBU yang tidak hanya terkonsentrasi pada jumlah namun pada peningkatan nilai kebermanfaatan dengan menciptakan sinergi yang berkesinambungan dengan berbagai *stakeholder* terkait.
2. Melanjutkan pelaksanaan pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi risiko secara bersama-sama dengan para PJPK
3. Pengembangan *pipeline* proyek untuk menghadapi kondisi Pemerintahan baru, berfokus pada:
   a. Pendampingan Proyek melalui *matchmaking* dengan dukungan pembiayaan/pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN), *development partners*, dan sumber lainnya.
   b. Sosialisasi kepada calon PJPK baru (sektor baru dan KPBU skala kecil)
   c. Penguatan kolaborasi dengan *strategic partners*
4. Optimalisasi pelaksanaan penugasan PDF dari Kementerian Keuangan melalui dukungan penguatan perencanaan proyek PDF yang berkualitas dan *investable* dengan turut mengupayakan perolehan PDF untuk proyek infrastruktur skala kecil dan/atau di luar skema KPBU serta melalui pengembangan *Project Development Advisory*;

In order to respond to business prospect dynamics and capture opportunities projected to emerge in 2026, the Company has formulated a number of strategic initiatives aimed at strengthening competitive advantages, optimizing operational performance, and ensuring sustainable growth. The Company has established its 2026 strategic programs, which include the following:

1. Maintaining focus on strengthening the Guarantee business, both under PPP and non-PPP schemes, not only by concentrating on volume but also by enhancing the value of benefits through creating sustainable synergies with relevant stakeholders.
2. Continuing active monitoring of projects that have received guarantees in order to anticipate and mitigate risks collaboratively with the GCAs.
3. Developing a project pipeline to address the new Government administration, with a focus on:
   a. Project Advisory through matchmaking supported by financing/funding sourced from the state budget (APBN), development partners, and other sources.
   b. Dissemination of potential new GCAs (in new sectors and small-scale PPP projects).
   c. Strengthening collaboration with strategic partners.
4. Optimizing the implementation of PDF assignments from the Ministry of Finance through support for strengthening quality and investable PDF project planning, including efforts to secure PDFs for small-scale infrastructure projects and/or projects outside the PPP scheme, as well as through the development of Project Development Advisory;

5. Ekspansi ke sektor baru seperti pengelolaan limbah (*waste management*), rumah sakit daerah, pendidikan, Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bus listrik, pelabuhan perikanan, dan *data center*. Mendukung kredibilitas pengembangan pipeline proyek penjaminan KPBU dan identifikasi Penjaminan Kredit Perseroan. *Improvement* dalam proses bisnis lainnya dengan melaksanakan semua komunikasi mandat Perseroan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan pengembangan produk;
6. Melakukan pemetaan produk penjaminan dan mengkoordinasikan pengembangan produk penjaminan serta usaha bisnis lainnya seperti identifikasi produk baru, pelaksanaan riset kebutuhan produk, mengidentifikasi pemangku kepentingan, pengembangan konsep produk, pengembangan siklus bisnis dan produk, dan pengujian produk;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah atau pihak yang dipandang relevan bagi pengembangan kebijakan, produk penjaminan, dan usaha bisnis lainnya misalnya Bappenas, Kementerian Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Investor, dan lain-lain;
8. Melakukan kemitraan untuk peningkatan kapasitas ekosistem, termasuk pengembangan sektor, dan peningkatan pemangku kepentingan serta mendukung penguatan bisnis Perseroan;
9. Mempersiapkan Perseroan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi dan peran Penjaminan Pemerintah dalam Pembangunan Proyek KPBU IKN.

5. Expanding into new sectors such as waste management, regional hospitals, education, low-income housing (MBR), electric buses, fishery ports, and data centers. Supporting the credibility of the development of the PPP guarantee project pipeline and identifying the Company's Credit Guarantees. Improvements in other business processes will be carried out by executing all of the Company's mandate communications and implementing business development and product development activities;
6. Mapping guarantee products and coordinating the development of guarantee products as well as other business initiatives, such as identifying new products, conducting product needs research, identifying stakeholders, developing product concepts, developing business and product cycles, and testing products;
7. Coordinating with Government institutions or other relevant parties for the development of policies, guarantee products, and other business initiatives, including Bappenas, Ministry of Finance, Financing Institutions, Investors, and others;
8. Establishing partnerships to enhance ecosystem capacity, including sector development and stakeholder engagement, to support the strengthening of the Company's business;
9. Preparing the Company to optimize its contribution and role in Government Guarantees for the development of PPP projects in the IKN.

# Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

Comparison of 2025 Target to Realization and 2026 Projection

## Target, Realisasi, dan Proyeksi Pendapatan dan Laba Rugi

Target, Realization, and Projection of Income and Profit or Loss

**Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Rugi Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026**

Table of Comparison between 2025 Target to Realization of Income and Profit or Loss and 2026 Projection

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian<br>Description | Target RKAP 2025<br>2025 RKAP Target | Realisasi 2025<br>2025 Realization | Target RKAP 2026<br>2026 RKAP Target | Pencapaian Target terhadap Realisasi 2025<br>Target Achievement Against 2025 Realization | Kenaikan Target RKAP 2026 dari Realisasi 2025<br>Increase in the 2026 RKAP Target from the 2025 Realization |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Revenues | 1.662.667.249 | 1.478.204.800 | 1.424.367.844 | 89% | (4%) |
| Beban usaha Operating Expenses | (599.573.510) | (536.928.315) | (560.247.359) | 90% | 4% |

| Uraian<br>Description | Target RKAP 2025<br>2025 RKAP Target | Realisasi 2025<br>2025 Realization | Target RKAP 2026<br>2026 RKAP Target | Pencapaian Target terhadap Realisasi 2025<br>Target Achievement Against 2025 Realization | Kenaikan Target RKAP 2026 dari Realisasi 2025<br>Increase in the 2026 RKAP Target from the 2025 Realization |
|---|---|---|---|---|---|
| Laba sebelum pajak penghasilan<br>Profit before income tax | 1.063.093.739 | 941.276.485 | 864.120.484 | 89% | (8%) |
| Beban pajak penghasilan<br>Income tax benefit | 15.069.641 | (45.292.841) | 11.329.717 | (301%) | (125%) |
| **Laba tahun berjalan** Income for the year | **1.078.163.380** | **895.983.644** | **875.450.202** | **83%** | **(2%)** |
| **Laba komprehensif tahun berjalan**<br>Comprehensive income for the year | **1.087.277.575** | **999.029.463** | **876.464.552** | **92%** | **(12%)** |

Realisasi pendapatan usaha tahun 2025 tercapai sebesar Rp1,48 triliun atau tercapai 89% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP Tahun 2025 sebesar Rp1,66 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP Tahun 2026, PT PII memproyeksikan pendapatan usaha sebesar Rp1,42 triliun yaitu lebih rendah dari realisasi tahun 2025.

The realization of operating revenue in 2025 reached Rp1.48 trillion, or 89% of the 2025 RKAP target of Rp1.66 trillion. While for the 2025 RKAP target, IIGF projects operating revenue of Rp1.42 trillion or decreasing from the 2025 realization.

Sementara itu, untuk realisasi laba tahun berjalan 2025 tercapai sebesar Rp895,98 miliar atau tercapai 83% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP Tahun 2025 sebesar Rp1,08 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2026, PT PII memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp875,45 miliar atau lebih rendah dari realisasi tahun 2025.

Meanwhile, the realization of profit for the year in 2025 reached 895.98 billion, or 83% of the 2025 RKAP target of Rp1.08 trillion. For the 2026 RKAP target, IIGF projects profit for the year of Rp875.45 billion, decreasing from the 2025 realization.

## Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan
Target, Realization, and Projection of Financial Position

### Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026
Table of Comparison between Target and Realization of Financial Position in 2025 and the 2026 Projection

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian<br>Description | Target RKAP 2025<br>2025 RKAP Target | Realisasi 2025<br>2025 Realization | Target RKAP 2026<br>2026 RKAP Target | Pencapaian Target terhadap Realisasi 2025<br>Target Achievement against 2025 Realization | Kenaikan Target RKAP 2026 dari Realisasi 2025<br>Increase in the 2026 RKAP Target from the 2025 Realization |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Aset Total Assets | 17.865.480.661 | 17.716.787.893 | 18.426.707.202 | 99% | 4% |
| Jumlah Liabilitas Total Liabilities | 248.729.184 | 231.360.737 | 261.760.121 | 93% | 13% |
| Jumlah Ekuitas Total Equity | 17.616.751.477 | 17.485.427.156 | 18.164.947.081 | 99% | 4% |
| **Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**<br>Total Liabilities and Equity | **17.865.480.661** | **17.716.787.893** | **18.426.707.202** | **99%** | **4%** |

Realisasi jumlah aset tahun 2025 tercapai sebesar Rp17,72 triliun atau tercapai 99% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2025 sebesar Rp17,86 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2026, PT PII memproyeksikan jumlah aset sebesar Rp18,43 triliun atau lebih tinggi 4% dari realisasi tahun 2025.

The realization of total assets in 2025 reached Rp17.72 trillion, or 99% of the 2025 RKAP target of Rp17.86 trillion. Meanwhile, for the 2026 RKAP target, IIGF projects total assets of Rp18.43 trillion, representing an increase of 4% from the 2025 realization.

Realisasi jumlah liabilitas tahun 2025 tercapai sebesar Rp231,36 miliar atau tercapai 93% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2025 sebesar Rp248,73 miliar. Sedangkan, untuk target RKAP 2026, PT PII memproyeksikan jumlah liabilitas sebesar Rp261,76 miliar atau lebih tinggi 13% dari realisasi tahun 2025.

The realization of total liabilities in 2025 reached Rp231.36 billion, or 93% of the 2025 RKAP target of Rp248.73 billion. Meanwhile, for the 2026 RKAP target, IIGF projects total liabilities of Rp261.76 billion, representing a 13% increase from the 2025 realization.

Realisasi jumlah ekuitas tahun 2025 tercapai sebesar Rp17,48 triliun atau 99% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2025 sebesar Rp17,62 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2026, PT PII memproyeksikan jumlah ekuitas sebesar Rp18,16 triliun atau lebih tinggi 4% dari realisasi tahun 2025.

The realization of total equity in 2025 reached Rp17.48 trillion, or 99% of the 2025 RKAP target of Rp17.62 trillion. Meanwhile, for the 2026 RKAP target, IIGF projects total equity of Rp18.16 trillion, representing an increase of 4% from the 2025 realization.

## Target, Realisasi, dan Proyeksi Struktur Modal

Target, Realization, and Projection of Capital Structure

**Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026**

Table of Comparison between Target and Realization of Capital Structure in 2025 and 2026 Projection

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

| Uraian<br>Description | Target RKAP 2025<br>2025 RKAP Target | | Realisasi 2025<br>2025 Realization | | Pencapaian Target terhadap Realisasi 2025<br>Target Achievement against 2025 Realization | Target RKAP 2026<br>Target RKAP 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nominal | Komposisi<br>Composition | Nominal | Komposisi<br>Composition | | Nominal | Komposisi<br>Composition |
| Jumlah Liabilitas<br>Total Liabilities | 248.729.184 | 1,39% | 231.360.737 | 1,31% | 93% | 261.760.121 | 1,42% |
| Jumlah Ekuitas<br>Total Equity | 17.616.751.477 | 98,61% | 17.485.427.156 | 98,69% | 99% | 18.164.947.081 | 98,58% |
| **Jumlah Aset**<br>**Total Assets** | **17.865.480.661** | **100,00%** | **17.716.787.893** | **100,00%** | **99%** | **18.426.707.202** | **100,00%** |

Realisasi struktur modal pada tahun 2025 terdiri dari liabilitas sebesar Rp231,36 miliar atau sebesar 1,31% dan ekuitas sebesar Rp17,48 triliun atau sebesar 98,69%. Sementara itu, di tahun 2026, diproyeksikan struktur modal tediri dari liabilitas sebesar Rp261,76 miliar atau sebesar 1,42% dan ekuitas sebesar Rp18,16 triliun atau sebesar 98,58%.

The realized capital structure in 2025 consisted of liabilities amounting to Rp231.36 billion or representing 1.31%, and equity amounting to Rp17.48 trillion or amounting to 98.69%. Meanwhile, in 2026, the capital structure is projected to consist of liabilities amounting to Rp261.76 billion, representing 1.42%, and equity amounting to Rp18.16 trillion, representing 98.58%.

## Target, Realisasi, dan Proyeksi Kebijakan Dividen
Dividend Policy Target, Realization, and Projection

Pada tahun 2025, terdapat pembagian dividen sebesar Rp186,18 miliar. Untuk informasi lebih rinci dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, Sub Bab Kebijakan Dividen.

Terkait proyeksi kebijakan dividen untuk tahun berikutnya diputuskan mengacu pada Keputusan RUPS didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

In 2025, dividend distribution amounted to Rp186.18 billion. More detailed information is presented in this Annual Report under the Management Discussion and Analysis chapter, Dividend Policy subsection.

The projected dividend policy for the following year will be determined based on the GMS resolution in accordance with the prevailing Laws and Regulations.

# Indikator Kinerja Utama (IKU) Korporasi
Corporate Key Performance Index (KPI)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Korporasi tahun 2025 telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan IKU pada tanggal 16 Desember 2024. Adapun pencapaian IKU tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut:

The Corporate Key Performance Indicators (KPI) Index for 2025 was approved by the Shareholders through the agenda of the General Meeting of Shareholders for KPI Approval held on 16 December 2024. The achievement of the 2025 KPI is presented in the following table:

**Tabel Capaian IKU Korporasi Tahun 2025**
Table of Corporate KPI Achievement in 2025

| Kategori Performansi<br>Performance Category | Sasaran Strategis<br>Strategic Objectives | Indikator Kinerja Utama<br>Key Performance Indicator | Bobot<br>Weight | Satuan<br>Unit | Target | Realisasi<br>Realization | Capaian IKU<br>KPI Achievement | Nilai Kinerja<br>Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandat dan Keuangan<br>Mandate and Finance | Optimalisasi nilai pemegang saham/ *shareholder value*<br>Optimization of shareholder value | Margin laba bersih*)<br>Net Profit Margin*) | 8,00% | Persentase<br>Percentage | 64,8% | 60,6% | 93,47% | 7,48% |
| | Penjaminan yang berkelanjutan<br>Sustainable guarantee | Progres penyelesaian 3 (tiga) proyek KPBU skala kecil<br>Progress in the completion of 3 (three) small-scale PPP projects | 5,0% | Jumlah<br>Total | 3 | 0 | 10,00% | 0,50% |
| | | Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan<br>Increase in the value of project investments generated through guarantees | 5,0% | Nilai<br>Amount | Rp67 triliun<br>Rp67 trillion | Rp154 triliun<br>Rp154 trillion | 120,00% | 6,00% |
| | | Jumlah penjaminan proyek yang mendukung energi terbarukan<br>Number of guaranteed projects supporting renewable energy | 5,0% | Jumlah<br>Total | 1 | 4 | 120,00% | 6,00% |

| Kategori Performansi Performance Category | Sasaran Strategis Strategic Objectives | Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator | Bobot Weight | Satuan Unit | Target | Realisasi Realization | Capaian IKU KPI Achievement | Nilai Kinerja Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close*<br>Provision of support for guaranteed projects to achieve financial close | 7,0% | Persentase<br>Persentase | 75% | 81% | 108,11% | 7,57% |
| | | Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal*<br>Number of projects for which appraisal has been completed | 5,0% | Memo Evaluasi<br>Evaluation Memo | 6 | 9 | 120,00% | 6,00% |
| | Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif<br>Preparation of effective project and transaction advisory | Penyelesaian Hasil Keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif<br>Effective completion of deliverables from project preparation and transaction advisory assignments | 5,0% | Persentase<br>Percentage | 100% | 101% | 100,71% | 5,04% |
| *Stakeholder* | Pemahaman *Stakeholders* yang efektif<br>Effective Stakeholder understanding | Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan *stakeholders* lainnya yang baik<br>Achievement of a good level of understanding among the GCA and other stakeholders | 5,0% | Indeks<br>Index | 4,0 | 4,1 | 101,50% | 5,08% |
| | Reputasi dan Tingkat kepercayaan pasar yang tinggi<br>High reputation and level of market trust | *Rating* Perusahaan *Sovereign*<br>Sovereign Company Rating | 5,0% | *Rating* | Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia<br>Equivalent To the Indonesian Govern-ment Rating | Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia<br>Equivalent To the Indonesian Govern-ment Rating | 100,00% | 5,00% |
| | | *Rating* ESG<br>ESG Rating | 5,0% | *Rating* | *Medium/ Moderate Risk* | *Medium Risk* | 100,00% | 5,00% |
| | Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan IIGF Institute<br>Capacity building and institutional strengthening of the IIGF Institute | Dukungan IIGF-I terhadap pemetaan *creative financing* daerah dalam bentuk *platform digital*<br>IIGF Institute's support for mapping regional creative financing in the form of a digital platform | 5,0% | Persentase<br>Percentage | 100% | 120% | 120,00% | 6,00% |

| Kategori Performansi<br>Performance Category | Sasaran Strategis<br>Strategic Objectives | Indikator Kinerja Utama<br>Key Performance Indicator | Bobot<br>Weight | Satuan<br>Unit | Target | Realisasi<br>Realization | Capaian IKU<br>KPI Achievement | Nilai Kinerja<br>Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Optimalisasi sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan<br>Optimization of synergy among SOEs/Ministry of Finance institutions | Kegiatan *joint* program yang melibatkan BUMN/ Lembaga di bawah Kementerian Keuangan<br>Joint program activities involving SOEs/Institutions under the Ministry of Finance | 5,0% | Proyek/ Program<br>Project/ Program | 2 | 6 | 120,00% | 6,00% |
| Proses Bisnis Internal<br>Internal Business Process | *Enterprise Risk Management* yang kuat<br>Strong Enterprise Risk Management | Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi<br>Maturity level of corporate risk management implementation | 7,0% | Nilai<br>Value | 3,25 | 4,08 | 120,00% | 8,40% |
| | Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik<br>Implementation of Good Corporate Governance | Tata kelola Perusahaan yang baik (GCG *Score*)<br>Good Corporate Governance (GCG Score) | 7,0% | GCG *Score* | 89 | 91,017 | 102,27% | 7,16% |
| | Pengelolaan Risiko Penjaminan yang efektif<br>Effective guarantee risk management | Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek<br>Level of control over claim risk related to project guarantees | 6,0% | Persentase<br>Percentage | 96,5% | 98,8% | 102,37% | 6,14% |
| Pembelajaran dan Pertumbuhan<br>Training and Development | Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas<br>Management of high-quality and high-integrity human resources | Pencapaian *Index Engagement* Karyawan yang optimal<br>Achievement of an optimal Employee Engagement Index | 7,0% | *Score Engagement* (absolut)<br>Engagement Score (absolute) | 74% | 64% | 86,49% | 6,05% |
| | | Peningkatan jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P<br>Increase in the number of employees holding CP3P certification | 8,0% | Persentase<br>Percentage | 100% | 120% | 120,00% | 9,60% |
| **Total** | | | 100 | | | | | 103,02% |

# Kebijakan Dividen
Dividend Policy

## Dasar Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Sharing Policy

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana modal ditempatkan dan disetor adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan selaku Pemegang Saham. Dengan demikian, pembagian dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Republik Indonesia. Besaran dividen yang didistribusikan kepada Pemegang Saham ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE), where the capital is fully issued and paid by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance as the Shareholder. Therefore, the distribution of dividends is entirely the right of the Government of the Republic of Indonesia. The amount of dividends distributed to the Shareholder is determined based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

## Pembagian Dividen
Dividend Distribution

### Pembagian Dividen Tahun 2025
Dividend Distribution for 2025

Pembagian dividen tahun 2025, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 05 tanggal 6 Mei 2025, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2025 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2024 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp186,18 miliar yang telah dibayarkan pada 3 Juni 2025.

The dividend distribution for 2025, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 05 dated 6 May 2025, Shareholders through the Company's Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) held on 6 May 2025 agreed to distribute a dividend for the 2024 fiscal year amounting to 20% of the Company's net profit, or Rp186.18 billion, which was paid on 3 June 2025.

### Pembagian Dividen Tahun 2024
Dividend Distribution for 2024

Pembagian dividen tahun 2024, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 23 tanggal 21 Mei 2024, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp167,17 miliar yang telah dibayarkan pada 6 Juni 2024.

The dividend distribution for 2024, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 23 dated 21 May 2024, Shareholders through the Company's Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) held on 21 May 2024 agreed to distribute a dividend for the 2023 fiscal year amounting to 20% of the Company's net profit, or Rp167.17 billion, which was paid on 6 June 2024.

**Tabel Kronologis Pembagian Dividen**
Table of the Chronology of Dividend Distribution

| Uraian<br>Description | 2025<br>(Tahun Buku 2024)<br>2025<br>(Fiscal Year 2024) | 2024<br>(Tahun Buku 2023)<br>2024<br>(Fiscal Year 2023) |
|---|---|---|
| Total Dividen (Rp juta) Total Dividend (Rp million) | 186.176 | 167.165 |
| Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Shares) | 10.655.000 | 10.655.000 |
| Rasio Pembayaran Dividen Ratio of Dividend Payment | 20% | 20% |
| Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp) | 0,02 | 0,02 |
| Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement | 6 Mei 2025 6 May 2025 | 21 Mei 2024 21 May 2024 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment | 3 Juni 2025 3 June 2025 | 6 Juni 2024 6 June 2024 |

# Aspek Perpajakan
Taxes

## Pengelolaan Perpajakan
Tax Management

PT PII sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada negara diantaranya melalui pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain menjadi wajib pajak yang diwajibkan penyetoran dan pelaporan pajak, Perseroan secara aktif juga berperan serta dalam melakukan pemotongan dan pelaporan atas pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pungut dan *offshore*.

IIGF, as one of Indonesia's State-Owned Enterprises (SOEs), serves as both an agent of value creation and an agent of development, expected to contribute to the country, among others, through fulfilling its obligations as a taxpayer. In addition to being a taxpayer required to remit and report taxes, the Company also actively participates in withholding and reporting taxes such as Income Tax (PPh) Articles 21, 22, 23, 4(2), 26, and Value-Added Tax (VAT) – collected and offshore.

## Setoran Pajak
Tax Payment

Jumlah setoran pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp217,27 miliar, yaitu meningkat 2,30% atau Rp4,89 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp212,38 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan peningkatan beban PPh Final sejalan dengan peningkatan pendapatan pengelolaan dana tahun 2025.

The total tax payments in 2025 amounted to Rp217.27 billion, an increase of 2.30% or Rp4.89 billion from 2024's Rp212.38 billion. This increase was mainly due to higher Final Income Tax (PPh Final) expenses, in line with the growth in income from investments in 2025.

**Tabel Setoran Pajak (Rp juta)**
Table of Tax Payment (Rp million)

| Uraian Description | 2025 | 2024 | Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nominal | Persentase Percentage |
| PPh Final Final Income Tax | 166.201 | 158.158 | 8.043 | 5,09% |
| PPh Pasal 21 Income Tax Article 21 | 38.564 | 39.458 | (894) | (2,27%) |
| PPh Pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan 26 Income Tax Article 22, 23, 4, Paragraph 2 and 26 | 3.371 | 3.734 | (363) | (9,72%) |
| PPN pungut dan *offshore* VAT Collected and Offshore | 9.136 | 11.027 | (1.891) | (17,15%) |
| **Jumlah Setoran Pajak** Total Tax Paid | **217.272** | **212.379** | **4.893** | **2,30%** |

## Kepatuhan terhadap Aspek Perpajakan
Compliance with Taxes

PT PII tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

IIGF has not received any guilty verdicts from the highest tax court regarding any taxation matters in the past 3 (three) years.

# Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

## Investasi
Investment

Pada tahun 2025, PT PII melakukan kegiatan investasi dalam bentuk Deposito, Surat Utang Negara dan Surat Utang/ Obligasi BUMN.

In 2025, IIGF carried out investment activities in the form of Deposits, Government Bonds, and SOE Bonds/Obligations.

Sedangkan untuk investasi dalam bentuk barang modal telah diuraikan dalam Laporan Tahunan ini Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, Sub Bab Realisasi Investasi Barang Modal. Jenis mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan alokasi dana internal Perseroan/ RKAP tahun 2025.

Meanwhile, investments in the form of capital goods are detailed in this Annual Report under the Management Analysis and Discussion chapter, subchapter Capital Expenditure Realization. The currency used is the Indonesian Rupiah. The source of investment funds came from the Company's internal fund allocation / 2025 RKAP.

## Ekspansi
Expansion

Pada tahun 2025, PT PII tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2025, IIGF did not carry out any expansion activities; therefore, there is no information regarding objectives or transaction values.

## Divestasi
Divestment

Pada tahun 2025, PT PII tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2025, IIGF did not carry out any divestment activities; therefore, there is no information regarding objectives or transaction values.

## Akuisisi
Acquisition

Pada tahun 2025, PT PII tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2025, IIGF did not carry out any company acquisition activities; therefore, there is no information regarding objectives or transaction values.

## Restrukturisasi Utang/Modal
Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2025, PT PII tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal. Sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

In 2025, IIGF did not carry out any debt or capital restructuring; therefore, there is no information regarding this matter.

# Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliates/Related Parties

## Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan
Material Transaction with Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of 31 December 2025, there were no transactions containing a conflict of interest.

## Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Transaction with Affiliates/Related Parties

### Pihak-Pihak Berelasi
Related Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang didefinisikan antara lain:
i. Entitas di bawah pengendalian Perseroan;
ii. Entitas asosiasi;

The Company conducts transactions with related parties as defined in PSAK No. 224 concerning the Disclosure of Related Party, which include, among others:

i. Entities under the control of the Company;
ii. Associate entities;

iii. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
iv. Entitas di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas;
v. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
vi. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

iii. Investors with voting rights that give such investors significant influence;
iv. Entities under the control of the investors referred to in note iii above;
v. Key management personnel and their family members; and
vi. Entities controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

## Sifat Pihak Berelasi
Nature of Related Parties

a. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan.
b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perseroan.
c. Bank-bank BUMN dan entitas-entitas nonbank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perseroan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito berjangka dan obligasi.

a. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company.
b. The Board of Directors consists of individuals who have the authority and responsibility for planning, directing, and controlling the activities of the Company.
c. State-owned banks and non-bank state-owned entities are considered related parties as they are entities under common control of the Government of the Republic of Indonesia, where the Company places investments in the form of time deposits and bonds.

## Kewajaran Transaksi
Arm's Length Nature of Transactions

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No. 24, sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan ini.

All transactions with related parties have been conducted in accordance with the policies and terms agreed upon by both parties. Accordingly, the Company considers that all such transactions are conducted on an arm's length basis in accordance with PSAK No. 224 on Disclosure of Related Party. This indicates that the Company has carried out transactions with related parties fairly. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Notes to the Financial Statements No. 24, as attached in this Annual Report.

## Alasan dan Tujuan Dilakukannya Transaksi
Reasons and Purpose of the Transactions

Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perseroan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (*efficient related party transaction*).

Transactions with related parties conducted by the Company represent business activities carried out in order to generate operating revenue and are performed on a routine, recurring, and/or ongoing basis. Transactions with related parties are conducted based on the principles of mutual necessity and professionalism, with the objective of providing benefits to both parties (efficient related party transactions).

# Nama Pihak Afiliasi/Berelasi yang Bertransaksi dan Sifat serta Tujuan Transaksi

Name of the Affiliated/Related Parties Engaging in the Transaction and the Nature and Purpose of the Transaction

## Tabel Nama Pihak Afiliasi/Berelasi, Hubungan, Sifat dan Tujuan Transaksi

Table of Affiliated/Related Party Names, Relationship, Nature, and Purpose of Transactions

| Entitas<br>Entity | Hubungan<br>Relationship | Sifat dan Tujuan Transaksi<br>Nature and Purpose of Transactions |
|---|---|---|
| Pemerintah Republik Indonesia | Pemegang Saham<br>Shareholder | Investasi, Piutang Usaha, Pinjaman Penerusan, Pendapatan, Beban Bunga<br>Investment, Account Receivables, Two-Step Loans, Revenue, Interest Expense |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)<br>Indonesia Eximbank | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Biaya yang masih harus dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-Lain, Beban Penjaminan<br>Accrued Expenses, Provisions and Other Payables, Guarantee Expense |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Kas dan Setara Kas, Pendapatan<br>Cash and Cash Equivalents, Revenue |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan<br>Cash and Cash Equivalents, Investments, Account Receivables, Revenue |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan<br>Cash and Cash Equivalents, Investments, Account Receivables, Revenue |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Kas dan Setara Kas, Investasi, Pendapatan<br>Cash and Cash Equivalents, Investments, Revenue |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan<br>Cash and Cash Equivalents, Investments, Account Receivables, Revenue |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Pendapatan, Piutang Usaha<br>Investment, Revenue, Account Receivables |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan<br>Investment, Revenue, Account Receivables |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan<br>Investment, Revenue, Account Receivables |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan<br>Investment, Revenue, Account Receivables |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Pendapatan<br>Investment, Revenue |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Pendapatan<br>Investment, Revenue |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Investasi, Pendapatan<br>Investment, Revenue |
| PT Pegadaian (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Pendapatan<br>Revenue |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Piutang Usaha, Pendapatan<br>Account Receivables, Revenue |
| PT Pertamina (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Piutang Usaha, Pendapatan<br>Account Receivables, Revenue |
| PT Jasa Marga (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Pendapatan<br>Revenue |

| Entitas<br>Entity | Hubungan<br>Relationship | Sifat dan Tujuan Transaksi<br>Nature and Purpose of Transactions |
|---|---|---|
| PT Len Industri (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Piutang Usaha, Pendapatan<br>Account Receivables, Revenue |
| Perusahaan Umum Damri | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Piutang Usaha, Pendapatan<br>Account Receivables, Revenue |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Piutang Usaha, Pendapatan<br>Account Receivables, Revenue |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Pendapatan<br>Revenue |
| PT Geo Dipa Energi (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Pendapatan<br>Revenue |
| PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Pendapatan<br>Revenue |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Entitas Sepengendali/BUMN<br>Entity Under Common Control / SOE | Pendapatan<br>Revenue |
| Dewan Komisaris dan Direksi<br>Board of Commissioners and Board of Directors | Manajemen Kunci<br>Key Management | Kompensasi dan Remunerasi manajemen kunci<br>Compensation and Remuneration of key management |

## Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

Related Party Balances and Transactions

Saldo transaksi dengan pihak afiliasi/ berelasi di tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The balances of transactions with affiliated/related parties in 2025 and 2024 are as follows:

### Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Table of Transaction Value with Related Parties

| Saldo Pihak Berelasi dalam Aset<br>Balances of Related Parties in Assets | 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Aset<br>Percentage to total Assets | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Aset<br>Percentage to total Assets |
| Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent | 6.390.274.756 | 36,07% | 1.696.401.153 | 9,99% |
| Investasi Investment | 8.884.103.091 | 50,15% | 11.906.060.381 | 70,08% |
| Piutang Usaha Account Receivables | 200.604.923 | 1,13% | 168.977.762 | 0,99% |
| **Sub Jumlah** Subtotal | **15.474.982.770** | **87,35%** | **13.771.439.296** | **81,06%** |

| Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas<br>Balances of Related Parties in Liabilities | 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Liabilitas<br>Percentage to total Liabilities | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Liabilitas<br>Percentage to total Liabilities |
| Pinjaman Penerusan Two-step Loans | 52.701.112 | 22,78% | 54.586.445 | 17,28% |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain<br>Accrued expenses, provisions, and other payables | 2.326.667 | 1,01% | 2.366.046 | 0,75% |

| Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan<br>Balances of Related Parties in Revenue | 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Pendapatan<br>Percentage to total Revenue | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Pendapatan<br>Percentage to total Revenue |
| Pendapatan Revenue | 1.247.954.048 | 84,42% | 1.279.108.456 | 86,02% |

| Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Usaha<br>Balances of Related Parties in Operating Expenses | 2025 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Beban Usaha<br>Percentage to total Operating Expenses | Nominal (Rp ribu)<br>Nominal (Rp thousand) | Persentase dari jumlah Beban Usaha<br>Percentage to total Operating Expenses |
| Beban Bunga Guarantee Expenses | 3.825.155 | 0,71% | 3.927.253 | 0,72% |
| Kompensasi dan Remunerasi Manajemen Kunci<br>Compensation and Remuneration of Key Management | 30.206.146 | 5.63% | 32.771.471 | 6,01% |

## Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Company Policy on Review Mechanism for Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perseroan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 224.

All related/affiliated party transactions above are affiliate transactions carried out in the course of generating operating revenue and are conducted routinely, repeatedly, and/or on an ongoing basis. As disclosed in the 2025 Audited Financial Statements, which were audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), the Company has ensured the level of fairness of such transactions and their compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia. The Company has disclosed transactions with related parties as defined under PSAK No. 224.

PT PII bukan merupakan Perseroan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum. Seluruh saham PT PII dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh Pemegang Saham.

IIGF is not a company whose equity is publicly traded. All shares of IIGF are owned by the Republic of Indonesia, therefore, all transactions have been known to the Shareholder.

Selama tiga tahun terakhir, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

During the last three years, there has been no non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions.

## Keterlibatan Organ Perseroan dalam Proses *Review* Transaksi Pihak Berelasi

Involvement of the Company's Organs in the Review Process of Related Party Transactions

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut,

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by internal auditors and external auditors. In this audit process, the

Perseroan melibatkan Organ Perseroan di antaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2025, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan pada Catatan 24.

Company involves its corporate organs, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, and several related divisions.

Based on the assessment conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners provides direction and input to the Board of Directors to ensure that transactions with related parties are carried out in accordance with the arm's-length principle.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2024 had been conducted through adequate procedures and had been implemented in accordance with generally accepted business practices and the arm's-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Financial Statements in Note 24.

### Aspek Kepatuhan pada Pelaksanaan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Compliance Aspects in the Implementation of Transactions with Related Parties

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar. Perseroan tidak pernah mengalami kasus dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak berelasi.

All transactions with related parties have been carried out in accordance with the policies and terms agreed upon by both parties, therefore, the Company considers that all transactions remain within reasonable limits. The Company has never experienced any issues in the implementation of transactions with related parties.

## Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Accountant's Report Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan lebih lanjut.

No material information or facts have occurred after the accountant's report date; therefore, there is no additional information to be presented.

## Realisasi Dana Penawaran Umum
Utilization of Public Offering Proceeds

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PII tidak mencatatkan sahamnya di bursa, sehingga status PT PII bukan merupakan perusahaan terbuka, maka tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of 31 December 2025, IIGF has not listed its shares on the stock exchange; therefore, IIGF status is not a publicly listed company. Consequently, there is no information regarding total proceeds raised, planned use of proceeds, details of proceeds utilization, proceeds balances, or the date of GMS approval for changes in proceeds usage.

# Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Unusual Events

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2025 yang diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), tidak menyebutkan adanya kejadian keuangan yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi selama tahun buku 2025.

Based on the audited Financial Statements for the 2025 fiscal year, audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), no financial events of an extraordinary or unusual nature were reported during the 2025 fiscal year.

# Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Amendments to Regulations and the Impacts on the Company

Sebagai bentuk implementasi komitmen PT PII terhadap aspek kepatuhan, sepanjang tahun 2025 Perseroan secara proaktif melakukan kajian atas penerbitan peraturan baru serta perubahan peraturan yang relevan dan berpotensi berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan baru dan perubahan peraturan yang memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

As part of IIGF's commitment to compliance, throughout 2025 the Company proactively conducted reviews of newly issued regulations as well as amendments to existing regulations that are relevant and potentially impactful to the Company's business activities. In this regard, new regulations and regulatory amendments that have a significant impact on the Company are as follows:

**Tabel Perubahan Peraturan dan Peraturan Baru yang Berdampak Signifikan**

Table of Regulatory Amendments and New Regulations with Significant Impact

| No. | Nama Peraturan<br>Regulation | Dampaknya terhadap PT PII secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif serta Tindak Lanjut yang Dilakukan<br>Impact on IIGF (Qualitative and/or Quantitative) and Follow-Up Actions Taken |
|---|---|---|
| 1. | Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara<br>Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises | UU BUMN mengatur pengecualian kepemilikan saham oleh BP BUMN dan BPI Danantara terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal negara (SMV), termasuk PT PII, sehingga pemegang saham PT PII masih dimiliki negara 100% melalui Kementerian Keuangan.<br>The State-Owned Enterprises Law (UU BUMN) regulates the exemption of share ownership by BP BUMN and BPI Danantara in SOEs designated as state fiscal instruments (SMV), including IIGF, and thus, IIGF's shares remain 100% owned by the state through the Ministry of Finance. |
| 2. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik<br>Regulation of the Minister of Finance Number 5 of 2025 on Procedures for Granting and Implementing Government Guarantees and Risk Coverage in order to Accelerating Renewable Energy Development for Electricity Supply | Dengan diterbitkannya PMK 5/2025, pelaksanaan evaluasi terhadap usulan permohonan jaminan pemerintah atas risiko gagal bayar BUMN dalam rangka pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan atau pengembangan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan (dalam hal ini Proyek PLTP Dieng-2) menggunakan prosedur/kriteria atau persyaratan sebagaimana diatur di dalam PMK 5/2025.<br>With the issuance of PMK 5/2025, the evaluation of proposed requests for government guarantees on the risk of SOE payment defaults in the context of developing power plants utilizing renewable energy sources or developing electricity transmission and/or distribution networks using renewable energy sources (in this case, the Dieng-2 Geothermal Power Plant Project) is carried out using the procedures, criteria, or requirements stipulated in PMK 5/2025. |

# Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

## Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Reason for Changes in Accounting Policies

Kebijakan akuntansi Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

The Company's accounting policies are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make judgments in the process of applying the Company's accounting policies, particularly in areas that are complex, require a higher degree of judgment, or where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements.

Perseroan melakukan *review* berkelanjutan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan revisi Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan Perseroan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.

The Company conducts continuous reviews of its accounting policies in line with developments and revisions of Financial Accounting Standards relevant to the Company. The following outlines the application of new accounting standards and revisions to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) that have been issued but are not yet effective.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menerapkan perubahan kebijakan akuntansi internal dalam Laporan Keuangan.

In 2025, the Company did not apply any changes to its internal accounting policies in the Financial Statements.

## Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Description of Changes in Accounting Policies and Their Impact

### Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

The following are the financial accounting standards, changes and interpretations of financial accounting standards that are effective from 1 January 2026:

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi"
  PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

- PSAK 117: "Insurance Contracts"
  PSAK 117 regulates the relaxation of several provisions, including addition of scope exceptions, adjustments to financial statement presentation, implementation of risk mitigation options, and several modifications to transitional provisions. PSAK 117 also requires a clear separation between income generated from insurance business and income from investment activities.

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan
  Amandemen PSAK 221, 'Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing', memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan serta pengungkapannya

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Amendments to PSAK 221: "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding conditions when a currency is not convertible
  Amendments to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates," clarify the provisions regarding conditions when a currency is not convertible and the disclosures thereof.

The implementation of these standards does not result in substantial changes to the Company's accounting policies and does not have a material impact on the financial statements for the current or prior years.

## Dampak atas Standar yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Impact of Standards Issued but Not Yet Adopted

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; dan
  PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" (Revisi 2025)

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2027

- PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

The following are the financial accounting standards, amendments, and interpretations of financial accounting standards that are effective as of 1 January 2026:

- Amendments to PSAK 109 "Financial Instruments" and PSAK 107 "Financial Instruments: Disclosures"; and
  PSAK 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control" (Revised 2025)

The following are the financial accounting standards, changes, and interpretations effective as of 1 January 2027.

- PSAK 118: "Presentation and Disclosures in Financial Statements," which will replace PSAK 201: "Presentation of Financial Statements."

At the time of issuing the financial statements, the Company is still assessing the potential impacts of implementing these new standards and amendments, as well as their effects on the Company's financial statements in future periods.

# Tata Kelola Perusahaan

## Corporate Governance




Tetap sedia:
Payung/Jas Hujan
Tas Siaga Bencana
Pantau info penting:
Pantau Tinggi Muka Air
bpbd.jakarta.go.id/waterlevel
Unduh Buku Panduan Kesiapsiagaan
tiny.cc/bukusakusiagabanjir

# Penerapan Tata Kelola PT PII

Implementation of Governance at IIGF

PT PII memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di lingkungan Perseroan sebagai fondasi dalam mendukung keberlangsungan usaha serta memastikan pengelolaan Perseroan berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, PT PII secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan guna meningkatkan kualitas pengelolaan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan dan prosedur internal, penguatan fungsi pengawasan, serta pemantauan kepatuhan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada praktik terbaik, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar tata kelola yang berlaku.

IIGF views the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company's environment as a foundation in supporting business continuity and ensuring that the Company is managed in a sound and sustainable manner. Therefore, IIGF consistently implements corporate governance practices to enhance the quality of management, supervision, and compliance with applicable regulations. This commitment is realized through the implementation of internal policies and procedures, the strengthening of supervisory functions, and continuous compliance monitoring in accordance with best practices, prevailing laws and regulations, and applicable governance standards.

## Pencapaian Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance Achievements

Sebagai komitmen Perseroan dalam menjalankan Tata Kelola secara berkelanjutan, PT PII berhasil mencapai berbagai pencapaian dan memberikan dampak positif bagi Pemegang Saham dan peningkatan kinerja Perseroan.

Through its commitment to implementing Governance on a sustainable basis, IIGF has achieved various milestones and delivered positive impacts for Shareholders while contributing to improved Company performance.

### Penilaian GCG
GCG Assessment

**Klasifikasi Sangat Baik dalam semua Aspek dengan skor secara keseluruhan 91,017%**
Classified as Very Good in all aspects with an overall score of 91.017%

### IKU Perseroan
Corporate KPIs

**Pencapaian IKU Perseroan PT PII Tahun 2025 adalah 103,02% melebihi target yang ditetapkan.**
The achievement of IIGF's Corporate KPIs in 2025 reached 103.02%, exceeding the established target.

### ISO 37001

**PT PII memperoleh ISO 37001 : 2016 dengan masa validasi 30 Maret 2025 sampai dengan 29 Maret 2028**
IIGF has obtained ISO 37001 :2016 certification with a validity period from 30 March 2025 to 29 March 2028.

### Penghargaan
Awards

**Meraih Penghargaan *Transparency Award* 2025 pada kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.**
Received the Transparency Award 2025 under the Best Public Information Provider category, organized by the Central Information Commission.

### Dividen
Dividends

**Perseroan membagikan dividen untuk tahun buku 2024 sebesar 20% dari laba bersih atau senilai Rp186,18 miliar, yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada 3 Juni 2025.**
The Company distributed dividends for the 2024 fiscal year amounting to 20% of net profit, or Rp186.18 billion, which were paid to shareholders on 3 June 2025.

### Laba Bersih
Net Profit

**Berhasil mencatatkan Laba Bersih Rp1,48 triliun, mengalami peningkatan 0,59% atau Rp8,71 miliar dibandingkan tahun 2024**
The Company recorded a net profit of Rp1.48 trillion, representing an increase of 0.59% or Rp8.71 billion compared to 2024.

# Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perseroan

Legal Basis and Policies for the Implementation of Corporate Governance

Untuk menjamin penerapan GCG berjalan optimal, Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu pada ketentuan hukum serta praktik terbaik yang berlaku. Landasan regulasi serta standar tata kelola yang menjadi acuan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:
   a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
   b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

In order to ensure the optimal implementation of GCG, the Company implements GCG principles in accordance with applicable legal provisions and best practices. The regulatory framework and governance standards that serve as references for the Company include the following:

1. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning the State Capital Investment of the Republic of Indonesia for the Establishment of a State-Owned Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector, as recently amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2020 on the Second Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning the State Capital Investment of the Republic of Indonesia for the Establishment of a State-Owned Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector;
2. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 28/PMK.06/2013 concerning the Preparation, Submission, and Amendment of the Long-Term Plans and the Work Plans and Budgets for State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
3. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 78/PMK.06/2015 concerning the Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and its amendments through:
   a. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 59/PMK.06/2016 concerning the Amendments to Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 concerning the Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
   b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 135/PMK.06/2017 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 concerning the Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
4. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;

5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 475 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Keuangan
10. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2024 oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
11. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
12. Anggaran Dasar Perseroan; dan
13. Kebijakan dan aturan pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan yang berlaku di Perseroan:

5. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 106/PMK.06/2017 concerning the Performance Management of the Board of Directors and Board of Commissioners in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
6. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 197/PMK.06/2019 concerning the Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.
7. Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 concerning the Guidelines for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
8. Decree of the Minister of Finance No. 556/KMK.01/2020 concerning the Guidelines for Communication Management within the Ministry of Finance;
9. Decree of the Minister of Finance No. 475 of 2023 concerning Guidelines for Handling Conflicts of Interest within the Ministry of Finance
10. ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024 issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
11. Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021 issued by the National Committee on Governance Policy;
12. The Company's Articles of Association; and
13. The policies and implementing regulations governing the corporate governance system applicable within the Company.

| Kebijakan<br>Policy | Daftar Isi/Ruang Lingkup<br>Table of Contents/Scope | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik<br>Good Corporate Governance Policy | Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perseroan dan Insan Perseroan, meliputi: | | Policies and procedures as the operational basis for the Good Corporate Governance (GCG) principles by all the Company's Organs and its Personnel, including: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perseroan | CHAPTER II | Vision, Mission, and Corporate Values |
| | BAB III | Organ Perusahaan | CHAPTER III | Corporate Organs |
| | BAB IV | Tata Kelola Manajemen Risiko | CHAPTER IV | Risk Management Governance |
| | BAB V | Tata Kelola Pengendalian Internal | CHAPTER V | Internal Control Governance |
| | BAB VI | Kode Etik dan Benturan Kepentingan | CHAPTER VI | Code of Conduct and Conflict of Interest |
| | BAB VII | Pengadaan Barang dan Jasa | CHAPTER VII | Procurement of Goods and Services |
| | BAB VIII | Tata Kelola Informasi | CHAPTER VIII | Information Governance |
| | BAB IX | Manajemen Mutu | CHAPTER IX | Quality Management |
| | BAB X | Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perseroan | CHAPTER X | Governance of Relationships with Corporate Stakeholders |
| | BAB XI | Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan | CHAPTER XI | Company's Long-Term Plan, as well as Work Plan and Budget |

| Kebijakan<br>Policy | Daftar Isi/Ruang Lingkup<br>Table of Contents/Scope | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BAB XII | Kebijakan dan Pelaporan Pelanggaran | CHAPTER XII | Whistleblowing System Policy |
| | BAB XIII | Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik | CHAPTER XIII | Measurement and Reporting of the Implementation of Good Corporate Governance |
| | BAB XIV | Penutup | CHAPTER XIV | Closing |
| Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)<br>Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors | Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta masing-masing organ pendukung, meliputi: | | Working procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors that regulate the professional relations between the Board of Commissioners and Board of Directors and their respective supporting organs, including: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Dewan Komisaris | CHAPTER II | Board of Commissioners |
| | BAB III | Direksi | CHAPTER III | Board of Directors |
| | BAB IV | Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perseroan | CHAPTER IV | Working Relationship between the Company's Organs |
| | BAB V | Penilaian, Evaluasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perseroan | CHAPTER V | Assessment, Evaluation, and Implementation of Good Corporate Governance in the Company |
| Kebijakan Kode Etik<br>Code of Conduct | Tata aturan hubungan internal Perseroan (organ Perseroan dan karyawan) dan hubungan dengan pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Adapun isinya meliputi: | | The rules of the Company's internal relationships (between the Company's Organs and Personnel) and relationships with stakeholders in carrying out the Company's business. The contents include: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Pernyataan Nilai Perseroan | CHAPTER II | Statement on Company Values |
| | BAB III | Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perseroan | CHAPTER III | Corporate Code of Conduct and Business Ethics |
| | BAB IV | Petunjuk Pelaksanaan | CHAPTER IV | Implementation Guidelines |
| | BAB V | Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran | CHAPTER V | Reporting and Sanctions for Violations |
| | BAB VI | Penutup | CHAPTER VI | Closing |
| Piagam Komite Audit<br>Audit Committee Charter | Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: | | References and guidelines for the Company's Audit Committee to exercise its duties and authorities, which include: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kode Etik | CHAPTER II | Duties, Responsibilities, Authorities, and Code of Conduct |
| | BAB III | Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan | CHAPTER III | Working Relationship Pattern, Membership, and Term of Office |
| | BAB IV | Tata Kerja dan Prosedur Kerja | CHAPTER IV | Working Procedures and Processes |
| | BAB V | Penutup | CHAPTER V | Closing |
| Piagam Komite Pemantau Risiko<br>Risk Monitoring Committee Charter | Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: | | References and guidelines for the Company's Risk Monitoring Committee to exercise its duties and authorities, which include: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang | CHAPTER II | Duties, Responsibilities, and Authorities |
| | BAB III | Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan | CHAPTER III | Working Relationship Pattern, Membership, and Term of Office |
| | BAB IV | Tata Kerja dan Prosedur Kerja | CHAPTER IV | Working Procedures and Processes |
| | BAB V | Penutup | CHAPTER V | Closing |

| Kebijakan<br>Policy | Daftar Isi/Ruang Lingkup<br>Table of Contents/Scope | | | |
|---|---|---|---|---|
| Piagam Audit Internal<br>Internal Audit Charter | Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional Perseroan sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup: | | Internal Audit's operating procedures to exercise its function of reviewing and testing the Company's operations as a business organization, which generally includes: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Tata Kelola Audit Internal | CHAPTER II | Internal Audit Governance |
| | BAB III | Penutup | CHAPTER III | Closing |
| Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran<br>Whistleblowing System Policy | Merupakan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Isi dari Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut: | | This is a policy that regulates the mechanism for reporting violations occurring within the Company. The contents of the Whistleblowing System Policy are as follows: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Pelaporan Pelanggaran | CHAPTER II | Whistleblowing Report |
| | BAB III | Pihak Terkait Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran | CHAPTER III | Related Parties of Whistleblowing Report Management |
| | BAB IV | Penanganan Pelaporan Pelanggaran | CHAPTER IV | Whistleblowing Report Handling |
| | BAB V | Perlindungan Pelapor dan Terlapor | CHAPTER V | Protection of Whistleblowers and the Reported Parties |
| | BAB VI | Dokumentasi, Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi | CHAPTER VI | Documentation, Dissemination, Monitoring, and Evaluation |
| Kebijakan Pengendalian Gratifikasi<br>Gratification Control Policy | Kebijakan ini mengatur mengenai batasan penerimaan dan pemberian gratifikasi, serta pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi yang berlaku bagi Insan Perseroan. Isi dari pedoman sebagai berikut: | | This policy regulates the limits of receiving and giving gratification, as well as reporting the acceptance and refusal of gratification applicable to the Company's personnel. The policy's contents are as follows: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Pengendalian Gratifikasi | CHAPTER II | Gratification Control |
| | BAB III | Dokumentasi, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi | CHAPTER III | Documentation, Dissemination, Monitoring, and Evaluation |
| | BAB IV | Penutup | CHAPTER IV | Closing |
| Kebijakan Sistem Pengendalian Internal<br>Internal Control System Policy | Pedoman pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perseroan, meliputi: | | Guidelines for internal control applied within the Company, including: | |
| | BAB I | Pendahuluan | CHAPTER I | Introduction |
| | BAB II | Implementasi Sistem Pengendalian Internal | CHAPTER II | Implementation of the Internal Control System |
| | BAB III | Tugas dan Tanggung Jawab | CHAPTER III | Duties and Responsibilities |
| | BAB IV | Evaluasi Sistem Pengendalian Internal | CHAPTER IV | Evaluation of the Internal Control System |
| | BAB V | Penutup | CHAPTER V | Closing |

Kebijakan terkait proses bisnis tersebut senantiasa ditinjau dan diperbarui oleh Perseroan agar tetap selaras dengan dinamika usaha serta ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada metodologi yang tepat dan praktik terbaik di industri. Apabila dibutuhkan, Perseroan juga melibatkan karyawan melalui forum diskusi terarah (*focus group discussion*)

Policies related to these business processes are continuously reviewed and updated by the Company to ensure alignment with business dynamics and applicable legal provisions. Their formulation refers to appropriate methodologies and industry best practices. When necessary, the Company also involves employees through focus group discussions to gather input and ideas. In addition, policy formulation

untuk menghimpun masukan dan gagasan. Selain itu, perumusan kebijakan dilakukan melalui kolaborasi antara unit bisnis yang menjalankan proses tersebut dan unit yang berperan dalam penyusunan dokumen proses bisnis (*Organization Design*), sehingga menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan operasional.

is carried out through collaboration between the business units that execute the processes and the unit responsible for preparing business process documentation (Organization Design), resulting in comprehensive and operational policies.

## Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Baik

Objectives of Implementing Good Corporate Governance

Secara umum, penerapan GCG di lingkungan Perseroan menjadi bagian dari strategi transformatif untuk membangun sebuah korporasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan GCG memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ tata kelola dalam Perseroan;
3. Mengatur hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
8. Memperbaiki budaya kerja Perseroan; dan
9. Meningkatkan citra baik Perseroan.

In general, the implementation of GCG within the Company forms part of a transformative strategy to build a sound and sustainable corporation. Accordingly, the implementation of GCG has the following objectives and targets:

1. To optimize the Company's value in building strong competitiveness both nationally and internationally, thereby ensuring sustainable existence and growth;
2. To encourage the professional, efficient, and effective management of the Company while empowering functions and strengthening the independence of the Company's governance organs;
3. To regulate the working relationship between the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors;
4. To ensure that every decision-making process and its implementation are based on high moral values and in compliance with applicable laws and regulations, as well as high social responsibility;
5. To develop professional human resources;
6. To enhance accountability to Stakeholders;
7. To prevent irregularities in the management of the Company;
8. To improve the Company's work culture; and
9. To strengthen the Company's positive image.

## Prinsip Tata Kelola dan Pilar Governansi Korporat

Governance Principles and Corporate Governance Pillars

Dalam menjalankan aktivitas kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.

In carrying out its business activities, the Company consistently implements Good Corporate Governance based on the GCG principles, including Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

| Prinsip GCG<br>GCG Principle | Definisi<br>Definition | Implementasi Prinsip GCG<br>Implementation of GCG Principles |
|---|---|---|
| Transparansi<br>Transparency | Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan;<br>Transparency in carrying out decision-making processes and in disclosing material and relevant information regarding the Company; | 1. Keterbukaan dalam menyampaikan laporan triwulanan, tahunan kepada Pemegang Saham<br>2. Keterbukaan dalam menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Kebelanjutan, dan Kebijakan-kebijakan Perseroan yang relevan pada *website* Perseroan<br>1. Transparency in disclosing quarterly and annual reports to the Shareholders<br>2. Transparency in disclosing the Company's Annual Report, Sustainability Report, and Corporate-related Policies through the Company's website |
| Akuntabilitas<br>Accountability | Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.<br>Clarity of function, implementation and accountability of the Company's organs, enabling effective management of the Company. | 1. Penetapan perubahan struktur organisasi sehubungan dengan perkembangan mandat dan kegiatan usaha Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-004/PII-BOD/0322 tanggal 18 Maret 2022<br>2. Penetapan Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PII-BOD/0522 tanggal 11 Mei 2022 serta melalui Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi (BOD *Resolution*) No. RES-007/BOD/0725 tanggal 16 Juli 2025.<br>3. Penetapan Pembagian Tugas Dewan Komisaris ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-011/KOM/1225 tanggal 20 Desember 2025<br>4. Penetapan pembagian tugas Komite di Bawah Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang pada masing-masing Piagam Komite Dewan Komisaris<br>5. Direksi, Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris serta seluruh Karyawan Perseroan melakukan penandatanganan Pakta Integritas yang diperbarui setiap tahunnya<br>1. Determination of changes to the organizational structure in line with the development of the Company's mandate and business activities through the Board of Directors' Decision Letter No. SK-004/PII-BOD/0322 dated 18 March 2022.<br>2. Determination of the Division of Duties and Authorities of the Board of Directors through Board of Directors' Decision Letter No. 006/SK/PII-BOD/0522 dated 11 May 2022, and through a Decision of the Board of Directors Outside a Board Meeting (BOD Resolution) No. RES-007/BOD/0725 dated 16 July 2025.<br>3. Determination of the Division of Duties of the Board of Commissioners through Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-011/KOM/1225 dated 20 December 2025.<br>4. Determination of the Division of Duties of Committees under the Board of Commissioners as stipulated in the Charter for Each Board of Commissioners' Committees.<br>5. The Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Commissioners' Organs, and all the Company's employees sign an Integrity Pact that is renewed annually. |
| Pertanggungjawaban<br>Responsibility | Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporat yang sehat;<br>Compliance in the management of the Company with laws and regulations and sound corporate principles; | Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku serta menjalankan operasional secara bertanggung jawab. Perseroan memastikan kegiatan usahanya berjalan sesuai regulasi lingkungan, keselamatan dan ketenagakerjaan, termasuk melalui pemantauan rutin dan penerapan standar K3. Selain itu, Perseroan turut berkontribusi kepada masyarakat melalui program TJSL dan menjaga transparansi melalui pelaporan yang akurat.<br>Complies with all applicable regulations and policies, as well as conducts its operations responsibly. The Company ensures that its business activities run in accordance with environmental, safety, and labor regulations, including through regular monitoring and the implementation of OHS standards. In addition, the Company contributes to society through CSR programs and maintains transparency through accurate reporting. |

| Prinsip GCG<br>GCG Principle | Definisi<br>Definition | Implementasi Prinsip GCG<br>Implementation of GCG Principles |
|---|---|---|
| Kemandirian<br>Independence | Keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporat yang sehat.<br>A situation in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is inconsistent with laws and regulations and sound corporate principles. | Penyelenggaraan kepengurusan Perseroan yang profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporat yang sehat.<br>The Company's management is conducted professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is inconsistent with applicable laws and regulations and sound corporate principles. |
| Kewajaran<br>Fairness | Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>Fairness and equality in fulfilling the rights of Stakeholders arising from agreements, as well as applicable laws and regulations | Prinsip keadilan dan kesetaraan ini diterapkan dengan melindungi kepentingan serta memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>The principles of fairness and equality are implemented by safeguarding stakeholders' interests and fulfilling their rights arising from agreements, as well as applicable laws and regulations. |

Selain menerapkan prisip-prinsip GCG, Perseroan juga menerapkan Tata Kelola Perseroan berlandaskan pada 4 (empat) pilar Governansi Korporat Indonesia, yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)

In addition to implementing GCG principles, the Company also applies Corporate Governance based on the 4 (four) pillars of Indonesian Corporate Governance, namely Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability, as formulated by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI).

| Empat Pilar Governansi<br>Four Pillars of Governance | Penjelasan<br>Description | |
|---|---|---|
| Perilaku Beretika<br>Ethical Conduct | Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tata kelola Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. | In carrying out its activities, the Company consistently upholds honesty, treats all parties with respect, fulfills its commitments, and continuously builds and maintains moral values and trust. The Company considers the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality, and is managed independently to ensure that each corporate organ does not dominate the others and cannot be intervened in by other parties. |
| Akuntabilitas<br>Accountability | Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja Perseroan yang berkelanjutan. | The Company accounts for its performance in a transparent and fair manner. Therefore, the Company must be managed properly, in a measurable manner, and in accordance with the interests of the Company while considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance. |
| Transparansi<br>Transparency | Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyediakan informasi yang aktual dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk diketahui oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. | To maintain objectivity in conducting business activities, the Company provides actual and relevant information that is easily accessible and understandable to stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also information that is important for shareholders, creditors, and other stakeholders to know when making decisions. |

| Empat Pilar Governansi<br>Four Pillars of Governance | Penjelasan<br>Description | |
|---|---|---|
| Keberlanjutan<br>Sustainability | Perseoran mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kepentingan bisnis Perseroan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. | The Company complies with applicable laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment. The Company is also committed to contributing to sustainable development through collaboration with all relevant stakeholders, with the aim of improving community welfare through its business activities in alignment with the sustainable development agenda. |

Dengan mengadopsi prinsip GCG dan pilar Governansi tersebut, Perseroan memastikan bahwa penerapan GCG tidak hanya memenuhi standar tata kelola yang baik, tetapi juga terus menjaga prospek pertumbuhan kinerja untuk jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan membangun citra positif sebagai perusahaan yang akuntabel di mata publik.

By adopting these principles and guidelines, the Company ensures that the implementation of GCG not only meets sound governance standards, but also continues to maintain long-term performance growth prospects for stakeholders and builds a positive image as an accountable company in the eyes of the broader public.

## Struktur Tata Kelola PT PII
Governance Structure of IIGF

Perseroan telah memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan yang memadai yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, berikut dengan organ pendukungnya. Perseroan juga dilengkapi oleh infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang mendukung penyelenggaraan tata kelola secara efektif, antara lain kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tata tertib yang mengatur kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

The Company has established an adequate Corporate Governance Structure comprising the Board of Commissioners and Board of Directors, along with their supporting organs. The Company is also supported by a Corporate Governance infrastructure that facilitates the effective implementation of governance, including policies and procedures, management information systems, and internal regulations that clearly define the main duties and functions of each organizational structure.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1, yang mengatur organ-organ utama Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

The Company's Corporate Governance Structure complies with the provisions of Law No. 40 of 2007, Chapter I on General Provisions of Article 1, which regulates the main organs of the Company, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors.

Berikut penjelasan fungsi masing-masing organ utama Perseroan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

The following is an explanation of the functions of each of the Company's main organs:

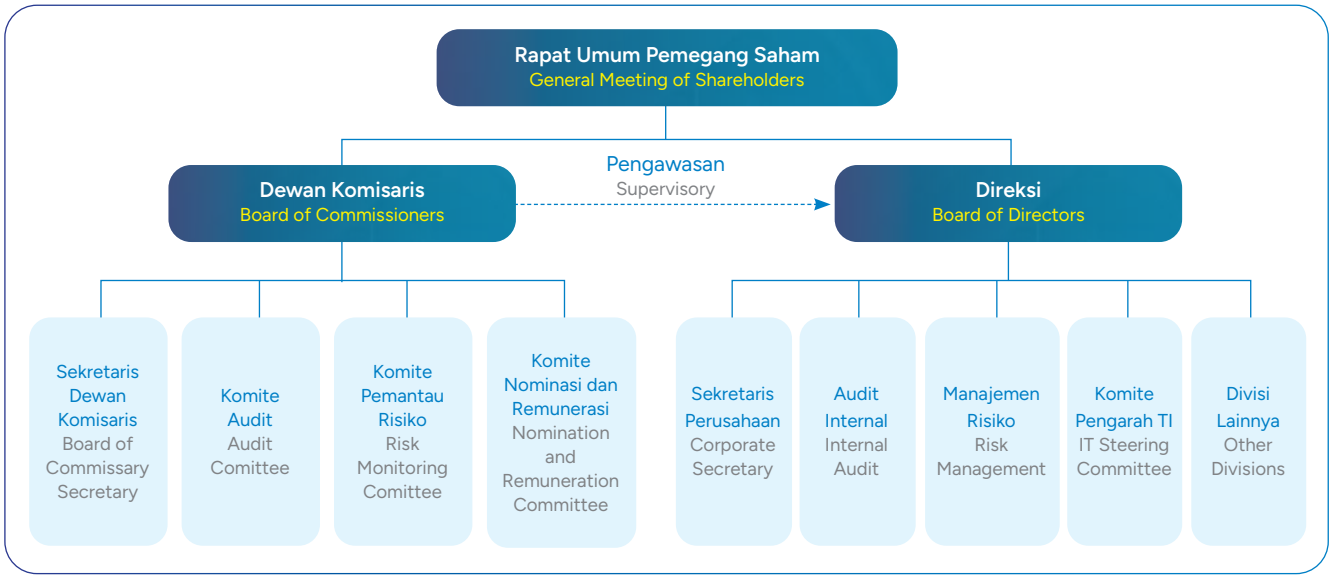
1. The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the GMS, is the Company's Organ that holds authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits stipulated by the Law and/or the Articles of Association.

2. The Board of Commissioners is the Company's Organ tasked with carrying out general and/or specific supervision based on the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. The Board of Directors is the Company's Organ that has full authority and responsibility for managing the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, as well as represents the Company both in and out of court according to the provisions of the Articles of Association.

**Struktur Tata Kelola PT PII**
IIGF Governance Structure




## Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola PT PII

Person in Charge of the Implementation of Governance at IIGF

Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola berjalan secara efektif, konsisten, dan terkoordinasi di seluruh lini organisasi Perseroan serta memastikan tercapainya tujuan perusahaan secara berkelanjutan, serta selaras dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-027/DIR/COS/HR/1217 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Keputusan Direksi melalui Rapat Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 dengan agenda Pembahasan Penunjukan Penanggungjawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT PII menetapkan Direktur Utama sebagai penanggung jawab utama dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh lingkungan Perseroan. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan atas peran, kewenangan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan, serta pengendalian tata kelola di Perseroan.

In order to ensure that governance implementation runs effectively, consistently, and in a coordinated manner across all levels of the organization to continuously achieve the Company's objectives, and in accordance with the Board of Directors' Decision Letter No. SK-027/DIR/COS/HR/1217, as reaffirmed through the Board of Directors' Decision made during the Board of Directors' Meeting held on 7 November 2025, with the agenda of discussing the appointment of the person in charge of Good Corporate Governance implementation and monitoring, IIGF has designated the President Director as the person in charge of the implementation and monitoring of Good Corporate Governance across the Company's environment. This designation aims to ensure clarity regarding roles, authority, and accountability in the implementation of the Company's governance policies, supervision, and control within the Company.

# Strategi Perseroan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbaik dan Berkelanjutan

The Company's Strategy in Implementing Best and Sustainable Corporate Governance

Perseroan memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas penerapan GCG di segenap aspek Perseroan. Sepanjang tahun 2025, sejumlah inisiatif implementasi GCG telah dilaksanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan dukungan dari pihak independen, yakni antara lain:

1. Internalisasi kebijakan kode etik dalam berbagai kesempatan kepada seluruh Insan Perseroan serta pembaharuan Pakta Integritas Tahunan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2024 (*Assessment* GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi *Area of Improvement* (AoI) GCG sesuai hasil *Assessment* GCG Tahun Buku 2024.
4. Pemutakhiran Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini serta penyesuaian dengan praktik terbaik
5. Pelaksanaan Survei Pengetahuan dan Persepsi Pemangku Kepentingan guna memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan terkait kinerja PT PII.
6. Melaksanakan Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada bulan Maret 2025, dengan hasil memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan kembali sertifikasi yang diperoleh dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2028. Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan.
7. Diseminasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh Insan Perseroan
8. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait GRC yaitu kebijakan GCG, kebijakan kode etik, kebijakan pengendalian gratifikasi, kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha kepada seluruh karyawan serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PII.
9. Partisipasi dalam ajang penghargaan terkait GCG.

The Company is committed to promoting sustainable business growth by improving the quality of GCG implementation across all aspects of the Company. Throughout 2025, a number of GCG implementation initiatives were carried out, both independently and with the support of independent parties, including the following:

1. Internalization of the code of conduct on various occasions to all Company personnel, as well as the renewal of the Annual Integrity Pact for employees, Board of Directors, and Board of Commissioners.
2. Assessment of Good Corporate Governance Implementation for the 2024 Fiscal Year (GCG Assessment) conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
3. Implementation of follow-up actions on the recommendations for Areas of Improvement (AoI) in GCG based on the GCG Assessment results for the 2024 Fiscal Year.
4. Updating the Good Corporate Governance Policy in accordance with the prevailing laws and regulations and adapting to best practices
5. Conducting Stakeholder Knowledge and Perception Survey to obtain feedback from stakeholders regarding the performance of IIGF.
6. Conducting the Anti Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016 Recertification Audit in March 2025, with results confirming compliance with the requirements to continue the certification previously obtained, which is valid until 29 March 2028. The Company remains committed to consistently implementing and maintaining the SMAP in accordance with the established SMAP objectives.
7. Dissemination of the gratification control program to all Company personnel.
8. Conducting dissemination of policies related to GRC, including the Code of Conduct, gratification control policy, whistleblowing system policy, Policy on the Anti-Bribery Management System, and the Business Continuity Management System Policy to all employees, as well as the Board of Directors and Board of Commissioners of IIGF.
9. Participation in award programs related to GCG.

# Penilaian dan Evaluasi Kepatuhan Penerapan Tata Kelola Perseroan

Assessment and Evaluation of Compliance with the Implementation of Good Corporate Governance

Perseroan melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala atas penerapan GCG sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (PMK 88/2015). Evaluasi atas penerapan GCG dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
4. Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

The Company periodically assesses and evaluates GCG implementation as part of its efforts to ensure compliance with the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance (PMK 88/2015). The evaluation of GCG implementation is carried out with the following objectives:

1. To test and assess the implementation of GCG through an elaboration of the GCG implementation condition and comparison with predetermined testing indicators and parameters.
2. To provide an overview of the measurement results through scoring of GCG implementation, along with proposed recommendations for improvement to reduce the gap between practical implementation and the established indicators and testing parameters.
3. To monitor the consistency of GCG implementation across the Company's organizational environment and to obtain input for the refinement and development of GCG policies.
4. To encourage increasingly professional, transparent, and efficient Corporate management, while empowering functions and strengthening the independence of the Company's Organs.

## Kriteria Penilaian

Assessment Criteria

Kriteria yang digunakan dalam mengukur efektivitas penerapan GCG merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan yang mencakup 6 (enam) aspek pengujian yaitu:

The criteria used to measure the effectiveness of GCG implementation are based on the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, which consists of 6 (six) assessment aspects, namely:

| | Aspek Pengujian/Indikator/Parameter<br>Assessment Aspects/Indicators/Parameters | Bobot<br>Weight |
|---|---|---|
| I. | Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan<br>Commitment to Sustainable Implementation of Governance | 7 |
| II. | Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS | 9 |

| | Aspek Pengujian/Indikator/Parameter<br>Assessment Aspects/Indicators/Parameters | Bobot<br>Weight |
|---|---|---|
| III. | Dewan Komisaris Board of Commissioners | 35 |
| IV. | Direksi Board of Directors | 35 |
| V. | Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency | 9 |
| VI. | Aspek Lainnya Other Aspects | +5 |
| | **Skor Keseluruhan** Total Score | **100** |

## Pihak Penilai Independen
Independent Assessor

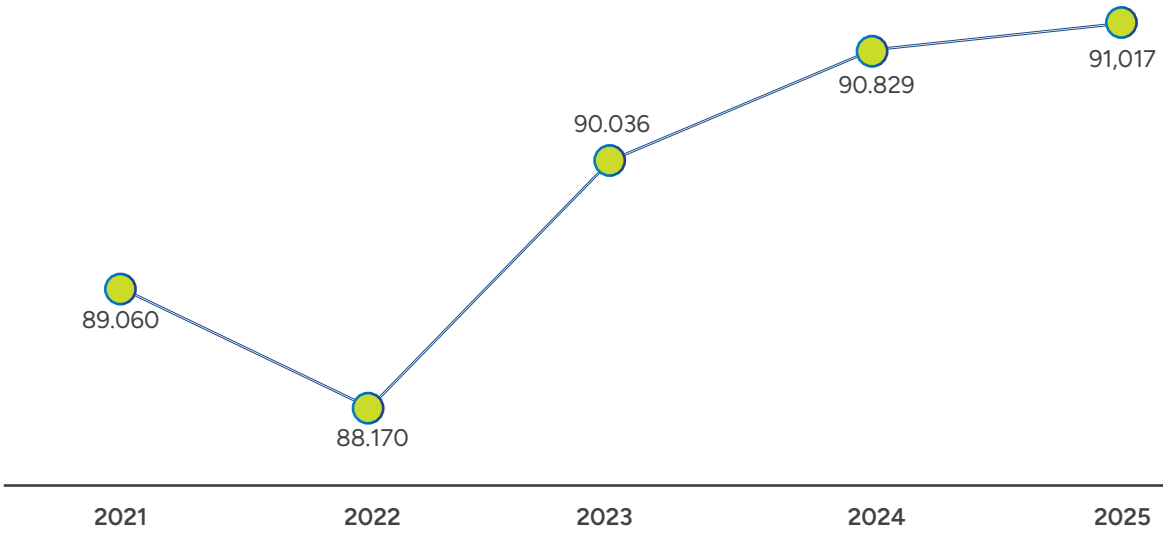
Penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan surat tugas yang ditetapkan melalui Surat Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Nomor PE.05.02/S-3/D5/03/2026 perihal Asesmen Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun Buku 2025 pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

The assessment of the implementation of Good Corporate Governance for the Fiscal Year was conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), based on the assignment letter issued by the Deputy for State Accountants of BPKP Number PE.05.02/S-3/D5/03/2026 concerning the Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation for Fiscal Year 2025 at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

## Hasil Penilaian atas Penerapan Tata Kelola
Results of the Governance Implementation Assessment

Berikut hasil penilaian atas penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir PT PII:

The following are the results of the assessment of GCG implementation in IIGF over the past 5 (five) years:




Hasil skor penilaian GCG yang diperoleh PT PII Tahun Buku 2025 adalah sebesar 91,017% dengan predikat penilaian "**Sangat Baik**". Berikut rincian perbandingan 2 (dua) tahun terakhir atas penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT PII:

The GCG assessment score obtained by IIGF for the 2025 Fiscal Year was 91.017%, with "**Excellent**" predicate. The following is a detailed comparison of assessment results of IIGF's Good Corporate Governance implementation in the last 2 (two) years:

| Aspek Pengujian/Indikator/Parameter<br>Assessment Aspects/Indicators/Parameters | Bobot<br>Weight | Capaian Tahun 2025<br>2025 Achievements | | Capaian Tahun 2024<br>2024 Achievements | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Skor<br>Score | % Pencapaian<br>%<br>Achievement | Skor<br>Score | % Pencapaian<br>%<br>Achievement |
| Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan<br>Commitment to the Sustainable Implementation of Governance | 7 | 6,683 | 95,470% | 6,569 | 93,84% |
| Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS | 9 | 8,740 | 97,753% | 8,813 | 97,92% |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | 35 | 32,777 | 93,604% | 31,787 | 90,82% |
| Direksi Board of Directors | 35 | 32,712 | 93,345% | 32,336 | 92,39% |
| Pengungkapan Informasi dan Transparansi<br>Information Disclosure and Transparency | 9 | 8,022 | 89,130% | 8,407 | 93,41% |
| Aspek Lainnya Other Aspects | 5 | 2,083 | 41,667% | 2,917 | 58,33% |
| **Skor Keseluruhan** Total Score | | 91,017 | | 90,829 | |
| **Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG**<br>Classification of GCG Implementation Quality | | Sangat Baik | | | |

**Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik**

Notes: 0-50: Poor | 50-60: Fair | 60-75: Moderate | 75-85: Good | 85-100: Excellent

## Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Tahun Buku 2025

Recommendations from the GCG Assessment Results for the 2025 Fiscal Year

Berikut tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian asesmen GCG berdasarkan parameter Keputusan Menteri Keuangan No. 505/ KMK.06/2020 Tahun buku 2025:

The following are the follow-up actions on recommendations from the GCG assessment results based on the parameters set out in the Decree of the Minister of Finance No. 505/ KMK.06/2020 for the 2025 Fiscal Year.

| Aspek<br>Aspek | *Area of Improvement* | |
|---|---|---|
| Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan<br>Commitment to Sustainable Implementation of Governance | Tidak ada | None |
| Pemegang Saham dan RUPS<br>Shareholders and GMS | Melakukan penyesuaian komposisi organ perseroan melalui pengangkatan Direktur Utama definitif sehingga komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan. | Adjusting the composition of the Company's organs by appointing a definitive President Director so that the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is in accordance with the provisions. |
| Dewan Komisaris<br>Board of Commissioners | Melakukan revisi *board manual* dengan memuat poin terkait *Standard Level Agreement* (SLA)/ berapa hari jangka waktu tanggapan yang harus diberikan oleh Dewan Komisaris atas rancangan RKAP. | Revising the Board Manual to include points related to the Standard Level Agreement (SLA)/the timeframe within which the Board of Commissioners must respond to the RKAP draft. |
| | Mencantumkan Rencana Anggaran dan IKU Dewan Komisaris dalam RKAT tahun berikutnya, serta menyampaikan RKAT Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP. | Including the Board of Commissioners' Budget Plan and KPIs in the following year's RKAP and submitting the Board of Commissioners' RKAT to the Board of Directors to be incorporated into the RKAP. |
| | Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk:<br>1. Menyediakan bahan-bahan rapat kepada peserta rapat paling lama 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat kecuali untuk rapat yang sewaktu-waktu dan bersifat mendesak;<br>2. Menyajikan dan mencantumkan poin terkait risalah hasil evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya pada risalah rapat selanjutnya;<br>3. Mendokumentasikan tanggal upload risalah rapat ke sharepoint dan melakukan monitoring untuk memastikan risalah rapat diupload ke *sharepoint* paling lama 14 (empat belas) hari setelah rapat selesai dilaksanakan. | Instructing the Secretary of the Board of Commissioners to:<br>1. Provide meeting materials to meeting participants no later than 3 (three) days before the meeting, except for meetings that are ad hoc and urgent;<br>2. Present and include points related to the minutes of evaluation results and follow-up on the implementation of previous meeting's decisions in the minutes of next meeting;<br>3. Documenting the date the meeting minutes are uploaded to SharePoint and monitoring to ensure they are uploaded to SharePoint no later than 14 (fourteen) days after the meeting concludes. |

| Aspek<br>Aspek | *Area of Improvement* | |
|---|---|---|
| | Menginstruksikan Komite Remunerasi dan Nominasi agar menyusun Program Kerja Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi serta Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan | Instructing the Remuneration and Nomination Committee to draft the Remuneration and Nomination Committee Annual Work Plans and the Remuneration and Nomination Committee charter to be submitted to the Board of Commissioners to be determined. |
| Direksi<br>Board of Directors | Menginstruksikan kepada Divisi *Corporate Service and Procurement* fungsi *General Affair* untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil laporan *Gap Analysis* terkait:<br>1) Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);<br>2) Menyusun struktur organisasi P2K3 serta deskripsi pekerjaan (*job description*), memberikan sertifikasi ahli K3 Umum kepada Petugas Ahli K3 Umum (AK3U);<br>3) Melakukan sosialisasi terkait formulir pelaporan bahaya; dan<br>4) Menyusun laporan kecelakaan kerja. | Instructing the Corporate Service and Procurement Division, General Affairs function to complete the follow-up actions on Gap Analysis report regarding:<br>1) Establishing an Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3);<br>2) Developing P2K3's organizational structure and job descriptions, and providing General OHS expert certification to General OHS Experts (AK3U);<br>3) Conducting outreach regarding hazard reporting forms; and<br>4) Compiling occupational accident reports. |
| | Menginstruksikan Divisi *Human Capital dan Organization Development* untuk:<br>1) Menyusun Kurikulum dan Kalender Pelatihan Tahunan (*Training Master Plan*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;<br>2) Membangun sistem *tracking* pelatihan berbasis *Human Resource Information System* (HRIS) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;<br>3) Menetapkan target keberhasilan program pelatihan serta menyusun laporan efektivitas pelatihan tahunan guna melihat keberhasilan program pelatihan yang sedang berjalan;<br>4) Melakukan transparansi karir pegawai melalui penyusunan dan sosialisasi kebijakan internal *job posting*, dan melakukan pengumuman seluruh posisi kosong secara internal terlebih dahulu;<br>5) Melakukan sosialisasi kebijakan pemberian remunerasi kepada seluruh pegawai;<br>6) Menyusun kebijakan pemberian penghargaan bagi pegawai baik individu maupun tim yang meliputi kriteria pemberian penghargaan (contoh penghargaan pegawai teladan dll.) dan melakukan pelaksanaannya; dan<br>7) Menyusun kebijakan transparansi yang jelas, memperkuat komunikasi dua arah melalui berbagai kanal resmi ataupun membangun *platform* komunikasi berbasis teknologi, melibatkan pimpinan secara aktif dalam penyampaian informasi strategis seperti kebijakan perusahaan, strategi jangka panjang serta perkembangan proyek, serta secara konsisten mengevaluasi dan menindaklanjuti umpan balik karyawan. | Instructing the Human Capital and Organization Development Division to:<br>1) Develop an Annual Training Curriculum and Calendar (Training Master Plan) that is accessible to all employees;<br>2) Establish a Human Resource Information System (HRIS)-based training tracking system accessible to all employees;<br>3) Establish training program success targets and compile an annual training effectiveness report to assess the success of ongoing training programs;<br>4) Promote employee career transparency by developing and disseminating an internal job posting policy and prioritizing all vacant positions announcement internally;<br>5) Disseminate the remuneration policy to all employees;<br>6) Develop and implement a reward policy for both individual and team employees, including award criteria (e.g., exemplary employee awards, etc.); and<br>7) Develop a clear transparency policy, strengthen two-way communication through various official channels or develop a technology-based communication platform, actively involve management in disseminating strategic information such as company policies, long-term strategies, and project developments, and consistently evaluate and follow up on employee feedback. |
| | Menginstruksikan kepada Divisi Audit Internal untuk mengoordinasikan kelemahan pengendalian kepada divisi terkait dan memonitor progresnya antara lain terkait:<br>1) Pembaruan SOP *Job Description*;<br>2) Penyelesaian finalisasi kebijakan *Competency Based Human Resource Management* (CBHRM);<br>3) Memastikan pelaksanaan pengecekan latar belakang calon karyawan;<br>4) Reviu program budaya serta penetapan keberlanjutan program tahun 2026 berdasarkan evaluasi tahun 2025;<br>5) Reviu relevansi *Operation Manual* (OM); | Instructing the Internal Audit Division to coordinate control weakness with relevant divisions and monitor progress, including:<br>1) Updating SOPs for Job Descriptions;<br>2) Finalizing the Competency-Based Human Resource Management (CBHRM) policy;<br>3) Ensuring the implementation of background checks for prospective employees;<br>4) Reviewing the cultural program and determining the program's sustainability in 2026 based on the 2025 evaluation;<br>5) Reviewing the relevance of the Operation Manual (OM); |

| Aspek<br>Aspek | *Area of Improvement* | |
|---|---|---|
| | 6) Pelaksanaan sosialisasi kepada *Risk Officer* terkait pengkinian *Risk Control Matrix* (RCM);<br>7) Peningkatan monitoring dan tindak lanjut secara lebih intensif kepada divisi yang belum menyampaikan *Business Impact Analysis and Continuity Plan* (BIACP);<br>8) Melakukan eskalasi kepada manajemen serta memberikan pendampingan teknis singkat agar penyusunan *Business Impact Analysis and Continuity Plan* (BIACP) dapat segera diselesaikan sebagai dasar penyusunan *Emergency Response Plan* (ERP);<br>9) Menerbitkan SOP Pengelolaan Piutang; dan<br>10) Memastikan adanya tanda tangan dalam Risalah Rapat Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Puncak. | 6) Disseminating information to Risk Officers regarding the update of Risk Control Matrix (RCM);<br>7) Increasing monitoring and more intensive follow-up for divisions that have not yet submitted their Business Impact Analysis and Continuity Plan (BIACP);<br>8) Escalating the process to management and providing brief technical assistance to ensure immediate completion of Business Impact Analysis and Continuity Plan (BIACP) as the basis for developing Emergency Response Plan (ERP);<br>9) Issuing Accounts Receivable Management SOP; and<br>10) Ensuring signatures on the Minutes of Top Management Review Implementation Meeting. |
| | Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk:<br>1) Menyelesaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi Hasil laporan *Assessment* Pengetahuan dan Persepsi *Stakeholder* terkait Penguatan aspek informasi dan edukasi teknis, Penyempurnaan proses pengajuan dan evaluasi penjaminan, Penguatan transparansi dan struktur biaya penjaminan, serta Penguatan program sosialisasi dan kolaborasi akademik; dan<br>2) Menambahkan muatan terkait hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan keputusan rapat sebelumnya dalam risalah rapat. | Instructing the Corporate Secretary to:<br>1) Complete follow-up on all recommendations from the Stakeholder Knowledge and Perception Assessment report related to strengthening technical information and education, improving guarantee application and evaluation process, strengthening transparency and guarantee fee structure, and strengthening the outreach and academic collaboration program; and<br>2) Add content related to the evaluation results of the implementation of previous meeting's decisions and the decisions of previous meetings into the minutes of meeting. |
| Pengungkapan Informasi dan Transparansi<br>Information Disclosure and Transparency | Melakukan *benchmarking* dan *gap assessment* internal Laporan Tahunan terhadap nominasi *Annual Report Award* (ARA) 2024 untuk meningkatkan peluang masuk nominasi ARA. | Conducting benchmarking and internal gap assessment of Annual Report against the 2024 Annual Report Award (ARA) nominations to increase the chances of being nominated for ARA. |

## Status Tindak Lanjut Rekomendasi GCG *Assessment* Perseroan Tahun Buku 2024

Status of Follow-Up to the Company's GCG Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year

Berikut status tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan tahun buku 2024 hingga akhir Desember 2025:

The following outlines the status of follow-up actions on the recommendations from the assessment of the Company's Good Corporate Governance implementation for the 2024 Fiscal Year as of the end of December 2025:

| Aspek<br>Aspects | Jumlah AoI<br>Number of AoI | Penyelesaian AoI<br>AoI Completion | Persentase<br>Percentage |
|---|---|---|---|
| Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan<br>Commitment to Sustainable Implementation of Governance | 1 | 1 | 100% |
| Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS | 2 | 2 | 100% |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | 7 | 7 | 100% |
| Direksi Board of Directors | 7 | 7 | 100% |
| Pengungkapan Informasi dan Transparansi<br>Information Disclosure and Transparency | 1 | 1 | 100% |
| **Total** | **18** | **18** | **100%** |

# Pernyataan mengenai Rekomendasi yang Telah dilaksanakan atas Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Tahun Buku 2024

Statement on Recommendations Implemented Based on the Assessment Results of Governance Implementation in the 2024 Fiscal Year

Berikut tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun buku 2024 hingga akhir Desember 2025:

The following outlines the follow-up actions on the recommendations from the assessment of Good Corporate Governance implementation in the 2024 fiscal year as of the end of December 2025:

| Aspek<br>Aspects | *Area of Improvement* | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan<br>Commitment to the Sustainable Implementation of Governance | Merencanakan dan melaksanakan Rapat Direksi yang membahas tentang Penunjukan Direktur sebagai Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).<br>Plan and conduct a Board of Directors meeting to discuss the appointment of a Director as the person in charge of the implementation and monitoring of Good Corporate Governance at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. | Telah dilaksanakan Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Penunjukan Penanggungjawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tanggal 7 November 2025.<br>A Board of Directors Meeting was held on 7 November 2025 to discuss the appointment of the person responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance. |
| Pemegang Saham dan RUPS<br>Shareholder and GMS | 1. Menetapkan pengaturan secara rinci mengenai jabatan lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan.<br>2. Melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti AoI yang dihasilkan dari asesmen atas penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun buku 2024.<br>1. Establish detailed provisions regarding other positions that may cause conflicts of interest.<br>2. Undertake initiatives to follow up on the AoI identified from the assessment of the good corporate governance implementation assessment for the 2024 financial year. | Telah disampaikan Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-264/KN/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyampaian Daftar Potensi Rangkap Jabatan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.<br>A letter from the Director General of State Assets, Ministry of Finance, No. S-264/KN/2025, dated 30 December 2025 on the Submission of a List of Potential Concurrent Positions for the Board of Directors and Board of Commissioners that may cause Conflicts of Interest, has been received. |
| Dewan Komisaris<br>Board of Commissioners | 1. Melibatkan perangkat Dewan Komisaris secara optimal dalam penyusunan RKA Dewan Komisaris.<br>2. Mencantumkan rencana kerja pengawasan dan pemberian arahan pada RKA Dewan Komisaris terkait:<br>- Kebijakan/rancangan Sistem Pengendalian Internal perusahaan dan pelaksanaannya<br>- Manajemen Risiko Perusahaan<br>- Sistem teknologi informasi perusahaan<br>- Kebijakan SDM<br>- Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan<br>- Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya<br>- Kebijakan mutu dan kepuasan pelayanan<br>- Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga<br>- Penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal<br>- Pengusulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris<br>- Persetujuan terhadap Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham<br>- Pelaporan kepada Pemegang Saham atas penilaian kinerja Direksi<br>- Rencana rapat Dewan Komisaris<br>3. Mengesahkan program kerja tahunan Komite Dewan Komisaris dan dimuat pada RKA Dewan Komisaris. | Telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-006/KOM/1224 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris PT PII.<br>The matter has been included in Board of Commissioners' Decree No. SK-006/KOM/1224 dated 31 December 2024 on the Determination of the Work Plan of IIGF's Board of Commissioners and its Organs. |

| Aspek<br>Aspects | *Area of Improvement* | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| | 1. Optimize the involvement of the Board of Commissioners' supporting organs in the preparation of the Board of Commissioners' RKA.<br>2. Include supervisory work plans and advisory activities in the Board of Commissioners' RKA related to:<br>- Corporate Internal Control System policies/design and their implementation<br>- Corporate risk management<br>- Information technology system of the Company<br>- Human resource policies<br>- Accounting policies and financial statement preparation<br>- Procurement policies and their implementation<br>- Quality policies and service satisfaction<br>- Company compliance with applicable laws and regulations and the Articles of Association, as well as compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties<br>- Appointment of prospective auditors and external audit budget allocation<br>- Proposals for the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners<br>- Approval of actions by the Board of Directors requires approval from the Board of Commissioners or Shareholders<br>- Reporting to Shareholders regarding the performance evaluation of the Board of Directors<br>- Plans for meetings of the Board of Commissioners<br>3. Approve the annual work programs of the Board of Commissioners' Committees and include them in the Board of Commissioners' Work Plans and Budgets. | |
| | Melakukan telaah atas pengusulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.<br>Conduct a review of proposals for the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners. | 1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan 22 April 2025 surat undangan No. UND-12/PII/DK/0425 tanggal 19 April 2025).<br>2. Telah diterbitkan Surat No. SR-01 /PII/DK/0425 tanggal 28 April 2025 perihal Usulan Tantiem Tahun 2024 dan Penyesuaian Remunerasi Tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PII.<br>1. Discussion Meeting was held on 22 April 2025 invitation letter No. UND-12/PII/DK/0425 dated 19 April 2025).<br>2. Letter No. SR-01/PII/DK/0425 was issued on 28 April 2025 on the Proposal for the 2024 Tantiem and the Adjustment of 2025 Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of IIGF. |
| | Menyesuaikan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagaimana ketentuan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko Edisi Ketiga Tahun 2022<br>Adjust the member composition of the Risk Monitoring Committee in accordance with the provisions stipulated in the Third Edition of the Risk Monitoring Committee Charter of 2022. | Telah ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor:<br>1. SK-006/KOM/1224 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris PT PII.<br>2. SK-003/KOM/0625 tanggal 2 Juni 2025 perihal Pengesahan Piagam Komite Audit PT PII<br>3. SK-004/KOM/0625 tanggal 2 Juni 2025 perihal Pengesahan Piagam Komite Pemantau Risiko PT PII.<br>Followed up through the issuance of Board of Commissioners' Decree number:<br>1. SK-006/KOM/1224 dated 31 December 2024 on the Determination of the Work Plan of IIGF's Board of Commissioners and its Organs.<br>2. SK-003/KOM/0625 dated 2 June 2025 on the Ratification of the Audit Committee Charter of IIGF.<br>3. SK-004/KOM/0625 dated 2 June 2025 on the Ratification of the Risk Monitoring Committee Charter of IIGF. |

| Aspek<br>Aspects | *Area of Improvement* | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| | Menginstruksikan Komite Dewan Komisaris untuk:<br>1. Melakukan telaah/pembahasan terkait penyusunan RKA Dewan Komisaris, *internal control report*, kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis, dan kualitas rekomendasi audit eksternal dan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik.<br>2. Melakukan peninjauan dan pemutakhiran Piagam Komite Dewan Komisaris.<br>Instruct the Board of Commissioners' Committees to:<br>1. Conduct reviews and discussions regarding the preparation of the Board of Commissioners' RKA, internal control reports, alignment of the Company's vision and mission with changes in the business environment, and the quality of external audit recommendations and the conformity of audit implementation with public accounting professional standards.<br>2. Review and update the Board of Commissioners' Committee Charters. | 1. Telah ditindaklanjuti melalui:<br>a. Rapat Pembahasan 15 April 2025 (UND-03/PII/DK-KA/0225 tanggal 11 April 2025).<br>b. Surat No. S-I5/PII/DK/O525 tanggal 2 Mei 2025 perihal Reviu atas Pelaksanaan Audit dan Kinerja Auditor Eksternal Tahun 2024.<br>c. Surat No. S-43/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 perihal Telaah atas Perubahan Lingkungan Bisnis pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).<br>2. Telah ditindaklanjuti melalui penerbitan:<br>a. SK-006/KOM/1224 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris PT PII.<br>b. SK-003/KOM/0625 tanggal 2 Juni 2025 perihal Pengesahan Piagam Komite Audit PT PII.<br>c. SK-004/KOM/0625 tanggal 2 Juni 2025 perihal Pengesahan Piagam Komite Pemantau Risiko PT PII.<br>d. S-43/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 perihal Telaah atas Perubahan Lingkungan Bisnis pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>1. Followed up through:<br>a. Discussion Meeting held on 15 April 2025 (UND-03/PII/DK-KA/0225 dated 11 April 2025).<br>b. Letter No. S-15/PII/DK/0525 dated 2 May 2025 on the Review of the Implementation of the 2024 Audit and the Performance of the External Auditor.<br>c. Letter No. S-43/PII/DK/1225 dated December 30, 2025 concerning the Review of Changes in the Business Environment at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund<br>2. Followed up through the issuance:<br>a. SK-006/KOM/1224 dated 31 December 2024 on the Determination of the Work Plan of IIGF's Board of Commissioners and its Organs.<br>b. SK-003/KOM/0625 dated 2 June 2025 on the Ratification of the Audit Committee Charter of IIGF.<br>c. SK-004/KOM/0625 dated 2 June 2025 on the Ratification of the Risk Monitoring Committee Charter of IIGF.<br>d. S-43/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 on the Review of Changes in the Business Environment at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| | Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk:<br>- Menyediakan bahan-bahan rapat kepada peserta rapat paling lama 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat kecuali untuk rapat yang sewaktu-waktu dan bersifat mendesak.<br>- Melakukan validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan.<br>Instruct the Secretary of the Board of Commissioners to:<br>- Provide meeting materials for participants no later than 3 (three) days before the meeting, except for meetings that are urgent and held on short notice.<br>- Validate meeting minutes in accordance with the established rules of procedure. | - Menyampaikan bahan rapat sesuai ketentuan via email sebagai lampiran dari undangan rapat.<br>- Meng*upload* risalah rapat ke *sharepoint* sesuai ketentuan<br>- Meeting materials are submitted in accordance with the applicable provisions via email as attachments to the meeting invitation.<br>- Meeting minutes are uploaded to SharePoint in accordance with the applicable provisions. |
| Direksi<br>Board of Directors | Mengadakan sosialisasi ulang SOP yang ada PT PII, melakukan evaluasi berkala, dan peningkatan pengawasan melalui audit internal yang lebih rutin.<br>Conduct re-dissemination of existing SOPs at IIGF, carry out periodic evaluations, and strengthen supervision through more frequent internal audits. | Telah disampaikan *email* dari fungsi OD terkait dengan Sosialisasi Kepatuhan Terhadap Kebijakan, SOP dan IK pada tanggal 5 Agustus 2025.<br>An email from the OD Function regarding the Dissemination of Compliance with Policies, SOPs, and Work Instructions (WI) was sent on 5 August 2025. |

| Aspek<br>Aspects | *Area of Improvement* | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| | Mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kinerja yang lebih stabil dan berkelanjutan.<br>Take strategic measures to ensure more stable and sustainable performance growth. | Telah melaksanakan upaya peningkatan kinerja Perseroan secara stabil dan berkelanjutan salah satunya dari sisi pendapatan sebagaimana tercantum dalam RKAP 2026 dan telah disahkan melalui RUPS RKAP Tahun 2026 pada tanggal 11 Desember 2025.<br>Efforts have been undertaken to improve the Company's performance in a stable and sustainable manner, including from the revenue perspective as outlined in the 2026 RKAP, which was approved through the GMS for the 2026 RKAP on 11 December 2025. |
| | Menginstruksikan Divisi *Corporate Service and Procurement* (CSP) untuk:<br>1. Melaksanakan tahapan *User Acceptance Test* (UAT), sosialisasi internal (*user*) dan eksternal (*vendor*) serta tahap *go-live.*<br>2. Melaksanakan kegiatan *vendor gathering* untuk mengkomunikasikan kebijakan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), *Whistle Blowing System* (WBS), dan Sistem *Vendor Collaboration.*<br>Instruct the Corporate Service and Procurement (CSP) Division to:<br>1. Implement the stages of User Acceptance Test (UAT), internal (user) and external (vendor) dissemination, and the go-live stage.<br>2. Organize vendor gathering activities to communicate policies regarding the Anti-Bribery Management System (SMAP), Whistleblowing System (WBS), and the Vendor Collaboration System. | 1. Tahap *User Acceptance Test* (UAT) dan Sosialisasi telah dilaksanakan sesuai tanggal dibawah:<br>a. Internal/*user* (staf, *Senior Leader* dan Deputi Direktur): 10 Februari 2025<br>b. Eksternal (*Vendor*): 24 Februari 2025<br>c. Internal/*user* (Direksi): 26 Februari 2025<br>Implementasi Sistem baru dijalankan sejak Tanggal 3 Maret 2025 setelah selesai Migrasi Sistem ERP yang dilakukan Tim IT pada tanggal 27 Februari 2025 - 2 Maret 2025.<br>2. *Vendor Gathering* telah dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Implementasi sistem ERP baru yaitu pada tanggal 24 Februari 2025.<br>1. The User Acceptance Test (UAT) and dissemination stages were conducted on the following dates:<br>a. Internal/user (staff, Senior Leader, and Deputy Director): 10 February 2025<br>b. External (Vendors): 24 February 2025<br>c. Internal/user (Board of Directors): 26 February 2025<br>Meanwhile, a new system was implemented starting 3 March 2025, following the completion of the ERP system migration carried out by the IT Team from 27 February 2025 to 2 March 2025.<br>2. The Vendor Gathering was conducted concurrently with the dissemination of the new ERP system implementation on 24 February 2025. |
| | Menginstruksikan Divisi *Human Capital and Organization Development* untuk:<br>1. Memutakhirkan SOP Pelatihan Karyawan Nomor COS.004/SOP/V.01 tanggal 16 Februari 2017<br>2. Menyusun kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan.<br>3. Memutakhirkan SOP Siaga Tanggap Darurat Nomor HC.003/SOP/V.01 tanggal 1 Oktober 2018.<br>Instruct the Human Capital and Organization Development Division to:<br>1. Update the Employee Training SOP No. COS.004/SOP/V.01 dated 16 February 2017.<br>2. Develop a policy regarding assessment methods to measure employee satisfaction.<br>3. Update the Emergency Response SOP No. HC.003/SOP/V.01 dated 1 October 2018. | 1. Telah dimutakhirkan SOP Pelatihan Karyawan per tanggal 1 Oktober 2025.<br>2. Perseroan telah melaksanakan Survei Kepuasan Pegawai tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Mercer Sirota dengan skor *engagement* sebesar 73%. Divisi HCOD telah menyusun Intruksi Kerja (IK) Pelaksanaan *Employee Engagement Survey* dan Penanganan Keluhan / *Feedback* Karyawan.<br>3. Telah dimutakhirkan menjadi dokumen SOP Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) No. RM.004/SOP/V.01 /2024.<br>1. The Employee Training SOP was updated as of 1 October 2025.<br>2. The Company conducted the 2024 Employee Satisfaction Survey, carried out by Mercer Sirota, which recorded an engagement score of 73%. The HCOD Division has prepared a Work Instruction (WI) on the Implementation of the Employee Engagement Survey and the Handling of Employee Complaints/ Feedback.<br>3. The document has been updated in accordance with the Business Continuity Management System (BCMS) SOP No. RM.004/SOP/V.01/2024. |

| Aspek<br>Aspects | *Area of Improvement* | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| | Menyusun dan menetapkan SOP terkait Kepatuhan lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) untuk memastikan bahwa seluruh aset, lokasi usaha, dan fasilitas perusahaan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br>Formulate and establish SOPs related to Environmental Compliance and Occupational Health and Safety (OHS) to ensure that all Company assets, business locations, and facilities comply with applicable laws and regulations. | Penyusunan Kebijakan SMK3 sudah diselesaikan pada Desember 2025.<br>The preparation of the OHSMS policy was completed in December 2025. |
| | Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk:<br>1. Membuat rencana kerja pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.<br>2. Membuat undangan pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.<br>3. Melakukan peninjauan kembali / pemutakhiran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik<br>4. Menyiapkan materi yang memuat seluruh kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik, seperti materi mengenai pedoman Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Kode Etik PT PII, dan materi pendukung lainnya untuk di sosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.<br>5. Menyusun laporan manajemen triwulan IV/tahunan secara akumulatif dan memastikan laporan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh Direksi.<br>Instruct the Corporate Secretary to:<br>1. Prepare an orientation work plan for newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners.<br>2. Prepare invitations for the orientation program for newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners.<br>3. Conduct a review and update of the Good Corporate Governance Guidelines.<br>4. Prepare materials containing all policies and additional guidelines that provide further guidance on various practices contained in the Good Corporate Governance Guidelines, such as materials on Risk Management Guidelines, Board Manual, IIGF Code of Conduct, and other supporting materials to be disseminated to the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors, and officials one level below the Board of Directors.<br>5. Prepare the cumulative fourth quarter/annual management report and ensure that the report is signed by all members of the Board of Directors. | 1. Rencana Kerja Pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat telah tertuang dalam Rencana Kerja CSC-GCG Tahun Buku 2026.<br>2. Program Pengenalan Perseroan telah dilaksanakan tanggal 11 Juni 2025 bagi Direktur Bisnis yang telah diangkat kembali pada tanggal 23 Maret 2025 bersamaan dengan anggota baru Komite Audit & Komite Pemantau Risiko, serta pada tanggal 30 Desember 2025 bagi anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris baru.<br>3. Kebijakan Tata Kelola Perseroan yang Baik telah dimutakhirkan dan disahkan pada tanggal 18 Desember 2025.<br>4. Materi Pengenalan Perseroan telah disesuaikan dengan memuat kebijakan yang berlaku di Perseroan yang memberikan panduan lebih jauh tentang praktik tata Kelola Perusahaan yang baik dan telah disampaikan pada Program Pengenalan Perseroan kepada Direktur Bisnis yang diangkat Kembali, anggota baru Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta kepada anggota Dewan Komisaris baru.<br>5. Laporan Manajemen periode tahun 2025 yang disampaikan kepada Pemegang Saham & Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.<br>1. The Work Plan for the Company Orientation Program for newly appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been included in the CSC–GCG Work Plan for the 2026 Fiscal Year.<br>2. The Company Orientation Program was conducted on 11 June 2025 for the Business Director, who was reappointed on 23 March 2025, together with the newly appointed members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, as well as on 30 December 2025 for the newly appointed members of the Board of Commissioners and the Secretary to the Board of Commissioners.<br>3. The Good Corporate Governance Policy has been updated and ratified on 18 December 2025.<br>4. The Company Orientation materials have been updated to include policies applicable within the Company that provide further guidance on good corporate governance practices and were presented during the Company Orientation Program for the reappointed Business Director, newly appointed members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, as well as the newly appointed members of the Board of Commissioners.<br>5. The 2025 Management Report submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners has been signed by all members of the Board of Directors. |

| Aspek<br>Aspects | *Area of Improvement* | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| | Menginstruksikan Divisi Audit Internal untuk:<br>1. Melakukan revisi terhadap Piagam Audit Internal untuk mencakup ruang lingkup fungsi audit internal secara lebih jelas dan komprehensif serta melakukan peninjauan Piagam Audit Internal secara berkala.<br>2. Menyampaikan Rancangan Rencana Aktivitas Audit Internal Tahunan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit guna mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum ditetapkan.<br>3. Menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi dari auditor internal dan eksternal tidak hanya kepada Dewan Komisaris tetapi juga kepada Direktur Utama.<br>4. Menyampaikan hasil *assessment* atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan internal kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, dan kepada Direktur Utama.<br>Instruct the Internal Audit Division to:<br>1. Revise the Internal Audit Charter to cover the scope of the internal audit function more clearly and comprehensively, and conduct periodic reviews of the Internal Audit Charter.<br>2. Submit the Annual Internal Audit Activity Plan draft to the Board of Commissioners c.q. the Audit Committee to obtain consideration and input prior to its finalization.<br>3. Submit the results of monitoring follow-up actions on recommendations from internal and external auditors not only to the Board of Commissioners but also to the President Director.<br>4. Submit the results of the assessment of the quality assurance and improvement program of the internal supervision function to the Board of Commissioners c.q. the Audit Committee and to the President Director. | 1. Piagam Audit Internal yang telah disesuaikan dengan AoI GCG *Assessment* telah dimutakhirkan pada tanggal 18 Desember 2025.<br>2. Telah disampaikan Surat Penyampaian Rancangan Rencana Aktivitas Audit Internal Tahunan kepada Dewan Komisaris c.q Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum ditetapkan<br>3. Telah disampaikan Surat Penyampaian Laporan Hasil Audit dan Pemantauan QI 2025 dari IA kepada Direktur Utama<br>4. Kepala Divisi Audit Internal telah menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan Fungsi Audit Internal Periode Tahun 2025 kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.<br>1. The Internal Audit Charter, which has been adjusted to AoI's GCG Assessment, was updated on 18 December 2025.<br>2. The Draft Annual Internal Audit Activity Plan has been submitted to the Board of Commissioners c.q. the Audit Committee for consideration and input prior to its finalization.<br>3. The submission letter for the Internal Audit Report and Monitoring Report for QI 2025 has been delivered by the Internal Audit Division to the President Director.<br>4. The Head of Internal Audit Division has submitted the Self-Assessment Report of the Quality Assurance Program and Internal Audit Function Improvement for the 2025 Period to the President Director and the Board of Commissioners c.q. the Audit Committee. |
| Pengungkapan Informasi dan Transparansi<br>Information Disclosure and Transparency | Mengikuti ajang penghargaan di bidang keterbukaan informasi.<br>Participate in award programs in the field of information disclosure. | PT PII meraih penghargaan dalam *Information Transparency Award* 2025 pada kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.<br>IIGF received the Information Transparency Award 2025 in the Best Public Information Provider category, organized by the Central Information Commission. |

# Rapat Umum Pemegang Saham
## General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dengan kewenangan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan penting yang memprioritaskan kepentingan Perseroan serta dilakukan secara wajar dan transparan. Kewenangan RUPS tidak didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ with the highest authority in important decision-making processes that prioritize the Company's interests and is conducted in a fair and transparent manner. The authority of the GMS is not delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits stipulated in the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

## Dasar Penyelenggaraan RUPS
Basis for the Implementation of the GMS

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilaksanakan mengacu pada ketentuan antara lain:
1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/ PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 505/ KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

The implementation of the Company's GMS refers to, among others, the following provisions:
1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
3. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 505/KMK.06/2020 concerning the Guidelines for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
4. The Company's Articles of Association.

## Hak dan Wewenang RUPS
Rights and Authorities of the GMS

Selaras dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No. 88/PMK.06/2015 disebutkan bahwa hak RUPS, antara lain:
1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
4. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam PMK No.88/PMK.06/2015 bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan.

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 88/PMK.06/2015, the rights of the GMS are, among others:
1. Attending and voting at the GMS, with the provision that each share grants its holder the right to cast one vote;
2. Obtaining material information regarding the Company in a timely, measurable, and regular manner;
3. Receiving a share of the Company's profits allocated to Shareholders in the form of dividends and the remaining assets resulting from liquidation, proportional to the number of shares owned; and
4. Other rights in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

PMK No. 88/PMK.06/2015 also stipulates that the GMS has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners, within the limits determined by prevailing laws and regulations and/or the Company's articles of association.

## Jenis-Jenis Pelaksanaan RUPS
Types of GMS Implementation

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun meliputi Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

In accordance with the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders consists of:

1. Annual General Meeting of Shareholders, which is held annually and includes the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Annual Report and the Annual General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's Work Plans and Budgets.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is held at any time as necessary for the Company's interests.

## Prosedur Pelaksanaan RUPS
GMS Implementation Procedures

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

The GMS invitation shall be issued no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS, excluding the date of the invitation and the GMS. The GMS invitation shall be delivered through registered mail and/or through an announcement in a newspaper. The GMS notice shall include the date, time, venue, and agenda of the GMS, along with a statement that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date the GMS invitation is issued until the date the GMS is held.

Sejalan dengan Anggaran dasar Perseroan Pasal 25, prosedur yang dilaksanakan untuk pemungutan suara sebelum rapat dimulai adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.
2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

In accordance with Article 25 of the Company's Articles of Association, the procedure to vote before the meeting commences are as follows:

1. The GMS may be held if at least 51% (fifty-one percent) of the total shares with voting rights are present or represented at the GMS, unless otherwise stipulated by prevailing laws and regulations and/or the articles of association.
2. Shareholders, either in person or represented by proxy based on the power of attorney, have the right to attend the GMS and exercise their voting rights in accordance with the number of shares owned.
3. The Chairman of the Meeting has the right to request that the power of attorney authorizing representation of a Shareholder be presented at the time the meeting is held.
4. At the meeting, each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote.
5. Voting regarding individuals shall be conducted by secret ballot, while voting on other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise and no objection is raised by the Shareholders present at the meeting.

6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
8. Dalam hal usulan lebih dari dua altematif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
10. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

6. All decisions shall be made based on deliberation to reach consensus.
7. In the event that consensus cannot be reached through deliberation, a resolution shall be deemed valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes cast, unless otherwise stipulated in the Articles of Association.
8. If more than two alternatives are proposed and the voting results do not produce one alternative receiving more than 1/2 (one-half) of the total votes cast, a re-vote shall be conducted between the two proposals receiving the highest votes until one proposal obtains more than 1/2 (one-half) of the total votes cast.
9. Blank votes or invalid votes shall be considered nonexistent and shall not be counted in determining the total number of votes cast at the GMS.
10. Shareholders may adopt a valid resolution without holding a physical GMS, provided that all Shareholders have been notified in writing and all Shareholders provide written approval of the proposed resolution and sign such approval. A resolution adopted in this manner shall have the same legal force as a resolution validly adopted at the GMS.

## Pelaksanaan RUPS Perseroan Tahun 2025

Implementation of the Company's GMS in 2025

Selama tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024
2. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2026
3. RUPS Luar Biasa Tahun 2025

Berikut penjelasan dari masing-masing pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2025:

Throughout 2025, the Company held several GMS meetings consisting of:

1. Annual GMS on the Approval of the Annual Report for the 2024 Fiscal Year
2. Annual GMS on the Approval of the Company's Work Plans and Budgets for 2026
3. Extraordinary GMS in 2025

The following provides an explanation of each Annual GMS and Extraordinary GMS held throughout 2025:

## RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024

Annual GMS on the Approval of the Annual Report for the 2024 Fiscal Year

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Undangan RUPS<br>Date of GMS Invitation | 21 April 2025 | 21 April 2025 |
| Tanggal & Waktu RUPS<br>Date & Time of GMS | 6 Mei 2025 | 6 May 2025 |
| Lokasi<br>Venue | Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara<br><br>Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta | Meeting Room of the Directorate General of State Assets<br>Syafrudin Prawiranegara II Building, North 10th floor, East Lapangan Banteng St. No. 2-4, Central Jakarta, Special Region of Jakarta |
| Pimpinan RUPST<br>Chairman of the Annual GMS | Rionald Silaban, SH | Rionald Silaban, SH |
| Kuorum Quorum | 100% | 100% |
| Pihak Independen<br>Independent Parties | • Arry Supratno, SH<br>Notaris<br>• Jimmy Pangestu<br>KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan | • Arry Supratno, SH<br>Notary<br>• Jimmy Pangestu<br>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm |

### Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2024

Agenda, Resolutions, and Follow-Up or Realization of the Implementation of the GMS on the Approval of the Annual Report for the 2024 Fiscal Year

| Agenda | Keputusan<br>Decision | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang mencakup :<br>a. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (*audited*) Perseroan; dan<br>b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.<br>1. Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year, which includes:<br>a. Ratification of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year (audited); and<br>b. b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions carried out throughout the 2024 Fiscal Year. | 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk:<br>a. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (*audited*) Perseroan;<br>b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan<br>1. Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year, including:<br>a. Ratification of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year (audited); and<br>b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions carried out throughout the 2024 Fiscal Year, insofar as such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report, including the Company's Financial Statements. | Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung.<br>The Annual Report, which includes the Financial Statements and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions carried out throughout the 2024 Fiscal Year, was ratified by the Shareholders during the GMS. |

| Agenda | Keputusan<br>Decision | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| 2. Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Perseroan<br>2. Determination of the utilization of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year. | 2. Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 untuk dialokasikan sebagai :<br>1) Cadangan wajib sebesar 5% atau senilai Rp46.544.000.000;<br>2) Dividen sebesar 20% atau senilai Rp186.176.000.000;<br>3) Sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan.<br>4) Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai ketentuan PMK Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.<br>2. Allocation of the Company's net profit for the 2024 Fiscal Year as follows:<br>1) Statutory reserve amounting to 5% or Rp46,544,000,000;<br>2) Dividends amounting to 20% or Rp186,176,000,000;<br>3) The remaining balance is designated as retained earnings.<br>4) Dividend payments must be made immediately pursuant to the provisions of PMK Number 179/PMK.02/2022 concerning the Management of Non-Tax State Revenue from State Assets Separated by the State Treasurer. | Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2024<br>The Shareholders determined the allocation of the net profit for the 2024 Fiscal Year through the Annual GMS for the Approval of the Annual Report for the 2024 Fiscal Year. |
| 3. Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2024.<br>3. Determination of the salaries/honorarium and allowances/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on performance for the 2024 Fiscal Year. | 3. Penetapan keputusan penyesuaian gaji / honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2024 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.<br>3. Determination regarding the adjustment of salaries/honorarium and allowances/facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on performance for 2024, which will be determined separately through a circular resolution of the Shareholders. | Pemegang Saham telah menetapkan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 264/MK/KN/2025 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2024 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.<br>The Shareholders determined the adjustment of salaries/honorarium and allowances/facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on performance for 2024, through the Annual GMS for the Approval of the Annual Report for the 2024 Fiscal Year in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the State-Owned Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund No. 264/MK/KN/2025 concerning the Approval of the Payment of Tantiem for the 2024 Fiscal Year and the Determination of the Board of Directors' Salaries, the Board of Commissioners' Honorarium, as well as the Allowances and Facilities Granted to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year. |

## RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2026

Annual GMS on the Approval of the Company's Work Plans and Budgets for 2026

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Undangan RUPS<br>Date of GMS Invitation | 18 November 2025 | 18 November 2025 |
| Tanggal & Waktu RUPS<br>Date & Time of GMS | 11 Desember 2025 | 11 December 2025 |
| Lokasi<br>Venue | Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara<br><br>Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta | Meeting Room of the Directorate General of State Assets<br>Syafrudin Prawiranegara II Building, North 10th floor, East Lapangan Banteng St. No. 2-4, Central Jakarta, Special Region of Jakarta |
| Pimpinan RUPST<br>Chairman of the Annual GMS | Rionald Silaban, SH | Rionald Silaban, SH |
| Kuorum Quorum | 100% | 100% |
| Pihak Independen<br>Independent Parties | Arry Supratno, SH<br>Notaris | Arry Supratno, SH<br>Notary |

### Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2026

Agenda, Resolutions, and Follow-Up or Realization of the Implementation of the GMS on the Approval of the Company's Work Plans and Budgets for 2026

| Agenda | Keputusan<br>Decision | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 Perseroan, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2026.<br>Approval of the Company's Work Plans and Budgets for 2026, as well as the Social and Environmental Responsibility Work Plan and Budget for 2026 | Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 Perseroan termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2026<br>Approved and ratified the Company's Work Plans and Budgets for 2026, including the Work Plans and Budgets for 2026 related to the Social and Environmental Responsibility Program. | RKAP 2026 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung<br>The Company's Work Plans and Budgets (RKAP) for 2026 was ratified by the Shareholders during the GMS |
| Persetujuan atas Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2026; dan<br>Approval of the Performance Contract of the Company's Board of Directors for 2026; and | Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2026<br>Approved and ratified the Performance Contract of the Company's Board of Directors for 2026. | Kontrak Kinerja Direksi Perseroan 2026 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung<br>The Performance Contract of the Company's Board of Directors for 2026 was ratified by the Shareholders during the GMS |
| Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.<br>Approval of the Performance Contract of the Company's Board of Commissioners for 2026. | Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.<br>Approved and ratified the Performance Contract of the Company's Board of Commissioners for 2026. | Kontrak Kinerja Dewan Komisaris 2026 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung<br>The Performance Contract of the Company's Board of Commissioners for 2026 was ratified by the Shareholders during the GMS |

## Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2025

Implementation of the Extraordinary GMS in 2025

Sepanjang tahun 2025, Pemegang Saham telah menerbitkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) Keputusan, meliputi:

Throughout 2025, the Shareholders issued 3 (three) circular resolutions, as follows:

| Tanggal RUPS<br>Date of GMS | Perihal<br>Subject | |
|---|---|---|
| 8 Maret 2025<br>8 March 2025 | Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia | Reappointment of a Member of the Board of Directors of the State-Owned Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 15 Juli 2025<br>15 July 2025 | Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia | Dismissal of a member of the Board of Directors of the State-Owned Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 19 Desember 2025<br>19 December 2025 | Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia | Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |

## Keputusan RUPS Sebelumnya dan Tindak Lanjutnya

Previous GMS Resolutions and Their Follow-Ups

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS yang diselenggarakan tahun 2024 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS yang diselenggarakan di tahun 2024 dan tindak lanjutnya:

All recommendations from the GMS Resolutions, which were held in 2024, have been implemented. The following are the GMS Resolutions held in 2024 and their respective follow-ups:

| Agenda | Keputusan<br>Resolutions | Tindak Lanjut<br>Follow-Ups |
|---|---|---|
| RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023<br>Annual GMS on the Approval of the Annual Report for the 2023 Fiscal Year | Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk:<br>a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan<br>b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan<br>Approved the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including:<br>a. Ratifying the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year; and<br>b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions carried out throughout the 2023 Fiscal Year, insofar as such actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report, including the Company's Financial Statements. | Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung.<br>The Annual Report consists of the Financial Statements and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions carried out in the 2023 Fiscal Year, and has been ratified by the Shareholders at the GMS. |
| | Penggunaan laba bersih tahun buku 2023 untuk dialokasikan sebagai:<br>a. Cadangan wajib sebesar 5% dari laba bersih atau sebesar Rp41.792.000.000;<br>b. Dividen sebesar 20% dari laba bersih atau sebesar Rp167.165.000.000; dan<br>c. Sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan.<br>Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara. | Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.<br><br>Pembayaran dividen telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/ PMK.02/2022, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan RUPS penetapan besaran dividen, dimana Perseroan telah menyetorkan dividen tersebut pada tanggal 6 Juni 2024. |

| Agenda | Keputusan<br>Resolutions | Tindak Lanjut<br>Follow-Ups |
|---|---|---|
| | Determined the allocation of the net profit for the 2023 Fiscal Year as follows:<br>a. Mandatory reserve amounting to 5% of net profit or Rp41,792,000,000;<br>b. Dividends amounting to 20% of net profit or Rp167,165,000,000; and<br>c. The remaining balance is designated as retained earnings.<br>Dividend payments shall be made promptly in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 179/PMK.02/2022 concerning the Management of Non-Tax State Revenue Derived from Separated State Assets by the State General Treasurer. | Shareholders have determined the use of net profit for the 2023 fiscal year through the General Meeting of Shareholders' Annual Report for the 2023 Fiscal Year.<br><br>Dividend payments have been made in accordance with the provisions of Minister of Finance Regulation Number 179/PMK.02/2022, which is no later than 1 (one) month after the date of the GMS decision determining the dividend amount. The Company paid the dividends on June 6, 2024. |
| | Penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2024 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2023 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.<br>The determination of adjustments to salaries/honorarium and allowances/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on performance for 2023, will be determined separately through a circular resolution of the Shareholders. | Pemegang Saham telah menetapkan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2023 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2023 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-177/KM.6/2024 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.<br>The Shareholders also determined the adjustment of salaries/honorarium and allowances/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2023 fiscal year, as well as the payment of tantiem based on performance for 2023, through the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the State-Owned Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund No. KMK-177/KM.6/2024 concerning the Approval of the Payment of Tantiem for the 2023 Fiscal Year and the Determination of the Board of Directors' Salaries, the Board of Commissioners' Honorarium, as well as the Allowances and Facilities Granted to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year. |
| RUPS Tahunan Persetujuan RKAP Tahun 2025<br>Annual GMS on the Approval of the Company's RKAP for 2025 | Menyetujui dan mengesahkan:<br>1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2025;<br>2. Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2025; dan<br>3. Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025.<br>Approved and ratified:<br>1. The Company's Work Plans and Budgets for 2025;<br>2. The Performance Contract of the Company's Board of Directors for 2025; and<br>3. The Performance Contract of the Company's Board of Commissioners for 2025. | RKAP 2025, Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2025 dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung tanggal 16 Desember 2024<br>The Company's RKAP for 2025, the Performance Contract of the Board of Directors for 2025 and the Performance Contract of the Board of Commissioners for 2025 were ratified by the Shareholders during the GMS held on 16 December 2024. |

# Direksi
Board of Directors

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya.

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors refer to the Company's Articles of Association, Law on Limited Liability Company, and the Minister of Finance Regulation on the Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the guidance and supervision of the Minister of Finance, including any amendments thereto.

Seluruh Direksi Perseroan merupakan individu profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

All members of the Company's Board of Directors are professionals who have fulfilled the requirements to be appointed as members of the Board of Directors according to the aforementioned provisions.

## Masa Jabatan Direksi
Term of Office of the Board of Directors

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the term of office for members of the Board of Directors is set at 5 (five) years, and they may be reappointed for 1 (one) additional term, provided that the GMS may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons for such dismissal.

## Komposisi Direksi
Composition of the Board of Directors

Pada tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Direksi. Informasi Perubahan Direksi selama tahun 2025 dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Berikut Komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2025:

In 2025, there were changes in the composition of the Board of Directors. Information regarding changes to the Board of Directors in 2025 is described in the Company Profile Chapter, under the Profile of the Board of Directors subsection in this Annual Report. The following is the composition of the Board of Directors of IIGF as of 31 December 2025:

| Jabatan<br>Position | Periode 15 Juli – 31 Desember 2025<br>Period 15 July – 31 December 2025 |
|---|---|
| Plt. Direktur Utama* Acting President Director* | Andre Permana |
| Direktur Keuangan Finance Director | Donny Hamdani |
| Direktur Bisnis Business Director | Andre Permana |

*) Sdr. M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2025

Mr. M. Wahid Sutopo effectively resigned as President Director as of 15 July 2025

# Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Perseroan menganggap independensi Direksi sebagai hal penting yang harus dijaga agar setiap anggota Direksi dapat bertindak secara optimal demi kepentingan Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan telah menetapkan ketentuan bahwa selain Direksi, pihak lain dilarang melakukan intervensi atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan. Setiap anggota Direksi diharapkan mampu membuat keputusan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Selain itu, setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi mereka dalam mengurus Perseroan.

The Company considers the independence of the Board of Directors to be an essential principle that must be maintained to ensure that each member of the Board is able to act optimally in the best interests of the Company. Therefore, the Company has established a provision that, aside from the Board of Directors, no other party is permitted to intervene or be involved in the management of the Company. Each member of the Board of Directors is expected to make decisions objectively, free from conflicts of interest, and without being influenced by external pressures. Besides, each member of the Board of Directors is prohibited from engaging in activities that may compromise their independence in managing the Company.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2025 telah menyatakan independensinya dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap tahun.

All members of the Board of Directors serving in 2025 have declared their independence through an Integrity Pact signed at the beginning of their appointment and renewed annually.

**M. Wahid Sutopo**

**Direktur Utama***

President Director*



*) Sdr. M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2025

*) Mr. M. Wahid Sutopo as President Director resigned from his position as of 15 July, 2025.

**Andre Permana**
**Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama**
Business Director and Acting President Director

**Donny Hamdani**
**Direktur Keuangan**
Finance Director




## Kebijakan Tata Laksana Kerja Direksi
Board of Directors' Manual

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi merujuk pada Kebijakan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pokok-pokok yang diatur dalam *Board Manual* terkait Direksi antara lain adalah:
1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
3. Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
4. Benturan kepentingan
5. Kekosongan jabatan dan pelimpahan wewenang
6. Pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi
7. Organ Pendukung Direksi
8. Pelaporan
9. Penilaian Kinerja Direksi
10. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
11. Program Pengenalan Perusahaan
12. Program Pelatihan Direksi
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual).

The main points regulated in the Board Manual concerning the Board of Directors are, among others:
1. General Provisions
2. Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors
3. The Board of Directors' Meetings and Decision-Making
4. Conflict of interest
5. Vacancy and delegation of authority
6. Temporary suspension and resignation of the Board of Directors
7. The Board of Directors' Supporting Organs
8. Reporting
9. Assessment of the Board of Directors' Performance
10. Actions of the Board of Directors Requiring Approval of the Board of Commissioners or the GMS
11. Company Induction Program
12. Training Programs for the Board of Directors
13. International Business Trip

14. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
15. Penetapan Penghasilan Direksi
16. Etika Berusaha
17. Penilaian, Evaluasi, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan

*Board Manual* Perseroan secara lengkap dapat diakses pada *website* Perseroan melalui https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

14. Communication and Correspondence between the Board of Directors and Board of Commissioners
15. Determination of the Board of Directors' Remuneration
16. Business Ethics
17. Assessment, Evaluation, and Implementation of Good Corporate Governance in the Company

The complete version of the Company's Board Manual can be accessed on the Company's website at https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

## Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors

Terkait pengelolaan dan pengurusan Perseroan, maka sesuai Anggaran Dasar, Direksi mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi berwenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
   d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

In the Company's management and administration, in accordance with the Articles of Association, the Board of Directors has the following duties, responsibilities, and authorities:

1. The Board of Directors is responsible for performing all actions related to the Company's management for the Company's benefit, in accordance with the Company's purposes and objectives, as well as representing the Company both in and out of court in all matters and events, subject to the limitations stipulated in the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or further limitations or directives agreed upon by the Shareholders based on resolutions of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors has the authority to:
   a. Establish the Company's management policy;
   b. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court;
   c. Arrange the transfer of authority from the Board of Directors to one or several of the Company's employees, either individually or jointly, or to other persons, to represent the Company in and out of court;
   d. Regulate the provisions of the Company's employment, including the determination of salaries, pensions, and other remuneration for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions, and other income for employees who exceed the responsibilities stipulated by laws and regulations shall obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders;

e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

3. Direksi berkewajiban untuk:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;

e. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulations and prevailing laws and regulations;
f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
g. Take all actions necessary with regards to the Company's management and assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and out of court in all matters and events, subject to the limitations stipulated in the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or further limitations or directives agreed upon by the Shareholders based on resolutions of the General Meeting of Shareholders

3. The Board of Directors has the responsibility for:
a. Ensuring and guaranteeing the Company's business and activities in accordance with its goals, objectives, and business activities;
b. Preparing in due time the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Program and Budget, and any amendments thereto, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the General Meeting of Shareholders;
c. Providing an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Program and Budget;
d. Preparing the List of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the Board of Directors' Meeting;
e. Preparing the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents, as referred to in the Law on Company Documents;
f. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to a Public Accountant for audit;
g. Submitting the Annual Report, including the Financial Statements, to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as a report on the Company's rights that are not recorded in the books, among others, as a result of the write-off of receivables;
h. Presenting the Annual Report to the General Meeting of Shareholders;

i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum;

k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf butir d dan e dan dokumen Perseroan lainnya;

l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

q. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) organisasi Perseroan;

r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

i. Submitting the Balance Sheet and Income Statement that have been approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law in accordance with the provisions of laws and regulations;

j. Submitting reports on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners, to the Minister in charge of Law;

k. Maintaining the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meetings, Minutes of the Board of Directors Meetings, the Annual Report and financial documents of the Company, as referred to in points d and e, and other Company documents;

l. Storing at the Company's registered office: the Shareholders Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meetings, Minutes of the Board of Directors Meetings, the Annual Report and financial documents of the Company, as well as other Company documents;

m. Formulating an accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on internal control principles, particularly covering the functions of management, recording, safekeeping, and supervision.

n. Providing regular reports in a timely manner with regard to the applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;

o. Preparing the Company's organizational structure, complete with details and duties;

p. Providing explanations on any matters inquired about or requested by members of the Board of Commissioners and the Shareholders;

q. Preparing and determining the Company's Work Program and Budget (RKAP) for the Company's organization;

r. Performing other obligations in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association and those determined by the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing laws and regulations.

4. In carrying out its duties, the Board of Directors shall devote full energy, thought, attention, and be dedicated to the duties, obligations, and achievement of the Company's objectives.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
6. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

8. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang telah diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

5. The Board of Directors shall comply with the Company's Articles of Association and prevailing regulations, and must implement professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in carrying out its duties.

6. Each member of the Board of Directors shall carry out his duties in good faith and with full responsibility for the Company's interests and business, taking into account prevailing laws and regulations.
7. Each member of the Board of Directors shall be personally and fully liable if he or she is proven to be at fault or negligent in performing his or her duties for the benefit and business of the Company, unless the concerned member of the Board of Directors can prove that:
   a. The loss was not due to the concerned member's fault or negligence;
   b. The concerned member has managed the Company in good faith and with due care for the benefit of the Company and in accordance with its purposes and objectives;
   c. The concerned member had no conflict of interest, directly or indirectly, in relation to the management actions that resulted in the loss.
   d. The concerned member had taken necessary actions to prevent the occurrence or continuation of such loss.
8. The actions taken by members of the Board of Directors without the approval of the Board of Directors' Meeting shall be the personal responsibility of such Director until the said action is approved by the Board of Directors' Meeting.

## Pembagian Tugas Direksi
Division of Duties of the Board of Directors

Sejalan dengan *Board Manual*, salah satu kewajiban Direksi adalah jika dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, oleh karena itu melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PII-BOD/0522 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi Perseroan, Direksi PT PII menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

In line with the Board Manual, one of the responsibilities of the Board of Directors stipulates that if the GMS does not determine the division of duties and authority, such division shall be determined through the Board of Directors' Resolution, accordingly, through Board of Directors' Decision Letter No. 006/SK/PII-BOD/0522 on the Division of Duties and Authority of the Company's Board of Directors, the Board of Directors of IIGF has established the respective duties of each member of the Board of Directors as follows:

| Jabatan<br>Position | Tugas Direksi<br>Duties of the Board of Directors | |
|---|---|---|
| **Direktur Utama**<br>President Director | 1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama yang dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya<br>2. Pengurusan/pengelolaan Perseroan oleh anggota Direksi lainnya sesuai tugas pokok Perseroan dan/atau penugasan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan<br>3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan.<br>4. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi pengawasan intern, sekretariat perusahaan, manajemen risiko, hukum dan kepatuhan serta inisiasi bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Utama sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi<br>5. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi | 1. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company, provided that all actions of the President Director have been approved by the Board of Directors' Meeting or other applicable provisions.<br>2. The Company's administration/management by other members of the Board of Directors in accordance with the Company's main duties and/or other assignments is subject to the policies set by the General Meeting of Shareholders and/or the Company's Articles of Association.<br>3. Supervising the duties of the Business Director and Finance Director.<br>4. Leading and supervising duties related to the functions of internal control, corporate secretariat, risk management, law, and compliance, as well as business initiation and other functions in the line of command of the President Director, in accordance with the Board of Directors' Decision Letter on Organizational Structure.<br>5. Providing input, considerations, or suggestions in determining strategy, the Company's policy, and/or the Board of Directors' decision-making. |
| **Direktur Keuangan**<br>Finance Director | 1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya<br>2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi keuangan dan perbendaharaan, investasi, sumber daya manusia, pengembangan organisasi, layanan perusahaan, pengadaan, teknologi informasi, penjaminan non-KPBU dan pemantauan proyek dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi<br>3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi | 1. Representing the Company for activities related to functions in the line of command of the Finance Director, in accordance with the Board of Directors' Decision Letter on Organizational Structure, or based on the Board of Directors' Meeting or other prevailing provisions.<br>2. Leading and supervising the tasks related to the functions of finance and treasury, investment, human resources, organizational development, corporate services, procurement, information technology, non-PPP guarantee, and project monitoring, and other functions in the line of command of the Finance Director in accordance with the Board of Directors' Decision Letter on Organizational Structure.<br>3. Providing input, considerations, or suggestions in determining strategy, the Company's policy, and/or the Board of Directors' decision-making. |
| **Direktur Bisnis**<br>Business Director | 1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya.<br>2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi bimbingan dan konsultasi bisnis, penilaian proyek (baik teknis, finansial, maupun lingkungan dan sosial), penjaminan KPBU dan edukasi pemangku kepentingan serta pengembangan ekosistem bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi.<br>3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi. | 1. Representing the Company for activities related to functions in the line of command of the Business Director, in accordance with the Board of Directors' Decision Letter on Organizational Structure, or based on the Board of Directors' Meeting or other prevailing provisions.<br>2. Lead and supervise the tasks related to the functions of business guidance and consultation, project appraisal (technical, financial, and environmental and social), PPP guarantee and stakeholder education, as well as business ecosystem development and other functions in the line of command of the Business Director in accordance with the Board of Directors' Decision Letter on Organizational Structure.<br>3. Providing input, considerations, or suggestions in determining strategy, the Company's policy, and/or the Board of Directors' decision-making. |

Sehubungan dengan pemberhentian sdr. M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perseroan, maka diterbitkan Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi (BOD *Resolution*) No. RES-007/BOD/0725 tentang Persetujuan Korporasi (*Corporate Approval*) terkait Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi Sementara dimana Direksi menyetujui pembagian tugas dan kewenangan Direktur Utama Perseroan diantara anggota Direksi yang tersisa sebagai berikut:

1. Direktur Bisnis merangkap sebagai Plt. Direktur Utama bertugas dan berwenang untuk memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi pengawasan, sekretariat perusahaan intern, manajemen risiko serta hukum dan kepatuhan.
2. Direktur Keuangan bertugas dan berwenang untuk memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi inisiasi bisnis.

In connection with the dismissal of Mr. M. Wahid Sutopo as President Director, and in order to ensure the continuity of the Company's duties and functions, a Board of Directors' Circular Resolution (BOD Resolution) No. RES-007/BOD/0725 was issued regarding Corporate Approval on the Division of Duties and Authorities of the Temporary Board of Directors, where the Board of Directors approves the division of duties and authorities of the President Director among the remaining members of the Board of Directors, as follows:

1. The Business Director, concurrently serving as Acting President Director, is responsible and authorized to lead and oversee the implementation of duties related to internal oversight function, corporate secretariat, risk management, as well as legal and compliance functions.
2. The Finance Director is responsible and authorized to lead and oversee the implementation of duties related to the business initiation function.

## Benturan Kepentingan dan Rangkap Jabatan

Conflict of Interest and Concurrent Positions

Selaras dengan *Board Manual*, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

In line with the Board Manual, members of the Board of Directors are prohibited from engaging in actions that involve conflicts of interest or from obtaining personal benefits, directly or indirectly, from decision-making processes and activities of the Company other than their legitimate remuneration.

Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions, such as:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, or Private Companies;
2. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in State-Owned Enterprises;
3. Other structural or functional positions within central and/or regional government institutions/agencies;
4. Other positions as regulated by prevailing laws and regulations;
5. Officials of political parties and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head and/or Regional Head/Deputy Regional Head; and/or
6. Other positions that may cause a conflict of interest.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Perseroan, anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas pada awal masa pengangkatan dan diperbaharui setiap tahun, yang memuat pernyataan bahwa Direksi tidak memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

To prevent conflicts of interest within the Company, members of the Board of Directors sign an Integrity Pact at the beginning of their term of office and renew it each year, which includes a statement affirming that they have no conflict of interest in carrying out their duties.

Selama tahun 2025, seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan serta tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang. Direksi Perseroan memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

Throughout 2025, none of the members of the Board of Directors had any conflicts of interest or potential conflicts of interest with respect to the Company, nor did they hold any prohibited concurrent positions. The Company's Board of Directors remains committed to prevent any potential conflicts of interest and to ensure that they do not place themselves in situations that may give rise to such conflicts under any circumstances.

## Kebijakan dan Frekuensi Rapat Direksi

Policy and Frequency of Board of Directors' Meetings

Kebijakan yang mengatur mengenai rapat Direksi dan frekuensi rapat Direksi diatur dalam *Board Manual* Perseroan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, rapat Direksi dilaksanakan sebagai sarana pengambilan keputusan dan/atau pembahasan dan diskusi mengenai hal-hal terkait kepengurusan Perseroan. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
3. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

The policy governing the Board of Directors' meetings and its frequency is set forth in the Company's Board Manual. In accordance with this policy, Board of Directors' Meeting serve as a forum for decision-making and/or for discussing matters related to the management of the Company. The Board of Directors' meetings are held periodically, at least 1 (once) a month. The Board of Directors' meetings may also be convened at any time if:

1. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
2. Requested in writing by one or more members of the Board of Commissioners; or
3. Requested in writing by one or more shareholders that jointly represent at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights.

Dalam Rapat Direksi, Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

During Board of Directors' meetings, the Board of Directors may invite the Board of Commissioners. Meetings may also be conducted through teleconference, video conference, or other electronic communication media that enable all participants to directly see and/or hear each other and actively participate in the meeting.

## Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2025

Frequency of Board of Directors' Meetings in 2025

Selama tahun 2025, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 73 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Direksi sebanyak 55 kali rapat dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 18 kali rapat.

Throughout 2025, the Board of Directors held a total of 73 meetings, consisting of 55 internal Board of Directors' meetings and 18 joint meetings with the Board of Commissioners.

## Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Gabungan Direksi Tahun 2025

Attendance Rate of the Board of Directors in Internal and Joint Meetings in 2025

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Jabatan Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi<br>Attendance of the Board of Directors at the Board of Directors' Internal Meetings | | | Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris)<br>Attendance of the Board of Directors at Joint Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Jumlah Kehadiran<br>Number of Attendances | Tingkat Kehadiran<br>Attendance Rate | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Jumlah Kehadiran<br>Number of Attendances | Tingkat Kehadiran<br>Attendance Rate |
| M. Wahid Sutopo* | Direktur Utama<br>President Director | 26 | 26 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| Andre Permana | Direktur Bisnis<br>Business Director | 55 | 55 | 100% | 18 | 18 | 100% |
| Donny Hamdani | Direktur Keuangan<br>Finance Director | 55 | 55 | 100% | 18 | 18 | 100% |
| **Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi**<br>Average Attendance Rate of the Board of Directors | | | | **100%** | | | **100%** |

**Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebijakan rapat yang diatur dalam *Board Manual***

The frequency of meetings and the attendance rate of the Board of Directors in both internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners were in accordance with the meeting policies stipulated in the Board Manual.

*) berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2025.

*) resigned as of 15 July 2025.

## Tingkat Kehadiran Direksi dalam RUPS Tahun 2025

Attendance Rate of the Board of Directors at the GMS in 2025

| No. | Tanggal<br>Date | Agenda | Realisasi<br>Realization | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | M. Wahid Sutopo* | Andre Permana | Donny Hamdani |
| 1. | 6 Mei 2025<br>6 May 2025 | RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024<br>Annual GMS on the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. | 11 Desember 2025<br>11 December 2025 | RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2026<br>Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 | - | ✔ | ✔ |

*) berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2025.

*) resigned as of 15 July 2025.

## Agenda Rapat Internal Direksi Tahun 2025

Agenda of the Board of Directors Meetings in 2025

| No. | Tanggal Pelaksanaan Rapat<br>Date of Meeting | Agenda | |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 Januari 2025<br>3 January 2025 | Pembahasan Penetapan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek | Discussion on the Determination of the Payment Date for Project Guarantee Claims |
| 2. | 14 Januari 2025<br>14 January 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Desember 2024 | Discussion on the Management Report for December 2024 |
| 3. | 17 Februari 2025 & 21 Februari 2025<br>17 February 2025 & 21 February 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Januari 2025 | Discussion on the Management Report for January 2025 |
| 4. | 6 Maret 2025<br>6 March 2025 | Pemberitahuan Penetapan Besaran Penjaminan dan *Update* Proyek | Notification of the Determination of Guarantee Amount and Project Update |
| 5. | 12 Maret 2025<br>12 March 2025 | Pembahasan Permohonan Jaminan Pemerintah | Discussion on the Request for a Sovereign Guarantee |
| 6. | 17 Maret 2025<br>17 March 2025 | Pembahasan *Update* Rencana Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek | Discussion on the Update on the Plan for Signing of the Project Guarantee and Regress Agreements. |
| 7. | 19 Maret 2025<br>19 March 2025 | Pembahasan Penyampaian *Update* atas Rancangan Risalah Kesepakatan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Proyek dan Beberapa Skenario Pembayaran Klaim Penjaminan | Discussion on the Update on the Draft Minutes of Agreement regarding the Evaluation of Obstacles Affecting Project Development Progress and Several Scenarios for Payment of Guarantee Claims |
| 8. | 21 Maret 2025<br>21 March 2025 | Pembahasan Lanjutan Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek | Follow-up Discussion on the Request for Approval to Sign the Project Guarantee and Regress Agreements |
| 9. | 21 Maret 2025<br>21 March 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Februari 2025 | Discussion on the Management Report for February 2025 |
| 10. | 24 Maret 2025<br>24 March 2025 | Penyampaian *Update* Risalah Kesepakatan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Proyek, Penyampaian Usulan Amandemen Perjanjian Penjaminan Proyek | Presentation of Update on the Minutes of Agreement regarding the Evaluation of Obstacles Affecting Project Development Progress, Proposal for Amendment to the Project Guarantee Agreement |
| 11. | 16 April 2025<br>16 April 2025 | Penyampaian Hasil Evaluasi Klaim | Presentation of Claim Evaluation Results |
| 12. | 16 April 2025<br>16 April 2025 | Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek | Approval for Signing the Project Assignment Contract. |
| 13. | 17 April 2025<br>17 April 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Maret 2025 | Discussion on the Management Report for March 2025 |
| 14. | 28 April 2025<br>28 April 2025 | Pembahasan Permohonan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung | Discussion on the Request for a Sovereign Guarantee for Direct Loan |
| 15. | 7 Mei 2025<br>7 May 2025 | Pembahasan Pembaruan Permohonan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung | Discussion on the Update of the Request for a Sovereign Guarantee for Direct Loan |
| 16. | 7 Mei 2025<br>7 May 2025 | Pembahasan KPBU | Discussion on PPP |
| 17. | 8 Mei 2025<br>8 May 2025 | Pembahasan Lanjutan Persetujuan Hasil PAR dan Hasil *Structuring* Awal Penjaminan Proyek | Follow-up Discussion on the Approval of PAR and Initial Structuring Results for the Project Guarantee. |
| 18. | 21 Mei 2025<br>21 May 2025 | Pembahasan Rapat Penetapan Dukungan Pemerintah Proyek KPBU | Discussion on the Determination of Government Support for PPP Project |
| 19. | 22 Mei 2025<br>22 May 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode April 2025 | Discussion on the Management Report for April 2025 |
| 20. | 22 Mei 2025<br>22 May 2025 | Lanjutan Pembahasan Rapat Penetapan Dukungan Pemerintah Proyek KPBU | Follow-up Discussion on the Determination of Government Support for PPP Project. |

| No. | Tanggal Pelaksanaan Rapat<br>Date of Meeting | Agenda | |
|---|---|---|---|
| 21. | 26 Mei 2025<br>26 May 2025 | *Update* Hasil RPDP KPBU | Update on the RPDP Results for PPP Project |
| 22. | 28 Mei 2025<br>28 May 2025 | Persiapan Rapat Penetapan Dukungan Pemerintah - 3 Proyek KPBU | Preparation for the Meeting to Determine Government Support - 3 PPP Projects |
| 23. | 16 Juni 2025<br>16 June 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Mei 2025 | Discussion on the Management Report for May 2025 |
| 24. | 19 Juni 2025<br>19 June 2025 | Pembahasan Hasil Evaluasi Pengajuan Klaim Penjaminan Proyek | Discussion on Evaluation Results of Project Guarantee Claim Submission |
| 25. | 20 Juni 2025<br>20 June 2025 | Penyampaian Rencana Penjaminan | Presentation of Guarantee Plan |
| 26. | 01 Juli 2025<br>1 July 2025 | Penyampaian Tindak Lanjut Evaluasi Klaim dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Besaran Penjaminan Proyek | Presentation of Follow-Up to Evaluation of Claim VII and Issuance of Notification Letter on Project Guarantee Amount Determination |
| 27. | 17 Juli 2025<br>17 July 2025 | Usulan Strategi Pengelolaan Dana | Proposal for Fund Management Strategy |
| 28. | 22 Juli 2025<br>22 July 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Juni 2025 | Discussion of Management Report for June 2025 |
| 29. | 13 Agustus 2025<br>13 August 2025 | Rencana Penjaminan dan Hasil Evaluasi atas Permohonan Jaminan Pinjaman | Guarantee Plan and Evaluation Results of Loan Guarantee Application |
| 30. | 21 Agustus 2025<br>21 August 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Juli 2025 | Management Report for July 2025 |
| 31. | 25 Agustus 2025<br>25 August 2025 | Pembahasan Usulan Masukan Evaluasi PT PII atas Permohonan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman | Discussion on IIGF's Evaluation Input on Government Guarantee Application for Project |
| 32. | 26 Agustus 2025<br>26 August 2025 | Strategi Pengelolaan Dana | Fund Management Strategy |
| 33. | 26 Agustus 2025<br>26 August 2025 | IPA Proyek KPBU | IPA for PPP Project |
| 34. | 16 September 2025<br>16 September 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Agustus 2025 | Discussion of Management Report for August 2025 |
| 35. | 17 September 2025<br>17 September 2025 | Penyampaian Hasil Pertemuan dengan Walikota dan Hasil Evaluasi Klaim | Presentation of Results from the Meeting with the Mayor of Claim Evaluation Result |
| 36. | 24 September 2025<br>24 September 2025 | Pra *Signing* Proyek KPBU | Pre-Signing of PPP Project |
| 37. | 26 September 2025<br>26 September 2025 | Pra Lanjutan Signing Proyek KPBU | Pre-Continuation Signing of PPP Project |
| 38. | 29 September 2025<br>29 September 2025 | Pembahasan RKAP 2026 | Discussion on the 2026 RKAP |
| 39. | 01 Oktober 2025<br>1 October 2025 | Tindak Lanjut Evaluasi Klaim | Follow-Up to Evaluation of Claim |
| 40. | 20 Oktober 2025<br>20 October 2025 | Permohonan Persetujuan Hasil PAR dan Hasil *Structuring* Awal Penjaminan Proyek KPBU | Request for Approval of PAR Results and Initial Structuring of the Guarantee for PPP Project |
| 41. | 22 Oktober 2025<br>22 October 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode September 2025 | Discussion of Management Report for September 2025 |
| 42. | 23 Oktober 2025<br>23 October 2025 | Evaluasi Rencana Perpanjangan Jangka Waktu Penjaminan Proyek | Evaluation of the Plan to Extend the Project Guarantee Period |
| 43. | 30 Oktober 2025<br>30 October 2025 | Pembahasan RKAP 2026 dan Tanggapan Dewan Komisaris | Discussion on the 2026 RKAP and Responses from the Board of Commissioners |
| 44. | 5 November 2025<br>5 November 2025 | Permohonan Penerbitan IPA Proyek KPBU | Request for Issuance of IPA for PPP Project |
| 45. | 7 November 2025<br>7 November 2025 | Penunjukan Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik | Appointment of the Person Responsible for Implementing and Monitoring Good Corporate Governance |

| No. | Tanggal Pelaksanaan Rapat<br>Date of Meeting | Agenda | |
|---|---|---|---|
| 46. | 18 November 2025<br>18 November 2025 | Usulan Strategi Pengelolaan Dana | Proposal of Fund Management Strategy |
| 47. | 20 November 2025<br>20 November 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Oktober 2025 | Discussion of Management Report for October 2025 |
| 48. | 27 November 2025<br>27 November 2025 | Proses Penilaian Kelayakan Permohonan Penjaminan | Feasibility Assessment Process for Guarantee Application |
| 49. | 12 Desember 2025<br>12 December 2025 | Permohonan Persetujuan Hasil PAR dan Hasil *Structuring* Awal Penjaminan Proyek KPBU | Request for Approval of PAR Results and Initial Structuring of the Guarantee for PPP Project |
| 50. | 12 Desember 2025<br>12 December 2025 | Penandatanganan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung | Signing of the Sovereign Guarantee for Direct Loan |
| 51. | 17 Desember 2025<br>17 December 2025 | Penandatanganan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung | Signing of the Sovereign Guarantee for Direct Loan |
| 52. | 18 Desember 2025<br>18 Desember 2025 | Penyampaian Hasil Evaluasi Klaim | Presentation of Claim Evaluation Results |
| 53. | 22 Desember 2025<br>22 Desember 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode November 2025 | Discussion of Management Report for November 2025 |
| 54. | 24 Desember 2025<br>24 Desember 2025 | Penandatanganan Penjaminan | Signing of the Guarantee |
| 55. | 24 Desember 2025<br>24 Desember 2025 | Penandatanganan Penjaminan | Signing of the Guarantee |

## Agenda Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris

Agenda of Joint Meetings Between the Board of Directors and Board of Commissioners

Informasi agenda rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dijelaskan pada sub bab Dewan Komisaris (agenda Rapat) dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

Information regarding the agenda of the joint meetings between the Board of Directors and Board of Commissioners is described in the Board of Commissioners subsection (Meeting Agenda) in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

## Penyampaian Undangan Rapat Direksi

Delivery of the Board of Directors' Meeting Invitation

Sepanjang tahun 2025, penyampaian undangan Rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Kebijakan Tata Tertib Rapat Direksi yaitu Panggilan Rapat Direksi disampaikan oleh Direktur Utama melalui e-mail dari Sekretaris Perusahaan atau bentuk lainnya setelah mendapatkan persetujuan Direktur Utama, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Rapat Direksi atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak apabila seluruh Direksi menyetujui, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.

Throughout 2025, invitations to Board of Directors' meetings were delivered in accordance with the policy set forth in the Board of Directors' Meeting Procedures. Invitations to Board of Directors' meetings are issued by the President Director via email through the Corporate Secretary or other forms of communication after obtaining approval from the President Director, no later than 3 (three) days prior to the meeting or in urgent circumstances, invitations may be delivered within a shorter period if all members of the Board of Directors agree, excluding the invitation date and the Board of Directors meeting date.

## Rencana Rapat Direksi tahun 2026
Board of Directors Meeting Plan for 2026

Sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 Direksi akan melakukan rapat Direksi yang terdiri dari (i) Laporan Manajemen paling tidak sebulan sekali; (ii) Rapat Pembahasan Proyek maupun hal lainnya, *tentative* setiap bulannya; dan (iii) Rapat Penyusunan RKAP atau RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In line with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026, the Board of Directors will conduct meetings consisting of: (i) Management Report meetings at least once a month; (ii) meetings to discuss projects and other matters, tentatively scheduled each month; and (iii) meetings for the preparation of the RKAP or the Annual GMS in accordance with the applicable regulations.

## Pelatihan Direksi
Board of Directors' Training

Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepemimpinan serta menghadapi dinamika pasar dan industri yang terus berkembang.

The Company provides broad opportunities for members of the Board of Directors to participate in competency development programs to enhance their insights and knowledge, which support the effective execution of their duties, functions, and responsibilities in exercising leadership and responding to the evolving dynamics of the market and industry.

## Kebijakan Pelatihan Direksi
Board of Directors' Training Policy

Kebijakan pelatihan Direksi diatur dalam *Board Manual*. Anggaran untuk kegiatan pelatihan Direksi dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan, serta realisasi kegiatan pelatihan Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan ini.

The Board of Directors' training policy is governed by the Board Manual. The budget for the Board of Directors' training is stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and the realization of the Board of Directors' training is reported to Shareholders through this Annual Report.

## Pelaksanaan Program Pelatihan Direksi
Implementation of Board of Directors' Training Programs

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Directors participated in the following training programs:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Program Pelatihan<br>Training Program | Tanggal<br>Date | Penyelenggara<br>Organizer | Tempat<br>Location |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wahid Sutopo* | Direktur Utama<br>President Director | - | - | - | - |
| Donny Hamdani | Direktur Keuangan<br>Finance Director | *The* 9th Seoul Asia *Urban Lighting Conference* | 29 Oktober – 2 November 2025<br>29 October – 2 November 2025 | Seoul Metropolitan Government | Seoul, Korea Selatan<br>Seoul, South Korea |

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Program Pelatihan<br>Training Program | Tanggal<br>Date | Penyelenggara<br>Organizer | Tempat<br>Location |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Enterprise Risk Governance: Board Accountability and Strategic Oversight* | 3 Desember 2025<br>3 December 2025 | Enterprise Risk Management Academy | *Online* |
| | | *Global Supply Chain* & *Geopolitical Risk: Navigating the New Reality* | | | |
| | | *Bridging* ESG *and* ERM: *The Risk-Centric Approach to Sustainability* | | | |
| Andre Permana | Direktur Bisnis<br>Business Director | *Business Forum – World Expo* | 18 – 20 Mei 2025<br>18 – 20 May 2025 | Japan Association for the 2025 World Expo | Osaka, Jepang |
| | | *Certified Risk Specialist* (CRS) – *Environment, Social and Governance* (ESG) | 16 – 18 Desember 2025<br>16 – 18 December 2025 | CRMS Indonesia | *Online* |

*) berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2025.

*) resigned as of 15 July 2025.

## Program Pengenalan Perseroan bagi Direksi

Company's Orientation Program for the Board of Directors

Kebijakan program pengenalan Perseroan untuk Direksi diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Perseroan diberikan kepada Direksi yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Perseroan berada pada Sekretaris Perusahaan. Materi Program Pengenalan Perseroan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; dan/atau
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2025, program pengenalan Perseroan dilaksanakan untuk Sdr. Andre Permana pada tanggal 11 Juni 2025 yang diangkat kembali untuk jabatan Direktur Bisnis.

The Company's orientation program policy for the Board of Directors is set forth in the Board Manual. The orientation program is provided to members of the Board of Directors who are appointed for the first time. The program may take the form of presentations, meetings, visits to the Company, and reviews of documents or other programs deemed appropriate by the Company. The Corporate Secretary is responsible for organizing the Company's orientation program. The Company's Orientation Program materials include:

1. The implementation of good corporate governance principles by the Company;
2. An overview of the Company related to its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as prohibited matters; and/or
5. Laws and regulations related to the Company's business activities.

In 2025, the Company's orientation program was conducted for Mr. Andre Permana on 11 June 2025, following his reappointment as Business Director.

## Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of Committee Reporting to the Board of Directors and the Basis for Assessment

Sejak tahun 2018, Direksi telah membentuk Komite dibawah Direksi yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI). Tujuan pembentukan Komite Pengarah TI dalam rangka memastikan bahwa rencana strategis teknologi informasi sejalan dengan rencana bisnis Perseroan dan kegiatan terkait TI.

Since 2018, the Board of Directors has established a committee reporting to the Board of Directors, namely the Information Technology (IT) Steering Committee. The establishment of the IT Steering Committee aims to ensure that the information technology strategic plan is aligned with the Company's business plan and IT-related activities.

## Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Pengarah TI

Policy and Procedures for the Assessment of the IT Steering Committee's Performance

Kebijakan dan prosedur penilaian kinerja Komite Pengarah TI mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite TI sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan Teknologi Informasi Perseroan (IT *Policy*) dan Surat Keputusan Direksi No. SK-038B/DIR/HC/1222 tentang Penunjukan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

The policy and procedures for evaluating the performance of the IT Steering Committee refer to IT Committee's duties and responsibilities as stipulated in the Company's Information Technology Policy (IT Policy) and the Board of Directors' Decision Letter No. SK-038B/DIR/HC/1222 on the Appointment of Members of the Information Technology Steering Committee of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

## Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Komite

Criteria for and Results of the Committee's Performance Assessment

Penilaian kinerja Komite Pengarah TI dilakukan oleh Direksi berdasarkan pada kriteria yang tercantum dalam Kebijakan Teknologi Informasi Perseroan (IT *Policy*) dan Surat Keputusan Direksi No. SK-038B/DIR/HC/1222 tentang Penunjukan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yaitu diantaranya adalah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan rapat Komite Pengarah TI.

The performance assessment of IT Steering Committee is conducted by the Board of Directors based on the criteria outlined in the Company's Information Technology Policy (IT Policy) and the Board of Directors' Decision Letter No. SK-038B/DIR/HC/1222 on the Appointment of Members of the Information Technology Steering Committee of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, which among others is the implementation of duties and responsibilities, as well as IT Steering Committee meeting.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite telah menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

The evaluation results show that the Committee has carried out its duties effectively and in accordance with applicable guidelines.

# Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The appointment and dismissal of the IIGF's Board of Commissioners refer to the Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019 concerning the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilaksanakan berdasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri penjaminan, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

The appointment of members of the Company's Board of Commissioners has been carried out based on the competencies required to ensure the effectiveness of the Board of Commissioners. These competencies include accounting, finance, strategic skills, business acumen, managerial experience and expertise, knowledge of the guarantee industry, regulatory understanding, and risk management and control.

## Masa Jabatan Dewan Komisaris
Term of Office of the Board of Commissioners

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.06/2019 dan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Referring to the Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019 and the Company's Articles of Association, the term of office of members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years, and they may be reappointed for 1 (one) additional term. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on GMS resolutions by stating the reasons for such dismissal.

## Komposisi Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Pada tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Informasi Perubahan Dewan Komisaris selama tahun 2025 dijelaskan pada bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Berikut Komposisi Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2025:

In 2025, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. Information regarding these changes in the composition of the Board of Commissioners in 2025 is described in the Company Profile chapter, under the Profile of the Board of Commissioners subsection in this Annual Report. The following is the composition of the IIGF's Board of Commissioners as of 31 December 2025:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position |
|---|---|
| Hadiyanto | Komisaris Utama President Commissioner |
| Ferry Irawan | Komisaris Commissioner |
| Bhimantara Widyajala | Komisaris Commissioner |

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The aforementioned number and composition of the Board of Commissioners have been aligned with the Company's needs and are expected to enable the Board to perform its supervisory function effectively, objectively, and independently in carrying out its duties and responsibilities.

## Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris

Independent Commissioner and Independence of the Board of Commissioners

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or controlling shareholders, and is free from business relationships or other relationships that may affect their ability to act independently or solely in the interest of the Company.

Hingga tanggal 31 Desember 2025, PT PII belum memiliki Komisaris Independen, mengingat Pemegang Saham Perseroan belum mensyaratkan adanya Komisaris Independen. Meskipun demikian, Perseroan tetap mengedepankan prinsip independensi dan profesionalitas sebagai aspek utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota Dewan Komisaris melalui penandatanganan pakta integritas pada awal pengangkatan dan diperbarui setiap tahun.

As of 31 December 2025, IIGF did not yet have an Independent Commissioner, as the Company's Shareholders had not required the appointment of an Independent Commissioner. Nevertheless, the Company continues to uphold the principles of independence and professionalism as essential aspects that must be possessed by each member of the Board of Commissioners through the signing of an Integrity Pact at the beginning of their appointment and renewed each year.

Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif, transparan, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kondisi maupun situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

The implementation of these principles aims to minimize potential conflicts of interest in the decision-making process and to ensure that every decision is made objectively, transparently, and free from undue influence from any party. Throughout 2025, there were no conditions or situations that had the potential to create conflicts of interest for members of the Board of Commissioners in carrying out their duties or making decisions.

### Tabel Status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2025

Table of Independence Status of the Board of Commissioners in 2025

| Kriteria<br>Criteria | Status Independensi<br>Independence Status | | |
|---|---|---|---|
| | Hadiyanto | Ferry Irawan | Bhimantara Widyajala |
| Bukan Anggota Direksi Perseroan<br>Shall not be a Member of the Company's Board of Directors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan<br>Shall be free from business and other relationships that may influence decision-making | ✔ | ✔ | ✔ |

| Kriteria<br>Criteria | Status Independensi<br>Independence Status | | |
|---|---|---|---|
| | Hadiyanto | Ferry Irawan | Bhimantara Widyajala |
| Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perseroan, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris.<br>Shall not be a professional principal advisor or consultant for the Company, or an employee who deals directly with service providers, for at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perseroan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.<br>Shall not be a supplier or main customer of the Company or affiliates, or an employee of/or who has direct or indirect contact with the main supplier or customer. | ✔ | ✔ | ✔ |

√ = Ya
X = Tidak

√ = Yes
X = No

## Pernyataan Tentang Independensi Komisaris

Statement on the Independence of the Board of Commissioners

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan menandatangani surat pernyataan independensi yang diperbarui secara berkala. Pernyataan independensi Dewan Komisaris dinyatakan dalam Pakta Integritas Dewan Komisaris yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap tahun.

In 2025, the Company's Board of Commissioners signed a statement of independence, which is updated periodically. The independence of the Board of Commissioners is affirmed through the Integrity Pact, which is signed at the beginning of their appointment and renewed each year.

Berikut Pakta Integritas Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025.

The following is the Integrity Pact of the Company's Board of Commissioners for 2025.

**Hadiyanto**

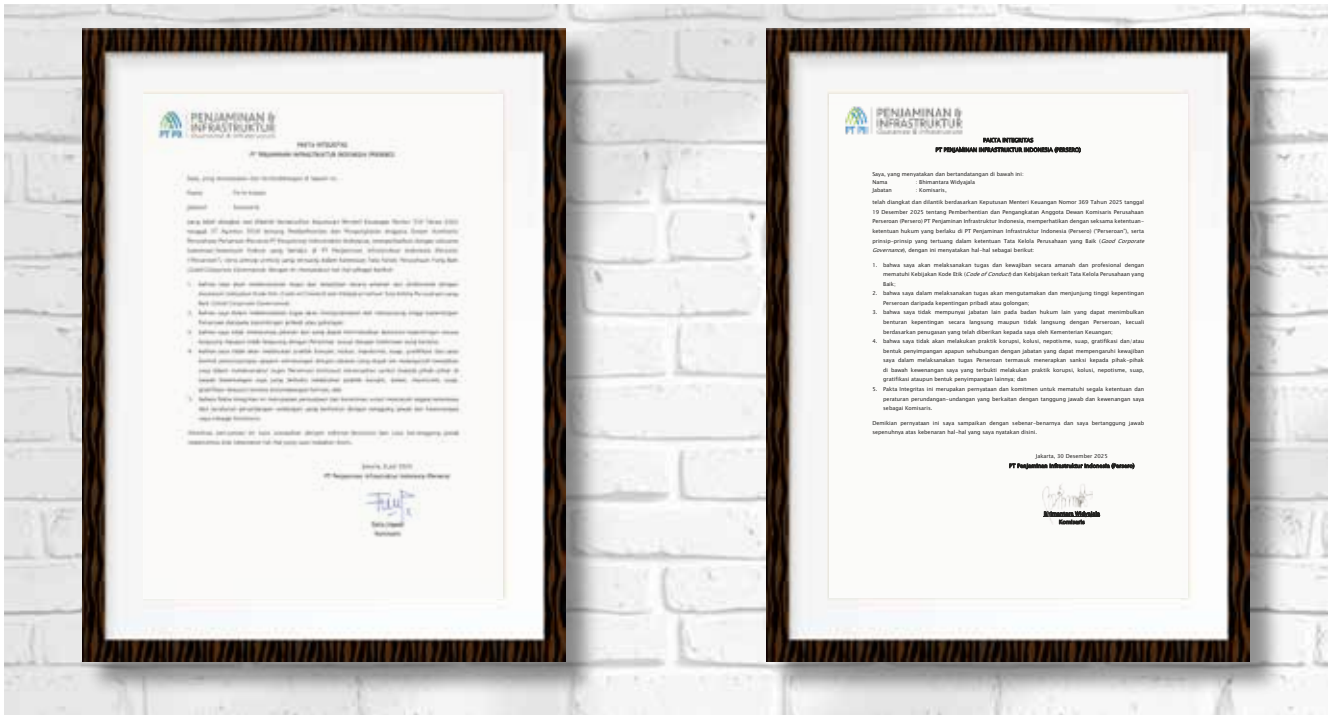
**Komisaris Utama**

President Commissioner



**Ferry Irawan**
**Komisaris**
Commissioner

**Bhimantara Widyajala**
**Komisaris**
Commissioner



## Kebijakan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Manual

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir diperbaharui pada tahun 2022. *Board Manual* dan Pedoman Dewan Komisaris disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik *Good Corporate Governance*.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is further regulated by the Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual), and the Board of Commissioners' Guidelines, which were last updated in 2022. The Board of Commissioners' Manual and Guidelines are prepared with reference to corporate law principles, the provisions of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, directives from the Shareholders, and Good Corporate Governance best practices.

Pokok-pokok yang dimuat dalam *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah terkait:
1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Benturan Kepentingan
4. Kekosongan Jabatan Dewan Komisaris
5. Pengunduran Diri Dewan Komisaris
6. Ketentuan Pengawasan Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Ketentuan Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
9. Ketentuan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

The following key points regarding the Board of Commissioners are contained in the Board Manual:
1. General Provisions
2. Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Commissioners
3. Conflict of Interest
4. Vacancy of the Board of Commissioners' Position
5. Resignation of the Board of Commissioners
6. Provisions related to the Board of Commissioners' Supervision
7. Board of Commissioners' Meetings
8. Provisions on Board of Commissioners' Decision-Making
9. Provisions on the Assessment of the Board of Commissioners' Performance

10. Organ Pendukung Dewan Komisaris
11. Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris atas RKAP
12. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
13. Rapat Umum Pemegang Saham
14. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
15. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal
16. Penambahan Penyertaan Modal Negara
17. Program Pengenalan Perseroan
18. Program Pelatihan Dewan Komisaris
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri
20. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
21. Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris
22. Etika Berusaha
23. Penilaian, Evaluasi, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan

Ketentuan lanjutan dari *Board Manual* yang dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris adalah pedoman pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Pedoman pelaksanaan tugas umum Dewan Komisaris
2. Pedoman pembagian tugas Dewan Komisaris
3. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RJP yang disampaikan kepada Direksi
4. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RKAP atau perubahan RKAP yang disampaikan kepada Direksi
5. Pedoman pelaksanaan tugas pemberian arahan Dewan Komisaris
6. Pedoman pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris
7. Tugas terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris
8. Tugas terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik

*Board Manual* Perseroan secara lengkap dapat diakses pada *website* Perseroan melalui https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

10. The Board of Commissioners' Supporting Organs
11. Supervisory Report of the Board of Commissioners on RKAP
12. Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
13. General Meeting of Shareholders
14. Board of Directors' Actions Requiring Approval from the Board of Commissioners or GMS
15. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) as External Auditor
16. Addition in State Capital Participation
17. Company Orientation Program
18. Board of Commissioners' Training Program
19. Overseas Business Trip
20. Communication and Correspondence Procedures between the Board of Directors and the Board of Commissioners
21. Determination of Board of Commissioners' Remuneration
22. Business Ethics
23. Assessment, Evaluation, and Implementation of Good Corporate Governance in the Company

Further Board Manual provisions stipulated in the Board of Commissioners' Manual on the implementation of duties, namely:

1. Guidelines for the implementation of the Board of Commissioners' general duties
2. Guidelines for the division of duties of the Board of Commissioners
3. Guidelines for the implementation of the Board of Commissioners' duties in approving the RJP draft submitted to the Board of Directors
4. Guidelines for the implementation of the Board of Commissioners' duties in approving the RKAP draft or changes to the RKAP submitted to the Board of Directors
5. Guidelines for the implementation of the Board of Commissioners' directive duties
6. Guidelines for the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties
7. Duties related to potential conflicts of interest involving the Board of Commissioners
8. Duties related to the Company's good corporate governance practices

The complete version of the Company's Board Manual can be accessed through the Company's website at https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

# Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Commissioners

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
   a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
   b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
   d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
   e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
   f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
   g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
   h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
   i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
   j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
   k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
   l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Commissioners stipulated in the Company's Articles of Association are as follows:

1. The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policies, both the Company's management and its business, carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors, including supervision of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Program and Budget, the provisions of the Articles of Association, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the Company's goals and objectives.
2. The Board of Commissioners is authorized to:
   a. See the Company's books, papers, and other documents, check cash for verification purposes, and other securities, and verify the Company's assets.
   b. Enter the Company's premises, buildings, and offices.
   c. Request explanation from the Board of Directors and/or other officials on all issues related to the Company's management.
   d. Know every policy and action that has been carried out and will be carried out by the Board of Directors.
   e. Request Directors and/or other officials reporting to Directors, upon the Directors' knowledge, to attend the Board of Commissioners' Meetings.
   f. Appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary.
   g. Temporarily suspend a member of the Board of Directors in accordance with the provisions in the Articles of Association.
   h. Establish other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary, by considering the Company's capability.
   i. Assign experts to carry out certain tasks and for a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary.
   j. Manage the actions of the Company's management in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions in the Articles of Association.
   k. Attend the Board of Directors' Meeting and provide opinions on the matters discussed.
   l. Carry out other supervisory authorities as long as they are not contradictory to laws and regulations, the Articles of Association, and/or the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

3. Dewan Komisaris berkewajiban/bertanggung jawab untuk:
   a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
   b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
   d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
   e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
   f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
   g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
   h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
   i. Membentuk Komite Audit.
   j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   k. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
   l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
   m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
   o. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris dan dituangkan di dalam Keputusan Dewan Komisaris.

3. The Board of Commissioners is responsible for:
   a. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management.
   b. Auditing, reviewing, and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Program and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
   c. Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Program and Budget, including the justification for the Board of Commissioners to sign the Company's Long-Term Plan and the Work Program and Budget.
   d. Following the development of the Company's activities and providing opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on any issues deemed important for the Company's management.
   e. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are indications of a decline in the Company's performance.
   f. Auditing and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and signing the annual report.
   g. Providing explanations, opinions, and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested.
   h. Preparing an annual work program and incorporating it into the Company's Work Program and Budget.
   i. Establishing an Audit Committee.
   j. Proposing a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders.
   k. Formulating minutes of the Board of Commissioners' Meetings and storing such records.
   l. Reporting to the Company regarding their and/or their family's shareholding in the Company and other companies.
   m. Providing reports on supervisory tasks that have been carried out in the previous fiscal year to the General Meeting of Shareholders.
   n. Carrying out other supervisory and advisory duties, provided that they are not contradictory to laws and regulations, the Articles of Association, and/or the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
   o. Determining the division of duties among members of the Board of Commissioners, as stipulated in a Board of Commissioners' Decision Letter.

## Tugas Komisaris Utama serta Pembagian Tugas Masing-Masing Dewan Komisaris

Duties of the President Commissioner and Division of Duties of Each Member of the Board of Commissioners

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-011/KOM/1225 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yaitu sebagai berikut:

The division of duties among members of the Board of Commissioners is determined based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-011/KOM/1225 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, as follows:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Uraian Tugas<br>Description of Duties | |
|---|---|---|---|
| Hadiyanto | Komisaris Utama<br>President Commissioner | 1. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris; dan<br>2. Sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.<br>3. Bidang *Human Capital and Organization Development.* | 1. Coordinating all duties of the Board of Commissioners;<br>2. Serving as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee; and<br>3. Overseeing the Human Capital and Organization Development function. |
| Bhimantara Widyajala | Komisaris<br>Commissioner | 1. Sebagai Ketua Komite Audit;<br>2. Bidang Internal *Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication*, IIGF *Institute, Corporate Strategy & Finance,* dan *Corporate Service & Procurement.* | 1. Serving as Chairman of the Audit Committee;<br>2. Overseeing Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, IIGF Institute, Corporate Strategy & Finance, and Corporate Service & Procurement functions. |
| Ferry Irawan | Komisaris<br>Commissioner | 1. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;<br>2. Bidang *Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social, Information and Technology,* Inisiasi Bisnis, Manajemen Risiko Korporasi, Manajemen Risiko Proyek dan Klaim, Penilaian Proyek, dan Penjaminan non KPBU | 1. Serving as Chairman of the Risk Monitoring Committee;<br>2. Overseeing Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social, Information and Technology, Business Initiation, Corporate Risk Management, Project Risk Management and Claims, Project Appraisal, and Non-PPP Guarantees functions. |

## Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Types of Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners

Sejalan dengan *Board Manual*, jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa penjaminan bersama, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset dan kerja sama lainnya yang perlu dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya dengan ruang lingkup, nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang termasuk pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

In accordance with the Board Manual, the following types of decisions require approval from the Board of Commissioners:

1. Pledging fixed assets as collateral for short-term credit facilities;
2. Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of joint guarantees, management contracts, licensing agreements, asset leasing, and other forms of cooperation required by the Company to achieve its objectives within the scope, value, or duration determined by the GMS;
3. Unless otherwise stipulated by laws and regulations, receiving or providing medium or long-term loans, including loans granted to the Company's subsidiaries;
4. Writing off uncollectible receivables and obsolete inventories from the accounting records;

5. Memindahtangankan aset tetap yang dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dan penyertaan modal dengan ketentuan:
   i. Berupa aset selain tanah dan/atau bangunan; dan atau
   ii. Berupa aset dengan nilai di bawah 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;
6. Penghapusan aset karena pemusnahan atau sebab-sebab lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan struktur organisasi;
8. Melakukan transaksi sebagaimana poin nomor 2 termasuk tindakan-tindakan lainnya yang diambil dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan nilai transaksi sama atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

5. Transferring fixed assets through sale, exchange, compensation, or capital participation, provided that:
   i. The assets are other than land and/or buildings; and/or
   ii. The value of the assets are below 50% (fifty percent) of the Company's net assets;
6. Writing off assets due to destruction or other causes in accordance with prevailing laws and regulations;
7. Determining the organizational structure;
8. Conducting transactions as referred to in point number 2, including other actions taken in the course of the Company's main business activities, with a transaction value equal to or exceeding 25% (twenty-five percent) and less than 50% (fifty percent) of the Company's equity.

## Benturan Kepentingan dan Rangkap Jabatan
Conflict of Interest and Concurrent Positions

Selaras dengan *Board Manual*, Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon atau merupakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Perseroan, anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas pada awal masa pengangkatan dan diperbaharui setiap tahun yang memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Selama tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan. Dewan Komisaris

In line with the Board Manual, members of the Board of Commissioners are prohibited from engaging in actions that involve conflicts of interest or from obtaining personal benefits from the Company's decision-making and/or activities, other than their legitimate remuneration.

Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
1. Members of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise;
2. Other positions that, under prevailing laws and regulations, are prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Board of Commissioners, member/administrator of political party, candidate/member of legislative body, candidate or incumbent of Regional Head/ Deputy Regional Head; and/or
3. Holding other positions that may give rise to a conflict of interest with the Company.

To prevent conflicts of interest within the Company, members of the Board of Commissioners sign an Integrity Pact at the beginning of their appointment and renew it each year. This pact includes a statement confirming that the members of the Board of Commissioners does not have conflict of interest in the performance of their duties.

Throughout 2025, none of the members of the Board of Commissioners had any conflicts of interest or potential conflicts of interest with respect to the Company. The

memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun, meskipun pada tahun 2025, terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan. Namun dapat dipastikan rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris disajikan di Bab Profil Perusahaan pada sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Board of Commissioners remains committed to preventing potential conflicts of interest and ensuring that they do not place themselves in situations that may give rise to such conflicts under any circumstances, although in 2025 several members of the Board of Commissioners held concurrent positions. However, it can be confirmed that such positions did not conflict with prevailing laws and regulations. Information regarding the concurrent positions of the Board of Commissioners is presented in the Company Profile Chapter, under the Profile of the Board of Commissioners subsection in this Annual Report.

## Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Meetings

Kebijakan rapat Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat Dewan Komisaris (rapat internal) dan rapat bersama Direksi (rapat gabungan).

The policy governing the Board of Commissioners' meetings is set forth in the Board Manual. A Board of Commissioners' meeting refers to a meeting conducted by the Board of Commissioners in relation to the execution of its duties and functions. The Board of Commissioners may hold Board of Commissioners meetings (internal meetings) as well as joint meetings with the Board of Directors.

Rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat gabungan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Meetings of the Board of Commissioners, whether internal meetings or joint meetings, may be held at least once a month or at any time upon the request of one or more members of the Board of Commissioners, upon the request of the Board of Directors, or upon a written request from one or more shareholders that jointly represent at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights, specifying the matters to be discussed.

## Frekuensi Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
Frequency of Board of Commissioners' Meetings in 2025

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 17 (tujuh belas) kali, rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali dan rapat dengan Pemegang Saham sebanyak 2 (dua) kali rapat.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 35 (thirty five) meetings, comprising 17 (seventeen) internal meetings of the Board of Commissioners, 18 (eighteen) joint meetings with the Board of Directors, and 2 (two) meetings with Shareholders.

## Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Gabungan Dewan Komisaris Tahun 2025

Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal and Joint Meetings in 2025

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris<br>Attendance of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' Internal Meetings | | | Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi)<br>Attendance of the Board of Commissioners at Joint Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Jumlah Kehadiran<br>Number of Attendances | Tingkat Kehadiran<br>Attendance Rate | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Jumlah Kehadiran<br>Number of Attendances | Tingkat Kehadiran<br>Attendance Rate |
| Hadiyanto | Komisaris Utama<br>President Commissioner | 17 | 17 | 100% | 18 | 18 | 100% |
| Ferry Irawan | Komisaris<br>Commissioner | 17 | 17 | 100% | 18 | 18 | 100% |
| Ahmad Ghufron[1] | Komisaris<br>Commissioner | 16 | 16 | 100% | 17 | 17 | 100% |
| Bhimantara Widyajala[2] | Komisaris<br>Commissioner | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| **Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris**<br>Average Attendance Rate of the Board of Commissioners | | | | **100%** | | | **100%** |

**Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Direksi telah sesuai dengan kebijakan rapat yang diatur dalam *Board Manual*.**
The frequency of meetings and the attendance rate of the Board of Commissioners in both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors were in accordance with the meeting policies stipulated in the Board Manual.

1: berhenti menjabat sejak 19 Desember 2025
2: menjabat sejak 19 Desember 2025

1: resigned as of 19 December 2025
2: start serving the position as of 19 December 2025

## Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun 2025

Attendance Rate of the Board of Commissioners at the GMS in 2025

| No. | Tanggal<br>Date | Agenda | Realisasi<br>Realization | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hadiyanto | Ferry Irawan | Ahmad Ghufron[1] | Bhimantara Widyajala[2] |
| 1. | 6 Mei 2025<br>6 May 2025 | RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024<br>Annual GMS on the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| 2. | 11 Desember 2025<br>11 December 2025 | RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026<br>Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |

1: berhenti menjabat sejak 19 Desember 2025
2: menjabat sejak 19 Desember 2025

1: resigned as of 19 December 2025
2: start serving the position as of 19 December 2025

# Agenda Rapat
Meeting Agenda

Berikut agenda rapat yang telah dibahas selama tahun 2025 baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

The following are the agendas discussed during 2025, both in Board of Commissioners' internal meetings and Board of Commissioners and Board of Directors' joint meetings:

## Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris 2025
Agenda of Internal Meetings of the Board of Commissioners in 2025

| No. | Tanggal Pelaksanaan Rapat<br>Date of Meeting | Agenda | |
|---|---|---|---|
| 1. | 16 Januari 2025<br>16 January 2025 | Pembahasan AOI GCG | Discussion on the AOI GCG |
| 2. | 30 Januari 2025<br>30 January 2025 | Pembahasan *Highlight* Laporan Manajemen Periode Desember 2024 | Discussion on the Highlights of the Management Report for the December 2024 period |
| 3. | 26 Februari 2025<br>26 February 2025 | Pembahasan *Highlight* Laporan Manajemen Periode Januari 2025 dan *update progress assessment* GCG tahun 2025 | Discussion on the Highlights of the Management Report for January 2025 and updates on the progress of the 2025 GCG assessment |
| 4. | 12 Maret 2025<br>12 March 2025 | Pembahasan Terbatas terkait Anggota Komite | Limited Discussion regarding Committee Members |
| 5. | 24 Maret 2025<br>24 March 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Februari 2025 | Discussion on the Management Report for February 2025 |
| 6. | 24 Maret 2025<br>24 March 2025 | Persiapan Rapat Kerja Dewan Komisaris | Preparation for Board of Commissioners' Work Meeting |
| 7. | 12 April 2025<br>12 April 2025 | - Evaluasi Program Kerja Dekom;<br>- Pemutakhiran *Board Manual*;<br>- Pemutakhiran Piagam Komite; dan<br>- Rencana *Benchmarking* Dekom | - Evaluation of the Board of Commissioners' Work Program<br>- Update of the Board Manual<br>- Update of Committee Charters<br>- Plan for benchmarking activities of the Board of Commissioners |
| 8. | 28 April 2025<br>28 April 2025 | *Highlight* Laporan Manajemen Periode Maret 2025 | Highlights of the Management Report for March 2025 |
| 9. | 26 Mei 2025<br>26 May 2025 | *Highlight* Laporan Manajemen Periode April 2025 | Highlights of the Management Report for April 2025 |
| 10. | 23 Juni 2025<br>23 June 2025 | *Highlight* Laporan Manajemen Periode Mei 2025 | Highlights of the Management Report for May 2025 |
| 11. | 28 Juli 2025<br>28 July 2025 | *Highlight* Laporan Manajemen Periode Juni 2025 | Highlights of the Management Report for June 2025 |
| 12. | 8 Agustus 2025<br>8 August 2024 | - Evaluasi *Alignment* RJPP vs Capaian dan Prognosa Tahun 2025<br>- Evaluasi Kinerja Semester I 2025 & Evaluasi Pencapaian Target Operasional<br>- Finalisasi *Charter* KA & KPR<br>- Evaluasi Pengelolaan Risiko<br>- Evaluasi *Enabler* (HC, IT & ESG *Framework*)<br>- Evaluasi Hal-Hal Lain (*board manual*) | - Evaluation of the alignment between the RJPP and the 2025 achievements and projections<br>- Evaluation of performance for the 1st semester of 2025 and evaluation of operational target achievements<br>- Finalization of the Audit Committee's Charter and Risk Monitoring Committee's Charter<br>- Evaluation of risk management<br>- Evaluation of enablers (Human Capital, IT, and ESG Framework)<br>- Evaluation of other matters (Board Manual) |
| 13. | 25 Agustus 2025<br>25 August 2025 | *Highlight* Pembahasan Laporan Manajemen Periode Juli 2025 | Discussion on the Management Report for July 2025 |
| 14. | 22 September 2025<br>22 September 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Periode Agustus 2025 | Discussion on the Management Report for August 2025 |
| 15. | 23 Oktober 2025<br>23 October 2025 | - Pembahasan Laporan Manajemen September 2025<br>- Pembahasan RKA Dekom dan RKAP PT PII Tahun 2026 | - Discussion on the Management Report for September 2025<br>- Discussion on the Board of Commissioners' RKA and IIGF's RKAP for 2026 |

| No. | Tanggal Pelaksanaan Rapat<br>Date of Meeting | Agenda | |
|---|---|---|---|
| 16. | 24 November 2025<br>24 November 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Oktober 2025 | Discussion on the Management Report for October 2025 |
| 17. | 24 Desember 2025<br>24 December 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen November 2025 | Discussion on the Management Report for November 2025 |

## Agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi 2025

Agenda of Joint Meetings Between the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

| No. | Tanggal Pelaksanaan Rapat<br>Date of Meeting | Agenda | |
|---|---|---|---|
| 1. | 14 Januari 2025<br>14 January 2025 | *Entry Meeting* GCG *Assessment* Tahun Buku 2024 | GCG Assessment Entry Meeting for 2024 Fiscal Year |
| 2. | 31 Januari 2025<br>31 January 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Desember 2024 | Discussion on the Management Report for December 2024 |
| 3. | 5 Februari 2025<br>5 February 2025 | Diskusi Dampak Inpres I Tahun 2025 (Diskusi Terbatas) | Discussion on the Impact of Presidential Instruction I of 2025 (Limited Discussion) |
| 4. | 27 Februari 2025<br>27 February 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2025 | Discussion on the Management Report for January 2025 |
| 5. | 27 Februari 2025<br>27 February 2025 | Pembahasan *Clearance Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan PwC | Clearance Meeting for 2024 Financial Statement Audit with PwC |
| 6. | 26 Maret 2025<br>26 March 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Februari 2025 | Discussion on the Management Report for February 2025 |
| 7. | 30 April 2025<br>30 April 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Maret 2025 | Discussion on the Management Report for March 2025 |
| 8. | 30 April 2025<br>30 April 2025 | Persiapan RUPST Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 | Preparation of the AGMS Annual Report for the 2025 Financial Year |
| 9. | 28 Mei 2025<br>28 May 2025 | - Pembahasan Laporan Manajemen April 2025<br>- Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja | - Discussion on the Management Report for April 2025<br>- Indications of Declining Performance |
| 10. | 25 Juni 2025<br>25 June 2025 | - Pembahasan Laporan Manajemen Mei 2025<br>- Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja | - Discussion on the Management Report for May 2025<br>- Indications of Declining Performance |
| 11. | 30 Juli 2025<br>30 July 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Juni 2025 | Discussion on the Management Report for June 2025 |
| 12. | 27 Agustus 2025<br>27 August 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Juli 2025 | Discussion on the Management Report for July 2025 |
| 13. | 20 September 2025<br>20 September 2025 | Evaluasi Perseroan Semester I 2025 | Company Evaluation for the First Semester of 2025 |
| 14. | 24 September 2025<br>24 September 2025 | Pembahasan Laporan Manajemen Agustus 2025 | Discussion on the Management Report for August 2025 |
| 15. | 28 Oktober 2025<br>28 Oktober 2025 | - Pembahasan Laporan Manajemen September 2025<br>- Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja<br>- Pembahasan Rancangan RKAP 2026 | - Discussion on the management performance report for September 2025<br>- Indications of Declining Performance<br>- RKAP Draft 2026 |
| 16. | 26 November 2025<br>26 November 2025 | - Pembahasan Laporan Manajemen Oktober 2025<br>- Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja<br>- Persiapan RUPS RKAP 2026 | - Discussion on the Management Report for October 2025<br>- Indications of Declining Performance<br>- Preparation for the GMS on the 2026 RKAP |
| 17. | 12 Desember 2025<br>12 December 2025 | *Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan, IKU Korporasi BOC BOD dan PSA62 Tahun Buku 2025 | Kick-Off Meeting for the Audit of Financial Statements, Corporate KPIs, BOC, BOD, and PSA62 for the 2025 Fiscal Year |
| 18. | 30 Desember 2025<br>30 December 2025 | - Pembahasan Laporan Manajemen November 2025<br>- Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja | - Discussion on company performance for November 2025<br>- Indications of Declining Performance |

## Penyampaian Undangan Rapat
Delivery of Meeting Invitation

Sepanjang tahun 2025, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel agenda rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, penyampaian undangan rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan bersama Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* yaitu panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Throughout 2025, as described in the tables of internal meeting agendas of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, the delivery of invitations for both internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors has been carried out in accordance with the policy stipulated in the Board Manual. Meeting invitations of the Board of Commissioners are delivered in writing by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner, and must be submitted no later than 3 (three) days prior to the meeting of the Board of Commissioners, or within a shorter period in urgent circumstances, excluding the invitation and meeting date.

## Rencana Rapat Dewan Komisaris tahun 2026
Plan for Board of Commissioners' Meetings in 2026

Sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, Dewan Komisaris akan melakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) kali dengan agenda rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

In line with the established work plan, the Board of Commissioners plans to hold approximately 24 (twenty-four) meetings in 2026, consisting of internal meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

## Pelatihan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Training

Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dan dalam memberikan nasihat yang relevan terhadap rencana strategis yang disiapkan Direksi Perseroan.

The Company provides broad opportunities for members of the Board of Commissioners to participate in competency development programs to enhance their insights and knowledge, which support the effective execution of their duties, functions, and responsibilities, as well as their ability to provide relevant advice on the strategic plans prepared by the Company's Board of Directors.

## Kebijakan Pelatihan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Training Policy

Kebijakan pelatihan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman Dewan Komisaris.

The training policy for the Board of Commissioners is stipulated in the Board Manual and the Board of Commissioners' Guidelines.

## Pelaksanaan Program Pelatihan Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners' Training Program

Berikut daftar pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris PT PII selama tahun 2025:

The following is a list of training programs attended by the Board of Commissioners of IIGF during 2025:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Topik Pelatihan<br>Topic of Training | Penyelenggara<br>Organizer | Tanggal<br>Date |
|---|---|---|---|---|
| Hadiyanto | Komisaris Utama<br>President Commissioner | *Resillience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era* | GRC Summit | 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025 |
| | | *Risk Odyssey*: *Engineering Momentum, Building a Resillient Risk* DNA | Enterprise Risk Management Academy (ERMA) | 3-5 Desember 2025<br>3-5 December 2025 |
| Ahmad Ghufron[1] | Komisaris<br>Commissioner | *Resillience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era* | GRC Summit | 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025 |
| | | *Risk Odyssey*: *Engineering Momentum, Building a Resillient Risk* DNA | Enterprise Risk Management Academy (ERMA) | 3-5 Desember 2025<br>3-5 December 2025 |
| Ferry Irawan | Komisaris<br>Commissioner | *Resillience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era* | GRC Summit | 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025 |
| Bhimantara Widyajala[2] | Komisaris | - | - | - |

1: berhenti menjabat sejak 19 Desember 2025
2: menjabat sejak 19 Desember 2025

1: resigned as of 19 December 2025
2: start serving the position as of 19 December 2025

## Program Pengenalan Perseroan bagi Dewan Komisaris

Company's Orientation Program for the Board of Commissioners

Kebijakan program pengenalan Perseroan bagi Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Perseroan berada pada Sekretaris Perusahaan.

The policy governing the Company's orientation program for the Board of Commissioners is set forth in the Board Manual. The Company's orientation program is provided to newly appointed members of the Board of Commissioners. The orientation program may take the form of presentations, meetings, visits to the Company, and reviews of documents or other programs deemed appropriate by the Company. Responsibility for organizing the Company's orientation program rests with the Corporate Secretary.

Materi Program Pengenalan Perseroan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

The Company's Orientation Program materials include:

1. The implementation of corporate governance principles by the Company;
2. An overview of the Company covering its objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; dan/atau
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan telah mengadakan program pengenalan Perseroan kepada Dewan Komisaris baru yaitu Sdr. Bhimantara Widyajala sebagai Komisaris pada tanggal 30 Desember 2025. Program pengenalan tesebut dilakukan secara formal melalui pertemuan tatap muka.

3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited matters; and/or
5. Laws and regulations related to the Company's business activities.

In 2025, the Company conducted an orientation program for a newly appointed member of the Board of Commissioners, Mr. Bhimantara Widyajala, who was appointed as Commissioner on 30 December 2025. The orientation program was conducted formally through an in-person meeting.



# Keputusan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2025

Decisions and Recommendations of the Board of Commissioners in 2025

Sepanjang Tahun 2025, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Commissioners issued several Board of Commissioners' Decision Letters, with details as follows:

| No. | Nomor Surat Keputusan<br>Decision Letter Number | Tanggal<br>Date | Perihal<br>Subject |
|---|---|---|---|
| 1 | SK-001/KOM/0525 | 1 Mei 2025<br>1 May 2025 | Pemberhentian dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Dismissal and Determination of the Composition of the Audit Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 2 | SK-002/KOM/0525 | 1 Mei 2025<br>1 May 2025 | Pemberhentian dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Dismissal and Determination of the Composition of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 3 | SK-003/KOM/0625 | 2 Juni 2025<br>2 June 2025 | Pengesahan Piagam Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Ratification of the Audit Committee Charter of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 4 | SK-004/KOM/0625 | 2 Juni 2025<br>2 June 2025 | Pengesahan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Ratification of the Risk Monitoring Committee Charter of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 5 | SK-005/KOM/0625 | 19 Juni 2025<br>19 June 2025 | Perpanjangan Masa Tugas Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Extension of the Term of Assignment of the Board of Commissioners Secretariat Staff of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 6 | SK-006/KOM/0725 | 15 Juli 2025<br>15 July 2025 | Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Appointment of the Acting President Director of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 7 | SK-007/KOM/0825 | 14 Agustus 2025<br>14 August 2025 | Penunjukan Kembali Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Reappointment of the Acting President Director of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 8 | SK-008/KOM/0925 | 2 September 2025<br>2 September 2025 | Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PII (Persero)<br>Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of IIGF |
| 9 | SK-009/KOM/0925 | 30 September 2025<br>30 September 2025 | Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Division of Duties of the Board of Commissioners of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 10 | SK-010/KOM/0925 | 30 September 2025<br>30 September 2025 | Pemberhentian dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Dismissal and Appointment of the Composition of the Nomination and Remuneration Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 11 | SK-011/KOM/1225 | 20 Desember 2025<br>20 December 2025 | Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Division of Duties of the Board of Commissioners of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |
| 12 | SK-012/KOM/1225 | 20 Desember 2025<br>20 December 2025 | Pemberhentian dan Penetapan Ketua Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)<br>Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund |

## Persetujuan Dewan Komisaris
Approval of the Board of Commissioners

Pada Tahun 2025 tidak terdapat perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

In 2025, there were no actions undertaken by the Board of Directors that required approval from the Board of Commissioners.

## Realisasi Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025
Implementation of the Board of Commissioners' Work Program in 2025

| No. | Program Kerja<br>Work Program | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Perencanaan** Planning Aspects | | | | |
| 1. | Penyusunan dan penetapan usulan RKA Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation and determination of the proposed Board of Commissioners' 2026 Work Program | September | Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan September-Oktober 2025 dan telah disampaikan kepada Direksi.<br><br>Surat Dewan Komisaris Nomor S-36/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025 | The Proposed Budget and Work Program draft was prepared in September - October 2025 and has been submitted to the Board of Directors.<br><br>Board of Commissioners' Letter No. S-36/PII/DK/1025 dated 29 October 2025 |
| 2. | Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation and determination of the proposed Board of Commissioners' 2026 Performance Contract | September | Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2026 telah disampaikan kepada RUPS dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2026.<br><br>Surat Dewan Komisaris Nomor S-36/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025 | The proposed Board of Commissioners' Performance Contract (IKU) has been submitted to the GMS and was ratified during the GMS on the Approval of 2026 RKAP.<br><br>Board of Commissioners' Letter No. S-36/PII/DK/1025 dated 29 October 2025 |
| 3. | Penelaahan dan persetujuan atas usulan RKAP dan atau RJPP<br>Review and approval of the proposed RKAP and/or RJPP | Juli – September (sesuai dengan jadwal RUPS)<br>July – September (in accordance with the GMS schedule) | 9 Oktober 2025<br>16 Oktober 2025<br>Tanggapan ke Direksi: S-37/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025 | 9 October 2025<br>16 October 2025<br>Response to the Board of Directors: S-37/PII/DK/1025 dated 29 October 2025 |
| 4. | Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP PT PII tahun 2026<br>Submission of the Board of Commissioners' response to IIGF 2026 RKAP and/or RJPP draft to the GMS | Desember (sesuai dengan jadwal RUPS)<br>December (in accordance with the GMS schedule) | Rapat Dewan Komisaris: 23 Oktober 2025<br>Tanggapan ke RUPS: S-38/PII/DK/1025 tanggal 30 Oktober 2025 | Board of Commissioners' Meeting: 23 October 2025<br>Response to the GMS: S-38/PII/DK/1025 dated 30 October 2025 |
| **Aspek Pengawasan** Supervisory Aspects | | | | |
| 5 | Pengawasan/ pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya<br>Supervision/advice on risk management policy and its implementation | Triwulanan<br>Quarterly | Penyampaian surat Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat No. S-10/PII/DK/0325 terkait Penyampaian Evaluasi Manajemen Risiko PT PII Tahun 2024<br><br>Rapat berkala Komite Pemantau Risiko dengan divisi Risk Management (RM) mengenai sistem kebijakan manajemen risiko yang dilaksanakan setiap triwulanan pada: 15 Januari, 17 April, 17 Juli dan 23 Oktober 2025 | Submission of the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors through letter No. S-10/PII/DK/0325 on the Submission of Risk Management Evaluation of IIGF in 2024<br><br>Periodic meetings of the Risk Monitoring Committee with the Risk Management (RM) division on the risk management policy system were held quarterly on: 15 January, 17 April, 17 July, and 23 October 2025 |

| No. | Program Kerja<br>Work Program | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pengawasan/ pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal<br>Supervision/advice on rinternal control system policy and its implementation | Triwulanan<br>Quarterly | Penyampaian surat Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat<br>1. S-04/PII/DK/0225 terkait Reviu atas Kegiatan Audit Internal Triwulan IV Tahun 2024 dan SPI PT PII Tahun 2024<br>2. S-16/PII/DK/0525 terkait Reviu atas Kegiatan Divisi Audit Internal dan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Audit Internal dan Eksternal Triwulan I Tahun 2025<br>3. S-22/PII/DK/0725 terkait Reviu atas Kegiatan Divisi Audit Internal dan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Internal dan Eksternal Triwulan II Tahun 2025<br>4. S-34/PII/DK/1025 terkait Reviu atas Kegiatan Divisi Audit Internal, Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Audit Internal dan Eksternal, dan Pengawasan atas Kebijakan dan Pelaksanaan SPI Triwulan III Tahun 2025<br>Rapat berkala Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (IA) mengenai sistem pengendalian internal yang dilaksanakan setiap triwulanan pada: 15 Januari, 15 April, 17 Juli dan 20 Oktober 2025 | Submission of the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors through letters:<br>1. S-04/PII/DK/0225 on the Review of Internal Audit Activities for the Fourth Quarter of 2024 and the Internal Audit Unit of IIGF for 2024<br>2. S-16/PII/DK/0525 on the Review of Internal Audit Division Activities and Follow-up Monitoring of Internal and External Audit Results for the First Quarter of 2025<br>3. S-22/PII/DK/0725 on the Review of Internal Audit Division Activities and Follow-up Monitoring of Internal and External Audit Results for the Second Quarter of 2025<br>4. S-34/PII/DK/1025 on the Review of Internal Audit Division Activities, Follow-up Monitoring of Internal and External Audit Results, and Supervision of Internal Audit Policy and Implementation for the Third Quarter of 2025<br>Periodic meetings of the Audit Committee with the Internal Audit (IA) division on internal control system were held quarterly on: 15 January, 15 April, 17 July, and 20 October 2025 |
| 7 | Pengawasan/ pemberian atas kebijakan dan pelaksanaan nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaanya<br>Supervision/provision of advice on HR policies and their implementation | Mei<br>May | Pembahasan pada 4 Juli 2025 melalui Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Manajemen<br>Penyampaian Surat Dewan Komisaris kepada Direksi: S-32/PII/DK/1025 tanggal 28 Oktober 2025 | Discussion on 4 July 2025 through a Risk Monitoring Committee Meeting with Management<br>Submission of Board of Commissioners' Letter to Board of Directors: S-32/PII/DK/1025 dated 28 October 2025 |
| 8 | Pengawasan/ pemberian nasihat atas kebijakan Teknologi Informasi dan pelaksanannya<br>Supervision/advice on Information Technology policies and their implementation | Agustus<br>August | Penyampaian Surat Dewan Komisaris kepada Direksi: S-45/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 | Submission of Board of Commissioners' Letter to Board of Directors: S-45/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 |
| 9 | Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan PT PII Tahun 2024<br>Submission of responses to IIGF's 2024 Annual Report | April-Mei<br>April-May | Rapat Dewan Komisaris dan Direksi: 30 April 2025 – Pembahasan Laporan Manajemen Periode Maret 2025 dan Persiapan RUPS Laporan Tahunan 2024 | Board of Commissioners and Board of Directors Meeting: 30 April 2025 – Discussion of Management Report for March 2025 and Preparation of the GMS for the 2024 Annual Report |
| 10 | Pengawasan/ pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya<br>Supervision/advice on quality and service policies and their implementation | Oktober<br>October | Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit: 22 November 2025<br>Penyampaian surat Dewan Komisaris kepada Direksi: S-41/PII/DK/1225 tanggal 17 Desember 2025 | Risk Monitoring Committee and Audit Committee Meeting: 22 November 2025<br>Submission of Board of Commissioners' Letter to Board of Directors: S-41/PII/DK/1225 dated 17 December 2025 |
| 11 | Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait perusahaaan<br>Supervision of the effectiveness of external and internal audits and the implementation of reviews of complaints related to the Company | Triwulanan<br>Quarterly | Laporan Pengawasan atas Efektivitas Audit Eksternal dan Internal serta pelaksanaan telaah atas pengadaan terkait Perusahaan disampaikan secara triwulanan. | Report on Supervising the Effectiveness of External and Internal Audits, as well as on the implementation of review on Company-related procurement, which are submitted quarterly. |
| 12 | Pengawasan/ pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaanya<br>Supervision/advice on procurement policies and their implementation | Mei<br>May | Rapat Komite Audit: 24 Juni 2025<br>Penyampaian surat kepada Direksi: S-21/PII/DK/0725 tanggal 11 Juli 2025 | Audit Committee Meeting: 24 June 2025<br>Letter to the Board of Directors: S-21/PII/DK/0725 dated 11 July 2025 |

| No. | Program Kerja<br>Work Program | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Pihak Ketiga<br>Supervision of the Board of Directors' compliance with laws and regulations and third party agreements | | Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit: 22 November 2025<br><br>Penyampaian surat Dewan Komisaris kepada Direksi: S-44/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 | Risk Monitoring Committee and Audit Committee Meeting: 22 November 2025<br><br>Submission of Board of Commissioners' Letter to Board of Directors: S-44/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 |
| 14 | Respon atas permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi RUPS<br>Response to the request for a response/explanation from the Board of Directors of the GMS | Paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap<br>No later than 14 days after the request for a response/ explanation from the Board of Directors/ GMS is received in full | Seluruh permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS telah ditanggapi tepat waktu, paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap | All requests for responses/explanations from the Board of Directors/GMS have been responded to in a timely manner, no later than 14 days after the complete request for responses/explanations from the Board of Directors/GMS has been received. |
| 15 | Pemantauan Kinerja Direksi<br>Monitoring of Board of Directors' Performance | Bulanan<br>Monthly | Rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengenai laporan manajemen bulanan sepanjang tahun 2025 | Regular joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding monthly management reports throughout 2025 |
| 16 | Pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Komisaris<br>Regular monthly meeting of the Board of Commissioners | Bulanan<br>Monthly | Selama periode tahun 2025 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 12 kali | Twelve regular meetings of the Board of Commissioners were held during 2025. |
| 17 | Pembahasan gejala penurunan kinerja<br>Discussion of symptoms of performance decline | Sesuai kebutuhan<br>As required | Laporan Dewan Komisaris kepada RUPS atas penyampaian surat penurunan gejala kinerja dari Direksi yang disampaikan melalui:<br>1. S-03/PII/DK/0225 tanggal 10 Februari 2025, dan<br>2. S-18/PII/DK/0525 tanggal 26 Mei 2025<br>3. S-31/PII/DK/1025 tanggal 28 Oktober 2025<br>4. S-42/PII/DK/1225 tanggal 27 Desember 2025 | Reports from the Board of Commissioners to the GMS on the submission of letters regarding declining performance from the Board of Directors were submitted through:<br>1. S-03/PII/DK/0225 dated 10 February 2025,<br>2. S-18/PII/DK/0525 dated 26 May 2025<br>3. S-31/PII/DK/1025 dated 28 October 2025<br>4. S-42/PII/DK/1225 dated 27 December 2025 |
| 18 | Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanannya<br>Supervision of accounting policies and preparation of financial statements and their implementation | Agustus<br>August | Rapat Komite Audit: 29 Agustus 2025<br><br>Penyampaian surat Dewan Komisaris kepada Direksi: S-30/PII/DK/1025 tanggal 30 Oktober 2025 | Audit Committee Meeting: 29 August 2025<br><br>Submission of the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors: S-30/PII/DK/1025 dated 30 October 2025 |
| 19 | Evaluasi atas pelaksanaan RKAP<br>Evaluation of RKAP implementation | Semesteran<br>Per Semester | Disampaikan dalam bentuk penyampaian laporan:<br>1. S-06 PII DK 0225 - Laporan Pengawasan RKAP Semester 1<br>2. S-26 PII DK 0825 - Laporan Pengawasan RKAP Semester 2 | Delivered in the form of Submission Reports:<br>1. S-06 PII DK 0225 - RKAP Supervision Report for Semester 1<br>2. S-26 PII DK 0825 - RKAP Supervision Report for Semester 2 |
| 20 | *Monitoring* atas kegiatan IIGF Institute<br>Monitoring of IIGF Institute's activities | Sesuai kebutuhan<br>As required | Dilaksanakan pada rapat pembahasan laporan manajemen dan rapat komite | Held at management report discussion meetings and committee meetings |
| 21 | Evaluasi atas kegiatan TJSL<br>Evaluation of CSR activities | Sesuai kebutuhan<br>As required | Disampaikan pembahasan dalam:<br>1. Rapat BOC BOD 30 April 2025 – Pembahasan Laporan Manajemen Periode Maret<br>2. Rapat BOC BOD 30 Juli 2025 – Pembahasan Laporan Manajemen Periode Juni | Discussions presented at:<br>1. BOC/BOD Meeting, 30 April 2025 – Discussion of Management Report for March<br>2. BOC/BOD Meeting, 30 July 2025 – Discussion of Management Report for June |
| 22 | Penelaahan pengusulan remunerasi Direksi<br>Review of proposed remuneration for the Board of Directors | Sesuai permintaan Direksi<br>As per Board of Directors' request | Penyampaian surat rahasia Dewan Komisaris kepada RUPS: S-01/PII/DK/0425 tanggal 28 April 2025 | Submission of Board of Commissioners' confidential letter to the GMS: S-01/PII/DK/0425 dated 28 April 2025 |

| No. | Program Kerja<br>Work Program | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | *Monitoring* atas proyek yang telah dijamin<br>Monitoring of guaranteed projects | Sesuai jadwal Divisi *Project Monitoring and Contract Management*<br>As per the Project Monitoring and Contract Management Division's schedule | *Site Visit* Dewan Komisaris dan Direksi pada Proyek Satelit Multifungsi pada 18-19 Juli 2025 di Batam, Kepulauan Riau | Site Visit by the Board of Commissioners and Board of Directors to the Multifunction Satellite Project on 18-19 July 2025, in Batam, Riau Islands |
| 24 | Pembahasan terkait transaksi atau Tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/ RUPS<br>Discussions on transactions or actions within the authority of the Board of Commissioners/GMS | Sesuai kebutuhan<br>As required | Sepanjang tahun 2025 tidak ada transaksi atau tindakan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | Throughout 2025, there were no transactions or actions related to the Company's business that required the Board of Commissioners' approval |
| 25 | Pemantauan pengadaan yang berkait dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris<br>Monitoring of procurement related to the Company received by the Board of Commissioners | Sesuai kebutuhan<br>As required | Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris | Throughout 2025, the Board of Commissioners received no complaints related to the Company. |
| 26. | Pengawasan/pemberian nasihat atas perubahan lingkungan bisnis Perseroan<br>Supervision/advice on changes in the Company's business environment | November | Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit: 22 November 2025<br><br>Penyampaian surat Dewan Komisaris kepada Direksi:<br>S-43 PII DK 1225 tanggal 30 Desember 2025 | Risk Monitoring Committee and Audit Committee Meeting: 22 November 2025<br><br>Submission of Board of Commissioners' Letter to Board of Directors: S-43 PII DK 1225 dated 30 December 2025 |
| **Aspek Pelaporan** Reporting Aspects | | | | |
| 27. | Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris<br>Submission of the report on the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities | Triwulanan<br>Quarterly | Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris<br><br>Setiap triwulanan disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu. | Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities<br>The report on the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities is submitted to the GMS in a timely manner, quarterly. |
| 28. | Penyampaian laporan pengawasan RKAP Tahun 2024-2025<br>Submission of the supervisory report on the implementation of the 2024–2025 RKAP | Semesteran<br>Per Semester | Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP<br>Tahun 2025 telah disampaikan kepada RUPS setiap semester.<br>- S-06/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025 untuk Semester II Tahun 2024.<br>- S-26/PII/DK/0825 tanggal 25 Agustus 2025 untuk Semester I Tahun 2025. | Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Implementation of the 2025 RKAP has been submitted to the GMS every semester:<br>- Letter No. S-06/PII/DK/0225 dated 28 February 2025 for the 2nd Semester of 2024.<br>- Letter No. S-26/PII/DK/0825 dated 25 August 2025 for the 1st Semester of 2025. |
| 29. | Penyampaian laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris<br>Submission of the report on the realization of the Board of Commissioners' KPI achievements | Triwulanan<br>Quarterly | Laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS setiap periode Triwulan. | The report on the realization of the Board of Commissioners' KPI achievements is submitted to the GMS every quarter. |
| **Aspek *Monitoring* & Evaluasi Penerapan GCG** GCG Implementation Monitoring & Evaluation Aspect | | | | |
| 30. | Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2024 oleh BPKP<br>Assessment of the implementation of GCG for 2024 by BPKP | Januari - Februari<br>January - February | Penilaian penerapan GCG tahun 2024 oleh BPKP telah selesai dengan nilai skor keseluruhan adalah 90,829 | The assessment of GCG implementation for 2024 conducted by BPKP has been completed with an overall score of 90.829. |
| 31. | Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2024<br>Monitoring the follow-up on the AOIs of GCG recommendations from the 2024 BPKP assessment | Semesteran<br>Per Semester | Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2024 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2025.<br>Seluruh AOI Aspek Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2025. | Follow-up actions on the AOIs of the GCG recommendations from the 2024 BPKP assessment were monitored semiannually throughout 2025.<br>All AOIs under the Board of Commissioners' aspects had been followed up as of December 2025. |

| No. | Program Kerja<br>Work Program | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Audit atas Laporan Keuangan** Financial Statements Audit Aspect | | | | |
| 32. | Pengadaan KAP Untuk Audit LK Tahun 2025<br>Appointment of KAP for the audit of the 2025 Financial Statements | April-Mei<br>April-May | Rapat Komite Audit tanggal 22 Desember 2025. | Audit Committee Meeting on 22 December 2025. |
| 33. | Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Tahun 2025 kepada RUPS<br>Proposal for the appointment of KAP to audit the 2025 Financial Statements to the GMS | Juni<br>June | Disampaikan ke RUPS melalui S-27/PII/DK/0825 tanggal 27 Agustus 2025. | Submitted to the Annual GMS through S-27/PII/DK/0825 dated 27 August 2025. |
| **Aspek Lainnya** Other Aspects | | | | |
| 34. | Penelaahan atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris<br>Review of complaints received by the Board of Commissioners | Sesuai kebutuhan/ pengaduan<br>As necessary/ complaints | Anggota Komite Audit menjadi Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.<br>Tidak ada pengaduan yang diterima Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2025. | A member of the Audit Committee serves as the Chairman of the Whistleblowing Management Team.<br>No complaints were received by the Board of Commissioners throughout 2025. |
| 35. | Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris<br>Competency Development of the members of the Board of Commissioners | Sesuai Jadwal<br>According to the schedule | Telah dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan pada bab ini pada sub bab pelatihan Dewan Komisaris | Has been implemented as described in this chapter under the Board of Commissioners' Training subsection. |



# Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Serta Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors and Committees Reporting to the Board of Commissioners

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Kolegial dan Individual

Collective and Individual Performance Assessment of the Board of Commissioners

Dalam rangka memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kontribusi Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pada kebijakan Perseroan dan praktik tata kelola perusahaan yang disepakati Dewan Komisaris.

To ensure effective and sustainable corporate governance and enhance the Board of Commissioners' contribution, the Board of Commissioners periodically conducts a performance assessment based on the Company's policies and the corporate governance practices agreed upon by the Board of Commissioners.

## Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Policy and Procedures for Performance Assessment of the Board of Commissioners

Kebijakan dan prosedur mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017, serta *Board Manual* Perseroan. Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode pengukuran kinerja berdasarkan pada strategis Perseroan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya bersamaan dengan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan.

The policies and procedures for performance assessment and evaluation of the Board of Commissioners refer to Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017, and the Company's Board Manual. Based on these policies, the implementation of performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through a performance measurement method based on the Company's strategy and the Key Performance Indicators (KPI) that are annually determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), simultaneously with the approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

## Pihak yang Melakukan Penilaian

Assessor

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan hasil penilaian mandiri yang disusun oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan disampaikan kepada Pemegang Saham melalui laporan berkala yaitu Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan, sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted by the Shareholders by taking into consideration the results of the self-assessment prepared by the Board of Commissioners. The results of the Board of Commissioners' performance assessment subsequently serve as the basis for evaluation and are reported to the Shareholders through periodic reports, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, including the Quarterly and Annual Report, as part of accountability for the implementation of Corporate Governance.

## Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Process of Performance Assessment of the Board of Commissioners

### Pemegang Saham
Shareholders

**Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Sasaran Strategis dan IKU sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.**
Shareholders, through the General Meeting of Shareholders, determine the Strategic Targets and KPIs as benchmarks for assessing the Board of Commissioners' performance in carrying out supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

### Dewan Komisaris
Board of Commissioners

**Dewan Komisaris melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berdasarkan Sasaran Strategis dan IKU yang telah ditetapkan, yang meliputi perspektif pengawasan dan pelaporan**
The Board of Commissioners conducts a self-assessment on the implementation of its duties, functions, and responsibilities based on the established Strategic Targets and KPIs, covering perspective of oversight and reporting.

### Pemegang Saham
Shareholders

**Pemegang Saham melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.**
Shareholders evaluate the Board of Commissioners' performance by comparing the actual performance achievement with the targets set in the performance contract.

## Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Criteria and Results of the Board of Commissioners' Performance Assessment

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pada IKU yang telah disetujui melalui RUPS terkait Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 sebagaimana Risalah RUPS tanggal 16 Desember 2024, yang salah satu keputusannya adalah menyetujui serta menetapkan kontrak manajemen berupa IKU antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT PII untuk tahun 2025. Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial berdasarkan pencapaian IKU yang meliputi kriteria sebagai berikut:

The performance assessment criteria for the Company's Board of Commissioners are based on the KPIs approved at GMS on the approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2025, as stated in the Minutes of the GMS dated 16 December 2024, one of which approved and established a management contract in the form of KPIs between the Board of Commissioners and Shareholders of IIGF for 2025. The measurement and assessment of the Board of Commissioners' performance are conducted collectively based on the achievement of these KPIs, which include the following criteria:

| Sasaran Strategis<br>Strategic Objectives | | Indikator Kinerja Utama<br>Key Performance Indicators | | Bobot Perspektif<br>Perspective Weight | Target | Satuan<br>Unit | Realisasi<br>Realization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Penerapan GCG<br>GCG Implementation | A.1.1 | Hasil Penilaian Independen atas penerapan GCG PT PII<br>Results of the Independent Assessment of the GCG Implementation at IIGF | 10% | 89 | Skor Nilai<br>Score | 91,02 |
| A.2 | Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang Efektif<br>Effective Supervision and Execution of the Duties of the Board of Commissioners | A.2.1 | Persentase arahan Dewan Komisaris yang Ditindaklanjuti oleh Direksi<br>Percentage of directives from the Board of Commissioners followed up by the Board of Directors | 20% | 90% | Persentase<br>Percentage | 100% |
| | | A.2.2 | Jumlah pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal<br>Number of supervisory actions on the implementation of follow-ups to audit recommendations issued by both internal and external auditors | 15% | 4 Kali<br>4 Times | Frekuensi<br>Frequency | 4 Kali<br>4 Times |

| Sasaran Strategis<br>Strategic Objectives | | Indikator Kinerja Utama<br>Key Performance Indicators | | Bobot Perspektif<br>Perspective Weight | Target | Satuan<br>Unit | Realisasi<br>Realization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A.2.3 | Persentase pemberian tanggapan (*response*) atas permohonan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu<br>Percentage of timely responses to requests for approval/recommendations submitted by the Board of Directors | 10% | 95% | Persentase<br>Percentage | 100% |
| | | A.2.4 | Pengawasan atas kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan.<br>Supervision of joint program activities involving SOEs/institutions under the Ministry of Finance | 5% | 2 Kali<br>2 Times | Frekuensi<br>Frequency | 6 kali<br>6 Times |
| B1 | Laporan Dewan Komisaris kepada RUPS yang berkualitas<br>High-Quality Reports of the Board of Commissioners to the GMS | B.1.1 | Persentase penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang tepat waktu<br>Percentage of timely submission of reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners | 10% | 100% | Persentase<br>Percentage | 102,50% |
| | | B.1.2 | Persentase penyampaian laporan pengawasan atas pelaksanaan RKAP yang tepat waktu<br>Percentage of timely submission of supervisory reports on the implementation of the Company's RKAP | 10% | 100% | Persentase<br>Percentage | 100% |
| | | B.1.3 | Persentase Penyampaian Laporan IKU Dewan Komisaris yang tepat waktu<br>Percentage of timely submission of the Board of Commissioners' KPI reports | 10% | 100% | Persentase<br>Percentage | 100% |
| | | B.1.4 | Persentase penyampaian tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RJP dan/atau RKAP beserta perubahannya (jika ada) yang tepat waktu<br>Percentage of timely submission of responses from the Board of Commissioners to proposals for RJP and/or RKAP and their amendments (if any) | 10% | 100% | Persentase<br>Percentage | 100% |
| | | | | | | | **106,23%** |

## Penilaian Penerapan GCG Untuk Aspek Dewan Komisaris

Assessment of GCG Implementation for the Board of Commissioners

Penilaian penerapan GCG tahun buku 2025 untuk Aspek Dewan Komisaris memperoleh nilai 93,648% dari skala 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah berjalan dengan Sangat Baik sesuai dengan hasil asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan pada kriteria standar alat uji Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The assessment of GCG implementation throughout the 2025 fiscal year for the Board of Commissioners received a score of 93.648% out of 100%. This result indicates that the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities Very Well, in accordance with the assessment results of the Good Corporate Governance implementation based on the standard evaluation criteria set forth in the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 concerning the Guidelines for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

The evaluation results of the Board of Commissioners' overall performance constitute an integral part of the compensation scheme and incentive allocation for members of the Board of Commissioners.

## Penilaian Kinerja Direksi Kolegial dan Individual

Collective and Individual Performance Assessment of the Board of Directors

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan serta memastikan pencapaian sasaran dan kinerja perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

The performance assessment of the Board of Directors is conducted to evaluate the effectiveness of the Board of Directors in carrying out its duties, functions, and responsibilities in managing the Company, as well as to ensure the achievement of the Company's targets and performance according to the predetermined plans.

## Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Procedures for Performance Assessment of the Board of Directors

Kebijakan dan prosedur mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017, serta *Board Manual* Perseroan. Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui metode pengukuran kinerja berdasarkan pada strategis Perseroan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya bersamaan dengan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.

The policies and procedures for performance assessment and evaluation of the Board of Directors refer to Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017, and the Company's Board Manual. Based on these policies, the performance assessment of the Board of Directors is carried out through a performance measurement method based on the Company's strategy and the Key Performance Indicators (KPI) that annually determined by the General Meeting of Shareholders (GMS), simultaneously with the approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), which is subsequently approved by the Board of Commissioners.

## Pihak yang Melakukan Penilaian

Assessor

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam proses tersebut, Dewan Komisaris melakukan penilaian dan pemantauan kinerja Direksi secara berkala dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan bersama melalui RUPS.

The performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) by taking into consideration the recommendations from the Board of Commissioners based on the evaluation of the Board of Directors' performance in fulfilling its duties and responsibilities. In this process, the Board of Commissioners conducts periodic assessments and monitoring of the Board of Directors' performance based on the Key Performance Indicators (KPI) that have been jointly established through the GMS.

Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Direksi dan disampaikan kepada Pemegang Saham melalui laporan berkala, termasuk Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan, sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

The results of this assessment serve as the basis for evaluating the Board of Directors' performance and are submitted to the Shareholders through periodic reports, including Quarterly and Annual Reports, as part of the accountability in implementing Good Corporate Governance.

## Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Process of Performance Assessment of the Board of Directors

### Pemegang Saham
Shareholders

**Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Sasaran Strategis dan IKU sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Direksi dalam melaksanakan Pengelolaan Perseroan**
Shareholders, through the General Meeting of Shareholders (GMS), determine Strategic Targets and Key Performance Indicators (KPIs) as benchmarks for measuring the Board of Directors' performance in managing the company.

### Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- **Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Penandatanganan IKU Korporasi yang telah disetujui oleh Pemegang Saham sebagai bentuk fungsi pengawasan dan komitmen bersama**
- **Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan pencapaian IKU termasuk kehadiran rapat dan kompetensi yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan pertimbangan penilaian.**
- The Board of Commissioners and Board of Directors sign the Corporate KPIs approved by the Shareholders as a form of supervisory function and mutual commitment.
- The Board of Commissioners monitors and evaluates the Board of Directors' performance based on KPI achievements, including meeting attendance and competencies, which are subsequently reported to the Shareholders as consideration for evaluation.

### Pemegang Saham
Shareholders

**Pemegang Saham menilai kinerja Direksi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi Dewan Komisaris.**
Shareholders assess the Board of Directors' performance by considering the evaluation results and recommendations of the Board of Commissioners.

## Kriteria Penilaian Kinerja Direksi secara Kolegial dan Individual

Criteria for the Collective and Individual Performance Assessment of the Board of Directors

Kriteria penilaian kinerja Direksi Perseroan berdasarkan pada IKU yang telah disetujui melalui RUPS bersamaan dengan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 sebagaimana Risalah RUPS tanggal 16 Desember 2024, yang salah satu keputusannya adalah menyetujui serta menetapkan kontrak manajemen berupa IKU antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT PII untuk tahun 2025.

The criteria for assessing the performance of the Company's Board of Directors are based on the KPIs approved at the GMS concurrently with the ratification of the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2025, as stated in the Minutes of the GMS dated 16 December 2024, one of which approved and established a management contract in the form of KPIs between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of IIGF for 2025.

IKU Direksi PT PII terdiri dari KPI kolegial dan Individual. KPI Kolegial Direksi merupakan indikator penilaian kinerja Direksi

The KPIs of the IIGF's Board of Directors consist of collective and individual KPIs. The collective KPIs represent

berdasarkan pada tugas bersama Direksi. IKU Individual/masing-masing Direksi merupakan turunan atau *cascading* dari IKU Kolegial dan diterapkan pada masing-masing Direksi yang disesuaikan dengan pembagian tugas masing-masing Direksi.

1. Penilaian kinerja atau IKU kolegial Direksi

   Berikut aspek yang menjadi penilaian kinerja Direksi yang dimuat dalam IKU Direksi Kolegial tahun 2025:

   - Margin laba bersih;
   - Progres penyelesaian 3 (tiga) proyek KPBU skala kecil
   - Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan;
   - Jumlah penjaminan proyek yang mendukung energi terbarukan;
   - Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close*;
   - Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal*;
   - Penyelesaian Hasil Keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif;
   - Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan *stakeholders* lainnya yang baik;
   - *Rating* perusahaan *sovereign*;
   - *Rating* ESG;
   - Dukungan IIGF-I terhadap pemetaan *creative financing* daerah dalam bentuk *platform digital*;
   - Kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan;
   - Tata kelola perusahaan yang baik (GCG *score*);
   - Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek;
   - Peningkatan Indeks *Engagement* karyawan yang optimal;
   - Peningkatan jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P.

2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi

   Berikut aspek yang menjadi penilaian kinerja Direksi yang dimuat dalam IKU Direksi individu tahun 2025:

performance indicators for the Board of Directors based on their joint responsibilities. Meanwhile, the individual KPIs for each Director are derived or cascaded from the collective KPIs and are applied to each Director in accordance with their respective duties and responsibilities.

1. Collective performance assessment or KPIs of the Board of Directors

   The following aspects of the Board of Directors' performance assessment are contained in the Collective KPIs of the Board of Directors in 2025:

   - Net profit margin;
   - Progress on the completion of 3 (three) small-scale PPP projects;
   - Increase in the value of project investments generated through guarantees;
   - Number of project guarantees supporting renewable energy;
   - Provision of support for guaranteed projects to reach financial close;
   - Number of projects that have completed the appraisal process;
   - Effective completion of deliverables from project preparation and transaction advisory assignments;
   - Achievement of a strong level of understanding among GCA and other stakeholders;
   - Sovereign company rating;
   - ESG rating;
   - IIGF-I's support for mapping regional creative financing through a digital platform;
   - Joint program activities involving SOEs/institutions under the Ministry of Finance;
   - Good Corporate Governance (GCG) score;
   - Level of risk control over guarantee claims for projects;
   - Optimal improvement in the employee engagement index;
   - Increase in the number of employees holding CP3P certification.

2. Individual Performance Assessment of Each Member of the Board of Directors

   The following aspects of the Board of Directors' performance assessment are contained in the individual KPIs of the Board of Directors in 2025:

| Keterangan<br>Description | Direktur Utama<br>President Director | Direktur Bisnis<br>Business Director | Direktur Keuangan<br>Finance Director |
|---|---|---|---|
| Margin laba bersih; Net profit margin; | ✔ | ✔ | ✔ |
| Progres penyelesaian 3 (tiga) proyek KPBU skala kecil;<br>Progress on the completion of 3 (three) small-scale PPP projects; | - | - | ✔ |

| Keterangan<br>Description | Direktur Utama<br>President Director | Direktur Bisnis<br>Business Director | Direktur Keuangan<br>Finance Director |
|---|---|---|---|
| Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan;<br>Increase in the value of project investments generated through guarantees; | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jumlah penjaminan proyek yang mendukung energi terbarukan;<br>Number of project guarantees supporting renewable energy; | - | ✔ | - |
| Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close*;<br>Provision of support for guaranteed projects to reach financial close; | - | ✔ | - |
| Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal*;<br>Number of projects that have completed the appraisal process; | - | - | ✔ |
| Penyelesaian Hasil Keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif;<br>Effective completion of deliverables from project preparation and transaction advisory assignments | ✔ | - | - |
| Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan *stakeholders* lainnya yang baik;<br>Achievement of a strong level of understanding among GCA and other stakeholders; | ✔ | ✔ | ✔ |
| *Rating* perusahaan *sovereign*; Sovereign company rating; | ✔ | ✔ | ✔ |
| *Rating* ESG; ESG rating; | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dukungan IIGF-I terhadap pemetaan *creative financing* daerah dalam bentuk *platform digital*;<br>IIGF-I's support for mapping regional creative financing through a digital platform; | - | - | ✔ |
| Kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan;<br>Joint program activities involving SOEs/institutions under the Ministry of Finance; | ✔ | - | - |
| Tata kelola perusahaan yang baik (GCG *score*);<br>Good Corporate Governance (GCG) score; | ✔ | - | - |
| Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek;<br>Level of risk control over guarantee claims for projects; | - | ✔ | - |
| Peningkatan Indeks *Engagement* karyawan yang optimal;<br>Optimal improvement in the employee engagement index; | ✔ | ✔ | ✔ |
| Peningkatan jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P.<br>Increase in the number of employees holding CP3P certification. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi<br>The maturity level of corporate risk management implementation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reputasi PT PII IIGF's reputation | ✔ | - | - |
| Tingkat capaian pendapatan pengelolaan dana<br>The level of achievement of fund management revenue | - | ✔ | - |
| Kegiatan, Program, dan/atau Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, *Development Partner*, dan Institusi dalam rangka mendukung bisnis Penjaminan dalam skema *Creative Financing*<br>Activities, programs, and/or cooperation with Ministries/Agencies, Development Partners, and Institutions in supporting the guarantee business under the Creative Financing scheme | - | - | ✔ |
| Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Utama<br>Completion of follow-up actions on the results of internal and external audits within the President Director's Directorate | ✔ | - | - |
| Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Utama<br>Completion of follow-up actions in accordance with the directives of the Board of Commissioners for the President Director's Directorate | ✔ | - | - |

| Keterangan<br>Description | Direktur Utama<br>President Director | Direktur Bisnis<br>Business Director | Direktur Keuangan<br>Finance Director |
|---|---|---|---|
| Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Keuangan<br>Completion of follow-up actions on the results of internal and external audits within the Finance Directorate | - | ✔ | - |
| Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Keuangan<br>Completion of follow-up actions in accordance with the directives of the Board of Commissioners for the Finance Directorate | - | ✔ | - |
| Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Bisnis<br>Completion of follow-up actions on the results of internal and external audits within the Business Directorate | - | - | ✔ |
| Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Bisnis<br>Completion of follow-up actions in accordance with the directives of the Board of Commissioners for the Business Directorate | - | - | ✔ |

Keterangan
✔: termasuk kriteria penilaian
- : tidak termasuk kriteria penilaian

Remarks
✔: included in the assessment criteria
- : not included in the assessment criteria

## Penilaian Penerapan GCG Untuk Aspek Direksi
Assessment of GCG Implementation for the Board of Directors

Penilaian penerapan GCG tahun buku 2025 untuk Aspek Direksi memperoleh nilai 93,463% dari skala 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan dengan Sangat Baik sesuai dengan hasil asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan pada kriteria standar alat uji Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The assessment of GCG implementation throughout the 2025 fiscal year for the Board of Directors obtained a score of 93.463% out of 100%. This result indicates that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities Very Well, in accordance with the assessment results of the Good Corporate Governance implementation based on the standard evaluation criteria set forth in the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 on Guidelines for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Adapun hasil penilaian kinerja Direksi secara individual adalah sebagai berikut:

The results of the individual performance assessment of the Board of Directors are as follows:

| Jabatan<br>Position | Skor Pencapaian KPI<br>KPI Achievement Score |
|---|---|
| Kolegial Collective | 103,02% dari target 100% 103.02% of the 100% target |
| Direktur Utama President Director | 104,99% dari target 100% 104.99% of the 100% target |
| Direktur Bisnis Business Director | 102,29% dari target 100% 102.29% of the 100% target |
| Direktur Keuangan Finance Director | 105,66% dari target 100% 105.66% of the 100% target |

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

The results of the evaluation of the Board of Directors' overall performance and the individual performance of each member constitute an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Directors.

## Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Reporting to the Board of Commissioners

Komite di bawah Dewan Komisaris PT PII terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Secara berkala Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian kinerja tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris.

The committees reporting the Board of Commissioners of IIGF consist of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. Periodically, the Board of Commissioners continuously conducts supervision and evaluation of the performance of these committees. This assessment is conducted to ensure the committees' effectiveness in carrying out their duties and responsibilities in supporting the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners.

## Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite

Policy and Procedures for Performance Assessment of the Committees

Kebijakan dan prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* Perseroan serta piagam masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris.

The policies and procedures for the performance assessment of committees reporting the Board of Commissioners refer to the Company's Board Manual as well as the charter of each committee reporting to the Board of Commissioners.

## Kriteria Penilaian Kinerja Komite

Criteria for Performance Assessment of the Committees

Sejalan dengan kebijakan penilaian kinerja Komite, penilaian kinerja Komite didasarkan pada tingkat realisasi dan penyelesaian program kerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Realisasi pelaksanaan tugas Komite, yang tercermin dalam laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja dan piagam Komite.
2. Frekuensi pelaksanaan rapat Komite, sebagai bentuk dukungan terhadap efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris.
3. Tingkat kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite sebagai indikator partisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas.

In line with the Committees' performance assessment policies, the evaluation is based on the level of realization and completion of work programs as stated in the Committees' Work Plan and Budget, with the following criteria:

1. The realization of committee duties, as reflected in reports on the implementation of duties according to the Committee's work program and charter.
2. The frequency of Committee meetings, as a form of support for the effectiveness of the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners.
3. The attendance rate of Committee members at Committee meetings as an indicator of active participation in carrying out their duties.

## Pihak yang Melakukan Penilaian Komite

Parties who Conduct Assessment of the Committee

Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) yang disusun oleh Komite. Hasil penilaian kinerja Komite selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

The performance assessment of the committees reporting the Board of Commissioners is conducted by the Board of Commissioners by taking into consideration the results of the self-assessment prepared by each Committee. The results of the Committee's performance assessment

melalui laporan berkala yaitu Laporan Triwulan Komite dan Laporan Tahunan Komite sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

are subsequently used as the basis for evaluation and are reported to the Board of Commissioners through periodic reports, namely the Committee Quarterly Report and the Committee Annual Report as part of the accountability for the implementation of Corporate Governance.

## Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Process of Performance Assessment of the Committees Reporting to the Board of Commissioners

### Penetapan Program Kerja Komite

Determination of Committees' Work Programs

**Setiap Komite menyusun dan menetapkan program kerja tahunan yang mengacu pada Piagam Komite dan diselaraskan dengan Program Kerja Dewan Komisaris yang selanjutnya Program Kerja Komite disepakati bersama dengan Dewan Komisaris**

Each Committee prepares and establishes an annual work program that refers to the Committee Charter and is aligned with the Board of Commissioners' Work Program, which is then jointly agreed upon by the Committee's Work Program with the Board of Commissioners.

### Evaluasi Kinerja Komite

Performance Evaluation of the Committees

**Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite berdasarkan realisasi program kerja, frekuensi rapat, tingkat kehadiran, serta kualitas dukungan Komite terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris.**

The Board of Commissioners evaluates the Committee's performance based on the realization of work programs, meeting frequency, attendance level, and the quality of the Committee's support for the Board of Commissioners' supervisory function.

### Penyampaian Hasil Penilaian

Submission of Evaluation Results

**Hasil penilaian kinerja Komite digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja Komite pada periode berikutnya serta menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas tata kelola Perseroan**

The results of the Committees' performance evaluations are used as a basis for improving their performance in the following period and serve as a consideration for the Board of Commissioners in enhancing the effectiveness of the Company's corporate governance.

## Hasil Penilaian Kinerja Komite Audit

Results of the Audit Committee's Performance Assessment

Komite Audit dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG. Untuk periode tahun buku 2025, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Pelaksanaan kinerja Komite Audit juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat internal Komite Audit. Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 26 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dirinci lebih lanjut di bagian pembahasan Komite Audit pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

The Audit Committee was established to strengthen the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners over the management of the Company in accordance with GCG principles. For the 2025 fiscal year, the Company's Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations as well as the Audit Committee's Charter. The performance of the Audit Committee is also measured by the attendance at meetings of the Board of Commissioners, joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and internal meetings of the Audit Committee. The Company's Audit Committee held 26 Audit Committee meetings and carried out a number of activities in fulfillment of its duties and responsibilities, as further detailed in the Audit Committee section in this chapter of the Annual Report.

## Hasil Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Results of the Risk Monitoring Committee's Performance Assessment

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris meningkatkan kualitas pengawasan melalui pemberian nasihat profesional kepada Dewan Komisaris terkait pengelolaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Untuk periode tahun buku 2025, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan kinerja Komite Pemantau Risiko juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat internal Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dirinci di bagian pembahasan Komite Pemantau Risiko pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

The Risk Monitoring Committee was established to assist the Board of Commissioners in enhancing the oversight quality by providing professional advice to the Board of Commissioners regarding the management of Enterprise Risk Management (ERM). For the 2025 fiscal year, the Company's Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations as well as the Risk Monitoring Committee's Charter. The performance of the Risk Monitoring Committee is also measured by the attendance at meetings of the Board of Commissioners, joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and internal meetings of the Risk Monitoring Committee. The Company's Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings and carried out a number of activities as part of the performance of its duties, as detailed in the Risk Monitoring Committee section in this chapter of the Annual Report.

## Hasil Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Results of the Nomination and Remuneration Committee's Performance Assessment

Pada tahun pelaporan, penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan Komite tersebut baru dibentuk pada bulan September 2025 sehingga periode pelaksanaan tugasnya masih terbatas.

During the reporting year, the performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee has not yet been conducted. This was due to the committee having been newly established in September 2025, resulting in a limited period of service.

Untuk periode tahun buku 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kepada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan (Kebijakan GCG) yaitu telah melaksanakan rapat khusus Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 1 kali, serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dirinci di bagian pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

For the 2025 fiscal year, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations and based on the Company's Good Corporate Governance Policy (GCG Policy), where it held one Nomination and Remuneration Committee meeting and carried out several activities as part of the implementation of its duties, as further detailed in the Nomination and Remuneration Committee section in this chapter of the Annual Report.

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala pada periode berikutnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi komite dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

The Company is committed to conducting periodic performance assessments of the Nomination and Remuneration Committee in the following periods as part of efforts to enhance the effectiveness of the committee's function in supporting the implementation of good corporate governance.

# Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

## Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan terkait nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada PMK No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan dan PMK No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2017.

Kriteria bakal calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam PMK No. 197/PMK.06/2019, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat umum:
   orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; atau
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Syarat Khusus:
   a. Sehat jasmani dan rohani;
   b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
   c. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
   d. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan; dan
   f. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
3. Syarat Lain:
   a. Bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

Policies related to the nomination and selection of members of the Board of Commissioners and Board of Directors refer to PMK No. 197/PMK.06/2019 concerning the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a State-Owned Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and PMK No. 78/PMK.06/2015 concerning the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a State-Owned Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, as amended several times, lastly by the Minister of Finance Regulation No. 135/PMK.06/2017.

The criteria for candidates of the Board of Commissioners, as regulated under PMK No. 197/PMK.06/2019, are as follows:

1. General requirements:
   Individuals who are capable of performing legal actions, unless within 5 (five) years before the appointment:
   a. Were declared bankrupt;
   b. were members of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board, who were found guilty of causing an SOE and/or a company to be declared bankrupt; or
   c. were punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
2. Specific requirements:
   a. Physically and mentally healthy;
   b. Have integrity and good morals;
   c. Have a strong will and high dedication;
   d. Understand the Company's management issues relating to one of the management functions;
   e. Have adequate knowledge of the Company's sector; and
   f. Can provide sufficient time to carry out his/her duties.
3. Other requirements:
   a. Shall not be a member of a political party, not a political party official, not a member of the legislature, and/or not currently running as a candidate for the legislature;

b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
c. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, paling kurang 1 (satu) tahun;
d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; dan
e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Kriteria bakal calon anggota Direksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2015, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Umum
   orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; atau
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Syarat Khusus, yaitu memiliki:
   a. kesehatan jasmani dan rohani;
   b. integritas dan moral;
   c. keahlian;
   d. kepemimpinan;
   e. pengalaman; dan
   f. kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Persyaratan lain untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi, yaitu:
1. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;

b. Shall not be a regional head/deputy regional head and/or not currently running as a candidate for regional head/deputy regional head;
c. Shall not serve as a member of the Board of Directors of the Company, for at least 1 (one) year;
d. Not currently holding a position that, based on statutory regulations, is prohibited from being concurrent with the position of a member of the Board of Commissioners, unless signing a statement letter of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Commissioners; and
e. Shall not serve as a member of the Board of Commissioners of the Company for 2 (two) consecutive service periods.

The criteria for candidates of the Board of Directors, as regulated under PMK Number 78/PMK.06/2015, are as follows:
1. General requirements:
   Individuals who are capable of performing legal actions, unless within 5 (five) years before the appointment:
   a. were declared bankrupt;
   b. were members of the Board of Directors or Board of Commissioners, who were found guilty of causing an SOE and/or a company to be declared bankrupt; or
   c. were punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.

2. Specific requirements:
   a. physically and mentally healthy;
   b. have integrity and good morals;
   c. skillful;
   d. have leadership character;
   e. have experience; and
   f. have a strong will and high dedication;

Other requirements to be elected as a member of the Board of Directors:
1. shall not be a member of a political party, not a political party official, not a member of the legislature, and/or not currently running as a candidate for the legislature;
2. shall not be a regional head/deputy regional head and/or not currently running as a candidate for regional head/deputy regional head;

3. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi/ Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
4. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi; atau
5. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

3. not currently serving as an official at central and/or local government agencies/institutions, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at SOEs, member of the Board of Directors at SOEs and/or companies, unless signing a statement letter of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors;
4. not currently holding a position, that, based on statutory regulations, is prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Directors, unless signing a statement letter of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors; or
5. shall not serve as a member of the Board of Directors of the Company for 2 (two) consecutive service periods.

## Tahapan dan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Stages and Procedures for Nominating the Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut tahapan nominasi hingga pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

The following are the stages of nomination and appointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors:

**Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

**Penyampaian pemberitahuan Dewan Komisaris kepada DJKN mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan yang segera habis/selesai.**
Notification from the Board of Commissioners to DJKN regarding members of the Board of Commissioners and Board of Directors whose terms of office will soon expire/end.

→

**Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)**
Director General of State Assets Management (DJKN)

**DJKN melakukan Penjaringan Bakal Calon Dewan Komisaris* dan Direksi****
DJKN conducts the selection/ screening of prospective candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors.

→

**TIM UKK**
FPP (Fit and Proper Test) Team

**Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Kementerian Keuangan melakukan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris dan Direksi**
The Ministry of Finance Fit and Proper Test (FPP) Team conducts assessments on candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors.

↓

**TIM UKK**
FPP (Fit and Proper Test) Team

**Hasil penilaian oleh Tim UKK dilaporkan kepada DJKN untuk kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Wakil Menteri.**
The assessment results by the FPP Team are reported to DJKN and subsequently submitted to the Minister through the Vice Minister via the GMS mechanism.

←

**RUPS**
GMS

**Proses Persetujuan Calon Dewan Komisaris dan Direksi oleh Menteri selaku RUPS yang dapat dilakukan melalui kuasa kepada Dirjen Kekayaan Negara**
The approval process of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors by the Minister acting as the GMS which can be done through power of attorney to the Director General of State Assets Management

←

**RUPS**
GMS

**Penetapan dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi oleh Menteri selaku RUPS.**
The determination and appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors by the Minister acting as the GMS.

* Bakal Calon Dewan Komisaris Perseroan diseleksi dari:
1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural Pemerintah;
4. Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
5. Orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

*Candidates for the Company's Board of Commissioners are selected from:
1. Former Directors of SOEs;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;
3. Government Structural Officials;
4. Government Functional Officers; or
5. Other individuals who are considered capable of becoming members of the Board of Commissioners.

Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat internal Kementerian Keuangan ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (TPKOMWAS).

** Bakal Calon Direksi Perseroan diseleksi dari:
1. Internal Perseroan, terdiri atas anggota Direksi; dan/atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa.
2. Eksternal Perseroan, dalam hal:
   a. Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal Perseroan dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan kepada DJKN; atau
   b. Dari hasil penilaian akhir oleh Tim UKK terhadap Bakal Calon dari internal Perseroan tidak diperoleh calon yang memenuhi kualifikasi.

Candidates of the Board of Commissioners who come from internal officers of the Ministry of Finance are set forth in accordance with the Minister of Finance's decree by considering recommendations from the Advisory Team for the Board of Commissioners at State-Owned Enterprises and the Supervisory Board at Public Service Agency (TPKOMWAS).

** Bakal Calon Direksi Perseroan diseleksi dari:
1. The company's internal, consisting of members of the Board of Directors; and/or officers one level below the Board of Directors, or officers with special achievements.
2. The company's external, in the event that:
   a. The Board of Commissioners does not submit proposals for internal candidates to DJKN.
   b. The final assessment by the UKK Team of the Candidates from the Company's internal did not result in candidates who met the qualifications.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, besaran gaji dan tunjangan Direksi dirumuskan dan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk dimintakan persetujuannya.

Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 sedangkan petunjuk teknis tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 200/2018").

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company refers to Article 96 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Meanwhile, the amount of salaries and allowances for the Board of Directors is formulated and proposed by the Board of Commissioners to the GMS for approval.

Such authority may be delegated to the Board of Commissioners pursuant to Article 96, paragraph 2 of Law No. 40 of 2007. Furthermore, the technical guidelines on the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors are further regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.06/2018 concerning the Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance ("PMK 200/2018").

## Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedures for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

### Direksi
Board of Directors

**Direksi mengajukan usulan remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris beserta kajiannya.**
The Board of Directors submits a remuneration proposal for the Board of Directors and related review to the Board of Commissioners.

### Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- **Melakukan kajian terkait dengan penetapan remunerasi. Kajian ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak independen.**
- **Mempelajari usulan dari Direksi dan pihak independen (jika ada) untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS**
- Conducts a review related to the determination of remuneration. This review may be carried out with assistance from an independent party.
- Reviews the proposal from the Board of Directors and independent parties (if any) before submitting it to the GMS.

### RUPS
GMS

- **Melakukan kajian terhadap usulan dari Dewan Komisaris.**
- **Memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.**
- Conducts a review of the proposal from the Board of Commissioners.
- Provides approval and determines the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.

## Indikator untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Terkait penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris berupa Gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap, Perseroan berpedoman pada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan yang mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Penghasilan tahun sebelumnya.
2. Tingkat inflasi.
3. Kinerja operasi dan keuangan Perseroan serta pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU)
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, termasuk pertimbangan atas sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
5. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya.
6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regarding the determination of remnueration of the Board of Directors and Board of Commissioners in the form of Salary and/or Honorarium, Allowances, and Facilities, which are of a fixed nature, the Company refers to the GMS resolutions, considering the results of the Company's assessment, which include the following aspects:

1. Remuneration in the previous year.
2. Inflation rate.
3. The Company's operational and financial performance, as well as the achievement of Key Performance Indicators (KPI).
4. The Company's financial condition and capacity, including consideration of the Company's long-term targets and strategies.
5. Reasonableness compared with peer companies.
6. Applicable laws and regulations.

## Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Structure and Components of the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 dalam agenda penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2024 *juncto* Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 264/MK/KN/2025 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2024 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 ("KPPS 264/MK/KN/2025"), dengan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The provision of remuneration to each member of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2025 was implemented based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year held on 6 May 2025 with agenda to determine the salaries/honorarium and allowances/facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on performance for the 2024 Fiscal Year, in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the State-Owned Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund No. 264/MK/KN/2025 on the Approval of the Payment of Tantiem for Fiscal Year 2024 and the Determination of the Board of Directors' Salaries, the Board of Commissioners' Honorarium, as well as the Allowances and Facilities Granted to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year ("KPPS 264/MK/KN/2025") with the following structure:

| Keterangan<br>Description | Struktur Remunerasi Dewan Komisaris<br>Board of Commissioners' Remuneration Structure | Struktur Remunerasi Direksi<br>Board of Directors' Remuneration Structure |
|---|---|---|
| Struktur Remunerasi Jangka Pendek<br>Short-Term Remuneration Structure | • Honorarium<br>• Tunjangan<br>• Fasilitas<br>• Tantiem/Insentif Kinerja<br>• Penghasilan Lainnya<br>• Honorarium<br>• Allowances<br>• Facilities<br>• Tantiem/Performance Incentives<br>• Other Income | • Gaji dan/atau Honorarium<br>• Tunjangan<br>• Fasilitas<br>• Tantiem/Insentif Kinerja<br>• Penghasilan Lainnya<br>• Salary and/or Honorarium<br>• Allowances<br>• Facilities<br>• Tantiem/Performance Incentives<br>• Other Income |

| Keterangan<br>Description | Struktur Remunerasi Dewan Komisaris<br>Board of Commissioners' Remuneration Structure | Struktur Remunerasi Direksi<br>Board of Directors' Remuneration Structure |
|---|---|---|
| Struktur Remunerasi Jangka Panjang<br>Long-Term Remuneration Structure | Hingga akhir tahun 2025, Perseroan belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan jangka Panjang untuk Dewan Komisaris<br>As of the end of 2025, the Company has not implemented Remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Commissioners | Hingga akhir tahun 2025, Perseroan belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan jangka panjang untuk Direksi<br>As of the end of 2025, the Company has not implemented Remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Directors |

## Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Remuneration Components of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

| Komponen Remunerasi & Fasilitas Lain<br>Remuneration Components & Other Benefits | Jumlah diterima dalam 1 (Satu) Tahun (dalam ribuan Rupiah)<br>Amount Received in 1 (One) Year (in thousand Rupiah) | |
|---|---|---|
| | 2025 | 2024 |
| Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners | 10.198.586 | 9.794.519 |
| Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors | 20.007.560 | 22.976.952 |
| **Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**<br>**Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors** | **30.206.146** | **32.771.471** |

Sesuai dengan PMK 200/2018, komponen gaji anggota Direksi lainnya adalah sebesar 90% dari gaji Direktur Utama dan honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

In accordance with PMK 200/2018, the salary of other members of the Board of Directors is set at 90% of the President Director's salary, while the honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary. Meanwhile, the honorarium of members of the Board of Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.

## Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham

Non-Performance Bonuses and Stock Options

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PT PII.

Until 31 December 2025, there were no Non-Performance Bonuses and Stock Options granted to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of IIGF.

# Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Serta Kepemilikan MSOP dan ESOP

## Performance-Based Long-Term Compensation and MSOP/ESOP Ownership

Kebijakan remunerasi PT PII saat ini difokuskan pada pemberian penghasilan tetap serta remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja jangka pendek. Hingga akhir tahun buku 2025, PT PII belum mengimplementasikan skema kompensasi atau insentif jangka panjang (*Long Term Incentive*/LTI) berbasis kinerja, baik bagi Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan.

IIGF's remuneration policy currently focuses on providing fixed income and remuneration linked to short-term performance. As of the end of the 2025 fiscal year, IIGF has not implemented any performance-based compensation or long-term incentive (LTI) scheme for the Board of Directors, Board of Commissioners, or employees.

Selain itu, Perseroan juga tidak terlibat dalam perdagangan saham di bursa efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP) termasuk informasi jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga pelaksanaan (*exercise*) yang dapat diungkapkan oleh Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

In addition, the Company is not listed or involved in share trading on any stock exchange. Accordingly, there is no information regarding a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP), including information on the number of ESOP/MSOP shares and their realization, program period, eligibility requirements for employees and/or management, as well as the exercise price, to be disclosed by the Company in this Annual Report.

# Informasi Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

## Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Untuk memperoleh masukan dan pandangan yang lebih komprehensif dalam rangka pengambilan keputusan yang objektif dan optimal, maka Perseroan memiliki ketentuan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya dalam rangka memperkaya sudut pandang, keberagaman komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi aspek operasional serta memajukan usaha Perseroan, dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan.

In order to obtain more comprehensive insights and perspectives to support objective and optimal decision-making, the Company has provisions regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. In addition to enriching perspectives, diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is expected to provide added value to operational aspects, as well as advance the Company's business and enhance the quality of Corporate Governance.

Penentuan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mempertimbangkan aspek keberagaman keahlian, kompetensi, pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The determination of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has considered aspects of diversity in expertise, competencies, knowledge, educational background, and work experience in accordance with the requirements of the duties and authorities of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tercermin pada tabel di bawah ini:

The diversity in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is reflected in the table below:

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2025

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners in 2025

| | | |
|---|---|---|
| Jabatan<br>Position | Terdapat 3 (tiga) orang Komisaris yaitu yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) anggota Komisaris | There are 3 (three) Commissioners, i.e., 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Commissioners. |
| Usia<br>Age | Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif, yaitu 50 tahun – 63 tahun. | The age diversity of the members of the Board of Commissioners falls within a productive age range of 50 - 63 years old. |
| Pendidikan<br>Education | Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Magister dan Doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Hukum, Manajemen Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Akuntansi. | The educational background of the members of the Board of Commissioners includes, Master's, and Doctoral degrees in various fields such as Law, Financial Management, Monetary Economics, and Accounting. |
| Pengalaman Kerja<br>Work Experience | Pengalaman kerja yang beragam, antara lain Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Perbankan, Pembiayaan Infrastruktur, Administrasi, Akuntansi, Manajemen Risiko, dan Hukum. | Diverse professional experience, including positions as Officials and/or Senior Executives or other key roles in the fields of Finance, Banking, Infrastructure Financing, Administration, Accounting, Risk Management, and Law. |

## Keberagaman Komposisi Direksi Tahun 2025

Diversity in the Composition of the Board of Directors in 2025

| | | |
|---|---|---|
| Jabatan<br>Position | Terdapat 3 (tiga) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis, namun pada 15 Juli 2025 Plt. Direktur Utama dijabat oleh Direktur Bisnis | There are 3 (three) Directors, i.e., President Director, Finance Director, and Business Director. However, as of 15 July 2025, the Acting President Director position has been held by the Business Director. |
| Usia<br>Age | Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang produktif, yaitu 47 tahun – 49 tahun. | The age diversity of the members of the Board of Directors falls within a productive age range of 47 to 49 years old. |
| Pendidikan<br>Education | Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana dan Doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Akuntansi, Manajemen Risiko, *Project Finance*, Teknik Sipil, Teknik bidang Manajemen Proyek | The educational background of the members of the Board of Directors includes Bachelor's, Doctoral degrees in various fields such as Accounting, Risk Management, Project Finance, Civil Engineering, and Engineering in Project Management. |
| Pengalaman Kerja<br>Work Experience | Pengalaman kerja yang beragam, antara lain Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Akuntansi, *Business Development, Risk & Compliance* dan Audit. | Diverse work experience, including positions as Officials, and/or Senior Executives or other key roles in the fields of Finance, Accounting, Business Development, Risk & Compliance, and Audit. |

# Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

## Working Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan prinsip-prinsip dasar hubungan kerja yang diatur dalam *Board Manual* Bab IV tentang Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perseroan sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan pembagian kewenangan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Ruang lingkup yang diatur dalam Kebijakan tersebut antara lain:

1. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham
3. Respon atas Peluang Bisnis dan Isu Terkini
4. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal
6. Penambahan Penyertaan Modal Negara
7. Program Pengenalan Perseroan
8. Program Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
11. Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi
12. Etika Berusaha

Implementasi pedoman hubungan kerja tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala, penyampaian laporan kinerja dan perkembangan Perseroan oleh Direksi, serta pembahasan isu strategis, peluang bisnis, dan risiko utama. Selain itu, pelaksanaan RUPS, mekanisme persetujuan atas perbuatan Direksi tertentu, penunjukan Kantor Akuntan Publik, serta penerapan tata komunikasi dan etika berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan tersebut, sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa terjaga guna mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pencapaian kinerja Perseroan secara berkelanjutan

In order to establish an integrated, sustainable, and accountable working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors, common perception and communication shall be established between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Therefore, the Board of Commissioners and the Board of Directors have established fundamental principles governing their working relationship as stipulated in the Board Manual Chapter IV on the Working Relationship among the Company's Organs, which serves as a reference for the implementation of coordination, communication, and the division of authority between the Board of Commissioners and Board of Directors.

The scope regulated in the Policy includes, among others:

1. Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
2. General Meeting of Shareholders
3. Response to Business Opportunities and Current Issues
4. Actions of the Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners or the GMS
5. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) as the External Auditor
6. Additional State Capital Participation
7. Company Orientation Program
8. Training Program for the Board of Commissioners and Board of Directors
9. International Business Trip
10. Communication and Correspondence Procedures between the Board of Directors and Board of Commissioners
11. Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors
12. Business Ethics

The implementation of the aforementioned manual is realized through regular joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the submission of performance reports and updates on the Company's developments by the Board of Directors, and discussions on strategic issues, business opportunities, and key risks. In addition, the implementation of the GMS, the approval mechanism for actions by the Board of Directors, the appointment of the Public Accounting Firm, as well as the implementation of communication procedures and business ethics, are carried out in accordance with the applicable provisions. Through these practices, the synergy between the Board of Commissioners and Board of Directors is consistently maintained to support the implementation of Good Corporate Governance and the achievement of the Company's sustainable performance.

# Komite di Bawah Dewan Komisaris

## Committee Reporting to the Board of Commissioners

Pada tahun 2025, PT PII membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga Komite di bawah Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2025 adalah:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;

Dengan demikian, Komite di bawah Dewan Komisaris PT PII telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 pasal 28.

In 2025, IIGF established the Nomination and Remuneration Committee, therefore, the Committee reporting to the Board of Commissioners of IIGF as of 31 December 2025 were:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Nomination and Remuneration Committee.

Accordingly, the Committee reporting to the Board of Commissioners of IIGF are in accordance with the provisions as governed in Article 28 of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015.

## Komite Audit

### Audit Committee

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Audit telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam piagam Komite Audit yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Mampu berkomunikasi secara efektif.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa atestasi, jasa non-atestasi dan/atau jasa konsultansi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
5. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
7. Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Audit.

The appointment and dismissal of Audit Committee members are carried out by the Board of Commissioners. The appointment of Audit Committee members is in accordance with the requirements set forth in the Audit Committee charter:

1. Shall have good integrity, competence, and sufficient work experience in the audit sector.
2. Shall be able to communicate effectively.
3. Members of the Audit Committee who are from the Company's external party are prohibited from having familial relationship that extend up to the third degree, either directly or indirectly, with other members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
4. Shall not be a person in a Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, or other party providing attestation services, non-attestation services, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 months.
5. Shall not be a person who works for the Company and has the authority and responsibility to plan, lead, or control and supervise the Company's activities within the last 6 months.
6. Shall not have any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.
7. Shall have no interests and other relationships that may affect their ability to act independently as members of the Audit Committee.

## Masa Jabatan Komite Audit
Term of Office of the Audit Committee

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Audit yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Audit Committee shall have a term of office not exceeding the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.

Meanwhile, the term of office of the Audit Committee is a maximum of 3 (three) years, and can be extended for one more period, without reducing the Board of Commissioners' right of termination at any time.

## Susunan Keanggotaan Komite Audit 2025
Composition of Audit Committee in 2025

Jumlah Komite Audit per 31 Desember 2025 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite Audit dan 2 (orang) sebagai anggota Komite Audit. Pada tahun 2025, terdapat perubahan susunan anggota Komite Audit dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian anggota komite dan Dewan Komisaris Perseroan. Berikut perubahan susunan Komite Audit sepanjang tahun 2025:

The Audit Committee, as of 31 December 2025, had 3 (three) members, consisting of 1 (one) Chairman of Audit Committee and 2 (two) members of Audit Committee. In 2025, there were changes in the composition of the Audit Committee with the appointment and dismissal of committee members and members of the Company's Board of Commissioners. The following were changes to the composition of the Audit Committee throughout 2025:

| Komite Audit<br>Periode 1 Januari 2025 – 30 April 2025<br>Audit Committee<br>Period: 1 January 2025 – 30 April 2025 | | | Komite Audit<br>Periode 1 Mei 2025 – 19 Desember 2025<br>Audit Committee<br>Period: 1 May 2025 – 19 December 2025 | | | Komite Audit<br>Periode 20 Desember 2025 - 31 Desember 2025<br>Audit Committee<br>Period: 20 December 2025 – 31 December 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama<br>Name | Jabatan di Perseroan<br>Position in the Company | Jabatan Komite Audit<br>Position in the Audit Committee | Nama<br>Name | Jabatan di Perseroan<br>Position in the Company | Jabatan Komite Audit<br>Position in the Audit Committee | Nama<br>Name | Jabatan di Perseroan<br>Position in the Company | Jabatan Komite Audit<br>Position in the Audit Committee |
| Ahmad Ghufron | Komisaris<br>Commissioner | Ketua Komite Audit<br>Chairman of Audit Committee | Ahmad Ghufron | Komisaris<br>Commissioner | Ketua Komite Audit<br>Chairman of Audit Committee | Bhimantara Widyajala | Komisaris<br>Commissioner | Ketua Komite Audit<br>Chairman of Audit Committee |
| Shartika Nirmala Dewi | - | Anggota Komite Audit<br>Member of Audit Committee | Shartika Nirmala Dewi | - | Anggota Komite Audit<br>Member of Audit Committee | Shartika Nirmala Dewi | - | Anggota Komite Audit<br>Member of Audit Committee |
| - | - | Anggota Komite Audit<br>Member of Audit Committee | Vidvant Brahmantyo | - | Anggota Komite Audit<br>Member of Audit Committee | Vidvant Brahmantyo | - | Anggota Komite Audit<br>Member of Audit Committee |

Susunan anggota Komite Audit telah sesuai dengan yang diatur dalam PMK No.88/PMK.06/2015 pasal 45 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan yang mengatur bahwa struktur dan keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai ketua yang dijabat oleh Sdr. Bhimantara Widyajala; dan
2. 1 (satu) orang pihak independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang usaha Perseroan yaitu Sdr. Vidvant Brahmantyo.
3. 1 (satu) orang pihak independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi yaitu Sdri. Shartika Nirmala Dewi

The composition of the Audit Committee are in accordance with the stipulation in PMK No. 88/PMK.06/2015 Article 45 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, which regulates that the structure and composition of Audit Committee are:

1. One (1) member of the Board of Commissioners as Chairman, Mr. Bhimantara Widyajala; and
2. One (1) independent party as a member with expertise in the Company's business, Mr. Vidvant Brahmantyo.
3. One (1) independent party as a member with expertise in finance and accounting, Mrs. Shartika Nirmala Dewi

## Profil Komite Audit 2025

Profile of Audit Committee in 2025

Berikut profil Komite Audit per 31 Desember 2025:

The following is the Audit Committee profile as of 31 December 2025:



### Bhimantara Widyajala

**Ketua Komite Audit/Komisaris**
Chairman of the Audit Committee/Commissioner

Penjelasan lebih lanjut di uraikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Ini
Further information can be referred to in the Company Profile chapter, subchapter of Board of Commissioners' Profile in this Annual Report.

| | | |
|---|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan<br>Legal Basis of Appointment | KMK No. 369 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-012/KOM/1225 tanggal 20 Desember 2025 | KMK No. 369 of 2025 dated 19 December 2025 and Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-012/KOM/1225 dated 20 December 2025 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| Masa Jabatan<br>Tenure | Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris | Following the term of office as Board of Commissioners |



### Vidvant Brahmantyo

**Anggota Komite Audit**
Audit Committee Member

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Domisili Domicile | Depok, Jawa Barat, Indonesia | Depok, West Java, Indonesia |
| Usia Age | 46 tahun per 31 Desember 2025 | 46 years old as of 31 December 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **Tempat/Tanggal Lahir**<br>Place/Date of Birth | Yogyakarta, 5 Desember 1979 | Yogyakarta, 5 December 1979 |
| **Riwayat Pendidikan**<br>Educational Background | • Magister Manajemen Strategis, Universitas Prasetiya Mulya<br>• Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia | • Master of Strategic Management, Universitas Prasetiya Mulya<br>• Bachelor of Economics, Accounting Department, Universitas Indonesia |
| **Riwayat Jabatan**<br>Career History | • Anggota Komite Audit, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2023 - 2025)<br>• Direktur Utama, PT Cekindo Business International (2021 - 2025)<br>• Anggota Komite Audit, PT Rajawali Nusindo (2021 - 2023)<br>• Partner, PT RSM Indonesia Konsultan (2018 – 2021)<br>• Manajer – Direktur, PT Deloitte Konsultan Indonesia (2011 – 2018)<br>• Manajer Internal Audit, PT Swiss-Belhotel International (2010 - 2011)<br>• Senior Consultant, PT Deloitte Konsultan Indonesia (2007 – 2010) | • Audit Committee Member, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2023 - 2025)<br>• President Director, PT Cekindo Business International (2021 - 2025)<br>• Audit Committee Member, PT Rajawali Nusindo (2021 - 2023)<br>• Partner, PT RSM Indonesia Konsultan (2018 - 2021)<br>• Manager - Director, PT Deloitte Konsultan Indonesia (2011 - 2018)<br>• Internal Audit Manager, PT Swiss-Belhotel International (2010 - 2011)<br>• Senior Consultant, PT Deloitte Konsultan Indonesia (2007 - 2010) |
| **Rangkap Jabatan**<br>Concurrent Positions | • Dalam Perseroan:<br>- Tidak ada<br>• Diluar Perseroan:<br>- Direktur Utama, PT Ekspansi Bisnis Indonesia (2025 - sekarang)<br>- Anggota Komite Audit, PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk. (2019 - sekarang) | • In the Company:<br>- None<br>• Outside the Company:<br>- President Director, PT Ekspansi Bisnis Indonesia (2025 - present)<br>- Member of Audit Committee, PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk. (2019 - present) |
| **Sertifikasi**<br>Certification | • *Chartered Accountant* (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)<br>• *Certified Internal Auditor* (CIA) dari Institute of Internal Auditors (IIA)<br>• *Certified Fraud Examiner* (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) | • Chartered Accountant (CA) from the Indonesian Institute of Accountants (IAI)<br>• Certified Internal Auditor (CIA) from the Institute of Internal Auditors (IIA)<br>• Certified Fraud Examiner (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>Legal Basis of Appointment | Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-001/KOM/0525 tanggal 1 Mei 2025 | Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-001/KOM/0525 dated 1 May 2025 |
| **Periode jabatan**<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| **Masa Jabatan**<br>Tenure | 1 Mei 2025 s.d. 30 April 2028 | 1 May 2025 to 30 April 2028 |



## Shartika Nirmala Dewi

**Anggota Komite Audit**
Audit Committee Member

| | | |
|---|---|---|
| **Kewarganegaraan**<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| **Domisili** Domicile | Jakarta | Jakarta |
| **Usia** Age | 40 tahun per 31 Desember 2025 | 40 years old as of 31 December 2025 |
| **Tempat/Tanggal Lahir**<br>Place/Date of Birth | Jakarta, 20 September 1985 | Jakarta, 20 September 1985 |

| | | |
|---|---|---|
| **Riwayat Pendidikan**<br>**Educational Background** | • Magister Manajemen Keuangan, Melbourne Business School, The University of Melbourne, Australia<br>• Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Universitas Indonesia<br>• Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia | • Master of Management Finance, Melbourne Business School, The University of Melbourne, Australia<br>• Profession in Accounting, Accountants Profession Education (PPAk), Universitas Indonesia<br>• Bachelor of Economics, majoring in Accounting, Universitas Indonesia |
| **Riwayat Jabatan**<br>**Career History** | Sebelum menjabat sebagai Komite Audit di PT PII, beliau pernah menduduki berbagai jabatan diantaranya sebagai Komite Pemantau Risiko – PT Geo Dipa Energi (Persero) (2021-September 2024), Kepala Seksi PKN I Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, DJKN, Kementerian Keuangan (2019-2021), Pelaksana Direktorat KND, DJKN, Kementerian Keuangan (2010-2019), Posisi terakhir sebagai Senior Associate pada KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) di Jakarta (2008-2010), Konsultan Keuangan pada PT Prima Mitra Edukarya (2007-2008). | Prior to serving as the IIGF's Audit Committee, she held various positions including as Risk Oversight Committee - PT Geo Dipa Energi (Persero) (2021-September 2024), Section Head in State Assets Management I, Regional Office of DJKN South Sumatra, Jambi, and Bangka Belitung, Directorate General of State Assets Management in Ministry of Finance (2019- 2021), Staff at Directorate of Segregated State Assets, Directorate General of State Assets Management in Ministry of Finance (2010-2019), Last position as Senior Associate in KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers network) in Jakarta (2008-2010), Financial Consultant in PT Prima Mitra Edukarya (2007-2008). |
| **Rangkap Jabatan**<br>**Concurrent Positions** | • Dalam Perseroan:<br>- Tidak ada<br>• Diluar Perseroan:<br>- Kepala Seksi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan IA, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. | • In the Company:<br>- None<br>• Outside the Company:<br>- Head of Directorate of Separated State Assets IA, Directorate General of State Assets Management, Ministry of Finance. |
| **Sertifikasi**<br>**Certification** | • *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) from Lembaga Profesi Manajemen Risiko (LSP MKS)<br>• *Certification in Audit Committee Practices from* Indonesian Institute of Audit Committee<br>• *Chartered Accountant* by Ikatan Akuntansi Indonesia | • Qualified Risk Management Analyst (QRMA) from Risk Management Professional Agency (LSP MKS)<br>• Certification in Audit Committee Practices from the Indonesian Institute of Audit Committee<br>• Chartered Accountant by Institute of Indonesia Chartered Accountants |
| **Dasar Hukum Pengangkatan**<br>**Legal Basis of Appointment** | Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-003/KOM/1024 tanggal 1 Oktober 2024 | Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-003/KOM/1024 dated 1 October 2024 |
| **Periode jabatan**<br>**Term of Office** | Periode Pertama | First Period |
| **Masa Jabatan Tenure** | 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2027 | 1 October 2024 to 30 September 2027 |

## Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit
Statement of Independence of Audit Committee Members

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Audit Committee have fulfilled all independence criteria and shall be able to carry out their duties independently, uphold the Company's interests, and cannot be influenced by any party.

### Tabel Independensi Komite Audit Tahun 2025
Table Independence of Audit Committee in 2025

| Aspek Independensi<br>Independence Aspect | | Bhimantara Widyajala | Vidvant Brahmantyo | Shartika Nirmala Dewi |
|---|---|---|---|---|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Shall not have a financial affiliation with the Board of Commissioners and Board of Directors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan | Shall not have a shareholding relationship in the Company | ✔ | ✔ | ✔ |

| Aspek Independensi<br>Independence Aspect | | Bhimantara Widyajala | Vidvant Brahmantyo | Shartika Nirmala Dewi |
|---|---|---|---|---|
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit | Shall not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah | Shall not serve as an administrator of political parties, officials, and the government | ✔ | ✔ | ✔ |

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen

Remark: √ : Independent ×: Not Independent

## Piagam Komite Audit
Audit Committee Charter

Untuk memastikan Komite Audit dapat menjalankan perannya secara optimal dan efisien, telah disusun Piagam Komite Audit yang diperbarui dan disahkan terakhir kali oleh Dewan Komisaris pada tanggal 2 Juni 2025. Ruang lingkup Piagam Komite Audit antara lain mengatur terkait:

1. Latar belakang, dasar hukum, dan maksud dan tujuan;
2. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan kode etik;
3. Pola hubungan kerja;
4. Struktur dan persyaratan keanggotaan;
5. Masa jabatan;
6. Program/rencana kerja tahunan;
7. Rapat;
8. Penanganan pengaduan dan pelaporan; dan
9. Program pengenalan anggota baru dan evaluasi kinerja.

To ensure that the Audit Committee can carry out its role optimally and efficiently, an Audit Committee Charter is prepared, lastly updated and ratified by the Board of Commissioners on 2 June 2025. The scope of the Audit Committee Charter regulates, among others:

1. Background, legal basis, and aims and objectives;
2. Duties, responsibilities, authorities, and code of conduct;
3. Work relationship patterns;
4. Structure and membership requirements;
5. Term of office;
6. Annual work program/plan;
7. Meetings;
8. Complaint handling and reporting; and
9. New member induction program and performance evaluation.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Duties and Responsibilities of Audit Committee

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Audit diberikan kewenangan yang sejalan dengan lingkup tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, terutama terkait kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit dimuat dalam Piagam Komite Audit, yaitu adalah:

To support the effective implementation of its duties, the Audit Committee is granted authority in line with the scope of duties, obligations, and responsibilities of the Board of Commissioners, as stipulated in the Company's Articles of Association, specifically related to activities that require the Board of Commissioners' attention on matters related to financial statements, internal control systems, implementation of internal and external audit functions, and compliance with applicable laws and regulations.

The provisions of duties and responsibilities of the Audit Committee are stipulated in the Audit Committee Charter as follows:

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal;
   b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
   d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
5. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur *review* terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
7. Komite Audit melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

1. The Audit Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of duty implementation of Internal Auditor and External Auditor by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits, as well as monitoring the follow-up on audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process.
2. In performing the duties referred to in point 1 above, the Audit Committee shall at least monitor and evaluate the following matters:
   a. implementation of duties of the Internal Audit Division;
   b. conformity of audit by Public Accounting Firm with applicable audit standards;
   c. conformity of financial statements with applicable accounting standards; and
   d. implementation of follow-up by the Board of Directors on findings of Internal Auditor and External Auditor.
3. The Audit Committee is required to provide recommendations on the appointment of Public Accounting Firm to the Board of Commissioners.
4. The Audit Committee provides recommendations on improvements to the management control system and its implementation.
5. The Audit Committee identifies matters that require the Board of Commissioners' attention and performs other duties of the Board of Commissioners
6. The Audit Committee ensures that the procedures of review are in place for all information released by the Company.
7. The Audit Committee performs other duties assigned by the Board of Commissioners.

## Hak dan Wewenang Komite Audit

Rights and Authorities of Audit Committee

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi tentang karyawan, aset, utang, modal, dana dan sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Meminta keterangan dan melakukan komunikasi dengan para pejabat dan pegawai Perseroan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, menajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

As stated in the Audit Committee Charter, the Audit Committee has the authority to:

1. Have full, free, and unrestricted access to documents, data, and information regarding employees, assets, debts, capital, funds, and other Company resources related to its duties implementation.
2. Request information and communicate with Company officials and employees, including the Board of Directors and parties responsible for internal audit, risk management, and external auditors, regarding Audit Committee duties and responsibilities.

3. Mencari dan memperoleh informasi dan dokumen dari pihak di luar Perseroan, jika diperlukan, dalam rangka peningkatan kemampuan anggota Komite Audit.
4. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

3. Seek and obtain information and documents from parties outside the Company, if necessary, to improve the capabilities of Audit Committee members.
4. Involve independent parties outside the Audit Committee members as necessary to assist in the implementation of its duties implementation (if necessary), with the approval of the Board of Commissioners.
5. Exercise other authority granted by the Board of Commissioners.

## Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Segregation of Duties And Responsibilities in Audit Committee

Sesuai dengan tugasnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta terhadap penerapan rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses penyajian pelaporan keuangan yang andal.

In line with the duties to assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of external auditors and internal auditors, the Audit Committee monitors and evaluates the planning and implementation of audits and follow-up recommendations on audit results, to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the process for preparing reliable financial reporting.

Sehubungan dengan hal itu, Komite Audit memberikan pendapat dan saran/masukan profesional kepada Dewan Komisaris melalui sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas piagam audit internal.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas rencana audit tahunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
4. Menyusun kerangka acuan kerja bagi pengadaan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan standar audit yang berlaku, menilai kinerja dan kualitas hasil audit, dan mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.

Therefore, the Audit Committee provides opinions and professional advice/input to the Board of Commissioners through several activities related, but not limited to:

1. Evaluating the policy and implementation of the internal control system.
2. Reviewing and evaluating the internal audit charter.
3. Reviewing and evaluating the annual audit plan, implementation and reporting of internal audit results, and the implementation of follow-up by the Board of Directors on internal auditor findings.
4. Preparing terms of reference for the procurement of external auditors and providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of external auditors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
5. Monitoring and evaluating the conformity of audit by the external auditor with the applicable audit standards, assessing the audit performance and quality, and proposing the termination of the relationship with the external auditor to the Board of Commissioners if there is a strong indication that the independence of the external auditor is impaired or it is proven that the external auditor does not conduct the audit in accordance with the applicable audit standards.
6. Monitoring the follow-up of the external auditor's findings and recommendations by the Board of Directors.

7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, standar, dan pedoman akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses penyusunan laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta rencana jangka panjang Perseroan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas laporan keuangan interim dan tahunan serta laporan manajemen periodik.
10. Melakukan penelaahan atas informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pihak lain dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
12. Melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
13. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaan kerja tim investigasi pelaporan pelanggaran, atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
14. Menyusun pedoman kerja Komite Audit yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
15. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
16. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. Reviewing and evaluating the suitability of accounting policies, standards, and guidelines, with generally accepted financial accounting standards.
8. Monitoring and evaluating the process of preparing financial statements to ensure that the financial statements prepared by management have presented the financial condition and the Company's operations fairly in accordance with applicable financial accounting standards.
9. Monitoring and evaluating the preparation and implementation of the Company's work program and budget as well as the Company's long-term plan by reviewing and evaluating the interim and annual financial statements and regular management reports.
10. Reviewing the information released by the Company to other parties and the Company's compliance with laws and regulations.
11. Ensuring there have been satisfactory review procedures for all information issued by the Company.
12. Reviewing and examining complaints relating to reported members of the Board of Directors, members or organs of the Board of Commissioners.
13. Supervising and directing the whistleblowing investigation team, on complaints relating to reported members of the Board of Directors, members or organs of the Board of Commissioners.
14. Preparing the Audit Committee working manual as a reference in performing duties and responsibilities and submitting them to the Board of Commissioners to be determined through a Decision Letter of the Board of Commissioners.
15. Identifying matters that require the Board of Commissioners' attention and duties of the Board of Commissioners.
16. Exercising other duties assigned by the Board of Commissioners.

## Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee Training/ Competency Improvement Program

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Audit untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Audit agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

The Company provides opportunities for the Audit Committee members to participate in competency development program to improve their insight and knowledge to support the duties of the Audit Committee, so that it is always relevant to the latest developments in the Company's business activities.

Kegiatan peningkatan pelatihan/kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The training/competency development activities attended by Audit Committee members throughout 2025 were as follows:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer | Waktu Pelaksanaan<br>Time |
|---|---|---|---|---|
| Bhimantara Widyajala[1] | Ketua Komite Audit<br>Chairman of Audit Committee | Disajikan pada sub bab Dewan Komisaris bagian Pelaksanaan Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini<br>Disajikan pada sub bab Dewan Komisaris bagian Pelaksanaan Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini | | |
| Ahmad Ghufron[2] | Anggota Komite Audit<br>Audit Committee Member | *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era.* | Enterprise Risk Management Academy | 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025 |
| Shartika Nirmala Dewi | Anggota Komite Audit<br>Audit Committee Member | • *Training "Whistleblowing Management System* ISO 37002"<br>• *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era.*<br>• *Risk Beyond* 2025 *on Enterprise Risk Management* | • Chesna Certification<br>• Enterprise Risk Management Academy<br>• Enterprise Risk Management Academy | • 8 Juli 2025<br>8 July 2025<br>• 21-22 September 2025<br>21-22 September 2025<br>• 4-5 Desember 2025<br>4-5 December 2025 |
| Vidvant Brahmantyo | Anggota Komite Audit<br>Audit Committee Member | • *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era.*<br>• *Risk Beyond* 2025 *on Enterprise Risk Management* | • Enterprise Risk Management Academy<br>• Enterprise Risk Management Academy | • 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025<br>• 4-5 Desember 2025<br>4-5 December 2025 |

1 menjabat sejak tanggal 20 Desember 2025.
2 berhenti menjabat sejak tanggal 19 Desember 2025.

1 serving in position as of 20 December 2025.
2 resigned as of 19 December 2025

## Rapat Komite Audit
Audit Committee's Meeting

Sejalan dengan Kebijakan rapat yang diatur dalam Piagam Komite Audit, penyelenggaraan rapat Komite Audit memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit terdiri atas:
   a. Rapat internal yaitu rapat yang hanya mengundang anggota Komite Audit saja; dan
   b. Rapat eksternal yaitu rapat yang mengundang pihak eksternal selain juga anggota Komite Audit.
2. Setiap anggota Komite Audit berhak menyampaikan usulan rapat internal maupun rapat eksternal kepada Ketua Komite Audit.
3. Undangan rapat disampaikan secara tertulis atau dengan media elektronik dengan menyebutkan waktu, tempat dan agenda rapat yang akan dilakukan.
4. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit.
5. Rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:
   a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

In line with the meeting policy set forth in the Audit Committee Charter, the Audit Committee meetings have the following provisions:

1. Audit Committee's meetings shall consist of:
   a. Internal meeting, namely meeting by only inviting Audit Committee members; and
   b. External meeting, namely meeting by inviting external parties in addition to Audit Committee members.
2. Each member of Audit Committee has the right to submit proposals for internal and external meetings to the Chairman of Audit Committee.
3. Meeting invitations are sent in writing or via electronic means, by stating the time, place, and agenda of the meeting.
4. Audit Committee meetings are chaired by the Chairman of Audit Committee.
5. Audit Committee meetings are regulated as follows:
   a. The Audit Committee holds meeting at least once a month, or the same as the minimum number of Board of Commissioners' meetings stipulated in the Company's Article of Association.

b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota, baik langsung maupun melalui *tele/video-conference*. Dalam hal ketua atau anggota Komite Audit berhalangan hadir mengikuti rapat, yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada ketua dan/atau anggota Komite Audit yang hadir.
c. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Komite Audit yang hadir.
d. Setiap anggota Komite Audit bebas menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun.
e. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
f. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat. Risalah rapat akan disediakan dalam format draf setidaknya 2 (dua) minggu setelah rapat Komite Audit selesai dilaksanakan.
g. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

6. Apabila diperlukan, anggota Komite Audit non Komisaris dapat melakukan rapat *ad-hoc* yang tidak memerlukan kehadiran ketua Komite Audit (anggota Dewan Komisaris). Dalam pelaksanaan rapat *ad-hoc*, diterapkan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari ketua Komite Audit.
   b. Materi yang dibahas di rapat merupakan pendalaman khusus dari materi yang dibahas di rapat Komite Audit.
   c. Hasil pembahasan dalam rapat dilaporkan kepada ketua Komite Audit.
   d. Rapat *ad-hoc* tidak dilaporkan dalam laporan tahunan Perseroan.

b. Audit Committee meetings can only be held if attended by at least the chairmain and one member, either in person or via tele/videoconference. If the chairman or member of Audit Committee is unable to attend the meeting, the aforementioned member must notify the chairman and/or members of Audit Committee present.
c. The decision of the Audit Committee meeting is considered valid if approved by more than 1/2 (one half) of the Audit Committee members present.
d. All members of the Audit Committee are free to express their professional opinion in the discussion of each meeting agenda without any intervention.
e. Decisions in the Audit Committee meeting are made through deliberation.
f. Each meeting of the Audit Committee is written in the minutes of the meeting, which includes the time and place of the meeting, meeting agenda, participants, topics discussed, dissenting opinions (if any), and meeting's decision. The minutes will be provided in draft format at least 2 (two) weeks after the Audit Committee meeting has been held.
g. The minutes of the meeting are signed by all Audit Committee members present.

6. If necessary, non-Commissioner members of the Audit Committee may hold ad-hoc meetings that do not require the presence of the Chairman of Audit Committee (member of the Board of Commissioners). The following provisions apply to ad-hoc meetings:
   a. Meetings are held after obtaining permission from the Chairman of Audit Committee.
   b. The material discussed at the meeting is a specific extension of the material discussed at the Audit Committee meeting.
   c. The results of the discussions at the meeting are reported to the Chairman of Audit Committee.
   d. Ad-hoc meetings are not reported in the Company's annual report.

## Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2025
Frequency of Audit Committee Meetings in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali rapat.

Throughout 2025, the Company's Audit Committee held 26 (twenty-six) meetings.

## Tingkat Kehadiran Komite Audit Dalam Rapat Komite Audit
Attendance of Audit Committee in Audit Committee Meetings

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Rapat Komite Audit<br>Audit Committee's Meetings | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Jumlah Kehadiran<br>Total Attendance | Tingkat Kehadiran<br>Attendance |
| Ahmad Ghufron[1] | Ketua Komite Audit<br>Chairman of Audit Committee | 25 | 25 | 100% |
| Bhimantara Widyajala[2] | Ketua Komite Audit<br>Chairman of Audit Committee | 1 | 1 | 100% |
| Shartika Nirmala Dewi | Anggota Komite Audit Audit Committee Member | 26 | 26 | 100% |
| Vidvant Brahmantyo[3] | Anggota Komite Audit Audit Committee Member | 14 | 14 | 100% |
| **Rata-Rata Tingkat Kehadiran Komite Audit**<br>Audit Committee's Average Attendance | | | | **100%** |

Keterangan:
1: berhenti menjabat sejak 19 Desember 2025
2: menjabat sejak 20 Desember 2025
3: menjabat sejak 1 Mei 2025

Remark:
1: resigned as of 19 December 2025
2: start serving the position as of 20 December 2025
3: start serving the position as of 1 May 2025

## Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2025
Realization of the Audit Committee Work Program in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, the Company's Audit Committee implemented various activities as part of its duties and responsibilities already planned in the Audit Committee's Work Program, with the following details:

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Perencanaan** Planning Aspect | | | | |
| 1 | Penyusunan RKA Komite Audit Tahun 2026<br>Preparation of the Audit Committee RKA in 2026 | Juli-September<br>July-September | • Pembahasan konsep pada tanggal 18 September 2025, 19 Oktober 2025, 23 Oktober 2025.<br>• Surat Dewan Komisaris No. S-36/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025. | • Concept discussions on 18 September 2025, 19 October 2025, and 23 October 2025.<br>• Board of Commissioners' Letter No. S36/PII/DK/1025 dated 29 October 2025. |
| 2 | Penyiapan Bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation of 2026 RKA for the Board of Commissioners | September | | |
| 3 | Penyiapan Bahan Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation of the Proposed 2026 Performance Contract (KPI) of the Board of Commissioners | September | | |
| 4 | Penelahaan atas Usulan RKAP dan/atau RJPP PT PII Tahun 2026<br>Review of the Proposed IIGF's RKAP and/or RJPP in 2026 | Juli-September<br>July-September | • Rapat pembahasan pada tanggal 9 Oktober 2025, 12 Oktober 2025, 16 Oktober 2025, 23 Oktober 2025, dan 28 Oktober 2025.<br>• Surat Dewan Komisaris Nomor S-37/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025. | • Discussion meetings on 9 October 2025, 12 October 2025, 16 October 2025, 23 October 2025, and 28 October 2025.<br>• Board of Commissioners' Letter No. S-37/PII/DK/1025 dated 29 October 2025. |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Penyiapan Bahan Tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas Rancangan RKAP dan/atau RJPP Tahun 2026<br>Preparation of Materials for the Board of Commissioners' Responses to the GMS on the 2026 RKAP and/or RJPP Draft | Desember (sesuai dengan jadwal RUPS)<br>December (in accordance with the GMS schedule) | Surat Dewan Komisaris No. S-38/PII/DK/1025 tanggal 30 Oktober 2025. | Board of Commissioners' Letter No. S-38/PII/DK/1025 dated 30 October 2025. |
| **Aspek Perencanaan** Supervisory Aspect | | | | |
| 6 | Reviu atas Laporan Hasil Audit<br>Review of Audit Report | Triwulanan<br>Quarterly | • Triwulan IV Tahun 2024<br>- Rapat KA dan Divisi IA tanggal 15 Januari 2025,<br>- Memo-02/PII/DKKA/0225 tanggal 10 Februari 2025,<br>- S-04/PII/DK/0225 tanggal 10 Februari 2025<br>• Triwulan I Tahun 2025<br>- Rapat KA dan Divisi IA tanggal 15 April 2025,<br>- Memo-07/PII/DKKA/0525 tanggal 8 Mei 2025, S-16/PII/DK/0525 tanggal 9 Mei 2025<br>• Triwulan II Tahun 2025<br>- Rapat KA dan Divisi IA tanggal 17 Juli 2025,<br>- Memo-12/PII/DKKA/0725 tanggal 29 Juli 2025, S-22/PII/DK/0725 tanggal 30 Juli 2025<br>• Triwulan III Tahun 2025<br>- Rapat KA dan Divisi IA tanggal 20 Oktober 2025,<br>- Memo-17/PII/DKKA/1025 tanggal 28 Oktober 2025, S-34/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025 | • Q4 2024<br>- Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 15 January 2025,<br>- Memo-02/PII/DKKA/0225 dated 10 February 2025,<br>- S-04/PII/DK/0225 dated 10 February 2025<br>• Q1 2025<br>- Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 15 April 2025,<br>- Memo-07/PII/DKKA/0525 dated 8 May 2025, S-16/PII/DK/0525 dated 9 May 2025<br>• Q2 2025<br>- Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 17 July 2025<br>- Memo-12/PII/DKKA/0725 dated 29 July 2025, S-22/PII/DK/0725 dated 30 July 2025<br>• Q3 2025<br>- Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 20 October 2025<br>- Memo-17/PII/DKKA/1025 dated 28 October 2025, S-34/PII/DK/1025 dated 29 October 2025 |
| 7 | Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal dan Eksternal<br>Monitoring of Follow-Up on Internal and External Audit Recommendations | Triwulanan<br>Quarterly | | |
| 8 | Me-*review* Laporan Manajemen Bulanan<br>Reviewing Monthly Management Reports | Bulanan<br>Monthly | • Dilaksanakan setiap bulan, baik Komite Audit sendiri maupun bersama dengan divisi terkait.<br>• Rapat Teknis Organ Dekom bersama Manajemen pada tanggal (17 Januari 2025, 19 Februari 2025, 21 Maret 2025, 23 April 2025, 22 Mei 2025, 18 Juni 2025, 23 Juli 2025, 22 Agustus 2025, 18 September 2025, 22 Oktober 2025, 21 November 2025, 23 Desember 2025)<br>• Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 Januari 2025, 26 Februari 2025, 24 Maret 2025, 28 April 2025, 26 Mei 2025, 23 Juni 2025, 28 Juni 2025, 25 Agustus 2025, 22 September 2025, 23 Oktober 2025, 24 November 2025, 24 Desember 2025 | • Held monthly, independently, or with related divisions.<br>• Technical Meetings of Committees Reporting to the Board of Commissioners, with Management (17 January 2025, 19 February 2025, 21 March 2025, 23 April 2025, 22 May 2025, 18 June 2025, 23 July 2025, 22 August 2025, 18 September 2025, 22 October 2025, 21 November 2025, 23 December 2025)<br>• Meetings of the Board of Commissioners (30 January 2025, 26 February 2025, 24 March 2025, 28 April 2025, 26 May 2025, 23 June 2025, 28 June 2025, 25 August 2025, 22 September 2025, 23 October 2025, 24 November 2025, 24 December 2025) |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal<br>Review of Internal Audit's Annual Audit Work Program (PKAT) | Awal Tahun<br>Beginning of the Year | • Memo KA Nomor-05/PII/DK-KA/0325 tanggal 10 Maret 2025,<br>• Surat Ketua Komite Audit Nomor S-01/PII/DK-KA/0325 tanggal 10 Maret 2025<br>• Surat Ketua Komite Audit Nomor S-02/PII/DK-KA/0825 tanggal 20 Agustus 2025<br>• Persetujuan Rencana Audit Divisi IA Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025<br>• Persetujuan PKPT Tahun 2026 Divisi IA PT PII (Persero) pada 10 November 2025<br>• Rapat KA dan Divisi IA tanggal 18 Desember 2025 | • Audit Committee Memo No. 05/PII/DK-KA/0325 dated 10 March 2025,<br>• Audit Committee Chairman's Letter No. S-01/PII/DK-KA/0325 dated 10 March 2025<br>• Audit Committee Chairman's Letter No. S-02/PII/DK-KA/0825 dated 20 August 2025<br>• Approval of the Internal Audit Division's 2025 Audit Plan dated 20 August 2025<br>• Approval of the 2026 PKPT for IIGF's Internal Audit Division on 10 November 2025<br>• Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 18 December 2025 |
| 10 | Penelaahan atas Pengaduan terkait Perseroan<br>Review of Complaints on the Company | Semesteran<br>Per Semester | • Rapat KA dan Divisi IA tanggal 15 Januari 2025 dan Memo-02/PII/DK-KA/0225 tanggal 10 Februari 2025<br>• Rapat KA dan Divisi IA tanggal 17 Juli 2025 dan Memo-12/PII/DK-KA/0725 tanggal 29 Juli 2025<br>• Rapat KA dan Divisi IA tanggal 20 Oktober 2025 dan Memo-17/PII/DK-KA/1025 tanggal 28 Oktober 2025 | • Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 15 January 2025 and Memo-02/PII/DK-KA/0225 dated 10 February 2025<br>• Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 17 July 2025 and Memo-12/PII/DK-KA/0725 dated 29 July 2025<br>• Audit Committee and Internal Audit Division Meeting on 20 October 2025 and Memo-17/PII/DK-KA/1025 dated 28 October 2025 |
| 11 | Penelaahan atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Pelaksanaannya<br>Review of Accounting Policies and Preparation of Financial Statements and Implementation | Juni-Juli<br>June-July | • Rapat tanggal 29 Agustus 2025<br>• Memo-16/PII/DK-KA/1025 tanggal 22 Oktober 2025<br>• S-30/PII/DK/1025 tanggal 22 Oktober 2025 | • Meeting on 29 August 2025<br>• Memo-16/PII/DK-KA/1025 dated 22 October 2025<br>• S-30/PII/DK/1025 dated 22 October 2025 |
| 12 | Evaluasi atas Kegiatan TJSL<br>Evaluation of CSR Activities | Juni<br>June | Dibahas dalam Rapat Laporan Manajemen periode Maret 2025 tanggal 23 April 2025, 28 April 2025, dan 30 April 2025 | Discussed in the Management Report Meeting for period March 2025 on 23 April 2025, 28 April 2025, and 30 April 2025 |
| 13 | Penelaahan atas Gejala Penurunan Kinerja<br>Review of Symptoms of Performance Decline | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per disposition from the Board of Commissioners | • S-03/PII/DK/0225 tanggal 10 Februari 2025, dan<br>• S-18/PII/DK/0525 tanggal 26 Mei 2025<br>• S-31/PII/DK/1025 tanggal 28 Oktober 2025 | • S-03/PII/DK/0225 dated 10 February 2025, and<br>• S-18/PII/DK/0525 dated 26 May 2025<br>• S-31/PII/DK/1025 dated 28 October 2025 |
| 14 | Evaluasi atas Pelaksanaan RKAP<br>Evaluation of the RKAPImplementation | Triwulanan<br>Quarterly | • S-06/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025 untuk Semester II Tahun 2024<br>• S-12/PII/DK/0425 tanggal 27 April 2025 untuk Tahun 2024<br>• Memo-14/PII/DK- KA/0825 dan S-26/PII/DK/0825 tanggal 25 Agustus 2025 untuk Semester I Tahun 2025 | • S-06/PII/DK/0225 dated 28 February 2025 for Second Semester of 2024<br>• S-12/PII/DK/0425 dated 27 April 2025 for 2024<br>• Memo-14/PII/DK-KA/0825 and S-26/PII/DK/0825 dated 25 Agustus 2025 for the First Semester of 2025 |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Penelaahan terkait Transaksi atau Tindakan Dalam Lingkup Kewenangan Dewan Komisaris/RUPS<br>Review of Transactions or Actions within the Scope of Authority of the Board of Commissioners/GMS | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per disposition from the Board of Commissioners | • Dilaksanakan di setiap penyusunan naskah tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi/ RUPS.<br>- Penelaahan IKU Individual Direksi Tahun 2025 (S-01/PII/ DK/0125 tanggal 28 Januari 2025)<br>- Penelaahan Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan IV 2024 S02/PII/ DK/0225 tanggal 10 Februari 2025)<br>- Penelaahan PTT Dekom (S-07/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025)<br>- Penelaahan Realisasi IKU Dekom (S-08/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025)<br>- Penelaahan *Representation Letter* PwC (S-/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025)<br>- Penelaahan Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan I 2025 (S-13/PII/ DK/0425 tanggal 29 April 2025)<br>- Penelaahan Realisasi IKU Dekom (S-14/PII/DK/0425 tanggal 30 April 2025)<br>- Penelaahan Realisasi IKU Dekom Triwulan II (S-23/PII/DK/0725 tanggal 30 Juli 2025)<br>- Penelaahan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan II 2025 (S24/PII/DK/0825 tanggal 13 Agustus 2025)<br>- Penelaahan PTT Dekom(S-25/ PII/DK/0825 tanggal 14 Agustus 2025)<br>- Penelaahan Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan III (S33/PII/DK/1025 tanggal 28 Oktober 2025)<br>- Penelaahan Realisasi IKU Dekom Triwulan III (S-35/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025) | • Implemented in every preparation of the Board of Commissioners' response to the Board of Directors/GMS.<br>- Review of the Board of Directors' Individual KPIs in 2025 (S-01/PII/DK/0125 dated 28 January 2025)<br>- Review of Feedback on the Report of Utilization of PMN Q4 2024 (S02/PII/DK/0225 dated 10 February 2025)<br>- Review of the Board of Commissioners' PTT (S-07/PII/ DK/0225 dated 28 February 2025)<br>- Review of the Board of Commissioners' KPI Realization (S-08/PII/DK/0225 dated 28 February 2025)<br>- Review of PwC Representation Letter (S-/PII/DK/0225 dated 28 February 2025)<br>- Review of Feedback on the Report of Utilization of PMN Q1 2025 (S-13/PII/DK/0425) 29 April 2025)<br>- Review of the Board of Commissioners' KPI Realization (S-14/PII/DK/0425 dated 30 April 2025)<br>- Review of the Board of Commissioners' KPI Realization Q2 (S-23/PII/DK/0725 dated 30 July 2025)<br>- Review of Report of Utilization of PMN Q2 2025 (S24/PII/ DK/0825 dated 13 August 2025)<br>- Review of the Board of Commissioners' PTT (S-25/ PII/DK/0825 dated 14 August 2025)<br>- Review of Feedback on the Report of Utilization of PMN Q3 (S33/PII/DK/1025 dated 28 October 2025)<br>- Review of the Board of Commissioners' KPI Realization Q3 (S-35/PII/DK/1025 dated 29 October 2025) |
| 16 | *Monitoring* atas Proyek yang Telah Dijamin<br>Monitoring of Projects that have been Guaranteed | Sesuai disposisi Dewan Komisaris<br>As per disposition from the Board of Commissioners | • *Site Visit* Proyek Satelit Multifungsi 18-19 Juli 2025 | • Site Visit of Multifunction Satellite Project, 18-19 July 2025 |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Pelaporan** Reporting Aspect | | | | |
| 17 | Penyusunan Laporan Triwulanan KA<br>Preparation of Audit Committee Quarterly Report | Triwulanan<br>Quarterly | • Laporan Triwulan IV Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2025,<br>• Memo KA No. 03/PII/DK-KA/0225 tanggal 13 Februari 2025 | • Q4 2024 Report dated 10 February 2025<br>• Audit Committee Memo No. 03/PII/DK-KA/0225 dated 13 February 2025 |
| | | | • Laporan Triwulan I Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025, Memo KA Nomor-08/PII/DK-KA/0525 tanggal 14 Mei 2025 | • Q1 2025 Report dated 14 May 2025, Audit Committee Memo Nomor-08/PII/DK-KA/0525 dated 14 May 2025 |
| | | | • Laporan Triwulan II Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025, Memo KA Nomor-13/PII/DK-KA/0825 tanggal 5 Agustus 2025<br>• Laporan Triwulan III Tahun 2025 tanggal 10 November 2025<br>• Memo KA nomor-18/PII/DK-KA/1125 tanggal 10 November 2025 | • Q2 2025 Report dated 5 August 2025, Audit Committee Memo Nomor-13/PII/DK-KA/0825 dated 5 August 2025<br>• Q3 2025 Report dated 10 November 2025<br>• Audit Committee Memo nomor-18/PII/DK-KA/1125 dated 10 November 2025 |
| 18 | Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan<br>Review of Quarterly Management Report | Triwulanan<br>Quarterly | • Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Komite Pembahasan Laporan Manajemen, Rapat BOC, dan Laporan Triwulanan KA | • Held simultaneously with the Committee Meeting to Discuss the Management Report, Board of Commissioners' Meeting, and Audit Committee Report Quarterly |
| 19 | Penyusunan Laporan Tahunan KA<br>Preparation of Audit Committee Annual Report | April | • Laporan Tahunan Komite<br>• Audit Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2025<br>• Memo KA Nomor 04/PII/DK-KA/0225 tanggal 14 Februari 2025 | • Annual Committee Report<br>• 2024 Audit dated 13 February 2025<br>• Audit Committee Memo No. 04/PII/DK-KA/0225 dated 14 February 2025 |
| **Aspek Penerapan GCG** GCG Implementation Aspect | | | | |
| 20 | Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024 oleh BPKP<br>Implementation of GCG Assessment of 2024 by BPKP | Januari-Maret<br>January-March | • *Entry Meeting* GCG *Assessment* pada tanggal 14 Januari 2025<br>• Wawancara Dewan Komisaris pada tanggal 26 Februari 2025 | • GCG Assessment Entry Meeting on 14 January 2025<br>• GCG Interview with Board of Commissioners on 26 February 2025 |
| | | | • Pembahasan GCG aspek Dewan Komisaris dengan BPKP pada tanggal 24-28 Februari 2025<br>• *Pra Exit Meeting* pada tanggal 27 Februari 2025<br>• *Exit Meeting* pada tanggal 7 Maret 2025 | • Discussion of GCG aspects with Board of Commissioners on 24-28 February 2025<br>• Pre-Exit Meeting on 27 February 2025<br>• Exit Meeting on 7 March 2025 |
| 21 | Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG Rekomendasi BPKP Tahun 2024<br>Monitoring the Follow-up of Implementation of AOI GCG Recommendations by BPKP of 2024 | Maret- Desember<br>March-December | • Rapat pada tanggal 11 Maret 2025, 20-21 Juni 2025, dan 15 November 2025 | • Meetings on 11 March 2025, 20-21 June 2025, and 15 November 2025 |
| 22 | Penelaahan atas Kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga<br>Review of the Board of Directors' Compliance with Laws and Agreements with Third Parties | November | • Rapat tanggal 22 November 2025 dan Surat Nomor S-44/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 | • Meeting on 22 November 2025 and Letter No. S-44/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Penelaahan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal<br>Review of Policies and Implementation of Internal Control System | Februari<br>February | • Disampaikan melalui Surat Dekom kepada Direksi: 05/PII/DK/0224 tanggal 7 Februari 2024 | • Submitted through Board of Commissioners' Letter to the Board of Directors: 05/PII/DK/0224 dated 7 February 2024 |
| 24 | Penelaahan atas Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya<br>Review of Procurement Policy and Its Implementation | April | • Memo KA Nomor-02/PII/DK-KA/0225 tanggal 10 Februari 2025,<br>• Surat Dewan Komisaris Nomor S04/PII/DK/0225 tanggal 10 Februari 2025 | • Audit Committee Memo No. 02/PII/DK-KA/0225 dated 10 February 2025<br>• Board of Commissioners' Letter No. S04/PII/DK/0225 dated 10 February 2025 |
| 25 | Penelahaan atas Perubahan Lingkungan Bisnis Perseroan<br>Review of Changes in the Company's Business Environment | November | • Rapat tanggal 22 November 2025 dan 31 Desember 2025<br>• Surat Dewan Komisaris Nomor S-43/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 | • Meetings on 22 November 2025 and 31 December 2025<br>• Letter S-43/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 |
| 26 | Penelahaan atas Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan<br>Review of the Company's Quality Policy or Service or Satisfaction | Oktober<br>October | • Rapat tanggal 22 November 2025<br>• Memo KA Nomor-19/PII/DK-KA/1225 tanggal 16 Desember 2025<br>• Surat Dewan Komisaris Nomor 41/PII/DK/1225 tanggal 17 Desember 2025 | • Meeting on 22 November 2025<br>• Audit Committee Memo No. 19/PII/DK-KA/1225 dated 16 December 2025<br>• Letter 41/PII/DK/1225 dated 17 December 2025 |
| **Aspek Audit atas Laporan Keuangan** Audit Aspect of Financial Statements | | | | |
| 27 | Pengadaan KAP Untuk Audit LK Tahun 2025<br>Procurement of Public Accounting Firms for Financial Statements Audit in 2025 | April-Mei<br>April-May | Rapat tanggal 22 Mei 2025 | Meeting on 22 May 2025 |
| 28 | Pengusulan Penetapan KAP untuk Audit LK Tahun 2025 kepada RUPS<br>Proposal of Public Accounting Firm Appointment for Financial Statements Audit in 2025 to GMS | Juni<br>Juni | • Memo-15/PII/DKKA/0825 tanggal 27 Agustus 2025<br>• Surat Dewan Komisaris Nomor S-27/PII/DK/0825 tanggal 27 Agustus 2025 | • Memo-15/PII/DKKA/0825 dated 27 August 2025<br>• S-27/PII/DK/0825 dated 27 August 2025 |
| 29 | Penelaahan Rencana Audit LK Tahun 2025 oleh KAP<br>Review of 2025 Financial Statements Audit Plan by KAP | Desember<br>December | Rapat tanggal 22 Desember 2025 | Meeting on 22 December 2025 |
| 30 | Pemantauan atas Kemajuan Pelaksanaan Audit LK Tahun 2024 oleh KAP<br>Monitoring of Audit Progress of 2024 Financial Statements by KAP | Januari-Februari<br>January-February | • Rapat Komite Audit dengan Divisi IA tanggal 15 Januari 2025<br>• *Clearance Meeting* dengan PwC tanggal 27 Februari 2025 | • Audit Committee's Meeting with IA Division on 15 January 2025<br>• Clearance Meeting with PwC on 27 February 2025 |
| 31 | Penelaahan atas Laporan Hasil Audit LK Tahun 2024 dari KAP<br>Review of the Audit Report of 2024 Financial Statements by KAP | April | • Memo-06/PII/DKKA/0425 tanggal 30 April 2025, dan<br>• S-15/PII/DK/0525 tanggal 2 Mei 2025 | • Memo-06/PII/DKKA/0425 dated 30 April 2025, and<br>• S-15/PII/DK/0525 dated 2 May 2025 |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Lainnya** Other Aspects | | | | |
| 32 | Pembahasan draf Annual Report Tahun 2024<br>Discussion of the 2024 Annual Report Draft | Februari-April<br>February-April | Rapat 6 Februari 2025, 4 Maret 2025, 11 Maret 2025, dan 10 April 2025. | Meetings on 6 February 2025, 4 March 2025, 11 March 2025, and 10 April 2025. |
| 33 | *Self Assessment* Kinerja Komite Audit<br>Self-Assessment of the Audit Committee's Performance | Desember<br>December | Rapat tanggal 18 Desember 2025 | Meeting on 18 December 2025 |
| 34 | Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Audit<br>Competency Development of Audit Committee Members | Sesuai Jadwal<br>As Scheduled | • ISO 37002:2021 *Whistleblowing Management System Training, online*, 7-8 Juli 2025<br>• *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era*, Yogyakarta, 21 Agustus 2025<br>• Seminar GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era*, Jogja, 22 Agustus 2025<br>• *Risk Beyond* 2025 *on Enterprise Risk Management*, Bali, 4-5 Desember 2025 | • ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System Training, online, 7-8 July 2025<br>• Masterclass GRC Summit 2025 Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post-Digital Era, Yogyakarta, 21 August 2025<br>• Seminar GRC Summit 2025 Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post-Digital Era, Yogyakarta, 22 August 2025<br>• Risk Beyond 2025 on Enterprise Risk Management, Bali, 4-5 December 2025 |

## Penilaian Kinerja Komite Audit

Performance Assessment of Audit Committee

Evaluasi kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pelaksanaan rapat Komite Audit sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The Audit Committee's performance evaluation is conducted by the Board of Commissioners, based on the implementation of duties and responsibilities, including the conduct of Audit Committee meetings, as described in the Chapter of Performance Assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees reporting to the Board of Commissioners in this Annual Report.

## Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam piagam Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pemantauan manajemen risiko.

The appointment and dismissal of members of the Risk Monitoring Committee is carried out by the Board of Commissioners. The appointment of the Risk Monitoring Committee's members of is in accordance with the requirements set forth in the Risk Monitoring Committee Charter:

1. Shall have good integrity, competence, and sufficient work experience in the risk management monitoring sector.

2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan keuangan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan manajemen risiko Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
8. Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Shall have sufficient knowledge to read and understand the risk management report and financial statements.
3. Shall be able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to carry out duties.
5. Members of the Risk Monitoring Committee who are from the Company's external party are prohibited from having familial relationship up to the third degree, either directly or indirectly with other members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
6. Shall not be a person who works for the Company and has the authority and responsibility to plan, lead, or control and supervise the Company's risk management activities within the last 6 (six) months.
7. Shall not have any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.
8. Shall have no interests and other relationships that may affect their ability to act independently as members of the Risk Monitoring Committee.

## Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko
Term of Office of the Risk Monitoring Committee

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Risk Monitoring Committee shall have a term of office not exceeding the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders. The term of office of Risk Monitoring Committee is a maximum of 3 (three) years, and can be extended once for a 2-year period, without reducing the Board of Commissioners' right of termination at any time.

## Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025
Composition of the Risk Monitoring Committee in 2025

Jumlah Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite dan 2 (orang) sebagai anggota. Pada tahun 2025, terdapat perubahan susunan anggota Komite Pemantau Risiko dengan adanya pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko, yaitu Sdr. Tatang Tabroni terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025. Dengan demikian, berikut perubahan susunan Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025:

As of 31 December 2025, the Risk Monitoring Committee had 3 (three) members, consisting of 1 (one) Chairman of the Committee and 2 (two) members. In 2025, the Risk Monitoring Committee's composition underwent changes with the appointment of member of the Risk Monitoring Committee, namely Mr. Tatang Tabroni, effective as of 1 May 2025. The following were changes to the Risk Monitoring Committee's composition throughout 2025:

| Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2025 – 30 April 2025 Risk Monitoring Committee 1 January 2025 – 30 April 2025 | | | Komite Pemantau Risiko Periode 1 Mei 2025 - 31 Desember 2025 Risk Monitoring Committee 1 May 2025 – 31 December 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Name | Jabatan di Perseroan Position in the Company | Jabatan Komite Pemantau Risiko Position in the Risk Monitoring Committee | Nama Name | Jabatan di Perseroan Position in the Company | Jabatan Komite Pemantau Risiko Position in the Risk Monitoring Committee |
| Ferry Irawan | Dewan Komisaris Board of Commissioner | Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee | Ferry Irawan | Dewan Komisaris Board of Commissioner | Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee |
| Belis Siswanto | - | Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member | Belis Siswanto | - | Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member |
| | | | Tatang Tabroni | - | Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member |

Susunan atau komposisi anggota Komite Pemantau Risiko berlandaskan pada PMK No. 88/PMK.06/2015 pasal 46 yang mengatur bahwa Ketua Komite berasal dari anggota komisaris. Dalam hal ini, Sdr. Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, sementara anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan GRC (*Governance, Risk and Compliance*) adalah Sdr. Belis Siswanto dan anggota yang memiliki keahlian di bidang penjaminan adalah Sdr. Tatang Tabroni.

The composition of the Risk Monitoring Committee is based on PMK No. 88/PMK.06/2015 Article 46, which stipulates that the Chairman of the Committee is a Commissioner. Therefore, Mr. Ferry Irawan has been appointed as the Chairman of the Risk Monitoring Committee, equipped with member with expertise in finance and GRC (Governance, Risk and Compliance), i.e., Mr. Belis Siswanto, and member with expertise in guarantee, i.e., Mr. Tatang Tabroni.



# Profil Komite Pemantau Risiko
Profile of Risk Monitoring Committee

Berikut profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025:

The following is the Risk Monitoring Committee profile as of 31 December 2025:



## Ferry Irawan

**Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris**
Chairman of Risk Monitoring Committee/Commissioner

Penjelasan lebih lanjut diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Ini
Further information can be referred to in the Company Profile chapter, subchapter of Board of Commissioners' Profile in this Annual Report.

| | | |
|---|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan<br>Legal Basis of Appointment | • KMK No. 339 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024<br>• SK Dewan Komisaris No. KEP-002/KOM/0824 tanggal 30 Agustus 2024 | • KMK No. 339 of 2024 dated 27 August 2024<br>• Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-002/KOM/0824 dated 30 August 2024 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| Masa Jabatan<br>Tenure | Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris | Following the term of office as Board of Commissioners |



## Belis Siswanto

**Anggota Komite Pemantau Risiko**
Risk Monitoring Committee Member

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Domisili Domicile | Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | South Tangerang, Banten, Indonesia |
| Usia Age | 55 tahun per 31 Desember 2025 | 55 years old as of 31 December 2025 |
| Tempat/Tanggal Lahir<br>Place/Date of Birth | Kediri, 15 Juni 1970 | Kediri, 15 June 1970 |
| Riwayat Pendidikan<br>Educational Background | Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1996), Magister (S2) Ilmu Administrasi, Manajemen Ekonomi Publik dari Universitas Indonesia (2003) Master of Commerce in Economics dari Keio University (2005) | Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Brawijaya (1996), Master of Administration, Public Economic Management from Universitas Indonesia (2003), Master of Commerce in Economics from Keio University (2005). |
| Riwayat Jabatan<br>Career History | Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1997-2022 | Served as Head of Nusa Tenggara Office of the Directorate General of Taxes at the Directorate General of Taxes from 1997-2022. |
| Rangkap Jabatan<br>Concurrent Positions | • Dalam Perseroan:<br>- Tidak ada<br>• Diluar Perseroan:<br>- Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. | • In the Company:<br>- None<br>• Outside the Company:<br>- Director of Internal Compliance and Human Resource Transformation at the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance |

| | | |
|---|---|---|
| Sertifikasi<br>Certification | Tidak ada | None |
| Dasar Hukum Pengangkatan<br>Legal Basis of Appointment | SK Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 | Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 dated 9 February 2023 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| Masa Jabatan<br>Tenure | 9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026 | 9 February 2023 to 8 February 2026 |



## Tatang Tabroni

**Anggota Komite Pemantau Risiko**
Risk Monitoring Committee Member

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Domisili Domicile | Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | South Tangerang, Banten, Indonesia |
| Usia Age | 61 tahun per 31 Desember 2025 | 61 years old as of 31 December 2025 |
| Tempat/Tanggal Lahir<br>Place/Date of Birth | Kuningan, 15 Oktober 1964 | Kuningan, 15 October 1964 |
| Riwayat Pendidikan<br>Educational Background | • Magister Manajemen (*Marketing*), Universitas Gadjah Mada (1997)<br>• Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1987) | • Master of Management (Marketing), Universitas Gadjah Mada<br>• Bachelor of Agriculture, Institut Pertanian Bogor (1987) |
| Riwayat Jabatan<br>Career History | • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Agustus 2020 - 2024)<br>• Berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999- 2020)<br>• Pegawai Pimpinan di Exim Bank (1989-1999) | • Member of the Risk Monitoring Committee of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (August 2020 - 2024)<br>• Various positions, most recently as Senior Vice President at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2020)<br>• Leadership Employee at Exim Bank (1989-1999) |
| Rangkap Jabatan<br>Concurrent Positions | • Dalam Perseroan:<br>- Tidak ada<br>• Diluar Perseroan:<br>- Tidak ada | • In the Company:<br>- None<br>• Outside the Company:<br>- None |
| Sertifikasi<br>Certification | Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko I, II, III dan IV | Risk Management Competency Certification I, II, III, and IV |
| Dasar Hukum Pengangkatan<br>Legal Basis of Appointment | SK Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/0525 tanggal 1 Mei 2025 | Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-02/KOM/0525 dated 1 May 2025 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| Masa Jabatan<br>Tenure | 1 Mei 2025 s.d. 30 April 2028 | 1 May 2025 to 30 April 2028 |

## Pernyataan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Statement of Independence of Risk Monitoring Committee Members

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Risk Monitoring Committee have fulfilled all independence criteria and shall be able to carry out their duties independently, uphold the Company's interests, and cannot be influenced by any party.

### Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Table: Independence of Risk Monitoring Committee in 2025

| Aspek Independensi<br>Independence Aspect | | Ferry Irawan | Belis Siswanto | Tatang Tabroni |
|---|---|---|---|---|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Shall not have a financial affiliation with the Board of Commissioners and the Board of Directors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan | Shall not have a relationship with the Company shareholders | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota komite Pemantau Risiko | Shall not have any familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah | Shall not serve on the board of political, government and official parties | ✔ | ✔ | ✔ |

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen

Remark: √ : Independent ×: Not Independent

## Piagam Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan dan telah diperbarui menjadi edisi ketiga pada tahun 2022.

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Risk Monitoring Committee Charter, which was established for the first time on 15 March 2018 with reference to the Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 concerning the Company's Risk Monitoring Committee Charter. As of 2022, the Risk Monitoring Committee Charter has been updated to the third edition in 2022.

Pokok pokok yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain adalah terkait:

1. Latar belakang dan dasar pembentukan;
2. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan etika kerja;
3. Pola hubungan kerja;
4. Struktur dan persyaratan keanggotaan;
5. Masa jabatan;
6. Program/rencana kerja tahunan;
7. Penganggaran dan pembiayaan;
8. Rapat;
9. Pelaporan;
10. Program pengenalan anggota baru dan evaluasi kinerja.

The main points regulated in the Risk Monitoring Committee Charter are, among others, related to:

1. Background and basis of establishment;
2. Duties, responsibilities, authorities, and work ethics;
3. Work relationship patterns;
4. Structure and membership requirements,
5. Term of office;
6. Annual work program/plan;
7. Budgeting and financing;
8. Meetings;
9. Reporting;
10. New member induction program and performance evaluation.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Duties and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, yaitu untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama terkait pemantauan dan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko, serta memberikan pendapat profesional dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko.
3. Melakukan revisi dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perseroan.
4. Memantau pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan Perseroan.
5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

The Risk Monitoring Committee Charter regulates the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, i.e., to assist the Board of Commissioners in conducting its duties and functions, especially related to monitoring and assessing the good corporate governance within the Company in terms of the risk management implementation, as well as provide professional opinions and recommendations relating, but not limited, to:

1. Conducting evaluation on the conformity between the risk management policy and the implementation of the policy.
2. Monitoring and evaluating the function implementation of the Company's working unit in charge of risk management.
3. Revising and evaluating the risk management report made by the Company.
4. Monitoring the implementation of the process of identification, measurement, monitoring, control, and risk management information system conducted by the Company.
5. Evaluating the Company's compliance with applicable laws and regulations related to risk management.
6. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' duties.
7. Exercising other duties assigned by the Board of Commissioners.

## Hak dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Rights and Authorities of Risk Monitoring Committee

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan informasi tentang karyawan, aset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Meminta keterangan dan melakukan komunikasi dengan para pejabat dan karyawan Perseroan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab manajemen risiko.

As stated in the Risk Monitoring Committee Charter, the Risk Monitoring Committee has the authority to:

1. Work collectively and independently in carrying out its duties.
2. Have full, free, and unrestricted access to documents, data, and information regarding employees, assets, and other Company resources related to its duties implementation.
3. Request information and communicate with Company officials and employees, including the Board of Directors and parties carrying out risk management functions, regarding risk management duties and responsibilities.

4. Mencari dan memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan dari pihak di luar Perseroan (jika diperlukan), dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan kemampuan anggota Komite Pemantau Risiko
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Seek and obtain necessary information and documents from parties outside the Company (if necessary) to carry out its duties and improve the capabilities of Risk Monitoring Committee members.
5. Involve independent parties outside the Risk Monitoring Committee members as necessary to assist its duties implementation (if necessary), with the approval of the Board of Commissioners.
6. Exercise other authority granted by the Board of Commissioners.

## Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Training and/or Competency Development Program

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Pemantau Risiko agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

The Company provides members of the Risk Monitoring Committee with the opportunity to participate in competency improvement programs to enhance their insight and knowledge, supporting the implementation of their duties and ensuring they remain relevant to the latest developments in the Company's business activities.

Berikut pelaksanaan program peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025:

The following is a summary of the competency improvement programs participated in by members of the Risk Monitoring Committee throughout 2025:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer | Waktu Pelaksanaan<br>Time |
|---|---|---|---|---|
| Ferry Irawan | Ketua Komite Pemantau Risiko<br>Chairman of Risk Monitoring Committee | Disajikan pada sub bab Dewan Komisaris bagian Pelaksanaan Program Pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini<br>Presented in the Board of Commissioners sub-chapter under the section Implementation of the Board of Commissioners Training Program of this Annual Report. | | |
| Tatang Tabroni | Anggota Komite Pemantau Risiko<br>Risk Monitoring Committee Member | • *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era.* | • Enterprise Risk Management Academy | • 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025 |
| | | • *Risk Beyond* 2025 *on Enterprise Risk Management* | • Enterprise Risk Management Academy | • 4-5 Desember 2025<br>4-5 December 2025 |
| Belis Siswanto | Anggota Komite Pemantau Risiko<br>Risk Monitoring Committee Member | • *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era.* | • Enterprise Risk Management Academy | • 21-22 Agustus 2025<br>21-22 August 2025 |

## Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee's Meeting

Kebijakan yang mengatur mengenai rapat dan frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko dimuat dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

The policies governing the meetings and frequency of the Risk Monitoring Committee are set out in the Risk Monitoring Committee Charter, which regulates the following matters:

1 Rapat Komite Pemantau Risiko dapat berupa:

   a. Rapat internal, yaitu rapat yang hanya mengundan anggota Komite Pemantau Risiko saja dan/atau Organ Dewan Komisaris lainnya;
   b. Rapat eksternal, yaitu rapat yang juga mengundang pihak lain di luar Organ Dewan Komisaris.

2. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko berhak menyampaikan usulan rapat internal maupun rapat eksternal kepada Ketua Komite Pemantau Risiko.
3. Undangan rapat disampaikan secara tertulis atau dengan media elektronik dengan menyebutkan waktu, tempat dan agenda rapat yang akan dilakukan.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko.
5. Rapat Komite Pemantau Risiko diatur sebagai berikut:
   a. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
   b. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
   c. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir atau mengikuti rapat.
   d. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko bebas menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap angenda rapat tanpa invervensi siapapun.
   e. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   f. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang mencakup waktu, tempat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, dan hasil rapat. Jika ada perbedaan pendapat, maka harus dimasukkan ke dalam risalah rapat.
   g. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.

1. Risk Monitoring Committee's meetings may be in the form of:
   a. Internal meetings, namely meetings that invite only members of the Risk Monitoring Committee and/or other Board of Commissioners' Organs;
   b. External meetings, namely meetings that also invite other parties outside the Board of Commissioners' Organ.
2. Each member of the Risk Monitoring Committee has the right to submit proposals for internal and external meetings to the Chairman of Risk Monitoring Committee.
3. Meeting invitations are sent in writing or electronically, stating the time, place, and agenda of the meeting.
4. Risk Monitoring Committee meetings are chaired by the Chairman of Risk Monitoring Committee.
5. Risk Monitoring Committee meetings are regulated as follows:
   a. The Risk Monitoring Committee shall meet at least once a month, or at least the same as the minimum Board of Commissioners' meetings stipulated in the Company's Articles of Association.
   b. Risk Monitoring Committee meetings may only be held if attended by at least the chairman and one member.
   c. The decision of the Risk Monitoring Committee Meeting is considered valid if approved by more than half of the Risk Monitoring Committee members present or participating in the meeting.
   d. All members of the Risk Monitoring Committee is free to express their professional opinion in the discussion of each meeting agenda item without any intervention.
   e. Decisions of the Risk Monitoring Committee Meeting are made through deliberation.
   f. The implementation of Risk Monitoring Committee Meeting is recorded in the minutes of the meeting, which include the time, place, agenda, participants in attendance, topics discussed, and the meeting results. Any differences of opinion must be included in the minutes.
   g. The minutes of the meeting are signed by all members of the Risk Monitoring Committee present.

## Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Throughout 2025, the Company's Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings.

## Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Attendance of Risk Monitoring Committee in Risk Monitoring Committee Meetings

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Rapat Komite Pemantau Risiko<br>Risk Monitoring Committee's Meetings | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Jumlah Kehadiran<br>Total Attendance | Tingkat Kehadiran<br>Attendance |
| Ferry Irawan | Ketua Komite Pemantau Risiko<br>Chairman of the Risk Monitoring Committee | 12 | 12 | 100% |
| Belis Siswanto | Anggota Komite Pemantau Risiko<br>Risk Monitoring Committee Member | 12 | 12 | 100% |
| Tatang Tabroni[1] | Anggota Komite Pemantau Risiko<br>Risk Monitoring Committee Member | 8 | 8 | 100% |
| **Rata-Rata Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko**<br>Risk Monitoring Committee's Average Attendance | | | | **100%** |

Keterangan:
[1] mulai menjabat sejak 1 Mei 2025.

Remark:
[1] start serving as of 21 May 2025

## Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025
Realization of the Risk Monitoring Committee Work Program in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Pemantau Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, the Company's Risk Monitoring Committee implemented various activities as part of its duties and responsibilities already planned in the Risk Monitoring Committee's Work Program, with the following details:

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Perencanaan** Planning Aspect | | | | |
| 1. | Penyusunan RKA KPR Tahun 2026<br>Preparation of the Risk Monitoring Committee 2026 Work Program & Budget (RKA) | Juli - September<br>July - September | Pembahasan konsep pada tanggal 18 September 2025, 19 Oktober 2025, 23 Oktober 2025.<br><br>Surat Dewan Komisaris Nomor S36/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025. | Concept discussions on 18 September 2025, 19 October 2025, and 23 October 2025.<br><br>Board of Commissioners' Letter No. S36/PII/DK/1025 dated 29 October 2025. |
| 2. | Penyiapan Bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation of 2026 RKA for the Board of Commissioners | September | | |
| 3. | Penyiapan Bahan Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation of the Proposed 2026 Performance Contract (KPI) of the Board of Commissioners | September | | |
| 4. | Penelahaan atas Usulan RKAP dan/atau RJPP PT PII Tahun 2026<br>Review of the Proposed IIGF's RKAP and/or RJPP in 2026 | Juli - September<br>July - September | Rapat pembahasan pada tanggal 9 Oktober 2025, 12 Oktober 2025, 16 Oktober 2025, 23 Oktober 2025, dan 28 Oktober 2025. | Discussion meetings on 9 October 2025, 12 October 2025, 16 October, 2025, 23 October 2025, and 28 October 2025. |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Penyiapan Bahan Tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas Rancangan RKAP dan/atau RJPP Tahun 2026<br>Preparation of Materials for the Board of Commissioners' Responses to the GMS on the 2026 RKAP and/or RJPP draft | Desember (sesuai dengan jadwal RUPS)<br>December (in accordance with the GMS schedule) | Surat Dewan Komisaris Nomor S-38/PII/DK/1025 tanggal 30 Oktober 2025. | Board of Commissioners' Letter No. S-38/PII/DK/1025 dated 30 October 2025. |
| **Aspek Pengawasan** Supervisory Aspect | | | | |
| 6. | Pelaksanaan Rapat Internal KPR<br>Implementation of Internal Risk Monitoring Committee Meeting | Sesuai Kebutuhan<br>As Required | · 5 Juli 2025<br>· 17 Juli 2025<br>· 26 Agustus 2025 | · 5 July 2025<br>· 17 July 2025<br>· 26 August 2025 |
| 7. | Pembahasan dengan Divisi *Risk Management*<br>Discussion with Risk Management Division | Triwulanan<br>Quarterly | · 15 Januari 2025<br>· 17 April 2025<br>· 17 Juli 2025<br>· 23 Oktober 2025 | · 15 January 2025<br>· 17 April 2025<br>· 7 July 2025<br>· 23 October 2025 |
| 8. | *Monitoring* dan Evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya<br>Monitoring and Evaluation of Risk Management Policy and Implementation | Triwulanan<br>Quarterly | Dilaksanakan tiap triwulan bersama Divisi RM | Conducted quarterly with Risk Management Division |
| 9. | Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan RKAP untuk Aspek Pengelolaan Risiko<br>Evaluating the RKAP in terms of Risk Management Aspect | Triwulanan<br>Quarterly | Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi RM dan divisi terkait | Conducted quarterly with Risk Management Division and related division |
| 10. | Evaluasi atas Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko yang Disusun dan Dilaksanakan oleh Perseroan<br>Evaluation of Risk Management Policies and Strategies Formulated and Applied by the Company | Triwulanan<br>Quarterly | Dilaksanakan tiap triwulan bersama Divisi RM | Conducted quarterly together with Risk Management Division |
| 11. | Penelaahan Rencana Kerja Divisi *Risk Management*<br>Review of the Work Program of the Risk Management Division | Awal Tahun<br>Beginning of the Year | 15 Januari 2025 | 15 January 2025 |
| 12. | Rapat dengan Divisi-Divisi Terkait Aspek Risiko dari Masing-Masing Divisi<br>Meetings with Divisions regarding Risk Aspects for Each Division | Triwulanan<br>Quarterly | Dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan Divisi RM dan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi | Held simultaneously with the Risk Management Division's discussion and joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors. |
| 13. | Penelahaan atas Laporan Manajemen Risiko<br>Review of Risk Management Report | Sesuai periode pelaporan<br>As per reporting period | Disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi dengan Surat Penyampaian Evaluasi Manajemen Risiko PT PII tahun 2024 nomor S-10/PII/DK/0325 tanggal 10 Maret 2025 | Submitted through the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors, with the Letter of Submission of the Risk Management Evaluation of IIGF for 2024 No. S-10/PII/DK/0325, dated 10 March 2025. |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Penelaahan Laporan Manajemen Bulanan dengan Fokus pada Aspek Manajemen Risiko<br>Reviewing Monthly Management Report with Focus on Risk Management Aspects | Bulanan<br>Monthly | Dilaksanakan tiap bulan, pada:<br>· Rapat Teknis Organ Dewan Komisaris bersama Manajemen bulanan<br>· Rapat Dewan Komisaris bulanan | Held monthly, at:<br>· Monthly Technical Meeting of the Board of Commissioners with Management<br>· Monthly Board of Commissioners' Meeting |
| 15. | Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja<br>Discussion of Symptoms of Performance Decline | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per Disposition from the Board of Commissioners | · S-03/PII/DK/0225 tanggal 10 Februari 2025<br>· S-18/PII/DK/0525 tanggal 26 Mei 2025<br>· S-31/PII/DK/1025 tanggal 28 Oktober 2025 | · S-03/PII/DK/0225 dated 10 February 2025<br>· S-18/PII/DK/0525 dated 26 May 2025<br>· S-31/PII/DK/1025 dated 28 October 2025 |
| 16. | *Monitoring* atas Proyek yang Telah Dijamin<br>Monitoring of Projects that have been Guaranteed | Sesuai Jadwal Divisi *Project Monitoring*<br>According to the Project Monitoring Division Schedule | 18-19 Juli 2025 (*Site Visit* Proyek Satelit, Batam, Kepulauan Riau) | 18-19 July 2025 (Site Visit to Satellite Project, Batam, Riau Islands) |
| 17. | Penelahaan Aspek Risiko atas Pemberian Tanggapan (*Response*) kepada Direksi/RUPS<br>Review of Risk Aspects of Providing Response to the Board of Directors/GMS | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per Disposition from the Board of Commissioners | · Laporan Realisasi IKU Dewan Komisaris PT PII Triwulan II Tahun 2025: S-23/PII/DK/0725<br>· Laporan Pengawasan RKAP PT PII Tahun 2025 Semester I: S-26/PII/DK/0825<br>· Telaah atas Kebijakan Pengadaan PT PII dan Pelaksanaannya: S-21/PII/DK/ 0725<br>· Usulan Penunjukan KAP (PwC) sebagai Auditor PT PII Tahun Buku 2025: S-27/PII/DK/0825 | · Realization Report of IIGF Board of Commissioners' KPIs in Q2 2025: S-23/PII/DK/0725<br>· Supervision Report of IIGF's RKAP Semester I 2025: S-26/PII/DK/0825<br>· Review of IIGF's Procurement Policy and Implementation: S-21/PII/DK/0725<br>· Proposed Appointment of KAP (PwC) as IIGF's Auditor for the 2025 Fiscal Year: S-27/PII/DK/0825 |
| 18. | Penelaahan Kebijakan dan Peraturan-Peraturan yang Terkait dengan Kegiatan Usaha Perusahaan dengan Fokus pada Aspek Manajemen Risiko<br>Review of Policies and Regulations related to the Company's Business Activities with a Focus on Risk Management Aspects | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per Disposition from the Board of Commissioners | · Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan IV Tahun 2024: S-02/PII/DK/0225<br>· Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan I Tahun 2025: S-13/PII/DK/0425<br>· Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan II Tahun 2025: S-24/PII/DK/0825<br>· Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan III Tahun 2025: S-33/PII/DK/1025 | · Response to the Utilization Report of PMN in Q4 2024: S-02/PII/DK/0225<br>· Response to the Utilization Report of PMN in Q1 2025: S-13/PII/DK/0425<br>· Response to the Utilization Report of PMN in Q2 2025: S-24/PII/DK/0825<br>· Response to the Utilization Report of PMN in Q3 2025: S-33/PII/DK/1025 |
| 19. | Pembahasan terkait Transaksi atau Tindakan dalam Lingkup Kewenangan Dewan Komisaris/RUPS<br>Discussion of Transactions or Actions within the Scope of Authority of the Board of Commissioners/GMS | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per Disposition from the Board of Commissioners | Dilaksanakan di setiap penyusunan naskah tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi/RUPS.<br>• Penelaahan IKU Individual Direksi Tahun 2025 (S-01/PII/DK/0125 tanggal 28 Januari 2025)<br>• Penelaahan Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Tw IV 2024 S02/PII/DK/0225 tanggal 10 Februari 2025)<br>• Penelaahan PTT Dekom (S-07/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025)<br>• Penelaahan Realisasi IKU Dekom (S-08/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025) | Implemented in every preparation of the Board of Commissioners' response to the Board of Directors/GMS.<br>• Review of the Board of Directors' Individual KPIs in 2025 (S-01/PII/DK/0125 dated 28 January 2025)<br>• Review of Feedback on the Report of Utilization of PMN Q4 2024 (S02/PII/DK/0225 dated 10 February 2025)<br>• Review of the Board of Commissioners' PTT (S-07/PII/DK/0225 dated 28 February 2025)<br>• Review of the Board of Commissioners' KPI Realization (S-08/PII/DK/0225 dated 28 February 2025) |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • Penelaahan Representation Letter PwC (S-/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025) | • Review of PwC Representation Letter (S-/PII/DK/0225 dated 28 February 2025) |
| | | | • Penelaahan Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan I 2025 (S13/PII/DK/0425 tanggal 29 April 2025) | • Review of Feedback on the Report of Utilization of PMN Q1 2025 (S13/PII/DK/0425) 29 April 2025) |
| | | | • Penelaahan Realisasi IKU Dekom (S-14/PII/DK/0425 tanggal 30 April 2025) | • Review of the Board of Commissioners' KPI Realization (S-14/PII/DK/0425 dated 30 April 2025) |
| | | | • Penelaahan Realisasi IKU Dekom Triwulan II (S-23/PII/DK/0725 tanggal 30 Juli 2025) | • Review of the Board of Commissioners' KPI Realization Q2 (S-23/PII/DK/0725 dated 30 July 2025) |
| | | | • Penelaahan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan II 2025 (S24/PII/DK/0825 tanggal 13 Agustus 2025) | • Review of Report of Utilization of PMN Q2 2025 (S24/PII/DK/0825 dated 13 August 2025) |
| | | | • Penelaahan PTT Dekom (S-25/PII/DK/0825 tanggal 14 Agustus 2025) | • Review of the Board of Commissioners' PTT (S-25/PII/DK/0825 dated 14 August 2025) |
| | | | • Penelaahan Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan III (S33/PII/DK/1025 tanggal 28 Oktober 2025) | • Review of Feedback on the Report of Utilization of PMN Q3 (S33/PII/DK/1025 dated 28 October 2025) |
| | | | • Penelaahan Realisasi IKU Dekom Triwulan III (S-35/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025) | • Review of the Board of Commissioners' KPI Realization Q3 (S-35/PII/DK/1025 dated 29 October 2025) |
| 20. | Pengawasan terhadap Implementasi Penjaminan dan PMN<br>Supervision of the Implementation of Guarantee and PMN | Sesuai Disposisi Dewan Komisaris<br>As per Disposition from the Board of Commissioners | • Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan IV Tahun 2024: S-02/PII/DK/0225 | • Response to the Utilization Report of PMN in Q4 2024: S-02/PII/DK/0225 |
| | | | • Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan I Tahun 2025: S-13/PII/DK/0425 | • Response to the Utilization Report of PMN in Q1 2025: S-13/PII/DK/0425 |
| | | | • Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan II Tahun 2025: S-24/PII/DK/0825 | • Response to the Utilization Report of PMN in Q2 2025: S-24/PII/DK/0825 |
| | | | • Tanggapan atas Laporan Penggunaan PMN Triwulan III Tahun 2025: S-33/PII/DK/1025 | • Response to the Utilization Report of PMN in Q3 2025: S-33/PII/DK/1025 |
| **Aspek Pelaporan** Reporting Aspect | | | | |
| 21. | Penyusunan Laporan Triwulanan KPR<br>Preparation of Risk Monitoring Committee Quarterly Report | Triwulanan<br>Quarterly | - Laporan Triwulan IV Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2025: Memo KPR Nomor-02/PII/DK-KPR/0225 tanggal 14 Februari 2025 | - Q4 2024 Report dated 14 February 2025: Risk Monitoring Committee Memo No. 02/PII/DK-KPR/0225 dated 14 February 2025 |
| | | | - Laporan Triwulan I Tahun 2025 tanggal 28 April 2025: Memo KPR Nomor-03/PII/DK-KPR/0425 tanggal 28 April 2025 | - Q1 2025 Report dated 28 April 2025: Risk Monitoring Committee Memo No. 03/PII/DK-KPR/0425 dated 28 April 2025 |
| | | | - Laporan Triwulan II Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025: Memo KPR Nomor-05/PII/DK-KPR/0725 tanggal 28 Juli 2025 | - Q2 2025 Report dated 28 July 2025: Risk Monitoring Committee Memo No. 05/PII/DK-KPR/0725 dated 28 July 2025 |
| | | | - Laporan Triwulan III Tahun 2025 tanggal 6 November 2025: Memo KPR Nomor-07/PII/DK-KPR/1125 tanggal 6 November 2025 | - Q3 2025 Report dated 6 November 2025: Risk Monitoring Committee Memo No. 07/PII/DK-KPR/1125 dated 6 November 2025 |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan<br>Review of Quarterly Management Report | Triwulanan<br>Quarterly | Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Komite Pembahasan Laporan Manajemen, Rapat Dewan Komisaris dan Laporan Triwulanan KPR | Held simultaneously with the Committee Meeting to Discuss the Management Report, Board of Commissioners' Meeting, and Risk Monitoring Committee Report Quarterly |
| 23. | Penyusunan Laporan Tahunan KPR<br>Preparation of Risk Monitoring Committee Annual Report | Triwulan pertama tahun berjalan<br>First Quarter of the Year | Melalui Surat Penyampaian Evaluasi Manajemen Risiko Perseroan Tahun 2024 S-10/PII/DK/0325 tanggal 10 Maret 2025 | Through the Submission Letter of the Company's 2024 Risk Management Evaluation S-10/PII/DK/0325 dated 10 March 2025 |
| **Aspek Penerapan GCG** GCG Implementation Aspect | | | | |
| 24. | Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG Perseroan Tahun 2024 oleh BPKP<br>Implementation of GCG Assessment in 2024 by BPKP | Januari - Maret<br>January - March | · *Entry Meeting* GCG *Assessment* pada tanggal 14 Januari 2025<br>· Wawancara Dewan Komisaris pada tanggal 26 Februari 2025<br>· Pembahasan GCG aspek Dewan Komisaris dengan BPKP pada tanggal 24-28 Februari 2025<br>· *Pra Exit Meeting* pada tanggal 27 Februari 2025<br>· *Exit Meeting* pada tanggal 7 Maret 2025 | · GCG Assessment Entry Meeting on 14 January 2025<br>· Interview with Board of Commissioners on 26 February 2025<br>· Discussion of GCG aspects of Board of Commissioners with BPKP on 24-28 February 2025<br>· Pre-Exit Meeting on 27 February 2025<br>· Exit Meeting on 7 March 2025 |
| 25. | Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG Rekomendasi BPKP Tahun 2024<br>Monitoring the Follow-up of the Implementation of AOI GCG Recommendations by BPKP in 2024 | Maret - Desember<br>March - December | Rapat pada tanggal 11 Maret 2025, 20-21 Juni 2025, dan 15 November 2025 | Meetings on 11 March 2025, 20-21 June 2025, and 15 November 2025 |
| 26. | Penelaahan atas Perubahan Lingkungan Bisnis Perseroan<br>Review of Changes in the Company's Business Environment | November | · Rapat tanggal 22 November 2025 dan 31 Desember 2025<br>· Surat S-43/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 | · Meetings on 22 November 2025 and 31 December 2025<br>· Letter S-43/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 |
| 27. | Penelahaan atas Kebijakan dan Sistem Teknologi Informasi Perseroan<br>Review of the Company's Information Technology Policy and System | April | Surat S-45/PII/DK/1225 tanggal 30 Desember 2025 | Letter S-45/PII/DK/1225 dated 30 December 2025 |
| 28. | Penelahaan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir (SDM)<br>Review of Career Development (HR) Policy and Implementation | Mei<br>May | Rapat tanggal 4 Juli 2025<br><br>Surat S-32/PII/DK/10225 tanggal 28 Oktober 2025 | Meeting on 4 July 2025<br><br>Letter S-32/PII/DK/10225 dated 28 October 2025 |
| 29. | Penelahaan atas Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan<br>Review of the Company's Quality Policy or Service Satisfaction | Maret<br>March | Rapat tanggal 22 November 2025<br><br>Surat S-41/PII/DK/1225 tanggal 17 Desember 2025 | Meeting on 22 November 2025<br><br>Letter S-41/PII/DK/1225 dated 17 December 2025 |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Lainnya** Other Aspects | | | | |
| 30. | Pembahasan Draf *Annual Report* Tahun 2024<br>Discussion of the 2024 Annual Report Draft | Februari - Mei<br>February - May | Rapat tanggal 6 Februari 2025, 4 Maret 2025, 11 Maret 2025, dan 10 April 2025. | Meetings on 6 February 2025, 4 March 2025, 11 March 2025, and 10 April 2025. |
| 31. | *Self Assessment* Kinerja Komite Pemantau Risiko<br>Self-Assessment of Risk Monitoring Committee Performance | Desember<br>December | Rapat tanggal 29 Desember 2025 | Meeting on 29 December 2025 |
| 32. | Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko<br>Competency Development of Risk Monitoring Committee Members | Sesuai Jadwal<br>As Scheduled | · *Masterclass* GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era*, Jogja, 21 Agustus 2025<br>· Seminar GRC *Summit* 2025 *Resilience to Sustainability: Leading Through* GRC *in The Post-Digital Era*, Jogja, 22 Agustus 2025<br>· *Risk Beyond* 2025 *on Enterprise Risk Management*, Bali, 4-5 Desember 2025 | · Masterclass GRC Summit 2025 Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post-Digital Era, Yogyakarta, 21 August 2025<br>· Seminar GRC Summit 2025 Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in The Post-Digital Era, Yogyakarta, 22 August 2025<br>· Risk Beyond 2025 on Enterprise Risk Management, Bali, 4-5 December 2025 |

## Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko
Performance Assessment of Risk Monitoring Committee

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Risk Monitoring Committee, with reference to the implementation of duties and responsibilities, including the conduct of Risk Monitoring Committee meetings, as described in the Chapter on Performance Assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees reporting to the Board of Commissioners in this Annual Report.

## Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Pada Tahun 2025, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-010/KOM/0925 tanggal 30 September 2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nominasi dan remunerasi di lingkungan Perseroan.

In 2025, the Board of Commissioners established Nomination and Remuneration Committee in accordance with the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-010/KOM/0925 dated 30 September 2025 concerning the Appointment and Determination of Members of Nomination and Remuneration Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. The Nomination and Remuneration Committee is established to support the effective implementation of the Board of Commissioners' duties, particularly those related to nomination and remuneration policies within the Company.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PII merujuk pada PMK No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The Nomination and Remuneration Committee of IIGF is established by referring to PMK No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

## Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Nomination and Remuneration Committee shall have a term of office not exceeding the term of their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.

Sementara itu, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya di dalam Perseroan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee members who do not concurrently serve as members of the Board of Commissioners shall have a term of office not exceeding the term of their appointment in the Company, without reducing the Board of Commissioners' right of termination at any time.

## Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2025

Jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan 1 (satu) orang sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Nomination and Remuneration Committee has 2 (two) members, consisting of 1 (one) Chairman of Nomination and Remuneration Committee and 1 (one) member of Nomination and Remuneration Committee.

Berikut susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2025:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2025 was as follows:

| Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 30 September – 31 Desember 2025<br>Nomination and Remuneration Committee Period: 30 September - 31 December 2025 | | |
|---|---|---|
| Nama<br>Name | Jabatan di Perseroan<br>Position in the Company | Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi<br>Position in the Nomination and Remuneration Committee |
| Hadiyanto | Komisaris Utama<br>President Commissioner | Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi<br>Chairman of Nomination and Remuneration Committee |
| Fiyarni Moeslim Pamuntjak | Division Head of Human Capital and Organization Development | Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>Nomination and Remuneration Committee Member |

# Profil Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Profile of Nomination and Remuneration Committee in 2025



## Hadiyanto

**Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Utama**

Chairman of Nomination and Remuneration Committee/President Commissioner

Penjelasan lebih lanjut di uraikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Ini

Further information can be referred to in the Company Profile chapter, subchapter of Board of Commissioners' Profile in this Annual Report.

| | | |
|---|---|---|
| Dasar Hukum Pengangkatan<br>Legal Basis for Appointment | • KMK 297 Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024<br>• SK Dewan Komisaris No. SK-010/KOM/0925 tanggal 30 September 2025 | • KMK 297 of 2024, dated 17 July 2024<br>• Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-010/KOM/0925 dated 30 September 2025 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| Masa Jabatan<br>Tenure | Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris | Following the term of office as Board of Commissioners |



## Fiyarni Moeslim Pamuntjak

**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Nomination and Remuneration Committee Member

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Domisili Domicile | Jakarta | Jakarta |
| Usia Age | 54 Tahun per 31 Desember 2025 | 54 years old as of 31 December 2025 |
| Tempat/Tanggal Lahir<br>Place/Date of Birth | Jakarta, 2 April 1971 | Jakarta, 2 April 1971 |
| Riwayat Pendidikan<br>Educational Background | • S2 PPM School of Management, International Marketing (2000)<br>• S1 Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur (1995) | • Master Degree in PPM School of Management, International Marketing (2000)<br>• Bachelor Degree in Universitas Indonesia, Faculty of Engineering, Department of Architecture (1995) |
| Riwayat Jabatan<br>Career History | • Division Head of Human Capital and Organizational Development, PT PII (Persero) (2024 – Sekarang):<br>• *Online Course Trainer & Producer at* Udemy (2020 – 2024)<br>• *Head of* HR, PT Edelman Indonesia (2017 – 2019<br>• HR *Manager*, Clifford Chance/ Linda Widyati & Partner (2015 – 2017)<br>• *Head of* HR, PT Mandiri AXA General Insurance (2013 – 2015) | • Division Head of Human Capital and Organizational Development, PT PII (Persero) (2024 – Present):<br>• Online Course Trainer & Producer at Udemy (2020 – 2024)<br>• Head of HR, PT Edelman Indonesia (2017 – 2019<br>• HR Manager, Clifford Chance/ Linda Widyati & Partner (2015 – 2017)<br>• Head of HR, PT Mandiri AXA General Insurance (2013 – 2015) |

| | | |
|---|---|---|
| | • *Recruitment & Training Manager*, PT Jebsen & Jessen Business Services Indonesia (2008 – 2013)<br>• *Learning & Development Section Head*, PT Bristol Myers Squibb Indonesia (2006 – 2008)<br>• 2002 – 2005: Operations Manager, PT Tri Cipta Chandra<br>• *Associate Assessor*, PT Daya Dimensi Indonesia (2000 – 2002)<br>• *Business Development Staff for Property Business*, PT Sadean International (1995 – 2000) | • Recruitment & Training Manager, PT Jebsen & Jessen Business Services Indonesia (2008 – 2013)<br>• Learning & Development Section Head, PT Bristol Myers Squibb Indonesia (2006 – 2008)<br>• 2002 – 2005: Operations Manager, PT Tri Cipta Chandra<br>• Associate Assessor, PT Daya Dimensi Indonesia (2000 – 2002)<br>• Business Development Staff for Property Business, PT Sadean International (1995 – 2000) |
| Rangkap Jabatan<br>Concurrent Positions | • Dalam Perseroan:<br>- Division Head of *Human Capital and Organisation Development*, PT PII (Persero)<br>• Diluar Perseroan:<br>- Tidak ada | • In the Company:<br>- Division Head of Human Capital and Organizational Development, PT PII (Persero)<br>• Outside the Company:<br>- None |
| Sertifikasi<br>Certification | • Sertifikasi BNSP – *Human Resources Manager*<br>• Sertifikasi BNSP – *Trainer Level* 4 | • BNSP Certification – Human Resources Manager<br>• BNSP Certification –Trainer Level 4 |
| Dasar Hukum Pengangkatan<br>Legal Basis for Appointment | SK Dewan Komisaris No. SK-010/KOM/0925 tanggal 30 September 2025 | Board of Commissioners' Decision Letter No. SK-010/KOM/0925 dated 30 September 2025 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama | First Period |
| Masa Jabatan<br>Tenure | Mengikuti masa jabatan sebagai Division Head of Human Capital and Organisation Development | Following the term of office as Division Head of Human Capital and Organisation Development |

## Pernyataan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement of Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Nomination and Remuneration Committee have fulfilled all independence criteria and shall be able to carry out their duties independently, uphold the Company's interests, and cannot be influenced by any party.

### Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Table: Independence of Nomination and Remuneration Committee in 2025

| Aspek Independensi<br>Independence Aspect | | Hadiyanto | Fiyarni Moeslim Pamuntjak |
|---|---|---|---|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Shall not have a financial affiliation with the Board of Commissioners and Board of Directors | ✔ | ✔ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan | Shall not have a shareholding relationship in the Company | ✔ | ✔ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota komite Nominasi dan Remunerasi | Shall not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Nomination and Remuneration Committee members | ✔ | ✔ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah | Shall not serve as an administrator of political parties, officials, and the government | ✔ | ✔ |

Keterangan: √ Independen ×: Tidak Independen

Remark: √ Independent ×: Not Independent

## Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Charter

Sehubungan dengan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dilakukan pada bulan September 2025, Perseroan sampai dengan saat ini masih dalam proses penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman kerja. Dengan demikian, untuk sementara pengaturan mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme kerja Komite Nominasi dan Remunerasi masih mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Kebijakan GCG) Perseroan.

In relation to the establishment of Nomination and Remuneration Committee in September 2025, the Company is currently in the process of drafting the Nomination and Remuneration Committee Charter as a working guideline. Accordingly, for the time being, the regulations regarding duties, functions, and working mechanisms of Nomination and Remuneration Committee still refer to the applicable provisions, namely the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, the Company's Articles of Association, and the Company's Good Corporate Governance Policy (GCG Policy).

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan kewenangan yang sejalan dengan lingkup tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, terutama terkait kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

To support the effective implementation of its duties, the Nomination and Remuneration Committee is granted authority in line with the scope of duties, obligations, and responsibilities of the Board of Commissioners, as stipulated in the Company's Articles of Association, specifically related to activities that require the Board of Commissioners' attention.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dimuat dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Kebijakan GCG) Perseroan, yang terdiri atas:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Utama, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Utama, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi pihak independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko; serta

The provisions of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are stipulated in the Company's Good Corporate Governance Policy (GCG Policy), which comprises:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding employee nomination policy to be submitted to the President Director, including proposing selection criteria and nomination procedures, and developing assessment system;
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding employee remuneration policy to be submitted to the President Director, including salary system, allowances, and income in retirement;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for the Board of Directors to be submitted to Shareholders;
4. Preparing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for selecting and/or replacing the Board of Directors to be submitted to Shareholders;
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding independent parties to serve as independent members of Audit Committee and Risk Monitoring Committee; and

6. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi.

6. Evaluating the implementation of the nomination and remuneration policy.

## Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Training/ Competency Development Program Nomination and Remuneration Committee

Selama tahun berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum mengikuti program pelatihan khusus bagi anggota komite. Hal ini dikarenakan Komite Nominasi dan Remunerasi baru dibentuk pada bulan September 2025 sehingga periode pelaksanaan tugas pada tahun pelaporan relatif singkat.

Meskipun demikian, anggota komite yang berasal dari unsur Dewan Komisaris tetap mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan bagi Dewan Komisaris. Pada tahun 2025, Sdr. Hadiyanto sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti pelatihan pada tanggal 21-22 Agustus 2025 dan 3-5 Desember 2025 sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab Dewan Komisaris bagian Pelaksanaan Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

During the current year, the Nomination and Remuneration Committee did not attend any specific training program for committee members. This is due to Nomination and Remuneration Committee is recently established in September 2025, resulting in a relatively short period of duty implementation during the reporting year.

Nevertheless, committee members from the Board of Commissioners continue to participate in various training and competency development activities organized for the Board of Commissioners. In 2025, Mr. Hadiyanto, as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, participated in training on August 21-22, 2025, and December 3-5, 2025, as described in the Board of Commissioners sub-chapter under the Implementation of the Board of Commissioners Training Program in this Annual Report.

## Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meetings in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali rapat.

Throughout 2025, the Company's Nomination and Remuneration Committee held 1 (one) meeting.

| Tanggal Rapat<br>Date of Meeting | Agenda Rapat<br>Meeting Agenda | Kehadiran<br>Attendance | |
|---|---|---|---|
| | | Hadiyanto | Fiyarni Moeslim Pamuntjak |
| 12 November 2025<br>12 November 2025 | *Kick Off Meeting* Komite Nominasi & Remunerasi<br>Kick-Off Meeting of the Nomination & Remuneration Committee | ✔ | ✔ |

## Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Performance Assessment of Nomination and Remuneration Committee

Pada tahun pelaporan, penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan komite baru dibentuk pada bulan September sehingga periode pelaksanaan tugasnya masih terbatas.

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala pada periode berikutnya sebagai bagian dari upaya

In the reporting year, performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee was not yet conducted. This is due to the committee is recently established in September, resulting in the duty implementation period that is limited.

The Company is committed to conducting periodic performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee in the subsequent period as

meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi komite dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

part of its efforts to improve the effectiveness of the committee's functions in supporting the implementation of good corporate governance.

## Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committees Under the Board of Commissioners

Merujuk pada PMK No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Pasal 28 Pasal 1, menyampaikan bahwa "Pembentukan Komite Lainnya jika diperukan, dan ayat 3 menyebutkan yang dimaksud komite Lainnya terdiri dari Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi".

Referring to PMK No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, Article 28 paragraph 1 states that "Other Committees may be established if necessary, and paragraph 3 states that Other Committees shall consist of Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee."

Hingga akhir Desember 2025, PT PII hanya memiliki 2 (dua) Komite lainnya di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab Sebelumnya.

As of the end of 2025, IIGF only had 2 (two) other committees reporting to the Board of Commissioners, which were Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee, as explained in the previous chapter.

# Komite di Bawah Direksi

Committee Reporting to the Board of Directors

Hingga akhir tahun 2025, Komite di bawah Direksi PT PII hanya 1 (satu) Komite yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK-038B/DIR/HC/12/22 tentang Penunjukan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

As of the end of 2025, there is only 1 (one) Committee reporting to the Board of Directors of IIGF, namely Information Technology Steering Committee, as governed in the Board of Directors' Decision Letter No. SK-038B/DIR/HC/12/22 concerning the Appointment of Members of the Information Technology Steering Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

## Komite Pengarah Teknologi Informasi

Information Technology Steering Committee

Dalam rangka memastikan keselarasan antara rencana strategis teknologi informasi dan rencana strategis Perseroan, serta meningkatkan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna, Direksi membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (Komite Pengarah TI). Pembentukan Komite Pengarah TI tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor SK-038B/DIR/HC/1222 tentang Penunjukan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

To ensure alignment between information technology strategic plan and the Company's strategic plan, and to enhance competitive advantage through the proper use of information technology, the Board of Directors of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund establishes an Information Technology Steering Committee (IT Steering Committee). The IT Steering Committee is established based on the Board of Directors' Decision Letter No. SK-038B/DIR/HC/1222 on the Appointment of Members of the Information Technology Steering Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

## Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah TI
Structure and Members of the IT Steering Committee

Sejalan dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-038B/DIR/HC/1222, struktur dan keanggotaan Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

In line with the Board of Directors' Decision Letter No. SK-038B/DIR/HC/1222, the structure and members of the IT Steering Committee are as follows:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua Chairman | Direktur Keuangan (yang membawahi fungsi TI) | Finance Director (in charge of IT function) |
| Anggota Member | 1. Direktur Utama (yang membawahi fungsi RM)<br>2. Kepala Divisi IT<br>3. Kepala Divisi RM | 1. President Director (in charge of RM function)<br>2. Head of IT Division<br>3. Head of RM Division |

## Profil Anggota Komite Pengarah TI
Profile of Members of IT Steering Committee

Anggota Komite Pengarah TI salah satunya terdiri dari Unsur Direksi yaitu Direktur Keuangan sebagai Ketua Komite dan Direktur Utama sebagai anggota. Dengan demikian profil anggota Komite Pengarah TI dapat dilihat pada bab bab Profil Perusahaan sub bab Profil Perusahaan sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

The IT Steering Committee consists of members of the Board of Directors, including Finance Director as the Committee Chairman and President Director as a member. Therefore, profile of the IT Steering Committee members can be referred to in the Company Profile chapter, subchapter of the Board of Directors' Profile in this Annual Report.

## Independensi Komite Pengarah TI
Independence of IT Steering Committee

PT PII memastikan bahwa masing-masing anggota Komite Pengarah TI bekerja secara independen, tanpa benturan kepentingan dalam proses pembahasan serta pemberian rekomendasi kepada Direksi.

IIGF ensures that each member of the IT Steering Committee works independently, without any conflict of interest in the discussion process and in providing recommendations to the Board of Directors.

## Pedoman Kerja Komite Pengarah TI
IT Steering Committee Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengarah TI berpedoman pada Kebijakan Teknologi Informasi (IT *Policy*) Perseroan. Pokok-pokok yang diatur dalam Kebijakan tersebut antara lain adalah terkait:

1. Tujuan Tata Kelola TI;
2. Komitmen dan Komite Pengarah TI;
3. Perencanaan Layanan TI;
4. Kontinuitas dan Pemulihan Layanan TI;
5. Pengelolaan Sumber Daya TI;
6. Desain dan Pengembangan Layanan TI;
7. Dukungan Operasional Layanan TI;
8. Pengelolaan Keamanan TI; dan
9. Pengelolaan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja TI atau permasalahan TI yang bersifat strategis.

In carrying out duties and responsibilities, the IT Steering Committee is directed by the Information Technology Policy (IT Policy) of the Company. The main points regulated in the Policy are, among others, related to:

1. IT Governance Objectives;
2. Commitment and IT Steering Committee;
3. IT Service Planning;
4. IT Service Continuity and Recovery;
5. IT Resource Management;
6. IT Service Design and Development;
7. IT Service Operational Support;
8. IT Security Management; and
9. IT Performance Monitoring and Evaluation Management

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI
Duties and Responsibilities of IT Steering Committee

Komite Pengarah TI mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memastikan keselarasan Rencana Strategis TI dengan Rencana Strategis Perseroan
2. Memberikan persetujuan terhadap IT *Master Plan*
3. Melakukan pemantauan dan memberikan arahan atas implementasi Rencana Strategis TI
4. Memonitor efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan
5. Menentukan prioritas terhadap inisiatif TI
6. Perumusan Kebijakan dan Prosedur TI
7. Penyelesaian terhadap isu-isu ataupun permasalahan TI yang bersifat strategis

IT Steering Committee has duties and responsibilities as follows:
1. Ensuring alignment of IT Strategic Plan with the Company's Strategic Plan
2. Approving the IT Master Plan
3. Monitoring and providing advice on the implementation of IT Strategic Plan
4. Monitoring the effectiveness of IT Policy implementation within the Company
5. Determining priority of IT initiatives
6. Formulating IT Policy and Procedures
7. Resolving strategic IT issues or problems

## Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah TI
Implementation of IT Steering Committee Activities

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah TI telah melaksanakan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas diantaranya sebagai berikut:

Throughout 2025, IT Steering Committee carried out various duties as follows:

### Rapat Komite Pengarah TI
IT Steering Committee's Meeting

Komite Pengarah TI mengadakan rapat sesuai kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu kehadirannya.

IT Steering Committee meets as necessary at a predetermined location, time, and date so that all members can schedule their attendance.

#### Frekuensi, Agenda dan Kehadiran Rapat Komite Pengarah TI

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah TI telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

#### Frequency, Agenda, and Meeting Attendance of IT Steering Committee

Throughout 2025, IT Steering Committee held 1 (one) meeting, with the following agenda and attendance:

| Tanggal Rapat<br>Meeting Date | Agenda | Peserta<br>Participant | Agenda Rapat<br>Meeting Agenda | Arahan<br>Instruction |
|---|---|---|---|---|
| 10 November 2025<br>10 November 2025 | IT *Maturity* dan *Review* ITMP<br>IT Maturity and ITMP Review | 1. Andre Permana<br>2. Donny Hamdani<br>3. Achmad Abimanyu<br>4. Rully Susiyanti | IT *Maturity* dan *Review* ITMP<br>IT Maturity and ITMP Review | 1. Divisi *Information Technology* untuk dapat menampilkan pencapaian-pencapaian di ITMP *review* kepada Perusahaan<br>2. Diskusi dengan *user* terkait *alignment project-project* IT antara ITMP dan kebutuhan terkini.<br>1. Information Technology Division to be able to provide the achievements in the ITMP review to the Company.<br>2. Discussion with users regarding the alignment of IT projects between the ITMP and current needs. |

### Tingkat Kehadiran Komite Pengarah TI Tahun 2025
Attendance of the IT Steering Committee in 2025

| Jabatan<br>Position | Jumlah Rapat<br>Number of Meetings | Kehadiran<br>Attendance |
|---|---|---|
| Andre Permana | 1 kali time | 100% |
| Donny Hamdani | 1 kali time | 100% |
| Achmad Abimanyu | 1 kali time | 100% |
| Rully Susiyanti | 1 kali time | 100% |

## Realisasi Program Kerja Komite Pengarah TI Tahun 2025
Realization of the IT Steering Committee Work Program in 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah TI telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Pengarah TI, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2025, the IT Steering Committee implemented various activities as part of its duties and responsibilities planned in the IT Steering Committee Charter, with the following details:

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization |
|---|---|---|---|
| 1. | IT *Maturity* dan *Review* ITMP<br>IT Maturity and ITMP Review | 10 November 2025<br>10 November 2025 | Selesai<br>Finished |

## Pengembangan Kompetensi Komite Pengarah TI
Competency Development of IT Steering Committee

Anggota Komite Pengarah TI salah satunya terdiri dari unsur Direksi, sehingga Pelaksanaan pengembangan kompetensi Komite Pengarah TI yang dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

The IT Steering Committee consists of members of the Board of Directors, and therefore, the implementation of the IT Steering Committee's competency development from the Board of Directors can be referred to in the Corporate Governance chapter, subchapter of the Board of Directors of this Annual Report.

## Penilaian Kinerja Komite Pengarah TI
Performance Assessment of IT Steering Committee

Evaluasi kinerja Komite Pengarah TI dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab Direksi dalam laporan Tahunan ini.

The Board of Directors evaluates the performance of the IT Steering Committee, with reference to the duties and responsibilities, including the conduct of IT Steering Committee meetings, as described in the Board of Directors chapter of this Annual Report.

## Komite Lain di Bawah Direksi
Other Committee Reporting to the Board of Directors

Hingga akhir tahun 2025, PT PII hanya memiliki Komite Pengarah TI dan belum menginisiasi pembentukan Komite Lain di bawah Direksi karena belum ada kebutuhan yang dirasakan oleh PT PII untuk membentuknya, sehingga tidak ada informasi terkait Profil, Pelatihan, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan dan Pelaksanaan tugas Komite Lain di Bawah Direksi PT PII.

As of the end of 2025, IIGF only had the IT Steering Committee and did not yet initiate the establishment of Other Committees reporting to the Board of Directors as it was deemed unnecessary. Therefore, there is no information regarding profile, training, duties and responsibilities, policies, and implementation of the duties of other committees reporting to the Board of Directors of IIGF.

# Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2025 dijabat oleh Sdr. Imam Wahyudi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/KOM/0925. Berikut Profil Sekretaris Dewan Komisaris PT PII:

The Secretary of the Board of Commissioners of IIGF per 31 December 2025 is Mr. Imam Wahyudi, pursuant to the Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-08/KOM/0925. The profile of IIGF's Secretary of the Board of Commissioners is as follows:

## Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners



### Imam Wahyudi
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Usia<br>Age | 49 tahun per 31 Desember 2025 | 49 years old as of 31 December 2025 |
| Tempat/Tanggal Lahir<br>Place/Date of Birth | Kebumen, 23 Agustus 1976 | Kebumen, 23 August 1976 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Periode Pertama, dengan masa Jabatan 2 September 2025 s.d 1 September 2028 | First Period, with tenure from 2 September 2025 up to 1 September 2028 |
| Riwayat Pendidikan<br>Educational Background | Magister Manajemen, Universitas Mercubuana (2020). | Master of Management, Universitas Mercubuana (2020). |
| Riwayat Jabatan<br>Career History | Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Pekanbaru, Kepala Seksi Barang Milik Negara III A Direktorat Barang Milik Negara, Kepala Seksi KND 1 C Direktorat Kekayaan Negara Disahkan, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. | Served as Head of the State Asset Management Section, Pekanbaru KPKNL, Head of State Assets Section III A, Directorate of State Assets, Head of Section KND 1 C, Directorate of State Assets Approved, DJKN, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. |
| Rangkap Jabatan<br>Concurrent Positions | Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan II B, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan | Head of the Separated State Assets Section II B, Directorate of Separated State Assets, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance |

## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Kebijakan GCG), *Board Manual,* serta Pedoman Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan. Secara garis besar, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris;
3. Mengoordinasi tugas-tugas administratif, kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris;
4. Mengoordinasi tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengoordinasi penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
6. Mengoordinasi penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham; dan
7. Mengoordinasi dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris.

Duties and responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners are regulated in the Good Corporate Governance Policy (GCG Policy), Board Manual, and Board of Commissioners Guidelines that apply in the Company. Generally, the Secretary of the Board of Commissioners is responsible for:

1. Assisting the Board of Commissioners in preparing the minutes of the Board of Commissioners' meetings;
2. Coordinating the implementation of the Board of Commissioners' meetings;
3. Coordinating the administrative, secretarial, and protocol duties of the Board of Commissioners;
4. Coordinating follow-up on requests and/or collection of data/information from and/or to the Company's management and external parties not covered by the duties of the Committee, including information on rules and regulations relevant to the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
5. Coordinating the budget preparation and submitting the Annual Budget of the Board of Commissioners;
6. Coordinating the suggestions and opinions regarding the agenda and materials of the General Meeting of Shareholders; and
7. Coordinating and following up on other tasks not covered by the duties of the Committees reporting to the Board of Commissioners.

## Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris
Competency Development of Secretary of the Board of Commissioners

Perseroan memberikan kesempatan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

The Company provides opportunity to the Secretary of the Board of Commissioners to participate in competency development program to improve his/her insight and knowledge to support the duties of Secretary of the Board of Commissioners, so that it is always relevant to the latest developments in the Company's business activities.

Berikut pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2025:

The training sessions attended by the Secretary of the Board of Commissioners in 2025 were as follows:

| No. | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer | Waktu Pelaksanaan<br>Time |
|---|---|---|---|
| 1 | *Qualified Risk Management Officer* | PPM Manajemen | 9 – 11 Desember 2025<br>9 – 11 December 2025 |
| 2 | *Investment and Financing of Renewable Energy Projects* | ET-Asia | 10 September 2025<br>10 September 2025 |

# Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Report on the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners in 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

In 2025, the Secretary of the Board of Commissioners conducted activities as an implementation of his/her duties and responsibilities with reference to the Charter of Secretary of the Board of Commissioners, with the work program realizations as follows:

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| **Aspek Pelaksanaan** Implementation Aspect | | | | |
| 1 | Penyusunan RKA Sesdekom Tahun 2026<br>Preparation of the Secretary of the Board of Commissioners 2026 Work Program & Budget (RKA) | Juli-September<br>July-September | Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan September-Oktober 2025 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris S-37/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025<br>dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-48/PII/DK/1022 tanggal 27 Oktober 2023 | RAB and RKA drafts prepared in September-October 2025 and submitted to the Board of Directors through the Board of Commissioners' Letter S-37/PII/DK/1025 dated 29 October 2025 and submitted to the Board of Directors through the Board of Commissioners' Letter No. S-48/PII/DK/1022 dated 27 October 2023 |
| 2 | Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation of 2026 RKA for the Board of Commissioners | September | Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2026 telah disampaikan kepada RUPS dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2026 | Proposed Performance Contract (KPI) of the Board of Commissioners for 2026 was submitted to the GMS and stipulated during the GMS Approval of the 2026 WP&B. |
| 3 | Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2026<br>Preparation of the proposed 2026 Performance Contract (KPI) of the Board of Commissioners | September | Dewan Komisaris telah memberikan reviu atas penelaahan Dekom terkait masukan atas konsep RKAP 2024 kepada Direksi melalui surat No.: S-37/PII/DK/1025 tanggal 29 Oktober 2025.<br>Dekom juga memberikan tanggapan atas RKAP 2026 kepada RUPS melalui surat no S-38/PII/DK/1025 tanggal 30 Oktober 2025 | The Board of Commissioners reviewed the Board of Commissioners' input regarding the 2024 WP&B draft to the Board of Directors via Letter No. S-37/PII/DK/1025 dated 29 October 2025.<br>The Board of Commissioners also provided feedback on the 2026 WP&B to the GMS via Letter No. S-38/PII/DK/1025 dated 30 October 2025. |
| 4 | Penelaahan atas usulan RKAP dan atau RJPP PT PII Tahun 2026<br>Review of the Proposed IIGF's RKAP an/d RJPP in 2026 | Juli - September<br>July - September | | |
| 5 | Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan/ atau RJPP Tahun 2026<br>Preparation of materials for the Board of Commissioners' responses to the GMS on the 2026 RKAP and/or RJPP draft | Desember<br>December | | |
| **Aspek Pengawasan** Supervisory Aspect | | | | |
| 6 | Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris<br>Internal Meetings of the Board of Commissioners | Bulanan<br>Monthly | Selama periode tahun 2025 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 14 kali | In the 2025 period, 14 meetings of the Board of Commissioners were held. |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi<br>The Board of Commissioners Meetings is implemented, by inviting the Board of Directors. | Bulanan<br>Monthly | Selama periode tahun 2025 telah dilaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali. | In the 2025 period, 18 (eighteen) joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors were held. |
| 8 | Penelaahan atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya<br>Review of quality and service policies and their implementation | Oktober<br>October | Rapat pada tanggal 22 November 2025<br>Surat Dewan Komisaris : S-41/PII/DK/1225 tanggal 17 Desember 2025 | Meeting on 22 November 2025<br>Board of Commissioners' Letter: S-41/PII/DK/1225 dated 17 December 2025 |
| 9 | Evaluasi atas pelaksanaan RKAP<br>Evaluation of the WP&B Implementation | Semesteran<br>Every six months | Dilaksanakan per semester dan laporan pelaksanaan pengawasan RKAP telah dikirim Dewan Komisaris kepada RUPS | Held every six months, with the report of WP&B supervision sent by the Board of Commissioners to the GMS. |
| 10 | Evaluasi atas kegiatan TJSL<br>Evaluation of CSR activities | Semesteran<br>Every six months | Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 Juli 2025. | Held concurrently with the Board of Commissioners' Meeting on 30 July 2025. |
| 11 | Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute<br>Monitoring of IIGF Institute's activities | Mei dan Desember<br>May and December | Dilaksanakan pada rapat pembahasan laporan manajemen dan rapat komite | Held during meetings discussing management report and committee meetings. |
| 12 | Penelaahan terkait transaksi atau Tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS<br>Review of transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS. | Sesuai disposisi<br>As per disposition | Sepanjang tahun 2025 tidak ada transaksi atau tindakan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | Throughout 2025, there were no transactions or actions related to the Company's business that required the Board of Commissioners' approval. |
| 13 | *Monitoring* atas proyek yang telah dijamin<br>Monitoring of projects that have been guaranteed. | Sesuai disposisi<br>As per disposition | Rapat berkala Dekom dengan Direksi terkait laporan bulanan dan rapat berkala dengan divisi RM dan divisi terkait mengenai pemantauan risiko atas proyek yang telah dijamin yang dilaksanakan setiap triwulanan | Periodic meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors on monthly reports, and periodic meetings with RM division and related divisions on risk monitoring of projects guaranteed, held quarterly. |
| **Aspek Pelaporan** Reporting Aspect | | | | |
| 14 | Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris<br>Preparation of report on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners. | Triwulanan<br>Quarterly | Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulan tahun 2025 | Report on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners was sent to the GMS quarterly in 2025. |
| 15 | Penyusunan laporan pengawasan RKAP<br>Preparation of RKAP monitoring report | Semesteran<br>Every six months | Laporan pengawasan RKAP telah dikirimkan ke RUPS per periode semesteran | RKAP monitoring report was sent to the GMS every six months. |
| 16 | Penyusunan laporan realisasi IKU<br>Preparation of KPI realization report | Triwulanan<br>Quarterly | Laporan realisasi IKU telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulanan | KPI realization report was sent to the GMS quarterly. |

| No. | Uraian Kegiatan<br>Description | Jadwal Pelaksanaan<br>Schedule | Realisasi Kegiatan<br>Realization | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | *Monitoring* atas proyek yang telah dijamin<br>Monitoring of projects that have been guaranteed. | Sesuai jadwal Divisi *Project Monitoring*<br>As scheduled by the Project Monitoring Division schedule. | Rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi terkait laporan bulanan dan rapat | Regular meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors regarding monthly reports and meetings |
| 18 | Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris<br>Preparation of the Secretariat of the Board of Commissioners' activity report | Triwulanan<br>Quarterly | Laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan per triwulanan | The activity report of the Secretariat of the Board of Commissioners was carried out quarterly. |
| 19 | Pembahasan draf *Annual Report* tahun 2024<br>Discussion of the 2024 Annual Report draft. | Januari - April<br>January - April | Pembahasan *draft* Laporan Tahunan dilaksanakan pada bulan Maret - April | Discussion of the Annual Report draft was held in March - April. |
| 20 | Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2024<br>Submission of responses to the 2024 Annual Report | April - Mei<br>April - May | Laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan per triwulanan | Responses to the 2024 Annual Report submitted as scheduled. |
| **Aspek Penerapan GCG** GCG Implementation Aspect | | | | |
| 21 | Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2024<br>Implementation of GCG Assessment in 2024 | Januari - Februari<br>January - February | Penilaian penerapan GCG tahun 2024 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan penilaian penerapan GCG Perseroan Tahun 2024 oleh BPKP. | The assessment of the 2024 GCG by BPKP was completed based on the report of assessment of the Company's GCG implementation in 2024 by BPKP. |
| 22 | Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2024<br>Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2024 | Semesteran<br>Every six months | Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG yang direkomendasikan oleh BPKP Tahun 2024 dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Seluruh AOI Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2025 | Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommended by BPKP in 2024 was carried out throughout 2025. All AOI of the Board of Commissioners were followed up until December 2025. |
| 23 | Pengadaan Penilai GCG Tahun 2025<br>Procurement of GCG Assessor in 2025 | November | Dekom telah menyampaikan surat Nomor S-28/PII/DK/1025 tanggal 1 Oktober 2025 mengenai permintaan pengadaan penilai independen untuk melakukan penilaian penerapan GCG. | The Board of Commissioners submitted Letter No. S-28/PII/DK/1025 dated 1 October 2025 on the request for the procurement of independent assessor to conduct GCG implementation assessment. |
| **Aspek Lainnya** Other Aspects | | | | |
| 24 | Peningkatan kompetensi Sesdekom dan Staf Sesdekom<br>Competency Improvement of the Secretary of the Board of Commissioners and Staff of the Secretary of the Board of Commissioners | Sesuai jadwal<br>As scheduled | Sepanjang tahun 2025, Sesdekom dan Staf Sesdekom telah mengikuti pelatihan dan seminar. | Throughout 2025, the Secretary of the Board of Commissioners and Staff of the Secretary of the Board of Commissioners attended training and seminars. |

# Sekretaris Perusahaan
## Corporate Secretary

Perseroan membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan dengan tugas utama untuk menjaga citra positif Perseroan dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara Perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Direksi memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-016/DIR/HCOD/0425 tanggal 25 April 2025, Rian Ditha Prasetianti telah ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan.

The Company has established a Corporate Secretary function with the main task of maintaining the Company's positive image by building good communication and relationships between the Company, shareholders and other stakeholders. The Board of Directors has the authority to appoint and dismiss the Corporate Secretary. In accordance with Board of Directors' Decision Letter No. SK-025/DIR/HC/0425 dated 25 April 2025, Rian Ditha Prasetianti is appointed as the Corporate Secretary.



### Rian Ditha Prasetianti

**Pimpinan Divisi Corporate Secretary & Communication**
Division Head of Corporate Secretary & Communication

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Domisili Domicile | Daerah Khusus Jakarta, Indonesia | Special Region of Jakarta, Indonesia |
| Usia Age | 47 tahun per 31 Desember 2025 | 47 years old as of 31 December 2025 |
| Tempat/Tanggal Lahir<br>Place/Date of Birth | Jakarta, 15 Agustus 1978 | Jakarta, 15 August 1978 |
| Periode jabatan<br>Career History | Menjabat sejak 25 April 2025 | Served in the office since: 25 April 2025 |
| Riwayat Pendidikan<br>Educational Background | Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (2000) | Bachelor of Economics Accounting, Universitas Indonesia (2000) |
| Riawayat Jabatan<br>Educational Background | Bergabung dengan PT PII sejak 2 Januari 2023 sebagai Pimpinan Divisi Risk Management. Sebelumnya, mengawali karier sebagai Auditor pada salah satu Kantor Akuntan Publik, kemudian pernah menjabat di beberapa bank di Indonesia sebagai *Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management* dan terakhir sebagai *Head, Operational Risk Governance and Advisory* | Joined IIGF on 2 January 2023 as Division Head of the Risk Management. Previously, she started her career as an Auditor at a Public Accounting Firm, then served in several banks in Indonesia as Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management, and Head of Operational Risk Governance and Advisory. |
| Rangkap Jabatan<br>Concurrent Positions | Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan | Has no concurrent positions internally or externally. |
| Sertifikasi<br>Certification | • *Certified PPP Professional* (CP3P) *Foundation Level*<br>• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko | • Certified PPP Professional (CP3P) - Foundation Level<br>• Risk Management Certification Level 3 by the Risk Management Certification Agency. |

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah didasarkan pada Kualifikasi Sekretaris Perusahaan yang mencakup:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu mendukung kinerja/tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pengalaman yang diperlukan berkaitan dengan usaha Perseroan;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai di bidang hukum, keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, manajerial, komunikasi dan keterampilan interpersonal yang baik; dan
4. Berdomisili di Indonesia.

The appointment of the Corporate Secretary is based on the Qualifications of the Corporate Secretary, which include:

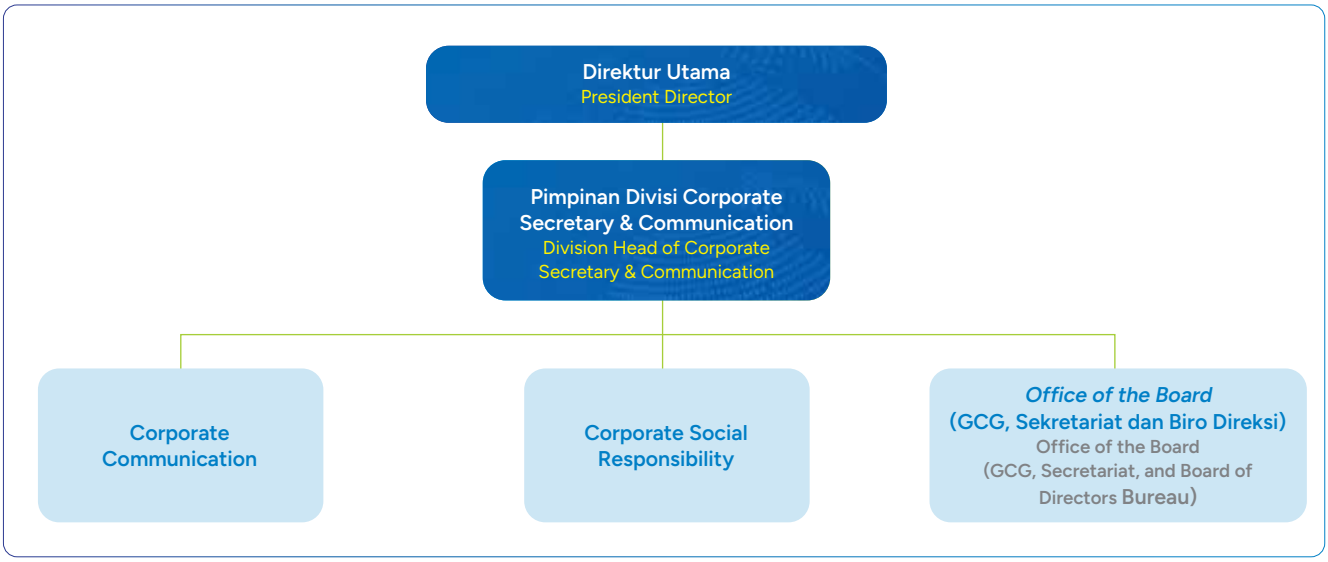
1. Is capable of taking legal action;
2. Has an educational background that shall support the performance/duties and responsibilities, and has the necessary experience related to the Company's business;
3. Has adequate knowledge and understanding in the fields of law, finance, good corporate governance, managerial, communication, with good interpersonal skills; and
4. Is domiciled in Indonesia.

## Kedudukan dan Keberadaan Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary's Position and Existence

Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

In the Company's organizational structure, the Corporate Secretary is directly under the President Director, with the following Organizational Structure:




## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan dalam menjembatani komunikasi antara organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan, hubungan kelembagaan serta kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

The Corporate Secretary has a role to liaise the communication between the Company's organs, relationships between the Company and stakeholders, institutional relationships, and compliance with laws and good corporate governance.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

The provisions on duties and responsibilities of the Corporate Secretary are stipulated in the Good Corporate

yang Baik (Kebijakan GCG) serta *Board Manual*. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung yaitu sebagai wakil Perseroan dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan Perseoran.
4. Menata usahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
5. Mengadakan program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya.
6. Mengoordinasikan penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Komisaris dan RUPS.
7. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam laman/situs web Perseroan dan media komunikasi daring Perseroan secara berkala.
8. Mengorganisasikan dan mengoordinasikan rapat Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan pemangku kepentingan Perseroan.
9. Menyusun jadwal dan tahapan kegiatan, pelaksanaan, serta pendokumentasian terkait RUPS dan Rapat Direksi.

Governance Policy (GCG Policy) and Board Manual. Generally, duties and responsibilities of the Corporate Secretary can be outlined as follows:

1. Ensuring that the Company complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles.
2. Providing information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time upon request.
3. Acting as a liaison, representing the Company in dealing with the Company's stakeholders.
4. Administering and keeping Company documents, including the List of Shareholders, Special Register, and minutes of Board of Directors' Meetings, Board of Commissioners' Meetings, and the GMS.
5. Conducting Company induction program for newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Coordinating the submission of the Board of Directors' reports to the Board of Commissioners and the GMS.
7. Regularly updating the information presented on the Company's website and online communication media.
8. Organizing and coordinating Board of Directors' meetings, joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, the GMS, and other activities with the Company's stakeholders.
9. Preparing the schedule and stages of activities, implementation, and documentation related to the GMS and Board of Directors' meetings.

## Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development Program

Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti pejabat Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Company provides opportunities for the Corporate Secretary to participate in various competency development activities that can support the implementation of the Corporate Secretary function. Information regarding the training and competency development activities attended by Corporate Secretary officials throughout 2025 is as follows:

| No. | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer | Waktu Pelaksanaan<br>Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN<br>Legal Aspects in SOEs Corporate Management | The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) | 15 – 16 Mei 2025<br>15 - 16 May 2025 |
| 2 | *Inhouse Training*: AI *Boosting Efficiency & Productivity* | PT PII – Revo U | 30 Juni 2025<br>30 June 2025 |

| No. | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer | Waktu Pelaksanaan<br>Time |
|---|---|---|---|
| 3 | *Workshop* "*Corporate Identity Inside the Brand Shaping Corporate Identify That Lasts*" | PT PII – Markplus Institute | 31 Oktober 2025<br>31 October 2025 |
| 4 | *Inhouse Training*: Menyusun Spesifikasi Teknis KAK dan HPS<br>In-house Preparation of Technical Specifications for TOR and Owner Estimate (OE) | PT PII – ADW | 16 Desember 2025<br>16 December 2025 |

## Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Job Description of the Corporate Secretary

Sepanjang Tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Berikut rincian kegiatan Sekretaris Perusahaan pada periode tersebut:

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out a number of activities as part of the Corporate Secretary's duties, responsibilities, and functions. The following are details of the Corporate Secretary's activities during the period:

| Aktivitas/Kegiatan<br>Activity | Keterangan<br>Description | |
|---|---|---|
| Pengelolaan Dokumen Perseroan<br>Company Document Governance | Kegiatan pengelolaan dokumen Perseroan yang dilakukan di tahun 2025 termasuk dokumen hukum, daftar khusus, dan dokumen korespondensi Perseroan | The Company's document governance was carried out in 2025, which included legal documents, special registers, and correspondence documents of the Company. |
| Penyelenggaraan program Tata Kelola Perusahaan Yang Baik<br>Implementation of the Good Corporate Governance Program | 1. *Assessment* atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun buku 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan capaian skor 90,829 ("Sangat Baik");<br>2. Pengawasan dan tindak lanjut atas pemenuhan *Area of Improvement* (AOI) berdasarkan hasil penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2024 oleh BPKP.<br>3. Pengendalian Gratifikasi, dengan jumlah laporan Gratifikasi sebanyak 17 (tujuh belas) laporan yang telah selesai diproses oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).<br>4. Diseminasi informasi terkait Pengendalian Gratifikasi yang diperuntukkan bagi internal dan eksternal Perseroan;<br>5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024;<br>6. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026;<br>7. Penelaahan dan pengelolaan dokumen korporasi | 1. Assessment of Good Corporate Governance implementation for the 2024 fiscal year by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), with a score of 90.829 ("Very Good");<br>2. Monitoring and follow-up on the fulfillment of Areas of Improvement (AOI) based on the assessment of Good Corporate Governance implementation in 2024 by BPKP.<br>3. Gratification Control, with 17 (seventeen) Gratification rejection reports processed by the Gratification Control Unit (UPG).<br>4. Dissemination of information related to Gratification Control for internal and external use of the Company;<br>5. Implementation of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Approval of the 2024 Annual Report;<br>6. Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS) Approval of the 2026 Company Work Plan and Budget;<br>7. Review and Management of Corporate Documents |
| Penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<br>Implementation of Meetings of Board of Directors, Joint Meeting of Board of Commissioners with Board of Directors, and General Meeting of Shareholders (GMS) | Rincian kegiatan penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS di tahun 2025 adalah sebagai berikut:<br>1. Rapat Direksi sebanyak 55 (lima puluh lima) kali<br>2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali<br>3. RUPST Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 6 Mei 2025<br>4. RUPST Persetujuan RKAP Tahun 2026 pada tanggal 11 Desember 2025 | Details of the activities of holding the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings as well as the GMS in 2025 were as follows:<br>1. 55 (fifty-five) Board of Directors' meetings<br>2. 18 (eighteen) Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors<br>3. AGMS on Approval of the 2024 Fiscal Year Annual Report on 6 May 2025<br>4. AGMS on Approval of the 2026 WP&B on 11 December 2025 |

| Aktivitas/Kegiatan<br>Activity | Keterangan<br>Description | |
|---|---|---|
| Kewajiban Pelaporan<br>Reporting Obligations | 1. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Manajemen Bulanan kepada Dewan Komisaris.<br>2. Penyampaian Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2024 kepada Pemegang Saham.<br>3. Penyampaian Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2024 kepada Pemegang Saham dan mempublikasikan pada situs web Perseroan. | 1. Coordinating the submission of Monthly Management Report to the Board of Commissioners.<br>2. Submission of Good Corporate Governance Assessment Report for the 2024 Fiscal Year to Shareholders.<br>3. Submission of the 2024 Annual Report to Shareholders and publication on the Company's website. |
| Koordinasi Kegiatan terkait penerapan GCG<br>Coordination of GCG Activities | Kegiatan terkait penerapan GCG yang dilakukan di tahun 2025 antara lain:<br>1. Penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2024<br>2. *Monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan *area of improvement* atas hasil penilaian GCG tahun buku 2024 | In 2025, activities related to the GCG implementation included:<br>1. Assessment of the Good Corporate Governance implementation for the 2024 Fiscal Year<br>2. Monitoring and evaluation of the fulfillment of areas of improvement on the GCG assessment results for the 2024 fiscal year |
| Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap hukum<br>Ensuring Company's compliance with the law | Kegiatan terkait pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap hukum yang dilakukan di tahun 2025 antara lain:<br>1. Penelaahan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerahasiaan dan Surat Keputusan Direksi; dan<br>2. Pembuatan Akta dan pengurusan perizinan Perseroan. | Activities related to the Company fulfillment of legal compliance in 2025 included:<br>1. Review of Cooperation Agreements, Memorandum of Understanding, Confidentiality Agreements, and the Board of Directors' Decision Letters; and<br>2. Deed drafting and Company's licenses. |
| Program meningkatkan citra Perseroan dan hubungan dengan *stakeholder*<br>Programs to enhance the Company's image and relationship with stakeholders | Telah dilaksanakan kegiatan terkait komunikasi perusahaan di sepanjang tahun 2025, di antaranya:<br>1. Publikasi informasi Perseroan melalui media massa dan media sosial;<br>2. Penguatan komunikasi dan relasi dengan media dan *stakeholders*;<br>3. Pengelolaan strategi komunikasi Perseroan;<br>4. Pelaksanaan kegiatan Perseroan yang melibatkan *stakeholders* guna memperkuat citra dan reputasi Perseroan;<br>5. Pelaksanaan *Stakeholder Survey*; dan<br>6. Pembaruan informasi pada *Website* Perseroan. | Activities related to the Company's communication in 2025 included:<br>1. Publication of the Company's information via mass media and social media;<br>2. Strengthening communication and relations with the media and stakeholders;<br>3. Management of the Company's communication strategy;<br>4. The Company's activities involving stakeholders to strengthen the Company's image and reputation;<br>5. Stakeholder Survey; and<br>6. Information update on the Company's Website. |
| Koordinasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan<br>Coordination of Corporate Social Responsibility (CSR) activities | Divisi *Corporate Secretary and Communication* telah menyelenggarakan kegiatan TJSL yang tepat sasaran sesuai agenda kegiatan TJSL Perseroan untuk tahun 2025. | The Corporate Secretary & Communication Division conducted the targeted CSR activities in accordance with the Company's CSR agenda for 2025. |

## Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Evaluation of Duties Carried out by Corporate Secretary

Kebijakan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan tertuang dalam *Indikator* Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dan disahkan oleh manajemen Perseroan. Indikator pelaksanaan evaluasi tugas Sekretaris Perusahaan didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Realisasi pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2025 mencapai sebesar 110% dari target yang ditetapkan sebelumnya 100%.

The policy for evaluating the implementation of the Corporate Secretary's duties is outlined in the Key Performance Indicators (KPI) that have been agreed upon and ratified by the Company's management. Indicators for the evaluation of Corporate Secretary's duties are based on the Corporate Secretary's duties and responsibilities.

The Corporate Secretary's performance in 2025 achieved 110% out of the previously set target of 100%.

Indikator IKU yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan pada tahun 2025 mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Optimalisasi sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan;
2. Pencapaian tingkat pemahaman Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan *stakeholders* lainnya yang baik;
3. Pengelolaan reputasi dan hubungan media;
4. Optimalisasi pengelolaan program-program TJSL;
5. Optimalisasi pelaksanaan kepatuhan hukum;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan pimpinan dan protokoler;
7. Pengelolaan risiko divisi; dan
8. Pelaksanaan tata kelola yang baik.

The KPI indicators used to evaluate the Corporate Secretary's performance include the following criteria:

1. Optimization of synergies between SOEs/Institutions under the Ministry of Finance;
2. Achieving a good level of Government Contracting Agency's (GCA) and other stakeholders' understanding;
3. Reputation management and media relations;
4. Optimization of CSR program management;
5. Optimization of legal compliance;
6. Implementation of secretarial leader and protocol functions;
7. Division's risk management;
8. Good corporate governance implementation;

# Audit Internal
Internal Audit

Fungsi Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Divisi Audit Internal. Perseroan membentuk Divisi Audit Internal dengan peran sebagai mitra strategis profesional, independen, obyektif, bertanggung jawab dan dapat menjadi penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*) bagi Direksi dan jajaran Manajemen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Pelaksanaan audit internal diharapkan dapat membantu Perseroan mendeteksi lebih dini permasalahan dan kelemahan di dalam unit kerja terutama bila terjadi penurunan atau penyimpangan terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran Perseroan khususnya pelaksanaan RKAP tahun berjalan. Hasil penelaahan Audit Internal kemudian dirangkum dan dibuatkan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan jajaran manajemen sebagai *early warning system*.

The Company's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division. The Company establishes the Internal Audit Division with the role of a professional, independent, objective, and responsible strategic partner, and trustworthy advisor to the Board of Directors and Management in actualizing the Company's vision, mission, and objectives.

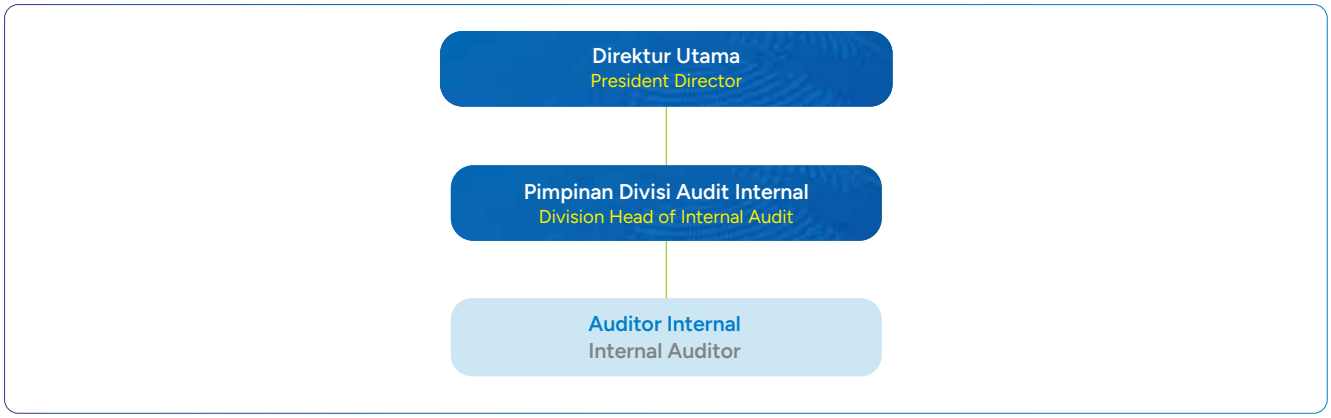
The implementation of internal audit is expected to assist the Company to detect problems and weaknesses in the working unit early, especially in the event of a decline or irregularity in the performance to achieve the Company's objective, specifically in the RKAP implementation for the current year. The Internal Audit review is summarized, and recommendations for improvement are formulated for the Board of Directors and management as an early warning system.

## Struktur Organisasi dan Kedudukan Audit Internal
Internal Audit's Organizational Structure and Position

Fungsi Audit Internal di Perseroan dijalankan oleh Divisi Audit Internal. Berikut bagan yang menggambarkan struktur organisasi Divisi Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-004/PII-BOD/0322 tanggal 18 Maret 2022:

The Company's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division. The following chart illustrates the organizational structure of the Company's Internal Audit Division based on the Board of Directors' Decision Letter No. SK-004/PII-BOD/0322 dated 18 March 2022:

### Struktur Organisasi Divisi Audit Internal
The Organizational Structure of the Internal Audit Division




Divisi Audit Internal dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan proses dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Perseroan serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan rencana, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi. Sebagai bagian pelaksanaan tugasnya, maka Divisi Audit Internal dapat melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris atau Komite Audit untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan hasil dan proses pengawasan.

The Internal Audit Division is established to supervise the implementation of processes and activities of all working units within the Company and to provide recommendations for improvement in accordance with the plans, programs, and policies set forth by the Board of Directors. As part of its duties, the Internal Audit Division may conduct direct meetings with the President Director, Board of Commissioners, or Audit Committee, to submit reports on various matters related to the supervision results and process.

## Pejabat Audit Internal dan Dasar Pengangkatan
Internal Auditor and Basis of Appointment

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Pimpinan Divisi Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan telah menunjuk Sdr. Deki Santo Wibowo untuk menjabat Pimpinan Divisi Audit Internal sejak tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-004/DIR/HC/0220 dan Surat Dewan Komisaris SR-01/PII/ DK/0220.

The Internal Audit Division is chaired by the Division Head of Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Company appointed Mr. Deki Santo Wibowo as the Head of Internal Audit Division as of 5 March 2020, pursuant to the Board of Directors' Decision Letter No. SK-004/DIR/HC/0220 and Board of Commissioners' Letter No. SR-01/PII/DK/0220.



### Deki Santo Wibowo
**Pimpinan Divisi Audit Internal**
Division Head of Internal Audit

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Usia Age | 49 tahun per 31 Desember 2025 | 49 years old as of 31 December 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Domisili Domicile | Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta | Central Jakarta, Special Region of Jakarta |
| Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth | Jakarta, 7 Desember 1976 | Jakarta, 7 December 1976 |
| Periode jabatan Term of Office | Menjabat sejak: 6 September 2021 | Served in the office since: 6 September 2021 |
| Riwayat Pendidikan Educational Background | Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999) | Bachelor of Accounting from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1999) |
| Sertifikasi Certification | Memperoleh *Certified Internal Auditor* (CIA) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2014), *Certified Public Accountant (CPA)* dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2013), *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2017), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) – *Foundation Certificate dari Pearson Vue* (2019). *Indonesia Internal Audit Practitioner* (IIAP) - dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2022), *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) *dari* BPKP – GIA *Corpu* (2022), *Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level* | Obtained Certified Internal Auditor (CIA) from the Institute of Internal Auditors (IIA) (2014), Certified Public Accountant (CPA) from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) (2011), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (2013), Certified Enterprise Risk Governance (CERG) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (2017), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – Foundation Certificate from Pearson Vue (2019). Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) - from the Institute of Internal Auditors (IIA) (2022), Certified Internal Audit Executive (CIAE) from BPKP – GIA Corpu (2022), Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level |
| Riwayat Jabatan Career History | Pernah menjabat sebagai Pimpinan Divisi *Organization Development* (OD) di PT PII. Pengalaman di bidang audit dan keuangan termasuk sebagai Auditor Internal maupun Auditor Eksternal selama lebih dari 20 tahun. Karier sebagai Auditor Internal ditempuhnya selama 8 tahun sebagai ICS *Compliance Head*. Sebelum berkarir sebagai Auditor Internal, beliau berkarir di beberapa Kantor Akuntan Publik dan perusahaan terbuka selama kurang lebih 19 tahun | Previously served as Division Head of the Organization Development (OD) at IIGF. Have experience in audit and finance sector, as an Internal Auditor and External Auditor for more than 20 years. Had a career as an Internal Auditor for 8 years as ICS Compliance Head. Prior to his career as an Internal Auditor, he worked in several Public Accounting Firms and public companies for approximately 19 years. |
| Rangkap Jabatan Concurrent Positions | Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan | Has no concurrent positions within the Company or externally. |

## Piagam Audit Internal

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Internal Perseroan merujuk pada Piagam Audit Internal terbitan keempat yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2025 oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam tersebut disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pengawasan Menteri Keuangan serta dengan referensi pada Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional (*International Professional Practices Framework*) yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IPPF) Edisi Tahun 2024, termasuk di dalamnya *Global Internal Audit Standards* (GIAS).

In carrying out its duties, the Company's Internal Audit Division refers to the fourth edition of the Internal Audit Charter which was ratified on December 18, 2025 by the Board of Directors and the Board of Commissioners. The charter was prepared with reference to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) under the Supervision of the Minister of Finance and with reference to the International Professional Practices Framework issued by The Institute of Internal Auditors (IPPF) 2024 Edition, including the Global Internal Audit Standards (GIAS).

Piagam Audit Internal Tersebut antara lain mengatur tentang:
- Mandat dan tujuan Audit Internal
- Independensi dan Pelaporan Audit Internal
- Standar, Etika dan Profesionalisme Audit Internal
- Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terkait

The Internal Audit Charter, among others, regulates:
- Mandate and Objectives of Internal Audit
- Independence and Reporting of Internal Audit
- Standards, Ethics, and Professionalism of Internal Audit
- Duties and Responsibilities of Related Company Organs

## SDM dan Sertifikasi Profesi Audit Internal
Internal Audit Human Resources and Professional Certification

Kualitas hasil pengawasan oleh Audit Internal ditentukan oleh kompetensi SDM-nya. Untuk itu, sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perkembangan industri. Berikut ini informasi sertifikasi profesi yang dimiliki personil Fungsi Audit Internal hingga akhir tahun 2025:

The quality of supervision results by Internal Audit is determined by the competence of its human resources. Therefore, professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, specifically in terms of compliance with laws and regulations and industry developments. The information on professional certifications held by Internal Audit Function personnel as of the end of 2025 is as follows:

| Jabatan<br>Position | Jumlah<br>Total | Jenjang Pendidikan<br>Education | |
|---|---|---|---|
| | (orang)<br>(person) | S1<br>Bachelor Degree | S2<br>Master Degree |
| Pimpinan Divisi Audit Internal<br>Division Head of Internal Audit | 1 | ✔ | - |
| Lead Auditor | 1 | - | ✔ |
| Auditor | 2 | ✔ | - |
| **Jumlah** Total | **4** | **3** | **1** |

## Program Pengembangan Kompetensi Audit Internal
Internal Audit Competency Development Program

Perseroan memberikan kesempatan kepada personil Divisi Audit Internal untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan Divisi Audit Internal. Berikut kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pimpinan Divisi Audit Internal dan karyawan Divisi Audit Internal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Company provides opportunities for the Internal Audit Division personnel to participate in various competency development activities that can support the Internal Audit Division's duties. In 2025, the competency development program activities attended by the Division Head of Internal Audit and Internal Audit Division employees were as follows:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer |
|---|---|---|---|
| Deki Santo Wibowo | Pimpinan Divisi<br>Division Head | *Workshop* Implementasi *Internal Control over Finacial Reporting* (ICoFR)<br>Workshop on Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) | Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia |
| | | *Inhouse Training: Artificial Intelligence Boosting Efficiency and Productivity with AI-Powered Solutions* 2025 | PT PII - Divisi HCOD<br>IIGF - HCOD Division |

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Topik Pelatihan<br>Training Topic | Penyelenggara<br>Organizer |
|---|---|---|---|
| | | Konferensi Auditor Internal dan Munas FKSPI<br>Internal Auditor Conference and National Conference of FKSPI | YPIA |
| | | *Workshop Quality Assurance* | Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia |
| | | Menyusun Spesifikasi Teknis KAK dan HPS<br>Preparing Technical Specifications for TOR and HPS | PT PII - Divisi CSP-*Procurement*<br>IIGF - CSP-Procurement Division |
| | | Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif bagi Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara *Batch* 1 (Klaster Jasa Keuangan dan Asuransi)<br>Investigative Thematic Anti-Corruption Training for Internal Audit Units of State-Owned Enterprises Batch 1 (Cluster of Financial Services and Insurance) | Pusat Edukasi Anti Korupsi<br>Anti-Corruption Education Center |
| Oke Darmawireja | Lead Auditor | *Strategic Cost Control Management* | UPSKILL |
| | | *Inhouse Training*: Menyusun Spesifikasi Teknis Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)<br>Preparing Technical Specifications for the Terms of Reference (TOR) and Own Estimated Price (HPS) | PT PII - Divisi CSP-*Procurement*<br>IIGF - CSP-Procurement Division |
| | | *Quality Assurance* | Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia |
| Ken Auva Maulida | Auditor | Desain dan Implementasi *Internal Control Over Financial Report*<br>Design and Implementation of Internal Control Over Financial Report | Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI)<br>Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI) |
| | | Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif<br>Thematic Investigative Anti-Corruption Training | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI<br>Corruption Eradication Commission (KPK) |
| Faisal Dita Nurulloh | Auditor | *Workshop* Implementasi *Internal Control over Finacial Reporting* (ICoFR)<br>Workshop on Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) | Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia |
| | | *Inhouse Training: Artificial Intelligence Boosting Efficiency and Productivity with* AI-*Powered Solutions* 2025 | PT PII - HCOD<br>IIGF - HCOD |
| | | Seminar Nasional Internal Audit<br>National Internal Audit Seminar | YPIA |

## Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal Tahun 2025

Report on the Duties and Responsibilities of the Internal Audit in 2025

Sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Audit Internal Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit atas Proses Klaim dan Regres Proyek SPAM Bandar Lampung dan Pekanbaru
2. Audit atas Proses Penyediaan Penjaminan Proyek Non KPBU Kereta Cepat Jakarta Bandung

As its duties and responsibilities, the Company's Internal Audit Division has implemented several activities, with details as follows:

1. Audit of the Claims and Recourse Process of SPAM Bandar Lampung and Pekanbaru Project
2. Audit of the Guarantee Provision Process of Non-PPP Project of Jakarta-Bandung High-Speed Train

3. Audit atas Proses *Project Development Facility* Barang Milik Negara
4. Audit Teknologi Informasi atas Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP)- *Procure to Pay*
5. Audit atas Proses Penjaminan KPBU - *Small Scale Project*
6. Audit Internal atas Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
7. Evaluasi atas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Tingkat Entitas
8. Rapat Audit Internal

   Kebijakan rapat Divisi Audit Internal mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Audit Internal. Sejalan dengan kebijakan tersebut, frekuensi rapat Divisi Audit Internal sebagai berikut:

   a. Rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan tingkat frekuensi bulanan dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada kebijakan terkait rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Piagam Internal Audit serta Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Laporan Manajemen dan Rapat Kegiatan Audit Internal
   b. Rapat dengan Direktur Utama dengan tingkat frekuensi setiap selesai diselenggarakannya *exit meeting* penugasan audit internal dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Pembahasan Laporan Penugasan Audit Internal
   c. Rapat dengan Komite Audit dengan tingkat frekuensi triwulanan dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Evaluasi Kegiatan Audit Internal

   Selama tahun 2025, Divisi Audit Internal telah melakukan rapat sebanyak 112 (seratus dua belas) kali rapat baik rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dengan frekuensi rapat berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

3. Audit of the Project Development Facility Process of State-Owned Assets
4. Information Technology Audit of Enterprise Resource Planning (ERP) system - Procure to Pay
5. Audit of PPP Guarantee Process - Small-Scale Project
6. Internal Audit of the Implementation of Anti-Bribery Management System
7. Evaluation of the Implementation of the Entity-Level Internal Control System
8. Internal Audit Meetings

   The Internal Audit Division's meeting policy refers to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines. In line with these policies, the frequency of Internal Audit Division's meetings is as follows:

   a. Meetings with the Board of Directors and Board of Commissioners monthly and at any time if necessary with reference to the meeting policy of the Board of Directors and Board of Commissioners, Internal Audit Charter, and Internal Audit Administration Guidelines, i.e., Management Report Meetings and Internal Audit Meetings
   b. Meetings with the President Director every time after the completion of the internal audit assignment exit meeting, and at any time if necessary, with reference to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines, i.e., the Internal Audit Assignment Report Meeting
   c. Meetings with the Audit Committee quarterly and at any time if necessary with reference to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines, i.e., the Internal Audit Evaluation Meeting.

   In 2025, the Internal Audit Division held 112 meetings, including the meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, with the frequency of meetings by type as follows:

| Uraian<br>Description | Rapat Direksi<br>Board of Directors' Meetings | Rapat Dewan Komisaris<br>Board of Commissioners' Meetings | Rapat Komite Audit<br>Audit Committee's Meetings |
|---|---|---|---|
| Frekuensi Rapat Meeting Frequency | 62 | 18 | 32 |

9. Tugas Lainnya

   Selain tugas di atas sepanjang tahun 2025 Divisi Audit Internal juga terlibat dalam kegiatan – kegiatan berikut:

9. Other Duties

   In addition to the above duties, throughout 2025, the Internal Audit Division was also involved in the following activities:

1. Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
   - Reviu atas Pengelolaan Pembiayaan Non Utang Pemerintah Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
   - Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I & II tahun 2025
   - Pemutakhiran Profil Entitas Pemeriksaan periode Semester I & II Tahun 2025
2. Pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
   - Pembahasan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung bersama BPKP Kantor Perwakilan Lampung
   - Pengelolaan Pembiayaan Non Utang Pemerintah Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
3. Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
   - Penjaminan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4. Pendampingan dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dan audit kepatuhan Perseroan tahun buku 2025, serta pendampingan dalam pelaksanaan penilaian atas capaian Indikator Kinerja Utama Korporasi, Direksi, dan Dewan Komisaris, oleh Kantor Akuntan Publik
5. Melaksanakan Penilaian Kapabilitas Divisi Audit Internal Periode 2025
6. Melaksanakan Penilaian Mandiri Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan Fungsi Audit Internal 2025
7. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal
8. Melaksanakan pelaporan kegiatan audit dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit kepada Komite Audit per triwulan
9. Melaksanakan *Risk Control Self Assessement* (RSCA)
10. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
11. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan melakukan Audit Internal atas Implementasi SMAP.

1. Assisting the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)
   - Review of the Management of Non-Debt Government Financing under Public-Private Partnership (PPP) Scheme
   - Monitoring the Settlement of State Losses Semester I & II of 2025
   - Update of Entity Audit Profile for Semester I & II of 2025
2. Assisting the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
   - Discussion of Evaluation Results of Obstacles to the Smooth Development of Bandar Lampung City SPAM PPP Project with BPKP Lampung Representative Office
   - Management of Non-Debt Government Financing under the Public-Private Partnership (PPP) Scheme
3. Assisting the Inspectorate General of the Ministry of Finance
   - Water Supply System (SPAM) Project Guarantee
4. Assisting the audit of the Company's Financial Statements and compliance audit for the 2025 fiscal year, as well as assistance in the assessment of the achievement of the Key Performance Indicators of the Corporation, Board of Directors, and Board of Commissioners, by the Public Accounting Firm
5. Assessing the Capability of the Internal Audit Division for the 2025 Period
6. Implementing Self-Assessment of Quality Assurance Program and Improvement of Internal Audit Function in 2025
7. Monitoring the follow-up on internal and external audit recommendations
8. Reporting audit activities and monitoring the follow-up of audit recommendations to the Audit Committee quarterly
9. Conducting Risk Control Self-Assessment (RSCA)
10. Actively supporting evaluation and assessment of Good Corporate Governance (GCG) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
11. Actively participating in the Anti-Bribery Management System (SMAP) by conducting an SMAP Implementation Internal Audit.

## Evaluasi Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Evaluation of Internal Audit Duties

Kebijakan evaluasi pelaksanaan tugas Audit Internal tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dan disahkan oleh manajemen Perseroan. Indikator pelaksanaan evaluasi tugas Divisi Audit Internal didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal.

Realisasi pencapaian kinerja Divisi Audit Internal tahun 2025 mencapai sebesar 117% dari target yang ditetapkan sebelumnya 100%.

Indikator IKU yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut atas laporan audit 2025.
2. Pencegahan kerugian (negara) dan/atau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Eksternal Auditor (BPK/BPKP/Itjen).
3. Bertindak sebagai *trusted advisor* melalui penugasan audit internal (baru).
4. Bertindak sebagai *trusted advisor* melalui pendampingan eksternal atau konsultansi kepada internal.
5. Pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik.
6. Peningkatan Kapabilitas Divisi Audit Internal.
7. Pengelolaan Risiko Divisi.
8. Penerapan dan implementasi *Internal Control* dalam proses bisnis perusahaan

The policy for evaluating the Internal Audit's duties is outlined in the Key Performance Indicators (KPI) agreed upon and ratified by the Company's management. Indicators for the evaluation of the Internal Audit Division's duties are based on the Internal Audit Division's duties and responsibilities.

The Internal Audit Division's performance in 2025 achieved 117% of the previously set target of 100%.

The KPI indicators used to evaluate the Internal Audit Division's performance include the following criteria:

1. Completion of follow-up on the 2025 audit report.
2. Prevention of (state) losses and/or completion of follow-up on recommendations from External Auditors (BPK/BPKP/Inspection General).
3. Acting as a trusted advisor through (new) internal audit assignments.
4. Acting as a trustworthy advisor through external mentoring or internal consulting.
5. Implementation of good corporate governance.
6. Improved capabilities of the Internal Audit Division.
7. Divisional Risk Management.
8. Internal Control application and implementation in the Company's business process.

## Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Divisi Audit Internal Tahun 2025

Quality Assurance Report on the Internal Audit Division Self-Assessment in 2025

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, Direksi secara aktif menjaga dan mengevaluasi kualitas Divisi Audit Internal Perseroan. Sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2025 Divisi Audit Internal menyelesaikan penilaian mandiri kapabilitas Divisi Audit Internal Periode 2025 mengacu pada Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi yang diterbitkan oleh BPKP.

To accelerate the good corporate governance improvement, the Board of Directors actively maintains and evaluates the quality of the Company's Internal Audit Division. As a form of the Company's commitment to actualizing this, in 2025, the Internal Audit Division completed a self-assessment of the Internal Audit Division's capabilities in 2025, with reference to the Technical Guidelines for Self-Assessment of Corporate SPI Capabilities, issued by BPKP.

Hasil penilaian mandiri tersebut, menunjukan bahwa kapabilitas Divisi Audit Internal Periode 2025 berada pada level 3 (*integrated*). Hal ini mencerminkan bahwa Divisi Audit Internal telah berhasil menerapkan praktik profesional dan audit internal secara konsisten dan telah selaras dengan standar yang berlaku. Selain itu Divisi Audit Internal mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

The self-assessment results showed that in 2025, the Internal Audit Division's capability was at level 3 (integrated). This reflects that the Internal Audit Division has successfully implemented professional practices and internal audits consistently, in line with the applicable standards. In addition, the Internal Audit Division was able to assess the efficiency, effectiveness, and economy of a program/activity, and provided consultation on governance, risk management, and internal control.

# Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*)

## Internal Control System

Perseroan menerapkan 3 (tiga) aspek pengendalian internal, yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan. Kerangka kerja pengendalian internal yang berlaku di PT PII diatur dalam Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang mengadopsi COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework* 2013. Selain itu Perseroan menerbitkan Kebijakan Pengelolaan Proses Bisnis Berbasis Pengendalian Internal untuk memberikan panduan agar pelaksanaan pengelolaan proses bisnis dapat dilakukan secara efisien, efektif, konsisten, terstandarisasi dan sistematis sesuai dengan sistem pengendalian internal yang terintegrasi (COSO *Framework* 2013).

The Company implements 3 (three) internal control aspects, i.e., operational control, financial control, and compliance. The Company adopts COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-Internal Control Integrated Framework 2013 as the applicable internal control system. In addition, the Company issued an Internal Control-Based Business Process Management Policy to provide guidance so that the implementation of business process management shall be carried out efficiently, effectively, consistently, standardized, and systematically, in accordance with the integrated internal control system (COSO Framework 2013).

Sebagaimana diatur dalam COSO *Internal Control – Integrated Framework* (2013), pengendalian internal merupakan sebuah sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

As regulated in COSO Internal Control – Integrated Framework (2013), internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees in a company, to provide reasonable assurance regarding the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with the applicable laws and regulations.

COSO – *Internal Control - Integrated Framework* terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian, yakni meliputi:
1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan.

COSO Internal Control - Integrated Framework consists of (5) five control components:
1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring.

Penerapan sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2025 yang mengacu pada COSO dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

   Aspek Lingkungan Pengendalian merupakan suatu kondisi dalam Perseroan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian berdampak pada kesadaran akan pentingnya penerapan pengendalian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

   Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan serta menjaga lingkungan pengendalian yang mengarah pada terbentuknya perilaku positif dan kondusif untuk memfasilitasi penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan Perseroan. Upaya tersebut diwujudkan melalui:

   a. Penegakan integritas dan nilai etika.
   b. Komitmen terhadap kompetensi.
   c. Kepemimpinan yang kondusif.
   d. Independensi Dewan Komisaris
   e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
   f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
   g. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
   h. Perwujudan peran Internal Audit yang efektif.

2. Penilaian Risiko

   Aspek Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian proses identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Penilaian risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Proses penilaian risiko dimulai dengan menetapkan maksud dan tujuan Perseroan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut secara efisien dan efektif, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar Perseroan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

3. Aktivitas Pengendalian

   Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa arahan Manajemen untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi telah dilakukan selama proses penilaian risiko.

The implementation of internal control system in 2025 referred to COSO, as described below:

1. Control Environment

   The Control Environment aspect is a condition within the company that affects the effectiveness of internal control. The control environment has an impact on the awareness of the importance of implementing control by the people involved.

   Management is responsible for creating and maintaining a control environment that leads to the establishment of positive and conducive behavior, to facilitate the implementation of a sound internal control and management system within the Company. These efforts are realized by:

   a. Upholding of integrity and ethical values.
   b. Commitment to competence.
   c. Conducive leadership.
   d. Independence of the Board of Commissioners.
   e. Establishment of an organizational structure in accordance with the needs.
   f. Appropriate delegation of authorities and responsibilities.
   g. Formulation and implementation of sound policies on human resource development.
   h. Realization of an effective Internal Audit role.

2. Risk Assessment

   Risk assessment is a series of processes to identify and analyze risks that may potentially hinder the achievement of the Company's objectives. Risk assessment is carried out to determine the impact of identified risks on the achievement of the Company's goals and objectives, as a reference in developing the necessary control activities to minimize risks. The risk assessment process begins with establishing clear and consistent goals and objectives of the Company, identifying the risks that may hinder the achievement of these objectives, both internal and external, and finally, conducting an analysis to determine the impact of risks and the necessary controls.

3. Control Activities

   Control activities are policies and procedures to assist in ensuring that the Management's direction to minimize the identified risks has been carried out during the risk assessment process.

Kebijakan pengendalian dirumuskan untuk memberikan arah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan prosedur berupa rangkaian urutan tindakan, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan menggunakan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan pengendalian diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi Perseroan, dan setidaknya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Aktivitas pengendalian dilakukan pada seluruh kegiatan Perseroan
b. Aktivitas pengendalian dikaitkan dengan proses penilaian risiko untuk mengendalikan tingkatan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.
c. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis melalui persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku; dan
d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh manajemen

Selain itu, untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis yang ada, Perseroan melakukan evaluasi atas rangkaian kegiatan pengendalian yang diterapkan. Rangkaian kegiatan pengendalian terdiri atas:

a. Telaah atas kinerja Perseroan.
b. Pembinaan sumber daya manusia.
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
d. Pengendalian fisik aset.
e. Pemisahan fungsi.
f. Pelaksanaan atau otorisasi atas kejadian dan transaksi
g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
h. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya yang dimiliki
i. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan yang terstruktur dan sistematis mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan wajib menyampaikan laporan yang memiliki informasi yang relevan serta akurat dan andal baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi

Control policies are formulated to provide direction for activities that should be conducted and serve as guidelines for the procedures' preparation. The procedures are in a series of sequences of actions, carried out by one or several people, using certain equipment and time in implementing certain activities. Control activities are organized by the Board of Directors with due regards to the size, complexity, nature of the Company's duties and functions, and shall at least consider the following matters:

a. Control activities are carried out in all the Company's activities
b. Control activities are linked to the risk assessment process to control the level of likelihood and impact of risk occurrence.
c. Written policies and procedures are established via the approval of authorized officials in accordance with the applicable policies and regulations; and
d. Procedures that have been established shall be implemented by the management.

In addition, to ensure its relevance to existing business developments, the Company shall evaluate the series of implemented control activities. The control activities consist of a series of:

a. Review of the Company's performance.
b. Human resources development.
c. Control of the information system management.
d. Physical control of assets.
e. Separation of functions.
f. Implementation or authorization of events and transactions
g. Accurate and timely recording of transactions and events
h. Restrictions on access to owned resources
i. Proper documentation of control events and transactions

4. Information and Communication

The information and communication system are a process of presenting structured and systematic reports on operational and financial activities, as well as compliance with the applicable laws and regulations. The Company must submit reports that have relevant, accurate, and reliable information, both financial and non-financial, relating to internal and external events. Such information shall be stored and communicated to the Company's management and other relevant staff in

tersebut harus disimpan dan kemudian dikomunikasikan kepada pimpinan Perseroan dan jajaran terkait lainnya di seluruh perusahaan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

the company, who may require the information in a form that enables them to carry out their internal control and operational responsibilities.

5. Pemantauan
   Pemantauan adalah proses penilaian atas kualitas sistem Pengendalian Internal Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan, melalui evaluasi terpisah, dan dengan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit dan telaah lainnya.

   Pemantauan berkelanjutan terdiri dari kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, evaluasi terpisah berupa kegiatan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu yang mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dapat diselenggarakan secara mandiri. *Review* dan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

5. Monitoring
   Monitoring is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control system within a certain period of time. Monitoring is conducted on an ongoing basis, through separate evaluations, and by following up recommendations on the results of audits and other reviews.

   Continuous monitoring consists of regular management activities, supervision, comparison, reconciliation, and other actions related to the implementation of duties. Meanwhile, a separate evaluation is an assessment of the quality of internal control system performance with a certain scope and frequency that considers the results of risk assessment and the effectiveness of continuous monitoring procedures. Separate evaluations can be organized independently. Reviews and tests of the effectiveness of internal control system are conducted by considering the scope and frequency of evaluation, methodology, and resources.

## Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Implementation

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan. Divisi Audit Internal membantu Direktur Utama untuk menilai keandalan dan kecukupan pengendalian internal Perseroan dan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*), keandalan pelaporan keuangan (*reporting*), serta efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan (*operation*), tetapi juga aspek lainnya yang berdampak pada tata kelola perusahaan (*governance*).

The Board of Directors is responsible for conducting a good internal control system to achieve the Company's objectives. The Internal Audit Division assists the President Director in assessing the reliability and adequacy of the Company's internal control, which is not only limited to compliance with laws and regulations (compliance), reliability of financial reporting (reporting), and efficiency and effectiveness of the Company's operations (operations), but also other aspects with an impact on corporate governance (governance).

## Pelaksanaan Sistem Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan
Operational, Financial, and Compliance Control System

Sistem Pengendalian Internal PT PII diterapkan atas 3 (tiga) aspek utama, yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun langkah-langkah pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan yang dilakukan oleh PT PII, antara lain meliputi :

IIGF implements (3) three Internal Control System aspects, i.e., operational control, financial control, and compliance with other laws and regulations. The operational, financial, and compliance control measures carried out by IIGF include, among others:

1. Pengendalian Operasional
   a. Identifikasi dan penilaian risiko operasional
   b. Pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur operasional berbasis pengendalian internal
   c. Penetapan tanggung jawab dan *Job Description* bagi pelaksana prosedur operasional
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap keefektifan prosedur operasional oleh Divisi Audit Internal
   e. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait keefektifan prosedur operasional oleh Divisi Audit Internal
2. Pengendalian Keuangan
   a. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan
   b. Penetapan prosedur pemantauan dan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan
   c. Pelaksanaan proses rekonsiliasi berkala untuk memastikan keakuratan informasi keuangan
   d. Penetapan mekanisme reviu kepatuhan oleh Divisi *Risk and Management* dan evaluasi oleh Divisi Audit Internal serta Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjaga keandalan informasi keuangan
   e. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait keandalan informasi keuangan oleh Divisi Audit Internal
3. Pengendalian Kepatuhan
   a. Identifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan dengan operasi Perseroan
   b. Pengembangan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan kebijakan Perseroan
   c. Pemantauan dan penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan oleh Divisi Audit Internal dan auditor eksternal (KAP, BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
   d. Sosialisasi kepada karyawan tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan tersebut
   e. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait kepatuhan oleh Divisi Audit Internal

1. Operational Control
   a. Identification and assessment of operational risks.
   b. Development and application of operational policies and procedures based on internal control.
   c. Determination of responsibilities and Job Description for operational procedure implementors.
   d. Regular monitoring and evaluation of the effectiveness of operational procedures by the Internal Audit Division.
   e. Monitoring the implementation of follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to the effectiveness of operational procedures by the Internal Audit Division.
2. Financial Control
   a. Accurate and timely recording of events and transactions to ensure the availability of relevant and reliable information for decision-making.
   b. Establishment of monitoring and verification procedures for financial transaction reporting.
   c. Regular reconciliation process to ensure the accuracy of financial information.
   d. Establishment of a compliance review mechanism by the Risk Management Division and evaluation by Internal Audit Division and Public Accounting Firm (KAP) to maintain the reliability of financial information.
   e. Monitoring the implementation of follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to the reliability of financial information by the Internal Audit Division.
3. Compliance Control
   a. Identification of laws and regulations, and policies relevant to the Company's operations.
   b. Development of compliance policies and procedures in line with legal requirements and Company policies.
   c. Monitoring and assessment of compliance with regulations and policies by the Internal Audit Division and external auditors (KAP, BPK, BPKP, Inspectorate General of the Ministry of Finance).
   d. Dissemination to employees on the applicable regulations and policies as well as the importance of compliance with such regulations and policies.
   e. Monitoring the implementation of follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to compliance by the Internal Audit Division.

## Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Review of the Effectiveness of Internal Control Systems

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa tata kelola Perseroan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perseroan. Salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai.

The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to ensuring that the Company's governance is well implemented as a basis for achieving the objective of maintaining and increasing the Company's value. One of the implementations of good corporate governance is to ensure that the internal control system runs adequately.

Pada tahun 2025, Divisi Audit Internal melakukan evaluasi atas *Entity Level Control* yang pada tanggal 3 November sampai dengan 5 Desember 2025. Ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) di dalam lingkungan PT PII selama periode tahun 2025.

In 2025, the Internal Audit Division conducted an Entity Level Control evaluation from 3 November to 5 December 2025. The scope of the assessment included all Entity Level Control processes within IIGF during the 2025 period.

Metodologi yang digunakan untuk menilai kecukupan penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen dan data;
2. Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan; dan
3. Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan.

The methodology to assess the adequacy of the entity-level internal control system implementation is as follows:

1. Review of documents and data;
2. Observation and interviews with management and employees; and
3. Survey for management and employees.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di PT PII pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori sangat baik dengan capaian skor 90,42 untuk mendukung efektifitas sistem dan kebijakan pengendalian internal.

Based on the evaluation results, the Entity Level Control at IIGF was generally designed and implemented very well, with a score of 90.42, to support the effectiveness of internal control systems and policies.

## Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dan Pengendalian Internal

Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control

Berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers/PwC) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat temuan atau kelemahan material terkait kepatuhan perundang–undangan maupun kepatuhan terhadap pengendalian internal.

Based on the audit conducted by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers/ PwC Network) on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended 31 December 2025, there were no findings or material weaknesses related to compliance with laws and regulations or compliance with internal control.

## Studi Banding/*Benchmarking* Audit Internal

Internal Audit Benchmarking

Dalam rangka mengukur dan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada unit kerja yang sejenis pada perusahaan lain, PT PII telah mengikuti Konferensi Nasional Audit Internal yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia).

IIGF attended the National Conference on Internal Audit organized by the Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) to assess and compare performance with similar activities or activities in similar working units in other companies.

Selain itu PT PII juga aktif berperan sebagai pengurus dan anggota dari Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara (FKSPI BUMN).

In addition, IIGF also actively plays a role as administrator and member of the Communication Forum for Internal Audit Units of State-Owned Enterprises (FKSPI BUMN).

## *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan

Monitoring Follow-Up on Findings

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Divisi Audit Internal melakukan pemantauan dan menindaklanjuti tanggapan atas rekomendasi dari hasil audit internal & eksternal melalui prosedur peninjauan dan verifikasi atas perkembangan status tindakan perbaikan yang dijalankan oleh unit kerja terkait.

The Internal Audit Division monitors and follows up on responses to recommendations from internal & external audit results through review and verification procedures on the status of corrective actions progress carried out by the relevant work units to ensure the effectiveness of the implementation of internal control system.

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja terkait.

This monitoring activity aims to objectively assess the extent to which the recommendation of findings have been implemented, and to check the accuracy of both written and physical data in the field on follow-up reports submitted by related working units.

Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal disampaikan kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai dengan akhir Triwulan IV (Q4) 2025, secara keseluruhan PT PII telah menyelesaikan 23 rekomendasi (100%) dari total 23 rekomendasi audit internal yang harus diselesaikan di 2025.

The Follow-up Report on Internal and External Audit Recommendations is distributed to the President Director and to the Board of Commissioners through Audit Committee periodically, at least once every three (3) months. As of the end of Quarter IV (Q4) 2025, IIGF completed 23 recommendations (100%) of the total 23 internal audit recommendations that must be completed in 2025.

## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Hasil Penelaahan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Pada tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern PT PII yang dilakukan Divisi Audit Internal pada 3 November

In 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, reviewed the evaluation results of the effectiveness of IIGF's internal control system, conducted by the Internal Audit Division from 3 November

sampai dengan 5 Desember 2025, dengan ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT PII selama periode tahun 2025.

to 5 December 2025, with the scope of the assessment covering all Entity Level Control processes within IIGF for the 2025 period.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di PT PII pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori sangat baik dengan capaian skor 90,42 sehingga Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern dianggap memadai.

The evaluation result shows that the Entity Level Control at IIGF was designed and implemented very good in general, with a score of 90,42. Therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors stated that the Internal Control System was implemented adequately.

# Manajemen Risiko
## Risk Management

Perseroan memandang penerapan manajemen risiko sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan strategis dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis.

The Company considers the risk management implementation as a key element in achieving its strategic objectives and business sustainability. Therefore, the Company implements a risk management system that is integrated with business strategies and processes.

Manajemen risiko diterapkan secara proaktif dan memandang ke depan guna mendukung Perseroan dalam mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Risk management is implemented in a proactive and forward-looking manner to support the Company in anticipating, maximizing added value for shareholders, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable growth of the Company's business.

## Dasar Kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko
### Risk Management Policy Basis

Perseroan memiliki sejumlah kebijakan terkait manajemen risiko, antara lain:
1. *Operation Manual* PT PII;
2. *Enterprise Risk Management Framework* PT PII; dan;
3. Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU).

The Company has several policies related to risk management, among others:
1. IIGF's Operation Manual;
2. IIGF's Enterprise Risk Management Framework; and;
3. Business Continuity Management System (SMKU) Policy.

Secara umum, kebijakan Perseroan terkait manajemen risiko dirumuskan dengan mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko yang mengadopsi standar ISO 31000:2018. Berdasarkan dokumen tersebut, Kerangka Manajemen Risiko Korporasi PT PII didefinisikan sebagai berikut:
1. Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik manajemen risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas manajemen risiko;

Generally, the Company's policies related to risk management are formulated with reference to the Risk Management Framework, adopting the ISO 31000:2018 standard. Based on this document, IIGF's Corporate Risk Management Framework is defined as follows:
1. Establishment of common principles and standards for risk management practices to enable common understanding of risk management;

2. Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;
3. Mengadopsi Kerangka Manajemen Risiko yang mendefinisikan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bisnis secara umum; dan
4. Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi manajemen risiko.

Kerangka ini merupakan pendekatan yang terstruktur dan konsisten untuk mengarahkan dan mempersiapkan organisasi agar dapat mengendalikan risiko dan perubahan yang dapat mempengaruhi organisasi. Selain itu, Kerangka Manajemen Risiko merupakan pendekatan holistik yang diterapkan dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan sehingga tetap selaras dengan *risk appetite* Perseroan di tengah situasi bisnis yang semakin dinamis.

2. Risk appetite and tolerance agreed upon by management in determining the risk level;
3. The adoption of a Risk Management Framework that defines the risk management processes applied to the business in general; and
4. Accountability and responsibility in the risk management implementation.

The Framework is a structured and consistent approach to direct and prepare the organization to control risks and changes that may affect the organization. In addition, the Risk Management Framework is a holistic approach applied in managing various risks faced by the Company, so that they remain aligned with the Company's risk appetite amidst the increasingly dynamic business condition.

## Prinsip-Prinsip Pengelolaan Manajemen Risiko
Risk Management Principles

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi panduan dalam menerapkan sistem manajemen risiko di lingkungan Perseroan berdasarkan standar ISO 31000:2018, sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1. Manajemen Risiko berperan dalam menciptakan dan melindungi nilai Perseroan;
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, proses, sistem, maupun struktur organisasi, dan dipertimbangkan dengan informasi terbaik yang tersedia dalam setiap pengambilan keputusan;
3. Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perseroan;
4. Manajemen Risiko adalah proses yang melibatkan para pemangku kepentingan secara inklusif dan dijalankan di seluruh organisasi untuk meningkatkan kesadaran serta pengelolaan risiko; dan
5. Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

The Company implements risk management principles that guide the application of risk management system within the Company based on ISO 31000:2018 standards, as elaborated below:
1. Risk Management plays a role in creating and protecting the Company's value;
2. Risk Management is an integral part of all organizational processes, which must be applied in all activities, processes, systems, and organizational structure, and considered with the best available information in every decision making;
3. Risk Management is dynamic, iterative, responsive to change, and customized in line with the achievement of the Company's objectives;
4. Risk Management is a process that involves stakeholders in an inclusive manner and is carried out across the organization; and
5. Risk Management is the driver to create an adaptable and sustainably developed organization.

## Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko
Risk Management Governance Structure

Penerapan Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab seluruh individu dan unsur organisasi sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Perseroan

The implementation of Risk Management is the responsibility of all individuals and organizational elements, in accordance with their respective roles, functions, and authorities. The

mengadopsi **Model Tiga Garis (*Three Lines Model*)** yang menggambarkan hubungan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan antar fungsi dalam organisasi.

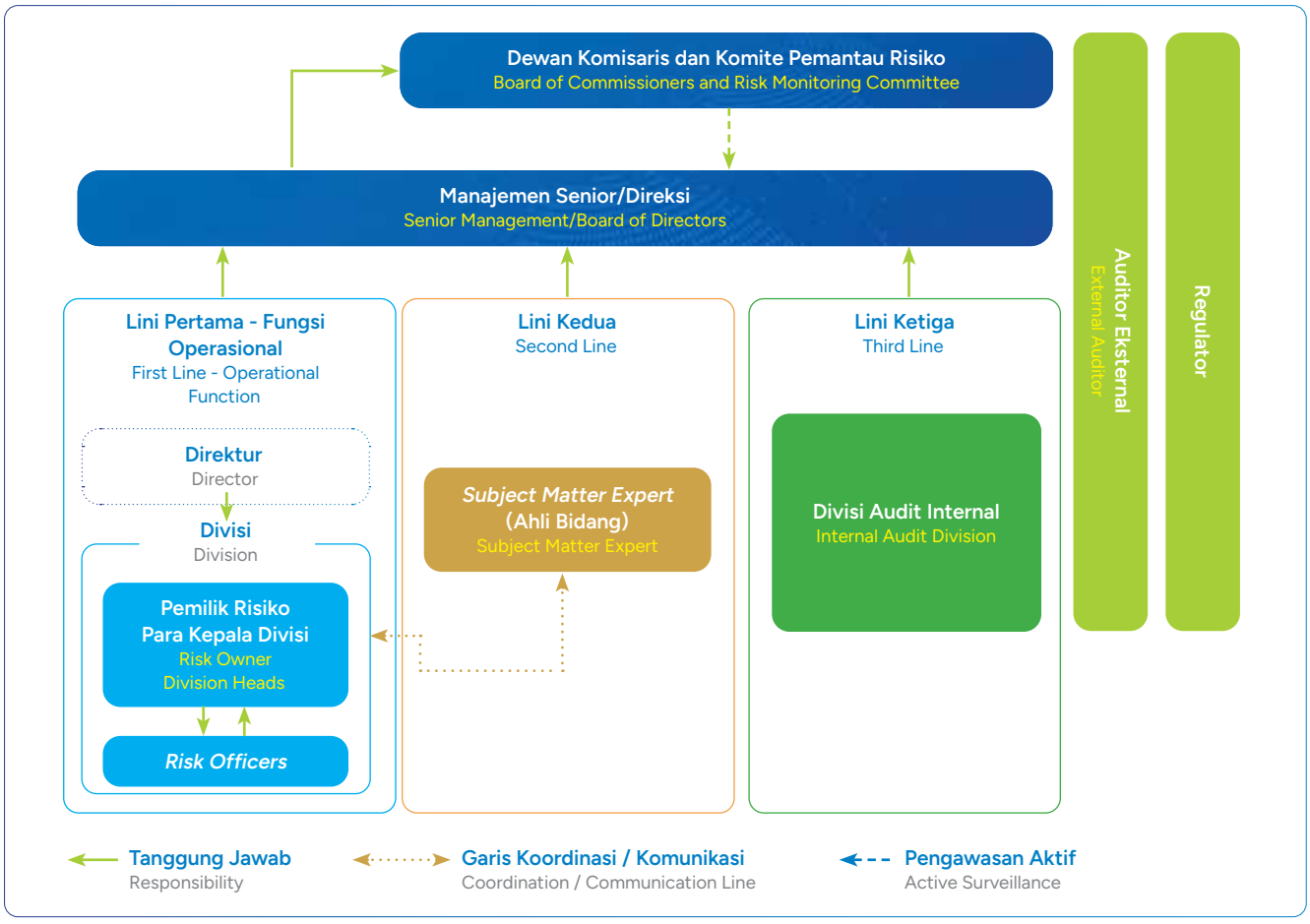
Tata kelola ini mencakup peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, pengelolaan oleh Manajemen Senior/Direksi, pelaksanaan oleh unit kerja sebagai pemilik risiko, serta fungsi *assurance* oleh Audit Internal dan Auditor Eksternal, dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Regulator.

Adapun struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Company adopts the **Three Lines Model**, which illustrates the coordination, communication, and oversight relationships between functions within the organization.

This governance encompasses the oversight role of the Board of Commissioners, management by Senior Management/ the Board of Directors, implementation by work units as risk owners, and assurance functions by Internal Audit and External Auditors, while adhering to regulatory requirements.

The Company's Risk Management Governance structure is as follows:




Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di PT PII:

1. **Dewan Komisaris**, yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, berperan dalam melakukan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan.
2. **Manajemen Senior/Direksi**, bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, arahan strategis, serta memastikan implementasi manajemen risiko berjalan efektif di seluruh organisasi.

The following is a further description of IIGF's Risk Management Governance structure:

1. **The Board of Commissioners,** supported by the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee, plays a role in overseeing the overall implementation of risk management.
2. **Senior Management/Board of Directors** is responsible for establishing policies and strategic direction, and ensuring the effective implementation of risk management throughout the organization.

3. **Direktur**, sebagai bagian dari Direksi, membawahi fungsi operasional termasuk pengelolaan risiko pada masing-masing divisi.
4. **Divisi/Unit Kerja (*First Line*)**, yang terdiri dari:
   - o ***Risk Owner*** atau Pemilik Risiko yaitu para Pimpinan Divisi/*Senior Leaders* yang bertindak sebagai pengelola risiko di setiap divisi.
   - o ***Risk Officer***, yaitu para staf yang terpilih pada setiap Divisi yang membantu Pemilik Risiko dan Tim dalam melaksanakan proses manajemen risiko di setiap divisi dengan dukungan Tim Divisi Risk Management.
5. ***Subject Matter Expert* (Ahli Bidang)**, yaitu pihak yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu yang relevan dengan kegiatan Perseroan.
6. **Divisi Audit Internal (*Third Line*)**, berfungsi memberikan *assurance* independen atas efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.
7. **Auditor Eksternal dan Regulator**, sebagai pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan evaluasi independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh elemen tersebut didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan guna memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi di seluruh lini organisasi.

3. **Directors**, as part of the Board of Directors, oversee operational functions, including risk management, in each division.
4. **Divisions/Work Units (First Line)**, consisting of:
   - o **Risk Owners**, namely the Division Heads/Senior Leaders who act as risk managers in each division.
   - o **Risk Officers**, namely selected staff members in each Division who assist the Risk Owners and Team in implementing the risk management process in each division, with the support of the Risk Management Division Team.
5. **Subject Matter Experts**, namely parties with competence and in-depth knowledge in specific fields relevant to the Company's activities.
6. **Internal Audit Division (Third Line)**, which functions to provide independent assurance on the effectiveness of the implementation of risk management, internal control, and governance.
7. **External Auditors and Regulators**, as external parties who conduct independent supervision and evaluation in accordance with applicable regulations.

All of these elements are supported by continuous communication and coordination to ensure the effective and integrated implementation of risk management across all levels of the organization.

## Struktur Organisasi dan Kedudukan Fungsi Manajemen Risiko

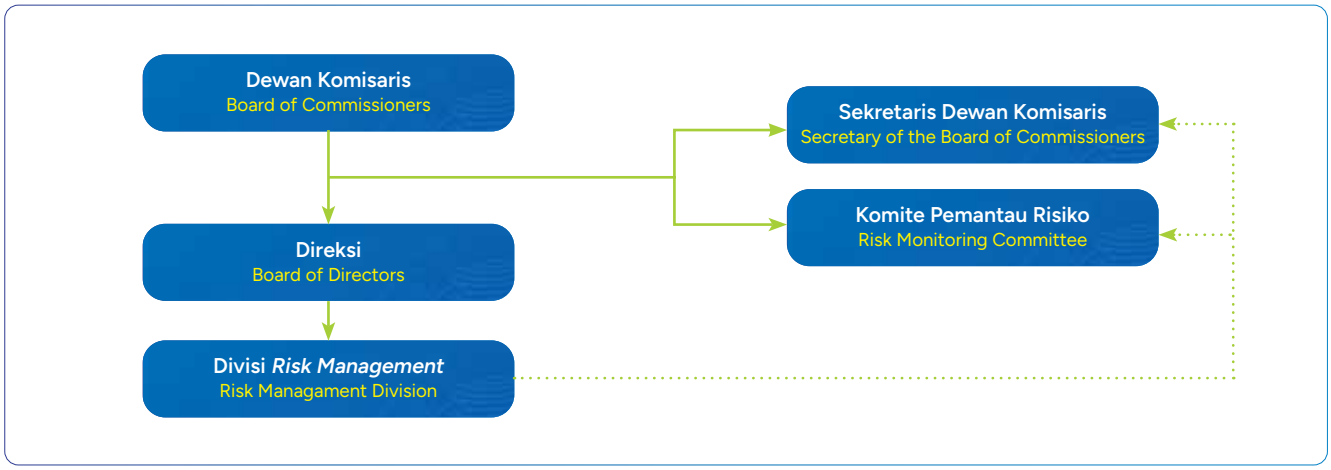
Organizational Structure and Position of Risk Management Function

Fungsi Manajemen Risiko di Perseroan dijalankan oleh Divisi *Risk Management*. Berikut bagan yang menggambarkan struktur organisasi Divisi *Risk Management* serta hubungan komunikasi dan pelaporan setiap unsur dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya:

The Company's Risk Management function is carried out by the Risk Management Division. The following chart depicts the organizational structure of the Risk Management Division, and the communication and reporting relationships of each element in carrying out its duties, responsibilities, and functions:

**Struktur Organisasi Divisi *Risk Management***

Organizational Structure of Risk Management Division



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pimpinan Divisi *Risk Management* bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko untuk memperoleh masukan dan arahan dalam pelaksanaan aktivitas manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala. Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Divisi *Risk Management*.

In carrying out its duties and responsibilities, the Division Head of Risk Management reports to the President Director and coordinates with the Risk Monitoring Committee to obtain input and direction on the implementation of risk management activities reported periodically. The Risk Management Team is directly responsible to the Division Head of Risk Management.

## Pejabat Manajemen Risiko dan Dasar Pengangkatan

Risk Management Officers and Basis of Appointment

Divisi *Risk Management* dipimpin oleh Pimpinan Divisi *Risk Management* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui proses internal. Hingga tanggal 31 Desember 2025, Pimpinan Divisi *Risk Management* Perseroan dijabat oleh Sdri. Rully Susiyanti berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-014/DIR/HCOD/0425 tanggal 4 April 2025

The Risk Management Division is led by the Division Head of Risk Management, who is appointed and dismissed by the President Director through an internal process. As of 31 December 2025, the Head of Risk Management Division of the Company is held by Mrs. Rully Susiyanti, pursuant to the Board of Directors' Decision Letter No. SK-014/DIR/HCOD/0425 dated 4 April 2025.



### Rully Susiyanti

Pimpinan Divisi *Risk Management*
Division Head of Risk Management

| | | |
|---|---|---|
| Kewarganegaraan<br>Nationality | Indonesia | Indonesian |
| Usia<br>Age | 48 Tahun per 31 Desember 2025 | 48 years old as of 31 December 2025 |
| Domisili<br>Domicile | Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia | South Jakarta, Special Region of Jakarta, Indonesia |
| Tempat/Tanggal Lahir<br>Place/Date of Birth | Jakarta, 31 Oktober 1977 | Jakarta, 31 October 1977 |
| Periode jabatan<br>Term of Office | Sejak 4 April 2025 | Since 6 January 2025 |
| Riwayat Pendidikan<br>Educational Background | • Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (2000)<br>• *Master of Science in Financial Management*, SKEMA Business School (2002) | • Bachelor of Economics Accounting, Universitas Indonesia (2000)<br>• Master of Science in Financial Management, SKEMA Business School (2002) |
| Sertifikasi<br>Certification | • *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)<br>• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko | • Qualified Chief Risk Officer (QCRO)<br>• Level 3 Risk Management Certification by the Risk Management Certification Agency |
| Riwayat Jabatan<br>Career History | Bergabung dengan PT PII sejak 6 Januari 2025 sebagai Pimpinan Divisi *Risk Management*. Sebelumnya, mengawali karir sebagai konsultan manajemen pada salah satu *consulting firm*, kemudian pernah menjabat di beberapa bank di Indonesia sebagai *Senior Internal Auditor, Governance & Process Improvement Head, Transformation Journey Senior Specialist* dan terakhir sebagai *Risk Control Head for Digital Banking & Branchless*. | Joined IIGF on 6 January 2025 as the Division Head of the Risk Management. Previously, she started her career as a management consultant at a consulting firm, then served in several banks in Indonesia as Senior Internal Auditor, Governance & Process Improvement Head, Transformation Journey Senior Specialist, and most recently as Risk Control Head for Digital Banking & Branchless. |
| Rangkap Jabatan<br>Concurrent Positions | Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan | Has no concurrent positions within the Company or externally. |

## Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Divisi *Risk Management*

Duties and Responsibilities of the Division Head of Risk Management

1. Memimpin pengembangan kerangka kerja manajemen risiko korporat (ERM *Framework*) yang diimplementasikan melalui Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko Perseroan yang terus dipelihara dan diperbaiki secara berkesinambungan (*Continuous Improvement*);
2. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemberian penjaminan, terutama dari aspek manajemen risiko Perseroan;
3. Memimpin pelaksanaan proses kajian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur standar Perseroan yang berlaku;
4. Melaksanakan dokumentasi dan konsultasi proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pemilik dan pengelola risiko di setiap divisi; dan
5. Menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

1. Leading the development of enterprise risk management framework (ERM Framework), implemented in the Company's Risk Management Process, under continuous improvement;
2. Supporting the decision-making process in providing guarantee, specifically in terms of the Company's risk management aspect;
3. Leading the compliance assessment process with the Company's applicable standard policies and procedures;
4. Documenting and providing consultation of risk management processes carried out by risk owners and managers in each division; and
5. Preparing regular risk management reports and submitting them to the Board of Directors and Board of Commissioners via the Risk Monitoring Committee.

Selain menjalankan peran fungsi Manajemen Risiko, Divisi *Risk Management* PT PII juga bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi terkait proses kepatuhan sebagai bagian dari implementasi GCG dan pengendalian internal.

In addition to carrying out its Risk Management function, IIGF's Risk Management Division also has the duty to provide assistance and consultation regarding the compliance process as part of GCG and internal control implementation.




Jika audit internal dilakukan setelah suatu transaksi dilakukan, maka sebaliknya pengkajian atas kepatuhan (*compliance review*) diterapkan sebagai salah satu alat pengelola risiko sebelum sebuah transaksi dilakukan. Salah satu tugas dari fungsi *compliance review* adalah memastikan terpenuhinya prasyarat sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta proses penjaminan di dalam proyek.

If an internal audit is carried out after a transaction, then, on the contrary, compliance review shall be applied as one of the risk management tools before a transaction is carried out. One of the tasks of the compliance review function is to ensure the fulfillment of prerequisites related to the procurement of goods and services and the projects guarantee process.

## SDM dan Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
Risk Management Human Resources and Professional Certification

Per tanggal 31 Desember 2025, Divisi *Risk Management* didukung oleh 4 (empat) karyawan dengan tingkat Pendidikan dan Sertifikasi Profesi sebagai berikut:

As of 31 December 2025, the Risk Management Division was supported by 4 (four) employees, with the levels of education and professional certification as follows:

| Jabatan Position | Jenjang Pendidikan Education | Sertifikasi Certification | Jumlah Personel Total Personnel |
|---|---|---|---|
| Pimpinan Divisi *Risk Management* Division Head of Risk Management | S2 Master Degree | 2 | 1 |
| *Senior Risk Specialist* | S2,S1 Master Degree, Bachelor Degree | 5 | 2 |
| *Risk Specialist* | S1 Bachelor Degree | 3 | 1 |
| **Jumlah** Total | | **10** | **4** |

Berikut pengungkapan informasi sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan yang bertugas di Divisi *Risk Management* hingga akhir tahun 2025:

The information regarding the professional certifications held by employees of the Risk Management Division until the end of 2025 was as follows:

| Jabatan Position | Jumlah Personel Number of Personnel |
|---|---|
| *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) dari LSP MKS Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from LSP MKS | 1 |
| *Certified Corporate Risk Analyst* (CCRA) dari BPKP Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) from BPKP | 2 |
| *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Certified Risk Management Professional (CRMP) from Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR) | 1 |
| *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) | 1 |
| *Enterprise Risk Management Associate Professional* (ERMAP) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) | 1 |
| *Certified* GRC *Professional* dari LSP GRK Certified GRC Professional from LSP GRK | 1 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification from Risk Management Certification Agency | 1 |
| *Certified* PPP *Professional* (CP3P) *Foundation Level* | 2 |
| *Certified Compliance Professional* (CCP) dari LPK MKS Certified Compliance Professional (CCP) from LPK MKS | 1 |

## Sistem Manajemen Risiko Perseroan
Company's Risk Management System

Perseroan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*/ERM) yang disusun secara holistik dan terintegrasi dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Kerangka Kerja ERM telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/PII-BOD/0321 tanggal 4 Maret 2021 dan telah dilakukan pembaharuan yang disahkan pada tanggal 30 Desember

The Company uses the Enterprise Risk Management (ERM) approach, which is prepared holistically and is integrated as a reference to carry out risk management effectively and efficiently. ERM Framework has been ratified pursuant to the Board of Directors' Decision Letter No. 003/SK/PII-BOD/0321 dated 4 March 2021 and updated as ratified on 30 December 2025. The framework preparation was the reflection of the Company's commitment to

2025. Penyusunan kerangka kerja tersebut merupakan perwujudan komitmen Perseroan dalam penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi sehingga dapat memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai standar internasional ISO 31000:2018 *Risk management - Guidelines* yaitu dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan merumuskan langkah-langkah mitigasi terkait tantangan dan dampak terhadap ketidakpastian.

implementing risk management in the organization in a broad and integrated manner to provide guidance for the risk management implementation in a systematic and measurable manner in accordance with the international standard, ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines, i.e., in identifying, analyzing, assessing, and formulating mitigation actions related to challenges and impacts on uncertainty.

## Tujuan dan Kerangka Kerja Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM)

Objectives and Framework of Enterprise Risk Management (ERM)

Perseroan menerapkan ERM dengan tujuan untuk:

1. Mengembangkan PT PII menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis PT PII;
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
3. Memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
4. Meningkatkan reputasi PT PII di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

The Company implements ERM with the objectives to:

1. Develop IIGF as a risk resilient organization to achieve the corporate vision and mission through a comprehensive evaluation of the risks inherent in all IIGF's business activities;
2. Support risk-based decision making by management in achieving healthy business growth by considering the established risk/return profile;
3. Fulfill Good Corporate Governance principles by creating prudent strategies and processes; and
4. Enhance IIGF's reputation from the perspective of shareholders and stakeholders.

Pernyataan Misi Manajemen Risiko, yaitu "*tone at the top*", bertujuan untuk mengkomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII dan menegaskan bahwa manajemen senior Perseroan akan mengarahkan kegiatan Manajemen Risiko di seluruh tingkatan organisasi.

The Risk Management Mission Statement, "tone at the top", aims to communicate IIGF's vision, principles, and mandate, and confirms that the Company's top management will direct Risk Management at all levels of the organisation.

Sementara itu, misi yang ingin dicapai melalui penerapan ERM adalah untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan memfasilitasi proses manajemen risiko melalui penyediaan alat dan metodologi yang tepat untuk dapat mengelola risiko secara eksplisit sehingga tercapai tujuan dari penerapan pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko di lingkungan PT PII.

Meanwhile, ERM implementation has the mission to understand the major risks faced by the organization and facilitate the risk management process through the provision of appropriate tools and methodologies to manage risks explicitly, in order to achieve the objective of implementing a consistent approach to risk management within IIGF.

Bersamaan dengan itu, penerapan ERM juga ditujukan untuk menciptakan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;

Simultaneously, ERM is implemented to create a risk-aware organization through:

1. Establishment of a risk-based management system, which manages all major risks through practices in all business activities and decision making;
2. Risk management at all levels in the organization;

3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan oleh semua pemilik proses bisnis; dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

3. Clear accountability and independence in carrying out compliance reviews and monitoring of all activities by all business process owners; and
4. Adoption of widely accepted international standards

## Kategori Risiko
Risk Category

PT PII telah membuat klasifikasi risiko yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis, Mencakup seluruh risiko yang timbul dari ketidakakuratan perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi bisnis Perseroan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis.
2. Risiko Operasional, Mencakup seluruh risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, kejadian eksternal, serta risiko *fraud* dalam pelaksanaan fungsi bisnis dan peran Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
3. Risiko Kredit, Mencakup seluruh risiko akibat kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada Perseroan, baik yang berasal dari aktivitas penjaminan maupun dari penempatan dana pada instrumen keuangan.
4. Risiko Likuiditas, Mencakup seluruh risiko akibat ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo secara tepat waktu.
5. Risiko Pasar, Mencakup seluruh risiko kerugian akibat perubahan kondisi pasar, termasuk fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, yang berdampak pada nilai aset dan kewajiban Perseroan.
6. Risiko Hukum, Mencakup seluruh risiko yang timbul akibat kelemahan atau kelalaian dalam aspek hukum dan kontraktual yang dapat menimbulkan tuntutan atau gugatan terhadap Perseroan.
7. Risiko Kepatuhan, Mencakup seluruh risiko akibat ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, serta kebijakan dan standar internal.
8. Risiko Reputasi, Mencakup seluruh risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sebagai dampak dari persepsi negatif, isu etika, kepatuhan, atau kualitas layanan.

IIGF has created a risk classification, explained as follows:

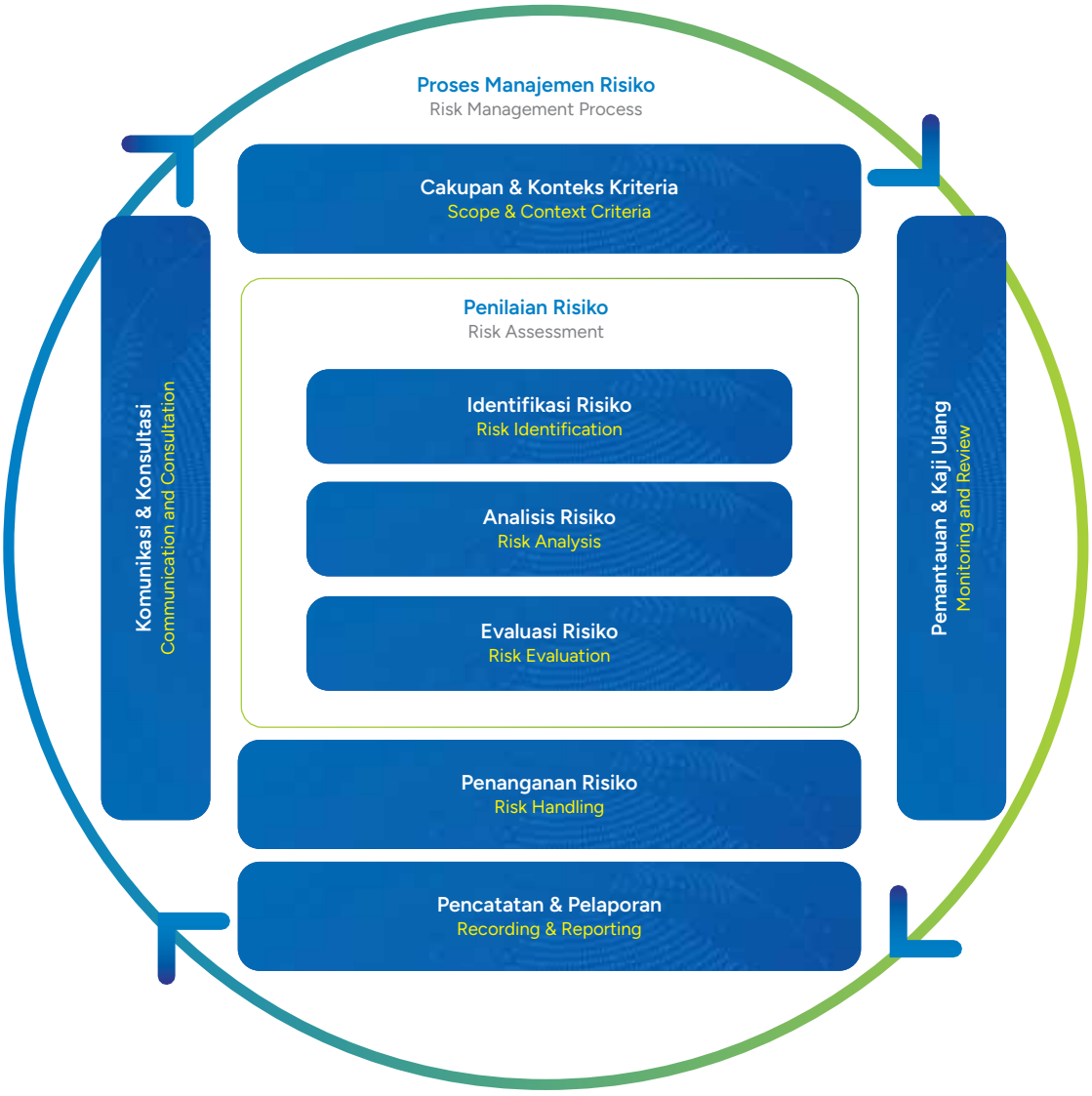
1. Strategic Risk, includes all risks arising from inaccuracy in the formulation, decision-making, execution, and monitoring of the Company's business strategies in achieving its vision, mission, and strategic objectives.
2. Operational Risk, includes all risks arising from inadequate or failed internal processes, human error, system failure, external events, and the risk of fraud in the implementation of the Company's business functions and role as an Infrastructure Guarantee Agency.
3. Credit Risk, includes all risks resulting from the failure of third parties to fulfill their financial obligations to the Company, either arising from underwriting activities or from the placement of funds in financial instruments.
4. Liquidity Risk, includes all risks resulting from the Company's inability to meet its due financial obligations in a timely manner.
5. Market Risk, includes all risks of loss due to changes in market conditions, including fluctuations in interest rates and exchange rates, which impact the value of the Company's assets and liabilities.
6. Legal Risk, includes all risks arising from weaknesses or negligence in legal and contractual aspects that may cause claims or lawsuits against the Company.
7. Compliance Risk, includes all risks resulting from the Company's non-compliance with laws and regulations, regulatory requirements, and internal policies and standards.
8. Reputation Risk, includes all risks arising from a decline in stakeholder trust in the Company as a result of negative perceptions, ethical issues, compliance issues, or service quality.

# Proses Manajemen Risiko yang Berlaku di PT PII

Risk Management Process Applicable at IIGF

Proses Manajemen Risiko merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Proses manajemen risiko meliputi penerapan yang sistematis dan berkesinambungan pada kegiatan dan proses komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, penilaian, penanganan, pemantauan dan kaji ulang serta pencatatan dan pelaporan risiko.

The Risk Management process is vital in management and decision making, and is integrated into the organizational structure, operations, and processes. The risk management process includes the systematic and continuous application of communication and consultation activities and processes, context determination, assessment, handling, monitoring, and review, as well as recording and reporting of risks.




Mengacu pada standar ISO 31000:2018, Proses Manajemen Risiko di PT PII dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Cakupan, Konteks, dan Kriteria
   Penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah tahapan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan

With reference to the ISO 31000:2018 standard, IIGF's Risk Management Process is described as follows:

1. Scope, Context, and Criteria
   The determination of scope, context, and criteria is a key phase to adjust the Risk Management process

proses Manajemen Risiko guna mendukung penilaian dan perlakuan risiko secara efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi dan operasional Perseroan. Secara garis besar, proses bisnis yang berjalan di PT PII saat ini terdiri dari:

a. Penjaminan KPBU;
b. Penjaminan Non-KPBU;
c. Pendampingan Penyiapan dan Transaksi;
d. *Capacity Building*; dan
e. Pengelolaan penempatan dana (investasi).

Menilik dinamika bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan, terdapat potensi penambahan mandat dan proses bisnis lain yang perlu dikaji dampaknya terhadap strategi, operasi dan keuangan Perseroan.

to support the assessment and treatment of risks effectively and relevant to the organizational and operational environment of the Company. Generally, IIGF's current business processes consist of:

a. PPP Guarantee;
b. Non-PPP Guarantee;
c. Project Development Facility;
d. Capacity Building; and
e. Investment management.

Looking into the business dynamics and the stakeholders' needs, there is the potential for additional mandates and other business processes that needs to be assessed for their impact on the Company's strategy, operations, and finances.

2. Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi adalah tahapan yang dilaksanakan baik secara internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik dalam bentuk rapat berkala, rapat insidentil atau *ad hoc*, *Focus Group Discussion* (FGD); dan diskusi reguler antara fungsi Manajemen Risiko dengan para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Officer*.

2. Communication and Consultation
Communication and consultation are phases carried out internally and externally to ensure the effectiveness of risk management by interacting with stakeholders, in the form of regular meetings, incidental or ad hoc meetings, Focus Group Discussions (FGDs); and regular discussions between the Risk Management function, Risk Owners, and Risk Officers.

3. Penilaian Risiko
Tahapan penilaian risiko mencakup identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dijalankan secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan dan dampak terjadinya suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sehingga dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.

3. Risk Assessment
The risk assessment stage includes the identification, analysis, and evaluation of risks conducted systematically to determine the likelihood and impact of an event that obstructs the achievement of organizational goals or objectives so that appropriate risk management can be carried out.

4. Penanganan Risiko
Penanganan risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi PT PII dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.

4. Risk Handling
Risk handling is a phase to determine the right actions that can provide the most optimal benefits for IIGF in dealing with identified risks.

5. Pemantauan dan Kaji ulang Risiko
Pemantauan risiko adalah kegiatan pemantauan rutin terhadap kinerja proses Manajemen Risiko atas perencanaan dan harapan atas proses Manajemen Risiko. Sementara itu, kaji ulang risiko merupakan kegiatan peninjauan secara berkala atas kondisi terkini dan pada fokus tertentu.

5. Risk Monitoring and Review
Risk monitoring is a regular monitoring activity of the Risk Management's performance on the planning and expectations on the Risk Management process. Meanwhile, risk review is a regular activity to review current conditions with a particular focus.

6. Pencatatan dan Pelaporan Risiko
Proses Manajemen risiko beserta hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme

6. Risk Recording and Reporting
The Risk Management process and its results shall be documented and reported via appropriate mechanisms.

yang tepat. Pelaporan risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola organisasi yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta membantu pemenuhan tugas dan tanggung jawab para Direksi dan Dewan Komisaris.

Risk reporting is an integral part of organizational governance that is implemented to improve the quality of communication with stakeholders, and to fulfill the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

## Penetapan Tingkat Risiko
Risk Level Determination

Perseroan telah menetapkan tingkat risiko yang mungkin dapat diterima Perseroan dan digunakan dalam pengukuran risiko yang menerjemahkan selera dan toleransi risiko Perseroan. Berikut matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko:

The Company has determined the level of risk that may be acceptable to the Company and is used in risk measurement, reflecting the Company's risk appetite and tolerance. The following risk level matrix will be used in the risk evaluation:

| Matriks Risiko 5x5<br>Risk Matrix 5x5 | | | Level Dampak<br>Severity | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Tidak Signifikan<br>Not Significant | Minor | Moderat<br>Moderate | Mayor<br>Major | Berbahaya<br>Danger |
| Level kemungkinan<br>Likelihood | E | Sangat Tinggi<br>Very High | Menengah<br>Medium<br>(1E) | Menengah<br>Medium<br>(2E) | Tinggi<br>High<br>(3E) | Tinggi<br>High<br>(5E) | Tinggi<br>High<br>(5E) |
| | D | Tinggi<br>High | Menengah<br>Medium<br>(1D) | Menengah<br>Medium<br>(2D) | Tinggi<br>High<br>(3D) | Tinggi<br>High<br>(4D) | Tinggi<br>High<br>(5D) |
| | C | Sedang<br>Middle | Rendah<br>Low<br>(1C) | Menengah<br>Medium<br>(2C) | Menengah<br>Medium<br>(3C) | Tinggi<br>High<br>(4C) | Tinggi<br>High<br>(5C) |
| | B | Rendah<br>Low | Rendah<br>Low<br>(1B) | Rendah<br>Low<br>(2B) | Menengah<br>Medium<br>(3B) | Menengah<br>Medium<br>(4B) | Tinggi<br>High<br>(5B) |
| | A | Sangat Rendah<br>Very Low | Rendah<br>Low<br>(1A) | Rendah<br>Low<br>(2A) | Rendah<br>Low<br>(3A) | Menengah<br>Medium<br>(4A) | Menengah<br>Medium<br>(5A) |

Selera Risiko
Risk Appetite

Toleransi Risiko
Risk Tolerance

Tingkat risiko rendah
Low Risk Level

Tingkat risiko menengah
Medium Risk Level

## Pedoman Penanganan Risiko
Risk Management Guidelines

Tujuan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan adalah agar Perseroan dapat melakukan penanganan risiko secara tepat sehingga dapat ditentukan aktivitas pengelolaan risiko selanjutnya. Penanganan risiko

The Company implements a risk management system with the objective to enable the Company to handle risks appropriately so that further risk management activities can be determined. Risk handling is prepared with due

dipersiapkan dengan memperhatikan selera risiko yang diterjemahkan ke dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko untuk dijadikan acuan dalam menentukan langkah mitigasi terhadap setiap risiko yang teridentifikasi.

regards to the risk appetite, which is translated into a risk level matrix. Below are risk handling guidelines for each risk level to be used as a reference in determining the mitigation measures for each identified risk.

| Tingkat Risiko<br>Risk Level | Penanganan Risiko<br>Handling Risk | |
|---|---|---|
| **Rendah**<br>Low | Risiko dapat diterima dan pengelolaannya cukup dilakukan oleh Unit Kerja Pemilik Risiko (*Risk Owner*) melalui tindakan pengendalian rutin dan *monitoring* berkala | The risk is acceptable and is managed by the Risk Owner through routine control measures and periodic monitoring. |
| **Menengah**<br>Medium | Risiko tersebut berada dalam batas toleransi risiko dan dapat diterima oleh Perseroan dengan pertimbangan manfaat tambahan yang akan diperoleh. Namun demikian, apabila risiko menengah berpotensi meningkat atau memiliki dampak strategis terhadap pencapaian sasaran utama Perseroan, maka risiko tersebut harus di eskalasikan kepada Manajemen Senior | The risk is within risk tolerance limits and is acceptable to the Company, considering the additional benefits to be obtained. However, if a medium risk has the potential to escalate or has a strategic impact on the achievement of the Company's primary objectives, it must be escalated to Senior Management. |
| **Tinggi**<br>High | Risiko telah melampaui toleransi risiko yang dapat diterima oleh Perseroan. Dalam kondisi ini, risiko dikategorikan sebagai tidak dapat diterima dan memerlukan tindakan mitigasi yang efektif, serta eskalasi kepada Manajemen Senior dan atau Pemangku Kepentingan yang berwenang untuk penetapan keputusan lebih lanjut. | The risk has exceeded the Company's acceptable risk tolerance. In this condition, the risk is categorized as unacceptable and requires effective mitigation measures, as well as escalation to Senior Management and/or authorized stakeholders for further decision-making. |

## Risiko-Risiko Utama yang Dihadapi oleh Perseroan

Company's Major Risks

Dalam menjalankan usahanya, pada tahun 2025, PT PII terekspos pada sejumlah risiko utama, diantaranya:

In conducting its business, in 2025, IIGF was exposed to several major risks, including:

| No. | Jenis Risiko<br>Type of Risk | Penjelasan Risiko<br>Risk Explanation | Pengelolaan dan Penanganan Risiko<br>Risk Management and Handling |
|---|---|---|---|
| 1. | Risiko Strategis -Tidak Tercapainya Target Nilai Investasi Penjaminan<br>Strategic Risk – Non-Achievement of Guarantee Investment Value Target | Dalam menjalankan peran sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), Perseroan menghadapi risiko terkait aktivitas bisnisnya. Risiko yang dihadapi antara lain terkait dengan target *pipeline* proyek, tertunda atau tidak berlanjutnya proyek ke tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres untuk proyek KPBU, dan tidak terbitnya penugasan untuk penjaminan Non KPBU yang dapat berpengaruh kepada nilai investasi proyek yang dijamin.<br>In carrying out its role as an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI), the Company faces risks, related to its business activities. The risks include those related to project pipeline targets, delayed or noncontinuation of projects to the stage of signing guarantee agreements and recourse agreements for PPP projects, and non-issuance of assignments for Non-PPP guarantees, which can affect the investment value of the guaranteed project. | Secara umum Perseroan melakukan penguatan strategi antara lain melakukan koordinasi dengan PJPK secara intensif dan pelaksanaannya untuk penambahan *pipeline* dan perluasan sektor.<br>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pencapaian target nilai investasi penjaminan maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.<br>Generally, the Company has strengthened the strategy, among others, to coordinate with GCA intensively and its implementation for pipeline and sector expansion.<br>By managing and handling related to the achievement of the target investment value of the guarantee, the level of risk can be better managed. |

| No. | Jenis Risiko<br>Type of Risk | Penjelasan Risiko<br>Risk Explanation | Pengelolaan dan Penanganan Risiko<br>Risk Management and Handling |
|---|---|---|---|
| 2. | Risiko Likuiditas<br>- Ketidakcukupan Likuiditas Ketika Terjadi Klaim Penjaminan<br>Liquidity Risk - Insufficient Liquidity When a Guarantee Claim Occurs | PT PII memiliki eksposur potensi klaim penjaminan. Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk memastikan proses pembayaran klaim tepat waktu.<br>IIGF is exposed to potential guarantee claims. When a claim occurs, the Company needs to ensure sufficient liquidity to ensure a timely claim payment process | Secara umum Perseroan melakukan pemantauan posisi penempatan dana (investasi) secara berkala untuk memastikan kecukupan likuiditas terhadap potensi klaim serta melakukan pemantauan atas potensi klaim secara berkala.<br>Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah berhasil melakukan pengelolaan likuiditas sehingga tingkat risiko likuiditas dapat terkelola dengan baik.<br>Generally, the Company monitors the position of investment regularly to ensure adequate liquidity against potential claims and monitors potential claims periodically.<br>In 2025, the Company successfully managed liquidity so that the level of liquidity risk could be well managed. |
| 3. | Risiko Kredit – Tidak Terpulihkannya Tagihan Regres<br>Credit Risk - Non-Recovery of Recourse Invoices | Setelah dilakukannya proses pembayaran klaim, Perseroan juga menghadapi risiko kredit terkait dengan pemulihan regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya tagihan regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar regres. Perseroan perlu memastikan bahwa piutang regres yang timbul dapat terpulihkan sesuai kesepakatan.<br>After the claim payment process, the Company also faces credit risk related to recourse recovery. This risk relates to the non-recovery of recourse receivables due to the inability of GCA or Guaranteed SOEs to pay recourse. The Company needs to ensure that the recourse receivables arising can be recovered as agreed | Secara umum Perseroan melakukan penguatan instrumen regres antara lain skema pembayaran regres dan penguatan perjanjian regres.<br>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait hak tagih regres maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.<br>Generally, the Company has strengthened recourse instruments, including recourse payment schemes and strengthening of recourse agreements. With the management and handling of recourse receivables, the level of risk can be better managed. |

Selain fokus pada risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan dari aspek Risiko Strategis, Likuiditas, dan Kredit, PT PII juga secara konsisten mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam proses bisnis dan kerangka manajemen risiko Perseroan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko yang timbul akibat perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan, yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan di masa kini dan mendatang.

In addition to focusing on the main risks faced by the Company from the aspects of Strategic, Liquidity, and Credit Risk, IIGF also consistently integrates the concept of sustainability into the Company's business processes and risk management framework. This approach is implemented to anticipate potential risks arising from changes in the dynamic business environment, including economic, social, and environmental aspects, which can impact the Company's current and future business continuity.

Dalam aspek ekonomi, integrasi keberlanjutan dilakukan melalui penguatan tata kelola, penyesuaian strategi bisnis, serta pengelolaan risiko guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan kinerja Perseroan. Pada aspek sosial, Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan hak pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra kerja, dan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko sosial dan reputasi. Sementara itu, pada aspek lingkungan, Perseroan secara konsisten mengelola potensi dampak lingkungan dari aktivitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

In the economic aspect, sustainability integration is implemented through strengthening governance, adjusting business strategies, and managing risks to maintain the Company's financial stability and sustainable performance. In the social aspect, the Company ensures that all operational activities are carried out with due regard for the interests and rights of stakeholders, including employees, business partners, and the community, as part of its efforts to mitigate social and reputational risks. Meanwhile, in the environmental aspect, the Company consistently manages the potential environmental impacts of its operational activities and ensures compliance with applicable regulations.

Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, yang tercermin dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan usaha, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan. Dengan demikian, integrasi keberlanjutan dan pengelolaan risiko diharapkan dapat memperkuat ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis sekaligus mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

All of these efforts are implemented based on the principles of integrity, transparency, and accountability, which are reflected in decision-making, business implementation, and reporting and supervision mechanisms. Therefore, the integration of sustainability and risk management is expected to strengthen the Company's resilience in facing changes in the business environment while supporting the creation of sustainable long-term value.

## Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2025

Report on the Duties and Responsibilities of the Risk Management Function in 2025

Sepanjang tahun 2025, Divisi *Risk Management* telah melaksanakan sejumlah aktivitas yang merupakan bagian dari tugas, tanggung jawab, dan fungsi Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelaahan atas Dokumen Proses Bisnis PT PII;
2. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan untuk memastikan proses penjaminan telah mengikuti prosedur internal (Pedoman/Kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
3. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan untuk memastikan proses penempatan dana investasi telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMK 148/2022 dan prosedur internal;
4. Melakukan penelaahan terhadap pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertentu untuk memastikan bahwa proses telah mengikuti ketentuan dan prosedur internal yang berlaku;
5. Memfasilitasi proses identifikasi, penanganan, pemantauan dan pelaporan risiko Perseroan secara berkelanjutan dengan melibatkan *Risk Officer* dan *Risk Owner*;
6. Melaksanakan implementasi *Risk Control Matrix*;
7. Melaksanakan implementasi *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dan *Key Risk Indicators* (KRI);
8. Melaksanakan sosialisasi, *training* dan sertifikasi manajemen risiko untuk personil di Perseroan;
9. Melaksanakan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) untuk penilaian tingkat maturitas ERM dengan mengacu kepada ISO 31000:2018 dan *best practice*
10. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen *Governance, Risk, and Compliance* yang bertujuan dalam otomatisasi beberapa lingkup modul yaitu *Risk Control Matrix*, *Risk Control Self-Assessment*, *Risk Event Database*, *Key Risk Indicator*, serta *Dashboard*; dan

Throughout 2025, the Risk Management Division carried out several activities that constituted the duties, responsibilities, and functions of Risk Management, including the following:

1. Reviewing IIGF's Business Process Documents;
2. Verifying the Compliance Check to ensure that the guarantee process complied with the applicable internal procedures (Guidelines/Policies and Standard Operating Procedures/SOPs);
3. Verifying Compliance Check to ensure that the investment placement process complied with the applicable laws and regulations, i.e., PMK 148/2022 and internal procedures;
4. Reviewing the procurement of goods and services with a certain value to ensure that the process has followed the applicable regulations and internal procedures;
5. Facilitating the process of identification, handling, monitoring, and reporting of the Company's risks continuously by involving Risk Officers and Risk Owners;
6. Implementing Risk Control Matrix;
7. Implementing Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRI);
8. Conducting dissemination, training, and certification of risk management for the Company's personnel;
9. Assessing Risk Maturity Index (RMI) for ERM maturity level assessment by referring to ISO 31000:2018 and best practice.
10. Development of Governance, Risk, and Compliance Management Information System with the objective to automate several module scopes, i.e., Risk Control Matrix, Risk Control Self-Assessment, Risk Event Database, Key Risk Indicator, and Dashboard; and

11. Implementasi dan Pemeliharaan Sertifikasi atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadopsi dari ISO 37001:2016 atas area Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

11. Implementing and Maintaining Certification on Anti- Bribery Management System (SMAP), adopted from ISO 37001:2016 for Procurement of Goods and Services as part of the commitment to Good Corporate Governance.

## Penjelasan Mengenai Hasil Telaah yang Dilakukan atas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2025

Explanation of Review Result Carried Out Over Risk Management System in 2025

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan risiko yang efektif, Perseroan telah melakukan penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko melalui beberapa mekanisme, di antaranya dengan mengakomodir aspek Manajemen Risiko ke dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi, audit dengan pendekatan berbasis risiko, review implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan secara berkala. Divisi *Risk Management* secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat melalui pengawasan dan pemantauan pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan.

To actualize effective risk management, The Company has assessed the risk management implementation through several mechanisms, including accommodating aspects of Risk Management into the Corporate's Key Performance Indicator (KPI), audits with a risk-based approach, regular reviews and monitoring, and reporting to stakeholders. The Risk Management Division evaluates the effectiveness of the corporate Risk Management system through supervision and monitoring of risk level movements in the Company's risk profile.

Pada tahun 2025 Divisi *Risk Management* melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat melalui penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang biasa disebut *Risk Maturity Index* (RMI). Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan manajemen risiko di Perseroan serta penyusunan *road map* untuk pengembangan kedepan. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen mengacu kepada standar ISO 31000:2018 menggunakan *tools* SAICORP.

In 2025, the Risk Management Division evaluated the effectiveness of the corporate Risk Management system by assessing the maturity level of risk management, commonly known as the Risk Maturity Index (RMI). This assessment aims to obtain an overview of the risk management implementation in the Company as well as the preparation of a road map for future development. The assessment is conducted by an independent external party with reference to the ISO 31000:2018 standard using SAICORP tools.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diperoleh skor nilai sebesar 4,08 (*Managed*) dari tingkatan level 1-5 naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,85 (*Repeatable*), Perseroan kemudian melakukan perumusan terhadap *road map* untuk terus meningkatkan pengelolaan risiko. Hasil penilaian ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris sebagai bagian dari realisasi IKU Perseroan tahun 2025.

The assessment resulted in a score of 4.08 (Managed) on a scale of level 1-5, increasing from the previous year score of 3.85 (Repeatable). Further, the Company formulated a road map to continuously improve risk management. The results of this assessment were submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners as part of the realization of the 2025 Corporate KPI.

## Pengawasan Aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi

Active Supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors

Perseroan senantiasa mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko, antara lain melalui Laporan Manajemen Risiko dan pemantauan atas perkembangan mitigasi

The Company reviews the effectiveness of risk management implementation, among others, through the Risk Management Report and monitoring of risk

risiko yang disampaikan setiap semester oleh Divisi *Risk Management* kepada Direktur Utama selaku Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko. Kemudian, secara berkala Perseroan menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang antara lain memuat informasi mengenai perkembangan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan, termasuk informasi mengenai status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Laporan dibuat secara komprehensif sehingga memberikan gambaran komitmen dari Perseroan untuk menurunkan tingkat risikonya.

Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan risiko Perseroan, Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko serta memberikan masukan dan saran terkait efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Kemudian, secara berkala diadakan rapat dan diskusi bersama antara Divisi *Risk Management* dan Komite Pemantau Risiko guna membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan.

mitigation progress submitted every semester by the Risk Management Division to the President Director, as the Director in charge of the Risk Management function. Further, the Company submits a Management Report to the Board of Commissioners which contains information on the progress of the risk management system implementation in the Company, including information on the status of follow-up on mitigation. The report is made comprehensively to illustrate the Company's commitment to reducing its risk level.

In addition, to strengthen the Company's risk management, the Board of Commissioners has established the Risk Monitoring Committee to assist the Board of Commissioners in supervising risk management as well as provide input and advice regarding the effectiveness of risk management in the Company. Periodically, joint meetings and discussions are held between the Risk Management Division and the Risk Monitoring Committee to discuss the implementation and work programs related to risk management and follow up on the inputs submitted.

## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Hasil Penelaahan atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Direksi dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai *best practice* mengingat tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan yang terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko antara lain dengan adanya sosialisasi, *training* dan sertifikasi yang akan meningkatkan budaya dan pengelolaan risiko secara keseluruhan. Pada tahun 2025, Perseroan juga melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang biasa disebut *Risk Maturity Index* (RMI) dengan hasil skor nilai sebesar 4,08 (*Managed*) dari tingkatan level 1-5 meningkat dari tahun sebelumnya

The Board of Commissioners has supervised and monitored the effectiveness of risk management implementation. Based on the supervision results, the Board of Directors is considered to have shown a strong commitment to enhancing the quality of the risk management practices continuously, especially in areas that include resource capabilities, technology, and methodologies developed in accordance with best practices, considering the challenges and demands of the business world, including the increasing expectations of stakeholders amidst uncertain economic and business situations.

Some recommendations for improvements have been made in an effort to improve the quality of risk management, which include the dissemination, training, and certification, that shall improve the risk culture and management comprehensively. In 2025, the Company also assessed the maturity level of risk management, commonly known as the Risk Maturity Index (RMI), with a score of 4.08 (Managed) on a scale of 1-5, increasing from the previous year score of 3.85 (Repeatable). This assessment aims to obtain an

sebesar 3,85 (*Repeatable*). Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan manajemen risiko di Perseroan serta penyusunan *road map* untuk pengembangan kedepan sehingga implementasi manajemen risiko Perseroan akan terus berkembang.

overview of the risk management implementation in the Company as well as the preparation of a road map for future development so that the implementation of the Company's risk management will continue to improve.

Dengan pendampingan oleh Divisi *Risk Management*, *Risk Officer* diharapkan dapat meningkatkan perannya untuk membantu para pemilik risiko (*Risk Owner*) dalam mengelola, menjalankan, dan memantau pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap divisi dan unit kerja masing-masing.

With assistance from the Risk Management Division, Risk Officers shall enhance their role to assist risk owners in managing, implementing, and monitoring the risk management processes in each division and working unit.

Hasil pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko melalui penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat dengan metodologi *Risk-Control Self Assessment* (RCSA) menunjukkan bahwa pengendalian risiko Perseroan untuk risiko yang dinilai memiliki tingkat risiko di atas rendah telah sepenuhnya memadai.

The results of risk management monitoring via the Corporate Risk Management Process with the Risk-Control Self Assessment (RCSA) methodology showed that the Company's risk control for risks assessed as having a risk level above low was fully adequate.

# Audit Eksternal/Akuntan Publik

External Audit/Public Accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan dan kinerja PT PII dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

The independent supervisory function of IIGF's financial aspect and performance is monitored by carrying out External Audit by Public Accounting Firm.

## Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Mechanism to Appoint and Determine Public Accountants

1. Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pengadaan Kantor Akuntan Publik
2. Dewan Komisaris menerbitkan Surat Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan kepada Direktur Utama
3. Pengadaan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Divisi *Corporate Service & Procurement* (Divisi CSP) sesuai dengan Kebijakan pengadaan barang dan jasa
4. Direktur Utama menerbitkan Surat Usulan Penunjukkan KAP sesuai dengan hasil pengadaan yang dilakukan oleh Divisi CSP kepada Dewan Komisaris

1. The Audit Committee submits recommendations to the Board of Commissioners regarding the procurement of Public Accounting Firm.
2. The Board of Commissioners issues a Procurement Letter to the President Director, for a Public Accounting Firm to conduct a general audit of the Financial Statements.
3. The procurement of Public Accounting Firm is organized by the Corporate Service & Procurement Division (CSP Division) in accordance with the Policy of the procurement of goods and services.
4. The President Director issues a Proposal Letter for the Appointment of KAP to the Board of Commissioners, in accordance with the procurement result organized by the CSP Division.

5. Dewan Komisaris menerbitkan Surat Usulan Penunjukkan KAP kepada Pemegang Saham
6. Pemegang Saham menerbitkan KMK Penunjukkan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan
7. Direktur Utama menerbitkan Surat Penunjukkan kepada KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan

5. The Board of Commissioners issues a Letter of Proposal for the KAP Appointment to the Shareholders.
6. Shareholders issued KMK for the KAP Appointment to conduct a general audit of the Financial Statements.
7. The President Director issues a Letter of Appointment to the KAP to conduct a general audit of the Financial Statements.

## Daftar Akuntan Publik Dalam Periode 2021-2025

List of Public Accountant for the 2021-2025 Period

| Periode<br>Period | Nama Kantor Akuntan Publik<br>Name of Public Accounting Firm | Nama Akuntan Publik<br>Public Accountant's Name | Lingkup Penugasan<br>Scope of Assignment | Jasa Lainnya<br>Other Services | Komisi yang Dibayarkan<br>Commission Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers/ PwC)<br>No. Izin: KEP-315/KM.1/2024<br>Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers/ PwC network)<br>Permit No.: KEP-315/ KM.1/2024 | Jimmy Pangestu, S.E., CPA<br>No. Izin: AP.1124<br>Permit No.: AP.1124 | Jasa audit laporan keuangan<br>Financial statements audit services | Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.<br>Compliance audit services in accordance with regulations, internal control (PSA 62), and Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, Board of Directors, and Board of Commissioners. | Rp1.195.000.000 |
| 2024 | KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers/ PwC)<br>No. Izin: KEP-315/KM.1/2024<br>Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers/ PwC network)<br>Permit No.: KEP-315/ KM.1/2024 | Jimmy Pangestu, S.E., CPA<br>No. Izin: AP.1124<br>Permit No.: AP.1124 | Jasa audit laporan keuangan<br>Financial statements audit services | Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.<br>Compliance audit services in accordance with regulations, internal control (PSA 62), and Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, Board of Directors, and Board of Commissioners. | Rp1.086.650.000 |
| 2023 | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)<br>No. Izin: KEP-241/KM.1.2015<br>KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers/ PwC network)<br>Permit No.: KEP-241/ KM.1.2015 | Jimmy Pangestu, S.E., CPA<br>No. Izin: AP.1124<br>Permit No.: AP.1124 | Jasa audit laporan keuangan<br>Financial statements audit services | Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.<br>Compliance audit services in accordance with regulations, internal control (PSA 62), and Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, Board of Directors, and Board of Commissioners. | Rp 1.055.000.000 |

| Periode<br>Period | Nama Kantor Akuntan Publik<br>Name of Public Accounting Firm | Nama Akuntan Publik<br>Public Accountant's Name | Lingkup Penugasan<br>Scope of Assignment | Jasa Lainnya<br>Other Services | Komisi yang Dibayarkan<br>Commission Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)<br>No. Izin: KEP-241/KM.1.2015<br>KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers/ PwC network)<br>Permit No.: KEP-241/ KM.1.2015 | Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA<br>No. Izin: AP.0229<br>Permit No.: AP.0229 | Jasa audit laporan keuangan<br>Financial statements audit services | Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.<br>Compliance audit services in accordance with regulations, internal control (PSA 62), and Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, Board of Directors, and Board of Commissioners. | Rp 981.852.850 |
| 2021 | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)<br>No. Izin: KEP-241/KM.1.2015<br>KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers/ PwC network)<br>Permit No.: KEP-241/ KM.1.2015 | Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA<br>No. Izin: AP.0229<br>Permit No.: AP.0229 | Jasa audit laporan keuangan<br>Financial statements audit services | Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.<br>Compliance audit services in accordance with regulations, internal control (PSA 62), and Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, Board of Directors, and Board of Commissioners. | Rp865.000.000 |

## Biaya Audit dan Biaya Non Audit

Audit's Fee and Non-Audit's Fee

Selama tahun 2025, PT PII menjalin kerja sama dengan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers/PwC) untuk melaksanakan audit atas jasa audit laporan keuangan, jasa audit kepatuhan, dan jasa audit Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris dengan total biaya audit sebesar Rp1.195.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pada tahun yang sama, tidak terdapat pembayaran biaya non-audit kepada KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers/PwC) karena tidak ada kerja sama selain untuk pelaksanaan audit tersebut.

In 2025, IIGF cooperated with KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers/ PwC network) to conduct financial statements audit services, compliance audit services, and Key Performance Indicator ("KPI") audit services of the Company, Board of Directors, and Board of Commissioners, with a total audit fee of Rp1,195,000,000 (one billion one hundred ninety-five million rupiah).

In the same year, there was no payment of non-audit fees to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan a member firm of the (a member firm of PricewaterhouseCoopers/PwC network) because there were no other services provided other than the aforementioned audit.

# Informasi Perkara Penting Perseroan
Information on Significant Cases of the Company

## Permasalahan Hukum Pidana dan Perdata
Criminal and Civil Legal Issues

Selama tahun 2025, PT PII tidak menghadapi permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana

Throughout 2025, IIGF did not face any legal issues, either civil or criminal.

## Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi
Legal Issues Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

Selama tahun 2025, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PII yang sedang menjabat.

Throughout 2025, there were no legal issues faced by the current members of the Board of Commissioners and Board of Directors of IIGF.

## Permasalahan Hukum Pada Entitas Anak
Legal Issues in Subsidiaries

Sampai dengan per 31 Desember 2025, PT PII belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak ada informasi terkait dengan permasalahan hukum, pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap Perseroan, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas Anak PT PII.

As of 31 December 2025, IIGF did not have any Subsidiaries. Therefore, there is no information regarding legal issues, subject matter of the case, settlement status, impact on the Company, nominal value of lawsuit, and administrative sanctions imposed on IIGF 's Subsidiaries.

## Permasalahan hukum Lainnya
Miscellaneous Legal Issues

Dalam tiga tahun terakhir hingga 31 Desember 2025, PT PII tidak terlibat dalam permasalahan hukum terkait ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, dan peraturan, termasuk transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material. Selain itu, tidak terdapat keputusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan. PT PII juga tidak menghadapi pelanggaran hukum dalam perlindungan konsumen, kepailitan, komersial, persaingan usaha, maupun lingkungan.

In the past three years until 31 December 2025, IIGF was not involved in any legal issues related to non-compliance with laws, rules, and regulations, including significant or material transactions with related party. Furthermore, there were no guilty verdicts from the highest tax court regarding tax matters. IIGF also did not face any legal violations related to consumer protection, bankruptcy, commercial matters, business competition, or the environment.

## Informasi Hubungan Industrial
Information on Industrial Relation

Selama tahun 2025, PT PII tidak menghadapi perkara hukum terkait dengan hubungan industrial, perburuhan atau ketenagakerjaan.

Throughout 2025, IIGF did not face any legal cases related to industrial relation, labor, or employment.

## Informasi Sanksi Administratif
Information on Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi dari regulator dalam bentuk apapun dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (*material event*).

Throughout 2025, the Company did not receive any form of administrative sanction from regulators and was never sanctioned by regulators for failing to make announcements on material events within the prescribed time frame.

## Sanksi Administratif yang Dihadapi Entitas Anak
Administrative Sanction Imposed on the Subsidiaries

Hingga per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki entitas anak sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi Sanksi administratif yang melibatkan Entitas Anak.

As of 31 December 2025, the Company did not have any subsidiaries. Therefore, the Company does not present information on administrative sanctions involving Subsidiaries.

# *Whistleblowing System*
Whistleblowing System




Pedoman pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/ WBS) diatur dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran nomor CSC.003/KEB/V.02/2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 September 2023.

The whistleblowing reporting (Whistleblowing System/ WBS) guidelines are regulated under the Whistleblowing System Policy number CSC.003/KEB/V.02/2023, which was signed by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners on 19 September 2023.

Penerapan kebijakan WBS di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan panduan pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari Insan Perseroan dan Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif;
2. Mendorong setiap Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, kebijakan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dipandang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, baik terhadap bisnis Perseroan, keuangan, lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi Perseroan dan lainnya;
3. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perseroan apabila mekanisme pengendalian internal sebagaimana telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan atau diberlakukan untuk mencegah pelanggaran/penyimpangan dan/atau penyalahgunaan oleh Insan Perseroan;
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pelapor atas potensi hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai;
5. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas; dan
6. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan kinerja pegawai maupun organisasi.

The implementation of WBS policy within the Company has the following objectives:

1. Providing guidelines in handling Whistleblowing reports from the Company's Personnel and Stakeholders to ensure the implementation of an effective mechanism for resolving whistleblowing;
2. Encouraging all Company's Personnel and other Stakeholders to submit/report violations and/or deviations from the code of conduct, laws and regulations, standard operating procedures, policies, and other violations committed by Company's Personnel that are deemed to be detrimental and/or harmful to the Company, both to the Company's business, finances, environment, office buildings, working conditions, reputation, etc.;
3. Minimizing the possibility of risks that may harm the Company if the predetermined internal control mechanism could not be implemented or enforced to prevent violations/deviations and/or abuse by the Company's Personnel;
4. Enhancing the confidence of each Company's Personnel and other Stakeholders regarding the protection provided by the Company to the Whistleblower against potential punishment, retaliation, or unreasonable, and unfair treatment to the Whistleblower if the person concerned discloses the violation, based on good faith and adequate evidence;
5. Supporting the actualization of a culture of transparency, accountability, and integrity; and
6. Improving the effectiveness of good corporate governance, internal control, and employee and organizational performance.

## Sosialisasi WBS

Dissemination of WBS

Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul, Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi terkait WBS baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal.

Selama tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan WBS. Kegiatan sosialisasi tersebut mencakup hal-hal berikut:

In order to provide understanding and raise awareness among all employees and other relevant parties to report any form of violation, thereby minimizing the occurrence of potential violations, the Company continuously conducts dissemination of the WBS to both internal and external parties.

Throughout 2025, the Company conducted a series of dissemination activities for the Company's personnel and stakeholders to introduce the WBS. These activities included the following:

1. Acara (*Event*) Sosialisasi
   a. Sosialisasi Kebijakan terkait GRC Tahun 2025
      Pada 26 Juni 2025 telah dilaksanakan sosialisasi Kebijakan terkait GRC yang mencakup pembahasan mengenai poin-poin ketentuan pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Kebijakan GCG), Kebijakan Kode Etik, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU). Bertempat di PT PII, sosialisasi dihadiri karyawan dan manajemen PT PII. Sosialisasi membahas poin – poin terkait WBS antara lain:
      - Pelanggaran yang dapat dilaporkan
      - Penyampaian pelaporan pelanggaran
      - Tata cara penanganan laporan pelanggaran
      - Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
      - Perlindungan pelapor, saksi dan terlapor

2. Sosialisasi Melalui Televisi di Area Kantor
   Sosialisasi dilaksanakan dengan memutarkan looping video terkait edukasi WBS pada televisi-televisi di area kantor PT PII. Poin-poin yang ditampilkan dalam video antara lain terkait:
   - Definisi pelapor (*whistleblower*)
   - Hal-hal yang termasuk pelanggaran dan dapat dilaporkan
   - Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
   - Saluran pelaporan pelanggaran.

1. Dissemination through Events
   a. GRC dissemination in 2025
      On June 26, 2025, a dissemination of GRC-related policies was conducted, which included discussions on the provisions of the Good Corporate Governance Policy (GCG Policy), Code of Ethics Policy, Gratification Control Policy, Violation Reporting System (WBS) Policy, Anti-Bribery Management System (SMAP) Policy, and Business Continuity Management System (SMKU) Policy. Held at IIGF, the dissemination was attended by IIGF employees and management. The dissemination discussed points related to the WBS, including:
      - Types of violations that can be reported
      - Procedures for submitting whistleblowing reports
      - Procedures for handling whistleblowing reports
      - The Whistleblowing Management Team
      - Protection for whistleblowers, witnesses, and reported parties

2. Dissemination Through Television in Office Areas
   Dissemination was also conducted by displaying looping educational videos related to the WBS on televisions located throughout the IIGF's office area. The video content included information on:
   - The definition of a whistleblower
   - Types of violations that can be reported
   - The Whistleblowing Management Team
   - Channels for submitting violation reports.

## Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan
Type of Violations to be Reported

Sejalan dengan kebijakan WBS, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS meliputi pelanggaran sebagai berikut:
1. Perbuatan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau nonfinansial terhadap Perseroan.
2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba dan perusakan barang.
3. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perseroan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan serta terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
4. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sistem pengendalian internal atas laporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.

In line with the WBS policy, the violations that can be reported via the WBS channel include the following:

1. Offenses that may cause financial or non-financial losses to the Company.
2. Violation of laws and regulations, such as signature forgery, embezzlement, mark-up, drug consumption, and destruction of goods.
3. Violation of the Company's Code of Conduct, such as conflict of interest, harassment, and involvement in prohibited community activities.
4. Violations of generally accepted accounting principles and internal control systems over financial statements that have the potential to result in material misstatements in the financial statements.

5. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional Perseroan, ataupun kebijakan, prosedur, dan/atau peraturan lain yang berlaku bagi Perseroan.
6. Perilaku Insan Perseroan yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Perseroan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
7. Tindakan pembiaran pelanggaran oleh Insan Perseroan yang mengindikasikan adanya keterlibatan yang bersangkutan dengan Pelanggaran tersebut.
8. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Violation of the Company's operational policies and procedures, or other policies, procedures, and/or regulations applicable to the Company.
6. Disgraceful behavior of the Company's personnel with the potential to tarnish the Company's reputation and/or may result in losses to the Company.
7. Acts of omission of violations by the Company's Personnel that indicate the involvement of the person related to the Violation.
8. Actions that endanger occupational health and safety.

## Pihak Terkait Pengelola Pelaporan Pelanggaran

Related Parties of Whistleblowing Management

Pihak pengelola pelaporan pelanggaran Perseroan adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan (PJTL) dan Tim Investigasi Pelaporan Pelanggaran (TIPP).

TP3 adalah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

PJTL terdiri atas:
1. Direktur Utama, jika Terlapor adalah Karyawan;
2. Komisaris Utama, jika Terlapor adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau organ Dewan Komisaris; dan

3. Dewan Komisaris (yang dalam hal ini tidak termasuk Komisaris Utama), jika Terlapor adalah Komisaris Utama.

Adapun, TIPP adalah tim yang bertugas melakukan investigasi Pelaporan Pelanggaran yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris.

The parties responsible for the Company's whistleblowing system are the Whistleblowing Management Team (TP3), Person in Charge of Report Follow-Up (PJTL), and Whistleblowing Investigation Team (TIPP).

TP3 is a team responsible for the Whistleblowing system management and the Whistleblowing System Policy implementation, whose members are determined via a Joint Decision Letter of the Board of Directors and Board of Commissioners.

PJTL consists of:
1. President Director, if the Reported Party is an employee;
2. President Commissioner, if the Reported Party is a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an organ of the Board of Commissioners; and
3. Board of Commissioners (in this case, does not include the President Commissioner), if the Reported Party is the President Commissioner.

Meanwhile, TIPP is a team in charge of investigating the Reported Violations, whose membership is determined based on the Decision Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

## Mekanisme Penyampaian Laporan

Mechanism for Submitting Reports

1. Tata cara penyampaian laporan atas terjadinya penyimpangan/pelanggaran adalah sebagai berikut:
   a. Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Perseroan melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang dikelola oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3).

1. The procedure for submitting reports on the occurrence of irregularities/violations is as follows:
   a. The Whistleblower submits the alleged violation in writing to the Company via whistleblowing channels established by the Company, which are managed by the Whistleblowing Management Team (TP3).

b. Apabila Pelapor menarik kembali laporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan pelaporan dimaksud.

2. Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat berupa keterangan tertulis, dokumen, foto, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan Pelaporan Pelanggaran dan harus memenuhi kriteria pelaporan sebagaimana diatur di dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

b. If the Whistleblower withdraws the report that has been submitted, the Whistleblower shall provide reasons related to the cancellation of such report.

2. The submitted Reports of Violations must be accompanied by supporting evidence in the form of written statements, documents, photos, and other evidence related to the reported Violations, and shall meet the reporting criteria as stipulated in the Whistleblowing Reporting System Policy.

## Saluran dan Media Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing Channels and Media

Perseroan menyediakan fasilitas saluran Pelaporan Pelanggaran melalui:

1. Melalui *website* Perseroan, dengan alamat *website*: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Menyampaikan surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) Perseroan, dengan alamat sebagai berikut:
   **PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**
   U.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
   Gedung Capital Place, Lantai 7
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
   Jakarta 12710 - Indonesia
3. Melalui *email* yang ditujukan kepada alamat *email*: pelaporan@iigf.co.id.
4. Kotak surat masuk TP3 di lingkungan Perseroan.

The Company provides Whistleblowing channel facilities via:

1. The Company's website, at: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Sending a letter addressed to the Company's Whistleblowing Management Team (TP3), at the following address:
   **Indonesia Infrastructure Guarantee Fund**
   att. Whistleblowing Management Team
   Capital Place Building, 7th Floor
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
   Jakarta 12710 - Indonesia
3. Through email at: pelaporan@iigf.co.id
4. TP3 mailbox available within the Company's office.

## Perlindungan Bagi Pelapor dan Terlapor

Protection for Whistleblowers and Reported Parties

Perseroan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua Pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Perlindungan kepada terlapor diberikan dengan berlandaskan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, Perseroan dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya oleh Perseroan.

2. Perseroan memberikan perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi/tekanan dalam segala bentuk, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun

The Company has a clear and impartial commitment to support and protect all Whistleblowers who report violations that occur within the Company. Protection for the reported parties is provided based on the principle of the presumption of innocence. In the event that indications of a criminal offense are identified, the Company may cooperate with the relevant authorities responsible for providing protection to witnesses and victims in accordance with the prevailing laws and regulations.

Protection for whistleblowers includes the following:

1. The identity of the whistleblower is kept confidential by the Company
2. The Company provides protection to the whistleblower from any form of threat, intimidation/pressure in any form, or any unpleasant actions from any party, as long as the whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation and does not disclose it to any other party

3. Perlindungan dan kerahasiaan diberikan kepada pelapor yang beritikad baik, terhitung sejak pengaduan disampaikan sampai dengan pengaduan selesai ditindaklanjuti
4. Apabila pelapor sendiri yang menyebarluaskan pengaduannya ke pihak lainnya yang mengakibatkan adanya risiko terungkapnya kerahasiaan pelapor, maka akan menghilangkan hak atas perlindungan yang diterima dari Perseroan.
5. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

3. Protection and confidentiality are granted to whistleblowers acting in good faith, starting from the time the report is submitted until the report has been fully followed up
4. If the whistleblower personally disseminates the report to other parties, resulting in the risk of the whistleblower's identity being disclosed, the whistleblower will lose the right to protection provided by the Company.
5. Protection for whistleblowers also applies to parties conducting the investigation as well as parties providing information related to the reported complaint.

Perseroan juga memberikan perlindungan kepada pelapor yang merupakan Insan Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi; dan/atau
4. Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadinya (*personal file record*)

The Company also provides protection to whistleblowers who are part of the Company's personnel in relation to the following matters:
1. Unfair dismissal;
2. Demotion in position or rank;
3. Harassment and/or discrimination; and/or
4. Adverse records in the personal file record.

Pelapor yang tidak berkenan identitasnya dipublikasikan, akan dijaga kerahasiaan identitas pribadinya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Dalam keadaan pelaporan sampai ke pengadilan atau kemungkinan proses hukum yang memerlukan identitas pelapor, maka pembukaan identitas pelapor dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelapor dan merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain perlindungan di atas, Perseroan juga dapat memfasilitasi perlindungan kepada pelapor dan/atau keluarga inti pelapor melalui aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila diperlukan.

Whistleblowers who prefer that their identities not be disclosed, the Company will maintain the confidentiality of their personal identity in accordance with the type of violation reported. In circumstances where the report proceeds to court or legal proceedings that require the disclosure of the whistleblower's identity, such disclosure will be carried out with prior notification to the whistleblower and in accordance with the applicable laws and regulations. In addition to the protections mentioned above, the Company may also facilitate protection for the whistleblower and/or the whistleblower's core family through the relevant authorities in accordance with prevailing laws and regulations, if necessary.

Perseroan memberikan perlindungan kepada terlapor melalui:
1. Kerahasiaan identitas terlapor selama proses verifikasi dan investigasi pelaporan pelanggaran.
2. Hak untuk membela diri dengan menyampaikan keterangan, saksi dan/atau bukti.
3. Hak mendapatkan informasi mengenai status kelanjutan proses dan hasil dari investigasi.
4. Pemulihan reputasi dan nama baik terlapor dalam hal berdasarkan hasil investigasi terlapor tidak dapat dibuktikan melakukan pelanggaran.

The Company provides protection to the reported party through the following measures:
1. Maintaining the confidentiality of the reported party's identity during the verification and investigation process of the reported violation.
2. The right to defend themselves by submitting testimony, witnesses, and/or evidence.
3. The right to obtain information regarding the status of the process continuation and the investigation results.
4. Restoration of the reported party's reputation and image if, based on the results of the investigation, the reported party is proven not to have committed a violation.

# Penanganan Pengaduan Pelaporan
Whistleblower Report Handling

Berikut alur skema alur penanganan pengaduan pelanggan Perseroan:

The following is the Company's whistleblower report handling flowchart:

**Pelapor Whistleblower**

Menyampaikan laporan dan dokuken pendukung melalui saluran pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh TP3
Submit reports and supporting documents via whistleblowing channels accessible by TP3

↓

**TP3 (Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran) TP3 (Whistleblowing Management Team)**

| Verifikasi laporan sesuai kriteria<br>Verify the report in line with the criteria | jika tidak sesuai kriteria, laporan ditutup<br>if the report does not meet the criteria, the report is closed | jika sesuai kriteria, usulkan investigasi kepada PJTL<br>if the report fulfills the criteria, investigation is proposed to PJTL |
|---|---|---|

↓

**Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan (PJTL) TIPP (Whistleblowing Investigation Team)**

| Investigasi substansi pelanggaran<br>Investigate the substance of the offense | mengumpulkan bukti<br>collect evidence | dapat menggunakan bantuan eskternal investigator<br>may use assistance of external investigator | membuat dan menyampaikan laporan hasil ivestigasi ke PJTL<br>prepare and submit investigation report to PJTL |
|---|---|---|---|

↓

**Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan (PJTL) PJTL (Whistleblowing Reporting Follow-up Team)**

| Tutup Laporan jika dugaan tidak terbutkti<br>Close the report if the allegation is not proven | berlakukan sanksi jika terbukti bersalah<br>apply sanctions if proven guilty | Lanjutkan proses hukum jika tindak pidana<br>Continue legal process if proven as criminal offense | tindakan lain yang diperlukan<br>other necessary actions |
|---|---|---|---|

↓

**Pelapor Whistleblower**

Informasi hasil verifikasi dan Keputusan
Information on verification results and decision

**Penjelasan:**

1. Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini disampaikan melalui saluran pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh seluruh anggota TP3.

**Description:**

1. The Whistleblower submits a report in the form of a letter with the necessary supporting documents. This report is submitted via the whistleblowing channels accessible to all TP3 members.

2. TP3 melakukan verifikasi pelaporan pelanggaran yang diterima sesuai kriteria pelaporan. Apabila pelaporan pelanggaran tidak sesuai dengan kriteria, maka tidak perlu dilakukan Investigasi dan akan dilakukan penghentian penanganan pelaporan. Jika memenuhi kriteria pelaporan, TP3 mengusulkan kepada PJTL untuk dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran oleh TIPP
3. TIPP melakukan investigasi terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya TIPP dapat menggunakan bantuan investigator eksternal. TIPP membuat dan menyampaikan laporan hasil investigasi kepada PJTL serta fungsi kepatuhan anti penyuapan dan/atau fungsi kepatuhan lainnya yang terkait untuk melakukan investigasi lanjutan.
4. Dari laporan hasil investigasi/investigasi lanjutan, PJTL menetapkan keputusan atas laporan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaporan tersebut ditutup atau selesai, jika dugaan pelanggaran tidak terbukti;
   b. Terlapor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di perseroan, jika terlapor terbukti bersalah;
   c. Pelaporan tersebut akan diteruskan kepada penyidik/pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi; dan/atau
   d. Sanksi atau tindak lanjut lainnya yang dipandang perlu.
5. Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai hasil verifikasi dan keputusan akhir atas pelaporan pelanggaran.

2. TP3 verifies the report of violation received in accordance with the reporting criteria. If the report does not meet the reporting criteria, no investigation will be conducted, and the handling of the report will be discontinued. If the report meets the reporting criteria, TP3 will propose to the PJTL that an investigation into the reported violation be conducted by the TIPP.
3. TIPP conducts an investigation into the substance of the reported violation and seeks and gathers the necessary evidence to confirm whether a violation has indeed occurred. In carrying out its duties, TIPP may utilize the assistance of external investigators. TIPP prepares and submits an investigation report to the PJTL as well as to the anti-bribery compliance function and/or other relevant compliance functions to conduct further investigations.
4. From the investigation/further investigation result, PJTL decides on offense violations under the following conditions:
   a. The report is closed or completed if the alleged violation is not proven;
   b. The reported party will be subject to sanctions in accordance with the Company's prevailing provisions, if the reported party is found guilty;
   c. The report will be forwarded to the investigator/authorized party for further processing in accordance with the prevailing provisions and regulations, if there is evidence indicating that the violation is related to general criminal offenses and/or corruption; and/or
   d. Sanctions or other follow-ups deemed necessary.
5. The whistleblower has the right to obtain information regarding the verification results and the final decision on the report.

## Jumlah Laporan dan Tindak Lanjutnya Tahun 2025

Number of Reports and Their Follow-Ups in 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatat tidak terdapat pelaporan atas dugaan pelanggaran baik yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perseroan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

Throughout 2025, the Company recorded no reports of alleged violations, whether categorized as actions that violate prevailing laws and regulations, related regulations/standards, or the Company's internal regulations, including matters as stipulated in the Company's Whistleblowing System Policy.

# Kode Etik Perseroan
Code of Conduct

Sebagai bagian dari pelaksanaan praktik GCG, Perseroan telah merumuskan Kode Etik Perseroan yang merupakan salah satu elemen penting yang berlaku mengikat bagi seluruh karyawan Perseroan, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Kode Etik Perseroan diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022.

As part of the implementation of GCG practices, the Company has established a Code of Conduct, which serves as an important element that is binding on all employees of the Company, including members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company's Code of Conduct is regulated under the IIGF's Code of Conduct Policy, which was ratified through the Joint Decision Letter of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 008/SK/PII-BOD/1222 and No. KEP-09/KOM/PII/12/2022 on the Ratification of the Company's Code of Conduct Policy dated 30 December 2022.

Kebijakan Kode Etik Perseroan merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan bertingkah laku berdasarkan prinsip kesadaran etis, berpikir etis, dan berperilaku etis sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

The Company's Code of Conduct Policy represents a set of ethical commitments that serve as guidelines to influence, shape, regulate, and guide behavior based on the principles of ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct, as part of the Company's efforts to realize the vision, mission, and corporate values of the Company.

## Nilai-nilai dan Budaya Perseroan
Corporate Values and Culture

Dalam rangka memperkuat identitas dan kinerja Perseroan, PT PII memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity*, *Teamwork*, *Think Big*, *Mutual Trust* dan *Excellence*. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lingkungan organisasi Perseroan. Penjabaran masing-masing nilai budaya dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

In order to strengthen the Company's identity and performance, IIGF has established corporate cultural values known as InTIME, which stand for Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence. These cultural values reflect the principles applied within the Company's organizational environment. A detailed description of each cultural value is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

## Pokok-Pokok dalam Kebijakan Kode Etik Perseroan
Key Principles of the Company's Code of Conduct Policy

Pokok-pokok yang diatur dalam Kebijakan Kode Etik meliputi:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Nilai-nilai Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-undangan dan Norma yang Berlaku;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;

The key provisions stipulated in the Code of Conduct Guidelines include:

1. Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. The Company's Values;
3. Compliance with Applicable Laws, Regulations, and Prevailing Norms;
4. Conflicts of Interest;
5. Professional Ethics in the Workplace;
6. Ethics in Relations with Stakeholders;
7. Involvement in Political Activities;
8. Commitment to Environmental Protection, Occupational Health, and Safety;

9. Kesempatan yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
10. Pelaporan Keuangan;
11. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi;
12. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perseroan dan Kerahasiaan Informasi;
13. Penerapan dan Penegakan Kebijakan Kode Etik;
14. Pelaporan dan Sanksi atas Pelanggaran; dan
15. Pernyataan Kepatuhan.

9. Equal opportunity for employment and promotion;
10. Financial Reporting;
11. Giving and Receiving Gifts, Hospitality, Entertainment, and Donations;
12. Commitment to the Protection of the Company's Assets and Confidentiality of Information;
13. Implementation and Enforcement of the Code of Conduct Policy;
14. Reporting and Sanctions for Violations; and
15. Statement of Compliance.

## Pengungkapan Kepatuhan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Compliance Disclosure that the Code of Conduct Applies to All Levels of the Organization

Kebijakan Kode Etik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022. Kebijakan Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Insan Perseroan di semua level organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan.

The Code of Conduct Policy was ratified through the Joint Decision Letter of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 008/SK/PII-BOD/1222 and No. KEP-09/KOM/PII/12/2022 on the Ratification of the Company's Code of Conduct Policy dated 30 December 2022. This Code of Conduct Policy applies to all the Company's Personnel at every organizational level, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees of the Company.

## Sosialisasi dan Penyebarluasan Kebijakan Kode Etik

Dissemination and Circulation of the Code of Conduct Policy

Kebijakan Kode Etik Perseroan diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Perseroan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua karyawan dengan mudah setiap saat. Untuk karyawan baru, sosialisasi Kebijakan Kode Etik Perseroan dilakukan melalui program pengenalan Perseroan (*Induction*) yang diselenggarakan oleh Divisi *Human Capital and Organisation Development* (Divisi HCOD) dengan menyampaikan mengenai Kebijakan Kode Etik serta menyediakan materi kegiatan terkait secara tertulis yang disampaikan baik melalui email atau dokumen elektronik lainnya.

The Company's Code of Conduct Policy is disclosed and/or disseminated to all parties involved in the Company through various communication channels owned by the Company, including information technology platforms that can be easily accessed by all employees at any time. For new employees, the dissemination of the Company's Code of Conduct Policy is conducted through the Company's induction program, organized by the Human Capital and Organisation Development Division (HCOD Division), which introduces the Code of Conduct Policy and provides written materials related to the program, delivered via email or other electronic documents.

Adapun untuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal, hal tersebut disampaikan dalam bentuk diseminasi informasi pada media sosial Perseroan mengenai komitmen dan kebijakan Perseroan, mengunggah dokumen kebijakan melalui *website* Perseroan, ataupun surat dan bentuk sosialisasi lain yang disampaikan kepada mitra usaha/vendor atau pemangku kepentingan melalui media komunikasi yang ada ataupun melalui klausul dalam perjanjian/kontrak.

Meanwhile, the dissemination of the policy to external stakeholders is carried out through the distribution of information on the Company's social media platforms regarding the Company's commitments and policies, the uploading of policy documents on the Company's website, as well as through letters and other forms of communication to business partners/vendors or stakeholders through available communication channels or through clauses included in agreements/contracts.

## Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementation and Enforcement of the Code of Conduct

Untuk mewujudkan perilaku Insan PT PII yang berlandaskan etika bisnis, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan, antara lain melalui:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun.
2. Untuk karyawan baru, Perseroan menyampaikan pemahaman terkait Kebijakan Kode Etik Perseroan dan menegaskan kewajiban mereka untuk menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Kode Etik Perseroan; dan
3. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan Peraturan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang berlaku di Perseroan.

To ensure that IIGF's Personnel uphold ethical business conduct, several strategic initiatives have been implemented, including the following:

1. The commitment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees to implement Good Corporate Governance in every aspect of the Company's operations, as reflected in the Integrity Pact, which is renewed at the beginning of each year;
2. For new employees, the Company provides understanding regarding the Code of Conduct Policy and emphasizes their obligation to sign a statement of commitment to comply with the Company's Code of Conduct; and
3. Leadership by example, whereby leaders demonstrate attitudes and behavior that are consistent with the Policies and Regulations regarding Good Corporate Governance that are applicable at the Company.

Upaya penegakan Kebijakan Kode Etik dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan PT PII yang diperbaharui setiap tahun;
2. Sosialisasi melalui saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat;
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan pangkat *Executive Vice President* (EVP) atau lebih tinggi;
4. Pelaporan Daftar Khusus (Kepemilikan saham) oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi kepada KPK;
6. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi;
7. Mengungkapkan saluran pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada *website* Perseroan;
8. Memberikan sanksi tegas bagi Insan Perseroan yang terbukti melanggar Kode Etik Perseroan.

Efforts to enforce the Code of Conduct Policy are carried out through several measures, including:

1. The signing of the Integrity Pact by all IIGF's Personnel, which is renewed annually;
2. Dissemination through the Company's communication channels, including information technology platforms that can be easily accessed by all employees at any time;
3. Submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) by the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees at the rank of Executive Vice President (EVP) or higher;
4. Reporting of the Special Register (share ownership) by the Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Reporting of Acceptance and/or Rejection of Gratifications to KPK;
6. Establishment of a Gratification Control Unit;
7. Disclosure of the Whistleblowing System channels on the Company's website;
8. Imposition of strict sanctions on the Company's Personnel proven to have violated the Company's Code of Conduct.

## Sanksi dan Pelaporan

Sanctions and Reporting

Dalam hal terdapat pelanggaran Kebijakan Kode Etik, Insan Perseroan ataupun pihak lainnya berkewajiban melaporkan setiap indikasi terjadinya perilaku yang melanggar Kebijakan Kode Etik Perseroan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) sebagaimana dimaksud dalam kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran Perseroan.

In the event of a violation of the Code of Conduct Policy, Company's Personnel or other parties are required to report any indication of conduct that violates the Company's Code of Conduct Policy to the Whistleblowing Management Team (TP3), as stipulated in the Company's whistleblowing system policy.

Perseroan menghormati hak membela diri dari Insan Perseroan yang diduga melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

The Company respects the rights of the Company's Personnel who are suspected of committing violations to defend themselves and to provide explanations that will be considered in determining the appropriate disciplinary consequences.

Apabila berdasarkan proses investigasi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan terbukti bahwa Insan Perseroan yang dilaporkan melakukan pelanggaran, maka Insan Perseroan tersebut akan diberikan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pihak yang berwenang di dalam Perseroan akan mengenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana atas pelanggaran Kebijakan Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran Lisan;
2. Surat Peringatan Pertama (SP-I);
3. Surat Peringatan Kedua (SP-II);
4. Surat Peringatan Ketiga (SP-III);
5. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir; hingga
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

In the event that, based on the investigation process conducted according to the applicable provisions within the Company, it is proven that the reported Company's Personnel committed a violation, the individual will be subject to sanctions commensurate with the level of the violation. The authorized parties within the Company will impose sanctions in accordance with the Company's Regulations or applicable laws and regulations. Violations of the Code of Conduct Policy may result in the following sanctions:

1. Verbal Warning;
2. First Written Warning (SP-I);
3. Second Written Warning (SP-II);
4. Third Written Warning (SP-III);
5. First and Final Written Warning; and
6. Termination of Employment (PHK).

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan pelanggaran melalui:

a. *Website* Perseroan dengan alamat https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran;
b. Surat, dengan alamat sebagai berikut:
   Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
   **PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**
   Gedung Capital Place, Lantai 7
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
c. Email, dengan alamat pelaporan@iigf.co.id; dan
d. Kotak Surat Pelaporan di lingkungan kantor Perseroan.

The Company provides facilities for reporting violations through the following channels:

a. The Company's website at https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran;
b. Written correspondence addressed to:
   Whistleblowing Management Team
   **PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**
   Capital Place Building, 7th Floor
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
c. Email at pelaporan@iigf.co.id; and
d. Whistleblowing mailbox available within the Company's office.

Mekanisme penanganan pelanggaran Kebijakan Kode Etik Perseroan dilaksanakan mengacu pada Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

The mechanism for handling violations of the Company's Code of Conduct Policy is implemented in accordance with the Company's Whistleblowing System Policy.

## Jumlah Pelanggaran Kode Etik Beserta Sanksi yang Diberikan

Code of Conduct Violations and Sanctions Imposed

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya pelanggaran atas kode etik maupun sanksi yang diberikan, hal ini mencerminkan tingginya pemahaman karyawan akan pentingnya penerapan kebijakan kode etik.

Throughout 2025, the Company recorded no violations of the Code of Conduct nor sanctions imposed, reflecting employees' strong understanding of the importance of implementing the code of conduct policy.

# Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Control Policies

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 505/PMK.06/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan dengan referensi kepada ketentuan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) 4.1.2 terkait pengaturan kebijakan dan praktik mengenai pencegahan pencucian uang, anti-suap, anti-korupsi, anti-kecurangan, atau standar terkait lainnya, PT PII telah merumuskan kebijakan yang berfokus pada pencegahan korupsi. Kebijakan ini diatur dalam berbagai kebijakan internal perusahaan, yaitu:

1. Kebijakan Kode Etik;
2. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
3. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
4. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
5. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Kebijakan ini mencakup serangkaian program dan prosedur yang dirancang untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip etika. Selain itu, PT PII juga telah merancang program dan prosedur yang komprehensif sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan Perseroan. Program bertujuan menggalang komitmen bersama serta memastikan bahwa setiap elemen Perseroan terlibat aktif dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi dan gratifikasi.

Referring to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 505/PMK.06/2020, Regulation of the Minister of Finance Number 227/PMK.09/2021 concerning Gratification Control within the Ministry of Finance, Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting and with reference to the provisions of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 4.1.2 regarding the regulation of policies and practices regarding the prevention of money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards, IIGF has formulated a policy that focuses on corruption prevention. This policy is regulated in various internal company policies, namely:

1. Code of Conduct;
2. Gratification Control Policy;
3. Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines;
4. State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines; and
5. Whistleblowing System Policy.

This policy covers a range of programs and procedures designed to prevent money laundering and the financing of terrorism, anti-corruption, the offer or acceptance of bribes and other facilitation payments or inducements contrary to laws and regulations or ethical principles. In addition, IIGF has also designed a comprehensive program and/or procedure to support the eradication of corruption within the Company. This program aims to drive joint commitment and ensure that every element of the Company is actively involved in preventing and eradicating corruption and gratification practices.

## Program dan Prosedur Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Corruption Prevention and Gratification Control Programs and Procedures

Berikut serangkaian program PT PII dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi:

1. Sosialisasi dan Pelatihan: Perseroan menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi rutin untuk seluruh karyawan agar memahami risiko korupsi, serta mengetahui tindakan pencegahan yang harus diambil.

2. Kode Etik dan Kebijakan Internal: Perseroan memiliki Kode Etik yang jelas dan kebijakan internal terkait pemberantasan korupsi. Dokumen-dokumen ini memberikan panduan dan norma-norma perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi.

The following are a series of IIGF's programs to prevent and eradicate corrupt practices:

1. Dissemination and Training: The Company conducts regular training and dissemination programs for all employees to ensure they understand the risks of corruption, as well as the preventive measures to be taken.
2. Code of Conduct and Internal Policy: The Company has a clear Code of Conduct and internal policies related to corruption eradication. These documents provide guidance and norms of behavior expected of all members of the organization.

3. Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Pelapor: Perseroan melakukan implementasi mekanisme pengaduan yang dapat diakses dengan mudah dan memberikan perlindungan bagi pelapor, serta memberlakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kerahasiaan dan tanpa retribusi terhadap pelapor.
4. Audit dan Pemeriksaan Internal: Perseroan rutin melakukan audit dan pemeriksaan internal untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi, mengevaluasi efektivitas kontrol internal, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Sanksi dan Tindakan Disipliner: Penetapan sanksi dan tindakan disipliner yang jelas terhadap pelanggaran kebijakan anti korupsi. Langkah-langkah ini memberikan sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas.
6. Komitmen Pemimpin dan Penyelenggara: Pemimpin organisasi dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program anti korupsi menunjukkan komitmen tinggi dan memberikan contoh melalui perilaku dan keputusan mereka.

3. Complaint Mechanism and Whistleblower Protection: The Company implements a complaint mechanism that is easily accessible and provides protection for whistleblowers, and enforces concrete measures to ensure confidentiality and no retribution against whistleblowers.
4. Audit and Internal Audit: The Company regularly conducts internal audits and controls to identify potential corruption risks, evaluate the effectiveness of internal controls, and ensure compliance with established policies and procedures.
5. Sanctions and Disciplinary Actions: The establishment of clear sanctions and disciplinary actions against violations of anti-corruption policies. These measures strongly signal that corrupt practices will not be tolerated and will be dealt with firmly
6. Commitment of Leaders and Organizers: Organizational leaders and those involved in implementing the anti-corruption program shall demonstrate high commitment and set an example using their behavior and decisions.

## Sosialisasi Program Pencegahan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Dissemination of Anti-Corruption Prevention and Gratification Control Program

Dalam memberikan pemahaman dan pembekalan pengetahuan mengenai korupsi beserta turunannya, Perseroan memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi Insan PT PII. Sosialisasi terkait anti korupsi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 berupa Sosialisasi Kebijakan terkait *Governance, Risk and Compliance* (GRC) yang meliputi Kebijakan GCG, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Kode Etik, Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) dan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh Insan Perseroan dalam mendukung penerapan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Perseroan juga melakukan sosialisasi kebijakan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan melalui kegiatan tatap muka maupun pemanfaatan media komunikasi internal. Sepanjang tahun 2025, diseminasi program pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui email internal serta sosialisasi langsung, termasuk dalam program pengenalan Perseroan (*induction*) bagi karyawan baru.

Selain itu, sosialisasi pengendalian gratifikasi juga ditujukan kepada pemangku kepentingan eksternal melalui publikasi komitmen Perseroan terhadap pengendalian gratifikasi pada media sosial resmi Perseroan.

To provide understanding and knowledge about corruption and its derivatives, the Company provides training and dissemination for IIGF personnel. Anti-corruption dissemination was conducted on 27 June 2025, in the form of Dissemination of Policies related to Governance, Risk, and Compliance (GRC), which included the GCG Policy, Gratification Control Policy, Code of Conduct, Whistleblowing System Policy, Business Continuity Management System Policy (SMKU), and Anti-Bribery Management System Policy (ABMS).

To build awareness and commitment of all Company personnel in supporting the implementation of Gratification Control Policy, the Company also disseminates the policy to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees through face-to-face activities and by utilizing internal communication channels. Throughout 2025, dissemination of the gratification control program was carried out continuously through internal emails and direct dissemination, including during the Company's induction program for new employees.

Furthermore, dissemination of gratification control was also directed to external stakeholders through the publication of the Company's commitment to gratification control on the Company's official social media.

## Pelatihan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Control Training

Guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen seluruh Insan Perseroan terhadap penerapan prinsip integritas serta pencegahan korupsi dan penyuapan, Perseroan secara berkala menyosialisasikan kebijakan anti korupsi dan anti penyuapan. Perseroan juga memanfaatkan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengajak dan menghimbau seluruh insan Perseroan untuk mendukung upaya pencegahan penyuapan melalui penerapan sikap berintegritas tinggi serta komitmen menjalankan prinsip 4 No's, yaitu *No Bribery*, *No Kick Back*, *No Indecent Gifts*, dan *No Luxurious Hospitality*.

To increase the understanding, awareness, and commitment of all Company personnel to the implementation of integrity principles and prevention of corruption and bribery, the Company regularly disseminates anti-corruption and anti-bribery policies. The Company also utilizes the commemoration of World Anti-Corruption Day to encourage and urge all Company personnel to support bribery prevention efforts by implementing high integrity and commitment to upholding the 4 No's principle, i.e. No Bribery, No Kick Back, No Indecent Gifts, and No Luxurious Hospitality.

## Pengelola dan Media Pelaporan Insiden Korupsi dan Gratifikasi

Management and Media for Reporting Corruption and Gratification Incidents

Pengelolaan program anti korupsi dan pengendalian gratifikasi di Perseroan dilaksanakan secara terstruktur oleh Divisi *Corporate Secretary & Communication*, dengan pengawasan dari manajemen serta organ perusahaan terkait. Divisi tersebut bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan anti korupsi, pencegahan penyuapan, serta pengendalian gratifikasi berjalan efektif, termasuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima.

The Company's management of anti-corruption and gratification control programs is carried out in a structured manner by the Corporate Secretary & Communication Division, with the supervision from management and relevant company organs. This Division is responsible for ensuring the effective implementation of anti-corruption, bribery prevention, and gratification control policies, including dissemination, monitoring, evaluation, and follow-up on every report received.

Perseroan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk tindak korupsi, penyuapan, maupun gratifikasi. Pelaporan dapat disampaikan melalui berbagai media resmi yang telah ditetapkan Perseroan yaitu melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), email resmi, surat tertulis dan *website* Perseroan.

The Company provides a secure, easily accessible reporting mechanism that guarantees the confidentiality of whistleblowers reporting suspected violations, including corruption, bribery, and gratification. Reports can be submitted through various official channels established by the Company, including the Whistleblowing System, official email, written letters, and the Company's website.

PT PII

| | |
|---|---|
| **Website** | **https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran** |
| **Email** | **pelaporan@iigf.co.id** |
| **Surat** Letter | **PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**<br>**Gedung Capital Place, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 - Indonesia**<br><br>**Ditujukan kepada : Tim Pengelola Laporan Pelanggaran**<br>att. Whistleblowing Management Team |

Untuk Pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi oleh Insan Perseroan dapat dilakukan melalui media Sistem Informasi Manajemen *Governance, Risk and Compliance* (SIM GRC) yang dapat diakses melalui https://grc.iigf.co.id/login.

Reporting of acceptance or rejection of gratification by Company personnel can be conducted through Governance, Risk and Compliance Management Information System (SIM GRC) accessible via https://grc.iigf.co.id/login.

## Pelaporan Insiden Korupsi Tahun 2025

Corruption Incident Reporting in 2025

Hingga akhir 31 Desember 2025, tidak terdapat insiden korupsi yang dilakukan oleh Insan PT PII sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

As of the end of 31 December 2025, there were no incidents of corruption committed by IIGF personnel, as reflected in the following table:

| Jenis Insiden<br>Incident Type | Jumlah insiden<br>Number of Incidents |
|---|---|
| Insiden korupsi Corruption | Nihil None |
| Insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi<br>Proven incidents of corruption that resulted in employees being dismissed or convicted of corruption | Nihil<br>None |
| Insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi<br>Proven incidents of corruption that resulted in contracts with business partners being terminated or not renewed due to corruption-related offenses | Nihil<br>None |

## Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Program Pengendalian Gratifikasi Perseroan diterapkan sejalan dengan penegakan Kode Etik Perseroan dan menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan selalu mengedepankan pengelolaan perusahaan yang amanah, serta menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabilitas sehingga memastikan pengelolaan usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan kebijakan gratifikasi ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai GCG utama Perseroan, yakni *integrity* dan *transparency*. kepada seluruh pegawai agar timbul pemahaman untuk menjalankan tugasnya sesuai etika bisnis terbaik, rasa saling percaya dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan.

The Company's Gratification Control Program is implemented in line with the enforcement of the Company's Code of Conduct, and is a vital part in implementing good corporate governance. The Company prioritizes trustworthy management of the Company, and upholds the principles of transparency and accountability to ensure business management that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The gratification policy is implemented to instill the Company's main GCG values, i.e., integrity and transparency, to all employees. This is carried out in order to ensure all employees understand their duties according to the best business ethics, mutual trust, and responsibility, when interacting with customers, vendors, partners, and all stakeholders.

Guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang bersih, sehat dan akuntabel, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang terakhir dimutakhirkan pada tahun 2023. Kebijakan tersebut mengatur lebih lanjut penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

The Company's Board of Directors and Board of Commissioners issued a Gratification Control Policy, which was lastly updated in 2023 to realize a clean, healthy, and accountable management of the Company's business. The policy further regulates the gratification control implementation within the Company.

## Laporan Pengendalian Gratifikasi 2025

Gratification Control Report in 2025

Selama tahun 2025, Perseroan menerima 17 (tujuh belas) laporan penerimaan Gratifikasi yang diproses oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, the Company received 17 (seventeen) reports of Gratification acceptance, which were processed by the Gratification Control Unit (UPG), with details as follows:

| Jenis Laporan Gratifikasi<br>Type of Gratification Report | Jumlah Laporan<br>Total Reports | Tindak Lanjut<br>Follow-up |
|---|---|---|
| **Penerimaan** Admission | | |
| Makanan<br>Meals | 12 | Objek Gratifikasi telah disalurkan sebagai bantuan sosial<br>Gratification items distributed as social assistance |
| Kain Batik<br>Batik Fabric | 3 | Ditetapkan menjadi Milik Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi<br>Determined to be State Property by the Corruption Eradication Commission |
| Souvenir Kegiatan tidak Berlogo<br>Souvenirs from Activities without Logo | 1 | Ditetapkan menjadi Milik Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi<br>Determined to be State Property by the Corruption Eradication Commission |
| Honorarium Narasumber dan/atau Peserta Rapat<br>Honorarium for Speakers and/or Meeting Participants | 1 | Ditetapkan menjadi Milik Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi<br>Determined to be State Property by the Corruption Eradication Commission |

Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi telah diinformasikan kepada Direksi secara triwulanan dan tahunan serta kepada Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan, serta seluruh laporan gratifikasi telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Every material breach of anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption policies has been informed to the Board of Directors on a quarterly and annual basis, and to the Board of Commissioners on a semi-annual and annual basis. All gratification reports have been followed up.

## Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Anti-Bribery Management System (SMAP) Policy

Sebagai bentuk komitmen atas anti korupsi dan anti penyuapan, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Inisiasi Penerapan SMAP di PT PII telah dimulai sejak tahun 2021 pada standar yang berlaku, yaitu SNI ISO 37001:2016.

As a form of commitment to anti-corruption and anti-bribery, the Company implements an Anti-Bribery Management System (SMAP). The SMAP has been initiated at IIGF since 2021 on the applicable standard, i.e., SNI ISO 37001:2016.

Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan proses sertifikasi SMAP, dan pada tanggal 30 Maret 2022 Perseroan mendapatkan sertifikat penerapan SMAP dari PT Chesna yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2025. Sertifikat SMAP yang telah diperoleh Perseroan adalah untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa.

In 2022, the Company carried out the SMAP certification process. On 30 March 2022, the Company received a certificate of SMAP from PT Chesna, valid until 29 March 2025. The Company obtained an SMAP certificate for the scope of Procurement of Goods and Services.

Dalam upaya mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016, pada tahun 2023 & 2024 Perseroan melaksanakan *Audit Surveillance* I & II. *Audit Surveillance* tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan, sehingga Perseroan dapat mempertahankan sertifikasi SMAP dalam lingkup pengadaan barang dan jasa.

In an effort to maintain ISO 37001:2016 Certification, in 2023 and 2024, the Company conducted Surveillance Audit I and II. The Surveillance Audit is conducted to ensure that the Company is always committed to implementing and maintaining SMAP consistently and in accordance with the SMAP objectives set forth. Therefore, the Company can maintain SMAP certification in the procurement of goods and services.

Selanjutnya, pada tanggal 20-21 Maret 2025, Perseroan telah melaksanakan Audit Resertifikasi SMAP. Berdasarkan hasil audit tersebut, Perseroan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan kembali sertifikasi yang diperoleh dari PT Chesna, dengan masa berlaku hingga tanggal 29 Maret 2028.

Subsequently, on 20-21 March 2025, the Company conducted SMAP Recertification Audit. Based on the audit results, the Company is declared to have met the requirements to renew its certification from PT Chesna, with a validity period until 29 March 2028.

## Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah merumuskan pedoman mengenai pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang dimutakhirkan pada tahun 2021.

As a State-Owned Enterprise, the Company has formulated guidelines for the implementation of State Official Wealth Report (LHKPN), which is regulated in Indonesia Infrastructure Guarantee Fund's State Official Wealth Reporting Guidelines, updated in 2021.

Ketentuan tersebut mengatur secara jelas mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaan, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

The provisions clearly regulate the Company's employees who shall report their assets, the procedures for submission, the managing work unit, and sanctions that shall be imposed on employees who do not carry out their reporting obligations.

## Pengelola LHKPN

LHKPN Management

Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi terkait dengan LHKPN di lingkungan Perseroan dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN (UPL) yang dikelola oleh divisi yang membidangi fungsi Sumber Daya Manusia. UPL terdiri dari Koordinator UPL dan Administrator Instansi dan/atau Administrator Unit Kerja. Tugas Koordinator UPL dalam hal ini meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.
2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
3. Memantau Admin Instansi dan/atau Admin Unit dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor;
4. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan atau konsultasi penggunaan aplikasi untuk pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
5. Melaporkan kepada pimpinan tertinggi Perseroan mengenai adanya wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN untuk mendapatkan arahan; dan

The monitoring and coordination related to LHKPN within the Company are carried out by the LHKPN Management Unit (UPL), managed by the division in charge of Human Resources function. UPL consists of the UPL Coordinator and Agency Administrator and/or Working Unit Administrator. The tasks of the UPL Coordinator in this case include:

1. Coordinating with the Corruption Eradication Commission (KPK) related to monitoring and evaluation of compliance with the fulfillment of LHKPN report submission obligations of LHKPN personnel who shall report and announce LHKPN.
2. Reminding the LHKPN reporters to comply with the obligation to submit and announce LHKPN;
3. Monitoring the Agency Administrator and/or Unit Administrator in managing mandatory data reporting;
4. Providing or coordinating assistance or consultation on the use of applications for filling out LHKPN for mandatory reporters.
5. Reporting to the Company's highest leader regarding the mandatory reporters who do not submit LHKPN or are late in submitting LHKPN for further direction; and

6. Membuat laporan pelaksanaan penyampaian LHKPN secara periodik berdasarkan Tanda Terima yang disampaikan oleh wajib lapor.

Admin Instansi dan/atau Admin Unit Kerja memiliki tugas :

a. Sebagai *data entry* yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor;
b. Sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapor yang dilakukan oleh Admin Unit;
c. Memberikan himbauan atau sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib Lapor;
d. Mengaktifkan akun sehingga Wajib Lapor dapat menggunakan modul *e-Filing*;
e. Membuat Akun Admin Unit apabila dibutuhkan; dan
f. Melakukan pengarsipan dokumen tanda terima Wajib Lapor.

6. Delivering reports on LHKPN reporting implementation regularly based on Receipts submitted by mandatory reporters.

The Agency Administrator and/or Working Unit Administrator has the following duties:

a. As data entry, to update the data of Mandatory Reporters;
b. As a verifier in the e-Registration module, i.e., validating the updating of Mandatory Reporting data by the Unit Administrator;
c. Providing directions or dissemination related to LHKPN obligations and technical guidance on procedures for filling out LHKPN to Mandatory Reporters;
d. Activating the account so that the Mandatory Reporter can use the e-Filling module;
e. Creating a Unit Administrator Account if necessary; and
f. Filing the Mandatory Reporting receipt document.

## Wajib Lapor
Mandatory Reporters

Sesuai kebijakan, Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dengan pangkat *Executive Vice President* atau lebih tinggi.

In accordance with the policy, Mandatory Reporters of LHKPN within the Company are the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees with the rank of Executive Vice President or higher.

## Sanksi atas Kelalaian Pelaporan LHKPN
Sanctions for Failure to Report LHKPN

Sejalan dengan Pedoman LHKPN, bagi Wajib Lapor yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kekayaannya diberikan sanksi di antaranya mengacu pada Peraturan Perusahaan maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

In line with the LHKPN Guidelines, Mandatory Reporters who fail to fulfill their wealth reporting obligations shall be imposed sanctions, with reference to the Company's Regulations and other provisions stipulated by authorized officials.

## Laporan LHKPN
LHKPN Report

Pada tahun 2025, UPL telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi formal yaitu e-LHKPN online sebagai sarana konsultasi dalam pengisian e-LHKPN melalui email pada tanggal 2 Januari 2025, 7 Februari 2025, 17 Maret 2025, 26 Maret 2025.

In 2025, UPL provided dissemination and technical guidance on LHKPN to relevant employees via document distribution and formal dissemination, i.e., e-LHKPN online, as a means of consultation in filling out e-LHKPN via email on 2 January 2025, 7 February 2025, 17 March 2025, and 26 March 2025.

Pelaporan LHKPN yang dilaksanakan PT PII pada tahun 2025 untuk periode tahun 2024, seluruh Wajib Lapor sebanyak telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%. Berikut jumlah Wajib Lapor yang melaporkan kekayaannya per masing-masing jabatan:

In 2025, IIGF carried out LHKPN reporting for the period of 2024, and all Mandatory Reporters reported their wealth with a 100% compliance rate. The following are the Mandatory Reporters who report their wealth by position:

| Nama<br>Name | Jabatan<br>Position | Tanggal Lapor<br>Report Date |
|---|---|---|
| M. Wahid Sutopo | Direktur Utama President Director | 9 Februari 2025 9 February 2025 |
| Andre Permana | Direktur Bisnis Business Director | 28 Maret 2025 28 March 2025 |
| Donny Hamdani | Direktur Keuangan Finance Director | 8 April 2025 8 April 2025 |
| Hadiyanto | Komisaris Utama President Commissioner | 26 Maret 2025 26 March 2025 |
| Ahmad Ghufron | Komisaris Commissioner | 18 Februari 2025 18 February 2025 |
| Ferry Irawan | Komisaris Commissioner | 8 Maret 2025 8 March 2025 |
| Tanti Hidayati | Deputi Direktur Deputy Director | 18 Februari 2025 18 February 2025 |
| Pratomo Ismujatmika | Deputi Direktur Deputy Director | 26 Maret 2025 26 March 2025 |
| Muhammad Ridho | Deputi Direktur Deputy Director | 18 Maret 2025 18 March 2025 |
| Ria Frilina | Executive Vice President | 26 Maret 2025 26 March 2025 |
| Yunan Novaris A. | Executive Vice President | 5 Januari 2025 5 January 2025 |
| Yuki Mahardito A. W. | Executive Vice President | 4 Januari 2025 4 January 2025 |
| Salomi Adriana | Executive Vice President | 30 Januari 2025 30 January 2025 |

# Kebijakan *Insider Trading*

## Insider Trading Policy

Kebijakan *insider trading* merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak internal lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang belum tersedia di pasar.

Hingga akhir 2025, PT PII belum memiliki kebijakan *insider trading* karena Perseroan belum memiliki status sebagai perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan kepada publik. Meskipun begitu, Perseroan telah memiliki pengaturan terkait penyebaran informasi Perseroan yang tertuang dalam Kebijakan Kode Etik PT PII dan Pedoman Komunikasi, di mana setiap individu di Perseroan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen Perseroan sesuai dengan klasifikasinya dan kebijakan terkait komunikasi serta tata kelola dokumen yang berlaku.

Selama tahun 2025, PT PII tidak menerima satu pun pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perseroan demi kepentingan pihak tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai praktik *insider trading.*

The insider trading policy is an effort and/or clear regulation regarding trading the corporation's shares conducted by the Board of Directors, Board of Commissioners, and other internal parties to ensure that no one benefits directly or indirectly from information that is not yet available to the public.

As of the end of 2025, IIGF did not have any insider trading policy because the Company did not yet obtain the status of a public company (issuer) whose shares were traded to the public. However, the Company has arrangements related to the dissemination of the Company information, as outlined in IIGF's Code of Conduct and Communication Manual, in which each individual of the Company shall maintain the confidentiality of all information and documents of the Company in accordance with their classification and policies related to communication and document governance that apply.

Throughout 2025, IIGF did not receive any complaints related to the alleged dissemination of non-public information by the Company's internal parties for the benefit of certain parties that could be identified as insider trading practices.

# Pengadaan Barang dan Jasa

## Procurement of Goods and Services

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan bisnisnya, Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan agar dapat dilakukan secara profesional, mandiri, transparan dan bertanggung jawab dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fungsi pengadaan barang dan jasa Perseroan dijalankan oleh Divisi *Corporate Service & Procurement*

To fulfill the operational and business needs, the Company has issued the Procurement of Goods and Services Policy with the objective to regulate the procurement of goods and services within the Company. As such, the procurement process can be carried out professionally, independently, transparently, and responsibly, to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia. The Company's procurement of goods and services function is carried out by the Corporate Service & Procurement Division.

Kebijakan Perseroan dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa tertuang dalam Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa PT PII yang telah dimutakhirkan pada 11 Juli 2025. Kebijakan ini menjadi acuan kerja bagi Divisi *Corporate Service & Procurement* selaku divisi yang membidangi proses pengadaan barang dan jasa di Perseroan, di mana diantaranya memuat etika pengadaan, metode pengadaan, pengelolaan proses pengadaan, organisasi dan kewenangannya, pengaduan benturan kepentingan dan penyimpangan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pemantauan serta pengelolaan penyedia barang dan jasa.

The Company's policy on the implementation of goods and services procurement is stipulated in the IIGF's Procurement of Goods and Services Policy, updated on 11 July 2025. This Policy serves as a work reference for the Corporate Service & Procurement Division as the division in charge of the process of procurement of goods and services in the Company, which includes procurement ethics, procurement methods, procurement process management, organization and authority, complaints of conflicts of interest and irregularities, Domestic Component Level (DCL), procurement planning, procurement implementation, monitoring and management of goods and service providers.

Pada tahun 2025, Divisi *Corporate Service & Procurement* PT PII melakukan pembaharuan kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka memastikan kesesuaian substansi pengaturan dengan implementasi yang berjalan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKP terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

In 2025, IIGF's Corporate Service & Procurement Division updated the policy of procurement of goods and services to ensure the suitability of the regulatory substance with the continuous implementation, while still paying attention to good governance, adjustments to the applicable laws and regulations, and following up BPKP recommendations related to the Domestic Component Level (DCL)

## Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan

### Dissemination of the Company's Procurement of Goods and Services Policy

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa bagi karyawan maupun calon mitra penyedia barang dan jasa, Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa kepada karyawan. Sementara itu, sosialisasi kepada mitra dilakukan melalui pertemuan-pertemuan koordinasi dan komunikasi resmi. Selain itu, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa juga tersedia secara luas melalui website Perseroan di alamat www.ptpii.co.id, yang dapat diakses melalui bagian publikasi manual kebijakan Perseroan.

The Company disseminates the procurement of goods and services policy to employees to increase their understanding of the mechanism of procurement of goods and services for employees and prospective partners. The Company also disseminates the policy to partners via coordination meetings and official communications. In addition, Procurement of Goods and Services Policy is also widely available on the Company's website at www.ptpii.co.id, accessible in the publication section of the Company's policy manual.

# Kegiatan Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Activities of the Procurement of Goods and Services Division

Selama tahun 2025, Divisi Corporate Service & Procurement PT PII telah melakukan:

1. Evaluasi dan peninjauan ulang prosedur pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan.
2. Penyusunan dan pemutakhiran daftar vendor/mitra penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk proses pemilihan vendor/mitra penyedia yang adil dan kompetitif.
4. Pemantauan kinerja vendor/mitra penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proyek-proyek Perseroan untuk memastikan bahwa standar kualitas dan waktu pengiriman terpenuhi.
5. Melakukan pengembangan penerapan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) khususnya modul pengadaan dengan melakukan digitalisasi dan automasi *approval* proses administrasi sehingga dapat membuat proses pengadaan lebih cepat, tepat dan akurat.
6. Melaksanakan kegiatan sinergi dengan *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan berupa rapat kerja dalam rangka kolaborasi antar unit pengadaan barang dan jasa yang dihadiri oleh PT PII, PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), LPEI pada tanggal 27-29 Agustus 2025. Agenda rapat kerja secara umum membahas terkait *sharing session* mengenai *Vendor Management* & Pengelolaan *E-Catalog* pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit pengadaan SMV. Rapat kerja ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kolaborasi antar unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SMV di bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Melaksanakan *In-house Training* "Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ("KAK") dan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") kepada kepala Divisi dan 1 (satu) level di bawahnya pada hari Selasa, 16 Desember 2025 dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait teknik penyusunan KAK dan HPS yang lebih komprehensif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
8. Melaksanakan survei kepuasan vendor/mitra dan pelanggan/pengguna layanan pengadaan barang/jasa PT PII dimana survei kepuasan vendor/mitra dan pelanggan/pengguna atas pelayanan PT PII dilakukan sebagai upaya

In 2025, the Corporate Service & Procurement Division of IIGF conducted the following:

1. Evaluating and reviewing the procurement procedures for goods and services to improve efficiency and transparency in the procurement process.
2. Preparing and updating a list of vendors/partners who provide goods and services in accordance with the qualification standards set by the Company.
3. Procuring goods and services in accordance with established needs and requirements, including a fair and competitive vendor/partner selection process.
4. Monitoring the performance of vendors/partners involved in providing goods and services in the Company's projects to ensure that quality standards and delivery times are met.
5. Developing the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) system, especially the procurement module, by digitizing and automating the approval of administrative processes to make the procurement process faster, more precise, and accurate.
6. Carrying out synergy activities with the Ministry of Finance's Special Mission Vehicles (SMV) in the form of working meetings for the collaboration between procurement of goods and services units attended by IIGF, PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), LPEI on 27-29 August 2025. The working meeting had the agenda to have sharing sessions regarding Vendor Management & E-Catalogue Management of procurement of goods and services within the SMV procurement unit. The event was a follow up on the Memorandum of Understanding on Collaboration Team Work between Procurement of Goods and Services units in the SMVs within the Guidance and Supervision of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
7. Carrying out In-house Training on "Preparing Terms of Reference ("TOR") and Own Estimated Price ("HPS") for Division Heads and 1 (one) level below on Tuesday, 16 December 2025, to improve understanding of TOR and HPS preparation techniques that are more comprehensive, accountable, and aligned with organizational needs.
8. Conducting a satisfaction survey of vendors/partners and customers/users of IIGF's services on the procurement of goods/services, in which this survey is carried out as an effort to continuously improve the

perbaikan berkelanjutan proses pengadaan. Dari hasil survei diharapkan PT PII dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan harapan *vendor*/mitra dan pelanggan/pengguna, dan selanjutnya PT PII dapat merumuskan strategi pelayanan yang baik untuk meningkatkan loyalitas yang berdampak pada meningkatnya pelayanan PT PII sebagai *fiscal tools* Pemerintah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan gambaran dan pendapat pelanggan dan penyedia barang/jasa terhadap pengadaan barang/jasa atas pelayanan yang telah diberikan PT PII.

a. Tingkat kepuasan Penyedia/Vendor Tahun 2025
   1. Secara umum, 100,00% penyedia menyatakan puas selama bekerja sama dengan PT PII (baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan).
   2. Indeks kepuasan penyedia terhadap sistem ERP *Procurement* sebesar 4,29 atau 85,71 (sangat puas).
   3. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan sebesar 4,37 atau 87,46 (sangat puas).
   4. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pelaksanaan kerja sama sebesar 4,37 atau 87,47 (sangat puas).
   5. Indeks kepuasan penyedia terhadap sistem ERP *Procurement*, proses pengadaan dan pelaksanaan kerja sama sebesar 4,34 atau 86,88 (sangat puas).

b. Tingkat kepuasan Pelanggan/Pengguna Tahun 2025
   1. Secara umum, seluruh pelanggan (100%) menyatakan puas selama berhubungan dengan PT PII (baik sistem ERP maupun dalam proses pengadaan dan hasil pengadaan)
   2. Indeks kepuasan pelanggan terhadap sistem ERP Procurement sebesar 4,20 atau 84,08 (sangat puas).
   3. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses pengadaan barang/jasa sebesar 4,22 atau 84,39 (sangat puas).
   4. Indeks kepuasan pelanggan terhadap hasil barang/jasa sebesar 4,22 atau 84,31 (sangat puas).
   5. Indeks kepuasan pelanggan terhadap sistem ERP *Procurement*, proses pengadaan, dan hasil pengadaan Perseroan sebesar 4,23 atau 84,54 (sangat puas).

procurement process. The survey result is expected to help IIGF measure the extent to which the services provided meet vendors/partners and customers/users expectations, and subsequently, help IIGF formulate a good service strategy to enhance loyalty, which affects the enhancement of IIGF's services as a Government fiscal tool. This activity aims to provide an overview and opinion of customers and goods/service providers on the services provided by IIGF in the procurement of goods/services.

a. Vendor/Partner satisfaction level in 2025
   1. Generally, 100.00% of suppliers expressed satisfaction while cooperating with IIGF (both in the procurement process and work execution).
   2. The supplier satisfaction index for the ERP Procurement system was 4.29 or 85.71 (very satisfied).
   3. The supplier satisfaction index for the procurement process was 4.37 or 87.46 (very satisfied).
   4. The supplier satisfaction index for the execution process of cooperation was 4.37 or 87.47 (very satisfied).
   5. The supplier satisfaction index for ERP Procurement system, procurement and execution process of cooperation was 4.34 or 86.88 (very satisfied).

b. Customer/User satisfaction level in 2025
   1. Generally, all customers (100%) expressed satisfaction while dealing with IIGF (including ERP system, procurement process, and procurement results).
   2. The customer satisfaction index for the ERP Procurement system was 4.20 or 84.08 (very satisfied).
   3. The customer satisfaction index for the procurement process goods/services was 4.22 or 84.39 (very satisfied).
   4 The customer satisfaction index for the results of goods/services was 4.22 or 84.31 (very satisfied).
   5. The total customer satisfaction index for ERP Procurement system, procurement process, and procurement result of the Company was 4.23 or 84.54 (very satisfied).

# Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditur

## Creditor Rights Protection Policy

Perseroan senantiasa berupaya membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi perlakuan yang sama bagi para kreditur.

Etika Perseroan kepada kreditur diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII, sejalan dengan kebijakan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan menghormati hak dan kewajiban antara Perseroan dan kreditur sesuai kesepakatan berdasarkan perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran dan keterbukaan, diantaranya:

1. Berkomitmen melaksanakan klausul perjanjian dengan sebaik-baiknya.
2. Menyediakan informasi yang aktual dengan memperhatikan kebijakan penyediaan informasi yang berlaku di Perseroan.
3. Mematuhi *covenant* yang berlaku selama perjanjian, apabila ada.
4. Melakukan komunikasi dan pertukaran informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup pengadaan secara aktual, berimbang dan wajar dengan memperhatikan ketentuan terkait komunikasi yang berlaku di Perseroan.

The Company consistently endeavors to foster good relations with all stakeholders, including creditors, based on commitment, trust, honesty, and mutual respect, as well as provide equal treatment to creditors.

The Company's ethics towards creditors are regulated in IIGF's Code of Conduct. In line with this policy, the Company is committed to fulfilling its obligations to creditors and respecting the rights and obligations between the Company and creditors in accordance with the terms agreed upon in the agreements that promote the principles of fairness and transparency, including:

1. Commit to implementing the clauses of the agreement with best endeavors.
2. Provide actual information with due observance of the Company's information provision policy.
3. Comply with the covenants applicable during the agreement, if any.
4. Communicate and exchange information required in accordance with the scope of procurement in an actual, balanced, and reasonable manner, with due regards to the provisions related to communication that apply in the Company.



# Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

## Corporate Social and Environmental Responsibility




Employee Volunteer Program
Ramadan 1447 H
Waktu Berbagi PT PII
Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA)

**“ Informasi kegiatan Perseroan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2025”. Secara umum, informasi dalam Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2025 saling melengkapi.**

“Information on the Company’s activities related to Social and Environmental Responsibility (TJSL) is presented in IIGF’s 2025 Sustainability Report.” In general, the information in this Annual Report and the 2025 Sustainability Report of IIGF’s complement each other.

# Komitmen Perseroan Dalam Penerapan Program Keberlanjutan

## Company’s Commitment to Implementing Sustainability Program

Mengusung tema “*Enabling Partnership and Collaboration, Managing Risk Through Transparency*” pada tahun 2025, PT PII menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan melalui pengelolaan risiko yang transparan dan akuntabel. Sebagai SMV Kementerian Keuangan, Perseroan menjalankan fungsi sebagai *financing enabler* melalui penyediaan penjaminan sebagai instrumen *de-risking* Pemerintah, guna mendorong penjaminan infrastruktur yang kredibel dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas penyiapan proyek dan kepercayaan investor. Komitmen tersebut mencerminkan peran strategis PT PII dalam memperkuat ekosistem investasi infrastruktur nasional serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

With the theme “Enabling Partnership and Collaboration, Managing Risk Through Transparency” in 2025, IIGF affirms its commitment to strengthen the partnership between the government, private sector, and various stakeholders through transparent and accountable risk management. Through its role as the Ministry of Finance’s Special Mission Vehicle (SMV), the Company executes its role as a financing enabler through guarantee provision as the Government’s de-risking instrument, in order to promote credible and sustainable infrastructure guarantee and improve the quality of project development and investor trust. Such commitment reflects IIGF’s strategic role in strengthening the national infrastructure investment ecosystem and supporting sustainable development that positively impacts the economy and community.

Sejak didirikan 16 tahun lalu, PT PII telah memainkan peran strategis dalam membangun landasan bagi Indonesia untuk menuju status negara maju. Salah satu kontribusi utamanya adalah penyediaan penjaminan dalam pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberi mandat untuk mempercepat dan memeratakan pembangunan infrastruktur nasional, PT PII telah menorehkan berbagai capaian penting dalam mendukung transformasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Since its establishment 16 years ago, IIGF has played a strategic role in laying the basis for Indonesia’s path to achieve the developed country status. One of its main contributions is the provision of infrastructure that not only drives economic growth, but also ensures a decent quality of life for the community. As one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, mandated to accelerate and equitably distribute national infrastructure development, IIGF has achieved numerous significant achievements in supporting inclusive and sustainable transformation.

Dengan terus memperkuat komitmennya, PT PII memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di masa mendatang. Sepanjang tahun 2025, Perseroan mendorong

By continuously strengthening its commitment, IIGF ensures that every initiative undertaken brings tangible benefits to the social and economic well-being of the community while preserving the environment for the future. Throughout 2025, the Company encouraged sustainable optimalisation

optimalisasi keberlanjutan melalui implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam lini bisnis, penguatan peran penjaminan dan penyiapan proyek, serta dukungan pada sektor-sektor prioritas, termasuk pengembangan energi terbarukan yang berkontribusi terhadap program transisi energi Pemerintah. Selain itu, Perseroan turut membangun ekosistem yang inklusif melalui program TJSL serta memperluas penjaminan pada sektor-sektor berkembang guna mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia.

through the implementation of Environmental, Social and Governance (ESG) principles in its line of business, guarantee and project development role strengthening, and support in prioritized sectors, including the development of renewable energy that contributes to the Government's energy transition program. Furthermore, the Company is also involved in building an inclusive ecosystem through CSR programs and expand guarantee in developing sectors in order to promote equitable development in Indonesia.

Sebagai hasil dari upaya tersebut, PT PII berhasil meraih sejumlah penghargaan pada tahun 2025, sebagai pengakuan atas komitmen dan konsistensinya dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

As a result, IIGF successfully won numerous awards in 2025, in recognition of its commitment and consistency to support the achievement of sustainable development.

## Pencapaian atas Kinerja Keberlanjutan Perseroan Tahun 2025

Achievements of the Company's Sustainability Performance in 2025



***Bronze Winner*** **untuk Kategori Laporan Tahunan sub kategori** ***Sustainability Report*** **pada** ***Public Relations Award*** **(PRIA) 2025 yang digelar oleh PR Indonesia**

Bronze Winner for Annual Report Category, Sustainability Report subcategory, at the 2025 Public Relations Award (PRIA), held by PR Indonesia




***Silver Winner*** **untuk Kategori Inovasi Sosial pada** ***Environmental and Social Innovation Award*** **(ENSIA) 2025 yang digelar oleh PT Sucofindo**

Silver Winner for Social Innovation Category at the 2025 Environmental and Social Innovation Award (ENSIA), held by PT Sucofindo



***Gold Champion*** **pada Bisnis Indonesia CSR** ***Awards*** **2025 yang digelar oleh Bisnis Indonesia**

Gold Champion at the 2025 Bisnis Indonesia CSR Awards, held by Bisnis Indonesia



**Penghargaan** ***Gold Rank*** **pada** ***Asia Sustainability Reporting Rating*** **(ASRRAT) 2025 oleh National Center for** ***Corporate Reporting***

Gold Award at the 2025 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT), held by National Center for Corporate Rating

# Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2025

Sustainable Performance Overview in 2025

## Kinerja Aspek Ekonomi

Economic Performance

**60** Total Proyek yang dijamin hingga tahun 2025
Total Projects Guaranteed as of 2025

**Rp705** Triliun / Trillion

**Rp1.478,20**
miliar billion
Total Pendapatan Usaha
Total Operating Income

**Rp895,98**
miliar billion
Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

**Rp774,18**
miliar billion
Distribusi Nilai Ekonomi
Economic Value Distribution

**256**
pemasok suppliers
Jumlah Pemasok Lokal
Total Local Suppliers

**Rp167,67**
miliar billion
Total Nilai Pengadaan Pemasok Lokal
Total Procurement Value of Local Vendors

**10**
Penjaminan Proyek Ramah Lingkungan
Environmentally Friendly Product

## Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Environmental Performance

Biaya Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Costs

**Rp1.177,81** juta / million

**35,72%**

**646.96**
Gigajoule
Jumlah Penggunaan Energi
Total Energy Use

**113,02**
Ton $CO_2$eq
Jumlah Emisi GRK yang dihasilkan
Total GHG Emissions generated

**6,79**
kg
Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan
Total B3 Waste generated

**275** m³

**Jumlah penggunaan volume air**
Total volume of water use

**Penanaman** Planting
**1.750** pohon tree

**Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 2025**
Biodiversity Conservation in 20245

## Kinerja Aspek Sosial
Social Performance

### Capaian Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan
Sustainable Products and Services Development Achievement

- Nilai Proyek Penjaminan Pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan **Rp219,94 Triliun**
- Value of Guarantee Projects for Green Business Activities of **Rp219.94 Trillion**

### Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Achievement

- Tingkat Rekrutmen Karyawan 3,68% dengan tingkat turnover sebesar 3,68%.
- Rasio Gaji Karyawan Golongan Terendah/*Entry Level* Dibandingkan Upah Minimum 119.19%
- Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 31,67 Jam/orang
- Karyawan Mendapatkan Promosi Jabatan pada posisi struktural sebanyak 5 orang atau 3,07%
- Employee Recruitment Rate of 3.68% with a turnover rate of 3.68%.
- Ratio of Lowest Position/Entry Level Employee Salary to Minimum Wage of 119.19%.
- Average Training Hour of 31.67 Hours/employee.
- 5 Employees Received Job Promotions to Structural Positions, or 3.07% of the total.

### Capaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Program Achievement

- Realisasi Penyaluran Dana Program TJSL Rp6,05 miliar.
- CSR Program Expenses of Rp6.05 billion.

# Strategi Penerapan Program TJSL

CSR Program Implementation Strategy

Strategi pelaksanaan program TJSL yang dijalankan PT PII difokuskan pada upaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan. Landasan penerapan program TJSL Perseroan didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta sejalan dengan visi PT PII dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PT PII terus mengoptimalkan peran strategis Perseroan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, Perseroan berfokus untuk memperluas layanan penjaminan di sektor-sektor yang berkembang, khususnya pada sektor transisi energi, ketahanan iklim, sektor air, ketahanan pangan dan pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

IIGF's CSR program's implementation strategy focuses on creating a positive impact on the surrounding community and environment through various sustainable initiatives. The basis of the Company's CSR program is sustainability principles oriented towards a balance between social, economic, and environmental interests, and in line with IIGF's vision in supporting sustainable development in Indonesia.

IIGF strives to optimize the Company's strategic role in accordance with the mandate given by the Ministry of Finance to encourage sustainable infrastructure development. In 2025, the Company focused on expanding its guarantee services in emerging sectors, particularly in energy transition, climate resilience, water, food security, and equitable access to basic services for the community, in order to improve people's lives and support sustainable development goals.

## Landasan Pelaksanaan Program TJSL Perseroan

Basis of the Company's CSR Implementation Program

Dalam menjalankan program TJSL, Perseroan berpedoman pada sejumlah peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan; dan
7. Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PII-BOD/CSC/1022 tentang Besaran Penyaluran Dana *Sponsorship*, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

In carrying out CSR program, the Company refers to a number of internal regulations and applicable laws and regulations, including:

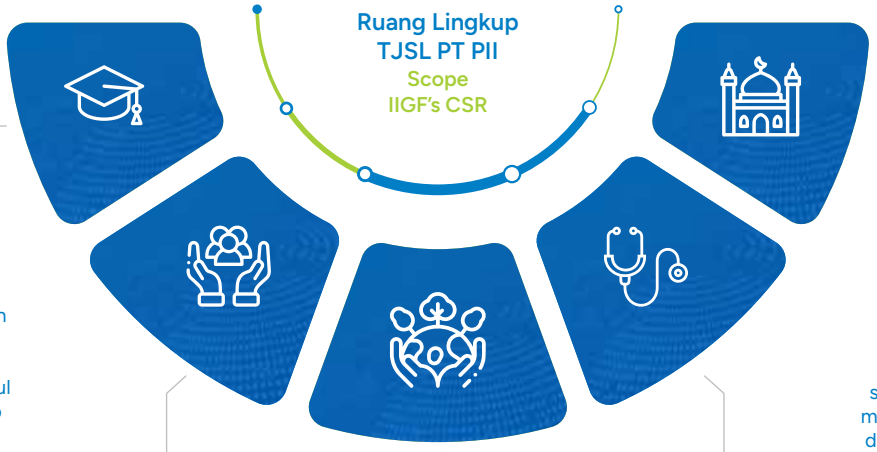
1. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
2. Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the Achievement of Sustainable Development Goals
3. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 176 of 2023 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
4. The Company's Articles of Association;
5. The Company's Social and Environmental Responsibility Activities Implementation Policy;
6. The Company's Standard Operating Procedures for Corporate Social and Environmental Responsibility; and
7. Board of Directors' Decision Letter No. 001/SK/PII-BOD/CSC/1022 on the Amount of Sponsorship, Donation, and Corporate Social and Environmental Responsibility Funds.

# Ruang Lingkup Program TJSL Perusahaan

Scope of the Company's CSR Program

Program TJSL PT PII difokuskan pada 5 (lima) sektor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

IIGF's CSR programs focus on 5 (five) sectors, as follows:




**Pendidikan**
**Education**

Mendukung peningkatan kualitas & pemerataan pendidikan sehingga menciptakan SDM unggul dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Diantaranya melalui pemberian beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk tenaga pengajar.

Supporting the improvement of quality & equal access of education to create excellent human resources and support for inclusive education. This includes providing scholarships and enhancing the quality of education, including the competence of teaching staff.

**Pemberdayaan Masyarakat**
**Community Empowerment**

Mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas termasuk ekonomi serta aspek pendukungnya. Diantaranya melalui program pemberdayaan UMKM.

Supporting the improvement of the quality of life of the underprivileged through empowerment, training, and capacity building programs, including economy, and its supporting aspects. This is conducted, among others, by MSMEs empowerment programs.

**Lingkungan**
**Environment**

Mendukung inisiatif pelestarian dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan guna keberlangsungan ekosistem dan habitat di dalamnya. Diantaranya melalui program pengelolaan sampah, konservasi hutan, penghijauan, dan energi terbarukan.

Supporting sustainable environmental preservation and conservation initiatives to maintain ecosystems and their habitats. This is conducted, among others, by waste management, forest conservation, reforestation, and renewable energy programs.

**Kesehatan**
**Health**

Mendukung inisiatif yang menciptakan pola hidup sehat, pengentasan masalah kesehatan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta dukungan pada ketahanan pangan.

Supporting initiatives that create healthy lifestyle, alleviate health problem, and improve the quality of public health as well as supporting food security.

**Sosial, Budaya, dan Keagamaan**
**Social, Cultural, and Religion**

Mendukung inisiatif sosial guna pengentasan masalah sosial yang terjadi di sekitar Perseroan, serta mendukung pelestarian seni, budaya, dan kegiatan keagamaan pada masyarakat. Diantaranya melalui dukungan pada pengentasan masalah kemiskinan ekstrem, bencana alam dan donasi keagamaan serta donasi kepada komunitas marginal.

Supporting social initiatives to support the alleviation of social problems that occur around the Company, as well as supporting the preservation of arts, culture, and religious activities in the community. This is conducted, among others, by eradication of extreme poverty, natural disasters, and religious donations, as well as donations to marginalized communities.

# Kontribusi Perseroan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

## Company's Contribution to the Sustainable Development Goals

PT PII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui strategi perusahaan yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan tidak hanya melalui pelaksanaan program TJSL, tetapi juga melalui penguatan mandat Perseroan dalam penyediaan penjaminan dan penyiapan proyek infrastruktur, baik skema KPBU maupun non-KPBU, yang terintegrasi dengan prinsip ESG dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional maupun daerah. Dalam implementasinya, Perseroan menerapkan pendekatan berbasis dampak untuk memastikan setiap inisiatif memberikan kontribusi optimal terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penjabaran capaian program keberlanjutan Perseroan tahun 2025 yang relevan adalah sebagai berikut:

**SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

1. Program Renovasi Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum di Kuningan Barat
2. Program Donor Darah
3. Bantuan Pemulihan Operasional RSUD Wangaya, Denpasar, Bali pasca Bencana Banjir

**SDG 4 – Pendidikan Berkualitas**

1. Program Pengembangan Inovasi dan Inklusivitas Pembelajaran bagi Guru (Program Guru PIIjar)
2. Program Beasiswa PT PII untuk Mahasiswa Berprestasi di Indonesia Timur Tahap 2
3. Program Pelatihan Digital Santri dan Bantuan Laboratorium Komputer untuk Pondok Pesantren Hidayatul Ghozzali di Purwakarta

**SDG 7 – Energi Bersih dan Terjangkau**

1. Penjaminan pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lombok Barat dengan penggunaan lampu LED hemat energi serta efisiensi konsumsi listrik.

IIGF is committed to contributing in the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) through corporate strategy in accordance with the Presidential Regulation No. 59 of 2017 on Achieving Sustainable Development Goals (SDGs). This commitment is manifested not only through the CSR program implementation, but also through the enhancement of the Company's mandate in guarantee provision and infrastructure project development, with the PPP scheme or non-PPP scheme, integrated by ESG principles and in accordance with the national and regional development agenda. By its implementation, the Company applies a impact-based approach to ensure every initiatives provide optimum contribution to the economic, social and environmental aspects.

The achievements of the Company's relevant sustainability program in 2025 are described as follows:

**SDG 3 – Good Health and Well-Being**

1. Public Sanitation Facility Renovation Program in West Kuningan
2. Blood Donation Program
3. Assistance for the Operational Recovery of Wangaya Local Hospital, Denpasar, Bali, after the Flood Disaster

**SDG 4 – Quality Education**

1. Program for Developing Innovation and Inclusive Learning for Teachers (PIIjar Teacher Program)
2. IIGF Scholarship Program for Outstanding Students in Eastern Indonesia Phase 2
3. Digital Student Training Program and Computer Laboratory Assistance for Hidayatul Ghozzali Islamic Boarding School in Purwakarta

**SDG 7 – Affordable and Clean Energy**

1. Project Guarantee for the Madiun Street Lighting (APJ) and West Lombok Street Lighting (PJU) by using energy-efficient LED lamps and efficient electricity consumption.

2. Penjaminan dengan skema Non-KPBU untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik energi terbarukan, salah satunya penjaminan Additional Loan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 PT Geo Dipa Energi.

**SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**
1. Program Pengembangan Kerajinan Ketak berbasis Pemberdayaan Perempuan di Lombok Barat.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Rantau Dedap, Muara Enim tentang pemanfaatan listrik dan *marketing* untuk produk kopi.

**SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**
1. Menjamin 60 proyek infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Penjaminan pada pengembangan proyek infrastruktur ramah lingkungan, dengan skema KPBU maupun non-KPBU
3. Penjaminan proyek senilai Rp219,94 triliun pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

**SDG 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**
1. Program pengelolaan sampah organik maupun anorganik melalui *Waste Management for Circular Economy* (WE CARE) untuk mengurangi limbah serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
2. Penanaman 1.750 Pohon yang dapat memberikan nilai ekonomi serta dapat menyerap emisi karbon.
3. Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh Kawasan Semanggi Losari, Surakarta

**SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim**
1. Pengelolaan semua limbah yang dihasilkan dari operasional Perseroan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah tersertifikasi dalam pengelolaan limbah.
2. Inisiatif pengelolaan dan pengendalian emisi GRK

2. Providing guarantees under a non-PPP scheme for the construction and expansion of renewable energy electricity infrastructure, including the Additional Loan guarantee for Geothermal Power Plant (GPP) Dieng-2 Project at PT Geo Dipa Energi.

**SDG 8 – Decent Work and Economic Growth**
1. Ketak Craft Development Program based on Women Empowerment in West Lombok.
2. Empowering Rantau Dedap, Muara Enim Community regarding electricity utilization and marketing for coffee products.

**SDG 9 – Industry, Innovation, and Infrastructure**
1. Guaranteed 60 infrastructure projects that contribute to economic growth and community welfare.
2. Guarantees for the development of environmentally friendly infrastructure projects, under both PPP and non-PPP schemes.
3. Providing project guarantees amounted to Rp219.94 trillion in green business activities.

**SDG 11 – Sustainable Cities and Communities**
1. Organic and inorganic waste management programs via Waste Management for Circular Economy (WE CARE) to reduce waste and improve the economy of surrounding communities.
2. Planting 1,750 Trees that can provide economic value and absorb carbon emissions.
3. Housing Quality Improvement Program in Slum Areas in Semanggi Losari, Surakarta

**SDG 13 – Climate Action**
1. Managing all waste generated from the Company's operations by collaborating with third parties certified in waste management.
2. Initiatives on GHG emission management and control.

## Governansi (Tata Kelola) Keberlanjutan
Sustainable Governance

Sebagai salah satu pilar utama dalam konsep ESG, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian kinerja serta keberlanjutan Perseroan. PT PII memandang bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila Perseroan dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

As one of the main pillars in ESG concept, Good Corporate Governance (GCG) implementation plays a crucial role in supporting the Company's performance and sustainability. IIGF believes that sustainable growth can only be achieved if the Company is managed transparently, accountably, and in accordance with GCG principles.

PT PII berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik GCG sebagai fondasi yang menyatukan seluruh aspek operasional Perseroan, mulai dari pengelolaan ekonomi, pengembangan sosial, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui penerapan GCG yang konsisten dan terstruktur, PT PII mampu membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, memperkuat integritas dalam proses bisnis, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang Perseroan. Dengan demikian, GCG tidak hanya menjadi pedoman tata kelola, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan.

IIGF is committed to implementing GCG practices as a unifying foundation for all aspects of the Company's operations, from economic management and social development, to environmental responsibility. Through consistent and structured GCG implementation, IIGF is able to build stakeholder trust, strengthen integrity in business processes, and ensure that every decision made is in line with the Company's long-term sustainability goals. Thus, GCG serves not only as a governance guideline but also as a driving force for the Company's healthy and sustainable growth.

## Struktur Governansi Keberlanjutan dan Penanggung Jawab Penerapan Program Keberlanjutan Perseroan

Company's Sustainability Governance Structure and Person in Charge of of Sustainability Program

Saat ini, PT PII telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berperan untuk mendukung penerapan tata kelola berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, termasuk bertanggungjawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Dalam aspek risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi strategi, kebijakan, dan kinerja Perseroan, termasuk manajemen risiko terkait keberlanjutan dan ketahanan iklim, serta memastikan sistem manajemen risiko yang efektif. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi keberlanjutan Perseroan, memastikan bahwa pengelolaan Perseroan telah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta melaporkan kinerja terkait ESG secara transparan kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan program keberlanjutan Perseroan, Direksi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada unit kerja atau pejabat di bawahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berlaku dalam struktur organisasi Perseroan.

Currently, IIGF has a corporate governance structure and infrastructure with a role to support the implementation of sustainable governance. In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, IIGF's organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each organs has clear authorities and responsibilities as mandated in the Articles of Association and laws and regulations, including being responsible for maintaining the long-term sustainability of the Company's business.

In terms of sustainability and climate-related risks and opportunities, the Board of Commissioners is responsible for supervising the Company's strategies, policies, and performance, including sustainability and climate-related risk management, and ensuring an effective risk management system. Meanwhile, the Board of Directors is responsible for executing sustainability policies and strategies, ensuring the Company's management has considered environmental and social aspects, and reporting ESG-related performance transparently to the Board of Commissioners and stakeholders. In carrying out the Company's sustainability program, the Board of Directors may delegate some of their authorities to the organizational structure reporting to them, in accordance with the provisions and authority of each organ.

The role of the Board of Commissioners and Board of

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengelolaan terkait keberlanjutan terukur dalam target yang ditetapkan Perseroan. Target tersebut menjadi parameter dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dewan Komisaris, IKU Direksi, serta IKU karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keberlanjutan. Hal tersebut akan menjadi evaluasi dan pertimbangan usulan insentif kinerja khususnya bagi Direksi dan karyawan.

Directors in implementing sustainability supervision and management is measured by the targets set by the Company. These targets are parameters in the Board of Commissioners' Key Performance Index (KPIs) and Board of Directors' KPIs, as well as the KPIs of employees responsible for sustainability management. This will be an evaluation and consideration for proposed performance incentives, especially for the Board of Directors and employees.

## Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan

Sustainable Finance Competency Development

PT PII memberikan kesempatan dan ruang bagi seluruh insan Perseroan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam menghadapi situasi dan kondisi serta isu-isu terkait ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Secara khusus, Dewan Komisaris, Direksi dan Deputi Direktur serta Divisi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan telah mengikuti berbagai kegiatan, seperti seminar, *workshop*, dan sebagainya, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Adapun topik pelatihan yang diikuti diantaranya terkait perhitungan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk proyek infrastruktur, *knowledge sharing* implementasi aspek ESG bersama dengan Direktorat Pengelola Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan SMV Kementerian Keuangan, pelatihan dan sertifikasi ESG *Risk Management*, *short course growing infrastructure : sustainable finance.*

IIGF provides opportunities and space for all of the Company's personnel to improve their knowledge and competency in facing the situations, conditions, and issues related to the economy, social, and community. In particular, the Board of Commissioners, Board of Directors, Deputy Directors, and the Division in charge of implementing sustainable finance have participated in various activities, such as seminars, workshops, etc., including those related to the implementation of sustainable finance. The training topics included calculating Greenhouse Gas (GHG) emission reductions for infrastructure projects, knowledge sharing on implementing ESG aspects in business with Directorate of Government Support and Infrastructure Financing Management (PDPPI) of the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR) of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's SMV, ESG Risk Management training and certification, and short course growing infrastructure: sustainable finance.

**Pengungkapan informasi lengkap terkait daftar pengembangan kompetensi program keberlanjutan yang telah dilakukan di tahun 2025 disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 PT PII.**

**Complete information disclosure related to the list of sustainability programs competency development in 2025 can be referred to in IIGF's 2025 Sustainability Report.**

## Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholders' Involvement

PT PII menempatkan para pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan. Pelibatan pemangku kepentingan PT PII dalam penerapan program keberlanjutan dilakukan secara aktif melalui komunikasi yang transparan

IIGF considers stakeholders as parties who have a key role in supporting the Company's business sustainability. IIGF's stakeholder involvement in the sustainability programs is actively conducted through transparent communication and close collaboration, to ensure that every initiative

dan kolaborasi yang erat, untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para *stakeholder*. PT PII melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, karyawan, masyarakat, mitra bisnis, dan akademisi, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program keberlanjutan, guna memastikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan. Melalui dialog yang konstruktif dan mekanisme umpan balik, PT PII berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif.

implemented is in line with the stakeholders' needs and expectations. IIGF involves various stakeholders, including the government, employees, communities, business partners, and academics, in the planning, implementation, and evaluation of sustainability programs to ensure broad and sustainable positive impacts. Through constructive dialogues and feedback mechanisms, IIGF is committed to maintaining a balance between social, economic, and environmental interests in every decision made, and supporting the achievement of more inclusive sustainable development goals.

# Kinerja Aspek Ekonomi
## Economic Performance

Kinerja ekonomi adalah ukuran keberhasilan atau hasil aktivitas ekonomi Perseroan, yang mencerminkan tingkat kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas.

PT PII terus menunjukkan komitmennya untuk bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap target kinerja ekonomi yang telah ditetapkan dicapai secara optimal. Perseroan juga berupaya menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai strategi yang inovatif dan adaptif. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PT PII secara konsisten menerapkan strategi yang tepat untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan peran Perseroan sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yang berfokus pada percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pada tahun 2025, PT PII mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang secara keseluruhan memenuhi target dalam RKAP Tahun 2025. Pada aspek kinerja operasional, di tahun 2025 PT PII memainkan peran penting untuk mengakselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis dan menjadi penyedia penjaminan pada 6 proyek baru, dengan nilai total investasi sebesar Rp154 Triliun. Proyek ini terdiri dari 2 proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 4 proyek non-KPBU.

Economic performance is a measure of the success or results of the Company's economic activities, reflecting the level of health, growth, and productivity.

IIGF continues to demonstrate its commitment to sustainable growth and development by ensuring that each established economic performance target is optimally achieved. The Company also strives to create significant added value for all stakeholders through various innovative and adaptive strategies. As part of this commitment, IIGF consistently implements appropriate strategies to drive sustainable economic performance improvements. This step is in line with the Company's role as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance, which focuses on accelerating and equitable infrastructure development in Indonesia.

In 2025, IIGF recorded operational and financial performance growth that overall met the targets set in the 2025 RKAP. In terms of operational performance, IIGF played a key role in accelerating the development of several strategic infrastructure projects and provided guarantees for 6 new projects, with a total investment value of Rp154 trillion. These projects comprised 2 (two) Public-Private Partnership (PPP) projects and 4 (four) non-PPP projects.

Di sisi keuangan, Perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang solid dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. PT PII mencatatkan realisasi laba tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp895,98 miliar, menurun 4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp930,88 miliar dan berada 17% di bawah target RKAP 2025. Untuk realisasi pendapatan usaha tahun 2025 tercapai sebesar Rp1,48 triliun, menurun sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar dari Rp1,49 miliar dan berada 11% di bawah target RKAP 2025.

In terms of financial performance, the Company recorded solid and better financial performance compared to the previous year. IIGF recorded profit for the year in 2025 of Rp895.98 billion, a 4% compared to that of the previous year of Rp930.88 billion and was 17% below the 2025 RKAP target. The revenues in 2025 reached Rp1.48 trillion, a 1% decrease from that of the previous year of Rp1.49 billion and 11% below the 2025 RKAP target.

Sejalan dengan upaya untuk meraih kinerja ekonomi yang optimal, di tahun 2025 Perseroan juga meningkatkan fokus dalam mengelola dampak ekonomi tidak langsung. Hal ini salah satunya dilakukan dengan memberikan penjaminan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan di berbagai daerah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mengembangkan ekosistem infrastruktur khususnya melalui pembentukan *Community of Practice* untuk pembiayaan inovatif (INFINITY), serta melaksanakan berbagai program TJSL khususnya pada program sektor sosial dalam memberikan bantuan pembangunan maupun renovasi sarana prasarana umum masyarakat, program pengentasan kemiskinan ekstrem serta program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemasok lokal.

In line with efforts to achieve optimal economic performance, in 2025, the Company also increased its focus on managing indirect economic impacts. This was achieved, among others, by providing guarantees for infrastructure development projects in various sectors and regions, including underdeveloped, frontier, and outermost regions. This included developing infrastructure ecosystem, particularly through the establishment of Community of Practice for Innovative Financing (INFINITY), and implementing various CSR programs, particularly in social sector, which include providing assistance for the construction and renovation of public infrastructure, extreme poverty alleviation programs, and community empowerment and local supplier empowerment programs.

Pembahasan mengenai kinerja ekonomi dan strategi PT PII telah disampaikan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2025.

A comprehensive discussion of IIGF's economic performance and strategy is presented in the Company's 2025 Sustainability Report.



# Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

**Kontribusi SDGs:**
Tujuan Nomor 7: Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan Nomor 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Tujuan Nomor 13: Penanganan Perubahan Iklim.

**SDGs Contributions:**
Goal 7: Affordable and Clean Energy, Goal 12: Responsible Consumption and Production, and Goal 13: Climate Change.

Kinerja lingkungan adalah hasil terukur dari upaya, strategi, dan pengelolaan Perseroan dalam meminimalkan dampak negatif, mengendalikan polusi, serta melestarikan lingkungan hidup. Ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berdampak pada citra positif, kepercayaan dan meningkatkan kinerja Perseroan baik operasional maupun keuangan.

PT PII berkomitmen untuk memperluas kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam mendukung integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam setiap proses pengambilan keputusan proyek, serta menciptakan operasional kantor yang ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap semua peraturan lingkungan yang berlaku, pengintegrasian aspek lingkungan dalam proses penjaminan proyek untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen nyata PT PII dalam mendukung keuangan berkelanjutan, beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim, dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Environmental performance is the measurable result of the Company's efforts, strategies, and management in minimizing negative impacts, controlling pollution, and preserving the environment. This reflects corporate social responsibility (CSR), which impacts a positive image and trust, and improves the Company's operational and financial performance.

IIGF is committed to expanding its contribution to environmental sustainability by making environmental protection a top priority, supporting the integration of environmental considerations into every project decision-making process, and creating environmentally friendly office operations. This commitment is realized through compliance with all applicable environmental regulations, integrating environmental aspects into the project guarantee process to encourage sustainable infrastructure development, and managing environmental impacts such as natural resource management, energy efficiency, pollution prevention, waste management, and biodiversity conservation.

This strategic step demonstrates IIGF's concrete commitment to supporting sustainable finance, adapting to the challenges of climate change, and contributing to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) for a more sustainable future.

## Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025
Environmental Management Program Initiatives in 2025

Sejalan dengan komitmen PT PII untuk mendukung kelestarian lingkungan, sepanjang tahun 2025 Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif program pengelolaan lingkungan sebagai langkah nyata dan konsistensi dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

In line with IIGF's commitment to supporting environmental sustainability, throughout 2025, the Company implemented various environmental management program initiatives as concrete and consistent steps to create a sustainable positive impact. These programs are designed to support

Program-program ini dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

1. **Pengelolaan Energi**
   PT PII menggunakan energi yang bersumber dari energi fosil yaitu listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung berbagai kegiatan operasional Perseroan seperti pada aktivitas kegiatan di area kantor maupun untuk bahan bakar kendaraan operasional. Pada tahun 2025, penggunaan listrik tercatat sebesar 179.711 kWh atau setara dengan 646,96 Gigajoule, meningkat dibanding tahun 2024, yang mencapai 158.611 kWh atau setara dengan 571 Gigajoule. Kenaikan konsumsi energi listrik tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya intensitas kehadiran karyawan secara luring di kantor seiring dengan normalisasi aktivitas kerja dan kebutuhan koordinasi operasional, penambahan tenaga pendukung yang memanfaatkan fasilitas kantor, serta meningkatnya aktivitas operasional, rapat dan pelatihan internal. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor sepanjang tahun 2025 turut berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan energi listrik dibandingkan tahun sebelumnya.

   PT PII juga melakukan kegiatan pengukuran penggunaan listrik dan BBM sebagai bentuk evaluasi Perseroan dalam menekan penggunaan energi dan pengembangan program efisiensi energi. Untuk mengetahui jumlah penggunaan energi per karyawan, Perseroan telah melakukan perhitungan intensitas penggunaan energi. Pada tahun 2025, nilai intensitas energi tercatat sebesar 3,76 Gigajoule per karyawan, meningkat 0,26% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,50 Gigajoule per karyawan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan konsumsi energi Perseroan relatif kecil, sejalan dengan berbagai inisiatif efisiensi energi yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.

   Berbagai insiatif dilakukan PT PII dalam rangka efisiensi penggunaan energi diantaranya dengan mematikan aliran listrik pada saat ruangan atau perangkat kerja tidak digunakan, melakukan peningkatan efisiensi pencahayaan dengan penggantian lampu TL menjadi lampu LED dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk menerapkan budaya efisensi energi.

2. **Pengelolaan Air dan Air Limbah (Efluen)**
   Penggunaan air oleh Perseroan relatif terbatas dan terutama digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Mengingat PT PII tidak bergerak

sustainable development goals, which include environmental protection and preservation.

1. **Energy Management**
   IIGF uses fossil-based energy, namely fuel oil (BBM), to support various Company operational activities, such as office activities and fueling operational vehicles. In 2025, electricity usage was recorded at 179,711 kWh, equivalent to 646.96 Gigajoules, an increase compared to 2024, which reached 158,611 kWh, equivalent to 571 Gigajoules. The increase in electricity consumption was primarily due to the increased frequency of offline employee attendance in the office, in line with the normalization of work activities and the need for operational coordination, increase in the number of interns and support staff utilizing office facilities, and increased operational activities, meetings, and internal training. Furthermore, the optimization of office facility utilization throughout 2025 also contributed to the increase in electricity consumption compared to the previous year.

   IIGF routinely measures electricity and fuel consumption as a form of evaluation of the Company's efforts to reduce energy consumption and develop energy efficiency programs. To determine the amount of energy used per employee, the Company has calculated energy intensity. In 2025, the energy intensity value was recorded at 3.76 gigajoules per employee, an increase of 0.26% compared to 3.50 gigajoules per employee in 2024. This increase indicates that the Company's energy consumption increase was relatively small, in line with various energy efficiency initiatives implemented throughout 2025.

   IIGF implemented various initiatives to improve energy efficiency, including switching off electricity when not in use or unused equipment, improving lighting efficiency by replacing TL lamps with LED lamps, and conducting dissemination to all employees to implement the energy efficiency culture.

2. **Water and Wastewater (Effluent) Management**
   The Company's water use is relatively limited and mainly used to support office operational activities. Considering that IIGF does not operate within the extractive sector,

di sektor ekstraktif, pengelolaan air dilakukan melalui sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh pengelola gedung (*building management*) sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk mendukung penggunaan air secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan karakteristik penggunaan tersebut, tidak terdapat dampak signifikan terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan air Perseroan.

PT PII juga melakukan berbagai upaya penghematan air, seperti sosialisasi kepada karyawan, adopsi teknologi penghematan air, dan kampanye internal untuk penghematan air. Pada tahun 2025, penggunaan volume air di PT PII tercatat sebesar 275 $m^3$ atau 0,275 megaliter, meningkat 19,05% dibandingkan tahun 2024 yang juga sebesar 231 $m^3$ atau 0,23 megaliter. Peningkatan volume penggunaan air ini terjadi dikarenakan bertambahnya program dan aktivitas yang dilaksanakan Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, PT PII juga berupaya untuk memastikan air limbah domestik Perseroan terkelola dengan baik dan tidak mencemari badan air. Komitmen ini dibuktikan dengan tidak membuang air limbah domestik ke lokasi-lokasi daerah *water-stressed area*. Sebagai gantinya, pembuangan air limbah domestik Perseroan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak eksternal untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa air limbah domestik yang dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu yang berlaku.

3. **Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah**
Untuk mencegah dampak negatif dan mendukung keberlanjutan lingkungan, PT PII mengintegrasikan pencegahan polusi dan pengelolaan limbah dalam proses penjaminan proyek. Aktivitas proyek yang menghasilkan polutan seperti emisi Gas Rumah Kaca (GRK), emisi non-GRK, serta limbah B3 dan non-B3, berpotensi mencemari dan merusak lingkungan. PT PII mendorong pengelola proyek untuk menyusun rencana inventarisasi emisi GRK, pengurangan emisi, serta pengolahan limbah B3 dan limbah padat sesuai regulasi yang berlaku. Dalam proses *screening*, PT PII mengidentifikasi risiko polusi dan limbah serta menyusun rencana mitigasinya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan penjaminan proyek, terutama yang mendapatkan *Project Development Facility* (PDF) dan wajib menerapkan ESG. PT PII juga mengelola emisi GRK dan limbah di kantor sebagai bagian dari operasional ramah lingkungan.

water management is performed through systems and policies implemented by building management in accordance to prevailing laws and regulations. Nevertheless, the Company remains committed to supporting the efficient and responsible use of water. With the usage characteristics in consideration, there is no significant impact to the environment caused by the Company's water use.

IIGF also undertakes various water conservation efforts, such as employee dissemination, adoption of water-saving technologies and internal water conservation campaigns. In 2025, IIGF's water use was recorded at 275 $m^3$ (0.275 megaliters), a 19.05% increase compared to 2024, which was also 231 $m^3$ (0.23 megaliters). This increase in water usage volume was due to the increase in programs and activities conducted by the Company compared to the previous year's usage.

On the other hand, IIGF also strives to ensure that the Company's domestic wastewater is properly managed and does not pollute water bodies. This commitment is demonstrated by not discharging domestic wastewater into water-stressed areas. Instead, the Company's domestic wastewater is disposed of in collaboration with external parties to prevent negative impacts on the environment and surrounding communities, and to ensure that domestic wastewater discharged into water bodies meets applicable quality standards.

3. **Pollution Prevention and Waste Management**
To prevent negative impacts and support environmental sustainability, IIGF integrates pollution prevention and waste management into the project assurance process. Project activities that produce pollutants such as greenhouse gas (GHG) emissions, non-GHG emissions, and hazardous and non-hazardous waste have the potential to pollute and damage the environment. IIGF encourages project managers to develop plans for GHG emission inventories, emission reductions, and hazardous and solid waste management in accordance with applicable regulations. During the screening process, IIGF identifies pollution and waste risks and develops mitigation plans. This is one of the considerations in project guarantee decisions, particularly those that receive PDFs and are required to implement ESG. IIGF also manages GHG emissions and office waste as part of its environmentally friendly operations.

Selama tahun 2025, kegiatan operasional kantor PT PII menghasilkan limbah B3 sebanyak 6,79 kg dan limbah non B3 sebanyak 8.604,40 kg. Untuk saat ini pengelolaan semua limbah yang dihasilkan dari operasional Perseroan dilakukan dengan pemisahan jenis limbah antara limbah B3, organik, serta anorganik dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah tersertifikasi dalam pengelolaan limbah.

Selain itu, saat ini PT PII melaksanakan program *flagship* WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*), yang merupakan program TJSL Perseroan pada sektor lingkungan dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Melalui program ini, PT PII mampu membantu pengurangan sampah organik dengan proyeksi sebesar 153,6 ton per tahun dan peningkatan ekonomi pada masyarakat pelaku budidaya dengan proyeksi sebesar Rp472,7 juta per tahun.

Throughout 2025, IIGF's office operations generated 6.79 kg of B3 (hazardous and toxic) waste and 8,604.40 kg of non-B3 waste. Currently, all waste generated from the Company's operations is managed by separating waste into hazardous and toxic, organic, and inorganic waste, in collaboration with certified third parties.

Furthermore, IIGF currently implements the flagship WE CARE (Waste Management for Circular Economy) program, the Company's CSR program in environmental sector, managing both organic and inorganic waste. Through this program, IIGF is able to contribute to the reduction of organic waste by a projected 153.6 tons per year and improve the economic well-being of the farming community by a projected Rp472.7 million per year.

**4. Pengelolaan dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

PT PII turut melakukan pengelolaan pengendalian emisi GRK sebagai bentuk pencegahan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Pada tahun 2025, jumlah emisi GRK yang dihasilkan Perseroan tercatat mengalami peningkatan sebesar 11,29% dibanding tahun 2024. Untuk mengetahui tingkat emisi GRK per karyawan, PT PII telah melakukan perhitungan intensitas emisi GRK. Pada tahun 2025, nilai intensitas emisi GRK tercatat sebesar 0,69 ton $CO_2$eq per karyawan, meningkat 11,29% % dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,62 ton $CO_2$eq per karyawan.

Inisiatif pengelolaan dan pengendalian emisi GRK dilakukan PT PII dengan mengindentifikasi sumber-sumber emisi GRK dari kegiatan operasional Perseroan yang kemudian mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memitigasi dampaknya. Melalui pendekatan komprehensif, PT PII melakukan pemantauan dan perhitungan emisi GRK secara berkala, serta melakukan praktik-praktik yang lebih efisien dalam penggunaan energi seperti penggantian Lampu Hemat Energi (*Light Emitting Diode*/LED), himbauan mematikan AC dan alat elektronik lainnya.

Selain itu, PT PII juga mendorong penggunaan kendaraan operasional yang lebih ramah lingkungan, termasuk kendaraan berbasis listrik (*electric vehicle*/EV) dan *hybrid engine*, guna menekan emisi dari sektor transportasi. Melalui berbagai inisiatif tersebut, PT PII berkomitmen untuk mendukung pengendalian emisi GRK secara berkelanjutan.

**4. Greenhouse Gas (GHG) Emission Management and Control**

IIGF also manages and controls GHG emissions as a way to prevent global warming and climate change. In 2025, the Company's GHG emissions recorded an increase of 11.29% compared to 2024. To determine the GHG emission level per employee, IIGF calculated the GHG emission intensity. In 2025, the GHG emission intensity was recorded at 0.69 tons $CO_2$eq per employee, an 11.29% increase compared to 0.62 tons $CO_2$eq per employee in 2024.

IIGF's GHG emission management and control initiatives involve identifying the sources of GHG emissions from the Company's operational activities and then taking comprehensive steps to mitigate their impacts. Through a comprehensive approach, IIGF regularly monitors and calculates GHG emissions, as well as implements more efficient energy practices, such as replacing energy-saving lamps (Light-Emitting Diodes/LEDs), and giving an appeal to turn off air conditioners and other electronic devices.

Furthermore, IIGF also encourages the use of more eco-friendly operational vehicles, including electric vehicles (EVs) and hybrid engines, to reduce emissions from the transportation sector. Through these various initiatives, IIGF is committed to supporting sustainable GHG emission control.

5. **Pelestarian Keanekaragaman Hayati**

Wilayah kerja PT PII tidak berada di dekat atau di dalam daerah konservasi atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Namun, PT PII menyadari bahwa pembangunan infrastruktur yang dijamin PT PII, seperti jalan tol, berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati ketika trase melintasi kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, Perseroan memastikan proyek-proyek yang dijamin memenuhi Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati melalui proses evaluasi kelayakan aspek lingkungan sosial sebagai bagian dari proses *appraisal* penjaminan Proyek PT PII. Evaluasi dilakukan dengan mereviu dokumen Proyek dan melakukan kajian mendalam untuk memastikan trase dan/atau lokasi proyek tidak berada dan/atau berdekatan dengan kawasan biodiversitas penting dengan rekomendasi mitigasi termasuk namun tidak terbatas memastikan penanggung jawab Proyek melakukan kajian alternatif untuk menghindari atau meminimalisir kawasan biodiversitas penting yang dilintasi trase, rekayasa desain teknis *elevated*, koridor satwa atau pendekatan teknis lainnya.

Upaya PT PII mendorong pengelola proyek untuk mengurangi dampak kegiatan infrastruktur terhadap keanekaragaman hayati di darat dan di bawah air dengan cara penyusunan rencana, perlindungan, dan pelestarian. Dalam melakukan evaluasi kelayakan penjaminan proyek, PT PII menyampaikan masukan mengenai strategi mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir persinggungan dengan kawasan sensitif, moratorium, maupun kawasan biodiversitas penting melalui kajian dan pemetaan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Sebagai contoh, di tahun 2025 PT PII melakukan dua (2) penjaminan untuk proyek infrastruktur jalan, di antaranya Proyek Jalan Tol Bogor – Serpong. PT PII memberikan prasyarat dalam rangka mitigasi risiko dan *sustainability* proyek ke pengelola proyek untuk melakukan pergeseran trase jalan tol agar trase tidak melewati Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Selain memberikan masukan untuk perbaikan rencana proyek, sebagai salah satu bukti komitmen PT PII dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT PII juga menjadikan pemenuhan perizinan untuk syarat efektif penjaminan. Seperti halnya dalam penjaminan untuk Proyek *Fly Over* Sitinjau Lauik di Sumatera Barat,

5. **Biodiversity Conservation**

IIGF's working areas are not located near or within conservation areas or areas with high biodiversity. However, IIGF recognizes that infrastructure development guaranteed by IIGF, such as toll roads, has the potential to negatively impact biodiversity when its routes traverse areas of high biodiversity value. Therefore, IIGF ensures that guaranteed projects comply with the Biodiversity Protection Principles through a feasibility evaluation of environmental and social aspects as part of IIGF's project guarantee appraisal process. The evaluation is conducted by reviewing Project documents and conducting an in-depth study to ensure that the Project's route and/or location are not located in or near to important biodiversity areas. Mitigation recommendations include, but are not limited to, ensuring that the Project Manager conducts alternative studies to avoid or minimize the impact of important biodiversity areas crossed by the route, using elevated engineering designs, wildlife corridors, or other technical approaches.

IIGF's efforts in encouraging project managers to reduce the impact of infrastructure activities on terrestrial and underwater biodiversity are carried out through planning, protection, and preservation. In evaluating the feasibility of project guarantees, IIGF provides input on mitigation strategies that can be implemented to avoid or minimize contact with sensitive areas, moratorium areas, or important biodiversity areas through Geographic Information System (GIS)-based studies and mapping. For example, in 2025, IIGF undertook 2 (two) guarantees for road infrastructure projects, including the Bogor – Serpong Toll Road Project. IIGF provided input to the project managers to shift the toll road route so that it did not pass through Special Purpose Forest Areas (KHDTK). In addition to providing input for project plan improvements, as a demonstration of IIGF's commitment to ensuring compliance with applicable laws and regulations, IIGF also made permit fulfillment a prerequisite for effective guarantees. For example, in the guarantee for the Sitinjau Lauik Flyover Project in West Sumatra, IIGF requires a Forest Area Use Approval (PPKH) due to a part of the flyover route that will pass through forest areas. Thus, IIGF confirms that infrastructure development can proceed hand in

PT PII mensyaratkan terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) karena sebagian trase *fly over* akan melewati kawasan hutan. Dengan demikian, PT PII menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.

hand with biodiversity conservation in accordance with applicable rules and regulations.

Pada tahun 2025, PT PII juga melaksanakan beberapa program TJSL yang berfokus pada pelestarian lingkungan, diantaranya;

- Program *Waste Management for Circular Economy* (WE CARE) melalui Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Budidaya Maggot di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, serta Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Dewanata di Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah
- Program Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu melalui Pemberdayaan Masyarakat berbasis Lingkungan di Banjarnegara, Jawa Tengah
- Program Manajemen Pengelolaan Sampah Desa Wisata Watu Hadang Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
- Penanaman Pohon di kawasan *Proving Ground* Bekasi, Jawa Barat
- Penanaman Pohon buah di Area *Exit* Tol Jogja – Bawen, Sleman, DI Yogyakarta

In 2025, IIGF also carried out some CSR programs focused on environmental conservation, including:

- Waste Management for Circular Economy (WE CARE) Program through Organic Waste Management based on Maggot Cultivation in Yogyakarta and Bantul Regency, as well as Optimization of the Dewanata Integrated Waste Management Site in Dieng Kulon, Banjarnegara, Central Java
- Serayu Watershed Restoration (DAS) Program through Environmental-based Community Empowerment in Banjarnegara, Central Java
- Waste Management Program in Watu Hadang Tourism Village, East Sumba, East Nusa Tenggara
- Tree Planting in Bekasi Proving Ground Area, West Java
- Fruit Trees Planting at Jogja-Bawen Toll Exit Area, Sleman, Special Region of Yogyakarta

## Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Environmental Management and Conservation Cost

Tahun 2025 PT PII mengalokasikan biaya lingkungan untuk dipergunakan dalam perbaikan lingkungan, serta pembiayaan program lingkungan hidup sebagai bagian dari penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Biaya yang dialokasikan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.177,81 juta, mengalami peningkatan sebesar 35,72% dibandingkan tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp867,82 juta.

In 2025, IIGF allocated environmental funds for environmental improvements and environmental program financing as part of its Corporate Social Responsibility (CSR) implementation. The allocated funds for 2025 amounted to Rp1,177.81 million, increasing by 35.72% compared to Rp867.82 million allocated in 2024.

## Pengaduan Masalah Lingkungan

Complaints about Environmental Problems

Penyediaan Layanan Pengaduan Lingkungan adalah sebagai upaya untuk memperoleh dan menangani masukan, keluhan, atau pertanyaan dari pemangku kepentingan terkait isu lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional Perseroan. Pengaduan lingkungan ini dapat disampaikan secara langsung kepada Perseroan melalui sarana/media yang disediakan.

The Environmental Complaint Service is an effort to obtain and address input, complaints, or questions from stakeholders regarding environmental issues resulting from the Company's operational activities. These environmental complaints can be submitted directly to the Company through the provided channels.

**Secara lisan**
Verbally

Menghubungi *Call Center* di +62 21 5795 0550 atau mengunjungi kantor pusat PT PII yang beralamat di Capital Place Lt. 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12710 – Indonesia.
Contacting the Call Center at +62 21 5795 0550, or visiting IIGF's head office at Capital Place Lt. 7 and 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 West Kuningan, South Jakarta, Special Region of Jakarta, 12710, Indonesia.

**Secara tertulis**
In writing

- Menyampaikan email ke alamat info@iigf.co.id
- Menyampaikan form keluhan yang tercantum dalam situs PT PII ataupun melalui media sosial Perseroan.
- Sending an email to info@iigf.co.id
- Submitting a complaint form, available at IIGF's website or via the Company's social media.

Pada tahun 2025 PT PII tidak menerima pengaduan dari pemangku kepentingan terkait lingkungan sehingga tidak terdapat denda ataupun sanksi lingkungan yang ditanggung oleh Perseroan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

In 2025, IIGF did not receive any complaints from stakeholders regarding the environment. Thus, there were no fines or environmental sanctions borne by the Company for non-compliance with environmental laws and regulations.

# Kinerja Sosial
Social Performance

## Pengembangan Sosial dan Masyarakat
Social and Community Development

Kinerja sosial adalah kinerja Perseroan dalam memenuhi tanggung jawab sosial terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan, yang merupakan indikator keberhasilan dalam mengelola dampak sosial dari kegiatan operasional perusahaan, termasuk etika bisnis.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan, persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Perseroan memegang peranan kunci dalam menentukan kelangsungan operasional usaha di masa depan. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan masyarakat. Komitmen ini terwujud melalui berbagai inisiatif yang implementasinya dilakukan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dirancang untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui program TJSL ini, Perseroan secara aktif mendukung aspek-aspek penting seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Social performance is the Company's performance in fulfilling its social responsibilities towards employees, the community, and the environment. It is an indicator of success in managing the social impacts of its operational activities, including business ethics.

As a crucial stakeholder, public perception and acceptance of the Company's existence play a key role in determining the future sustainability of its business operations. Therefore, IIGF is committed to ensuring a harmonious and mutually beneficial relationship between the Company and the community. This commitment is realized through various initiatives, the implementation of which is carried out through the Corporate Social Responsibility (CSR) Program, designed to be implemented sustainably. Through this CSR program, the Company actively supports important aspects such as improving the quality of education, empowering the local economy, preserving the environment, and improving the quality of life of the community.

Dalam menjalankan program TJSL, PT PII secara hati-hati mengelola dampak operasional terhadap masyarakat dengan mengutamakan prinsip *Creating Shared Value* (CSV), yang berfokus pada keseimbangan antara tiga aspek utama: *Profit, People, and Planet*. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar proyek, memperoleh manfaat langsung.

In implementing the CSR program, IIGF carefully manages the operational impact on the community by prioritizing the Creating Shared Value (CSV) principle, which focuses on the balance between three key aspects: Profit, People, and Planet. This approach aims to ensure that all stakeholders, especially the communities surrounding the project, benefit directly.

Komitmen PT PII untuk berkembang bersama masyarakat tercermin dalam Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, yang mengatur pedoman pelaksanaan TJSL perseroan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program yang diimplementasikan sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan perusahaan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Dengan kebijakan ini, PT PII berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya bermanfaat bagi Perseroan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

IIGF's commitment to developing with the community is reflected in the Company's Social and Environmental Responsibility Activity Implementation Policy, which regulates the company's CSR implementation guidelines. This policy is designed to ensure that every implemented is in line with the Company's values and objectives, and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). With this policy, IIGF is committed to having an active role in actualizing sustainable development, which is not only beneficial for the Company but also for the community and the environment.

## Inisiatif Program Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Tahun 2025

Social and Community Empowerment Program Initiatives in 2025

Program TJSL yang menjadi prioritas utama Perseroan, adalah pada sektor-sektor yang dapat mendukung percepatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG). Program ini dirancang untuk menanggapi tantangan sosial dan lingkungan yang ada, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sekitar area operasional Perseroan.

The Company's CSR program that becomes the Company's top priority is sectors that can support accelerated development based on Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. This program is designed to respond to existing social and environmental challenges while ensuring that every activity implemented provides sustainable, long-term benefits for all stakeholders, especially the communities around the Company's operations.

Pada tahun 2025, PT PII telah menyalurkan dana sebesar Rp6,05 miliar untuk program TJSL, yang dialokasikan pada 5 (lima) sektor utama: Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan, Kesehatan, serta Sosial, Budaya, dan Keagamaan.

In 2025, IIGF disbursed funds amounting to Rp6.05 billion for the CSR program, which was allocated to 5 (five) main sectors: Education, Community Empowerment, Environment, Health, as well as Social, Cultural, and Religion.

### Realisasi Penyaluran Dana Program TJSL Selama Tiga Tahun Terakhir (Rp Juta)

Fund Disbursement Realization of CSR Program in the Last Three Years (Rp Million)

| No. | Bidang Penyaluran<br>Distribution Sector | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Education | 1.148,0 | 559,6 | 937,6 |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment | 1.080,4 | 1.110,3 | 987,8 |
| 3. | Lingkungan Environment | 1.099,5 | 810,5 | 403,8 |

| No. | Bidang Penyaluran<br>Distribution Sector | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Kesehatan Health | 136,6 | 718,0 | 421,9 |
| 5. | Sosial, Budaya, dan Keagamaan Social, Cultural, and Religion | 2.583,7 | 1.639,2 | 1.678,7 |
| | **Total** | **6.048,5** | **4.837,5** | **4.429,8** |

Berbagai program TJSL yang dilakukan sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu komitmen PT PII dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang dinilai mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Berikut ini ringkasan program TJSL prioritas yang telah dilaksanakan PT PII sepanjang tahun 2025

Various CSR programs implemented throughout 2025 represented one of IIGF's commitments to achieving SDGs by creating social and environmental impacts capable of supporting the development acceleration and community's economic improvement.

The following is a summary of priority/flagship CSR programs implemented by IIGF in 2025.

## Sektor Pendidikan
Education Sector

**Selama tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1,14 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Pendidikan sebanyak 3 program.**

**In 2025, the Company disbursed Rp1.14 billion of budget for CSR implementation in Education sector, consisting of 3 programs**

### 1. Program Guru PIIjar
PIIjar Teacher Program



Program Pengembangan Inovasi dan Inklusivitas Pembelajaran bagi Guru (Program Guru PIIjar) merupakan kelanjutan dari Program Guru Binar yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Program ini dirancang sebagai jawaban atas tantangan guru dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis komik digital dan lembar kerja asesmen yang inovatif, sekaligus memperkenalkan strategi pembelajaran berdiferensiasi agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan kontekstual. Program ini dilaksanakan secara *hybrid* di 3 lokasi, yaitu Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Pekanbaru (Riau), dan Kota Balikpapan (Kalimantan Timur).

The Teacher Innovation and Inclusiveness Development Program (PIIjar Teacher Program) is a continuation of Binar Teacher Program, implemented since 2022. This program is designed to address teachers' challenges in integrating digital technology into teaching and learning activities. It aims to improve teachers' skills in developing innovative digital comic-based learning media and assessment worksheets, while also introducing differentiated learning strategies to make learning process more active, enjoyable, and contextual. This program was implemented in a hybrid format across 3 locations, which were Padang (West Sumatra), Pekanbaru (Riau), and Balikpapan (East Kalimantan).

Tahapan program mencakup; advokasi dan sosialisasi para pemangku kepentingan, proses seleksi untuk memilih 40 orang guru di tiap wilayah dari jenjang SMA di kota Padang dan Balikpapan dan jenjang SD di kota Pekanbaru, kegiatan *onboarding online*, rangkaian pelatihan intensif dan pendampingan serta kelas swapacu untuk implementasi hasil pelatihan (*live coaching*).

The program's stages include advocacy and Stakeholders dissemination, selection process in choosing 40 teachers in each region, from high school levels in Padang and Balikpapan and elementary school levels in Pekanbaru, online onboarding activities, a series of intensive training sessions and mentoring sessions, and live coaching sessions to implement the training results.

Indikator keberhasilan program dinilai dari 3 aspek, yaitu kehadiran peserta, peningkatan pengetahuan (diukur dari *pre-test* dan *post-test*), pengembangan instrumen asesmen diagnostik, serta efektivitas program.

The program success indicators were assessed based on 3 aspects, namely participant attendance, knowledge enhancement (measured by pre-test and post-test), development of diagnostic assessment instruments, and program effectiveness.

### 2. Program Beasiswa PT PII untuk Mahasiswa Berprestasi di Indonesia Timur Tahap 2

IIGF Scholarship Program for Outstanding Students in Eastern Indonesia Phase 2




Program ini merupakan lanjutan dari program beasiswa tahun 2024. Pada tahun 2025, beasiswa diberikan kembali kepada 60 mahasiswa pra sejahtera dengan nilai dan prestasi terbaik dari hasil evaluasi program tahun sebelumnya, dengan pembagian 30 mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara, 30 mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Sulawesi Selatan, dan 30 mahasiswa Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Maluku.

This program is a continuation of the 2024 scholarship program. In 2025, scholarships were awarded to 60 underprivileged students with the best grades and achievements based on previous year's program evaluation, with 30 students from Sam Ratulangi University (UNSRAT) Manado, North Sulawesi; 30 students from Hasanuddin University (UNHAS) Makassar, South Sulawesi; and 30 students from Pattimura University (UNPATTI) Ambon, Maluku.

Beasiswa yang diberikan dalam bentuk dana pendidikan bulanan meliputi kebutuhan untuk biaya hidup, buku, komunikasi data, dan lainnya. Di samping itu, dilakukan pula *development activity* untuk mengasah *soft skill* para penerima beasiswa, seperti *coaching* dan *mentoring* untuk pelatihan kepemimpinan, *public speaking*, persiapan dunia kerja, dan pengelolaan keuangan. Penerima beasiswa juga didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program *community development* untuk masyarakat sekitar.

The scholarships are provided in the form of monthly educational funds covering living expenses, books, data communications, and other needs. In addition, development activities are conducted to hone the soft skills of scholarship recipients, such as coaching and mentoring for leadership, public speaking, career preparation, and financial management. Scholarship recipients are also encouraged to actively participate in social activities through community development programs for the surrounding community.

### 3. Program Pelatihan Digital Santri dan Bantuan Laboraturium Komputer untuk Pondok Pesantren Hidayatul Ghozzali di Purwakarta

Digital Santri Training Program and Computer Laboratory Assistance for Hidayatul Ghozzali Islamic Boarding School in Purwakarta




Untuk mendukung pendidikan yang berkualitas di era digitalisasi ini, PT PII memberikan bantuan laboratorium komputer untuk Pondok Pesantren Hidayatul Ghozzali, salah satu pesantren di Purwakarta yang menampung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Pesantren ini tidak hanya menyediakan asrama dan pendidikan agama, namun juga menyediakan pendidikan formal setingkat SMA/MA dengan tenaga pendidik dan fasilitas yang kurang memadai, termasuk tidak adanya komputer.

To support quality education in this digital era, IIGF provided computer laboratory assistance to Hidayatul Ghozzali Islamic Boarding School, a boarding school in Purwakarta that accommodates students from low-income families. This boarding school not only provides dormitories and religious education, but also provides formal education at high school/Islamic high school level, with inadequate teaching staff and facilities, including a lack of computers.

Pada program ini, PT PII mendukung penyediaan laboratorium komputer beserta isinya seperti set komputer *client*, komputer *server*, meja komputer *server*, dan meja untuk komputer *client*. Sebanyak 30 siswa diberikan pelatihan penggunaan komputer disertai kelas *digital creative* dengan silabus materi *copywriting* dan desain visual, *digital marketing* dan *social media*, serta sesi HR untuk proses lamaran kerja (termasuk pembuatan CV dan linkedin, wawancara, serta tes psikologi). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas para pengajar di pesantren, diberikan pula pelatihan untuk 20 guru (*Training of Trainers*) dengan materi *integrative thinking, problem solving and decision making*, serta *communication skill*.

In this program, IIGF supports the provision of a computer laboratory and its equipment, including client computer sets, server computers, server computer desks, and client computer desks. A total of 30 students received computer training, along with digital creative class covering copywriting and visual design, digital marketing, and social media, as well as HR session for job application process (including creating CV and LinkedIn, interviews, and psychological testing). Furthermore, to improve the quality of Islamic boarding school teachers, 20 teachers were also provided with training (Training of Trainers) covering integrative thinking, problem-solving and decision-making, and communication skills.

## Sektor Pemberdayaan Masyarakat
Community Empowerment Sector

**Selama tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1,08 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 3 program.**

**In 2025, the Company disbursed Rp1.08 billion of budget for CSR implementation in Community Empowerment sector, consisting of 3 programs.**

### 1. Program Pengembangan Kerajinan Ketak berbasis Pemberdayaan Perempuan di Lombok Barat
Women Empowerment-Based Ketak Craft Development Program in West Lombok




Program pemberdayaan perempuan berbasis pengembangan kerajinan ketak di Lombok Barat ini dilaksanakan dalam rangka memberdayakan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan serta kualitas produk ketak sebagai warisan budaya lokal yang ramah lingkungan, yang menyasar 33 perempuan penganyam ketak di Desa Persiapan Longserang, Lombok Barat, NTB dengan pendekatan pelatihan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan akses pasar.

Program dimulai dengan diskusi dan observasi sebagai asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan setiap penerima manfaat. Dari hasil asesmen tersebut, intervensi yang dilakukan meliputi pembangunan sentra ketak sebagai pusat produksi dan pemasaran, pelatihan peningkatan kualitas dan inovasi produk, penguatan kelompok dan pembentukan koperasi untuk memastikan keberlanjutan, serta pemasaran digital dan kolaborasi produk untuk memperluas target pasar.

Secara dampak, para penganyam ketak kini dapat menjangkau akses pasar melalui *offtaker* dan memiliki pendapatan stabil dan berkelanjutan dengan estimasi kenaikan pendapatan Rp280.000/bulan.

This women empowerment program, based on the development of ketak crafts in West Lombok, aims to empower the local economy to increase income and improve the quality of ketak products, an environmentally friendly local cultural heritage. It targets 33 female ketak weavers in Longserang Preparation Village, West Lombok, NTB. This approach involves training, infrastructure development, and strengthening market access.

The program begins with discussions and observations as an initial assessment to determine the needs and capabilities of each beneficiary. Based on the assessment results, interventions include the development of ketak centers as production and marketing centers, training for quality improvement and product innovation, group strengthening and the formation of cooperatives to ensure sustainability, and digital marketing and product collaboration to expand the target market.

In terms of impact, ketak weavers can now access the market through offtakers and have a stable and sustainable income, with an estimated increase of Rp280,000 per month.

### 2. Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pemberdayaan Masyarakat Rantau Dedap

Mini-Hydro Power Plant (MHPP) Development Program and Community Empowerment in Rantau Dedap



PT PII melaksanakan program pembangunan dan penguatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dirancang untuk menjawab permasalahan kebutuhan akan penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di Rantau Dedap, Muara Enim, Sumatera Selatan. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur kelistrikan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pengolahan dan pengeringan kopi. Dengan tersedianya listrik yang lebih stabil, diharapkan terjadi peningkatan kualitas produk, efisiensi waktu produksi, serta kenaikan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

IIGF implements a Mini-Hydro Power Plant (MHPP) development and strengthening program designed to address the need for a reliable and sustainable energy supply while simultaneously supporting increased economic productivity in Rantau Dedap community, Muara Enim, South Sumatra. This program focuses not only on electricity infrastructure but also on community empowerment, particularly in utilizing electricity for productive economic activities such as coffee processing and drying. With the availability of more stable electricity, it is expected to improve product quality, increase production time efficiency, and increase community income sustainably.

Pada program ini, dilakukan intervensi terpadu yang mencakup aspek fisik dan non-fisk. Aspek fisik difokuskan pada pembangunan dan penguatan sistem PLTMH yang meliputi pembangunan turbin mikrohidro, rumah turbin (*power house*), bendungan (*forebay*), serta jaringan distribusi listrik menuju rumah tangga dan fasilitas umum. Pada aspek non-fisik, intervensi diarahkan untuk pelatihan pengoperasian serta pemeliharaan dan perawatan PLTMH.

This program utilizes integrated interventions encompassing both physical and non-physical aspects. The physical aspect focuses on the development and strengthening of MHPP system, including the construction of mini-hydro turbine, power house, forebay, and electricity distribution network to households and public facilities. The non-physical aspect focuses on training for the operation, maintenance, and upkeep of MHPP.

Di samping itu, 30 masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pemanfaatan listrik dan pemberdayaan *marketing* dengan mengusung tema "Dari Energi Air ke Nilai Jual: *Marketing* Kopi Rantau Dedap Berbasis PLTMH", yang mencakup pemahaman peran listrik PLTMH dalam meningkatkan efisiensi usaha kopi, peningkatan kualitas produk kopi melalui pemanfaatan energi listrik, serta strategi *branding* dan diferensiasi kopi Rantau Dedap. Selain itu, peserta juga dibekali dengan pengetahuan mengenai strategi harga dan kemasan untuk meningkatkan daya saing produk, pemasaran digital sederhana berbasis desa, serta akses pasar dan rencana pengembangan usaha ke depan.

Furthermore, 30 community members who make their living as farmers received training related to electricity utilization and marketing empowerment under the theme "From Water Energy to Sales Value: MHPP-Based Rantau Dedap Coffee Marketing." This training covers the role of MHPP in increasing coffee business efficiency, improving coffee product quality through the use of electricity, and branding and differentiation strategies for Rantau Dedap coffee. Moreover, participants are also equipped with knowledge on pricing and packaging strategies to increase product competitiveness, simple village-based digital marketing, market access, and future business development plans.

### 3. Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh Kawasan Semanggi Losari, Surakarta

Housing Quality Improvement Program in Slum Area of Semanggi Losari, Surakarta



PT PII bersama seluruh SMV di bawah Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta yang difasilitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta melakukan kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penyediaan perumahan yang layak huni khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah. Penyediaan rumah layak huni ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun konsep penataan kawasan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pengelolaannya yang berkelanjutan untuk semua.

IIGF, along with all SMVs under the Ministry of Finance, cooperated with Surakarta Government, facilitated by Surakarta City Housing Settlement Areas and Land Affairs Agency, undertaking a collaborative Corporate Social Responsibility program to provide affordable housing, particularly for Low-Income Communities (MBR) in Sangkrah Village, Surakarta, Central Java. The provision of decent housing is urgently needed for low-income communities, by developing a concept for livable, productive, and sustainable regional planning based on the Sustainable Development Goals (SDGs) to ensure the availability of clean water and sanitation, as well as their sustainable management for all.

## Sektor Lingkungan
Environmental Sector



**Selama tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar RP 1,099 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Lingkungan sebanyak 5 program.**

**In 2025, the Company disbursed Rp1,099 billion of budget for CSR implementation in Environmental sector, consisting of 5 programs.**

### 1. Program WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*)
WE CARE (Waste Management for Circular Economy) Program



PT PII melanjutkan program, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dilaksanakan dalam 2 (dua) metode yakni; pengolahan sampah organik melalui pengembangan Inti Plasma *Maggot* di Kota Yogyakarta dan optimalisasi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dari segi 5 aspek persampahan di TPST Dieng *Waste Management and Treatment* (Dewanata) yang merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang berlokasi di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara. Pelaksanaan program ini mencakup; studi pendahuluan yang meliputi *baseline study* terkait 5 aspek pengelolaan sampah (peraturan, kelembagaan, teknis operasional, keuangan, dan partisipasi masyarakat), pendampingan yang mencakup peningkatan kapasitas pengelola TPST yang disertai asistensi dan audiensi pemangku kepentingan, serta modifikasi sarana prasarana pendukung. Pada tahun ini, program WE CARE juga dikembangkan di Bantul sebagai bagian dari pengembangan program.

IIGF continues its circular economy-based waste management program, implemented through 2 (two) methods, namely organic waste processing through the development of Maggot Plasma Core in Yogyakarta and optimizing responsible waste management across 5 waste aspects at TPST Dieng Waste Management and Treatment (Dewanata), a waste management facility located in Dieng Kulon Village, Banjarnegara. The program covers preliminary studies i.e., baseline studies related to 5 waste management aspects (regulations, institutions, technical operations, finance, and community participation), assistance i.e., capacity building for TPST managers accompanied by assistance and stakeholder hearings, and modification of supporting infrastructure. This year, the WE CARE program was also developed in Bantul as part of the program development.

### 2. Program Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu

Serayu Watershed (DAS) Restoration Program




Program pemberdayaan berbasis lingkungan penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu merupakan program sinergi TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan yang dilaksanakan sejak 2024 hingga 2025. Ruang Lingkup PT PII pada program TJSL SMV Penyelamatan DAS Serayu ini meliputi bantuan *chopper* untuk 12 Desa dan program pengelolaan kambing perah di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelamatan lingkungan dengan pendekatan ekonomi berkelanjutan.

An environment-based empowerment program to conserve Serayu Watershed (DAS) in the form of a synergy CSR of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance, carried out since 2024 until 2025. IIGF's scope in the CSR SMV Serayu Watershed Restoration program includes providing chopper for 12 villages and a dairy goat management program in Sumberejo Village, Batur District, Banjarnegara Regency. This program aims to increase community awareness of the importance of saving the environment with a sustainable economic approach.

### 3. Program Manajemen Pengelolaan Sampah Desa Wisata Watuhadang Sumba Timur

Waste Management Program in Watuhadang Tourism Village, East Sumba



Program peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok sadar wisata terkait manajemen pengelolaan sampah dan mewujudkan lingkungan desa wisata yang bersih dari sampah serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dari produk-produk turunan pengelolaan sampah di Desa Wisata Watuhadang, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

This program aims to increase the capacity of community and tourism awareness groups regarding waste management, create a clean tourism village environment, and increase local income from waste management by-products in Watuhadang Tourism Village, East Sumba, East Nusa Tenggara.

### 4. Program Penanaman Bibit Pohon Buah pada area proyek Proving Ground Bekasi

Planting of Fruit Tree Seedling Program in Proving Ground Bekasi Project Area



PT PII menunjukkan kepedulian dalam mendukung peningkatan kualitas udara sekaligus penyerapan emisi di Bekasi diantaranya melalui program TJSL yang berfokus pada kegiatan penanaman pohon. Terdapat 250 bibit pohon ditanam di sekitar area Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi yang merupakan lokasi proyek *Proving Ground* Bekasi, salah satu proyek yang dijamin PT PII. Beberapa jenis pohon yang ditanam diantaranya pule, eucalyptus, cemara kipas, mahoni, nangka, mangga harum manis, dan rambutan.

IIGF demonstrates its commitment to supporting air quality improvement and emission reduction in Bekasi, including through its CSR program, which focuses on tree planting activities. A total of 250 tree seedlings are planted around Motor Vehicle Roadworthiness and Certification Testing Center (BPLJSKB) Bekasi, which is the site of Proving Ground Bekasi project, one of the guaranteed projects by IIGF. Some of the tree species planted include blackboard tree, eucalyptus, fan-leafed cedar, mahogany, jackfruit, arumanis mango, and rambutan.

### 5. Penanaman Pohon Buah di sekitar area proyek Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
Planting of Fruit Tree around Yogyakarta-Bawen Toll Road project area




PT PII melaksanakan program penanaman 1.500 bibit pohon di area sekitar exit tol Yogyakarta – Bawen, khususnya di kawasan Watu Jagal, Plambongan, Banyurejo, Kecamatan Tempel, Sleman. Program ini dilaksanakan karena area tersebut mengalami kondisi lingkungan terbuka yang rentan terhadap degradasi lahan, kurangnya penyerapan karbon, polusi udara, dan minimnya tutupan vegetasi. Ketiadaan pohon di sepanjang jalur keluar tol berpotensi meningkatkan suhu mikro, erosi tanah, serta mengurangi kualitas udara akibat lalu lintas kendaraan. Jenis pohon yang ditanam adalah pohon buah produktif seperti alpukat, kelengkeng, durian, dan nanas yang tidak hanya menyerap emisi karbon, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis tanaman dipilih berdasarkan pertimbangan daya adaptasi tinggi, nilai jual stabil, dan potensi panen berkala, sehingga mampu mendukung program ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pemulihan ekosistem.

IIGF implements a program to plant 1,500 tree seedlings in the area around Yogyakarta-Bawen toll road exit, specifically in Watu Jagal area, Plambongan, Banyurejo, Tempel District, Sleman. This program is implemented due to the area experiences open environmental conditions that are vulnerable to land degradation, lack of carbon sequestration, air pollution, and minimal vegetation cover. The absence of trees along the toll road exit has the potential to increase microclimate, soil erosion, and reduce air quality due to vehicle traffic. The types of trees planted are productive fruit trees such as avocado, longan, durian, and pineapple, which not only absorb carbon emissions but also provide economic value to the surrounding community. The plant species are selected based on considerations of high adaptability, stable sales value, and the potential for regular harvests, thus supporting the programs of food security, local economy, and ecosystem restoration.

## Sektor Kesehatan
Health Sector

**Selama tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp136 juta yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor kesehatan sebanyak 2 program.**

**In 2025, the Company disbursed Rp136 million of budget for CSR implementation in health sector, consisting of 2 programs.**

### 1. Program Renovasi Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum di Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan
Public Bathing, Washing, and Toilet (MCK) Facilities Renovation Program in Kuningan Barat Subdistrict, South Jakarta



PT PII merenovasi MCK Umum di Kelurahan Kuningan Barat, yang berlokasi di sekitar area gedung operasional Perseroan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan merupakan salah satu kawasan padat penduduk yang belum memiliki fasilitas MCK yang layak. Kondisi ini menyebabkan masalah lingkungan seperti bau tidak sedap, genangan air kotor, dan risiko penyakit bagi warga setempat. Pekerjaan renovasi MCK meliputi pembangunan kembali bangunan MCK serta pemasangan fasilitas sanitasi dan listrik.

IIGF renovates a public sanitation in West Kuningan sub-district, located near the Company's operational building, as part of its Corporate Social Responsibility (CSR) program. The sub-district of West Kuningan, South Jakarta, is a densely populated area lacking adequate public sanitation facilities. This situation causes environmental problems such as unpleasant odors, stagnant dirty water, and the risk of disease for local residents. This renovation work includes reconstructing the public sanitation building and installing sanitation and electrical facilities.

### 2. Program Donor Darah
Blood Donation Program




PT PII mendukung kegiatan bakti sosial donor darah dengan tema "*a Drop of Blood, a Million Deeds in the Holy Month*" yang dilaksanakan oleh Sekolah Woodlands Montessori yang merupakan lembaga pendidikan inklusif yang sejak tahun 2016 menerima anak didik dengan kebutuhan khusus seperti autis, ADHD, dan disabilitas belajar seperti diseleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, salah satunya sebagai bentuk upaya penyediaan kantong darah yang dibutuhkan melalui kegiatan donor darah untuk penyandang *Thalassemia*, yaitu salah satu penyakit kelainan darah *genetic* yang hingga saat ini belum dapat disembuhkan, sehingga memerlukan transfusi darah seumur hidup.

IIGF supports the blood donation social service activity with the theme "A Drop of Blood, a Million Deeds in the Holy Month," held by Woodlands Montessori School, an inclusive educational institution that accepts students with special needs such as autism, ADHD, and learning disabilities such as dyslexia, dysgraphia, and dyscalculia since 2016. This activity also collaborates with Fatmawati General Hospital (RSUP), one of which is as a form of efforts to provide the required blood bags through blood donation activities for sufferers of Thalassemia, a genetic blood disorder not yet able to be cured, thereby requiring lifelong blood transfusions.

## Sektor Sosial, Budaya, dan Keagamaan
Social, Cultural, and Religion Sector

**Selama tahun 2025, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp2,58 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Sosial, Budaya, dan Keagamaan sebanyak 17 program.**

**In 2025, the Company disbursed Rp2.58 billion of budget for CSR implementation in Social, Cultural, and Religion sector, consisting of 17 programs.**

### 1. Program Berbagi Berkah Ramadan 1446 H
Ramadan 1446 H Blessing Sharing Program



Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446H/2025, PT PII menyelenggarakan Donasi Berbagi Berkah Bulan Ramadan melalui dukungan berbagai inisiatif sosial keagamaan, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun lingkungan sekitar tempat tinggal karyawan. Donasi berbagi berkah bulan Ramadan pada tahun 2025 diberikan kepada Yayasan/DKM/Pesantren/Komunitas keagamaan lainnya guna mendukung kegiatan keagamaan seperti santunan kepada panti asuhan, kaum dhuafa, pembangunan atau renovasi masjid dan mushola serta kegiatan sosial keagamaan lainnya, yang mendapatkan rekomendasi dari karyawan.

To welcome the holy month of Ramadan 1446 H in 2025, IIGF organized a donation to share the Ramadan blessings by supporting various social and religious initiatives, both in the vicinity of the Company and the environment around the employees' residence. The donations to share the Ramadan blessings in 2025 were provided to Foundations/DKM/Islamic Boarding Schools/other religious communities to support religious activities, such as donations to orphanages, the underprivileged, construction or renovation of mosques and prayer rooms, and other social religious activities, as recommended by the employees.

### 2. *Employee Volunteer* Program Ramadan 1446 H
Employee Volunteer Program in Ramadan 1446 H



Dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan 1446H/2025M, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan *Employee Volunteer* Program, PT PII bersama para karyawan menyelenggarakan kegiatan 'Waktu Berbagi PT PII' yang berlokasi di Yayasan Sayap Ibu, Bintaro, Tangerang Selatan, Yayasan Sahabat Valencia Peduli, Gambir, Jakarta Pusat, dan Panti Asuhan Al-Andalusia, Mampang, Jakarta Selatan. Program ini bertujuan untuk berbagi kebermanfaatan sosial kepada para komunitas anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan pengidap kanker sekaligus sebagai wujud kepedulian PT PII di bulan Ramadan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jiwa relawan karyawan melalui kegiatan interaksi dengan anak-anak penyandang disabilitas.

To share happiness in the month of Ramadan 1446 H in 2025, as well as a part of the Employee Volunteer Program, IIGF, together with its employees, held "IIGF's Sharing Time" event at Sayap Ibu Foundation in Bintaro, South Tangerang; Sahabat Valencia Peduli Foundation in Gambir, Central Jakarta; and Al-Andalusia Orphanage in Mampang, South Jakarta. This program aims to provide social benefits to orphans, people with disabilities, and cancer patients, as well as demonstrate IIGF's commitment to the month of Ramadan. Furthermore, this program also aims to foster employee volunteerism through interaction with children with disabilities.

### 3. Donasi Hewan Kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha
Donation of Sacrificial Animals for Eid al-Adha



Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446H / 2025 serta sebagai bentuk kepedulian sosial, PT PII menyalurkan 4 ekor sapi kepada masyarakat di daerah sekitar wilayah Perseroan atau wilayah proyek infrastruktur yang dijamin yang berada di Kota Jayapura, Papua; Kabupaten Karo, Sumatera Utara; Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Jakarta Selatan, DKI Jakarta guna membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, PT PII juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan berbagi daging kurban yang diselenggarakan di Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

To celebrate Eid al-Adha 1446H in 2025 and as a form of social responsibility, IIGF distributed 4 cows to communities in the areas surrounding the Company's operations or the infrastructure projects covered by the Company, including Abepura, Papua; Kabanjahe, Karo, North Sumatra; Pontianak, West Kalimantan; and Mampang, South Jakarta, to foster good relationships with stakeholders. Furthermore, IIGF also cooperated the Ministry of Finance to organize a sacrificial meat distribution event at Al-Amin Mosque of the Ministry of Finance, Central Jakarta.

### 4. Donasi PT PII Peduli Bencana Banjir Bandang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

IIGF's Donation for the Flash Floods in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra



Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, PT PII menyalurkan bantuan tanggap bencana banjir untuk meringankan beban masyarakat terdampak dalam bentuk sembako, makanan siap saji, makanan ringan, *hygiene kit*, dan alat kebersihan. Selain itu, PT PII juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan juga menyalurkan bantuan bencana melalui kegiatan Kemenkeu Peduli Bencana Sumatra.

As a form of concern for the victims of the flash floods in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra, IIGF distributed flood response assistance to ease the burden on affected communities. This assistance included basic necessities, ready-to-eat meals, snacks, hygiene kits, and cleaning supplies. Furthermore, IIGF also cooperated with the Ministry of Finance to distribute the disaster relief through the Ministry of Finance's Sumatra Disaster Aid program.

### 5. Bantuan Pemulihan Operasional RSUD Wangaya, Denpasar, Bali pasca Bencana Banjir

Operational Recovery Assistance for Wangaya Local Hospital, Denpasar, Bali, after the Flood Disaster



Sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan dan dukungan terhadap keberlanjutan layanan kesehatan publik imbas dari dampak banjir bandang melanda wilayah Denpasar, Bali, khususnya di sekitar aliran Tukad Badung, PT PII memberikan bantuan penggantian dan setting ACB serta pemeliharaan genset di RSUD Wangaya. Tujuan program ini adalah untuk membantu pemulihan layanan kesehatan esensial agar RSUD Wangaya dapat segera kembali beroperasi normal, khususnya untuk ruang darurat dan perawatan intensif. RSUD Wangaya merupakan salah satu fasilitas publik yang terdampak banjir cukup parah yang menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas kelistrikan seperti ruang genset dan panel ACB (*Automatic Changeover Breaker*), serta gudang farmasi yang terletak di lantai bawah ikut terendam.

As a form of corporate social responsibility and support for the sustainability of public health services following the flash floods that hit Denpasar, Bali, particularly around the Tukad Badung River, IIGF provided assistance with ACB replacement and setting, as well as generator maintenance at Wangaya Local Hospital. The program aimed to assist in the restoration of essential health services so that Wangaya Local Hospital could quickly return to normal operations, particularly for the emergency and intensive care units. Wangaya Local Hospital was one of the public facilities severely impacted by the flood, which caused significant damage to electrical facilities such as the generator room and ACB (Automatic Changeover Breaker) panel, as well as the inundation of pharmaceutical warehouse located on the ground floor.

### 6. Donasi Fasilitas Penunjang Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Pulau Bintan

Donation of Educational Support Facilities for Elementary Schools on Bintan Island



Sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah terhadap transformasi digital dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis digital di wilayah sekitar proyek, PT PII mendukung fasilitas penunjang pendidikan berbasis digital di SDN 004 Bintan Utara. Dalam program ini, PT PII bekerja sama dengan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan laptop dan router untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah dengan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses pembelajaran di sekolah, sekaligus mempersiapkan para siswa untuk adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan.

As a form of support for the government's digital transformation program and improving the quality of digital-based education in the project area, IIGF supported the digital-based educational support facilities at SDN 004 North Bintan. Under this program, IIGF, in collaboration with BAKTI of the Ministry of Communication and Digital, distributed laptops and routers to support the learning process at the school. The program utilizes technology to increase the effectiveness and efficiency of learning process, while simultaneously preparing students to be adaptive in facing future challenges.

### 7. Donasi Bibit Padi Unggul dan Pupuk Organik untuk Petani Lokal Karawang

Donation of Excellent Rice Seedlings and Organic Fertilizer for Local Farmers in Karawang




Sebagai upaya mendukung program Pemerintah, sejak 2020, PT PII mendukung praktik pertanian organik melalui berbagai inisiatif. Diantaranya melalui dukungan pertanian organik menggunakan variestas padi inpari yang memiliki nutrisi tinggi guna mendukung pengentasan *stunting* di Karawang.

As an effort to support government programs, since 2020, IIGF has supported organic farming practices through various initiatives. This includes agricultural support by using highly nutritious Inpari Nutrizinc seeds to support stunting reduction in Karawang.

Untuk mendukung keberlanjutan metode pertanian organik sekaligus selaras dengan Program Asta Cita Pemerintah mengenai penguatan ketahanan pangan nasional khususnya padi, pada tahun 2025, PT PII mendukung penyediaan bibit padi unggul dan pupuk organik untuk komunitas petani. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani padi unggul melalui metode pertanian organik dengan target hasil 20%, memperbaiki struktur tanah, mengurangi keasaman tanah dan meningkatkan kekuatan batang padi, sehingga dapat menghasilkan padi yang berkualitas serta mampu meningkatkan ekonomi para petani.

To support the sustainability of organic farming methods and align with the Government's Asta Cita Program to strengthen national food security, especially for rice, in 2025, IIGF supported the provision of excellent rice seeds and organic fertilizer for farming communities. This support aims to increase the productivity of excellent rice farmers through organic farming methods with a target yield of 20%, improve soil structure, reduce soil acidity, and increase rice stalk strength, thus producing quality rice and also able to boost the farmers' economy.

Program TJSL pada sektor Sosial, Budaya, dan Keagamaan tahun 2025 lainnya adalah;
8. Donasi untuk Kebutuhan Renovasi Masjid Atullah Padang
9. Donasi Revitalisasi Masjid Al-Muslimun Bogor
10. Donasi Buku Kartini
11. Donasi Peralatan Kerja Bakti Bersih Lingkungan di Bogor
12. Donasi Renovasi Masjid Nurul Huda
13. Donasi Karpet untuk Masjid Al-Amanah Kanwil DJKN Kemenkeu Sumatra Utara
14. Donasi Santunan untuk Anak Yatim dalam rangka Peringatan 1 Muharram 1447 H
15. Bantuan Renovasi untuk Masjid Abdurrahman bin Muhammad Al Askar
16. Donasi Berbagi Kasih Natal 2025

Other CSR programs in Social, Cultural, and Religion sector in 2025 included:
8. Donation for the Renovation of Atullah Mosque in Padang
9. Donation for the Revitalization of Al-Muslimun Mosque in Bogor
10. Donation of Kartini Books
11. Donation of Equipment for Environmental Cleanup Work Program in Bogor
12. Donation for the Renovation of Nurul Huda Mosque
13. Donation of Carpets for Al-Amanah Mosque, Regional Office of the Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance, North Sumatra
14. Donation of Assistance for Orphans in Commemoration of 1 Muharram 1447 H
15. Renovation Assistance for Abdurrahman bin Muhammad Al Askar Mosque
16. Donation for the 2025 Christmas Love Sharing Program

## Penanganan Pengaduan Masyarakat
Public Complaint Handling

Sebagai perwujudan komitmen keterbukaan kepada masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pengaduan atau kritik terkait hal-hal yang merugikan atau berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan TJSL Perseroan, PT PII menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan langsung kepada Perseroan melalui *Call Center* di +62 21 5795 0550 atau dengan mengunjungi kantor pusat PT PII. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis melalui email ke info@iigf.co.id, menggunakan formulir keluhan yang tersedia di situs web PT PII, atau melalui saluran media sosial resmi Perseroan.

IIGF provides a public complaint channel as the manifestation of its commitment to transparency with the local community and other stakeholders, allowing them to submit complaints or criticisms regarding matters detrimental to or related to the implementation of the Company's CSR activities. Complaints can be submitted directly to the Company by contacting the Call Center at +62 21 5795 0550 or visiting IIGF's head office. In addition, complaints can also be submitted in writing via email to info@iigf.co.id using the complaint form available on IIGF's website, or via the Company's official social media channels.

Sepanjang tahun 2025, PT PII tidak menerima pengaduan dan sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap masyarakat maupun terkait program TJSL yang dilaksanakan, serta tidak terdapat insiden pelanggaran terkait hak-hak masyarakat adat yang dilakukan Perseroan.

Throughout 2025, IIGF did not receive any complaints or sanctions related to non-compliance with the community or the CSR programs. There were no incidents of violations related to the rights of indigenous peoples by the Company.

## Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Employment, Occupational Health and Safety Management Aspect

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan Perseroan. Karyawan berperan sebagai penggerak utama operasional bisnis yang bertugas mewujudkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis Perseroan. Mengingat pentingnya peran ini, PT PII berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan, mengembangkan kapasitas dan kompetensi

Human Resources (HR) is one of the main pillars in supporting the Company's sustainability. Employees act as the main driver of business operations, in charge of actualizing performance and achieving targets set in the Company's strategic goals. Given the importance of this role, IIGF is committed to creating an inclusive working environment, providing equal opportunities for every employee, and developing employee capacity and competence continuously. The Company also focuses on

karyawan secara berkelanjutan. Perseroan juga terfokus pada pengembangan karir karyawan dan menciptakan suasana kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal.

Perseroan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam manajemen SDM yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara internal, PT PII telah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM, antara lain:

1. Peraturan Perusahaan Tahun 2024-2026;
2. Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Human Capital HCOD.002/KEB/V.01/2023;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-006/DIR/HR/06/2010 tentang Program Pelatihan Bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-049/DIR/COS/HR/1116 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Direksi No. 006/DIR/HR/06/2010 tentang Program Pelatihan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-045/DIR/HC/1220 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
5. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-004/DIR/COS/HR/0114 tentang Peraturan Cuti bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagaimana diubah melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-006/DIR/COS/HR/0117 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Cuti bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-046/DIR/HC/1220 tentang Peraturan Lembur Bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Perseroan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan SDM dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta mendukung kesejahteraan dan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan Perseroan secara berkelanjutan.

employee career development and establishes a working atmosphere that supports optimal occupational health and safety.

The Company adopts best practices in HR management in accordance with applicable labor regulations, particularly Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Internally, IIGF has established various policies governing HR management, among others:

1. 2024-2026 Company Regulations;
2. Human Capital Acitivity Management Policy HCOD.002/KEB/V.01/2023;
3. Board of Directors' Decision Letter No. SK-006/DIR/HR/06/2010 concerning Training Programs for Employees of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, as lastly amended by the Board of Directors' Decision Letter No. SK-049/DIR/COS/HR/1116 concerning the Fourth Amendment to the Board of Directors' Decision Letter No. 006/DIR/HR/06/2010 concerning Training Programs for Employees of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund;
4. Board of Directors' Decision Letter No. SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 concerning Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees, as lastly amended by the Board of Directors' Decision Letter No. SK-045/DIR/HC/1220 concerning the Amendment to the Board of Directors' Decision Letter No. SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 concerning Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.
5. Board of Directors' Decision Letter No. SK-004/DIR/COS/HR/0114 concerning Leave Regulations for Employees of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, as amended by Board of Directors' Decision Letter No. SK-006/DIR/COS/HR/0117 concerning the First Amendment to Leave Regulations for Employees of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund;
6. Board of Directors' Decision Letter No. SK-046/DIR/HC/1220 concerning Overtime Regulations for Employees of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

These policies implemented by the Company aim to ensure that every aspect of HR management is conducted transparently, fairly, and in accordance with the applicable legal standards, as well as support employee welfare and development to achieve the Company's objectives in a sustainable manner.

# Inisiatif Program Pengelolaan SDM Tahun 2025

HR Management Program Initiatives in 2025

Komitmen Perseroan dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak-hak karyawan tercermin dalam kebijakan yang secara tegas menolak segala bentuk praktik kerja paksa. PT PII tidak mempekerjakan anak di bawah umur, menerapkan prinsip non-diskriminasi, mendukung inklusivitas dan keberagaman, menjamin kebebasan berserikat, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi seluruh karyawan.

The Company's commitment to respecting human rights, including employee rights, is reflected in its policies, which explicitly reject all forms of forced labor practices. IIGF does not employ minors, implements the principle of non-discrimination, supports inclusivity and diversity, guarantees freedom of association, and creates a safe and decent working environment for all employees.

1. **Kesetaraan Dalam Bekerja/Non-Diskriminasi**

   Keberagaman karyawan sangat penting bagi inovasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Untuk itu, Perseroan menitikberatkan pada aspek keberagaman, inklusi, dan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan dalam berkontribusi menciptakan keberlanjutan Perseroan. Dimulai dari aspek rekrutmen, PT PII memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, *gender*, suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga setiap rekrutmen yang diadakan oleh Perseroan dapat dipastikan selalu terbebas dari unsur diskriminasi.

   Pada tahun 2025, jumlah karyawan PT PII tercatat sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang, dengan komposisi jumlah karyawan wanita sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang dan karyawan laki-laki sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang. Di tahun ini juga Perseroan telah merekrut karyawan baru sebanyak 6 (enam) orang yang berasal dari tenaga *pro-hire* maupun *fresh graduate.*

1. **Equality at Work/Non-Discrimination**

   Employee diversity is crucial for innovation and effective decision-making. Therefore, the Company emphasizes the aspects of diversity, inclusion, and equal opportunities for every employee to contribute to the Company's sustainability. Starting from recruitment, IIGF provides equal opportunities without distinguishing seniority, gender, ethnicity, religion, race, and intergroup, so that the Company ensures every recruitment is always free from discrimination.

   In 2025, there were a total of 163 (one hundred and sixty-three) employees of IIGF, with 79 (seventy-nine) female employees and 84 (eighty-four) male employees. This year, the Company also recruited 6 (six) new employees, consisting of both pro-hire and fresh graduates.

2. **Pekerja Anak dan Kerja Paksa**

   PT PII memastikan tidak mempekerjakan anak atau melakukan praktik kerja paksa dalam operasionalnya, sesuai dengan komitmen Perseroan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan yang diterapkan mencakup usia minimal karyawan 18 tahun dan jam kerja 8 jam sehari, dengan kompensasi untuk lembur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Selama tahun pelaporan, tidak ditemukan kasus pekerja anak atau kerja paksa. Kebijakan ini mendukung kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Konvensi *International Labour Organization* (ILO) terkait usia minimal kerja, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan kerja paksa.

2. **Child Labor and Forced Labor**

   IIGF ensures that it does not employ children or practice forced labor in its operations, in accordance with the Company's commitment to human rights. The policies implemented include a minimum employee age of 18 years and working hours of 8 hours a day, with compensation for overtime as stated in the Company Regulations. During the reporting year, there were no cases of child labor or forced labor. This policy supports compliance with labor and human rights regulations in Indonesia, including the Law on ILO Conventions related to minimum working age, elimination of child labor, and elimination of forced labor.

3. **Kesetaraan Dalam Pengembangan Karir**
   Kesempatan yang setara kepada setiap karyawan dan berupaya mendorong terciptanya keberagaman di semua tingkat organisasi merupakan komitmen PT PII. Perseroan mendukung setiap karyawan untuk mengembangkan karier dan mencapai posisi kepemimpinan tanpa diskriminasi.

   Pada tahun 2025, PT PII melakukan penguatan pengelolaan sumber daya manusia melalui implementasi *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM), yang ditandai dengan penyesuaian struktur kepangkatan karyawan serta penerapan *dual grading* dan dua jalur pengembangan karier, yaitu jalur kepangkatan dan jalur jabatan karyawan berdasarkan *job grade* karyawan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keselarasan antara kompetensi individu, tanggung jawab jabatan, serta target kinerja pada tingkat individu, unit kerja, dan korporasi. Sejalan dengan implementasi CBHRM dan penyesuaian struktur tersebut, pada tahun 2025 Perseroan telah memberikan promosi kepada 5 (lima) orang karyawan untuk menduduki posisi struktural sebagai Pimpinan Divisi dan berdasarkan kebutuhan Perseroan mutasi karyawan juga telah dilakukan kepada sebanyak 14 (empat belas) karyawan

3. **Equality in Career Development**
   IIGF is committed to providing equal opportunities for every employee and striving to encourage diversity at all levels of the organization. The Company supports all employees in developing their careers and achieving leadership positions without discrimination.

   In 2025, IIGF strengthened its human resource management through implementing Competency-Based Human Resources Management (CBHRM), marked by adjustments to employees' rank structure and applying dual grading and two career development paths: a rank path and a position path based on employees' job grades. This policy is designed to ensure alignment among individual competencies, job responsibilities, and performance targets at individual, work unit, and corporate levels. In line with the implementation of CBHRM and these structural adjustments, in 2025, the Company promoted five employees to structural positions as Division Leaders and based on employees' needs, transferred 14 employees.

4. **Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi**
   Upaya kesetaraan juga terlihat dalam pengembangan kompetensi karyawan, di mana PT PII memastikan semua karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti pelatihan. Program pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan melalui pelatihan, *workshop*, dan peningkatan keterampilan, baik teknis maupun non-teknis, yang disesuaikan dengan *Competency Model* Perseroan.

   Selama tahun 2025, PT PII telah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan dengan jumlah jam pelatihan mencapai 5.162,5 jam dan rata-rata 31,67 jam per orang. Untuk total jumlah peserta pelatihan pada masing-masing program pelatihan dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini pada Bab Tinjauan Pendukung Bisnis Bagian Pengembangan Kompetensi Karyawan.

4. **Equality in Competency Development**
   The efforts to provide equality are also reflected in employee competency development, in which IIGF ensures that all employees have equal opportunities to participate in training. The HR competency development program is carried out through training, workshops, and capacity building, both technical and non-technical, which are adjusted to the Company's Competency Model.

   Throughout 2025, IIGF provided employee training and development programs with a total of 5,162.5 training hours and an average of 31.67 hours per person. The total training participants in each training program can be referred to in this Annual Report in the chapter Business Support Aspects, section Employee Competency Development.

5. **Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan**
   Praktik ketenagakerjaan terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian remunerasi kepada karyawan menjadi komitmen Perseroan. Remunerasi diberikan berdasarkan klasifikasi jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi, dan

5. **Employee Remuneration and Welfare**
   The Company is committed to implementing best employment practices in accordance with applicable laws and regulations, including in the provision of employee remuneration. Remuneration is provided based on position classification, length of service,

prestasi individu, tanpa diskriminasi *gender*. Oleh karena itu, rasio remunerasi antara karyawan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama yaitu 1:1.

PT PII memastikan bahwa upah terendah untuk karyawan yang baru direkrut telah memenuhi ketentuan Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasi Perseroan. Pada tahun 2025, upah terendah untuk karyawan baru adalah Rp6,4 juta, lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Perseroan juga memberikan tunjangan bagi karyawan, seperti tunjangan jabatan, perumahan, komunikasi, transportasi, keagamaan, dan lain-lain, serta benefit berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebagai bagian dari bentuk remunerasi lainnya, PT PII memberikan hak cuti melahirkan selama 90 hari bagi karyawan perempuan yang akan melahirkan, serta memberikan kelonggaran bagi karyawan pria untuk mendampingi pasangan mereka selama proses melahirkan dengan cuti selama 5 (lima) hari. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2 (dua) karyawan perempuan dan 3 (tiga) karyawan pria memanfaatkan hak cuti ini, dan seluruhnya (100%) kembali bekerja dan diterima kembali setelah masa cuti berakhir.

Untuk karyawan dengan status magang, PT PII memberikan remunerasi berupa bantuan uang saku sebesar Rp150.000,00 per hari dan uang makan sebesar Rp30.000,00 per hari. Remunerasi ini diberikan kepada peserta magang dengan syarat menyertakan bukti pendukung berupa formulir dan absensi kehadiran. Pemberian remunerasi untuk peserta magang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

6. **Hubungan Industrial**

   Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku merupakan standar bagi Perseroan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengaturan hubungan antara Perseroan dan karyawan yang tercermin dalam Peraturan Perusahaan Tahun 2024-2026. Peraturan ini menjadi pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta prosedur yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam menjaga hubungan yang baik dan produktif.

workload, location, and individual achievement, without gender discrimination. Therefore, the remuneration ratio between female and male employees in the same position is 1:1.

IIGF ensures that the lowest wage for newly recruited employees fulfills the applicable Minimum Wage provisions in the area where the Company operates. In 2025, the lowest wage for new employees was Rp6.4 million, higher than the minimum wage set by the government. Furthermore, the Company also provides benefits to employees, such as allowances for position level, housing, communication, transportation, religious holiday, etc., as well as other benefits in the form of regular medical check-ups.

As part of other forms of remuneration, IIGF provides 90 days of maternity leave for female employees who are about to give birth, and provides 5 (five) days of leave for male employees to accompany their spouses during the birth process. Throughout 2025, 2 (two) female employees exercised their rights to maternity leave and 3 (three) male employees exercised their rights to paternity leave, all of whom (100%) returned to work and were accepted back after the leave period ended.

In terms of interns, IIGF provides remuneration in the form of pocket money assistance of Rp150,000 per day and meal allowance of Rp30,000 per day. This remuneration is provided to the interns subject to supporting evidence in the form of completed forms and attendance. The provision of remuneration for internship is in accordance with the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Domestic Apprenticeship.

6. **Industrial Relations**

   Creating harmonious industrial relations in accordance with applicable regulations is a standard for the Company. This commitment is actualized through the regulation of the relationship between the Company and employees, as reflected in the 2024-2026 Company Regulation. This regulation is a clear guideline regarding rights, obligations, and procedures that shall be complied with by both parties in maintaining a good and productive relationship.

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan PT PII. Meskipun demikian, Perseroan tetap membuka ruang bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan permasalahan perburuhan secara langsung. Karyawan dapat mengakses berbagai media komunikasi internal yang disediakan oleh Perseroan, seperti saluran pengaduan atau forum diskusi, untuk menyampaikan permasalahan atau pendapat setiap karyawan. Dengan demikian, PT PII memastikan bahwa setiap isu yang timbul dapat diatasi dengan cara yang transparan dan konstruktif, tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan dan dialog yang positif antara Perseroan dan karyawan.

As of the end of 2025, IIGF had no trade union. Nevertheless, the Company continues to provide open space for employees to convey their aspirations and resolve labor issues directly. Employees can access various internal communication media provided by the Company, such as complaint channels or discussion forums, to convey problems or opinions. Thus, IIGF ensures that any issues that arise can be resolved transparently and constructively, without ignoring the principle of openness and positive dialogue between the Company and employees.

**7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan**

Keselamatan dan kesehatan karyawan serta komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna mendukung kelancaran operasional menjadi prioritas Perseroan. Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus ditingkatkan untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Perseroan telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk melindungi serta menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di area kerja, dengan tujuan mencapai target kecelakaan nihil (*zero accident*) di lingkungan kerja.

**7. Employee Occupational Health and Safety (OHS)**

The Company prioritizes the health and safety of its employees and is committed to creating a healthy and safe working environment to support the smooth operations. The Occupational Health and Safety (OHS) culture keeps being improved to ensure a safe, healthy, and productive working environment. The Company has established policies and strategies to protect and ensure the safety of every employee and other people in the workplace, to achieve zero accident target in the working environment.

PT PII menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk akses kepada dokter yang dapat dihubungi karyawan untuk penanganan medis segera, baik untuk karyawan itu sendiri maupun anggota keluarga mereka. Selain menyediakan ruang olahraga yang dilengkapi dengan peralatan seperti *treadmill* dan alat angkat beban untuk mendukung peningkatan kesehatan karyawan, Divisi *Human Capital and Organization Development* (HCOD) melaksanakan berbagai kegiatan olahraga di lingkungan Perseroan, seperti yoga, *hiking*, zumba, *pound fit*, badminton, basket, *mini soccer*, tenis lapangan, dan golf, dengan seluruh biaya peralatan dan sewa lapangan ditanggung oleh Perseroan. PT PII juga menyelenggarakan *Medical Checkup* tahunan sesuai dengan ketentuan Perseroan.

IIGF provides various health facilities, including access to doctors that employees can contact for immediate medical treatment, for the employees themselves and their family members. In addition to providing an exercise room equipped with equipment such as treadmills and weights to support employee health improvement, the Human Capital and Organization Development Division conducts various sports within the Company, such as yoga, hiking, zumba, pound fit, badminton, basketball, mini soccer, tennis court, and golf, with all equipment and court rental costs borne by the Company. IIGF also organizes an annual Medical Checkup, as stated in the Board of Directors' Decision Letter.

Pada tahun 2025 PT PII telah menyusun Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengatur mengenai komitmen dan kerangka penerapan SMK3 PT PII. Selain itu, PT PII juga telah memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat menjadi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha yang lebih komprehensif, yang mencakup identifikasi risiko, perencanaan bencana,

In 2025, IIGF has drafted a Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) which covers the commitment and implementation structure of OHSMS in IIGF. Furthermore, IIGF has updated its Emergency Response SOPs into a more comprehensive Business Continuity Management System, which covers risk identification, disaster planning, emergency handling, and post-disaster recovery. These initiatives

penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan menghadapi tantangan secara efektif, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. PT PII mengapresiasi dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak terkait dan yakin bahwa langkah-langkah ini akan membawa dampak positif bagi ekosistem kerja Perseroan.

demonstrate the Company's commitment to protecting employees' welfare and dealing with challenges effectively, supporting the creation of a safe, healthy, and productive working environment. IIGF appreciates the continued support of all relevant parties and believes that these efforts have a positive impact on the Company's work ecosystem.

## Penanganan Pengaduan Pegawai
Employee Complaint Management

PT PII menyediakan saluran pengaduan bagi karyawan sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran terkait berbagai aspek operasional Perseroan. Setiap karyawan dapat mengajukan pengaduan langsung kepada atasan mereka untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, karyawan juga dapat menggunakan saluran pengaduan resmi yang tersedia untuk menyampaikan masalah atau keluhan mereka.

IIGF provides a complaint facility to employees as a forum for submitting complaints, feedback, or suggestions related to various aspects of the Company's operations. All employees can submit a complaint directly to their supervisor for immediate follow-up. Furthermore, employees can also use the official complaint channels available to convey their problems or complaints.

Pada tahun 2025 tercatat tidak terdapat pengaduan yang berindikasi pelanggaran terhadap pengelolaan ketenagakerjaan yang dilakukan, sehingga Perseroan tidak mendapatkan denda ataupun sanksi atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan terkait pengelolaan ketenagakerjaan.

In 2025, there were no complaints indicating any violations of employment management practices. Therefore, the Company was not subject to any fines or sanctions for non-compliance with laws and/or regulations related to employment management.

## Peningkatan Layanan Kepada Pelanggan
Service Improvement to Customers

Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik serta setara kepada seluruh pelanggan. PT PII berfokus pada pengembangan dan inovasi produk serta layanan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

The Company is committed to continuously providing the best and equal products and services to all customers. IIGF focuses on continuous development and innovation of products and services to support the achievement of sustainable development goals.

Saat ini, PT PII telah memberikan penjaminan kepada 26 kategori sektor untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Sejalan dengan itu, PT PII berupaya menghadirkan produk dan layanan yang tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga berorientasi pada pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui layanan terbaik yang memastikan kualitas, keberlanjutan, serta dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

To date, IIGF has provided guarantees to 26 sector categories to support the acceleration of Indonesia's infrastructure development. In line with that, IIGF strives to provide products and services that not only provide social benefits to the community but are also oriented towards environmental preservation. This is realized through the best services that ensure quality, sustainability, and a positive impact on the environment and community.

PT PII berupaya memenuhi kebutuhan dari berbagai segmen pelanggan sesuai dengan perkembangan lini usaha dan portofolio proyek yang didukung oleh Perseroan. Upaya utama PT PII adalah memberikan pelayanan terbaik yang bermanfaat bagi setiap pelanggan secara profesional, baik dalam sikap maupun respon yang diberikan oleh Perseroan dan segenap jajarannya. Sejalan dengan komitmen tersebut, PT PII memastikan bahwa tidak ada produk dan layanan yang ditarik kembali, sebagai bagian dari jaminan kualitas dan kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas utama Perseroan.

IIGF strives to meet the needs of various customer segments in accordance with the development of business lines and project portfolios supported by the Company. IIGF's main effort is to provide the best and most useful service for each customer in a professional manner, both in the attitude and response given by the Company and all its staff. In line with this commitment, IIGF ensures that no products or services are recalled, as part of the quality assurance and customer satisfaction, which is the Company's top priority.

## Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan

Equitable Fulfillment of Service Quality to Customers

Perseroan berkomitmen menjunjung kesetaraan pada pelayanan yang adil, konsisten dan berkualitas pada semua jenis layanan yang diberikan tanpa memandang perbedaan tertentu atau diskriminasi perlakuan pada pelanggan. Sehingga melalui pendekatan ini, PT PII memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan akan selalu diperlakukan secara profesional dan berintegritas sehingga terwujud hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik dari sisi badan usaha pemerintah, maupun mitra lainnya.

The Company is committed to upholding equality in fair, consistent, and quality service across all types of services provided, regardless of any differences or discrimination in customer treatment. Through this approach, IIGF ensures that every stakeholder is always treated professionally and with integrity, thus establishing mutually beneficial and sustainable relationships, both with government entities and other partners.

Bagi PT PII, memberikan perlakuan yang setara kepada pelanggan merupakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, serta dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada pelanggan.

For IIGF, providing equal treatment to customers is an obligation of business owners, as stipulated in the Consumer Protection Law, to treat or serve consumers properly, honestly, and without discrimination. The explanation of this article states that business owners are prohibited from discriminating against consumers in providing services, and are prohibited from discriminating in terms of the service quality offered to customers.

## Transparansi Informasi Produk dan Layanan

Transparency of Products and Services Information

Memberikan informasi yang jelas, akurat, transparan merupakan komitmen PT PII. Setiap pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi lengkap terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui situs web yang beralamat di www.ptpii.co.id. Sejalan dengan itu, Perseroan juga menyediakan sarana/media yang dapat diakses oleh pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya yang ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dengan menghubungi *call center* Perseroan di +6221 57950550 atau melalui email Perseroan yang beralamat di info@iigf.co.id.

IIGF is committed to providing clear, accurate, and transparent information. Every stakeholder can find complete information regarding the products and services offered by the Company via the website at www.ptpii.co.id. In line with that, the Company also provides a platform accessible to customers or other stakeholders who want to obtain more comprehensive information, by contacting the Company's call center at +6221 57950550 or via the Company's email address at info@iigf.co.id.

## Pengelolaan Pengaduan Pelanggan
Customer Complaint Management

Sebagai bagian dari upaya Perlindungan Pelanggan, Perseroan telah menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Divisi Corporate Secretary & Communication. Penyampaian keluhan, saran atau kritik dapat disampaikan melalui alamat pengaduan ke:

As part of the Customer Protection efforts, the Company provides a channel to submit complaints to be addressed to the Corporate Secretary & Communication Division. Complaints, suggestions, or criticisms can be submitted via the complaint media to:

PT PII PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR Guarantee & Infrastructure

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

Capital Place, 7-8 Floor Jl. Gatot Subroto
No.Kav 18, RT.6/RW.1, Kuningan Barat
Kecamatan Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

## Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

PT PII secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan, yaitu *stakeholders survey* kepada vendor/rekanan Perseroan, untuk memperoleh masukan terkait pengetahuan dan persepsi mereka terhadap kinerja Perseroan. Survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya PT PII untuk lebih memahami pandangan para pemangku kepentingan mengenai layanan yang diberikan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Melalui interaksi yang terstruktur ini, PT PII dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengukur tingkat kepuasan, serta terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disediakan.

IIGF regularly conducts customer satisfaction survey, specifically stakeholder survey to the Company's vendors/ partners, to obtain input regarding their knowledge and perception of the Company's performance. This survey is conducted as part of IIGF's efforts to better understand stakeholders' views on the services provided and the Company's overall performance. Through these structured interaction, IIGF can identify areas for improvement, measure satisfaction levels, and continuously improve the quality of products and services provided.

Pada tahun 2025, indeks pengetahuan rata-rata *stakeholders* PT PII sebesar 3,67 dan masuk dalam kategori "Teredukasi". Sementara itu rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *stakeholders* sebesar 4,44 atau masuk dalam kategori "Sangat Positif". Jika dirangkum, maka indeks pengetahuan dan persepsi kinerja dari para *stakeholders* PT PII adalah sebesar 4,05 dari skala 5 yang berada pada level "*Satisfactory*".

In 2025, the average knowledge index of IIGF's stakeholders was 3.67 or "Educated". Meanwhile, the average perception of IIGF's performance among stakeholders was 4.44 or "Very Positive". In summary, the knowledge index and perceived performance of IIGF was 4.05 out of 5, or "Satisfactory".

## Inisiatif Program Peningkatan Kepuasan *Stakeholders*

Stakeholders Satisfaction Improvement Program Initiatives

Untuk memastikan tingkat kepuasan *stakeholders* tetap berada pada level "*Satisfactory*", PT PII telah mengimplementasikan berbagai inisiatif program peningkatan kepuasan pemangku kepentingan yang dirancang secara khusus untuk merespons kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Selain berfokus pada peningkatan komunikasi, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan, pada tahun 2025 Perseroan juga melaksanakan berbagai program strategis untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders*, dengan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan di industri infrastruktur.

IIGF has implemented various stakeholder satisfaction improvement program initiatives specifically designed to respond to the stakeholders' needs and expectations to ensure that the level of stakeholder satisfaction remains at the "Satisfactory" level. In addition to focusing on improving communication, transparency, and quality of services provided, in 2025 the Company implemented various strategic programs to meet stakeholder expectations, by continuously innovating and adjusting to the dynamics of needs and developments in the infrastructure industry.




## Penjaminan Proyek Berwawasan Lingkungan

Green Project Guarantee

Sebagai bagian dari mandatnya selaku SMV Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT PII berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta pemerataan pembangunan di Indonesia. PT PII juga aktif mendukung pemerintah dalam mewujudkan program SDGs untuk pembangunan yang lebih baik di seluruh negeri. Salah satu langkah yang diambil PT PII dalam mendukung pencapaian SDGs adalah dengan mengembangkan portofolio produk dan layanan berkelanjutan, seperti Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan (KUBL), guna mempercepat proyek-proyek yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

As part of its mandate as SMV of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, IIGF is committed to supporting sustainable infrastructure development and equitable development in Indonesia. IIGF also actively supports the government in realizing SDGs program for better development across the country. One IIGF step to support the achievement of SDGs is by developing a portfolio of sustainable products and services, such as Green Business Activities (KUBL), to accelerate environmentally friendly and sustainable projects.

Dalam memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur, PT PII menerapkan *safeguarding* potensi dampak lingkungan, sosial, dan pengadaan lahan Proyek yang dijamin dengan melakukan evaluasi Usulan Penjaminan berdasarkan *Environmental and Social*

In providing guarantees for infrastructure projects, IIGF applies safeguarding to the potential environmental, social, and land acquisition impacts of the guaranteed projects by conducting feasibility evaluations based on IIGF's Environmental and Social Management Framework

*Management Framework* ("ESMF") PT PII. Perseroan turut melakukan peningkatan kualitas proses evaluasi kelayakan penjaminan dengan mengintegrasikan risiko perubahan iklim (*climate risk*) dalam kerangka kerja *appraisal* proyek, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan *de-risking* proyek terhadap potensi risiko fisik maupun risiko transisi akibat perubahan iklim. Selain itu, untuk proyek-proyek yang menerima dukungan Pemerintah seperti penjaminan dengan skema KBPU maupun non-KBPU, PT PII juga menerapkan evaluasi kelayakan sesuai dengan standar *Environmental, Social, and Governance* ("ESG") yang mengacu pada kerangka kerja dan manual Kementerian Keuangan. Hingga tahun 2025, PT PII telah menerapkan ESG *Assessment* dalam proses evaluasi penjaminan untuk proyek sektor transportasi (bandara), rumah sakit, dan perumahan.

("ESMF"). The Company also improves the quality of guarantee feasibility evaluation process by integrating climate change risk into the project Appraisal framework, thereby accommodating the need for project de-risking against potential physical and transition risks due to climate change. Furthermore, for projects receiving government support such as PPP-scheme and non-PPP scheme guarantees, IIGF also implements feasibility evaluations in accordance with Environmental, Social, and Governance ("ESG") standards, which refer to the Ministry of Finance's framework and manual. As of 2025, IIGF implemented ESG Assessment in guarantee evaluation process for projects in transportation (airport), hospital, and housing sectors.

PT PII sebagai salah satu pemegang mandat fasilitas pendampingan PJPK dalam tahap penyiapan proyek, atau biasa dikenal sebagai *Project Development Facility* (PDF), turut melakukan kajian penerapan aspek ESG dalam proyek-proyek yang disiapkan dengan dukungan skema PDF. Kajian aspek ESG disusun oleh tim Inisiasi Bisnis PT PII selaku pelaksana fasilitas PDF dengan panduan Kerangka Kerja dan Manual ESG Kementerian Keuangan, di antaranya yaitu menilai topik materialitas proyek dengan *Materiality Assessment Tool*. Sejauh ini, tim Inisasi Bisnis PT PII telah melakukan pendampingan penyiapan proyek untuk proyek infrastruktur di sektor transportasi (bandara), rumah sakit, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan pendidikan (riset).

IIGF, as one mandated holder of the Project Development Facility (PDF) assistance facility for GCA in the project preparation stage, also conducts studies on the implementation of ESG aspects in projects prepared under PDF scheme. ESG assessment is prepared by IIGF's Business Initiation team, as the executor of PDF facility, in accordance with the Ministry of Finance's ESG Framework and Manual, including the assessment of project materialityby by using the Materiality Assessment Tool. To date, IIGF's Business Initiation team has provided project preparation assistance for infrastructure projects in transportation (airport), hospital, Drinking Water Management System SPAM, and education (research) sectors.

PT PII juga telah melakukan penjaminan terhadap proyek-proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, akses energi terbarukan, stasiun pengisian kendaraan listrik, serta proyek-proyek konservasi energi untuk penerangan jalan umum di beberapa wilayah di Indonesia

IIGF also provided guarantees for renewable energy projects, such as hydroelectric power plants, geothermal power plants, renewable energy access, electric vehicle charging stations, and energy conservation projects for public street lighting in several regions in Indonesia.

Hingga tahun 2025, PT PII telah melakukan penjaminan untuk 10 proyek berwawasan lingkungan, di antaranya Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lombok Barat yang dilaksanakan dengan skema KPBU. Proyek APJ Madiun merupakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik lampu penerangan jalan yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. Penjaminan untuk Proyek APJ Madiun dimulai sejak September 2022

As of 2025, IIGF provided guarantees for 10 green projects, including Madiun Street Lighting Project (APJ) and West Lombok Street Lighting Project, implemented under PPP scheme. The Madiun APJ Project is the construction, operation, and maintenance of 7,459 street lighting points spread across National Roads, Main Regency Roads and Urban Roads. The guarantee for the Madiun APJ Project began in September 2022 with a guarantee duration of 10 years until 2032. Meanwhile, the West Lombok PJU

dengan durasi penjaminan selama 10 tahun hingga tahun 2032. Sementara Proyek PJU Lombok Barat mencakup pembangunan tiang baru sebanyak 3.699 titik dan pemanfaatan tiang milik PLN (*retrofit*) sebanyak 8.306 + 330 titik. Penjaminan untuk Proyek PJU Lombok Barat dimulai sejak Oktober 2023 dengan durasi penjaminan selama 11 tahun hingga tahun 2033. Kedua proyek juga meliputi penggantian lampu dari lampu konvensional menjadi lampu LED yang memiliki daya hidup lebih lama, serta menggunakan teknologi hemat energi. Berdasarkan evaluasi kelayakan dokumen Proyek, pembangunan APJ Madiun dan PJU Lombok Barat berpotensi menurunkan konsumsi energi listrik, dimana APJ Madiun dapat menghasilkan efisiensi sebesar 35% dan PJU Lombok Barat sebesar 74% per tahun. Selain itu, kedua proyek merupakan upaya konservasi energi dan dapat berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama untuk Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan).

Project includes the construction of 3,699 new poles and the utilization of PLN's poles (retrofit) of 8,306 + 330 points. The guarantee for the West Lombok PJU Project began in October 2023 with a guarantee duration of 11 years until 2033. The two projects also include replacing lamps from conventional lamps to LED lamps that have a longer lifespan, and use energy-saving technology. Based on the feasibility evaluation of Project documents, the construction of Madiun APJ and West Lombok PJU has the potential to reduce electricity consumption, where the Madiun APJ can produce an efficiency of 35% and the West Lombok PJU by 74% per year. Furthermore, the two projects are energy conservation efforts and can contribute to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities).

PT PII turut mendukung Kebijakan Energi Nasional untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) melalui penjaminan skema Non-KPBU untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik energi terbarukan. Pada tahun 2025, PT PII melakukan penjaminan kredit untuk sejumlah proyek EBT, salah satunya penjaminan Additional Loan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 PT Geo Dipa Energi. Penjaminan PT PII untuk Proyek PLTP Dieng-2 telah dimulai sejak Agustus 2020 melalui penugasan *Direct Lending* untuk PLTP Dieng-2 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan PLTP Patuha-2 di Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing 55 MW milik PT Geo Dipa Energi. Di tahun 2025, PT PII kembali menjamin pinjaman tambahan dari ADB untuk PT Geo Dipa Energi dalam rangka penyelesaian pembangunan PLTP Dieng-2.

IIGF supports the National Energy Policy to increase the mix of new and renewable energy (NRE) through non-PPP guarantee schemes for the construction and development of renewable energy electricity infrastructure. In 2025, IIGF provided loan guarantees for several NRE projects, including the Additional Loan guarantee for Geothermal Power Plant (GPP) Dieng-2 Project of PT Geo Dipa Energi. IIGF's guarantee for GPP Dieng-2 Project began in August 2020 through Direct Lending assignments for the GPP Dieng-2 in Wonosobo Regency, Central Java, and the GPP Patuha-2 on Mount Patuha, Bandung Regency, West Java, each with a capacity of 55 MW, owned by PT Geo Dipa Energi. In 2025, IIGF again guaranteed an additional loan from ADB for PT Geo Dipa Energi in order to complete the construction of GPP Dieng-2.

Selain itu, PT PII mendukung upaya PT PLN dalam melaksanakan proyek infrastruktur berbasis green energy dan melakukan penjaminan untuk tiga (3) program EBT PT PLN, yaitu Program Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (AICET) dengan Pembiayaan ADB, Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification Phase*-1 dan *Phase*-2 (ISLE-1 dan ISLE-2), dan Program Indonesia-*Electricity Network Transformation* (I-ENET). Program AICET merupakan program pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang mencakup infrastruktur PLTS, PLTB, dan *control center* di Sumatera dan Sulawesi, serta

Furthermore, IIGF supports PT PLN's efforts in implementing green energy-based infrastructure projects and provides guarantees for three (3) PT PLN NRE programs, namely Program Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (AICET) with ADB Financing, Indonesia Sustainable Least-cost Electrification Program Phase-1 and Phase-2 (ISLE-1 and ISLE-2), and Indonesia-Electricity Network Transformation (I-ENET) Program. The AICET Program is an electricity infrastructure development program that includes SoPP, WPP, and control center infrastructure in Sumatra and Sulawesi, as well as the construction of

pembangunan gardu induk ekstensi di wilayah Jawa – Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu, Program ISLE PT PLN merupakan program peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Terakhir, Program I-ENET adalah program peningkatan penyediaan dan keandalan pasokan listrik, serta upaya integrasi sumber daya energi terbarukan yang terdistribusi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Secara keseluruhan, nilai cakupan penjaminan PT PII terhadap proyek berwawasan lingkungan, termasuk penjaminan dengan skema KPBU maupun non-KPBU (penjaminan kredit), adalah sebesar Rp 13,03 Triliun.

extension substations in Java-Bali, Sumatra, and Sulawesi regions. Meanwhile, PT PLN's ISLE Program is a program to increase the capacity of renewable energy generators in Kalimantan and Sumatra regions. Finally, the I-ENET Program is a program to increase the provision and reliability of electricity supply, as well as efforts to integrate distributed renewable energy resources in Java, Madura, and Bali regions. Overall, the total value of IIGF's guarantee coverage for green projects, including guarantees under both PPP and non-PPP schemes (loan guarantees), is Rp13.03 trillion.

PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan turut mendukung *roadmap* penerapan keuangan berkelanjutan melalui implementasi standar ESG Kementerian Keuangan. Di tahun 2025, pemerintah menyiapkan sejumlah proyek KPBU yang penyiapannya didukung melalui skema *Project Development Facility* (PDF), salah satunya adalah Proyek Pengembangan Bandara Singkawang. Penyiapan Proyek Bandara Singkawang yang merupakan proyek *brownfield* didukung dengan fasilitas PDF yang ditugaskan kepada PT PII. Proyek bandara Singkawang berlokasi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dan rencananya akan dilaksanakan dengan konsep *green airport*. Proyek tersebut dibangun untuk mengakomodasi layanan transportasi udara di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Proyek tersebut rencananya dibangun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan standar ESG dalam penyiapannya Dalam melakukan evaluasi kelayakan proyek atas usulan penjaminan, PT PII melalui Divisi *Project Appraisal* (PAP), *Environmental and Social* (ENS), dan *Legal and Compliance* (LAC) turut memperhatikan analisis aspek ESG proyek sesuai dengan manual Kementerian Keuangan. Hal tersebut merefleksikan komitmen PT PII dalam mendukung ekosistem pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.

IIGF, as one of the Ministry of Finance's SMV, supports the roadmap for implementing sustainable finance through the implementation of the Ministry's ESG standards. In 2025, the government prepared several PPP projects, of which their preparation was supported through the Project Development Facility (PDF) scheme. These includes Singkawang Airport Development Project a brownfield project, supported by PDF facility assigned to IIGF. The Singkawang Airport project is located in Singkawang, West Kalimantan, and is planned to be implemented with a green airport concept. The project is built to accommodate air transportation services in Singkawang and the surrounding area, thus increasing accessibility and economic growth. The project was planned to be constructed with due observance of sustainability and ESG standards. In evaluating the project's feasibility for guarantee proposals, IIGF, through its Project Appraisal (PAP), Environmental and Social (ENS), and Legal and Compliance (LAC) Divisions, also considers ESG analysis of the project in accordance with the Ministry of Finance's manual. This reflects IIGF's commitment to supporting a sustainable infrastructure financing ecosystem.

PT PII yakin bahwa melalui penjaminan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan mengutamakan kesejahteraan sosial dan ramah lingkungan, tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IIGF is confident that by guaranteeing innovative infrastructure projects that prioritize social welfare and are environmentally friendly, it shall not only support national economic growth, but also create a strong foundation for a more sustainable, inclusive, and prosperous future for all Indonesians.



# Laporan Keuangan

## Financial Statements



**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER/*DECEMBER* 2025**

PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andre Permana
   Alamat Kantor : Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
   Alamat Rumah : Grand Bintaro Garden Residence Blok D.4 A, RT 002, RW 001, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan
   Nomor Telepon : 021- 5795 0550
   Jabatan : Plt. Direktur Utama

2. Nama : Donny Hamdani
   Alamat Kantor : Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
   Alamat Rumah : Jl. Duren Sawit Blok K2/10 RT 012 RW 011, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur
   Nomor Telepon : 021- 5795 0550
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

***PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)***

***DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2025 AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025***

*We, the undersigned:*

1. *Name* : *Andre Permana*
   *Office address* : *Capital Place Office Tower, 7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710*
   *Residential address* : *Grand Bintaro Garden Residence Blok D.4 A, RT 002, RW 001, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan*
   *Telephone* : *021- 5795 0550*
   *Title* : *Acting President Director*

2. *Name* : *Donny Hamdani*
   *Office address* : *Capital Place Office Tower, 7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710*
   *Residential address* : *Jl Duren Sawit Blok K2/10 RT 012 RW 011, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur*
   *Telephone* : *021- 5795 0550*
   *Title* : *Finance Director*

*declare that:*

1. *we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);*
2. *the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);*
   b. *the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. *we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).*

*Thus this statement is made truthfully.*

Jakarta, 2 Maret/*March* 2026

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/
*For and on behalf of the Board of Directors*

**Andre Permana**
Plt. Direktur Utama/
*Acting President Director*

**Donny Hamdani**
Direktur Keuangan/
*Finance Director*

Address : Capital Place 7-8th Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia
Phone : +62 21 5795 0550 | Fax : +62 21 5795 0040 | Email : info@iigf.co.id | Website : www.iigf.co.id

pwc

Laporan/*Report* No. 00221/2.1457/AU.1/09/1124-3/1/III/2026

**Laporan auditor independen**
**Kepada para Pemegang Saham**

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

***Independent auditors' report***
***To the Shareholders of***

***PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)***

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

***Opinion***

*We have audited the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

***Basis for opinion***

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024

**Informasi lain**

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung inkonsistensi material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Other information***

*Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.*

*Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.*

*In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.*

***Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

pwc

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.*

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan**

***Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami.

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

*The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

pwc

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

Jakarta,
2 Maret/*March* 2026

**Jimmy Pangestu, S.E., CPA**
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1124

## PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

### Lampiran - 1 - *Schedule*

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2025 | Catatan/ *Notes* | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | ***ASSETS*** |
| Kas dan setara kas | 7,286,275,750 | 5 | 2,030,081,757 | *Cash and cash equivalents* |
| Investasi | 9,884,203,091 | 6 | 14,423,560,381 | *Investments* |
| Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 94.022.470 (2024: Rp 57.688.580) | 475,276,683 | 7 | 402,385,200 | *Account receivables – net of allowance for impairment losses of Rp 94,022,470 (2024: Rp 57,688,580)* |
| Piutang lainnya | 10,467,439 | | 11,935,434 | *Other receivables* |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 1,504,824 | | 1,099,038 | *Prepaid expenses and advances* |
| Aset tetap | 10,427,124 | 8 | 9,619,207 | *Fixed assets* |
| Aset hak-guna | 11,446,272 | 9 | 28,615,680 | *Right-of-use assets* |
| Aset takberwujud | 4,743,816 | 10 | 4,923,545 | *Intangible assets* |
| Beban tangguhan | 3,928,446 | 11 | 2,837,247 | *Deferred expenses* |
| Pajak dibayar dimuka | 9,148,525 | 13a | 9,169,276 | *Prepaid income tax* |
| Aset pajak tangguhan | 13,875,508 | 13d | 58,909,855 | *Deferred tax asset* |
| Uang jaminan yang dapat dikembalikan | 5,490,415 | | 5,385,039 | *Refundable deposits* |
| **JUMLAH ASET** | 17,716,787,893 | | 16,988,521,659 | ***TOTAL ASSETS*** |
| **LIABILITAS** | | | | ***LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 14,002,393 | 12 | 6,731,077 | *Account payables* |
| Utang pajak | 2,843,815 | 13b | 1,531,600 | *Taxes payable* |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain | 76,416,987 | 14 | 117,924,523 | *Accrued expenses, provisions and other payables* |
| Pendapatan tangguhan | 32,869,530 | 15 | 71,794,931 | *Unearned income* |
| Liabilitas sewa pembiayaan | 13,244,378 | 16 | 31,198,399 | *Finance lease liabilities* |
| Pinjaman penerusan | 52,701,112 | 17 | 54,586,445 | *Two-step loans* |
| Liabilitas imbalan kerja | 39,282,522 | 18 | 32,180,991 | *Employee benefits obligation* |
| **JUMLAH LIABILITAS** | 231,360,737 | | 315,947,966 | ***TOTAL LIABILITIES*** |
| **EKUITAS** | | | | ***EQUITY*** |
| Modal saham - modal dasar, 20.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 10.655.000 lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham | 10,655,000,000 | 19 | 10,655,000,000 | *Share capital - authorised, 20,000,000 shares - issued and paid 10,655,000 shares, with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share* |
| Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 189,024,480 | | 85,062,184 | *Unrealised gain from financial assets at fair value through other comprehensive income* |
| Keuntungan aktuarial, setelah pajak | 2,936,422 | | 3,852,899 | *Gain from actuarial, net of tax* |
| Saldo laba | | | | *Retained earnings* |
| Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib | 352,814,126 | 21 | 306,270,126 | *appropriated - statutory reserve* |
| Belum ditentukan penggunaannya | 6,285,652,128 | | 5,622,388,484 | *Unappropriated* |
| **JUMLAH EKUITAS** | 17,485,427,156 | | 16,672,573,693 | ***TOTAL EQUITY*** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | 17,716,787,893 | | 16,988,521,659 | ***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes form an integral part of these financial statements.*

## PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

### Lampiran - 2 - *Schedule*

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2025 | Catatan/ *Notes* | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Pendapatan** | | | | ***Revenues*** |
| Pendapatan penjaminan | 292,584,422 | 22 | 310,054,107 | *Revenue from guarantee* |
| Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi | 55,393,409 | 22 | 70,265,155 | *Revenue from project preparation and transaction advisory* |
| Pendapatan pengelolaan dana | 1,118,103,290 | 22 | 1,091,915,052 | *Income from investments* |
| Pendapatan bunga regres | 10,207,925 | 22 | 13,625,092 | *Interest Income from recourse* |
| Pendapatan lainnya | 1,915,754 | 22 | 1,071,180 | *Other income* |
| Jumlah pendapatan | 1,478,204,800 | | 1,486,930,586 | *Total revenues* |
| **Beban usaha** | | | | ***Operating expenses*** |
| Beban pajak final | (166,201,263) | 13c | (158,158,364) | *Final tax expense* |
| Umum dan administrasi | (131,719,702) | 23 | (128,552,881) | *General and administrative* |
| Penjaminan | (90,589,192) | 23 | (87,923,483) | *Guarantee* |
| Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi | (47,809,924) | 23 | (61,441,679) | *Project preparation and transaction advisory* |
| Inisiasi bisnis | (16,170,859) | 23 | (20,129,272) | *Business initiation* |
| Pengembangan usaha | (38,977,238) | 23 | (38,665,474) | *Business development* |
| Kerugian penurunan nilai | (36,333,890) | 7 | (38,913,580) | *Impairment losses* |
| Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan) | (5,549,658) | | (7,005,772) | *Interest expense (including finance lease interest)* |
| Penyusutan | (5,041,580) | 8 | (4,702,176) | *Depreciation* |
| Amortisasi | (2,291,207) | 10 | (1,963,944) | *Amortisation* |
| Keuntungan kurs, bersih | 166,489 | | 166,542 | *Foreign exchange gain, net* |
| Penghasilan keuangan, kotor | 3,247,411 | | 1,986,883 | *Finance income, gross* |
| Lain-lain | 342,298 | | 397,970 | *Others* |
| Jumlah beban usaha | (536,928,315) | | (544,905,230) | *Total operating expenses* |
| **Laba sebelum pajak penghasilan** | 941,276,485 | | 942,025,356 | ***Profit before income tax*** |
| Beban pajak penghasilan | (45,292,841) | 13c | (11,145,678) | *Expense tax benefit* |
| **Laba tahun berjalan** | 895,983,644 | | 930,879,678 | ***Profit for the year*** |
| **Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:** | | | | ***Other comprehensive income for the year:*** |
| Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | *Items that will be reclassified subsequently to profit and loss:* |
| Keuntungan/(kerugian) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | 103,962,296 | | (56,945,416) | *Gain/(loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income for the year* |
| | 103,962,296 | | (56,945,416) | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | *Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss:* |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja | (1,174,971) | 18 | 3,851,606 | *Remeasurement from post-employment benefits obligation* |
| Pajak penghasilan terkait | 258,494 | 13d | (847,353) | *Related income tax* |
| | (916,477) | | 3,004,253 | |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak | 103,045,819 | | (53,941,163) | *Other comprehensive income/ for the year, net of tax* |
| **Total laba komprehensif tahun berjalan** | 999,029,463 | | 876,938,515 | ***Total comprehensive income for the year*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes form an integral part of these financial statements.*

## PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

### Lampiran - 3 - *Schedule*

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY***
***FOR THE YEAR ENDED***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | Modal saham/ *Share capital* | Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealised gain/ (loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income* | Keuntungan aktuarial, setelah pajak/ *Actuarial gain net of tax* | Saldo laba/*Retained earnings* | | Jumlah/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ *Appropriated - statutory reserve* | Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* | | |
| **Saldo 1 Januari 2024** | | 10,655,000,000 | 142,007,600 | 848,646 | 264,478,126 | 4,900,465,806 | 15,962,800,178 | ***Balance at 1 January 2024*** |
| Pencadangan saldo laba | 21 | - | - | - | 41,792,000 | (41,792,000) | - | *Appropriation of retained earnings* |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan: | | | | | | | | *Comprehensive income for the year:* |
| - Laba tahun berjalan | | - | - | - | - | 930,879,678 | 930,879,678 | *Profit for the year -* |
| - Dividen | 20 | - | - | - | - | (167,165,000) | (167,165,000) | *Dividend -* |
| - Penghasilan komprehensif lain: | | | | | | | | *Other comprehensive income: -* |
| - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | - | (56,945,416) | - | - | - | (56,945,416) | *Financial assets at fair value through - other comprehensive income* |
| - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak | | - | - | 3,004,253 | - | - | 3,004,253 | *Remeasurement of post-employment - benefit liabilities, net of tax* |
| **Saldo 31 Desember 2024** | | 10,655,000,000 | 85,062,184 | 3,852,899 | 306,270,126 | 5,622,388,484 | 16,672,573,693 | ***Balance at 31 December 2024*** |
| Pencadangan saldo laba | 21 | - | - | - | 46,544,000 | (46,544,000) | - | *Appropriation of retained earnings* |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan: | | | | | | | | *Comprehensive income for the year:* |
| - Laba tahun berjalan | | - | - | - | - | 895,983,644 | 895,983,644 | *Profit for the year -* |
| - Dividen | 20 | - | - | - | - | (186,176,000) | (186,176,000) | *Dividend -* |
| - Penghasilan komprehensif lain: | | | | | | | | *Other comprehensive income: -* |
| - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | - | 103,962,296 | - | - | - | 103,962,296 | *Financial assets at fair value through - other comprehensive income* |
| - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak | | - | - | (916,477) | - | - | (916,477) | *Remeasurement of post-employment - benefit liabilities, net of tax* |
| **Saldo 31 Desember 2025** | | 10,655,000,000 | 189,024,480 | 2,936,422 | 352,814,126 | 6,285,652,128 | 17,485,427,156 | ***Balance at 31 December 2025*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes form an integral part of these financial statements.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 4 - *Schedule***

**LAPORAN ARUS KAS**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENT OF CASH FLOWS***
***FOR THE YEAR ENDED***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Arus kas dari aktivitas operasi** | | | | ***Cash flows from operating activities*** |
| Laba sebelum pajak penghasilan | | 941,276,485 | 942,025,356 | *Profit before income tax* |
| Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas: | | | | *Add items not affecting cash flows:* |
| - Beban penyusutan | 8 | 5,041,580 | 4,702,176 | *Depreciation expense* - |
| - Beban kerugian penurunan nilai | | 36,333,890 | 38,913,580 | *Impairment losses* - |
| - Beban amortisasi | 10 | 2,291,207 | 1,963,944 | *Amortisation expense* - |
| - Beban penyisihan imbalan kerja | 18 | 7,172,451 | 7,958,143 | *Expense from provision for employee benefits obligation* - |
| - Beban amortisasi aset hak guna | 9 | 17,169,408 | 17,228,322 | *Right-of-use assets amortisation expense* - |
| - Beban bunga sewa pembiayaan | | 1,724,503 | 3,078,519 | *Finance lease interest expense* - |
| - Beban amortisasi investasi | | (27,616,413) | (1,017,114) | *Amortisation of investment* - |
| Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi | | 983,393,111 | 1,014,852,926 | *Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities* |
| Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: | | | | *Changes in operating assets and liabilities* |
| (Kenaikan)/penurunan aset operasi: | | | | *(Increase)/decrease in operating assets:* |
| - Piutang usaha | | (109,225,373) | (113,723,991) | *Account receivables* - |
| - Piutang lainnya | | 1,467,995 | (491,080) | *Other receivables* - |
| - Biaya dibayar dimuka dan uang muka | | (405,786) | 2,007,185 | *Prepaid expenses and advances* - |
| - Beban tangguhan | | (1,091,199) | 1,496,561 | *Deferred expenses* - |
| - Pajak dibayar dimuka | | 20,751 | (4,138,995) | *Prepaid tax* - |
| (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: | | | | *(Decrease)/increase in operating liabilities:* |
| - Utang usaha | | 7,271,316 | (7,313,702) | *Account payables* - |
| - Utang pajak | | 1,312,215 | (2,314,208) | *Taxes payable* - |
| - Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain | | (41,507,536) | (44,744,387) | *Accrued expenses, provisions and other payables* - |
| - Pembayaran manfaat imbalan kerja | 18 | (1,245,891) | (2,451,817) | *Payment of employee benefit* - |
| - Pendapatan tangguhan | | (38,925,402) | (59,041,374) | *Unearned income* - |
| | | (182,328,910) | (230,715,808) | |
| **Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi** | | 801,064,201 | 784,137,118 | ***Net cash flow provided from operating activities*** |
| **Arus kas dari aktivitas investasi** | | | | ***Cash flows from investing activities*** |
| Penempatan investasi | | (2,154,117,000) | (8,916,640,000) | *Placement for investments* |
| Investasi jatuh tempo | | 6,825,053,000 | 10,230,800,000 | *Matured investments* |
| Pembelian aset tetap | 8 | (5,849,497) | (770,550) | *Acquisition of fixed assets* |
| Pembelian aset takberwujud | 10 | (2,111,478) | (2,600,364) | *Acquisition of intangible assets* |
| Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan | | (105,376) | (16,000) | *Refundable deposit* |
| **Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi** | | 4,662,869,649 | 1,310,773,086 | ***Net cash flow provided from investing activities*** |
| **Arus kas dari aktivitas pendanaan** | | | | ***Cash flows from financing activities*** |
| Pembayaran pinjaman penerusan | 17,27 | (1,885,333) | (540,241) | *Two-step loans payment* |
| Pembayaran dividen | 20 | (186,176,000) | (167,165,000) | *Dividend payment* |
| Pembayaran sewa | 27 | (19,678,524) | (18,610,859) | *Payment for lease* |
| **Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan** | | (207,739,857) | (186,316,100) | ***Net cash flow used in financing activities*** |
| **Kenaikan bersih kas dan setara kas** | | 5,256,193,993 | 1,908,594,104 | ***Net increase in cash and cash equivalents*** |
| **Kas dan setara kas awal tahun** | | 2,030,081,757 | 121,487,653 | ***Cash and cash equivalents at beginning of year*** |
| **Kas dan setara kas akhir tahun** | | 7,286,275,750 | 2,030,081,757 | ***Cash and cash equivalents at end of year*** |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes form an integral part of these financial statements.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/1 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Sesuai dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk:

a) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
b) Memberikan penjaminan Pemerintah *(sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
c) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

a) Memberikan penjaminan kewajiban finansial Pemerintah dalam skema perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") dalam proyek infrastruktur.
b) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah di bidang infrastruktur.
c) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.

## *1. GENERAL*

*PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 dated 27 January 2010.*

*In accordance with adjustment of Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to:*

*a) To provide sovereign guarantees in infrastructure sectors;*
*b) To provide sovereign guarantee for financing in other than infrastructure sectors based on the assignment from the Government; and*
*c) To conduct activities related to the implementation of sovereign guarantees and other activities related to the implementation of project development that support the national economy both centralised and regional.*

*In achieving its objective, the Company may do, among others:*

*a) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the Public Private Partnersip ("PPP") cooperation agreement in infrastructure projects.*
*b) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the infrastructure sector.*
*c) To provide guarantees for default risk of the State-Owned Enterprises ("SOEs") based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/2 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**1. UMUM** (lanjutan)

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain: (lanjutan)

d) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") dan/atau pemerintah daerah berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.
e) Memberikan penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial selain pinjaman dan surat utang/obligasi.
f) Memberikan penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
g) Memberikan jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitas perencanaan, penyiapan, dan penilaian kelayakan, atas proyek atau program, serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.
h) Kerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
i) Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
j) Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("BUPI") yang beroperasi sebagai suatu entitas "*single window*" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan memiliki dukungan pemenuhan kelayakan dan kapasitas oleh, bila diperlukan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral atau kombinasinya - untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

***1. GENERAL** (continued)*

*In achieving its objective, the Company may do, among others: (continued)*

*d) To provide guarantees for default risk of the Regional Owned Enterprises based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.*

*e) To provide guarantee for other financial risks to SOEs, Regional Owned Enterprises and/ or Enterprises based on the assignment and/or provision set by the Minister of Finance arising from obtaining financing or financial risk mitigation facilities other than loan and debt securities/bonds.*
*f) To provide guarantee to other business entities in accordance with the assignments and/or provisions set by the Minister of Finance.*
*g) To provide consulting services, providing informations, planning facilities, preparation, and feasibility assessment, on project or program, and other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.*
*h) Cooperation with other parties, including international financial institutions in implementation of guarantee provision.*
*i) Joint ventures or equity participation in other legal entities that have similar goals and objectives with the Company.*

*j) Other activities to achieve the goals and objectives of the Company.*

*The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). Guarantees provided by the Company have eligibility and capacity supported by, as necessary, the Government of Indonesia ("GOI"), a multilateral financing agency or a combination - for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/3 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**1. UMUM** (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

**1. *GENERAL*** *(continued)*

*The Company is domiciled in Indonesia, located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.*

*As at 31 December 2025 and 2024, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:*

| | **2025** | **2024** | |
|---|---|---|---|
| Komisaris Utama | Hadiyanto | Hadiyanto | *President Commissioner* |
| Komisaris | Ferry Irawan | Ferry Irawan | *Commissioner* |
| Komisaris | Bhimantara Widyajala[3)] | Ahmad Ghufron | *Commissioner* |
| Direktur Utama | -[1)] | Muhammad Wahid Sutopo | *President Director* |
| Direktur | Andre Permana[2)] | Andre Permana | *Director* |
| Direktur | Donny Hamdani | Donny Hamdani | *Director* |

1) Muhammad Wahid Sutopo diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 225 tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025.

2) Andre Permana ditunjuk sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-006/KOM/0725 pada tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-007/KOM/0825 pada tanggal 14 Agustus 2025.

3) Bhimantara Widyajala diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri keuangan (KMK) No. 369 Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2025.

*1) Muhammad Wahid Sutopo has been dismissed from his position as President director based on KMK No.225 of 2025, dated 15 July 2025.*

*2) Andre Permana was appointed as Acting President Director based on Board of Commissioners' Decree No. 006/KOM/0725 dated 15 July 2025, and the Board of Commissioners' Decree No. SK-007/KOM/0825 dated 14 August 2025.*

*3) Bhimantara Widyajala has been appointed as the Commissioner based on KMK No. 369 of 2025 which has been set on 19 December 2025.*

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki 163 pegawai (31 Desember 2024: 163 pegawai) (tidak diaudit).

*As at 31 December 2025, the Company has 163 employees (31 December 2024: 163 employees) (unaudited).*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 2 Maret 2026.

Berikut ini adalah informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

**2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION***

*The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 2 March 2026.*

*Presented below are the material accounting policy information adopted in preparing the Company's financial statements.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/4 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of the financial statements***

*The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

*The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.*

*The statement of cash flows is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.*

*Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousand of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.*

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/5 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan** (lanjutan)

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")**

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi"

  PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan

  Amandemen PSAK 221, 'Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing', memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan serta pengungkapannya.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; dan
- PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" (Revisi 2025).

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***a. Basis of preparation of the financial statements*** *(continued)*

***Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")***

*Beginning 1 January 2025, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.*

- *SFAS 117: "Insurance Contract"*

  *SFAS 117 regulates the relaxation of several provisions, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions. SFAS 117 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and from investment activities.*

- *Amendment of SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable*

  *Amendment of SFAS 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" clarifies the requirements concerning the conditions under which a currency is non-exchangeable and its disclosure.*

*The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current year or prior financial years.*

*The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2026:*

- *Amendment of SFAS 109 "Financial Instrument" and SFAS 107 "Financial Instrument: Disclosure"; and*
- *SFAS 338: "Business Combinations of Entities Under Common Control" (Revised 2025).*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/6 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan** (lanjutan)

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")** (lanjutan)

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2027:

- PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

**b. Penjabaran mata uang asing**

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of the financial statements** (continued)*

***Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")** (continued)*

*The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2027:*

- *SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial Statements" which will replace SFAS 201: "Presentation in Financial Statements"*

*As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company's financial statements.*

***b. Foreign currency translation***

*a. Functional and presentation currency*

*Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").*

*The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.*

*b. Transactions and balances*

*Transactions denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/7 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**c. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**d. Aset dan liabilitas keuangan**

**Aset keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (iii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

(i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Arus kas kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Cash and cash equivalents***

*Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.*

***d. Financial assets and liabilities***

***Financial assets***

*The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), (iii) financial assets measured at amortised cost. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.*

*(i) Financial assets at fair value through profit or loss*

*Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which are acquired principally for the purpose of selling or repurchasing them in the short-term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.*

*(ii) Financial assets measured at amortised cost*

*Financial assets measured at amortised cost if the financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flows. Contractual cash flow of the financial assets which on a certain date solely payment from principal and interest ("SPPI") of the principal outstanding.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/8 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha, piutang lainnya, uang jaminan yang dapat dikembalikan serta investasi Perusahaan pada obligasi tertentu.

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Suatu instrumen utang diukur pada aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***d. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

***Financial assets*** *(continued)*

*(ii) Financial assets measured at amortised cost (continued)*

*Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's financial assets at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables, other receivables, refundable deposits and the Company's investment in certain bonds.*

*(iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income*

*A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:*

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

*After initial measurement, these financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in statement of changes in equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/9 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

Penilaian pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***d. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

***Financial assets*** *(continued)*

*Solely payments of principal and interest ("SPPI") assessment*

*For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.*

*In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:*

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

*Business model assessment*

*Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/10 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen senior;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Perusahaan dapat mereklasifikasikan seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***d. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

***Financial assets*** *(continued)*

*Business model assessment (continued)*

*Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but not limited to:*

- *How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business unit are compensated (based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

*The Company can reclassify all of its financial assets if and only if, its business model for managing those financial assets changes.*

*Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.*

*Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/11 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Aset keuangan** (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menetapkan aset keuangan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual.

Ketika ada sejumlah aset keuangan yang dianggap tidak dapat tertagih atau berpotensi gagal bayar, maka cadangan kerugian penurunan nilai akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah aset keuangan yang tercatat dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung berdasarkan skenario pemulihan yang diidentifikasi atas rencana penyelesaiaan untuk masing-masing badan usaha secara individu. Keadaan dari masing-masing badan usaha secara individu dipertimbangkan ketika Perusahaan memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto piutang usaha dan beban tangguhan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dianggap tidak dapat tertagih atau berpotensi gagal bayar.

**Liabilitas keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***d. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

***Financial assets*** *(continued)*

*Impairment of financial asset*

*The Company determines that financial asset should be evaluated for impairment through individual evaluation.*

*When any financial assets amount is considered uncollectible or potentially default, a credit impairment provision is raised. This provision is the difference between the account receivables and the present value of estimated future cash flows, based on recovery scenario that has been identified for the workout plan for each investors individually. The individual circumstances of each investors are considered when the Company estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgement.*

*Presentation of allowance for expected credit losses in statement of financial position*

*Allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the account receivables and deferred expenses.*

*At each reporting date, the Company assesses whether the financial assets recorded at amortized cost considered uncollectible or potentially default.*

***Financial liabilities***

*The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.*

*At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/12 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Liabilitas keuangan** (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Financial assets and liabilities** (continued)*

***Financial liabilities** (continued)*

*Financial liabilities measured at amortised cost*

*Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.*

*Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.*

***Derecognition***

*Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Company test control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.*

***Determination of fair value***

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/13 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Penentuan nilai wajar** (lanjutan)

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Financial assets and liabilities** (continued)*

***Determination of fair value** (continued)*

*When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.*

*A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.*

*The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss over the life of the instrument.*

*For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/14 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Penentuan nilai wajar** (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), nilai tukar mata uang asing, volatilitas dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

**Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

**Reklasifikasi aset keuangan**

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sedangkan reklasifikasi untuk liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

Perusahaan akan mereklasifikasi aset keuangan yang terdampak oleh perubahan model bisnis. Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***d. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

***Determination of fair value*** *(continued)*

*For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, Secured Overnight Financing Rate ("SOFR"), foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.*

***Offsetting***

*Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.*

***Reclassification of financial assets***

*The Company is permitted to reclassify its financial assets if the Company changes its business model for managing financial assets while reclassification for financial liabilities is not permitted.*

*The Company will reclassify financial assets affected by changes in business models. Changes to the business model must have a significant impact on the Company's operational activities, such as acquiring, divesting, or discontinuing a line of business.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/15 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Reklasifikasi aset keuangan** (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

**Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya**

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari: KPBU, Non-KPBU, dan penjaminan pelaku usaha korporasi.

Kontrak jaminan keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan Perusahaan selanjutnya mengukur kontrak jaminan keuangan tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara
- kerugian kredit ekspektasian; dan
- jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui seusi dengan prinsip PSAK 115 – ”Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.

Kerugian kredit ekspektasian nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan. Kerugian kredit ekspektasian atas jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***d. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

***Reclassification of financial assets*** *(continued)*

*The followings are not a change in business model:*

- *changes in intention relating to certain financial assets (even in situations significant changes in market conditions);*
- *temporary loss of certain markets for financial assets; and*
- *transfer of financial assets between parts of the Company with different business models.*

*The Company applies a prospective reclassification of the date of the reclassification. The Company does not restate profits, losses (including impairment profit or loss), or interest recognised earlier.*

***Financial guarantee contracts and other commitment receivables***

*The financial guarantee contracts owned by the Company consist of: PPP, Non-PPP, and guarantees for corporate business entities.*

*Financial guarantee contracts are initially measured at fair value and the Company subsequently measure the financial guarantee contracts at the higher of:*

- *expected credit loss; and*
- *the amount initially recognised less the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of SFAS 115 – “Revenue from Contracts with Customers”.*

*Expected credit loss on financial guaranteed contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement. Expected credit loss on financial guarantees is recognised as other liabilities.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/16 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya** (lanjutan)

KPBU

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPK terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPK atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha ("BU") akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU.

Non-KPBU

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan BUMN Terjamin terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN Terjamin yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi. Perusahaan akan mendapatkan hak tagih dari BUMN Terjamin atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pemberi pinjaman dan/atau pemegang obligasi akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN Terjamin kepada pemberi pinjaman.

Pelaku Usaha Korporasi

Peran Perusahaan dalam penjaminan pelaku usaha korporasi adalah untuk memberikan dukungan *loss limit* dan melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") atas kewajiban finansial terjamin (Pelaku Usaha) kepada penerima jaminan (Bank) dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN").

**e. Investasi**

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah.

Obligasi Pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Perusahaan telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 410 "Akuntansi Sukuk".

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Financial assets and liabilities** (continued)*

***Financial guarantee contracts and other commitment receivables** (continued)*

*PPP*

*The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that has been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.*

*Non-PPP*

*The Company also has recourse agreement with guaranteed SOEs related to provision of guarantee to guaranteed SOEs for defaulted payments by guaranteed SOEs who received loans and/or issued bonds. The Company will get the rights to claim or recourse back to guaranteed SOEs for any payment that has been made by the Company to the lenders and/or bondholders, due to inability of guaranteed SOEs in fulfilling its financial obligations to the lenders.*

*Corporate Business Entity*

*The Company's role in corporate business entity guarantee to provide loss limit support and carry out joint guarantees with the Indonesian Export Financing Agency ("LPEI") for guaranteed financial obligations (Business Entity) to guarantee recipients (Banks) related to the government's guarantee for National Economic Recovery ("PEN").*

***e. Investments***

*Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds.*

*Government Bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.*

*The Company has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS 410 "Accounting for Sukuk".*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/17 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**e. Investasi** (lanjutan)

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi disajikan sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Selisih antara biaya perolehan dan nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

**f. Aset tetap**

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

**2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***e. Investments*** *(continued)*

*Investments in sukuk measured at amortised cost are stated at fair value plus or minus transaction costs related to the acquisition of the investment. The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

***f. Fixed assets***

*Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives, as follows:*

| | **Tahun/*Years*** | |
|---|---|---|
| Prasarana kantor | 4 | *Leasehold improvement* |
| Peralatan komputer | 4 | *Computer equipments* |
| Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan | 4 | *Office equipments, furnitures and fixtures* |

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

*The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.*

*Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.*

*An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.*

*When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statement profit or loss.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/18 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**g. Aset takberwujud**

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset takberwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

**h. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***g. Intangible assets***

*Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.*

*Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.*

*Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.*

*Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.*

***h. Taxation***

*Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.*

*The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/19 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**h. Perpajakan** (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan suku bunga pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus Ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**i. Liabilitas imbalan kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***h. Taxation*** *(continued)*

*Deferred income tax is recognised on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

***i. Employee benefits obligation***

***Short-term employee benefits***

*Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/20 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**i. Liabilitas imbalan kerja** (lanjutan)

**Imbalan pensiun**

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Employee benefits obligation** (continued)*

***Pension benefits***

*The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the UU Cipta Kerja No. 11 Year 2020 as amended by UU No. 6 Year 2023 concerning Government In Lieu Of Law No. 2 Of 2022 Concerning Stipulation Employment Regulations Become Law which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on UU Cipta Kerja No. 11 Year 2020 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.*

*The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.*

*For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Job creation Law No. 11 of 2020 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/21 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**i. Liabilitas imbalan kerja** (lanjutan)

**Imbalan pensiun** (lanjutan)

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

**Imbalan jangka panjang lainnya**

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

**j. Utang usaha dan lain-lain**

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**k. Penyisihan**

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Employee benefits obligation** (continued)*

***Pension benefits** (continued)*

*Current service costs are expensed in the prevailing period.*

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.*

*Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.*

*Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.*

***Other long-term benefits***

*Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.*

***j. Account and other payables***

*Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.*

***k. Provisions***

*Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/22 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**I. Pendapatan dan beban**

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diamortisasi berdasarkan metode garis lurus dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu periode penjaminan. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

(i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
(ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

(i) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan tidak dapat dikembalikan.
(ii) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan penjaminan korporasi padat karya merupakan *guarantee fee* yang diakui sebesar porsi margin dari imbal jasa penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan atau periode pelaksanaan jasa.

Pendapatan bunga regres merupakan pendapatan bunga yang diterima atas timbulnya piutang regres. Pendapatan bunga regres diakui dengan metode bunga efektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***I. Revenues and expenses***

*Revenue from guarantee consists of premium income, fees and commissions.*

*Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is amortised based on straight-line method and recognised as income over the guarantee period. Revenue from processing fee is recognised when earned.*

*(i) Guarantee fee is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.*

*(ii) Processing fee is earned for providing services in processing claims submitted to the guarantor.*

*Fees and commissions consist of upfront fee and other fees and commissions.*

*(i) Upfront fee is recognised upon signing of guarantee contract and non-refundable.*

*(ii) Other fees and commission is recognised as incurred.*

*Revenue from labor intensive corporation is guarantee fee which is recognised at margin portion of loss limit guarantee and Corporate Business Entity co-guarantee service fees that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period or period of service.*

*Recourse interest income is interest income received on the occurrence of recourse receivables. Recourse interest income is recognised using the effective interest method.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/23 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**l. Pendapatan dan beban** (lanjutan)

Untuk pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, kewajiban pelaksanaan biasanya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat jasa diberikan (dipenuhi sepanjang waktu). Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito berjangka dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

**m. Sewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset diidentifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal permulaan sewa Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

***l. Revenues and expenses*** *(continued)*

*For revenue from project preparation and transaction advisory, the performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognised, when the service is rendered (over the time). Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.*

*Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.*

*Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.*

*Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.*

***m. Leases***

*At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.*

*The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date. The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/24 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**m. Sewa** (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Beban keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset Hak-Guna" dan "Liabilitas sewa pembiayaan" di dalam laporan posisi keuangan.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

**2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION*** *(continued)*

**m. *Leases*** *(continued)*

*The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.*

*Lease payments are allocated between the principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.*

*The Company presents right-of-use assets as part of "Right-of-Use Asset" and "Finance lease liabilities" in the statement of financial position.*

*Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:*

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

*If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.*

*Short-term leases*

*Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/25 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:
i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
ii. perusahaan asosiasi;
iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas;
v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***n. Transactions with related parties***

*The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS 224 "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:*
*i. entities under the control of the Company;*
*ii. associated companies;*
*iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;*
*iv. entities controlled by investors under note iii above;*
*v. key employees and family members; and*
*vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**a. Faktor risiko keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

**(1) Risiko pasar**

**(i) Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT***

***a. Financial risk factors***

*The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign currency exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:*

***(1) Market risk***

***(i) Foreign currency exchange rate risk***

*The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2025 and 2024, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact the Company's current year profit after tax.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/26 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**a. Faktor risiko keuangan** (lanjutan)

**(1) Risiko pasar** (lanjutan)

**(ii) Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset keuangan Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi dan deposito berjangka. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito berjangka dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito berjangka Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan investasi yang diukur dengan biaya diamortisasi dengan suku bunga tetap.

Liabilitas keuangan Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

**(2) Risiko kredit**

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif.

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***(1) Market risk** (continued)*

***(ii) Interest rate risk***

*Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.*

*The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments and time deposits. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rates in the market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within 1 (one) year (short-term), while most of the other investments are fixed rate investments.*

*Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as investment at fair value through other comprehensive income and investment at amortised cost with fixed interest rate.*

*The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rates in the market will not significantly impact the Company's interest expense.*

***(2) Credit risk***

*The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/27 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**a. Faktor risiko keuangan** (lanjutan)

**(2) Risiko kredit** (lanjutan)

Deposito berjangka, deposito yang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,607,037,452 | 6,061,274,102 | *AAA* |
| AA | 679,000,000 | 1,902,000,000 | *AA* |
| | 8,286,037,452 | 7,963,274,102 | |

Untuk saldo kas dan setara kas, manajemen menganggap bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam waktu dekat. Akibatnya, tidak ada penyisihan kerugian yang diakui berdasarkan ekspektasi kerugian kredit 12 bulan, karena penurunan nilai tersebut juga tidak signifikan bagi Perusahaan.

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek utang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi paling rendah AA.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***(2) Credit risk** (continued)*

*Time deposits, time deposits classified as cash and cash equivalents and cash in bank are placed with highly reputable domestic banks as follows:*

*For cash and equivalents balances, management considers that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations in near term. As a result, no loss allowance has been recognised based on 12-month expected credit losses, as any such impairment is also insignificant to the Company.*

*For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.*

*The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:*

| | 31 Desember/*December* 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Lancar/ *Current*** | **<1 tahun/ *<1 year*** | ***1-2 tahun/ 1-2 years*** | **>2 tahun/ *>2 years*** | **Jumlah/ *Total*** | |
| **Aset** | | | | | | ***Assets*** |
| Kas dan setara kas*) | 7,285,937,452 | - | - | - | 7,285,937,452 | *Cash and cash equivalents*) |
| Investasi | 9,884,203,091 | - | - | - | 9,884,203,091 | *Investments* |
| Piutang usaha**) | 463,759,152 | 22,940,000 | 30,275,000 | 52,325,000 | 569,299,152 | *Account receivables* |
| Piutang lainnya | 10,467,439 | - | - | - | 10,467,439 | *Other receivables* |
| Uang jaminan yang dapat dikembalikan | 5,490,415 | - | - | - | 5,490,415 | *Refundable deposits* |
| | 17,649,857,549 | 22,940,000 | 30,275,000 | 52,325,000 | 17,755,397,549 | |
| Dikurangi: | | | | | | *Less:* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | | | | | (94,022,470) | *Allowance for impairment losses* |
| | | | | | 17,661,375,079 | |

*)Tidak termasuk kas
**)Termasuk piutang *regress* sebesar Rp 261.751.585

*Not include cash on hand*)
*Included recourse receivables amounting Rp 261,751,585*)

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/28 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**a. Faktor risiko keuangan** (lanjutan)

**(2) Risiko kredit** (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***(2) Credit risk** (continued)*

*The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2025 and 2024 are as follows: (continued)*

| | 31 Desember/*December* 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Lancar/ *Current*** | **<1 tahun/ *<1 year*** | ***1-2 tahun/ 1-2 years*** | **>2 tahun/ *>2 years*** | **Jumlah/ *Total*** | |
| **Aset** | | | | | | ***Assets*** |
| Kas dan setara kas*) | 2,029,774,102 | - | - | - | 2,029,774,102 | *Cash and cash equivalents*) |
| Investasi | 14,423,560,381 | - | - | - | 14,423,560,381 | *Investments* |
| Piutang usaha**) | 378,873,780 | 36,875,000 | 22,275,000 | 22,050,000 | 460,073,780 | *Account receivables* |
| Piutang lainnya | 11,935,434 | - | - | - | 11,935,434 | *Other receivables* |
| Uang jaminan yang dapat dikembalikan | 5,385,039 | - | - | - | 5,385,039 | *Refundable deposits* |
| | 16,849,528,736 | 36,875,000 | 22,275,000 | 22,050,000 | 16,930,728,736 | |
| Dikurangi: | | | | | | *Less:* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | | | | | (57,688,580) | *Allowance for impairment losses* |
| | | | | | 16,873,040,156 | |

*) Tidak termasuk kas
**) Termasuk piutang *regress* sebesar Rp 201.989.828

*) *Not include cash on hand*
**) *Included recourse receivables amounting Rp 201,989,828*

Termasuk di dalam eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah risiko lainnya terkait klaim yang diungkapkan pada Catatan 25.

*Included in the maximum credit risk on the Company's as at 31 December 2025 and 2024 are other risks related to claim as disclosed in Note 25.*

**(3) Risiko likuiditas**

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

***(3) Liquidity risk***

*The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.*

*As at 31 December 2025 and 2024, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses, provisions, and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/29 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**a. Faktor risiko keuangan** (lanjutan)

**(3) Risiko likuiditas** (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan *undiscounted cash flows*.

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***(3) Liquidity risk** (continued)*

*The table below shows the remaining contractual maturities of the financial liabilities based on undiscounted cash flows.*

| | 31 Desember/*December* 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah/ *Total* | Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract* | Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | ***Financial liabilities*** |
| Utang usaha | 14,002,393 | - | 14,002,393 | - | *Account payables* |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain | 76,416,987 | - | 76,416,987 | - | *Accrued expenses, provisions, and other payables* |
| Pinjaman penerusan | 71,523,213 | - | 7,079,217 | 64,443,996 | *Two-step loans* |
| | 161,942,593 | - | 97,498,597 | 64,443,996 | |

| | 31 Desember/*December* 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah/ *Total* | Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract* | Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year* | Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year* | |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | ***Financial liabilities*** |
| Utang usaha | 6,731,077 | - | 6,731,077 | - | *Account payables* |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain | 117,924,523 | - | 117,924,523 | - | *Accrued expenses, provisions, and other payables* |
| Pinjaman penerusan | 77,273,281 | - | 5,750,068 | 71,523,213 | *Two-step loans* |
| | 201,928,881 | - | 130,405,668 | 71,523,213 | |

Selain pada liabilitas keuangan Perusahan di atas, sebagai BUPI yang memberikan penyediaan penjaminan, risiko likuiditas pada Perusahaan juga berhubungan dengan adanya kemungkinan Perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial atas klaim yang telah diajukan maupun potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan. Perusahaan mengelola dan mengawasi risiko likuiditas untuk kewajiban finansial dengan menyesuaikan portofolio investasi dengan kewajiban finansial untuk klaim yang telah diajukan atau profil jatuh tempo dari potensi klaim. Perusahaan secara rutin melakukan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan likuiditas. Analisa ini, disertai dengan kebutuhan investasi yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan investasi yang konservatif, membantu Perusahaan dalam mengelola risiko likuiditas dengan tepat.

*Apart from the Company's financial liabilities above, as BUPI who provides guarantees, liquidity risk for the Company is also related to the possibility that the Company will not be able to fulfill its financial obligations for claims that have been submitted or potential claims for risks borne by the Company in the guarantee agreement. The Company managed and monitored its liquidity risk for financial obligations by matching the investment portfolio to its financial obligations for claim that has been submitted or maturity profiles of the potential claims. The Company regularly analysed and identified the liquidity needs. These analyses, together with clear investment requirements according to regulation and a conservative investment policy, help the Company to appropriately manage liquidity risk.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/30 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**b. Manajemen risiko modal**

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

**c. Estimasi nilai wajar**

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
  Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
- Tingkat 3
  Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Capital risk management***

*In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.*

*The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.*

***c. Fair value estimation***

*Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:*

- *Level 1*
  *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2*
  *Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);*
- *Level 3*
  *Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/31 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**c. Estimasi nilai wajar** (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2025 dan 2024.

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Fair value estimation** (continued)*

*The following table presents the Company's assets and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2025 and 2024.*

| | 31 Desember/*December* 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | **Tingkat 1/ *Level 1*** | **Tingkat 2/ *Level 2*** | **Tingkat 3/ *Level 3*** | **Nilai wajar/ *Fair value*** | |
| **Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar** | | | | | | ***Financial assets at fair value*** |
| Investasi pada instrumen utang | 1,931,753,807 | - | 1,931,753,807 | - | 1,931,753,807 | *Debt investments* |
| Jumlah | 1,931,753,807 | - | 1,931,753,807 | - | 1,931,753,807 | *Total* |

| | 31 Desember/*December* 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | **Tingkat 1/ *Level 1*** | **Tingkat 2/ *Level 2*** | **Tingkat 3/ *Level 3*** | **Nilai wajar/ *Fair value*** | |
| **Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar** | | | | | | ***Financial assets at fair value*** |
| Investasi pada instrumen utang | 1,823,949,498 | - | 1,823,949,498 | - | 1,823,949,498 | *Debt investments* |
| Jumlah | 1,823,949,498 | - | 1,823,949,498 | - | 1,823,949,498 | *Total* |

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan:

*Financial instrument not measured at fair values*

*The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position:*

| | 31 Desember/*December* 2025 | | |
|---|---|---|---|
| | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | **Nilai wajar/ *Fair value*** | |
| **Aset keuangan:** | | | ***Financial assets:*** |
| Kas dan setara kas | 7,286,275,750 | 7,286,275,750 | *Cash and cash equivalents* |
| Investasi | 7,952,449,283 | 8,225,220,475 | *Investments* |
| Piutang usaha | 475,276,683 | 475,276,683 | *Account receivables* |
| Piutang lainnya | 10,467,439 | 10,467,439 | *Other receivables* |
| Uang jaminan yang dapat dikembalikan | 5,490,415 | 5,490,415 | *Refundable deposits* |
| | 15,729,959,570 | 16,002,730,762 | |
| **Liabilitas keuangan:** | | | ***Financial liabilities:*** |
| Utang usaha | 14,002,393 | 14,002,393 | *Account payables* |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain | 76,416,986 | 76,416,986 | *Accrued expenses provisions and other payables* |
| Pinjaman penerusan | 52,701,112 | 52,701,112 | *Two-step loans* |
| | 143,120,491 | 143,120,491 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/32 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**c. Estimasi nilai wajar** (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan: (lanjutan)

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

***c. Fair value estimation*** *(continued)*

*Financial instrument not measured at fair values (continued)*

*The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position: (continued)*

| | 31 Desember/*December* 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | **Nilai wajar/ *Fair value*** | |
| **Aset keuangan:** | | | ***Financial assets:*** |
| Kas dan setara kas | 2,030,081,757 | 2,030,081,757 | *Cash and cash equivalents* |
| Investasi | 12,599,610,883 | 12,527,036,685 | *Investments* |
| Piutang usaha | 402,385,200 | 402,385,200 | *Account receivables* |
| Piutang lainnya | 11,935,434 | 11,935,434 | *Other receivables* |
| Uang jaminan yang dapat dikembalikan | 5,385,039 | 5,385,039 | *Refundable deposits* |
| | 15,049,398,313 | 14,976,824,115 | |
| **Liabilitas keuangan:** | | | ***Financial liabilities:*** |
| Utang usaha | 6,731,077 | 6,731,077 | *Account payables* |
| Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain | 117,924,523 | 117,924,523 | *Accrued expenses provisions and other payables* |
| Pinjaman penerusan | 54,586,445 | 54,586,445 | *Two-step loans* |
| | 179,242,045 | 179,242,045 | |

(i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 - hirarki nilai wajar).

*(i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits*

*The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 - fair value hierarchy).*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/33 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**c. Estimasi nilai wajar** (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

(ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar untuk pinjaman penerusan dengan suku bunga mengambang, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya (level 2 - hirarki nilai wajar).

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

***c. Fair value estimation*** *(continued)*

*Financial instrument not measured at fair values (continued)*

*(ii) Debt investments*

*The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit maturity (level 2 - fair value hierarchy).*

*(iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities*

*The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 - fair value hierarchy).*

*(iv) Two-step loans*

*The fair value for two-step loans with floating interest rate, the carrying value approximates its fair value (level 2 - fair value hierarchy).*

***4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS***

*Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.*

*Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/34 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

**a. Liabilitas imbalan kerja**

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

***4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS*** *(continued)*

*Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates and assumptions.*

*Key sources of estimation uncertainty:*

***a. Employee benefits obligation***

*The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.*

*The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.*

*For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.*

*Other key assumptions for employee benefits obligation are based on current market conditions.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/35 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**b. Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan**

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat piutang usaha serta kerugian penurunan nilai pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah kewajibannya atas proyek KPBU dan non-KPBU, dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Untuk proyek KPBU, Perusahaan memiliki hak regres kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU. Untuk proyek non-KPBU, Perusahaan juga memiliki hak regres kepada BUMN Terjamin terkait risiko gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Identifikasi atas kemungkinan kewajiban yang timbul atas penjaminan pelaku usaha korporasi memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan ekspektasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak pada nilai estimasi komitmen dan kontinjensi pelaku usaha korporasi pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

***4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS*** *(continued)*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***b. Claim provision related to guarantee agreement***

*Allowance for impairment losses are provided when events or changes in circumstance indicate that the balance may not be collectible. The identification of uncollectible receivables requires the use of judgement and estimates. If the expectations are different from the original estimates, such differences will impact the carrying value of account receivables and impairment losses in the period in which such estimate has been changed.*

*At each reporting date, the Company assesses its obligations for PPP and non-PPP projects, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantees agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. For PPP projects, the Company has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors. For non-PPP projects, the Company also has recourse to guaranteed SOEs related to risk of default of the loans.*

*Identification of possible liabilities arising from guarantees for corporate business entities requires consideration and estimation. If the expectations are different from the initial expectations, then this difference will have an impact on the estimated value of commitments and contingencies of corporate business entities in the period when the changes in estimates occur.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/36 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**c. Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai**

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas realisasi proyek.

**d. Piutang usaha - penjaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai**

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa piutang usaha - penjaminan yang dicatat masih dapat ditagih kepada Badan Usaha pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan, salah satunya, menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai syarat efektif, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai atas piutang penjaminan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas pembayaran piutang penjaminan, serta mempertimbangkan kemampuan membayar dari Badan Usaha.

***4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***c. Deferred charges and allowance for impairment losses***

*The Company continually evaluates objective evidence of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regard to the tender process at the end of each reporting period.*

*Provision for impairment losses on deferred expense is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of project realisation.*

***d. Account receivables - guarantee and allowance for impairment losses***

*The Company continually evaluates objective evidence that account receivables - guarantee recorded can still be collected from Investors at the end of each reporting period. The Company, for instance, uses its judgement to assess whether the project will achieve effective clause that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders at the end of each reporting period.*

*Provision for impairment losses on guarantee receivables is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of payment, by also considering the Investor's ability to repay.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/37 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Bank | 62,237,452 | 32,774,102 | *Cash in banks* |
| Deposito berjangka | 7,223,700,000 | 1,997,000,000 | *Time deposits* |
| Kas | 338,298 | 307,655 | *Cash on hand* |
| | 7,286,275,750 | 2,030,081,757 | |

Deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga 5,00% - 5,65% per tahun di 2025 (2024: 6,25% - 6,86%).

*Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates 5.00% - 5.65% per annum in 2025 (2024: 6.25% - 6.86%).*

Seluruh kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2025.

*All cash and cash equivalents are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2025.*

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

*Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.*

## 6. INVESTASI / *6. INVESTMENTS*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Deposito berjangka | 1,000,100,000 | 5,933,500,000 | *Time deposits* |
| Investasi dengan pendapatan tetap | | | *Fixed income investments* |
| - Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 1,931,753,807 | 1,823,949,498 | *Investment at fair value through - other comprehensive income* |
| - Investasi yang diukur pada biaya diamortisasi | 6,932,606,186 | 6,646,223,850 | *Investment at amortised cost -* |
| - Investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi (sukuk) | 19,743,098 | 19,887,033 | *Investments measured at - amortised cost (sukuk)* |
| | 9,884,203,091 | 14,423,560,381 | |

Seluruh investasi merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2025.

*All investments are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2025.*

.

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/38 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**6. INVESTASI** (lanjutan)

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, karena manajemen berpendapat bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

**a) Deposito berjangka**

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Bank Swasta | 1,000,100,000 | 2,517,500,000 | *Private banks* |
| Bank BUMN | - | 3,416,000,000 | *State-Owned banks* |
| | 1,000,100,000 | 5,933,500,000 | |

Deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 5,00% - 5,75% per tahun di 2025 (2024: 6,75% - 7,50%).

**b) Investasi dengan pendapatan tetap**

**- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | 1,931,753,807 | 1,823,949,498 | *Government bonds* |
| | 1,931,753,807 | 1,823,949,498 | |

Harga pasar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar antara 99,99% sampai dengan 123,62% dan antara 94,00% sampai dengan 120,27% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar investasi dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 103.962.296 (laba) dan Rp 56.945.416 (rugi) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat di laporan perubahan ekuitas.

**6. *INVESTMENTS*** *(continued)*

*The management does not provide any allowance for impairment losses for investments as of 31 December 2025 and 2024, since management believes that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations.*

*Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.*

***a) Time deposits***

*Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 5.00% - 5.75% per annum in 2025 (2024: 6.75% - 7.50%).*

***b) Fixed income investments***

***- Investments at fair value through other comprehensive income***

*The market price of investments at fair value through other comprehensive income ranged from 99.99% to 123.62% and from 94.00% to 120.27% as of 31 December 2025 and 2024, respectively.*

*The Company recognised the unrealized gains or losses from the changes in the market value of the investments categorised as fair value through other comprehensive income in the amount of Rp 103,962,296 (gain) and Rp 56,945,416 (loss) for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively, both recorded in the statement of changes in equity.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/39 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**6. INVESTASI** (lanjutan)

**b) Investasi dengan pendapatan tetap** (lanjutan)

**- Investasi yang diukur pada biaya perolehan**

Pada tanggal 31 Desember 2025, periode jatuh tempo investasi pada obligasi berkisar antara 1 – 23 tahun (2024: 1 - 9 tahun) dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 4,88% - 8,88% per tahun di 2025 (2024: 4,88% - 10,25%).

***6. INVESTMENTS** (continued)*

***b) Fixed income investments** (continued)*

***- Investments at amortised cost***

*As of 31 December 2025, the maturity period of investments in bonds ranging between 1- 23 years (2024: 1 - 9 years) maturities and earned interest rates ranging between 4,88% - 8.88% per annum in 2025 (2024: 4.88% - 10.25%).*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | 6,792,606,185 | 6,169,223,850 | *Government Bonds* |
| Obligasi BUMN | 140,000,000 | 477,000,000 | *State-Owned Enterprise bonds* |
| | 6,932,606,185 | 6,646,223,850 | |

**- Investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi (sukuk)**

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 410 "Akuntansi Sukuk".

***- Investments measured at amortised cost (sukuk)***

*Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 410 "Accounting for Sukuk".*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Obligasi BUMN | 10,000,000 | 10,000,000 | *State-Owned Enterprise bonds* |
| Obligasi Pemerintah | 9,743,098 | 9,887,033 | *Government Bonds* |
| | 19,743,098 | 19,887,033 | |

**7. PIUTANG USAHA**

***7. ACCOUNT RECEIVABLES***

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Bunga yang belum diterima | 140,804,157 | 132,761,882 | *Interest receivables* |
| Regres | 261,751,586 | 201,989,828 | *Recourse* |
| Penjaminan | 127,762,276 | 89,018,262 | *Guarantee* |
| Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi | 38,981,134 | 36,303,808 | *Project preparation and transaction advisory* |
| | 569,299,153 | 460,073,780 | |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (94,022,470) | (57,688,580) | *Allowance for impairment losses* |
| Total | 475,276,683 | 402,385,200 | *Total* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/40 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *ACCOUNT RECEIVABLES (continued)*

Piutang regres adalah hak tagih Perusahaan kepada PJPK sehubungan tidak terpenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BUP atas proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Lampung dan SPAM Pekanbaru (lihat Catatan 25). Piutang bunga atas regres sebesar Rp 27.523.477 dicatat pada piutang regres (2024: Rp 17.315.552).

*Recourse receivables represent the Company's right to claim against GCA arising from the inability of GCA to fulfill its financial obligations to Investors for Water Supply System Lampung and Water Supply System Pekanbaru (refer to Note 25). Interest receivables from recourse amounting to Rp 27,523,477 recorded in recourse receivable (2024: Rp 17,315,552).*

Pada tanggal 31 Desember 2025, total piutang regres dan penjaminan sebesar Rp 389.513.861 mengalami penurunan nilai dan telah dicadangkan sebesar Rp 94.022.470 (2024: Rp 57.688.580).

*As of 31 Desember 2025, receivables from recourse and guarantee amounting to Rp 389,513,861 are impaired and have been provisioned amounting Rp 94,022,470 (2024: Rp 57,688,580).*

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*Movements of the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 57,688,580 | 18,775,000 | *Beginning balance* |
| Penambahan | 38,333,890 | 38,913,580 | *Additions* |
| Pemulihan kerugian penurunan nilai | (2,000,000) | - | *Reversal of impairment losses* |
| Saldo akhir | 94,022,470 | 57,688,580 | *Ending balance* |

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

*Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover losses from uncollectible account receivables.*

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

*Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.*

## 8. ASET TETAP / *FIXED ASSETS*

| | 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pelepasan/ *Disposals* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| **Aset kepemilikan langsung:** | | | | | | ***Direct ownership assets:*** |
| **Harga perolehan:** | | | | | | ***Acquisition cost:*** |
| Aset dalam penyelesaian | 403,485 | 5,451,735 | - | (5,547,225) | 307,995 | *Construction in progress* |
| Prasarana kantor | 31,572,672 | 106,560 | - | 5,190,360 | 36,869,592 | *Leasehold improvement* |
| Peralatan komputer | 15,066,866 | 84,160 | - | - | 15,151,026 | *Computer equipments* |
| Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan | 11,657,706 | 207,042 | - | 356,865 | 12,221,613 | *Office equipments, furnitures and fixtures* |
| | 58,700,729 | 5,849,497 | - | - | 64,550,226 | |
| **Akumulasi penyusutan:** | | | | | | ***Accumulated depreciation:*** |
| Prasarana kantor | (24,094,520) | (3,940,953) | - | - | (28,035,473) | *Leasehold improvement* |
| Peralatan komputer | (13,912,178) | (738,872) | - | - | (14,651,050) | *Computer equipments* |
| Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan | (11,074,824) | (361,755) | - | - | (11,436,579) | *Office equipments, furnitures and fixtures* |
| | (49,081,522) | (5,041,580) | - | - | (54,123,102) | |
| **Nilai buku** | 9,619,207 | | | | 10,427,124 | ***Net book value*** |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/41 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

| | 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pelepasan/ *Disposals* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| **Aset kepemilikan langsung:** | | | | | | ***Direct ownership assets:*** |
| **Harga perolehan:** | | | | | | ***Acquisition cost:*** |
| Aset dalam penyelesaian | 150,520 | 252,965 | - | - | 403,485 | *Construction in progress* |
| Prasarana kantor | 31,473,882 | 98,790 | - | - | 31,572,672 | *Leasehold improvement* |
| Peralatan komputer | 15,055,022 | 11,844 | - | - | 15,066,866 | *Computer equipments* |
| Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan | 11,250,754 | 406,952 | - | - | 11,657,706 | *Office equipments, furnitures and fixtures* |
| | 57,930,178 | 770,551 | - | | 58,700,729 | |
| **Akumulasi penyusutan:** | | | | | | ***Accumulated depreciation:*** |
| Prasarana kantor | (21,273,452) | (2,821,068) | - | - | (24,094,520) | *Leasehold improvement* |
| Peralatan komputer | (12,266,465) | (1,645,713) | - | - | (13,912,178) | *Computer equipments* |
| Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan | (10,839,429) | (235,395) | - | - | (11,074,824) | *Office equipments, furnitures and fixtures* |
| | (44,379,346) | (4,702,176) | - | - | (49,081,522) | |
| **Nilai buku** | 13,550,832 | | | | 9,619,207 | ***Net book value*** |

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

*Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2025 and 2024.*

## 9. ASET HAK-GUNA / *9. RIGHT-OF-USE ASSETS*

Perusahaan menyewa aset berupa gedung kantor yang digunakan dalam operasinya yang memiliki masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2023 dan berakhir pada 31 Agustus 2026.

*The Company leases asset in the form of office space used for its operations that have a lease period of 3 years starting on 1 September 2023 and ending on 31 August 2026.*

Beban amortisasi sewa gedung kantor diakui sebagai beban sewa dalam kategori beban umum dan administrasi.

*Amortisation expense of office space lease was recognised as rental expense under general and administrative expenses.*

| | 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pelepasan/ *Disposals* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| **Harga perolehan:** | | | | | ***Acquisition cost:*** |
| Gedung kantor | 51,508,225 | - | - | 51,508,225 | *Office building* |
| | 51,508,225 | - | - | 51,508,225 | |
| **Akumulasi amortisasi:** | | | | | ***Accumulated amortisation:*** |
| Gedung kantor | (22,892,545) | (17,169,408) | - | (40,061,953) | *Office building* |
| | (22,892,545) | (17,169,408) | - | (40,061,953) | |
| **Nilai buku** | 28,615,680 | | | 11,446,272 | ***Net book value*** |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/42 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 9. ASET HAK-GUNA (lanjutan) / *9. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

| | 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pelepasan/ *Disposals* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| **Harga perolehan:** | | | | | ***Acquisition cost:*** |
| Gedung kantor | 50,978,008 | 530,217 | - | 51,508,225 | *Office building* |
| | 50,978,008 | 530,217 | - | 51,508,225 | |
| **Akumulasi amortisasi:** | | | | | ***Accumulated amortisation:*** |
| Gedung kantor | (5,664,223) | (17,228,322) | - | (22,892,545) | *Office building* |
| | (5,664,223) | (17,228,322) | - | (22,892,545) | |
| **Nilai buku** | 45,313,785 | | | 28,615,680 | ***Net book value*** |

## 10. ASET TAKBERWUJUD / *10. INTANGIBLE ASSETS*

| | 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pelepasan/ *Disposals* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| **Harga perolehan:** | | | | | | ***Acquisition cost:*** |
| Aset dalam penyelesaian | 1,041,608 | 1,719,877 | - | (1,324,608) | 1,436,877 | *Construction in progress* |
| Piranti lunak | 16,433,599 | 391,601 | - | 1,324,608 | 18,149,808 | *Software* |
| | 17,475,207 | 2,111,478 | - | - | 19,586,685 | |
| **Akumulasi amortisasi:** | | | | | | ***Accumulated amortisation:*** |
| Piranti lunak | (12,551,662) | (2,291,207) | - | - | (14,842,869) | *Software* |
| | (12,551,662) | (2,291,207) | | | (14,842,869) | |
| **Nilai buku** | 4,923,545 | | | | 4,743,816 | ***Net book value*** |

| | 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pelepasan/ *Disposals* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| **Harga perolehan:** | | | | | | ***Acquisition cost:*** |
| Aset dalam penyelesaian | 96,800 | 1,022,608 | - | (77,800) | 1,041,608 | *Construction in progress* |
| Piranti lunak | 14,778,044 | 1,577,755 | - | 77,800 | 16,433,599 | *Software* |
| | 14,874,844 | 2,600,363 | - | - | 17,475,207 | |
| **Akumulasi amortisasi:** | | | | | | ***Accumulated amortisation:*** |
| Piranti lunak | (10,587,718) | (1,963,944) | - | - | (12,551,662) | *Software* |
| | (10,587,718) | (1,963,944) | - | - | (12,551,662) | |
| **Nilai buku** | 4,287,126 | | | | 4,923,545 | ***Net book value*** |

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

*Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2025 and 2024.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/43 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 11. BEBAN TANGGUHAN / *11. DEFERRED EXPENSES*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Beban tangguhan | 20,649,513 | 18,579,494 | *Deferred expenses* |
| Penyisihan penurunan nilai | (16,721,067) | (15,742,247) | *Provision for impairment* |
| | 3,928,446 | 2,837,247 | |

Beban tangguhan terutama merupakan biaya atas jasa konsultasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

*Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.*

Beban tangguhan juga mencakup biaya pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan akan dibebankan ke laba rugi pada saat pendapatan dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui.

*Deferred expenses also included costs for project preparation and transaction advisory and will be recognised to profit and loss upon the recognition of revenue from project preparation and transaction advisory.*

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*Movements of the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 15,742,247 | 15,594,747 | *Beginning balance* |
| Penambahan | 978,820 | 147,500 | *Additions* |
| Saldo akhir | 16,721,067 | 15,742,247 | *Ending balance* |

Kecuali untuk jumlah beban tangguhan yang telah dibentuk penyisihannya, manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu, beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

*Except for deferred expenses that have been provided with impairment provision, management believes that outstanding projects could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2025 and 2024.*

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan yang dibentuk telah memadai.

*Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.*

## 12. UTANG USAHA / *12. ACCOUNT PAYABLES*

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan biaya operasional Perusahaan.

*Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee, project preparation and transaction advisory provision, and the Company's operational costs.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/44 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

### a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid income tax*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lebih bayar: | | | *Overpayment of:* |
| Pajak Pertambahan Nilai: | | | *Value Added Tax:* |
| - 2023 | - | 3,124,162 | *2023* - |
| - 2024 | 5,554,754 | 5,548,664 | *2024* - |
| - 2025 | 3,593,771 | - | *2025* - |
| | 9,148,525 | 8,672,826 | |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | - | 496,450 | *Witholding Tax Article 21* |
| | 9,148,525 | 9,169,276 | |

### b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pajak lain-lain: | | | *Other taxes:* |
| - Pajak Pertambahan Nilai | 1,167,380 | 1,201,790 | *Value Added Tax* - |
| - Pajak Penghasilan Pasal 23 | 295,680 | 249,858 | *Withholding Tax Article 23* - |
| - Pajak Penghasilan Pasal 21 | 1,360,833 | 55,642 | *Withholding Tax Article 21* - |
| - Lainnya | 19,922 | 24,310 | *Others* - |
| | 2,843,815 | 1,531,600 | |

### c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan / *c. (Expense)/income tax benefit*

Beban pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

*Tax expense of the Company consist of the following:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pajak tangguhan | (45,292,841) | (11,145,678) | *Deferred tax* |
| | (45,292,841) | (11,145,678) | |

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Laba sebelum pajak penghasilan | 941,276,485 | 942,025,356 | *Profit before income tax* |
| Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku | (207,080,827) | (207,245,579) | *Tax calculated at applicable tax rate* |
| Pengaruh atas: | | | *Effects of:* |
| - Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final | 246,697,154 | 240,658,426 | *Revenues subjected to final income tax* - |
| - Rugi pajak yang dibebankan di tahun berjalan | (5,155,690) | (2,649,713) | *Tax loss charged in current year* - |
| - Beban yang tidak dapat diperhitungkan | (42,510,759) | (41,908,812) | *Non-deductible expenses* - |
| - Penyesuaian aset pajak tangguhan | (37,242,719) | - | *Adjustment of deferred tax assets* - |
| Beban pajak penghasilan | (45,292,841) | (11,145,678) | *Expense tax benefit* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/45 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN** (lanjutan)

***13. TAXATION** (continued)*

**c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan** (lanjutan)

***c. (Expense)/income tax benefit** (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Laba sebelum pajak penghasilan | 941,276,485 | 942,025,356 | *Profit before income tax* |
| Beda waktu | (36,994,951) | (50,409,209) | *Timing differences* |
| Beda tetap | 193,634,210 | 190,241,638 | *Permanent differences* |
| Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final | (1,121,350,700) | (1,093,901,935) | *Revenues subjected to final income tax* |
| (Rugi)/laba pajak berjalan | (23,434,956) | (12,044,150) | *Current tax (loss)/income* |
| Rugi pajak yang bisa dikompensasi | (55,325,449) | (65,827,232) | *Tax loss carry forward* |
| Akumulasi kerugian pajak | (78,760,405) | (77,871,382) | *Accumulated tax losses* |

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

*Below are details of accumulated fiscal losses:*

| Tahun fiskal: | 2025 | 2024 | *Fiscal year:* |
|---|---|---|---|
| 2025 | (23,434,956) | - | *2025* |
| 2024 | (12,044,150) | (12,044,150) | *2024* |
| 2023 | - | (3,503,051) | *2023* |
| 2020 | (43,281,299) | (43,281,299) | *2020* |
| 2019 | - | (19,042,882) | *2019* |
| | (78,760,405) | (77,871,382) | |

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 166.201.263 (2024: Rp 158.158.364) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari deposito berjangka, pendapatan tetap dan rekening giro.

*Included in the fiscal correction of the permanent difference is the tax expense of Rp 166,201,263 (2024: Rp 158,158,364) paid for interest income from time deposits, fixed income and current accounts.*

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

*The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2025 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/46 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**c. (Beban)/Manfaat pajak penghasilan** (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024 ("PMK-136/2024"), yurisdiksi tempat Perusahaan berdomisili tunduk pada peraturan tersebut yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Perusahaan menerapkan pengecualian dalam PSAK 212 pada 31 Desember 2024 atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan penilaian dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak dari penerapan peraturan tersebut.

***13. TAXATION** (continued)*

***c. (Expense)/Income tax benefit** (continued)*

*The calculations of income tax for the year ended 31 December 2024 conform to the Company's Annual Tax Return.*

*Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 136 of 2024 which was issued on 31 December 2024 ("PMK-136 of year 2024"), the jurisdiction in which the Company is incorporated, has come into effect from 1 January 2025. The Company applies the SFAS 212 exception on 31 December 2024 to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar two income taxes. As of 31 December 2025, the Company has assessed and concluded that there is no impact from the implementation of the regulation.*

**d. Aset pajak tangguhan** / ***d. Deferred tax asset***

| | 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Januari/ *January 2025* | Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss* | Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity* | 31 Desember/ *December 2025* | |
| Penyisihan gaji dan bonus | 7,285,168 | (7,285,168) | - | - | *Provision for salaries and bonus* |
| Beban penyisihan imbalan kerja | 7,079,818 | 1,303,843 | 258,494 | 8,642,155 | *Provision for employee benefits obligation* |
| Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap | 1,514,158 | 40,560 | - | 1,554,718 | *Differences between accounting and tax fixed assets net book value* |
| Pendapatan tangguhan penjaminan | 7,015,201 | (7,015,201) | - | - | *Guarantee unearned income* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang regres dan penjaminan | 12,691,487 | (12,691,487) | - | - | *Allowance for impairment losses for recourse and guarantee receivables* |
| Penyisihan penurunan nilai beban tangguhan | 3,463,295 | 215,340 | - | 3,678,635 | *Allowance for impairment losses on deferred expenses* |
| Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi | 8,779,683 | (8,779,683) | - | - | *Corporate business entities unearned income* |
| Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan pelaku usaha korporasi | 11,081,045 | (11,081,045) | - | - | *Commitment and contigencies of corporate business entities revenue* |
| | 58,909,855 | (45,292,841) | 258,494 | 13,875,508 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/47 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**13. *TAXATION*** *(continued)*

**d. Aset pajak tangguhan** (lanjutan)

**d. *Deferred tax asset*** *(continued)*

| | 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Januari/ *January 2024* | Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss* | Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity* | 31 Desember/ *December 2024* | |
| Penyisihan gaji dan bonus | 6,539,681 | 745,487 | - | 7,285,168 | *Provision for salaries and bonus* |
| Beban penyisihan imbalan kerja | 6,715,779 | 1,211,392 | (847,353) | 7,079,818 | *Provision for employee benefits obligation* |
| Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap | 1,639,671 | (125,513) | - | 1,514,158 | *Differences between accounting and tax fixed assets net book value* |
| Pendapatan tangguhan penjaminan | 5,911,312 | 1,103,889 | - | 7,015,201 | *Guarantee unearned income* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang regres dan penjaminan | 4,130,500 | 8,560,987 | - | 12,691,487 | *Allowance for impairment losses for recourse and guarantee receivables* |
| Penyisihan penurunan nilai beban tangguhan | 3,430,845 | 32,450 | - | 3,463,295 | *Allowance for impairment losses on deferred expenses* |
| Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi | 22,872,674 | (14,092,991) | - | 8,779,683 | *Corporate business entities unearned income* |
| Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan pelaku usaha korporasi | 19,662,424 | (8,581,379) | - | 11,081,045 | *Commitment and contigencies of Corporate business entities revenue* |
| | 70,902,886 | (11,145,678) | (847,353) | 58,909,855 | |

Manajemen berkeyakinan bahwa, aset pajak tangguhan yang diakui sebesar porsi dapat dimanfaatkan atas tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan.

*Management believes that deferred tax assets are recognized to the extent that they can be utilized based on the availability of future taxable income.*

**e. Pemeriksaan pajak**

**Tahun pajak 2024**

- **Pajak pertambahan nilai**

  Pada tanggal 5 Mei 2025, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2024.

  Pada tanggal 15 Desember 2025, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2024 sebesar Rp 5.554.754 yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 22 Januari 2026.

**e. *Tax audit***

***Fiscal year 2024***

- ***Value added tax***

  *On 5 May 2025, the Company received a tax audit letter related to overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2024.*

  *On 15 December 2025, the Company received an overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2024 amounting to Rp 5,554,754 and the payment was received by the Company on 22 January 2026.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/48 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**e. Pemeriksaan pajak** (lanjutan)

**Tahun pajak 2023**

- **Pajak Penghasilan**

Pada tanggal 4 Juni 2025, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk keseluruhan Pajak Penghasilan tahun pajak 2023.

Pada tanggal 21 Oktober 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) untuk keseluruhan Pajak Penghasilan tahun pajak 2023.

- **Pajak pertambahan nilai**

Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2023.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2023 sebesar Rp 3.124.162 yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 16 Januari 2025.

***13. TAXATION** (continued)*

***e. Tax audit** (continued)*

***Fiscal year 2023***

- ***Income taxes***

*On 4 June 2025, the Company received a tax audit letter related to income taxes for fiscal year 2023.*

*On 21 October 2025, the Company received a Tax Assessment Letter confirming nil underpayment for income taxes for the 2023 fiscal year.*

- ***Value added tax***

*On 22 March 2024, the Company received a tax audit letter related to overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2023.*

*On 24 December 2024, the Company received an overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2023 amounting to Rp 3,124,162 and the payment was received by the Company on 16 January 2025.*

**14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN**

***14. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES***

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Beban jasa konsultasi | 30,728,290 | 31,686,926 | *Advisory fees* |
| Bonus dan gaji | 42,393,086 | 33,114,397 | *Bonus and salary* |
| Estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi | - | 50,368,387 | *Estimated commitment and contingencies of corporate business entities* |
| Lainnya | 3,295,610 | 2,754,813 | *Others* |
| | 76,416,986 | 117,924,523 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/49 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 15. PENDAPATAN TANGGUHAN / *15. UNEARNED INCOME*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Penjaminan infrastruktur | 32,869,530 | 31,887,277 | *Infrastructure guarantee* |
| Penjaminan pelaku usaha korporasi | - | 39,907,654 | *Corporate business entities guarantee* |
| | 32,869,530 | 71,794,931 | |

## 16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN / *16. FINANCE LEASE LIABILITIES*

Liabilitas sewa pembiayaan merupakan liabilitas sewa pembiayaan aset hak-guna yang merupakan nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar dan dihitung dengan suku bunga implisit dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

*Finance lease liabilities represent lease liabilities for right-of-use assets of present value of unpaid lease payments and are calculated using the implicit interest rate of the incremental loan interest rate.*

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

*Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments for year 2025 and 2024 were as follows.*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut: | | | *The present value lease liabilities are as follows:* |
| - Tidak lebih dari 1 tahun | 13,244,378 | 17,954,021 | *Not later than 1 year* - |
| - Lebih dari 1 tahun | - | 13,244,378 | *Later than 1 year* - |
| | 13,244,378 | 31,198,399 | |

## 17. PINJAMAN PENERUSAN / *17. TWO-STEP LOANS*

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

*On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.*

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu *World Bank*, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

*Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/50 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**17. PINJAMAN PENERUSAN** (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek KPBU di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amendemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan telah berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 19 November 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-162/MK.5/2020 sebagai amendemen kedua atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan jadwal pembayaran pokok pinjaman dengan masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah sebesar Rp 52.701.112 dan Rp 54.586.445. Pinjaman penerusan ini menggunakan SUN *Benchmark* sebagai acuan tingkat suku bunga atau setara dengan tingkat suku bunga 7,13% pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas Cicilan Pokok Rp 1.885.333 (2024: Rp 540.241) dan bunga pinjaman penerusan Rp 3.864.534 (2024: Rp 3.938.537).

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

***17. TWO-STEP LOANS** (continued)*

*The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on PPP in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.*

*On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown expired on 30 April 2019.*

*On 19 November 2020, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-162/MK.5/2020 as second amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of changes in repayment schedule with grace period of 9 (nine) years starting from the first drawdown date and are due up to 2034.*

*As at 31 December 2025 and 2024, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 52,701,112 and Rp 54,586,445. This loan used SUN Benchmark as reference of interest expense or equivalent to 7.13% for the year ended 31 December 2025 2024, respectively. As of 31 December 2025, the Company has paid the principal installments Rp 1,885,333 (2024: Rp 540,241) and interest of the two-step loans amounting Rp 3,864,534 (2024: Rp 3,938,537).*

*The Company has complied with the covenants in the borrowing agreements above.*

*Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/51 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION*

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 dan PP 35/2021.

*The Company provides employee benefits based on the provisions of Job Creation Law No. 6/2023 and PP 35/2021.*

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, perusahaan aktuaris independen.

*Employee benefits obligations as at 31 December 2025 and 2024 have been calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, an independent actuary.*

Liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan aktuaria tanggal 18 Februari 2026 dan 18 Februari 2025 diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Employee benefits obligations based on the actuarial reports dated 18 February 2026 and dated 18 February 2025 recognised in the statements of financial position are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya | 31,676,330 | 25,123,655 | *Pension and other post-employment benefits* |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 7,606,192 | 7,057,336 | *Other long-term benefits* |
| | 39,282,522 | 32,180,991 | |

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya | 6,072,974 | 6,176,960 | *Pension and other post-employment benefits* |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 1,099,477 | 1,781,183 | *Other long-term benefits* |
| | 7,172,451 | 7,958,143 | |

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Usia pensiun normal | 56 tahun/*years* | 56 tahun/*years* | *Retirement age* |
| Tingkat diskonto | 6.55% | 7.15% | *Discount rate* |
| Tingkat mortalita | TMI 4 (2019) | TMI 4 (2019) | *Mortality rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 10.00% | 10.00% | *Salary increment rate* |
| Tingkat pengunduran diri | 5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter* | 5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter* | *Resignation rate* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/52 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)*

### Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya / *Pension and other post-employment benefits*

Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya | 31,676,330 | 25,123,655 | *Pension and other post-employment benefits obligation* |

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Biaya jasa kini | 4,190,869 | 4,329,637 | *Current service cost* |
| Beban bunga | 1,766,490 | 1,610,173 | *Interest cost* |
| Biaya jasa lalu | 13,399 | 53,670 | *Past service cost* |
| Kelebihan pembayaran imbalan | 102,216 | 183,480 | *Excess of benefit paids* |
| | 6,072,974 | 6,176,960 | |

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya adalah sebagai berikut:

*The movement in the pension and other post-employment benefits is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal tahun | 25,123,655 | 24,549,282 | *Balance at the beginning of the year* |
| Beban imbalan kerja tahun berjalan | 6,072,974 | 6,176,960 | *Employee benefit expense charged in the current year* |
| Pengukuran kembali: | | | *Remeasurement:* |
| Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan | 1,174,971 | (3,851,606) | *Gain/(loss) from changes in financial assumptions* |
| Pembayaran imbalan kerja | (695,270) | (1,750,981) | *Benefit paid* |
| | 31,676,330 | 25,123,655 | |

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pascakerja lainnya adalah sebagai berikut:

*The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:*

| | 31 Desember/*December* 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation* | | | |
| | Perubahan asumsi/ *Change in assumption* | Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* | Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* | |
| Tingkat diskonto | 1.00% | (4,179,160) | 4,838,652 | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 1.00% | 4,686,341 | (4,133,731) | *Rate of salary increase in the future* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/53 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA** (lanjutan) / ***18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION*** *(continued)*

**Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya** (lanjutan) / ***Pension and other post-employment benefits*** *(continued)*

| | 31 Desember/*December* 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation* | | | |
| | Perubahan asumsi/ *Change in assumption* | Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* | Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* | |
| Tingkat diskonto | 1.00% | (2,196,856) | 2,522,450 | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 1.00% | 3,927,031 | (3,453,796) | *Rate of salary increase in the future* |

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 14,15 tahun (2024: 15,00 tahun).

*The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2025 is 14.15 years (2024: 15.00 years).*

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

*Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1,642,492 | 835,005 | *Less than a year* |
| 1 sampai 2 tahun | 3,222,965 | 1,816,263 | *Between 1 - 2 years* |
| 2 sampai 5 tahun | 4,779,198 | 7,765,088 | *Between 2 - 5 years* |
| Lebih dari 5 tahun | 247,403,962 | 247,776,190 | *Over than 5 years* |

**Imbalan jangka panjang lainnya** / ***Other long-term benefits***

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Other long-term benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya | 7,606,192 | 7,057,336 | *Other long-term benefits obligation* |

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Biaya jasa kini | 972,785 | 988,785 | *Current service cost* |
| Biaya jasa lalu | - | 14,300 | *Past service cost* |
| Beban bunga | 469,624 | 389,371 | *Interest cost* |
| (Keuntungan)/kerugian aktuarial | (342,932) | 388,727 | *Actuarial (gains)/loss* |
| | 1,099,477 | 1,781,183 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/54 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)*

**Imbalan jangka panjang lainnya** (lanjutan) / ***Other long-term benefits** (continued)*

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *The movement in the employee benefits obligation is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal tahun | 7,057,336 | 5,976,989 | *Balance at the beginning of the year* |
| Beban tahun berjalan | 1,099,477 | 1,781,183 | *Current year expense* |
| Pembayaran imbalan kerja | (550,621) | (700,836) | *Employee benefits paid* |
| | 7,606,192 | 7,057,336 | |

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:*

| | 31 Desember/*December* 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation* | | | |
| | Perubahan asumsi/ *Change in assumption* | Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* | Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumption* | |
| Tingkat diskonto | 1.00% | (493,154) | 554,326 | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 1.00% | 565,478 | (513,160) | *Rate of salary increase in the future* |

| | 31 Desember/*December* 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation* | | | |
| | Perubahan asumsi/ *Change in assumption* | Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* | Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* | |
| Tingkat diskonto | 1.00% | (446,188) | 502,841 | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 1.00% | 517,634 | (468,472) | *Rate of salary increase in the future* |

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: / *Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 767,821 | 978,342 | *Less than a year* |
| 1 sampai 2 tahun | 994,847 | 833,122 | *Between 1 - 2 years* |
| 2 sampai 5 tahun | 3,159,135 | 3,387,187 | *Between 2 - 5 years* |
| Lebih dari 5 tahun | 25,641,757 | 28,251,972 | *Over than 5 years* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/55 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 19. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*The composition of Company's shareholder as at 31 December 2025 and 2024 are as follows:*

| | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah saham/ *Number of shares*** | **Kepemilikan/ *Ownership (%)*** | **Nilai/ *Value*** | |
| Pemerintah Republik Indonesia | 10,655,000 | 100 | 10,655,000,000 | *Government of the Republic of Indonesia* |

| | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah saham/ *Number of shares*** | **Kepemilikan/ *Ownership (%)*** | **Nilai/ *Value*** | |
| Pemerintah Republik Indonesia | 10,655,000 | 100 | 10,655,000,000 | *Government of the Republic of Indonesia* |

## 20. DIVIDEN / *DIVIDEND*

Pada tahun 2025, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 5 tanggal 6 Mei 2025, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2025 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2024 sejumlah Rp 186.176.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2025.

*In 2025, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 5 dated 6 May 2025, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 6 May 2025 approved amount of dividend for 2024 amounting Rp 186,176,000 that has been paid on 3 June 2025.*

Pada tahun 2024, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 23 tanggal 21 Mei 2024, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2023 sejumlah Rp 167.165.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Juni 2024.

*In 2024, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 23 dated 21 May 2024, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 21 May 2024 approved amount of dividend for 2023 amounting Rp 167,165,000 that has been paid on 6 June 2024.*

## 21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB / *RETAINED EARNING APPROPRIATED - STATUTORY RESERVE*

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

*Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/56 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB** (lanjutan)

Pada tahun 2025, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 46.544.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 352.814.126. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 5 tanggal 6 Mei 2025.

Pada tahun 2024, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 41.792.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 306.270.126. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 23 tanggal 21 Mei 2024.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

***21. RETAINED EARNING APPROPRIATED - STATUTORY RESERVE*** *(continued)*

*In 2025, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 46,544,000, as the reserve balance became Rp 352,814,126. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 5 of Arry Supratno, S.H., dated 6 May 2025.*

*In 2024, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 41,792,000, as the reserve balance became Rp 306,270,126. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 23 of Arry Supratno, S.H., dated 21 May 2024.*

*Management plans to increase the general reserve in the future.*

**22. PENDAPATAN** / ***22. REVENUES***

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan penjaminan: | | | *Revenue from guarantee:* |
| - Pendapatan premi | 153,127,427 | 144,317,918 | *Premium income* - |
| - Pendapatan pelaku usaha korporasi | 90,276,041 | 125,671,843 | *Corporate business entities revenue* - |
| - Pendapatan provisi dan komisi | 49,180,954 | 40,064,346 | *Fees and commission* - |
| | 292,584,422 | 310,054,107 | |
| Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi | 55,393,409 | 70,265,155 | *Revenue from project preparation and transaction advisory* |
| Pendapatan pengelolaan dana: | | | *Income from investments:* |
| - Deposito berjangka | 536,931,405 | 491,737,556 | *Time deposits* - |
| - Investasi dengan pendapatan tetap: Pendapatan bunga | 581,171,885 | 600,177,496 | *Fixed income:* - *Interest income* |
| | 1,118,103,290 | 1,091,915,052 | |
| Pendapatan bunga regres | 10,207,925 | 13,625,092 | *Interest Income from recourse* |
| Pendapatan lainnya | 1,915,754 | 1,071,180 | *Income from others* |
| | 1,478,204,800 | 1,486,930,586 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/57 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 22. PENDAPATAN (lanjutan) / *REVENUES (continued)*

Pendapatan penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Revenue from corporate business entities recognised in the profit or loss is as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Amortisasi pendapatan tangguhan penjaminan pelaku usaha korporasi | 50,368,387 | 88,850,000 | *Amortisation of corporate business entities unearned income* |
| Estimasi komitmen pelaku usaha korporasi | 39,907,654 | 36,821,843 | *Estimated corporate business entities commitment* |
| | 90,276,041 | 125,671,843 | |

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

*Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.*

## 23. BEBAN USAHA / *OPERATING EXPENSES*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Umum dan administrasi:** | | | ***General and administrative:*** |
| - Pegawai | 67,994,522 | 60,435,400 | *Employee cost* - |
| - Sewa | 22,040,038 | 20,515,894 | *Rent* - |
| - Jasa profesional | 14,205,146 | 11,854,549 | *Professional fees* - |
| - *Outsourcing* | 7,884,422 | 6,914,927 | *Outsourcing* - |
| - Pemeliharaan | 5,442,730 | 7,007,152 | *Maintenance* - |
| - Beban bina karyawan | 4,229,064 | 4,829,265 | *Employee development* - |
| - Rapat dan konferensi | 3,839,695 | 6,242,437 | *Meeting and conference* - |
| - Pelatihan | 2,174,851 | 4,615,925 | *Training* - |
| - Perjalanan dinas | 1,267,102 | 3,382,653 | *Travelling* - |
| - Transportasi | 1,027,042 | 1,113,879 | *Transportation* - |
| - Perlengkapan kantor | 975,021 | 1,005,486 | *Office equipment* - |
| - Air dan Listrik | 271,475 | 251,251 | *Water & electricity* - |
| - Lokakarya | 73,787 | 73,489 | *Workshop* - |
| - Komunikasi | 27,711 | 50,615 | *Communication* - |
| - Lainnya | 267,096 | 259,959 | *Others* - |
| | 131,719,702 | 128,552,881 | |
| **Penjaminan:** | | | ***Guarantee:*** |
| - Pegawai | 81,449,322 | 78,529,622 | *Employee cost* - |
| - Konsultan | 6,106,922 | 6,757,115 | *Consultancy* - |
| - Perjalanan dinas | 1,543,712 | 1,411,005 | *Travelling* - |
| - Rapat dan konferensi | 1,101,665 | 790,371 | *Meeting and conference* - |
| - Lokakarya | 387,571 | 435,370 | *Workshop* - |
| | 90,589,192 | 87,923,483 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/58 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 23. BEBAN USAHA (lanjutan) / *23. OPERATING EXPENSES (continued)*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:** | | | ***Project preparation and transaction advisory:*** |
| - Konsultan | 30,880,755 | 44,342,233 | *Consultancy* - |
| - Pegawai | 13,561,300 | 11,661,102 | *Employee cost* - |
| - Perjalanan dinas | 1,450,804 | 3,035,626 | *Travelling* - |
| - Rapat dan konferensi | 1,438,461 | 1,617,598 | *Meeting and conference* - |
| - Lokakarya | 303,075 | 672,057 | *Workshop* - |
| - Lainnya | 175,529 | 113,063 | *Others* - |
| | 47,809,924 | 61,441,679 | |
| **Inisiasi bisnis:** | | | ***Business initiation:*** |
| - Pegawai | 15,875,513 | 16,536,866 | *Employee cost* - |
| - Lokakarya | 105,573 | - | *Workshop* - |
| - Rapat dan konferensi | 131,627 | 643,314 | *Meeting and conference* - |
| - Perjalanan dinas | 58,146 | 208,728 | *Travelling* - |
| - Konsultan | - | 2,740,364 | *Consultancy* - |
| | 16,170,859 | 20,129,272 | |
| **Pengembangan usaha:** | | | ***Business development:*** |
| - Pegawai | 20,521,124 | 20,870,443 | *Employee cost* - |
| - Sumbangan sosial | 6,048,508 | 4,867,517 | *Social contribution* - |
| - *IIGF Institute* | 5,595,182 | 5,089,557 | *IIGF Institute* - |
| - Lokakarya | 4,028,076 | 3,784,291 | *Workshop* - |
| - Iklan dan promosi | 1,308,625 | 1,860,468 | *Advertising and promotion* - |
| - Representasi | 573,297 | 908,494 | *Representation* - |
| - Rapat dan konferensi | 774,459 | 1,208,838 | *Meeting and conference* - |
| - Perjalanan dinas | 127,967 | 75,866 | *Travelling* - |
| | 38,977,238 | 38,665,474 | |

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

*Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.*

## 24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN / *24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION*

**Sifat pihak berelasi** / ***Nature of relationship***

a. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.

*a. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.*

b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.

*b. The Board of Directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.*

c. Bank-bank BUMN dan entitas-entitas nonbank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito berjangka dan obligasi.

*c. SOEs banks and non-banks SOEs are related parties as those entities under common controls of the Government of the Republic of Indonesia where the Company places its investments in time deposits and bonds.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/59 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

***24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION** (continued)*

**Sifat pihak berelasi** (lanjutan)

***Nature of relationship** (continued)*

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

*In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:*

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

***Balances arising from related parties transactions***

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Kas dan setara kas** | | | ***Cash and cash equivalents*** |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 4,096,006,538 | 6,838 | *PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk* |
| - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2,247,572,394 | 4,607,997 | *PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk* |
| - PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 23,592,195 | 32,527,189 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* |
| - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 22,566,103 | 23,258,655 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 537,052 | - | *PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk* |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah) | 474 | 1,636,000,474 | *PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk (Syariah)* |
| | 6,390,274,756 | 1,696,401,153 | |
| **Investasi** | | | ***Investments*** |
| - Pemerintah Republik Indonesia | 8,734,103,091 | 8,003,060,381 | *Government of the - Republic of Indonesia* |
| - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 110,000,000 | 140,000,000 | *PT Sarana Multigriya Finansial - (Persero)* |
| - PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 40,000,000 | 40,000,000 | *PT Kereta Api Indonesia - (Persero)* |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah) | - | 2,378,000,000 | *PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk (Syariah)* |
| - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 1,000,000,000 | *PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk* |
| - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | - | 150,000,000 | *PT Pelabuhan Indonesia - (Persero)* |
| - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 38,000,000 | *PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk* |
| - PT Pupuk Indonesia (Persero) | - | 80,000,000 | *PT Pupuk Indonesia (Persero) -* |
| - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | - | 77,000,000 | *PT Telekomunikasi Indonesia - (Persero) Tbk* |
| | 8,884,103,091 | 11,906,060,381 | |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/60 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

***24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION*** *(continued)*

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi** (lanjutan)

***Balances arising from related parties transactions*** *(continued)*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Piutang usaha** | | | ***Account receivables*** |
| - Pemerintah Republik Indonesia | 173,220,296 | 154,474,132 | *Government of the Republic of Indonesia* |
| - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 22,222,276 | 2,218,262 | *PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 2,615,321 | - | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,373,918 | - | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 965,312 | 1,201,562 | *PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)* |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah) | - | 4,332,717 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)* |
| - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | - | 2,950,875 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* |
| - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,998,838 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| - Lain-lain (dibawah Rp 500.000) | 207,800 | 801,376 | *Others (below Rp 500,000)* |
| | 200,604,923 | 168,977,762 | |
| | 15,474,982,770 | 13,771,439,296 | |
| Persentase terhadap jumlah aset | 87.35% | 81.06% | *Percentage of total assets* |
| **Pinjaman penerusan** | | | ***Two-step loans*** |
| - Pemerintah Republik Indonesia | 52,701,112 | 54,586,445 | *Government of the Republic of Indonesia* |
| | 52,701,112 | 54,586,445 | |
| Persentase terhadap jumlah liabilitas | 22.78% | 17.28% | *Percentage of total liabilities* |
| **Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain** | | | ***Accrued expenses, provisions and other payables*** |
| - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | 1,225,900 | 1,225,900 | *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)* |
| - Pemerintah Republik Indonesia | 1,100,767 | 1,140,146 | *Government of the Republic of Indonesia* |
| | 2,326,667 | 2,366,046 | |
| Persentase terhadap jumlah liabilitas | 1.01% | 0.75% | *Percentage of total liabilities* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/61 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

***24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION*** *(continued)*

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi** (lanjutan)

***Balances arising from related parties transactions*** *(continued)*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Pendapatan** | | | ***Revenues*** |
| - Pemerintah Republik Indonesia | 705,016,760 | 737,863,800 | *Government of the Republic of Indonesia* - |
| - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 140,378,315 | 148,779,443 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* - |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah) | 132,523,446 | 239,610,507 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)* - |
| - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 107,500,534 | 3,748,548 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* - |
| - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 48,375,808 | 27,970,332 | *PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* - |
| - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 40,840,778 | 14,643,929 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* - |
| - PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 20,140,581 | 20,140,581 | *PT Waskita Karya (Persero) Tbk* - |
| - PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 9,583,858 | 16,077,452 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* - |
| - PT Pertamina (Persero) | 8,919,477 | 8,919,477 | *PT Pertamina (Persero)* - |
| - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 7,313,667 | 14,023,667 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* - |
| - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 6,999,083 | 19,870,611 | *PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)* - |
| - PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 6,681,868 | 4,751,422 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* - |
| - PT Geo Dipa Energi (Persero) | 3,528,675 | 3,385,867 | *PT Geo Dipa Energi (Persero)* - |
| - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | | | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* - |
| - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 2,784,299 | 5,875,528 | *PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk* - |
| - PT Pupuk Indonesia (Persero) | 2,669,333 | 6,108,667 | *PT Pupuk Indonesia (Persero)* - |
| - PT Pegadaian (Persero) | | | *PT Pegadaian (Persero)* - |
| - PT Len Industri (Persero) | 2,400,000 | 2,400,000 | *PT Len Industri (Persero)* - |
| - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | 1,377,566 | 1,322,743 | *Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)* - |
| - Perusahan Umum Damri | 600,000 | 200,000 | *Perusahaan Umum Damri* - |
| - PT Jasa Marga (Persero) | 299,000 | 182,000 | *PT Jasa Marga (Persero)* - |
| - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | 21,000 | 42,000 | *PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)* - |
| - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | - | 2,415,000 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* - |
| - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk | - | 776,882 | *PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk* - |
| | 1,247,954,048 | 1,279,108,456 | |
| Persentase terhadap jumlah pendapatan | 84.42% | 86.02% | *Percentage of total revenue* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/62 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

***24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION*** *(continued)*

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi** (lanjutan)

***Balances arising from related parties transactions*** *(continued)*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| **Beban bunga** | | | ***Interest expense*** |
| - Pemerintah Republik Indonesia | 3,825,155 | 3,927,253 | *Government of the - Republic of Indonesia* |
| Persentase terhadap jumlah beban usaha | 0.71% | 0.72% | *Percentage of total operating expense* |
| **Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci** | | | ***Compensation and remuneration of the key management personnel*** |
| Dewan Komisaris | | | *Board of Commissioners* |
| - Gaji dan imbalan kerja jangka pendek | 10,198,586 | 9,794,519 | *Salary and short-term - employee benefit* |
| Direksi | | | *Board of Directors* |
| - Gaji dan imbalan kerja jangka pendek | 20,007,560 | 22,976,952 | *Salary and short-term - employee benefit* |
| | 30,206,146 | 32,771,471 | |
| Persentase terhadap jumlah beban usaha | 5.63% | 6.01% | *Percentage of total operating expenses* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/63 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 25. PERJANJIAN PENTING

### Perjanjian Penjaminan

Hal-hal berikut adalah perjanjian penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2025:

KPBU

## *25. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

### *Guarantee Agreement*

*The following are the guarantee agreement entered by the Company as at 31 December 2025:*

*PPP*

| No | Proyek / *Project* | Badan Usaha / *Business Entity* | Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date* | Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date* | Maksimum Nilai Penjaminan* / *Maximum Guarantee Value** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Batang Jawa Tengah ("CJPP") / *Batang East Java Power Plant ("CJPP")* | PT Bhimasena Power Indonesia | 6 Oktober / *October 2011* | 6 Juni / *June 2016* | Rp 300 Miliar |
| 2 | Paket Palapa Ring Barat / *Western Package Palapa Ring* | PT Palapa Ring Barat | 29 Februari / *February 2016* | 10 November / *November 2016* | Rp 1,293 Miliar |
| 3 | Paket Palapa Ring Tengah/ *Central Package Palapa Ring* | PT LEN Telekomunikasi Indonesia | 4 Maret / *March 2016* | 30 Desember / *December 2016* | Rp 1,211 Miliar |
| 4 | Tol / *Toll Road* Batang - Semarang | PT Jasamarga Semarang Batang | 27 April / *April 2016* | 20 Juni / *June 2016* | Rp 2,450 Miliar |
| 5 | Tol / *Toll Road* Pandaan - Malang | PT Jasamarga Pandaan Malang | 9 Juni / *June 2016* | 3 Oktober / *October 2016* | Rp 5,456 Miliar |
| 6 | Tol / *Toll Road* Manado - Bitung | PT Jasamarga Manado Bitung | 9 Juni / *June 2016* | 6 Oktober / *October 2016* | Rp 3,400 Miliar |
| 7 | Tol / *Toll Road* Balikpapan - Samarinda | PT Jasamarga Balikpapan Samarinda | 9 Juni / *June 2016* | 2 Desember / *December 2016* | Rp 6,120 Miliar |
| 8 | Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Umbulan | PT Meta Adhya Tirta Umbulan | 21 Juli / *July 2016* | 10 Februari / *February 2017* | Rp 1,171 Miliar |
| 9 | Paket Palapa Ring Tengah/ *Eastern Package Palapa Ring* | PT Palapa Timur Telematika | 29 September/ *September 2016* | 29 Maret / *March 2017* | Rp 5,467 Miliar |
| 10 | Tol / Toll Road Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed | PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek | 22 Februari / *February 2017* | 8 Mei / *May 2017* | Rp 600 Miliar |

*) Tidak di audit

*Unaudited*)

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/64 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

**25. *SIGNIFICANT AGREEMENTS*** *(continued)*

***Guarantee Agreement*** *(continued)*

*PPP (continued)*

| No | Proyek / *Project* | Badan Usaha / *Business Entity* | Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date* | Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date* | Maksimum Nilai Penjaminan* / *Maximum Guarantee Value** |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tol / *Toll Road* Cileunyi - Sumedang - Dawuan | PT Citra Karya Jabar Tol | 22 Februari / *February 2017* | 22 Februari / *February 2019* | Rp 1,430 Miliar |
| 12 | Tol / *Toll Road* Krian - Legundi - Bunder - Manyar | PT Waskita Bumi Wira | 22 Februari / *February 2017* | 11 Desember / *December 2017* | Rp 649 Miliar |
| 13 | Tol / Toll Road Serang - Panimbang | PT Wijaya Karya Serang Panimbang | 22 Februari / *February 2017* | 17 November / *November 2017* | Rp 2,053 Miliar |
| 14 | Tol / *Toll Road* Probolinggo - Banyuwangi | PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi | 29 Desember / *December 2017* | 10 Juli / *July 2020* | Rp 2,281 Miliar |
| 15 | Tol / *Toll Road* Jakarta - Cikampek II Selatan | PT Jasamarga Japek Selatan | 29 Desember / *December 2017* | 27 Juni / *June 2019* | Rp 2,280 Miliar |
| 16 | Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Lampung | PT Adhya Tirta Lampung | 14 Februari / *February 2018* | 14 Agustus / *August 2018* | Rp 774 Miliar |
| 17 | Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Semarang Barat | PT Air Semarang Barat | 23 November / *November 2018* | 29 Mei / *May 2019* | Rp 630 Miliar |
| 18 | Bandar Udara / *Airport* Labuan Bajo[1)] | PT Cinta Airport Flores | 7 Februari / *February 2019* | Berakhir Sebelum Efektif / *Expired Before Being Effective* | Rp 367 Miliar |
| 19 | Kereta Api Makassar - Parepare / *Makassar - Parepare Railway Train* | PT Celebes Railway Indonesia | 5 April / *April 2019* | 16 September / *September 2021* | Rp 1,131 Miliar |
| 20 | Satelit Multifungsi Pemerintah / *Government Multifunction Satellite* | PT Satelit Nusantara Tiga | 3 Mei / *May 2019* | 31 Maret / *March 2021* | Rp 9,870 Miliar |
| 21 | Tol / *Toll Road* Semarang - Demak | PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak | 23 September / *September 2019* | 9 Januari / *January 2020* | Rp 5,167 Miliar |
| 22 | Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan / *Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province* | PT Jalintim Adhi Abipraya | 3 Agustus / *August 2020* | 30 Desember / *December 2020* | Rp 1,303 Miliar |

[1)]Tidak di audit

*Unaudited*[1)]

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/65 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

***25. SIGNIFICANT AGREEMENTS** (continued)*

***Guarantee Agreement** (continued)*

*PPP (continued)*

| No | Proyek / *Project* | Badan Usaha / *Business Entity* | Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date* | Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date* | Maksimum Nilai Penjaminan* / *Maximum Guarantee Value** |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tol / *Toll Road* Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo | PT Jogjasolo Marga Makmur | 9 September / *September 2020* | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 2,760 Miliar |
| 24 | Tol / *Toll Road* Yogyakarta - Bawen | PT Jasamarga Jogja Bawen | 13 November / *November 2020* | 7 Mei / *May 2024* | Rp 2,634 Miliar |
| 25 | Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Pekanbaru | PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani | 16 Desember / *December 2020* | 21 Juli / *July 2021* | Rp 469 Miliar |
| 26 | Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Jatiluhur I | PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur | 19 Februari / *February 2021* | 25 Februari / *February 2022* | Rp 2,066 Miliar |
| 27 | Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau / *Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province* | PT Adhi Jalintim Riau | 12 April / *April 2021* | 5 Oktober / *October 2021* | Rp 792 Miliar |
| 28 | Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Karian Serpong | PT Karian Water Services | 29 April / *April 2021* | Belum Efektif / Not Yet Effective | Rp 2,796 Miliar |
| 29 | Jembatan Callender Hamilton / Callender Hamilton Bridge | PT Baja Titian Utama | 6 Desember / *December 2021* | 16 Juni / *June 2022* | Rp 2,736 Miliar |
| 30 | Tol / *Toll Road* Gedebage – Tasikmalaya - Cilacap[2)] | PT Jasamarga Gedebage Cilacap | 31 Januari / *January 2022* | Berakhir Sebelum Efektif / *Expired Before Being Effective* | Rp 3,460 Miliar |
| 31 | Tol / *Toll Road* Gilimanuk – Mengwi[3)] | PT Tol Jaget Kerthi Bali | 8 Maret / *March 2022* | Berakhir Sebelum Efektif / *Expired Before Being Effective* | Rp 2,682 Miliar |
| 32 | Alat Penerangan Jalan / *Road Lighting Device* Madiun | PT Tri Tunggal Madiun Terang | 20 September / *September 2022* | 10 November / *November 2022* | Rp 98 Miliar |
| 33 | Proving Ground BPLJKSB Bekasi | PT Indonesia International Automotive Proving Ground | 31 Oktober / *October 2022* | 13 Juni / *June 2023* | Rp 1,690 Miliar |
| 34 | Tol / *Toll Road* Akses Patimban | PT Jasamarga Akses Patimban | 24 Januari / *January 2023* | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 1,027 Miliar |

*)Tidak di audit

*Unaudited*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/66 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

**25. *SIGNIFICANT AGREEMENTS*** *(continued)*

***Guarantee Agreement*** *(continued)*

*PPP (continued)*

| No | Proyek / *Project* | Badan Usaha / *Business Entity* | Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date* | Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date* | Maksimum Nilai Penjaminan* / *Maximum Guarantee Value** |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat / *Public Street Light West Lombok Regency* | PT Sinar Energi Indonusa | 12 Oktober / *October 2023* | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 98 Miliar |
| 36 | Tol / *Toll Road* JORR Elevated Cikunir - Ulujami | PT Jakarta Metro EkspressWay | 17 Oktober / *October 2023* | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 2,058 Miliar |
| 37 | Tol / *Toll Road* Kediri - Tulungagung | PT Surya Sapta Agung Tol | 27 Februari / *February 2024* | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 1,780 Miliar |
| 38 | Jalan non Tol/ *Non TollRoad* Trans Papua | PT Hutama Mambelim Trans Papua | 3 Juli / July 2024 | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 3,357 Miliar |
| 39 | Jalan Layang/ *Flyover* Sitinjau Lauik 1 | PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik | 2 Maret / March 2025 | 3 Agustus / *August 2025* | Rp 3,115 Miliar |
| 40 | Tol / *Toll Road* Bogor Serpong | PT Bogor Serpong Infra Selaras | 3 Oktober / *October 2025* | Belum Efektif / *Not Yet Effective* | Rp 1,941 Miliar |

[1]Tidak di audit

*Unaudited*[1]

1) Pada tanggal 14 November 2022, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan PT Cinta Airport Flores berakhir sebelum efektif sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan PT Cinta Airport Flores.
2) Pada tanggal 10 Februari 2023, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan PT Jasamarga Gedebage Cilacap berakhir sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan PT Jasamarga Gedebage Cilacap.
3) Pada tanggal 4 Agustus 2023, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan PT Tol Jaget Kerthi Bali berakhir sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan PT Tol Jaget Kerthi Bali.

*1) On 14 November 2022, the guarantee agreement between the Company and PT Cinta Airport Flores expired before being effective due to the expiration of the PKS between the GCA and PT Cinta Airport Flores.*
*2) On 10 February 2023, the guarantee agreement between the Company and PT Jasamarga Gedebage Cilacap expired due to the expiration of the PKS between the GCA and PT Jasamarga Gedebage Cilacap.*
*3) On 4 August 2023, the guarantee agreement between the Company and PT Tol Jaget Kerthi Bali expired due to the expiration of the PKS between the GCA and PT Tol Jaget Kerthi Bali.*

Pada tanggal 31 Desember 2025, estimasi nilai penjaminan dari perjanjian penjaminan KPBU di atas adalah sebesar Rp 85.070 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, terminasi, dana likuiditas terbatas, cidera janji pembayaran bulanan, ketersediaan layanan, biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung, biaya pengakhiran yang ditanggung dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

*As of 31 December 2025, estimated guarantee from this guarantee agreement PPP above is amounting to Rp 85,070 billion (full amount) (unaudited) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, termination, limited liquidity fund, breach of monthly payment, availability payment, non-termination costs, termination costs and termination due to force majeure.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/67 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

## *25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

***Guarantee Agreement** (continued)*

Non-KPBU

*Non-PPP*

| No | Proyek / *Project* | Badan Usaha / *Business Entity* | Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date* | Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date* | Maksimum Nilai Penjaminan* / *Maximum Guarantee Value** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasan Ekonomi Khusus / *Special Economic Zone* Mandalika | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | 31 Desember/ *December 2018* | 22 Maret / *March 2019* | Rp 1,455 Miliar |
| 2 | Hydropower Programme | PT Perusahaan Listrik Negara | 5 September / *September 2019* | 5 September/ *September 2019* | Rp 722 Miliar |
| 3 | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") / *Geothermal Power Plant Development Project* Dieng-2 dan Patuha-2 | PT Geo Dipa Energi (Persero) | 19 Agustus / *August 2022* | 21 September/ *September 2020* | Rp 904 Miliar |
| 4 | Result-Based Lending Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku Papua / *Distribution Network* Kalimantan and Maluku-Papua ("RBL-KMP") | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 16 Desember / *December 2020* | 14 Januari/ *January 2021* | Rp 1,619 Miliar |
| 5 | Result-Based Lending Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara/ *Distribution Network* Sulawesi and Nusa Tenggara *("RBL-SNT")* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 16 Desember / *December 2020* | 16 Desember/ *December 2020* | Rp 833 Miliar |
| 6 | Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali / *East Java and Bali ("EJB") Distribution Network Development* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 10 Februari / *February 2021* | 9 April/ *April 2021* | Rp 956 Miliar |
| 7 | *Sustainable and Reliable Energy Access Program - Western and Central Java ("SREAP")* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 19 Mei / *May 2022* | 31 Mei/ *May 2022* | Rp 2,312 Miliar |
| 8 | Pembangunan PLTU Tahap III/ *PLTU Development Phase III* (PLTU Timor-1 2 x 50 MW) | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 28 Desember / *December 2022* | 28 Desember/ *December 2022* | Rp 413 Miliar |
| 9 | Pinjaman /*Loans* PT Kereta Api Indonesi (Persero) – Kereta Api Cepat Jakarta Bandung | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 25 Januari/ *January 2024* | 25 Januari/ *January 2024* | Rp 1,886 Miliar |
| 10 | Pinjaman / *Loans Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE)* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 28 Mei / *May 2024* | 31 Juli / *July 2024* | Rp 2,357 Miliar |
| 11 | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") / *Geothermal Power Plant Development Project* Dieng-2 dan Patuha-2 Tahap II | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 15 Desember / *December 2025* | Belum Efektif / Not Yet Effective | Rp 599 Miliar |
| 12 | Pinjaman / *Loans Indonesia Sustainable Least-cost Electrification - 2(ISLE - 2)* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 31 Desember / *December 2025* | 2 Februari / *February 2026* | Rp 2,014 Miliar |
| 13 | Pinjaman /*Loans Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET)* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 31 Desember / *December 2025* | 23 Januari/ *January 2026* | Rp 2,098 Miliar |
| 14 | Pinjaman ADB / *ADB Loans Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Program* | PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) | 31 Desember / *December 2025* | Belum Efektif / Not Yet Effective | Rp 1,678 Miliar |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/68 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, estimasi nilai penjaminan dari perjanjian penjaminan non-KPBU di atas adalah sebesar Rp 20.237 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

Penjaminan pelaku usaha korporasi

Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana peran Perusahaan adalah memberikan dukungan *loss limit* dan dapat melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") sebagai Badan Usaha Penjamin yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan PMK tersebut, pada tanggal 19 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI terkait pengaturan tata cara penagihan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang terbit untuk periode bulan Desember 2021.

Pada tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan LPEI sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait perubahan profil risiko debitur yang dapat dijamin.

***25. SIGNIFICANT AGREEMENTS*** *(continued)*

***Guarantee Agreement*** *(continued)*

*Non-PPP (continued)*

*As of 31 December 2025, estimated guarantee from this guarantee agreement non-PPP above is amounting to Rp 20,237 billion (full amount) (unaudited) plus interests and other charges.*

*Corporate business entities*

*On 28 July 2020, the issuance of Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Economic Recovery Program where the role of the Company are providing loss limit supports and performing co-guarantee with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") as a guarantor of Corporate Business Entities appointed by the Government of Indonesia. In accordance with the PMK, on 19 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance, and on 15 December 2020, the Company also entered into a cooperation agreement with LPEI regarding the implementation of the assignment to provide loss limit supports for the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 13 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance regarding the procedure for collecting Loss Limit Guarantee Fees issued for the period December 2021.*

*On 23 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance and also on 15 February 2021 with LPEI regarding implementation of a co-guarantee assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 9 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with LPEI regarding the changes in the debtor's risk profile that can be guaranteed.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/69 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2021, telah diterbitkan PMK No. 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2021.

Pada tanggal 30 Maret 2022, telah diterbitkan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan diperpanjang paling lama pada tanggal 16 Desember 2022.

Berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Perusahaan memberikan dukungan *loss limit* kepada LPEI dengan batasan 90% dari akumulasi imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima Perusahaan dari Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 98/PMK.08/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 27/PMK.08/2022, masa pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah berakhir di tahun 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat eksposur dukungan *loss limit* yang masih berjalan, dan seluruh hak serta kewajiban yang timbul berdasarkan skema tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perjanjian kerja sama yang berlaku.

***25. SIGNIFICANT AGREEMENTS*** *(continued)*

***Guarantee Agreement*** *(continued)*

*Corporate business entities (continued)*

*On 1 April 2021, the issuance of PMK No. 32/PMK.08/2021 regarding Changes of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates has ended on 17 December 2021.*

*On 30 March 2022, the issuance of PMK No. 27/PMK.08/2022 regarding second amendment of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates was extended no later than 16 December 2022.*

*Based on assignment from the Government, the Company provides loss limit supports to LPEI with threshold 90% of the accumulated loss limit received by the Company from Government.*

*Based on PMK No. 98/PMK.08/2020, as most recently amended by PMK No. 27/PMK.08/2022, the period for providing loss limit support under the Government Guarantee scheme for the National Economic Recovery Program ended in 2025. As of 31 December 2025, there is no outstanding loss limit support exposure, and all rights and obligations arising from the scheme have been settled in accordance with the applicable laws and cooperation agreements.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/70 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

BUMN

**25. *SIGNIFICANT AGREEMENTS*** *(continued)*

***Guarantee Agreement*** *(continued)*

*SOEs*

| No | Proyek / *Project* | Badan Usaha / *Business Entity* | Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date* | Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date* | Maksimum Nilai Penjaminan* / Maximum *Guarantee Value** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obligasi III / *Bonds III* PT Waskita Karya (Persero) Tbk | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 16 September / *September 2021* | 16 September / *September 2021* | Rp 112 Miliar |
| 2 | Pinjaman / *Loans* PT Waskita Karya (Persero) Tbk | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 29 Oktober / *October 2021* | 29 Oktober / *October 2021* | Rp 3,230 Miliar |
| 3 | Obligasi IV / *Bonds IV* PT Waskita Karya (Persero) Tbk | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 22 April / *April 2022* | 22 April / *April 2022* | - |
| 4 | Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 22 April 2022 / *22 April 2022* | 22 April 2022 / *22 April 2022* | Rp 586 Miliar |
| 5 | Pinjaman / *Loans* PT Industri Kereta Api (Persero) | PT Industri Kereta Api (Persero) | 30 Desember / *December 2022* | 30 Desember / *December 2022* | - |
| 6 | Pinjaman / *Loans* Perusahaan Umum DAMRI | Perusahaan Umum DAMRI | 30 Desember / *December 2022* | 30 Desember / *December 2022* | Rp 72 Miliar |
| 7 | Pinjaman / *Loans* PT Pertamina (Persero) )[2)] | PT Pertamina (Persero) | 30 Desember / *December 2022* | 30 Desember / *December 2022* | Rp 3,304 Miliar |
| 8 | Pinjaman / *Loans* PT Len Industri (Persero) | PT Len Industri (Persero) | 30 Desember / *December 2022* | 30 Desember / *December 2022* | Rp 480 Miliar |
| 9 | Pinjaman / *Loans* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) [1)] | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 19 Oktober / October 2023 | 19 Oktober / *October 2023* | Rp 750 Miliar |

1) Penjaminan Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia sesuai PMK 34/2023 telah berakhir periode penjaminannya pada tanggal 2 April 2024.

2) Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero) sesuai PMK 211/2020 telah berakhir periode penjaminannya pada tanggal 30 Desember 2025.

*1) PT Rajawali Nusantara Indonesia Loan Guarantee in accordance with PMK 34/2023 has its guarantee period ended the guarantee period on 2 April 2024.*

*2) PT Pertamina (Persero) Indonesia Loan Guarantee in accordance with PMK 211/2020 has its guarantee period ended the guarantee period on 30 December 2025.*

**Kontinjensi**

Dalam penjaminan KPBU, terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh BU kepada PJPK 7 hari setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO"). Dalam hal PJPK tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2025, estimasi potensi klaim kepada PJPK terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah untuk 6 (enam) proyek adalah sebesar Rp 588 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit).

***Contingencies***

*In PPP guarantee, regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for several toll road projects that were guaranteed by the Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to GCA 7 days after the issuance of the Operation Worthiness Certificate ("OWC"). If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the Investor could submit a claim to the Company. As per 31 December 2025, the estimated potential claims to GCA regarding the delay of land acquisition risk for 6 (six) guaranteed projects is Rp 588 billion (full amount) (unaudited).*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/71 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

**Kontinjensi** (lanjutan)

Selain itu, terdapat potensi cedera janji atas pembayaran bulanan pada salah satu proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran klaim penjaminan dengan estimasi nilai sebesar Rp 55 miliar (tidak diaudit). Perusahaan juga mengidentifikasi adanya potensi terminasi pada salah satu proyek SPAM sebagai akibat berakhirnya penjaminan atas tagihan bulanan, dengan estimasi nilai sebesar Rp 353 miliar (tidak diaudit).

Dalam penjaminan Non-KPBU, jika BUMN Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian pinjaman kepada pemberi pinjaman, Perusahaan akan melaksanakan fungsinya sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran BUMN Terjamin tersebut. Terdapat potensi cidera janji dari 1 (satu) debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya pada tahun 2026 dengan estimasi potensial klaim sebesar Rp 3.231 miliar (tidak diaudit). Sehubungan dengan potensi cidera janji ini, debitur akan melakukan upaya-upaya lain dalam pemenuhan kewajiban finansialnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki di atas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJPK ("KPBU") atau BUMN Terjamin ("Non-KPBU") dari masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

***25. SIGNIFICANT AGREEMENTS** (continued)*

***Guarantee Agreement** (continued)*

***Contingencies** (continued)*

*In addition, there is a potential default on the monthly payment of one of the Drinking Water Supply System ("SPAM") projects, which may result in a guarantee claim payment obligation with an estimated amount of Rp 55 billion (unaudited). The Company has also identified a potential termination of one of SPAM projects due to the expiration of the guarantee coverage for the monthly invoices, with an estimated amount of Rp 353 billion (unaudited).*

*In Non-PPP guarantee, if guaranteed SOEs are unable to fulfill payment obligations in accordance with the loan agreement to the lender, the Company will carry out its function as a guarantor for the Guaranteed BUMN's payment obligations. There is a potential breach of contract for 1 (one) debtor in fulfilling its financial obligations in 2026 with an estimated potential claim of IDR 3,231 billion (unaudited). In connection with this potential breach of contract, the debtor has will make other efforts to fulfill its financial obligations.*

*As at 31 December 2025 and 2024, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognised in the financial statements. Based on the assessment, as at 31 December 2025 and 2024, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.*

*Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA ("PPP") or guaranteed SOEs ("Non-PPP") of each projects, which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.*

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/72 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. PERJANJIAN PENTING** (lanjutan)

**Perjanjian Penjaminan** (lanjutan)

**Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti**

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 4 (empat) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti untuk periode perpanjangan sewa selama 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023.

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2023 dan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

***25. SIGNIFICANT AGREEMENTS** (continued)*

***Guarantee Agreement** (continued)*

***Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti***

*On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 4 (four) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.*

*On 27 July 2020, the Company entered into extension of lease agreement with PT Mahkota Prima Properti for another 3 (three) years lease period starting from 1 September 2020 and expires on 31 August 2023.*

*On 2 August 2023, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 3 (three) years starting from 1 September 2023 and expires on 31 August 2026.*

*This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.*

**26. TRANSAKSI NONKAS**

Transaksi nonkas yang penting adalah sebagai berikut:

***26. NON-CASH TRANSACTIONS***

*The principal non-cash transactions are as follows:*

| | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pencadangan saldo laba | 46,544,000 | 41,792,000 | *Appropriation retained earnings* |
| Kerugian penurunan nilai - piutang usaha | (36,333,890) | (38,913,580) | *Impairment losses - account receivables* |
| Perubahan nilai pasar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar | 103,962,296 | (56,945,416) | *Changes in fair value of financial assets at fair value* |

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**Lampiran - 5/73 - *Schedule***

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2025***
*(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)*

## 27. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH / *NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION*

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut: / *Reconciliation from financing activities are as follows:*

| | 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perubahan non-kas/ *Non-cash changes* | | | |
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Arus kas/ *Cashflow* | Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange* | Pergerakan beban transaksi/ *Changes in transaction cost* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| Pinjaman penerusan | 54,586,445 | (1,885,333) | - | - | 52,701,112 | *Two-step loans* |
| Liabilitas sewa pembiayaan | 31,198,399 | (19,678,524) | - | 1,724,503 | 13,244,378 | *Financial lease liabilities* |
| Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan | 85,784,844 | (21,563,857) | - | 1,724,503 | 65,945,490, | *Total liabilities from financing activities* |

| | 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perubahan non-kas/ *Non-cash changes* | | | |
| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Arus kas/ *Cashflow* | Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange* | Pergerakan beban transaksi/ *Changes in transaction cost* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
| Pinjaman penerusan | 55,126,686 | (540,241) | - | - | 54,586,445 | *Two-step loans* |
| Liabilitas sewa pembiayaan | 46,200,522 | (18,610,859) | - | 3,608,736 | 31,198,399 | *Financial lease liabilities* |
| Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan | 101,327,208 | (19,151,100) | - | 3,608,736 | 85,784,844 | *Total liabilities from financing activities* |

## 28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN / *EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD*

### a) Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement*

KPBU / *PPP*

Berdasarkan surat Bupati Lombok Barat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Nomor 180/67/Hukum/2026 tanggal 5 Januari 2026, Proyek KPBU PJU Kabupaten Lombok Barat dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya dan akan dilakukan pengkajian ulang atas proyek tersebut.

*Based on the letter of the Regent of West Lombok in his capacity as the Contracting Agency (PJPK) No. 180/67/Hukum/2026 dated 5 January 2026, the West Lombok Street Lighting Public-Private Partnership (PPP) Project was declared not to proceed to the next stage and will be subject to further review.*

Non-KPBU / *Non-PPP*

Pada tanggal 6 Februari 2026, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek *Green Energy Corridor Sulawesi ("GECS")* dengan PLN selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

*On 6 February 2026, the Company entered into loan guarantee agreement of Green Energy Corridor Sulawesi ("GECS") project with PLN as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.*

pwc

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

# Laporan asurans praktisi independen yang memberikan keyakinan memadai atas Laporan Capaian Kinerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2025

Strictly private and confidential

Laporan No. N20260302052/DC2/JPA/2026

**Laporan asurans praktisi independen yang memberikan keyakinan memadai atas Laporan Capaian Kinerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

**Kepada para Pemegang Saham**

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

Sesuai dengan surat penugasan tertanggal 31 Desember 2025, kami telah menyelesaikan perikatan asurans yang memberikan keyakinan memadai atas Informasi-Informasi Tertentu di dalam Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ("Laporan Capaian Kinerja"). Perikatan dengan keyakinan memadai ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dari Kementerian Keuangan ("Kemenkeu"), yang mengharuskan Perusahaan untuk menyampaikan laporan secara tertulis, setiap tahunnya, dari praktisi independen yang ditunjuk terkait Laporan Capaian Kinerja Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

**Informasi-informasi tertentu**

Informasi-Informasi Tertentu terdiri dari informasi atas Realisasi, Capaian IKU dan Nilai Kinerja di dalam Laporan Capaian Kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana terangkum dalam Lampiran 2.

**Kriteria pelaporan**

Informasi-Informasi Tertentu di atas telah dinilai berdasarkan definisi, pendekatan dan pengukuran atas Manual Indikator Kinerja Utama ("Manual IKU") yang telah disetujui untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana terangkum dalam Lampiran 1.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024

**Keterbatasan inheren**

Keterbatasan inheren timbul pada seluruh perikatan asurans dikarenakan pekerjaan dilakukan berdasarkan pengujian selektif atas informasi yang diperiksa. Oleh karena itu, mungkin saja terdapat kecurangan, kesalahan atau ketidakpatuhan namun tidak dapat terdeteksi. Di samping itu, data bukan keuangan mungkin saja memiliki lebih banyak keterbatasan inheren dibandingkan dengan data keuangan, mengingat sifat dan metode yang digunakan untuk menentukan, menghitung dan memperoleh sampel atau mengestimasi data bukan keuangan tersebut.

Kami yakin bahwa bukti yang kami peroleh telah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

**Tujuan serta pembatasan distribusi dan penggunaan**

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menarik perhatian pada fakta bahwa Informasi-Informasi Tertentu di dalam Laporan Capaian Kinerja disusun untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dengan menggunakan Kriteria Pelaporan yang dirancang untuk tujuan laporan ini. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan semata-mata untuk Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk disebarluaskan atau dipergunakan oleh pihak lain manapun selain Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perusahaan. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul sebagai akibat penggunaan laporan ini oleh pihak lain untuk tujuan atau kegunaan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Capaian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Tanggung jawab ini termasuk di dalamnya adalah merencanakan, melaksanakan dan memelihara pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan Informasi-Informasi Tertentu, pada Laporan Capaian Kinerja, yang bebas dari kesalahan penyajian material baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Manajemen bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran dan pelaporan atas Informasi-Informasi Tertentu berdasarkan Kriteria Pelaporan.

**Independensi praktisi dan pengendalian mutu**

Kami telah mematuhi ketentuan independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang berlandaskan prinsip dasar yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Kantor Akuntan Publik menerapkan Standar Manajemen Mutu 1 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang mengharuskan Kantor Akuntan Publik untuk merancang, mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem manajemen mutu termasuk kebijakan atau prosedur mengenai kepatuhan terhadap ketentuan etika, standar profesional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tanggung jawab praktisi**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas Informasi-Informasi Tertentu dalam Laporan Capaian Kinerja berdasarkan bukti yang telah kami peroleh. Kami melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai sesuai dengan Standar Perikatan Asurans 3000 – Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu Atas Informasi Keuangan Historis ("Standar") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan ini untuk memperoleh keyakinan memadai atas Informasi-Informasi Tertentu dalam Laporan Capaian Kinerja.

Berdasarkan Standar, suatu perikatan yang memberikan keyakinan memadai melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti apakah Informasi-Informasi Tertentu telah disusun sesuai dengan Kriteria Pelaporan. Prosedur yang dipilih adalah berdasarkan pertimbangan praktisi, dengan mempertimbangkan sifat, saat dan luas, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material atas Informasi-Informasi Tertentu dalam Laporan Capaian Kinerja, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal Perusahaan yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Informasi-Informasi Tertentu dalam Laporan Capaian Kinerja untuk merancang prosedur asurans yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan. Prosedur yang kami lakukan merupakan kombinasi dari permintaan keterangan, observasi, inspeksi dan pelaksanaan kembali, termasuk:

- Memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan cara perhitungan di dalam Manual IKU.
- Membandingkan antara Laporan Capaian Kinerja yang disusun oleh Perusahaan dengan Kontrak Kinerja yang telah disetujui.
- Mengumpulkan keterangan dari personel Perusahaan yang relevan berkaitan dengan penyiapan dan perhitungan Laporan Capaian Kinerja.
- Mengevaluasi Realisasi dengan melakukan reviu sampel-sampel atas informasi yang relevan dan dokumentasi pendukung atas asersi-asersi yang dibuat untuk Informasi-Informasi Tertentu.
- Melakukan perhitungan kembali atas Capaian IKU dan Nilai Kinerja.

pwc

**Kesimpulan atas keyakinan memadai**

Menurut opini kami, Informasi-Informasi Tertentu yang disajikan dalam Laporan Capaian Kinerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 terlampir telah disusun secara memadai, dalam semua hal yang material, berdasarkan Kriteria Pelaporan.

Jakarta,
2 Maret 2026

**Jimmy Pangestu, S.E., CPA**
Izin Akuntan Publik No. AP.1124

## Lampiran 1

**Manual Indikator Kinerja Utama ("Manual IKU") yang telah disetujui pada tanggal 16 Desember 2024 pada Kontrak Kinerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2025**

**F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/*shareholder value***

F1.1 *Margin* laba bersih

**Definisi:** Rasio yang menunjukkan optimalisasi tingkat pengembalian kepada pemegang saham melalui tingkat *margin* laba usaha dibandingkan pendapatan usaha.

**Formula:** Laba Bersih / Pendapatan Usaha.

**Keterangan:** Jumlah laba bersih - setelah pajak dan pendapatan usaha didasarkan pada laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**F2** Penjaminan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

F2.1 Progres penyelesaian 3 (tiga) proyek *scale* Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ("KPBU")

**Definisi:** Pelaksanaan mandat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PT PII") dalam menyediakan penjaminan infrastruktur, sehubungan dengan *small scale* KPBU sesuai dengan mandat yang diberikan.

**Formula:** Progress penyelesaian 3 (tiga) proyek *small scale* KPBU dengan rincian target 3 (tiga) proyek usulan penjaminan (bobot 15%), 3 (tiga) proyek IPA (bobot 15%) dan 3 (tiga) proyek *signing* (bobot 70%).

**Keterangan:** *Small scale* KPBU adalah proyek dengan nilai investasi di bawah Rp300 Miliar.

F2.2 Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan

**Definisi:** Peningkatan akumulasi nilai investasi dan/atau jumlah modal kerja yang dijamin PT PII sepanjang tahun 2025.

**Formula:** Realisasi nilai investasi *pipeline* 2025 sebesar Rp67 Triliun.

F2.3 Jumlah penjaminan proyek yang mendukung energi terbarukan

**Definisi:** Pelaksanaan mandat PT PII dalam menyediakan penjaminan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan.

**Formula:** Jumlah proyek *signing* yang mendukung energi terbarukan.

F2.4 Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close*

**Definisi:** Mendukung serta mendorong proyek-proyek KPBU yang telah dijamin agar dapat mencapai tahap *financial close*.

**Formula:** (Proyek-proyek KPBU yang sudah mencapai tahap *financial close* s.d akhir tahun 2025 dibandingkan dengan total keseluruhan proyek-proyek KPBU yang telah dijamin PT PII s.d akhir tahun 2025) x 100%.

F2.5 Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal*

**Definisi:** Dalam penyediaan penjaminan, proses *appraisal* baik yang dilakukan sehubungan dengan proses internal dalam pengambilan keputusan penjaminan maupun sebagai dukungan bagi pemangku kepentingan lainnya ataupun pemberi penugasan. Masing-masing proses tersebut terdapat kajian-kajian ataupun hasil penilaian yang dijadikan suatu acuan hasil.

**Formula:** Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal* dalam tahun 2025

**F3 Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif**

F3.1 Penyelesaian Hasil Keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif

**Definisi**: Dukungan penyiapan proyek dalam membantu pemilik proyek menyiapkan proyek KPBU serta pendampingan transaksi yang efektif.

**Formula:**

| | |
|---|---|
| Hasil Keluaran telah mendapatkan persetujuan PJPK | Pencapaian 120% |
| Hasil Keluaran telah mendapatkan persetujuan Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (“PDPPI”) | Pencapaian 110% |

| | |
|---|---|
| Hasil Keluaran telah di*review* oleh PT PII dan disampaikan kepada PDPPI | Pencapaian 100% |
| Hasil Keluaran telah disampaikan Konsultan kepada PT PII untuk di*review* | Pencapaian 90% |

**Keterangan**:
Hasil Keluaran yang diperhitungkan adalah Hasil Keluaran terakhir atas Penugasan Proyek eksisting yang telah selesai dikerjakan oleh PT PII. Pencapaian dihitung secara rata-rata dari setiap Proyek yang ditugaskan oleh PDPPI.

**C1 Pemahaman *Stakeholders* yang efektif**

C1.1 Pencapaian tingkat pemahaman Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") dan *stakeholders* lainnya yang baik

**Definisi**: Peningkatan pemahaman PJPK atas bisnis dan proses penjaminan dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh pihak independen. Adapun *survey* tersebut menggunakan Indeks yang mencerminkan tingkat pemahaman PJPK serta pemangku kepentingan.

**Formula**:
Indeks Tingkat Pemahaman PJPK yang diukur melalui *survey* oleh Penilai Independen. Perhitungan IKU ini dilakukan oleh *survey* yang dilakukan pihak independen. Tingkat indeksnya meliputi:

| |
|---|
| 0 ≤ x ≤ 1 = Tidak Paham |
| 1 < x ≤ 2 = Kurang Paham |
| 2 < x ≤ 3 = Cukup Paham |
| 3 < x ≤ 4 = Paham |
| 4 < x ≤ 5 = Sangat Paham |

**Keterangan:** Pihak independen yang melaksanakan survei adalah *Business Research and Indonesia Economic Forecasting* ("BRIEF"). Laporan *Assessment* Pengetahuan dan Persepsi *Stakeholder* PT PII telah dikeluarkan oleh BRIEF pada bulan November 2025.

**C2 Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi**

C2.1 *Rating* Perusahaan *Sovereign*

**Definisi**: Pencapaian *Rating* Perusahaan Sama dengan *Rating* Pemerintah yang dilakukan oleh lembaga *rating* bertaraf internasional.

**Formula**:
*Rating* Perusahaan = *Rating* Pemerintah.
*Rating toxonomy*: AAA, AA, A, BBB, BB, B.

**Keterangan**: Peringkat Perusahaan didasarkan pada hasil penilaian *Fitch Ratings* per 19 November 2025.

C2.2 *Rating* ESG

**Definisi**: Pencapaian *Rating* ESG.

**Formula**: Skor Tingkat *Rating* ESG.

**Keterangan**: Peringkat Perusahaan didasarkan pada hasil penilaian Fitch Rating per 30 Juni 2025.

**C3 Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan IIGF Institute**

C3.1 Dukungan IIGF-I terhadap pemetaan *creative financing* daerah dalam bentuk *platform digital*

**Definisi**: *Mapping* terhadap kapasitas keuangan, kesenjangan infrastruktur dan dukungan politik di pemerintah daerah untuk mendapatkan standarisasi data sebagai basis dalam pengambilan keputusan strategis mengenai proyek infrastruktur dan skema KPBU.

**Formula**: 50% (Penyelesaian *Platform* tepat waktu) + 50% (Pemetaan data kabupaten/kota ke dalam *platform* digital).

**Keterangan:**
Target Penyelesaian Platform: 30 Juni 2025
Jumlah data kabupaten/ kota dalam platform: 130 kabupaten/kota

**C4 Optimalisasi Sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan**

C4.1 Kegiatan *Joint Program* yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan

**Definisi:** Kerja sama antara BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan, dalam hal pelaksanaan penjaminan, penugasan, riset, penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility*, dll.

**Formula:** Jumlah Joint Program/proyek (1 CSR dan 1 Non-CSR) yang dikerjakan Bersama dengan BUMN / Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan.

**P1 *Enterprise Risk Management* yang kuat**

P1.1 Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi

**Definisi**: Pengukuran dan Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Korporasi.

**Formula**: Skor Tingkat Kematangan yang dilakukan eskternal lebih tinggi atau sama dengan target.

**Keterangan:** Penilaian Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi yang dilakukan oleh PT Jagad Prima Mandiri (RWI Consulting) berdasarkan sertifikat *Risk Maturity Assessment* dengan nomor LF/PR/F.JPM.100/63/2025 pada tanggal 8 Desember 2025.

**P2 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

P2.1 Tata kelola perusahaan yang baik (*GCG score*)

**Definisi**: Pelaksanaan tata kelola yang terjaga baik.

**Formula**: Realisasi = Skor *GCG* PT PII tahun 2025
Indeks *Scoring GCG*: Realisasi skor *GCG* berdasarkan hasil penilaian / target skor GCG.

**Keterangan**: Penilaian implementasi *GCG* dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”), berdasarkan Berita Acara PE.05.02/ST-5/D503/1/2026 Pembahasan Hasil Asesmen Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2025 pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada tanggal 25 Februari 2026.

**P3 Pengelolaan Risiko Penjaminan yang Efektif**

P3.1 Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek

**Definisi**: Dalam pemantauan jalannya Proyek, diperlukan suatu analisa atas indikator yang mempengaruhi risiko-risiko yang telah dijamin oleh PT PII. KRI merupakan salah satu bagian yang dapat menurunkan tingkat risiko klaim. Pemantauan aktif dilakukan guna mengkategorikan status risiko proyek dan melakukan upaya yang cukup untuk menurunkan risiko klaim.

**Formula**: (Eksposur yang tidak memiliki potensi klaim dibagi nilai eksposur proyek yang dijamin secara keseluruhan) x 100%.

## L1 Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas

L1.1 Pencapaian indeks *engagement* karyawan yang optimal

**Definisi**: *Employee engagement* atau keterikatan karyawan adalah suatu kondisi, sikap atau perilaku positif seorang karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan perasaan semangat (*vigor*), dedikasi (*dedication*) dan keasyikan (*absorption*) untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan organisasi.

Seorang karyawan yang memiliki tingkat keterikatan (*engagement*) yang tinggi pada organisasi memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan operasional organisasi, antusias dalam bekerja, mampu bekerja sama dengan karyawan lain, berbicara positif mengenai organisasi dan berbuat melebihi harapan organisasi.

Peningkatan tingkat *engagement* karyawan terhadap Perusahaan yang diukur melalui survei oleh lembaga independen (*score engagement* karyawan). Dengan *cluster score* sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| 1 | >75% *favourable - clear strength* |
| 2 | 65% - 75% *favourable - moderate strength* |
| 3 | <65% or >20% *unfavourable - warning sign* |
| 4 | <50% *favourable or* > 30% *unfavorable - red flag* |

**Formula**: Hasil *survey* lembaga independen untuk *score engagement* karyawan.

**Keterangan**: Pihak independen yang melakukan survei adalah *Mercer*, perusahaan pengembangan sumber daya manusia yang independen yang menerbitkan laporan survei untuk tahun 2024 dan 2025, dengan hasil tahun 2025 yang dipresentasikan pada tanggal 6 Februari 2026.

L1.2 Peningkatan jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P

**Definisi**: Pencapaian Sertifikasi CP3P level dasar (*foundation*) dan level lanjutan (*execution*) untuk seluruh karyawan PT PII.

**Formula**: 50% Peningkatan 20% Jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P level dasar (foundation) pada akhir tahun 2025 + 50% Peningkatan 20% Jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P level lanjutan (execution) pada akhir tahun 2025.

**Lampiran 2**

## Realisasi, Capaian IKU dan Nilai Kinerja

## 31 Desember 2025

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | | Bobot Perspektif | Satuan | Target | Realisasi | Capaian IKU | Nilai Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 = (4x8) |
| F1 | Optimalisasi nilai pemegang saham/ shareholder value | 1 | Margin laba bersih | 8% | Persentase | 64,85% | 60,60% | 93,47% | 7,48% |
| F2 | Penjaminan yang berkelanjutan | 1 | Progres penyelesaian 3 (tiga) proyek *small scale* KPBU | 5% | Jumlah | 3 | 0 | 10,00% | 0,50% |
| | | 2 | Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan | 5% | Nilai | 67 | 154 | 120,00% | 6,00% |
| | | 3 | Jumlah penjaminan proyek yang mendukung energi terbarukan | 5% | Jumlah | 1 | 4 | 120,00% | 6,00% |
| | | 4 | Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close* | 7% | Persentase | 75,00% | 81,00% | 108,11% | 7,57% |
| | | 5 | Jumlah proyek yang diselesaikan appraisal | 5% | Memo Evaluasi | 6 | 9 | 120,00% | 6,00% |
| F3 | Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif | 1 | Penyelesaian Hasil Keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif | 5% | Persentase | 100,00% | 101,00% | 100,71% | 5,04% |
| C1 | Pemahaman Stakeholders yang efektif | 1 | Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan stakeholders lainnya yang baik | 5% | Indeks | 4 | 4,10 | 101,50% | 5,08% |
| C2 | Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi | 1 | Rating Perusahaan *Sovereign* | 5% | Rating | Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia | Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia | 100,00% | 5,00% |
| | | 2 | Rating ESG | 5% | Rating | Medium/ Moderate Risk*) | Medium/ Moderate Risk*) | 100,00% | 5,00% |
| C3 | Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaaan IIGF Institute | 1 | Dukungan IIGF-I terhadap pemetaan *creative financing* daerah dalam bentuk platform digital | 5% | Persentase | 100,00% | 120,00% | 120,00% | 6,00% |
| C4 | Optimalisasi sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan | 1 | Kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan | 5% | Proyek/ Program | 2 | 6 | 120,00% | 6,00% |
| P1 | Enterprise Risk Management yang kuat | 1 | Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi | 7% | Nilai | 3,25 | 4,08 | 120,00% | 8,40% |
| P2 | Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik | 1 | Tata kelola perusahaan yang baik (*GCG score*) | 7% | GCG Score | 89 | 91,02 | 102,27% | 7,16% |
| P3 | Pengelolaan Risiko Penjaminan yang Efektif | 1 | Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek | 6% | Persentase | 96,50% | 98,80% | 102,37% | 6,14% |
| L1 | Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas | 1 | Pencapaian Indeks Engagement karyawan yang optimal | 7% | Score Engagement (absolut) | 74,00% | 64,00% | 86,49% | 6,05% |
| | | 2 | Peningkatan jumlah karyawan yang memiliki sertifikasi CP3P | 8% | Persentase | 100,00% | 120,00% | 120,00% | 9,60% |
| | | | | **100,00%** | | | | | **103,02%** |

PT PII

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia**

Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1
Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550
+62 21 5795 0040
info@iigf.co.id

# 2025 Annual Report
# Laporan Tahunan